OTORITAS JASA KEUANGAN

Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Strengthening the Financial Services Sector to Maintain Economic Growth

2023

Laporan Kinerja OJK Tahun 2023
OJK Perfomance Report 2023

Makna Desain *Cover*
Cover Explanation

Makna Desain
Meaning of Design

Irisan geometri pada desain memberikan kesan seperti jendela yang memperlihatkan perspektif pada berbagai sektor jasa keuangan dan aktivitas korporat lainnya.

Selain memberikan kesan modern, desain turut memadukan unsur tradisional melalui motif kain songket yang dipercaya membawa harapan, keinginan, dan doa baik bagi pemakainya, serta melambangkan permohonan berkah dan kemudahan.

The geometric intersections in the design create an impression of windows that provide perspectives on various financial services sectors and other corporate activities.

In addition to giving a modern impression, the design also incorporates traditional elements through the songket fabric motifs, which are believed to bring hope, desire, and good prayers for the wearer, as well as symbolizing requests for blessings and ease.

Makna *Pattern*
Meaning of Pattern

Pola irisan geometris "jendela" memperlihatkan berbagai aspek sektor jasa keuangan, dipadukan dengan motif Songket Saik Kalamai untuk keseimbangan antara konsep modern dan tradisional yang mewakili budaya Indonesia.

The geometric slice pattern "windows" showcase various aspects of the financial services sector, combined with the Songket Saik Kalamai motif for a balance between modern and traditional concepts that represent Indonesian culture.

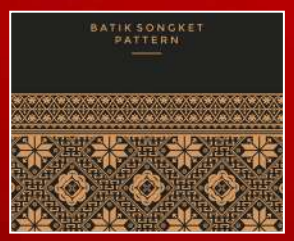

Kain Batik Songket
Songket Batik Cloth

Motif Saik Kalamai menggambarkan kehidupan terencana dan persatuan yang kuat, menggambarkan peran OJK dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional.

The Saik Kalamai motif depicts well-planned lives and strong unity, symbolizing the role of the Financial Services Authority (OJK) in maintaining the resilience of the national economy.

Penjelasan Tema Desain
Design Theme Explanation

Penguatan Sektor Jasa Keuangan
Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Strengthening the Financial Services Sector to Maintain Economic Growth

Desain pada Laporan Kinerja OJK Tahun 2023 memadukan gaya modern dengan unsur kebudayaan Sumatra, yakni motif kain Songket. Kain Songket secara tradisional melambangkan harapan yang baik bagi pemakainya, dan penggunaannya dalam upacara adat melambangkan permohonan berkah dan kemudahan.

The design of the OJK's 2023 Performance Report combines a modern style with elements of Sumatran culture,specifically the Songket fabric motif. Traditionally, Songket fabric symbolizes good luck, and its use in traditional ceremonies represents a request for blessings and ease. By incorporating the Songket motif into the cover design, the OJK hopes that the financial services sector can serve as a medium to achieve stability and economic growth that is both inclusive and sustainable.

Desain pada sampul Laporan Kinerja OJK Tahun 2023 menampilkan visual yang memadukan modernitas dan tradisi yang direpresentasikan oleh motif kain Songket, yakni Songket Saik Kalamai. Motif yang disatukan dengan konsep modern, merupakan ilustrasi dari harmoni sektor keuangan yang secara bersama-sama untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia.

The design on the cover of the OJK Performance Report 2023 features visuals that combine modernity and tradition, represented by the Songket fabric motif, namely Songket Saik Kalamai. This motif is, combined with a modern concept, is an illustration of the harmony of the financial sector which works together to advance the economy of Indonesian society.

Motif Saik Kalamai yang menghiasi latar halaman isi Laporan Kinerja ini memiliki makna tersendiri, terutama bentuk yang saling menyambung melambangkan kehidupan yang terencana dengan baik, serta persatuan yang terjalin dengan kuat. Motif ini merepresentasikan OJK sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar dapat berkontribusi optimal untuk pertumbuhan perekonomian nasional.

The Saik Kalamai motif adorning the background of the pages of this Performane Report holds its own significance, especially with its interconnected shapes symbolizing well-planned lives and strong unity. This motif represents the Financial Services Authority (OJK) as a state institution playing a crucial role in maintaining the resilience of financial services sector in order to contribute optimally to national economic growth.

Daftar Isi
Table of Content

Penjelasan Tema Desain
Design Theme Explanation 3

Daftar Isi
Table of Content 4

Sambutan Ketua Dewan Komisaris
Foreword by the Chairman of the Board of Commissioners 7

Tentang OJK
OJK at a Glance — I

Visi dan Misi
Vision and Mission 18

Nilai-Nilai Strategis dan Perilaku Kunci
Strategic Values and Key Behaviors 19

Logo OJK
OJK's Logo 21

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK
Oath of Office and Inauguration of OJK Board of Commissioners 22

Profil Dewan Komisioner
Board of Commissioners 24

Deputi Komisioner
Deputy Commissioners 38

Struktur Organisasi dan Komite
Organisational Structure and Committees 42

Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK
OJK Regional Offices and Branch Offices 44

Peristiwa Penting 2023
Event Highlights in 2023 46

Penghargaan
Awards 52

Arah Strategis OJK 2023
OJK's 2023 Strategic Direction — II

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025
Indonesia Financial Services Sector Master Plan for 2021-2025 56

Destination Statement OJK 2022-2027
OJK Destination Statements 2022-2027 58

Tinjauan Industri Sektor Keuangan
Financial Services Sector Overview — III

Perkembangan Perekonomian Dunia 2023
Global Economic Developments 2023 62

Perkembangan Perekonomian Indonesia 2023
Domestic Economic Developments 2023 65

Stabilitas Sistem Keuangan
Financial System Stability 67

Perkembangan Industri Perbankan
Banking Industry Development 68

Perkembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Capital Market Industry, Financial Derivatives and Carbon Exchange Development 79

Perkembangan Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Insurance, Guarantee and Pension Fund (IGPF) Development 91

Perkembangan Industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya
Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions Development 95

Perkembangan Industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Financial Sector Technology Innovation Industry, Digital Financial Assets and Crypto Development 112

Fokus Pelaksanaan Tugas OJK 2023
Focus of OJK Task Implementation in 2023 — IV

Kebijakan Strategis
Strategic Policies 118

Pengawasan Perbankan
Supervision of Banking 135

Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Supervision of the Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange 149

Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Supervision of Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds 185

Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Supervision of Financing Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions 195

Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets 210

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Komunikasi
Supervision of Financial Service Provider (FSP) Conduct of as well as Consumer Education and Protection and Communication 217

Pelaksanaan Tata Kelola
Governance
V

Dewan Audit
Audit Board 264

Audit Internal
Internal Audit 264

Pengelolaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Risk Management and Quality Control 266

Program Penguatan Integritas
Strengthening Integrity 270

Penguatan Manajemen Strategis
Strengthening Strategic Management
VI

Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
Strategic, Budget and Performance Management 276

Program Transformasi OJK
OJK Transformation Program 279

Hubungan Kelembagaan dan Kerja Sama Domestik
Institutional Relations and Domestic Cooperation 285

Hukum & Penyidikan
Law and Investigations 287

Organisasi dan SDM
Organisation and Human Resources (HR) 292

Pengembangan SDM & Penguatan Riset SJK
HR Development and Strengthening Research in Financial Services Sector 299

Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna, dan Terintegrasi
Development of Innovative, Expeditious and Integrated Information Systems 304

Logistik
Logistics 309

Outlook dan Arah Strategis 2024
Outlook and Strategic Direction 2024
VII

Outlook Perekonomian Domestik & Sektor Jasa Keuangan 2024
Outlook for the Domestic Economy and Financial Services Sector in 2024 315

Peta Strategi 2024
Strategy Map 2024 316

Program Transformasi OJK 2024
OJK Transformation Program 2024 317

Laporan Keuangan OJK 2023
OJK Financial Statement 2023
VIII

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), telah ditindaklanjuti dengan penyusunan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan lainnya. OJK menerbitkan beberapa peta jalan (*Roadmap*) untuk terus menyempurnakan ekosistem sektor jasa keuangan. OJK juga melakukan transformasi organisasi guna mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien, serta terus mengedepankan penerapan tata kelola yang baik.

OJK followed up the promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act) by preparing several Financial Services Authority Regulations (POJK) and other legislation. OJK has issued several roadmaps to continue improving the financial services sector ecosystem. OJK also pursued organisational transformation towards effective and efficient management, while prioritising the application of good governance.

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioner

Sambutan Ketua Dewan Komisioner
Foreword by the Chairman of the Board of Commissioners

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Perkenankan kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 dengan baik. Selama periode tersebut, OJK memastikan terlaksananya penerbitan pengaturan dalam menindaklanjuti amanat Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pengawasan yang efektif terhadap industri jasa keuangan dan senantiasa memberikan perlindungan yang diperlukan bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.

Perekonomian global mengalami moderasi dengan divergensi ekonomi yang terjadi di beberapa negara utama. Mayoritas bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga mendorong pengetatan likuiditas global. Pasar keuangan juga cenderung mengalami volatilitas, meskipun dengan magnitudo yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk dipicu oleh konflik Israel dan Palestina.

Sementara itu, kinerja perekonomian nasional terjaga dengan baik dengan pertumbuhan yang dapat dipertahankan di kisaran 5%. Sektor jasa keuangan tumbuh positif tercermin dari pertumbuhan kredit (10,38% *yoy*) dan piutang pembiayaan (13,23% *yoy*). Pertumbuhan ini didukung oleh struktur permodalan yang kuat tercermin dari CAR perbankan sebesar 27,65%. Profil risiko juga terjaga tercermin dari *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan sebesar 2,26 kali serta RBC Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum dan reasuransi masing-masing sebesar 457,98% dan 363,1%. Pada industri Pasar Modal, IHSG menguat 6,16% *yoy* dengan jumlah investor tumbuh 18,04% mencapai 12,17 juta serta didukung penghimpunan dana di pasar modal yang mencapai Rp255,39 triliun dan jumlah Emiten baru yang Pernyataan Pendaftarannya telah dinyatakan Efektif oleh OJK sebanyak 83 yang terdiri dari 78 Emiten Baru Saham dan lima Emiten Baru Penerbit Efek Bersifat Utang/Sukuk. Ke depan, kondisi sektor jasa keuangan ini perlu dijaga agar tetap resilien sehingga dapat bertumbuh di tengah ketidakpastian dan risiko ekonomi global saat ini.

Dear esteemed stakeholders,

Allow us to express our full praise and gratitude to God Almighty, as it is only through His blessings and mercy that the Financial Services Authority (OJK) could execute its duties and functions adeptly throughout 2023. During this period, OJK steadfastly promulgated regulations to follow up the mandate stipulated in accordance with the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act), while maintaining effective supervision of the financial services industry and constantly offering the protections necessary for consumers and the broader public. This was possible given the unwavering support from various parties, coupled with strong synergy.

The world economy experienced moderation in 2023, accompanied by economic divergence across several major global players. Most central banks maintained higher-for-longer interest rate environments, which tightened liquidity globally. Furthermore, financial markets succumbed to uncertainty and volatility, albeit at a lower magnitude than in the previous year, in part triggered by the conflict between Israel and Palestine.

At home, national economic performance was maintained, with growth held at around 5%. The financial services sector expanded, as reflected in credit growth (10.38% yoy) and financing receivables (13.23% yoy). Growth was supported by a solid capital structure, as indicated by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) recorded in the banking industry of 27.65%. The risk profile also remained manageable, with a gearing ratio at finance companies of 2.26x and risk-based capital (RBC) in the life insurance and general insurance as well as the reinsurance industries of 457.98% and 363.1%, respectively. In terms of the capital market, the Jakarta Composite Index (JCI) rallied 6.16% yoy in the reporting period, with the investor base expanding 18.04% to reach 12.17 million, underpinned by fundraising totalling IDR255.39 trillion and the number of new issuers with effective registration statements approved by OJK totalled 83, consisting of 78 new issuers of shares and five new issuers of debt securities/sukuk. Moving forward, the promising state of the financial services sector must be maintained to ensure resilience and preserve growth against a backdrop of global economic uncertainty and risk.

Penerbitan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), telah ditindaklanjuti dengan penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta ketentuan lainnya. Sepanjang 2023, OJK telah menerbitkan 30 POJK di mana di antaranya adalah penerbitan POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana amanat UU PPSK. Selain itu, OJK juga melakukan transformasi kelembagaan dengan penambahan dua Kepala Eksekutif baru yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto termasuk struktur organisasi yang pendukung sebagai komitmen OJK dalam implementasi UU PPSK.

OJK followed up the promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act) by preparing various implementation regulations in the form of Government Regulations (PP), OJK Regulations (POJK) and other legislation. In 2023, OJK issued 30 POJK, including POJK Number 28 of 2023 on Determining the Status and Follow-Up Supervision of Rural Banks and Islamic Rural Banks as well as POJK Number 5 of 2023, as the second amendment to OJK Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance Companies and Reinsurance Companies as mandated by the PPSK Act. In addition, OJK also implemented institutional transformation by appointing two new Chief Executive positions, namely the Executive Head of Supervision of Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions as well as the Executive Head of Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets, which includes a supporting organisational structure as a form of OJK commitment to PPSK Act implementation.

OJK menerbitkan beberapa peta jalan (*Roadmap*) untuk terus menyempurnakan ekosistem sektor jasa Keuangan antara lain *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian 2023-2027, Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 2023-2027, serta *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

OJK also issued several roadmaps to continue improving the financial services sector ecosystem, including the Indonesia Capital Market Roadmap 2023-2027, Roadmap for the Development and Strengthening of FinTech P2P Lending 2023-2028, Roadmap for the Development and Strengthening of the Insurance Industry 2023-2027, Roadmap for Financial Services Provider Conduct Supervision, Education and Consumer Protection 2023-2027, as well as the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) 2023-2027.

Pada Sidang Pleno Financial Action Task Force (FATF) di Prancis tahun 2023, Indonesia secara resmi menjadi Anggota Penuh FATF ke-40. Hal ini menegaskan pengakuan dunia terhadap tata kelola manajemen, pengawasan, dan penindakan pencucian uang yang terkait narkoba, pendanaan terorisme, dan senjata pemusnah massal di Indonesia telah memenuhi standar internasional. OJK juga senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong implementasi keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta penyelenggaraan *pilot project* implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada industri perbankan.

At the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) plenary session held in France in 2023, Indonesia officially became the 40th full member of FATF. This reinforced global recognition that the management, supervision and prosecution of money laundering relating to narcotics, terrorism financing and weapons of mass destruction in Indonesia is in accordance with international standards. Furthermore, OJK continued its full support of government policies to nurture the advancement of sustainable finance by issuing the Indonesia Taxonomy for Sustainable Finance (TBKI), while also implementing pilot projects concerning the introduction of the Indonesia Green Taxonomy (THI) in the banking industry.

Sepanjang 2023, OJK menyelenggarakan 3.104 program edukasi yang menjangkau 2.571.108 peserta yang menyasar perempuan, UMKM, pelajar/mahasiswa, guru, termasuk masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). OJK juga mendorong berbagai macam program untuk mendukung inklusi keuangan, antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program penyaluran kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dengan penyusunan *Generic Model* (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah pedesaan, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta pelaksanaan *capacity building* dan sertifikasi anggota TPAKD. Dalam rangka mewujudkan pelindungan konsumen, OJK melaksanakan pemeriksaan tematik dengan tema Penyusunan Perjanjian Baku dan Dokumen Transaksi Keuangan pada Lembaga Pembiayaan, serta melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka menindaklanjuti pengaduan konsumen dan perilaku PUJK yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan konsumen.

In 2023, OJK implemented 3,104 educational programs targeting women, MSMEs, students, teachers and communities in disadvantaged, frontier and outermost (3T) regions, which reached 2,571,108 participants. OJK also promoted various programs to support financial inclusion, including the One Student One Account (KEJAR) program, the lending/financing against loansharking program (K/PMR), formulating a generic model (GM) for the inclusive finance ecosystem (EKI) in rural areas, as well as establishing Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) together with capacity building and certification for members. Seeking to strengthen consumer protection, OJK conducted thematic inspections regarding the preparation of standardised agreements and financial transaction documents at financing institutions, while performing bespoke inspections in response to consumer complaints and FSP conduct in violation of prevailing regulations to the potential detriment of consumers.

OJK melakukan transformasi organisasi guna mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien serta terus mengedepankan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui berbagai upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Penguatan sumber daya manusia juga secara berkelanjutan dilakukan melalui program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai OJK secara kolaboratif. Seluruh aktivitas dan tugas OJK tersebut juga didukung oleh penguatan sistem informasi digital yang semakin terkini dan terintegrasi.

OJK also pursued organisational transformation towards effective and efficient management, while prioritising the application of good governance through various endeavours, including preventative and enforcement measures. OJK continued strengthening human resources through collaborative training programs to increase the capacity and competency of OJK staff. Such activities were supported by sophisticated and integrated digital information systems.

Laporan Kinerja OJK Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan ringkasan yang komprehensif atas ruang lingkup kegiatan OJK dan interaksi OJK dengan semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan masukan untuk memastikan fungsi pengawasan kami efektif dan sejalan dengan perkembangan terkini. Dengan demikian, kami dapat menyesuaikan kebijakan kami untuk mendukung perekonomian nasional dan penguatan sektor jasa Keuangan. Laporan Kinerja ini juga memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2023.

The OJK Performance Report aims to provide a comprehensive summary regarding the purview of OJK activities as well as OJK interaction with all stakeholders. We hope to receive valuable feedback and input to help maintain an effective supervisory function in line with the latest developments. To that end, we can adjust our policies to support the national economy and strengthen the financial services sector. The Performance Report also contains the Financial Statements as well as the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) concerning the OJK Financial Statements 2023.

Akhir kata, atas nama Dewan Komisioner kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai OJK yang telah memberikan dedikasi tinggi dan kinerja terbaiknya serta kepada Industri jasa Keuangan dan Kementerian/ Lembaga terkait atas kontribusi, sinergi, dan optimisme yang telah dibangun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama tahun 2023. Kiranya Laporan Kinerja OJK Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK selama 2023 serta dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, we express our upmost appreciation to all OJK employees for their unswerving dedication and performance excellence as well as to the financial services industry and relevant government ministries/agencies for their contribution, synergy and optimism regarding the execution of OJK's duties and functions in 2023. The OJK Performance Report 2023 serves as a comprehensive reference for all stakeholders concerning the implementation of all OJK functions and duties in 2023.

Jakarta, Juli 2024
Jakarta, July 2024

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners
The Financial Service Authority

Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja OJK Tahun 2023

Executive Summary OJK Performane Report 2023

Tahun 2023 menandai periode moderasi dalam perekonomian global, dengan divergensi ekonomi yang nyata di beberapa negara utama. Di Amerika Serikat, normalisasi ekonomi terlihat dari data pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5% *yoy*, meningkat dari 1,9% *yoy*. Di sisi lain, kawasan Eropa mengalami tekanan stagflasi dengan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,4% *yoy*, jauh lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,4% *yoy*. Sementara itu, ekonomi Tiongkok tumbuh cukup baik sebesar 5,2%, melebihi target resmi 5,0% dan meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3%.

The past year of 2023 was characterised by global economic moderation and tangible economic divergence among several major global players. In the United States, economic normalisation was reflected in economic growth data of 2.5% yoy, up from 1.9% yoy. In contrast, Europe experienced stagflation pressures, with economic growth significantly lower at just 0.4% yoy compared with 3.4% yoy in the previous year. Meanwhile, economic growth in China exceeded the official 5.0% target to reach 5.2%, accelerating from 3% in the previous year.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global telah menyebabkan penurunan inflasi *headline* secara signifikan. Inflasi di AS turun menjadi 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya 6,4%, serupa dengan inflasi di Eropa yang turun menjadi 3,4% dari 10,4% tahun sebelumnya. Meskipun demikian, inflasi inti masih terpantau tinggi, di atas target yang ditetapkan oleh bank sentral akibat kenaikan harga energi dan pangan, serta gangguan rantai pasokan di penghujung 2023.

Global economic moderation contributed to a significant decline in headline inflation. US inflation fell to 3.3% in the reporting period from 6.4% in the previous year, with inflation in Europe retreating to 3.4% from 10.4%. Conversely, core inflation remained high and above the corresponding targets set by central banks due to rising food and energy prices as well as supply chain disruptions towards the end of 2023.

Sebagai respons, mayoritas bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama serta mendorong pengetatan likuiditas global. Hal ini tercermin dari tindakan investor yang menarik investasi dari pasar yang lebih berisiko. Fragmentasi geopolitik yang memicu deglobalisasi juga terus berlanjut, terutama terkait proteksionisme yang diterapkan oleh AS dan penguatan kendali atas teknologi dan data oleh Tiongkok. Sementara itu, pasar keuangan global mengalami volatilitas, meskipun dengan magnitudo yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk dipicu oleh konflik Israel dan Palestina.

In response, most central banks maintained a higher-for-longer interest rate environment, which squeezed liquidity globally. This manifested in the actions of investors by withdrawing from riskier markets. Geopolitical fragmentation continued driving deglobalisation, particularly given the inward-looking policies of the US as well as tighter control over technology and data by China. Meanwhile, global financial markets succumbed to uncertainty and volatility, albeit at a lower magnitude than in the previous year, in part triggered by the conflict between Israel and Palestine.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah kondisi global yang menantang. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 5,05% *yoy*, didorong oleh kenaikan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan belanja investasi pemerintah dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasar saham Indonesia tumbuh positif dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir 2023 ditutup pada level 7.272,80 atau naik sebesar 6,16% *yoy*. Sektor Infrastruktur, Bahan Baku, Keuangan, Barang Konsumen Primer, serta Properti & *Real Estate* menjadi sektor-sektor yang mengalami peningkatan kinerja berdasarkan catatan Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia.

At home, Indonesia's national economy maintained solid growth despite challenging global conditions. GDP growth stood at 5.05% yoy, boosted by consumption by non-profit institutions serving households (NPISH) as well as investment spending by the Government on national strategic projects (PSN), specifically the new Nusantara Capital City (IKN). The stock market in Indonesia rallied, with the Jakarta Composite Index (JCI) closing at the end of 2023 at a level of 7,272.80, up 6.16% yoy. Based on sectoral indices recorded in the Indonesia Stock Exchange (IDX), the performance of the infrastructure sector, raw materials, financial sector, primary consumer goods as well as property and real estate improved.

Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian dan risiko ekonomi global. Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan tercatat solid, ditopang oleh permodalan dan likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan mampu tumbuh 10,38%. Piutang pembiayaan tumbuh tinggi sebesar 13,23% *yoy*, dan *outstanding* pembiayaan *Fintech P2P Lending* mencapai Rp59,64 triliun atau tumbuh 16,67% *yoy*. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi komersial tumbuh 3,02% *yoy*. Aset dana pensiun sukarela tumbuh 6,91% *yoy* dengan nilai aset sebesar Rp368,70 triliun. Di pasar modal, kinerja pasar surat utang secara komposit yang ditunjukkan oleh *Indonesia Composite Bond Index* mengalami peningkatan sebesar 8,65% dibandingkan tahun sebelumnya ke level 374,61.

Against a backdrop of elevated global economic uncertainty and risk, the stability of the financial services sector in Indonesia was maintained. The intermediation function of financial services institutions remained solid, underpinned by adequate capital and ample liquidity as well as a manageable risk profile. Bank lending grew 10.38%, while financing receivables recorded high 13.23% yoy growth and outstanding financing from Fintech P2P Lending reached IDR59.64 trillion, up 16.67% yoy. In the commercial insurance sector, accumulated premium income grew 3.02% yoy. Total assets of the voluntary pension fund industry increased 6.91% yoy with an asset value of IDR368.70 trillion. In the capital market, bond market performance, as denoted by the Indonesia Composite Bond Index, increased 8.65% on the previous year to reach a level of 374.61.

Permodalan sektor jasa keuangan tercatat kuat didukung oleh permodalan perbankan yang solid dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 27,65%. Pada industri perasuransian, *Risk Based Capital* (RBC) baik di asuransi jiwa maupun asuransi umum dan reasuransi tercatat tinggi, masing-masing sebesar 457,98% dan 363,1%, jauh di atas *threshold*. Pada industri pembiayaan, *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan menunjukkan tren positif dan tercatat sebesar 2,26 kali di akhir 2023, jauh di bawah *threshold* 10 kali. Di pasar saham, IHSG akhir tahun mampu menguat 6,16% meski terdapat *outflow* non-residen sebesar Rp6,19 triliun. Jumlah investor per akhir tahun mencapai 12,17 juta atau tumbuh 18,04% dari posisi akhir 2022, didukung dengan penghimpunan dana di pasar modal yang mencapai Rp255,39 triliun dan jumlah Emiten baru yang Pernyataan Pendaftarannya telah dinyatakan Efektif oleh OJK sebanyak 83 yang terdiri dari 78 Emiten Baru Saham dan lima Emiten Baru Penerbit Efek Bersifat Utang/Sukuk.

Capital in the financial services sector remained solid, as indicated by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 27.65%. In terms of the insurance industry, Risk-Based Capital (RBC) in the life insurance and general insurance as well as the reinsurance industries remained well above the respective thresholds at 457.98% and 363.1%. In the financing industry, the gearing ratio of finance companies tracked a positive trend, recorded at 2.26x at the end of 2023, significantly below the 10x threshold. In the stock market, the Jakarta Composite Index (JCI) rallied 6.16% despite a non-resident outflow of IDR6.19 trillion. The investor base increased 18.04% from the position recorded at the end of 2022 to reach 12.17 million, underpinned by fundraising totalling IDR255.39 trillion and the number of new issuers with effective registration statements approved by OJK totalled 83, consisting of 78 new issuers of shares and five new issuers of debt securities/sukuk.

OJK senantiasa mendorong penguatan keuangan berkelanjutan melalui beberapa kebijakan dan program yang diluncurkan, di antaranya penyempurnaan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dengan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), serta penyelenggaraan *pilot project* implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada industri perbankan. Sejak mulai diperdagangkan pada 26 September 2023, terdapat satu Penyelenggara Bursa Karbon yang mendapatkan izin, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon) dan 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar di Bursa Karbon, dengan 10 perusahaan (21,74%) merupakan perusahaan publik.

OJK continued advancing sustainable finance through the policies and programs implemented, which included refining the Indonesia Green Taxonomy (THI), 1.0 edition, by developing the Indonesia Taxonomy for Sustainable Finance (TBKI), while also implementing pilot projects concerning the introduction of the Indonesia Green Taxonomy (THI) in the banking industry. Since trade opened on 26th September 2023, OJK has licensed one Carbon Exchange Operator, namely PT Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon), along with 46 carbon exchange service users listed on the carbon exchange, including 10 public listed companies (21.74%).

OJK turut berkomitmen pada penguatan integritas Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di sektor jasa keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 dalam rangka penguatan pengaturan penerapan program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), sebagaimana ditetapkan pada FATF *Plenary Meeting*. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara OJK bersama dengan PPATK dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait atas komitmen mendorong sektor jasa keuangan untuk secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

OJK remains firmly committed to strengthening the integrity of anti-money laundering, combating the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction in the financial services sector. To that end, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) Number 8 of 2023 to strengthen provisions concerning the AML/CFT/PF program in the financial services sector. Moreover, Indonesia was officially accepted as a full member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) at the FATF plenary meeting held in France. This was inextricably linked to the successful collaboration between OJK, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and all relevant government ministries/agencies in terms of their avowed commitment to ensure the financial services sector comprehensively meets international standards when implementing AML/CFT/PF programs.

OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai komitmen mendukung pengembangan perbankan syariah nasional yang memiliki pilar penguatan karakteristik perbankan syariah dan pilar peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. OJK juga secara resmi meluncurkan *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dalam rangka memberikan pedoman arah pengembangan Pasar Modal Indonesia secara terkoordinasi dan selaras dengan perkembangan sektor keuangan, Dalam upaya mewujudkan industri *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* yang berintegritas dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen, diluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028. Penguatan industri asuransi dilakukan melalui peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian 2023-2027, yang menjadi pedoman OJK, asosiasi, serta industri perasuransian dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan, serta meningkatkan *level of confidence* masyarakat terhadap sektor perasuransian nasional.

OJK launched its Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) 2023-2027 as a form of commitment to support development of the national Islamic banking industry, which contains a pillar on strengthening the characteristics of Islamic banking and a pillar on increasing the national economic contribution of the Islamic banking industry. OJK also officially launched the Indonesia Capital Market Roadmap 2023 2027 to provide guidance regarding the direction of coordinated capital market development in Indonesia in alignment with financial sector development. Seeking to create a FinTech P2P Lending industry with integrity and oriented towards financial inclusion and consumer protection, OJK launched the Roadmap for the Development and Strengthening of FinTech P2P Lending 2023-2028. Furthermore, OJK also strengthened the insurance industry by launching the Roadmap for the Development and Strengthening of the Insurance Industry 2023-2027 as guidance for OJK, industry associations as well as the insurance industry when preparing development and strengthening strategies, while simultaneously boosting the public level of confidence in the national insurance sector.

Peran dan fungsi OJK terhadap pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terus diperkuat dengan peluncuran Peta Jalan Pengawasan PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) 2023-2027. Adanya Peta Jalan diharapkan mampu mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia dan mendukung penguatan pelindungan konsumen melalui pengawasan perilaku PUJK, penyelesaian pengaduan, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

OJK's role and function to supervise financial service provider (FSP) conduct was also strengthened by the launch of the Roadmap for Financial Services Provider Conduct Supervision, Education and Consumer Protection 2023-2027, which is expected to create synergy in collaboration towards achieving the financial inclusion and literacy targets in Indonesia, while strengthening consumer protection through the supervision of FSP conduct, complaint handling and eradication of illegal financial activity.

Selain itu, dalam perkembangan teknologi AI yang semakin canggih, OJK berinisiatif meluncurkan Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya (*Code of Conduct Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence*). Pedoman tersebut dapat menjadi panduan bagi penyelenggara *Fintech* dan pihak terkait untuk memastikan aplikasi berbasis AI yang dimanfaatkan telah memenuhi prinsip-prinsip *beneficial, fair and accountable, transparent dan explicable, robustness* dan *security*.

In addition, in response to the increasingly sophisticated development of AI technology, OJK took the initiative to launch the Code of Conduct for Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence, which provides guidance for the FinTech industry and other relevant parties to ensure the use of AI-based applications fulfils various principles, namely beneficial, fair and accountable, transparent and explicable, robustness and security.

Selama 2023, OJK menerbitkan 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), 25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), serta kebijakan lainnya pada masing-masing sektor jasa keuangan. Pada Bidang Perbankan, OJK menerbitkan lima POJK, lima SEOJK dan 10 Surat KEPP, salah satunya POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, telah diterbitkan 10 POJK dan lima SEOJK, termasuk di dalamnya POJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuatif secara Signifikan, serta POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

In 2023, OJK promulgated 30 Financial Services Authority Regulations (POJK), 25 Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK) as well as other policies covering each of the financial services sectors. In the banking industry, OJK issued five POJK, five SEOJK and 10 KEPP, including POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Service Activities, as well as POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Governance for Commercial Banks. In the Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Sector, OJK issued 10 POJK and five SEOJK, including POJK Number 13 of 2023 concerning Policies to Maintain Capital Market Performance and Stability during Significantly Fluctuating Market Conditions, as well as POJK Number 14 of 2023 concerning Carbon Trading through the Carbon Exchange.

Di Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, OJK menerbitkan 10 POJK dan lima SEOJK, salah satunya POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Sementara itu, pada Bidang Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, telah diterbitkan satu POJK dan empat SEOJK, yaitu POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; serta pada Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen, diterbitkan dua POJK dan satu SEOJK, diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

In the insurance, guarantee and pension fund industry, OJK issued 10 POJK and five SEOJK, including POJK Number 5 of 2023 concerning the Financial Soundness of Insurance Companies and Reinsurance Companies, as well as POJK Number 27 of 2023 concerning the Business Implementation of Pension Funds. Meanwhile, in terms of finance institutions, venture capital firms, microfinance institutions and other financial services institutions, OJK issued one POJK and four SEOJK, including POJK Number 25 of 2023 concerning the Business Implementation of Conventional and Islamic Venture Capital Firms, and SEOJK Number 19/SEOJK.06/2023 concerning FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending. In terms of consumer protection and education, OJK issued two POJK and one SEOJK, namely POJK Number 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, and POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

Dalam meningkatkan program edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK telah menyelenggarakan 3.104 program yang menjangkau 2.571.108 peserta. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dalam tiga jenis, yaitu edukasi keuangan konvensional, syariah, dan gabungan (konvensional dan syariah), dengan bentuk edukasi secara masif/komunitas/*training of trainers* yang menyasar perempuan, UMKM, pelajar/mahasiswa, guru, termasuk masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Seeking to expand educational programs to increase financial literacy among the public, OJK implemented 3,104 educational programs that reached 2,571,108 participants. The educational programs were classified into three types, namely conventional, Islamic and blended (conventional and Islamic) financial education, targeting women, MSMEs, students, teachers and communities in disadvantaged, frontier and outermost (3T) regions through massive and community-based training as well as the training of trainers.

Dalam mendorong inklusi keuangan, OJK terus mendorong implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Hingga saat ini, pelajar dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar maupun produk SimPel/SimPel iB yang telah dimiliki oleh 449 bank peserta di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2023, sebanyak 53,87 juta pelajar (85,04%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total *outstanding* simpanan lebih dari Rp30 triliun. Selain itu, telah dibentuk 515 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat Provinsi dan 481 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota. Berbagai program TPAKD dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah telah diimplementasikan, seperti program penyaluran kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dengan jumlah debitur mencapai 1.362.688 dan nominal penyaluran Rp38.761,19 miliar; penyusunan *Generic Model* (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah pedesaan melalui pelaksanaan *pilot project* yang didiseminasikan ke 35 Kantor OJK; serta pelaksanaan *capacity building* dan sertifikasi anggota TPAKD.

Nurturing financial inclusion, OJK continued implementing the One Student One Account (KEJAR) program. Currently, students can use segmented child/student savings products and SimPel/SimPel iB products offered by 449 participating banks throughout Indonesia. At the end of 2023, a total of 53.87 million students (85.04%) had SimPel and Child Savings accounts with outstanding savings exceeding IDR30 trillion. In addition, 515 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) have been established, with 34 TPAKD at the provincial level and 481 at the regency/city administrative level. Various TPAKD programs have been implemented to expand regional access to finance, including the lending/financing against loansharking program (K/PMR) with 1,362,688 borrowers and IDR38,761.19 billion in disbursements; formulating a generic model (GM) for the inclusive finance ecosystem (EKI) in rural areas through pilot projects disseminated by 35 OJK offices; as well as capacity building and certification for TPAKD members.

Dalam rangka mewujudkan pelindungan konsumen dan masyarakat yang efektif serta pengawasan terhadap kepatuhan PUJK, OJK telah melaksanakan lima pemeriksaan tematik pada 2023 dengan tema Penyusunan Perjanjian Baku dan Dokumen Transaksi Keuangan pada Lembaga Pembiayaan. Selain itu, OJK juga telah melaksanakan empat pemeriksaan khusus dalam rangka menindaklanjuti pengaduan konsumen dan perilaku PUJK yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat.

Towards establishing effective public and consumer protection as well as supervision of FSP compliance, OJK conducted five thematic inspections in 2023 regarding the preparation of standardised agreements and financial transaction documents at financing institutions. In addition, OJK also performed four bespoke inspections in response to consumer complaints and FSP conduct in violation of prevailing regulations to the potential detriment of consumers. OJK monitored the self-assessment reports submitted by 2,747

Pemantauan atas pelaporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) tahun 2023 telah dilaksanakan pada 2.747 PUJK yang wajib melakukan Penilaian Sendiri melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI). Sebagai bentuk penegakan kepatuhan, OJK telah menetapkan sanksi atas keterlambatan pelaporan Penilaian Sendiri kepada 154 PUJK dengan rincian surat sanksi administratif berupa denda kepada 150 PUJK dan surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada empat PUJK. Pada aspek penegakan hukum, OJK telah mengirimkan 18 Berkas Perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) dan 19 Berkas Perkara telah dilimpahkan disertai dengan penyerahan tersangka/barang bukti.

FSP required to submit self-assessment reports via the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI) in 2023. Enforcing compliance, OJK has imposed sanctions for the late submission of self-assessment reports on 154 FSP, with administrative sanctions in the form of fines given to 150 FSP and administrative sanctions in the form of written warnings to four FSP. From a law enforcement perspective, OJK has filed 18 legal cases that were affirmed complete by the Public Prosecution Service (P-21) along with 19 legal cases accompanied by the submission of suspects/evidence.

Penguatan tata kelola OJK dilakukan melalui pelaksanaan audit internal, pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas, serta penguatan integritas. Pada 2023, Audit Internal OJK melaksanakan 22 penugasan audit internal, serta pemantauan tindak lanjut 373 rekomendasi audit internal dan 516 rekomendasi audit eksternal. Dalam pengelolaan risiko, OJK telah melakukan 214 reviu manajemen risiko meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, perizinan, penyidikan, hukum, edukasi dan pelindungan konsumen, dan manajemen strategis, serta penyempurnaan ketentuan pelaksanaan assurans internal, termasuk beberapa Forum Governansi dan Penegakan Integritas Internal OJK dan SJK. Tahun 2023 OJK meraih peringkat 1 Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Terbaik Nasional dan Kementerian/Lembaga dan indeks integritas OJK pada 2018-2023, selalu berada pada tingkat korupsi rendah (>75).

OJK strengthened governance through its internal audit, risk management and quality control function, while also strengthening integrity. In 2023, a total of 22 internal audit assignments were subject to OJK internal audits, with follow-up monitoring of the recommendations from 373 internal audits and 516 recommendations from external audits. In terms of risk management, OJK implemented 214 risk management reviews, covering regulation, supervision, licensing, investigations, legal, education and consumer protection and strategic management, and also refined regulations concerning internal assurance, including the OJK and Financial Services Sector Internal Governance and Integrity Enforcement Forum. In 2023, OJK was awarded first place for the Best National Gratification Control Program among Government Ministries/Agencies. Meanwhile, the OJK Integrity Index from 2018 to 2023 consistently pointed to a low level of corruption (>75).

OJK senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kinerja OJK pada 2023 memperoleh predikat "*Exceed*", yang dinilai berdasarkan capaian hasil kinerja dan survei tingkat kepuasan stakeholder dengan predikat "Baik". Pembenahan di internal OJK dilakukan secara berkelanjutan melalui transformasi organisasi, penguatan SDM, pemenuhan 34 gedung kantor OJK di daerah (14 di antaranya milik OJK) maupun penguatan di bidang teknologi informasi, meliputi pengembangan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO), Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi, (SPRINT), *Enterprise Data Warehouse* SJK Terintegrasi, Sistem Informasi Program APU-PPT dan PPPSM, Sistem Informasi TPAKD, Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, serta Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

OJK constantly strives to improve performance and ensure the benefits are increasingly felt by the public in accordance with the duties and functions mandated by prevailing laws and regulations. OJK performance in 2023 earned the 'Exceed' predicate based on performance and the Stakeholder Satisfaction Survey ('Satisfied' predicate). OJK pursues internal improvements on an ongoing basis through organisational transformation, strengthening human resources, operating 34 regional OJK office buildings (14 of which are owned by OJK), and strengthening various aspects of information technology, including development of the OJK Online Reporting Application (APOLO), Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT), Integrated Financial Services Sector Enterprise Data Warehouse, AML/CFT/PF program information system, TPAKD Information System, OJK Consumer Protection and Education Reporting Information System, as well as the Consumer Protection Application Portal.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I

Tentang OJK

OJK at a Glance

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Act Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) elucidates that OJK was established with the aim to ensure all activities in the financial services sector are implemented in a regulated, fair, transparent and accountable manner to create a sustainable and stable financial system growth, while protecting the interests of consumers and the public. OJK is mandated with regulating and supervising financial service activities in the Banking sector, Capital Market sector and Insurance sector, Pension Funds, Financing Institutions, and other Financial Services Institutions.

Reformasi Sektor Keuangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUPPSK), antara lain bertujuan untuk menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan Indonesia. UU PPSK hadir untuk menekankan mengenai independensi dan peran otoritas sektor keuangan antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perubahan pengaturan dalam UU PPSK yang memperkuat kredibilitas OJK antara lain melalui penambahan beberapa tugas dan wewenang baru OJK antara lain pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor investasi teknologi sektor jasa keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto, sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan, dan pengembangan sektor keuangan secara umum.

Financial sector reform through promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act) aims to strengthen the authority and institutional governance in Indonesia's financial sector. The PPSK Act explicitly stipulates the independence and roles of financial sector authorities, including the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS). Regulatory amendments contained in the PPSK Act strengthen OJK credibility through new duties and additional authority, including the supervision and regulation of activities in the financial services technology investment sector as well as digital financial assets and crypto assets, and the integrated financial sector, while also assessing the systemic impact of financial conglomerates and financial sector development in general.

Peranan OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen, sehingga peningkatan dan kemajuan perekonomian nasional dapat terwujud.

OJK plays a vital role in maintaining financial system stability and protecting the interests of consumers towards growing and advancing the national economy.

I.1 Visi dan Misi
Vision and Mission

Visi
Vision

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Become a trusted supervisory authority of the financial services sector, protecting the interests of consumers and the public and creating a globally competitive financial services industry that promotes public prosperity as a pillar of the national economy.

Misi
Mission

- **Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel**

  Realise the regulated, fair, transparent and accountable implementation of all financial services sector activities.

- **Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil**

  Safeguard sustainable and stable financial system growth.

- **Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat**

  Protect the interests of consumers and the public.

I.2 Nilai-Nilai Strategis dan Perilaku Kunci
Strategic Values and Key Behaviours

OJK memiliki lima nilai strategis yang menjadi pedoman dan pegangan seluruh Insan OJK dalam bertindak, bertingkah laku, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya. Kelima nilai strategis, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner dikenal sebagai INPRESIV.

OJK upholds five strategic values as guidelines for all OJK personnel in their actions, behaviours and interactions as well as in completing their core tasks and functions. The five strategic values are integrity, professionalism, synergy, inclusiveness and visionary, abbreviated as INPRESIV.

Integritas
Integrity

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
To act objectively, fairly, and consistently according to the code of ethics and organisational policy, while upholding honesty and commitment.

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
To work responsibly in accordance with broad competencies to achieve performance excellence.

Profesionalisme
Professionalism

Sinergi
Synergy

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
To collaborate productively and effectively with all internal and external stakeholders.

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
To accept diverse stakeholders openly, while expanding opportunities for public access to the financial industry.

Inklusif
Inclusiveness

Visioner
Visionary

Berwawasan luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.
To have broad insight and be forward-looking, with the ability to think outside the box.

Grafik 1.1 Nilai Strategis OJK (INPRESIV)
Graph 1.1 OJK Strategic Values (INPRESIV)

Untuk menerjemahkan nilai strategis INPRESIV, OJK juga menerapkan suatu prinsip budaya kerja yang mengedepankan nilai luhur persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan yang positif. Perilaku tersebut dijabarkan cara berkomunikasi secara proaktif untuk membangun rasa saling percaya meningkatkan interaksi dan kolaborasi untuk menghilangkan silo internal, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan sebagai sebuah organisasi yang adaptif dan terintegrasi.

Proaktif
Berani berbicara dan selalu bersikap positif terhadap perubahan, mengantisipasi dan mengambil tindakan atau keputusan secara benar dan memberikan respon yang tepat di segala keadaan.

Kolaboratif
Bekerja sama dan berkontribusi secara nyata dalam memberikan ide, gagasan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik dan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

Bertanggung Jawab
Melaksanakan tugas dengan jujur, amanah dan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta peraturan.

Interpreting the INPRESIV strategic values, OJK applies work culture principles that prioritise the virtues of unity and integrity, as manifested in the positive attitude, behaviour, and actions of OJK personnel. This behaviour describes how to communicate proactively and build mutual trust, increase interaction and collaboration to eliminate internal silos, and execute duties responsibly to achieve the goals as an adaptive and integrated organisation.

Proactive
Dare to speak up and maintain a positive attitude towards change, anticipate and take the right actions or decisions, while providing an appropriate response in all circumstances.

Collaborative
Collaborate and contribute significantly to provide the best ideas or solutions to problems, while generating value added for the organisation.

Responsible
Execute duties honestly and responsibly in a trustworthy way, while avoiding any abuse of authority and upholding moral values and regulations.

I.3 Logo OJK
OJK's Logo

Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

The OJK logo symbolises a philosophy that reflects:

Sederhana | *Simplicity*

Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam sikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.
The OJK logo can be recognised as quickly as reading OJK, symbolising simplicity in attitude and rapidity of action, particularly in terms of carrying out the functions mandated by the state to OJK.

Warna Logo | *Logo Colour*

Warna Logo OJK melambangkan bahwa organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna pekerjaan yang diamanatkan.
The colour of the logo symbolises OJK as a living organisation with fresh blood coursing through its veins, working tirelessly towards perfection in the implementation of mandated responsibilities.

Ringan | *Modesty*

Logo OJK berkesan ringan, tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan dan tidak membeda-bedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.
The OJK logo is modest and unencumbered, representing the humility and consideration of BOC members, officials and employees in executing the mandated responsibilities without discrimination.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Gambar 1.1 Logo OJK
Figure 1.1 OJK's Logo

Warna Huruf | *Font Colour*

Warna huruf OJK memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.
The vibrant colours of the lettering were chosen for their elegance, showing OJK as an advanced and visionary institution of the future.

Garis-garis Tegas | *Clear Lines*

Garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat undang-undang.
The bold lines symbolise the decisiveness of BOC members, officials and employees in the execution of duties as mandated by law.

Merah dan Putih | *Red and White Banner*

Warna merah dan putih di atas huruf OJK yang melancip menunjukkan sikap dinamis dan bekerja yang menjadi ciri aparat OJK, namun selalu dalam koridor undang-undang.
The red and white colours of the banner above the OJK lettering symbolise the dynamic and diligent attitudes that characterise OJK personnel within the confines of the legal corridor.

I.4 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK

Oath of Office and Inauguration of OJK Board of Commissioners Members

Gambar 1.2 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dua Anggota Dewan Komisioner Baru
Figure 1.2 Oath of Office and Inauguration of Two New Members of the Board of Commissioners

Pada 9 Agustus 2023. Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik dua Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yaitu Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya serta Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Pelantikan dilakukan sesuai Keppres No. 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Agusman dan Hasan Fawzi akan menjabat hingga 2028 dan menambah jajaran ADK OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan orang ADK dan dua orang ADK *Ex-Officio*.

On 9th August 2023, the Chief Justice of the Supreme Court, H. M. Syarifuddin, administered the oath of office and inaugurated two members of the OJK Board of Commissioners (BOC), namely Agusman as the Executive Head of Supervision for Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, and Hasan Fawzi as the Executive Head of Supervision for Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets. The appointments were made in accordance with Presidential Decree (Keppres) Number 67/P of 2023 concerning the Appointment of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners. Agusman and Hasan Fawzi will remain in office until 2028, thus bringing the number of OJK BOC members to 11, including nine BOC members and two ex-officio members.

Berikut adalah susunan lengkap ADK OJK sesuai Keppres Nomor 51/P Tahun 2022 dan Nomor 67/P Tahun 2023:

1. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota;
3. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
5. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota;
6. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
7. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota;
8. Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
9. Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
10. Doni Primanto Joewono sebagai anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia;
11. Suahasil Nazara sebagai anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

Kehadiran dua ADK OJK baru ini merupakan amanat Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang bertujuan untuk semakin mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

In accordance with Presidential Decree (Keppres) Number 51/P of 2022 and 67/P of 2023, the current structure of the OJK Board of Commissioners is as follows:

1. *Mahendra Siregar as Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
2. *Mirza Adityaswara as Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority concurrently Chairman of the Ethics Committee,*
3. *Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
4. *Inarno Djajadi as Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
5. *Ogi Prastomiyono as Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
6. *Agusman as Chief Executive of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Companies Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
7. *Hasan Fawzi as Chief Executive of Technology Innovation, Digital Assets, and Crypto Assets Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
8. *Friderica Widyasari Dewi as Chief Executive of Behavioral Supervisory of Financial Services Business, Education, and Consumer Protection concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
9. *Sophia Issabella Wattimena as Chairman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority,*
10. *Doni Primanto Joewono as Senior Deputy Governor, Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia, and*
11. *Suahasil Nazara as Vice Minister of Finance, Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Ministry of Finance.*

The two new appointees to the OJK Board of Commissioners are in accordance with the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act), Number 4 of 2023, which aims to nurture the contribution of the financial sector for inclusive, sustainable, and equitable economic growth towards greater public prosperity and less economic inequality, while creating a prosperous, advanced and dignified Indonesia.

I.5 Profil Dewan Komisioner
Board of Commissioners

01

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

02

Mirza Adityaswara

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority concurrently Chairman of Ethics Committee

03

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Banking Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

04

Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

05

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

06

Agusman

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Companies Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority the Board of Commissioners

07

Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Technology Innovation, Digital Assets, and Crypto Assets Supervision, Concurrently member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

08

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Behavioral Supervisory of Financial Services Business, Education, and Consumer Protection concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

09

Sophia Isabella Wattimena

Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

10

Doni Primanto Joewono

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia
Senior Deputy Governor, Ex-officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia

11

Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan
Vice Minister of Finance, Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Ministry of Finance

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Mahendra Siregar mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022.

Mahendra menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak 25 Oktober 2019 sampai 19 Juli 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (2019), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014), Wakil Menteri Keuangan (2011-2013), dan Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011).

Selain mengemban tugas pada institusi pemerintah, Mahendra juga pernah memegang berbagai jabatan komisaris di korporasi dan organisasi internasional.

Mahendra memperoleh gelar *Master of Economics* dari Monash University, Melbourne pada tahun 1991 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986.

Mahendra Siregar was sworn in by the Supreme Court as the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) on 20th July 2022.

Mahendra served as the Deputy Minister of Foreign Affairs from 25th October 2019 to 19th July 2022. Prior to that, Mahendra was the Ambassador of the Republic of Indonesia to the United States (2019), Chairman of the Indonesia Investment Coordinating Board (2013-2014), Deputy Minister of Finance (2011-2013) and Deputy Minister of Trade (2009-2011).

In addition to holding various prominent positions in government institutions, Mahendra has also held different commissioner positions in international organisations and corporations.

Mahendra earned a Master of Economics from Monash University, Melbourne in 1991 and a Bachelor of Economics from the University of Indonesia in 1986.

Mirza Adityaswara

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai
Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority concurrently
Chairman of Ethics Committee

Lahir di Surabaya, 9 April 1965. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 serta gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University pada tahun 1995.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di industri keuangan dan pemerintahan dengan mengawali karier di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Beliau melanjutkan karier profesionalnya di beberapa institusi jasa keuangan, antara lain *Head of Securities Trading & Research* di Bahana Sekuritas (2002-2005), *Director, Head of Equity Research & Bank Analysis* di Credit Suisse Securities Indonesia (2005-2008), serta *Managing Director, Head of Capital Market,* Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group (2008–2010).

Beliau juga pernah menjabat di beberapa lembaga, antara lain Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2013) serta Deputi Gubernur Senior di Bank Indonesia (2013-2019). Selama 2015-2019, Beliau diberikan tugas tambahan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang bertugas mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK dalam konteks kebijakan makroprudensial yang berkorelasi dengan pengawasan serta pengaturan industri jasa keuangan.

Setelah selesai bertugas dari Bank Indonesia, beliau menjabat selaku Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020-2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2020-2022.

Born in Surabaya on 9th April 1965, Mirza Adityaswara earned his Bachelor of Economics in 1992 from the University of Indonesia in Jakarta before continuing his studies to earn a Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia, in 1995.

Mirza Adityaswara has more than 30 years of experience in the financial industry and government, commencing his career at Bank Sumitomo Niaga in 1989. He continued his professional career at several financial services institutions, including as Head of Securities Trading & Research at Bahana Sekuritas (2002-2005), Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia (2005- 2008), and Managing Director, Head of Capital Market, as well as Chief Economist at Bank Mandiri Group (2008–2010).

Mirza Adityaswara also served as a Member of the Board of Commissioners and Chief Executive of the Board of Commissioners at Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) in 2010-2013, as well as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia (2013-2019). From 2015-2019, he was also bestowed additional duties as the Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia, tasked with overseeing the implementation of institutional synergy between Bank Indonesia and OJK in the context of macroprudential policy in correlation with financial services industry supervision and regulation.

After completing his assignment from Bank Indonesia, Mirza Adityaswara served as Expert Staff to the Minister of Finance from 2020-2022 and President Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) from 2020-2022.

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Banking Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Dian Ediana Rae lahir di Bandung, 4 April 1960. Ia lulusan Doktor Bidang Hukum Ekonomi Keuangan dari Universitas Indonesia dengan predikat *cumlaude*. Ia menamatkan pendidikan Sarjana bidang Hukum Internasional Universitas Padjajaran dan Master bidang Hukum Bisnis University of Chicago Law School. Dian juga sempat mengambil *Law Course* di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, *Summer School for International Finance Law* di Oxford University, Inggris, dan *Executive Education Program* di Harvard Kennedy School.

Sejalan dengan keilmuan yang dimiliki, Dian pun banyak berkecimpung di bidang hukum ekonomi dan bisnis. Dian Ediana Rae memulai kariernya di bidang keuangan di Bank Indonesia. Dalam kariernya di Bank Indonesia, Dian merupakan anggota dari Delegasi Indonesia untuk misi negosiasi *trade in services* di WTO, APEC, dan ASEAN. Selanjutnya, Dian juga memimpin beberapa delegasi Indonesia dalam pertemuan G20 terkait *Trade Finance Expert* dan UNCTAD *Conference on Debt Management*. Dian menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia, tepatnya untuk penugasan di London pada tahun 2010-2013, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang kewenangannya meliputi daerah Jawa Barat dan Banten pada 2013-2014, serta sebagai Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia Sumatera untuk masa jabatan 2014-2016. Sebelum akhirnya menjadi Wakil Kepala PPATK pada 2016-2020, dan kemudian diangkat menjadi Kepala PPATK periode 2020-2021.

Selain itu, Dian Ediana Rae juga pernah ditunjuk sebagai *Vice Chairman* di Kelompok Kerja Pertukaran Informasi The Egmont Group. Dian juga terpilih sebagai *Regional Representative* The Egmont Group untuk kawasan Asia Pasifik, anggota the Egmont Group Committee, dan juga menjabat sebagai *Co-Chair* dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG) di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2018-2021.

Born in Bandung on 4th April 1960, Dian Ediana Rae graduated from the University of Indonesia with a cum laude distinction for his Doctorate in Financial Economics and Law. Dian also completed a Bachelor's in International Law from Padjajara University and a Master in Business Law from the University of Chicago Law School. He took a Law Course at Georgetown University, Washington DC, United States, and Summer School for International Finance Law at Oxford University, UK, as well as the Executive Education Program at Harvard Kennedy School.

Building on his academic knowledge, Dian is also intimately involved in economics and business law. He began his career in finance at the Bank Indonesia, eventually serving as a member of the Indonesian delegation for the Trade in Services Negotiation Mission at the World Trade Organisation (WTO), APEC and ASEAN. He has led several Indonesian delegations at G20 meetings as a Trade Finance Expert and the UNCTAD Conference on Debt Management. Dian was the Head of Bank Indonesia Representatives in London from 2010-2013, Head of Bank Indonesia Representatives for Region VI with jurisdiction over West Java and Banten from 2013-2014, as well as Head of the Bank Indonesia Regional I Department in Sumatera from 2014 -2016. Dian was appointed as Deputy Chairman of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) from 2016-2020 and Chairman of INTRAC from 2020-2021.

In addition, Dian Ediana Rae was appointed Vice Chairman of the Information Exchange Working Group of the Egmont Group and also elected as Regional Representative of the Egmont Group for the Asia-Pacific region, a member of the Egmont Group Committee, and served as Co-Chair of the Financial Intelligence Consultative Group (FICG) in Southeast Asia, Australia, and New Zealand from 2018-2021.

Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Inarno Djajadi kelahiran Yogyakarta, 31 Desember 1962. Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Beliau memulai karier di bidang pasar modal sejak tahun 1989.

Inarno menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui RUPS pada tanggal 29 Juni 2018. Sebelumnya Inarno menjabat sebagai *Treasury Officer* di PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991), Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Direktur PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Direktur PT Widari Sekuritas (1999), dan Direktur Utama PT Madani Sekuritas (2000-2003).

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Komisaris serta Komisaris Utama PT KPEI (2003-2009, 2010-2013, dan 2013-2016), Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Komisaris Utama PT CIMB Niaga Sekuritas (2014-2017), serta Komisaris BEI tahun 2017-2018.

Inarno juga memiliki pengalaman di berbagai organisasi sepanjang kariernya, termasuk sebagai anggota Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) (1992-1994), anggota Dewan Pengawas Profesi Pasar Modal Indonesia (2017-2020), dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta Raya (ISEI Jaya) sejak 2020.

Born in Yogyakarta on 31st December 1962, Inarno Djajadi earned a Bachelor of Economics from Gadjah Mada University in 1981 before commencing his career in the capital market in 1989.

Inarno served as the President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the General Meeting of Shareholders on 29th June 2018. Prior to IDX, Inarno served as Treasury Officer at PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991), Director of PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Director of PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Director of PT Widari Sekuritas (1999), and President Director of PT Madani Sekuritas (2000-2003).

In addition, Inarno Djajadi also served as President Director, Commissioner, and President Commissioner of the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) from 2003-2009, 2010-2013 and 2013-2016 respectively, President Commissioner of PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), President Commissioner of PT CIMB Niaga Sekuritas (2014-2017), and IDX Commissioner (2017-2018).

Inarno Djajadi has also gained invaluable experience at various organisations throughout his career, including as a member of the Indonesian Securities Brokerage Association (IPEI) (1992-1994), a member of the Supervisory Board for the Indonesian Capital Market (2017- 2020), and currently serves as the Chairman of Jakarta Economics Bachelors Association Raya (ISEI Jaya) since 2020.

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Lahir di Bogor, 21 Mei 1961, Ogi Prastomiyono memperoleh gelar sarjana Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984, dan *Master of Business Administration* dari University of Notre Dame, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Ogi memulai karier di Bank Ekspor Impor Indonesia atau Exim Bank pada 1986. Di sana, ia menduduki posisi sebagai *loan officer* di Divisi Kredit Perkebunan. Posisi terakhirnya di Exim Bank sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan.

Di tahun 1999, Ogi bergabung dengan Mandiri dan menduduki berbagai posisi yang berbeda di Bank Mandiri sebelum duduk di Direksi, yaitu Kepala Divisi *Compliance*, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, *Deputy Chairman – IPO Working Team* sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, *Managing Director* Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2003 hingga 2005, *Group Head Compliance* sejak tahun 2005 hingga 2006, *Group Head Internal Audit* 2006 -2008.

Beliau diangkat sebagai Direktur *Compliance & Human Capital* Bank Mandiri sejak tahun 2008 - 2014, sebagai Direktur *Risk Management & Compliance* sejak tahun 2014 - 2015, sebagai Direktur *Technology & Operations* pada tahun 2015 - 2016 dan sebagai Direktur *Operations* tahun 2016 - 2018.

Pada tahun 2018, Ogi mendapat penugasan dari pemerintah atau pemegang saham utama untuk menjadi Direktur Layanan Strategis di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID BUMN *holding* industri pertambangan sampai dengan tahun 2021. Selain itu, Ogi juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Vale Indonesia Tbk dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Saat ini, Ogi juga menjabat sebagai Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan *Ex-Officio* OJK pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Born in Bogor on 21st May 1961, Ogi Prastomiyono earned a Bachelor of Agricultural Industrial Technology from the Bogor Agricultural University in 1984 and Master of Business Administration from the University of Notre Dame, United States, in 1994.

Beginning his career at Exim Bank in 1986, Ogi Prastomiyono served as a loan officer in the Plantation Credit Division. His final position at Exim Bank was Head of the Research and Development Division.

In 1999, Ogi Prastomiyono joined Bank Mandiri and held various positions before serving on the Board of Directors, namely as Head of the Compliance Division (1999-2001), Deputy Chairman of the IPO Working Team (2001-2003), Managing Director of Bank Syariah Mandiri (2003- 2005), Group Head of Compliance (2005-2006), and Group Head of the Internal Audit (2006-2008).

Ogi Prastomiyono was subsequently appointed as Director of Compliance & Human Capital of Bank Mandiri (2008-2014), Director of Risk Management & Compliance (2014-2015), Director of Technology & Operations (2015-2016), and Director of Operations (2016-2018).

In 2018, Ogi Prastomiyono was assigned by the government and appointed by the controlling shareholders as Director of Strategic Services at PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) or MIND ID BUMN holdings for the mining industry until 2021. In addition, Ogi also served as Deputy President Commissioner of PT Vale Indonesia from 2020-2022. Currently, Ogi also holds the position as Ex Officio member of the Financial Accounting Standards Consultative Council in the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI) from OJK.

Agusman

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Companies Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Agusman lahir di Padang pada tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi Universitas Andalas pada tahun 1989, dan mendapat gelar *Master of Business Administration* (MBA) di bidang *Economics and Finance* dari Curtin University of Technology pada tahun 1998. Agusman melanjutkan studi dan meraih gelar PhD di bidang *Banking and Finance* dari Australian National University pada tahun 2006.

Born in Padang in 1965, Agusman completed his Bachelor of Accounting at Andalas University in 1989 and Master of Business Administration, Economics and Finance from Curtin University of Technology in 1998 before furthering his studies to earn a PhD in Banking and Finance from the Australian National University in 2006.

Agusman mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1992 serta tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Departemen *Surveillance* Sistem Keuangan (2016-2017), Kepala Departemen Komunikasi (2017-2019), Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (2019) dan Kepala Departemen Audit Internal (2020-2023). Yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (2021-2023).

Beginning his career at Bank Indonesia in 1992, Agusman served as Head of the Financial System Surveillance Department (2016-2017), Head of the Communication Department (2017-2019), Head of the Financial Market Deepening Department (2019), Head of the Internal Audit Department (2020-2023) and Chairman of the Supervisory Board for the Bank Indonesia Defined Contribution Pension Fund (2021-2023).

Selanjutnya, sejak 9 Agustus 2023, Agusman diangkat sebagai Kepala Eksekutif/Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner OJK.

On 9th August 2023, Agusman was sworn in as the Executive Head and Concurrent Member of the OJK Board of Commissioners in accordance with Presidential Decree (Keppres) Number 67/P of 2023 concerning the Appointment of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners.

Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Technology Innovation, Digital Assets, and Crypto Assets Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pierre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Born in Purwakarta on 27th April 1970, Hasan Fawzi completed his Bachelor of Engineering at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1993 and Master of Business Administration (MBA) at LÍAE de Grenoble, Université Pierre Mendes, France before earning a Master of Management (MM) from the Faculty of Economics and Business (FEB) of the University Indonesia in 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008. Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018-2022.

Hasan Fawzi began his professional career at PT Kliring Depositori Efek Indonesia, ultimately serving as Head of the System Development Department from 1993 to 1997 before joining the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) as Head of the Information Technology Division from 1997 to 2008. Hasan Fawzi continued his career as Director of PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) from 2008 to 2012, President Director of KPEI for two terms (2012-2015 and 2015-2018), as well as Director of Development at the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

Hasan Fawzi also served as President Commissioner of PT PEFINDO Credit Bureau (2022-2023), President Commissioner and Independent Commissioner of PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), and Independent Commissioner of PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chief Executive of Behavioral Supervisory of Financial Services Business, Education, and Consumer Protection concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Friderica Widyasari Dewi meraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration* (MBA) di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karier di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di *self-regulatory organizations* (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Friderica Widyasari Dewi completed her Bachelor of Economics at Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 2001 before continuing her education at California State University, USA, earning a Master of Business Administration (MBA) in 2004 and a PhD in Leadership and Innovation Policy from Gadjah Mada University in 2019.

Born in Cepu on 28th November 1975, Friderica Widyasari Dewi worked at the Indonesia Stock Exchange (IDX) for more than 10 years from 2005, ultimately serving as Director of Market Development from 2009 to 2015.

Friderica Widyasari Dewi continued her career at a self-regulatory organisation (SRO), namely the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), from 2015-2016 before she was appointed as President Director of KSEI from 2016-2019. From 2020-2022, she served as President Director of BRI Danareksa Sekuritas.

Friderica Widyasari Dewi also holds licenses as an Investment Manager Representative (WMI) and Underwriter Representative (WPEE) issued by OJK in 2019.

Sophia Isabella Wattimena

Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Lahir di Cirebon, 24 Februari 1969, Sophia Isabella Wattimena menyandang gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia lalu menamatkan pendidikan *Master of Business Administration* (MBA) di Leiden University, Belanda, serta Kuehne Logistic University, Jerman. Sophia juga telah memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu *Chartered Accountant* (CA).

Sophia mengawali kariernya sebagai auditor eksternal di Ernst & Young (EY), *Manager Internal Audit* di PT Semen Cibinong Tbk, kemudian sebagai *Senior Manager* EY Transaction Advisory Services. Selama kariernya, Sophia juga pernah menjabat sebagai *Head of Finance Resource Management* Unit United Nations Development Program (UNDP). Setelah itu, Sophia dipercaya sebagai *Vice President Advisory & Investment* di PT Indonesia Infrastructure Finance, lalu berikutnya bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Direktur Keuangan & Operasi PT Pelabuhan Indonesia Investama dan Direktur Keuangan & SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Ia kemudian menjajaki karier di PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) sebagai *Executive Director of Finance* dan selanjutnya dipercaya sebagai *Managing Director*, sebelum dilantik menjadi Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022-2027.

Born in Cirebon on 24th February 1969, Sophia Isabella Wattimena earned a Bachelor of Accounting from Gajah Mada University, before pursuing a Master of Business Administration (MBA) at Leiden University, the Netherlands and Kuehne Logistics University, Germany. In addition, Sophia Isabella Wattimena is a qualified Chartered Accountant (CA) as recognised by the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI).

Sophia began her career as an External Auditor at Ernst & Young (EY) and served as Internal Audit Manager at PT Semen Cibinong and Senior Manager at EY Transaction Advisory Services. Sophia has enjoyed an illustrious career, which includes serving as Head of the Finance Resource Management Unit in the United Nations Development Programme (UNDP) before being entrusted as Vice President of Advisory & Investment at PT Indonesia Infrastructure Finance, and then joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Director of Finance and Operations, PT Pelabuhan Indonesia Investama as Director of Finance and Operations and PT Indonesia Kendaraan Terminal as Director of Finance and HR. Sophia subsequently furthered her career at PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) as Executive Director of Finance and then Managing Director before being appointed Chairperson of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners for the period from 2022-2027.

Doni Primanto Joewono

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia
Senior Deputy Governor, Ex-officio Member of OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia

Lahir di Surabaya 24 Februari 1965, Doni Primanto Joewono menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1988, lalu melanjutkan studi S2 Administrasi dan Pengembangan SDM di Universitas Indonesia (UI) tahun 2004.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia hingga tahun 2000. Kariernya berlanjut sebagai peneliti ekonomi di Departemen Pengelolaan Moneter (2000-2002).

Ia lantas menjabat Deputi Kepala Bagian Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter (2002-2005), Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter Departemen Statisitik Ekonomi dan Moneter (2005), dan Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter Kantor BI Semarang (2005). Kemudian Doni ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008).

Kariernya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo (2012-2013), dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta (2015-2018) dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat (2018-2019). Selama kariernya di daerah, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.

Doni Primanto Joewono menjadi Kepala Departemen SDM Bank Indonesia tahun 2020 dan Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Born in Surabaya on 24th February 1965, Doni Primanto Joewono earned a Bachelor of Economics in Development Studies at Sebelas Maret University in 1988, before obtaining a Master of HR Administration and Development from the University of Indonesia (UI) in 2004.

Doni Primanto Joewono began his career in 1991 at the Monetary Management Department of Bank Indonesia, where he remained until 2000 before continuing his career as an economic researcher in the Monetary Management Department from 2020-2022.

Doni Primanto Joewono served as Deputy Head of the Economic and Monetary Statistics Department (2002-2005), Head of the Economic and Monetary Division of the Economic and Monetary Statistics Department (2005), and Head of Economic and Monetary Affairs at Bank Indonesia Semarang Office (2005). Doni was subsequently appointed as a Senior Economic Researcher (Deputy Director) at the Bank Indonesia Representative Office in London (2005-2008).

His career flourished by leading several Bank Indonesia Representative Offices, including the Bank Indonesia Representative Office in Solo (2012-2013), Jakarta (2015-2018) and West Java (2018-2019). During that time, he was recognised for the best Regional Inflation Control Team (TPID) in Solo (2012) and then in Jakarta (2017), where he initiated various programs to nurture regional investment and economic empowerment of Islamic Boarding Schools (pesantren).

Doni Primanto Joewono was appointed Deputy Governor of Bank Indonesia in accordance with Presidential Decree Number 78/P of 2020, dated 30th July 2020, and took the oath of office on 11th August 2020.

Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan
Vice Minister of Finance, Ex-Officio Member of OJK Board of Commissioners from Ministry of Finance

Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar *Master of Science* dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, meraih gelar *Doctor of Philosophy* dari University of Illinois Urbana-Champaign, USA.

Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar *(Professor)* di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal sejak 2015, pada tahun 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sejak tanggal 25 Oktober 2019 dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saat ini Suahasil juga diberikan amanat oleh Presiden sebagai Ketua Pelaksana Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara sejak bulan April 2023 serta dipercaya juga menjadi Ketua Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja sejak bulan Agustus 2022.

Born in Jakarta on 23rd November 1970, Suahasil Nazara earned his Bachelor of Economics at the University of Indonesia (UI) in 1994 before furthering his education at Cornell University, USA, obtaining a Master of Science in 1997. In 2003, he completed the Doctor of Philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Commencing his career in 1999 as a civil servant lecturer at the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia, Suahasil Nazara became a Professor of Economics in 2009. Furthermore, Suahasil Nazara has also headed the Economics Postgraduate Study Program (2004-2005), the Demographic Institute (2005-2008) and the Economics Department (2009-2013) within the Faculty of Economics and Business at the prestigious University of Indonesia.

Suahasil Nazara served as a Member of the Minister of Finance Assistance Team for Fiscal Decentralisation (2009-2011) and remained active as an Administrator in the Indonesian Economist Association (ISEI), while also holding the position of Deputy Chair of the Supervisory Committee for Regional Autonomy Implementation from 2009-2015. Suahasil Nazara also held the position of Coordinator in the Policy Working Group of the Secretariat of the National Team to Accelerate Poverty Alleviation (TNP2K) at the office of the Vice President of the Republic of Indonesia (2010-2015), and board member of the National Economic Committee (KEN) from 2013-2014.

During the presidency of Joko Widodo, Suahasil Nazara was appointed Acting Head of the Fiscal Policy Office in 2015 before being definitively installed by the Minister of Finance as Head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

On 25th October 2019, Suahasil Nazara was appointed by the President of Indonesia as Deputy Minister of Finance of the Republic of Indonesia. The President also assigned Suahasil in April 2023 as Chairman of the Task Force to Increase Governance in the Palm Oil Industry and Optimise State Revenues and was also entrusted as Chairperson of the Task Force to Accelerate Socialisation of the Job Creation Act in August 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I.6 Deputi Komisioner
Deputy of Commissioners

01

Defri Andri

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah
Deputy Commissioner of the Supervision of Government-Owned and Islamic Banks

02

Jasmi

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Deputy Commissioner of Venture Capital, Financing, Microfinance and Other Financial Institution Supervision

03

Moch. Ihsanuddin

Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Deputy Commissioner of Financial Sector Technology Innovation, Digital Asset and Crypto Asset Supervision

04

Bambang Mukti Riyadi

Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah
Deputy Commissioner of International Affairs, Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing and Regional Office Management

05

Hidayat Prabowo

Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas
Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management, and Quality Assurance

06

Agus Edy Siregar

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan
Deputy Commissioner of Financial Systems Stability

07

Iwan Pasila

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Deputy Commissioner of Insurance, Surety and Pension Funds Supervision

08

Yunita Linda Sari

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
Deputy Commissioner of Investment Management of Capital Market and Securities Institution Supervision

09

Djustini Septiana

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
Deputy Commissioner of Issuer and Securities Transactions Supervision and Special Audit

10

Imansyah

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat/setingkat Deputi Komisioner
Head of OJK Office of West Java/at level of Deputy Commissioner

11

Irnal Fiscallutfi

Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi
Deputy Commissioner of Human Resources and Information Systems

12

Teguh Supangkat

Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan
Deputy Commissioner of Financial Conglomerates Supervision

13

Anung Herlianto EC

Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta
Deputy Commissioner of Private Banks Supervision

14

Rizal Ramadhani

Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan
Deputy Commissioner of Legal Affairs and Investigations

15

Sarjito

Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen
Deputy Commissioner of Market Conduct, Education and Consumer Protection Supervision

16

I.B Aditya Jayaantara

Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik
Deputy Commissioner of Strategic Planning, Finance, Secretariat of Board Commissioners, and Logistics

Advisor Senior
Senior Advisor

01

Ahmad Soekro Tratmono

Advisor Senior
Senior Advisor

02

Anto Prabowo

Advisor Senior
Senior Advisor

03

Fakhri Hilmi

Advisor Senior
Senior Advisor

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I.7 Struktur Organisasi dan Komite
Organisational Structure and Committees

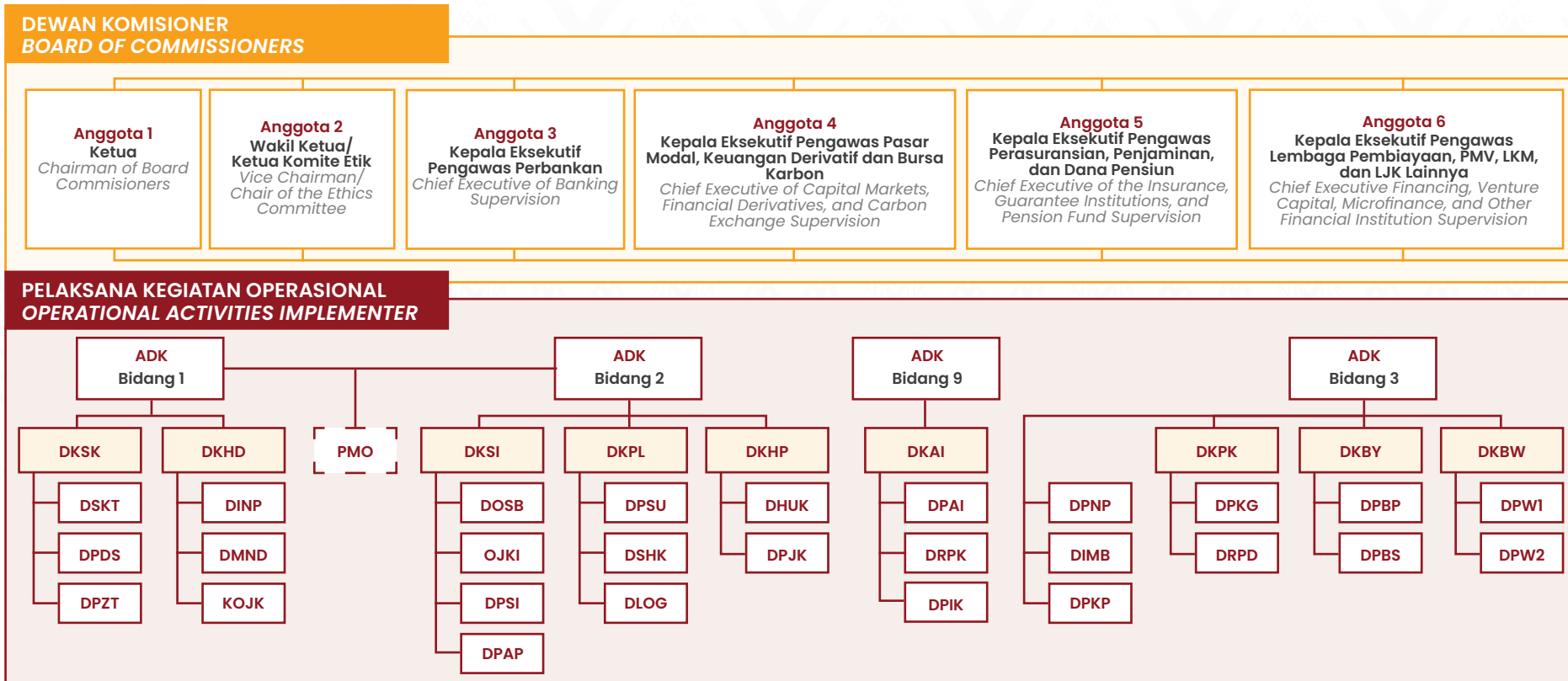

Keterangan | *Explanation*

- **ADK** (Anggota Dewan Komisioner | *Board of Commissioners*)
- **SCOM** (*Strategic Committee* | *Strategic Committee*)
- **DKSK** (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan *Deputy Commissioner of Financial Systems Stability*)
  - **DSKT** (Departemen *Surveillance* dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | *Department of Financial Services Sector Surveillance and Integrated Policies*)
  - **DPZT** (Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi *Department of Integrated Supervision Coordination and Licensing*)
  - **DPDS** (Departemen Pengelolaan Data dan Statistik | *Department of Data and Statistics Management*)
- **DKHD** (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah *Deputy Commissioner of International Affairs, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing and Regional Office Management*)
  - **DINP** (Departemen Internasional dan APU-PPT | *Department of International Affairs, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing*)
  - **DMND** (Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah *Department of Regional Office Management and Development*)
  - **9** Kantor OJK Kelas A | *OJK Office Class A*
  - **5** Kantor OJK Kelas B | *OJK Office Class B*
  - **21** Kantor OJK Kelas C | *OJK Office Class C*

Fungsi Bersama | *Shared Function*

- **DKSI** (Deputi Komisioner SDM dan Sistem Informasi | *Deputy Commissioner of Human Resources and Information Systems*)
  - **DOSB** (Departemen Organisasi, SDM, dan Budaya *Department of Organization, Human Resources and Organizational Culture*)
  - **OJKI** (OJK Institute | *OJK Institute*)
  - **DPSI** (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi *Department of Information Systems Management*)
  - **DPEA** (Departemen Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | *Department of Applications Development*)
- **DKPL** (Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik *Deputy Commissioner of Strategic Planning, Finance, Secretariat of Board Commissioners, and Logistics*)
  - **DPSU** (Departemen Perencanaan Strategis dan Keuangan *Department of Finance and Strategic Planning*)
  - **DSHK** (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan | *Department of Board of Commissioners Secretariat and Institutional Relations*)
  - **DLOG** (Departemen Logistik | *Logistics Department*)
- **DKHP** (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan *Deputy Commissioner of Legal Affairs and Investigations*)
  - **DHUK** (Departemen Hukum | *Legal Department*)
  - **DPJK** (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan *Department of Financial Services Sector Investigation*)
- **DKAI** (Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas | *Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management, and Quality Assurance*)
  - **DPAI** (Departemen Audit Internal | *Department of Internal Audit*)
  - **DRPK** (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas *Department of Risk Management and Quality Control*)
  - **DPIK** (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus *Department of Integrity Enforcement and Special Audit*)
- **DPNP** (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan *Department of Banking Regulation and Development*)
- **DIMB** (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan *Department of Banking Licensing and Crisis Management*)
- **DPKP** (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan | *Department of Banking Supervision Quality Control and Development*)
- **DKPK** (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan *Deputy Commissioner of Financial Conglomerates Supervision*)
  - **DPKG** (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan *Department of Financial Conglomerates Supervision*)
  - **DRPD** (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah | *Department of Special Inspection and Regional Banking Supervision*)
- **DKBY** (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah | *Deputy Commissioner of the Supervision of Government-Owned and Islamic Banks*)
  - **DPBP** (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah *Department of Government-Owned Banks Supervision*)
  - **DPBS** (Departemen Perbankan Syariah *Department of Islamic Banking*)

Catatan :
Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PDK.02/2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

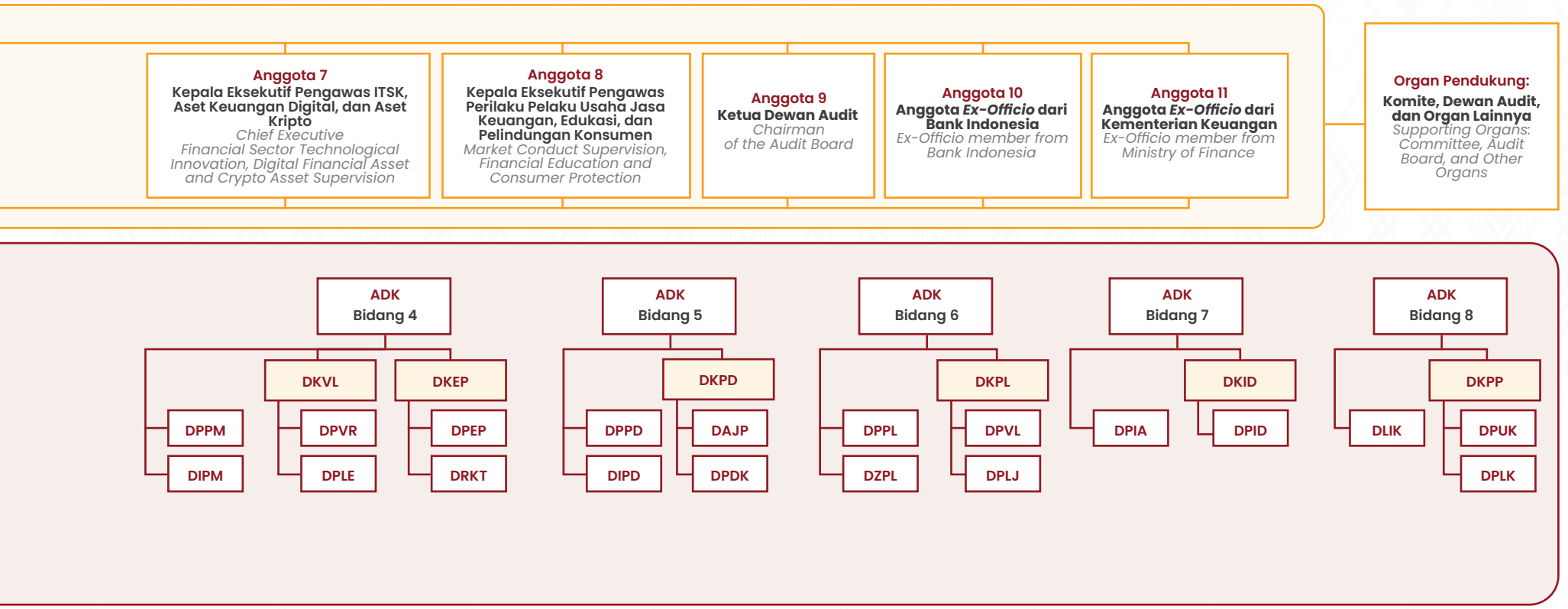

Pengawasan | *Supervision*

- **DKBW** (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta *Deputy Commissioner of Private Banks Supervision*)
  - **DPW1** (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 *Department of Private Banks Supervision 1*)
  - **DPW2** (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 *Department of Private Banks Supervision 2*)
- **DPPM** (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal | *Department of Capital Market Regulation and Development*)
- **DIPM** (Departemen Perizinan Pasar Modal *Department of Capital Market Licensing*)
- **DKVL** (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek | *Deputy Commissioner of Investment Management of Capital Market and Securities Institution Supervision*)
  - **DPVR** (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional | *Department of Investment Management and Regional Capital Market Supervision*)
  - **DPLE** (Departemen Pengawasan Lembaga Efek *Department of Securities Institution Supervision*)
  - **DKEP** (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus | *Deputy Commissioner of Issuer and Securities Transactions Supervision and Special Audit*)
  - **DPEP** (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik *Department of Issuer and Public Companies Supervision*)
  - **DPKT** (Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek *Department of Special Inspection, Derivative Finance, Carbon Exchange and Securities Transaction Supervision*)
- **DPPD** (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP *Department of Insurance, Surety and Pension Funds Regulation and Development*)
- **DIPD** (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PPDP | *Department of Licensing, Specialized Inspection and Quality Control for Insurance, Surety and Pension Funds*)
- **DKPD** (Deputi Komisioner Pengawas PPDP | *Deputy Commissioner of Insurance, Surety and Pension Funds Supervision*)
  - **DAJP** (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang *Department of Insurance and Ancillary Services Institution Supervision*)
  - **DPDK** (Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus | *Department of Surety and Pension Funds Supervision and Specialized Inspection*)
- **DPPL** (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PVML *Department of Regulation and Development for Venture Capital, Financing, Microfinance and Other Financial Institutions*)
- **DZPL** (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PVML | *Department of Licensing, Special Inspection and Supervision of Quality Control for Venture Capital, Financing, Microfinance and Other Financial Institutions*)
- **DKPL** (Deputi Komisioner Pengawas PVML | *Deputy Commissioner of Venture Capital, Financing, Microfinance and Other Financial Institution Supervision*)
  - **DPVL** (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan , PMV, dan LKK | *Department of Venture Capital, Financing and Specialized Financial Institution Supervision*)
  - **DPLJ** (Departemen Pengawasan LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | *Department of Microfinance and Other Financial Institutions Supervision*)
- **DPIA** (Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD | *Department of Regulation and Development for Financial Sector Technology Innovation, Digital Asset and Crypto Asset*)
- **DKID** (Deputi Komisioner Pengawas IAKD | *Deputy Commissioner of Financial Sector Technology Innovation, Digital Asset and Crypto Asset Supervision*)
  - **DPID** (Departemen Pengawasan IAKD | *Department of Financial Sector Technology Innovation, Digital Asset and Crypto Asset Supervision*)
- **DLIK** (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi | *Department of Financial Literacy, Inclusion and Communication*)
- **DKPP** (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen | *Deputy Commissioner of Market Conduct, Education and Consumer Protection Supervision*)
  - **DPUK** (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan *Department of Market Conduct Supervision*)
  - **DPLK** (Departemen Perlindungan Konsumen *Department of Consumer Protection*)

Notes :
Pursuant to BOC Regulation (PDK) Number 2/PDK.02/2024, as the fourth amendment to PDK Number 1/PDK.02/2023 concerning the Financial Services Authority Organisation (Organisational Structure of the Financial Services Authority)

I.8 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK

OJK Regional Offices and Branch Offices

1. Peta Sebaran Kantor OJK Daerah

1. OJK Regional Office Distribution Map

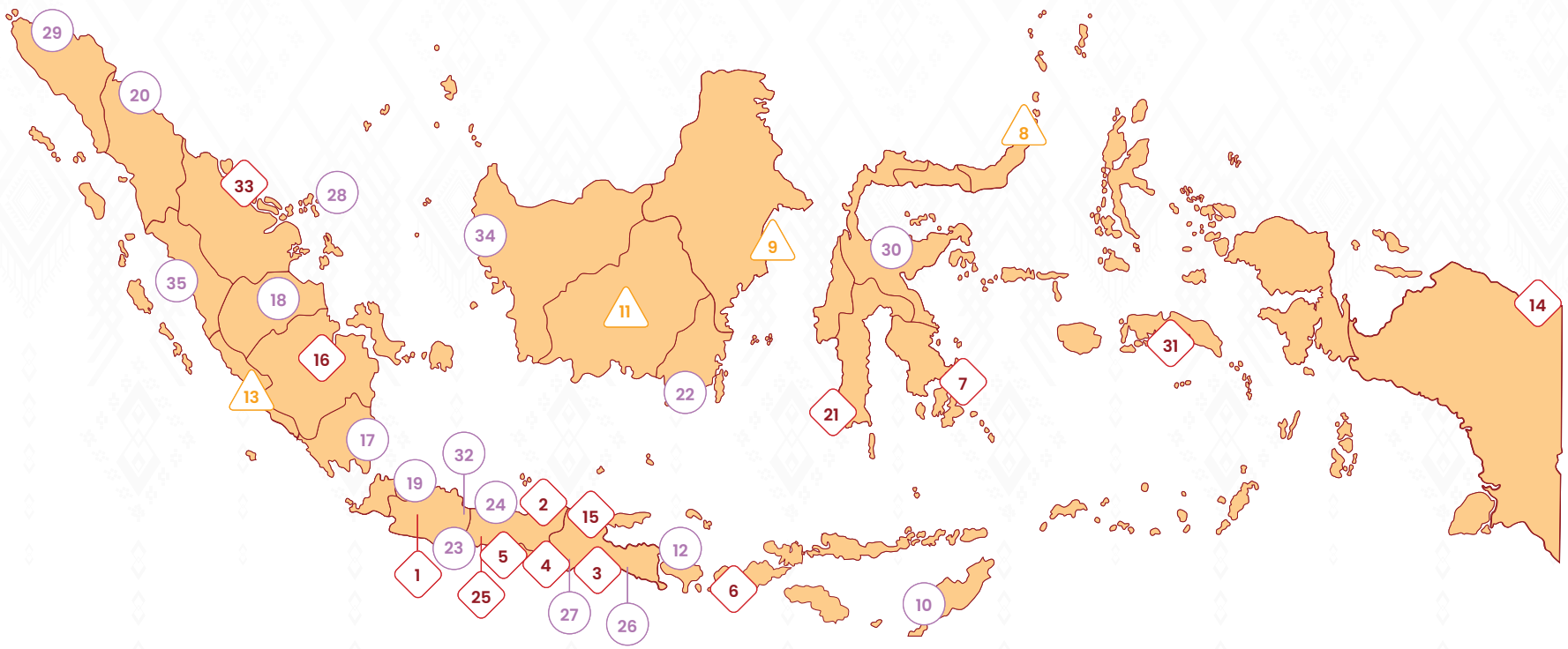

Milik OJK
Owned by OJK

Sewa dari Swasta / Bank Indonesia
Leased Building from Private Parties / Bank Indonesia

Pinjam Pakai Gedung Pemerintah Daerah
Occupying Provincial Government

Gambar 1.3 Peta Sebaran Kantor OJK Daerah
Figure 1.3 OJK Regional Office Distribution Map

No.	Lokasi Kantor | *Office Location*				
1.	Kantor OJK Prov. Jawa Barat	*OJK Office of West Java*	19.	Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Prov. Banten	*OJK Office of Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi and Banten*
2.	Kantor OJK Prov. Jawa Tengah	*OJK Office of Central Java*	20.	Kantor OJK Prov. Sumatera Utara	*OJK Office of North Sumatera*
3.	Kantor OJK Malang	*OJK Office of Malang*	21.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	*OJK Office of South and West Sulawesi*
4.	Kantor OJK Solo	*OJK Office of Solo*	22.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Selatan	*OJK Office of South Kalimantan*
5.	Kantor OJK Prov. D.I. Yogyakarta	*OJK Office of Special Region of Yogyakarta*	23.	Kantor OJK Tasikmalaya	*OJK Office of Tasikmalaya*
6.	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Barat	*OJK Office of. West Nusa Tenggara*	24.	Kantor OJK Tegal	*OJK Office of Tegal*
7.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara	*OJK Office of Southeast Sulawesi*	25.	Kantor OJK Purwokerto	*OJK Office of Purwokerto*
8.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara	*OJK Office of North Sulawesi, Gorontalo and North Maluku*	26.	Kantor OJK Jember	*OJK Office of Jember*
9.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	*OJK Office of East and North Kalimantan*	27.	Kantor OJK Kediri	*OJK Office of Kediri*
10.	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur	*OJK Office of East Nusa Tenggara*	28.	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau	*OJK Office of Riau Islands*
11.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah	*OJK Office of Central Kalimantan*	29.	Kantor OJK Prov. Aceh	*OJK Office of Aceh*
12.	Kantor OJK Prov. Bali	*OJK Office of Bali*	30.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah	*OJK Office of Central Sulawesi*
13.	Kantor OJK Prov. Bengkulu	*OJK Office of Bengkulu*	31.	Kantor OJK Prov. Maluku	*OJK Office of Maluku*
14.	Kantor OJK Prov. Papua	*OJK Office of Papua*	32.	Kantor OJK Cirebon	*OJK Office of Cirebon*
15.	Kantor OJK Prov. Jawa Timur	*OJK Office of East Jawa*	33.	Kantor OJK Prov. Riau	*OJK Office of Riau*
16.	Kantor OJK Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	*OJK Office of South Sumatera and Bangka Belitung Islands*	34.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat	*OJK Office of West Kalimantan*
17.	Kantor OJK Prov. Lampung	*OJK Office of Lampung*	35.	Kantor OJK Prov. Sumatera Barat	*OJK Office of West Sumatera*
18.	Kantor OJK Prov. Jambi	*OJK Office of Jambi*			

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I.9 Peristiwa Penting 2023
Event Highlights in 2023

2 Januari | *2nd January* 2023

Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023
Opening of Trading on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2023

Pada 2 Januari 2023, OJK membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden berharap kinerja Pasar Modal Indonesia yang semakin baik akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023.

On 2nd January 2023, OJK kicked off trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX), attended by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. The President expressed hope that capital market performance would continue to strengthen national economic growth in 2023.

30 Januari | *30th January* 2023

Rapat Berkala KSSK Pertama tahun 2023
First KSSK Periodic Meeting of 2023

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV tahun 2022 terus membaik, hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I tahun 2023 yang digelar pada Senin (30/01).

At the press conference for the First KSSK Periodic Meeting of 2023 was held on Monday, 30th January 2023, the Financial System Stability Committee (KSSK) confirmed that financial system stability had improved in the fourth quarter of 2022.

6 Februari | *6th February* 2023

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023
Annual Gathering of the Financial Services Industry (PTIJK) 2023

Presiden Joko Widodo menghadiri PTIJK 2023 yang digelar pada 6 Februari 2023 di Jakarta. PTIJK 2023 mengangkat tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi".

President Joko Widodo attended the Annual Gathering of the Financial Services Industry (PTIJK) 2023 on 6th February 2023 in Jakarta, entitled Strengthening the Financial Services Sector to Maintain Economic Growth.

15 Februari | *15th February* 2023

OJK Terpilih Sebagai Ketua ACMF 2023
OJK Selected to Chair the ASEAN Capital Markets Forum in 2023

OJK menjadi Ketua ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) tahun 2023 menggantikan *Securities and Exchange Regulator of Cambodia* (SERC). Pertemuan ini membahas inisiatif untuk mengatasi tantangan dan mendorong kontribusi Pasar Modal ASEAN terhadap ekonomi kawasan serta pencapaian target ekonomi hijau. Sebagai pemimpin ACMF tahun ini, OJK diharapkan membawa kolaborasi yang lebih besar untuk pertumbuhan ASEAN.

OJK was selected to Chair the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) in 2023, succeeding the Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC). The Forum discussed initiatives to overcome the challenges and increase the contribution of the capital markets in ASEAN to the regional economy and achieve green economy targets. As chair of the ACMF in 2023, OJK nurtured greater collaboration for ASEAN growth.

16 Maret | *16th March* 2023

Sinergi Lembaga Pemeringkat Kredit Dorong Pembiayaan UMKM
Synergy among Credit Rating Agencies to Foster MSME Financing

OJK mendorong dilakukannya sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan *Innovative Credit Scoring* (ICS) untuk semakin memperluas informasi kinerja debitur yang bisa meningkatkan pembiayaan kredit khususnya bagi UMKM.

OJK nurtures synergy between the Credit Bureau (LPIP) and Innovative Credit Scoring (ICS) to expand information on debtor performance that can increase lending/financing, particularly to MSMEs.

27 April | *27th April* 2023

Sinergi OJK Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan melalui Kemandirian Ekonomi Desa
OJK Synergy Promotes Financial Inclusion through Economic Self-Reliance in Villages

OJK bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam TPAKD terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

OJK, in collaboration with the central and regional governments within the TPAKD framework, continues to synergize efforts to promote financial inclusion through economic self-reliance in villages, aiming to accelerate regional economic growth.

12 Mei | *12th May* 2023

OJK Perkuat Hubungan Kerja Sama dengan *Financial Supervisory Service* Korea
OJK Strengthens Cooperative Relationship with the Financial Supervisory Service of Korea

OJK terus berupaya meningkatkan pengawasan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen melalui penguatan Penandatanganan *Memorandum of Agreement* tentang *secondment* program antara OJK dan FSS untuk peningkatan kapasitas pegawai/SDM.

OJK continues to enhance the supervision of the financial services sector and consumer protection by strengthening the Memorandum of Agreement on the secondment program between OJK and FSS to improve employee and human resource capacity.

15 Mei | *15th May* 2023

OJK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sepakat Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan
OJK and the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Agree to Strengthen Financial Services Sector Supervision

Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyepakati peningkatan kerja sama untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola.

The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) by the Chairman of OJK, Mahendra Siregar, and Chairman of BPKP, Muhammad Yusuf, agreed to increase cooperation to strengthen financial services sector supervision and increase governance effectiveness.

23 Mei | *23rd May* 2023

OJK Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan OJK Tahun 2022

OJK Receives Unqualified Opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia for the Financial Statements in 2022

Seremonial penyerahan laporan dilakukan di Kantor BPK, dan disaksikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua BPK, serta jajaran Dewan Komisioner OJK. OJK telah menjaga opini WTP sejak pertama kali menerbitkan Laporan Keuangan pada 2013.

The ceremonial handover of the report took place at the BPK Office, witnessed by the Chairman of the OJK Board of Commissioners, the Chairman of BPK, and the members of the OJK Board of Commissioners. OJK has maintained an unqualified opinion since it first issued Financial Statements in 2013.

22 Juni | *22nd June* 2023

Peresmian Program Ekosistem Keuangan Inklusif

Inauguration of the Inclusive Financial Ecosystem Program

OJK terus melakukan berbagai langkah progresif meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

OJK pursues various progressive measures to increase public access to finance, particularly in rural areas through the Inclusive Finance Ecosystem (EKI) program, which is expected to accelerate development and ameliorate public prosperity in rural areas.

9 Juli | *9th July* 2023

Siapkan Penyelenggaraan Bursa Karbon, OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Preparing for the Carbon Exchange, OJK Strengthens Cooperation with the Ministry of Environment and Forestry

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menandatangani Nota Kesepahaman mengenai perluasan kerja sama serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.

The Chairman of OJK, Mahendra Siregar, and Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya Bakar, signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning the expansion of cooperation and coordination in the implementation of tasks and functions at both institutions.

9 Agustus | *9th August* 2023

Pelantikan Dua Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Appointment of Two New Members of the OJK Board of Commissioners for the Supervision of Financing Institutions and Financial Sector Technology Innovation

Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik dua Anggota Dewan Komisioner OJK yaitu Agusman dan Hasan Fawzi, di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta.

The Chief Justice of the Supreme Court, H. M. Syarifuddin, administered the oath of office and inaugurated two members of the OJK Board of Commissioners, namely Agusman and Hasan Fawzi at the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Jakarta.

26 September | *26th September* 2023

Presiden Resmikan Bursa Karbon Indonesia
President Launches Indonesian Carbon Exchange

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan secara resmi Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Gedung BEI, Jakarta.

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially launched the Indonesia Carbon Exchange, operated by the Indonesia Stock Exchange (IDX) in accordance with OJK regulations, at the Main Hall of the Indonesia Stock Exchange in Jakarta.

10 Oktober | *10th October* 2023

OJK dan Ombudsman Perkuat Kerja Sama Pelayanan Publik
OJK and Ombudsman Strengthen Cooperation for Public Services

OJK dan Ombudsman RI menyepakati penguatan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta.

OJK and the Ombudsman of the Republic of Indonesia agreed to strengthen cooperation for public services in the financial services sector through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) in Jakarta.

12 Oktober | *12th October* 2023

OJK Dorong Penguatan Fungsi Audit Internal Pada Sektor Jasa Keuangan di Era Digitalisasi
OJK Promotes Stronger Internal Audit Function in the Financial Services Sector in Era of Digitalisation

OJK mendorong penerapan GRC secara terintegrasi di SJK sebagai upaya mewujudkan stabilitas, pertumbuhan, dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

OJK promotes the implementation of integrated GRC in the financial services sector to create stability, growth, and strength in the financial services industry for the benefit of the national economy and public prosperity.

13 Oktober | *13th October* 2023

Pertemuan Tahunan (Ijtima' Sanawi) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2023
Annual Gathering (Ijtima' Sanawi) of the Sharia Supervisory Board (DPS) in 2023

OJK bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima' Sanawi) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2023 dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan peran DPS.

In conjunction with the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), OJK hosted the Annual Gathering (Ijtima' Sanawi) of the Sharia Supervisory Board (DPS) 2023 to foster development of the Islamic economy and finance in Indonesia through strengthening the role of DPS.

23 Oktober | *23rd October* 2023

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027
Launching the Indonesia Insurance Development and Strengthening Roadmap 2023-2027

OJK secara resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027 dengan mengambil tema *"Restoring Confidence through Industrial Reform"*.

OJK officially launched the Indonesia Insurance Development and Strengthening Roadmap 2023-2027, with the theme "Restoring Confidence through Industrial Reform".

26 Oktober | *26th October* 2023

Syariah Financial Fair (SYAFIF)
Syariah Financial Fair (SYAFIF)

OJK pertama kali menginisiasi kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Oktober 2023 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan. Dalam kesempatan dimaksud, OJK memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tema Edukasi Keuangan Syariah melalui teka-teki silang (TTS) terpanjang di Indonesia.

OJK launched the inaugural Syariah Financial Fair (SYAFIF) in Yogyakarta from October 26-29th, 2023, as part of the culminating activities of the Financial Inclusion Month. At this event, OJK achieved a significant milestone by establishing the longest crossword puzzle in Indonesia, focused on the theme of Syariah Financial Education, thereby earning recognition from the Indonesian World Records Museum (MURI).

10 November | *10th November* 2023

Peluncuran *Roadmap Fintech P2P Lending* 2023-2028
Launch of the FinTech P2P Lending Roadmap 2023-2028

OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 sebagai upaya mewujudkan industri *fintech P2P lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan, pelindungan konsumen, serta pertumbuhan ekonomi.

OJK launched the FinTech P2P Lending Roadmap 2023-2028 to create and maintain a sound FinTech P2P Lending industry with integrity and oriented towards financial inclusion, consumer protection and economic growth.

10 November | *10th November* 2023

OJK bersama AFTECH dan AFSI Hadirkan Bulan *Fintech* Nasional 2023
OJK hosts National FinTech Month 2023 in conjunction with the AFTECH and AFSI

OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menggelar Bulan *Fintech* Nasional 2023, sebagai langkah pemangku kepentingan di sektor teknologi keuangan memperluas peran positif dan meningkatkan sinergi kolaborasi untuk memajukan ekonomi digital di Indonesia.

In conjunction with the Indonesia FinTech Association (AFTECH) and Indonesia Sharia FinTech Association (AFSI), OJK hosted National FinTech Month 2023 as a way for stakeholders in the FinTech sector to expand its positive role and increase collaborative synergy to advance the digital economy in Indonesia.

23 November | *23rd November* 2023

OJK Bersama Asosiasi *Fintech* Luncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence)* di Industri Teknologi

In conjunction with FinTech Associations, OJK Launches Code of Ethics for Artificial Intelligence in the Technology Industry

OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana (ALUDI) meluncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence)* pada Pembukaan Acara Puncak 5th *Indonesia Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2023.

In conjunction with the Indonesia FinTech Association (AFTECH), Indonesia Sharia FinTech Association (AFSI), FinTech Lenders Association (AFPI) and Indonesia Securities Crowdfunding Services Association (ALUDI), OJK launched the Code of Ethics for Artificial Intelligence at the 5th Indonesia FinTech Summit & Expo (IFSE) 2023.

27 November | *27th November* 2023

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027

Launch of Islamic Banking Development and Strengthening Roadmap (RP3SI) 2023-2027

OJK secara resmi meluncurkan Peja Jalan (*Roadmap*) Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema "Perbankan Syariah yang Tangguh, untuk Masyarakat yang Sejahtera".

OJK Officially launched the Islamic Banking Development and Strengthening Roadmap (RP3SI) 2023-2027, with the theme "Solid Islamic Banking Industry for a Prosperous Society."

12 Desember | *12th December* 2023

Peluncuran Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2023-2027

Launch of Supervision of Conduct of Financial Service Providers as well as Consumer Education and Protection Roadmap 2023-2027

OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2023-2027, bertujuan mewujudkan masyarakat yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berintegritas.

OJK Launched the Supervision of Conduct of Financial Service Providers as well as Consumer Education and Protection Roadmap 2023-2027, which aims to create a literate, inclusive and protected society along with integrated Financial Service Providers (FSP).

29 Desember | *29th December* 2023

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023

Closing Trading of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2023

Anggota Dewan Komisioner OJK, Pimpinan *Self-Regulatory Organization* (SRO), dan perwakilan pelaku industri Pasar Modal menghadiri Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023 di Jakarta.

Members of the OJK Board of Commissioners, leaders of self-regulatory organisations (SRO) and representatives of the capital market industry closed trading of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2023 in Jakarta.

I.10 Penghargaan
Awards

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Corruption Eradication Commission (KPK)
Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik
Best Gratification Control Unit

Badan Publik Informatif
Informative Public Agency
Badan Publik dengan Kategori Informatif Terbaik Nasional Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Best Informative Public Agency in the category of State Institutions and Non-Ministerial Government Institutions

BARESKRIM POLRI
Criminal Investigation Agency (BARESKRIM)
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga
Law Enforcement Against Financial Services Sector Crimes by a Government Ministry/Agency in the Civil Servant Investigation Category

4

5

Media Relations Awards 2023
Media Relations Awards 2023

- Pemimpin Lembaga Terpopuler di Media Arus Utama 2023
- *Gold Winner* Kategori *Press Conference*
- *Silver Winner* Kategori *Press Release*
- *Silver Winner* Kategori *Press Gathering*
- *Bronze Winner* Kategori *Media Special Program*
- *Bronze Winner* Kategori *Press Release*
- *Most Popular Institutional Leaders in Mainstream Media 2023*
- *Gold Winner in Press Conference Category*
- *Silver Winner in Press Release Category*
- *Silver Winner in Press Gathering Category*
- *Bronze Winner in Media Special Program Category*
- *Bronze Winner in Press Release Category*

Public Relations Indonesia Awards 2023
Public Relations Indonesia Awards 2023

- Terpopuler di Media Cetak dan *Online* 2022 Sub Kategori Lembaga Negara
- *Gold Winner Owned Media* – Media Cetak Integrasi Edisi September 2022
- *Silver Winner Owned Media* – Media Cetak Integrasi Edisi Desember 2022
- *Bronze Winner* Kanal Digital – Media Sosial *Instagram* @ojkindonesia
- *Bronze Winner* Laporan Tahunan – *Annual Report*
- *Most Popular in Print and Online Media 2022, State Institution Subcategory*
- *Gold Winner Owned Media – Integrated Print Media September 2022 Edition*
- *Silver Winner Owned Media – Integrated Print Media December 2022 Edition*
- *Bronze Winner Digital Channels – Instagram Social Media @ojkindonesia*
- *Bronze Winner – Annual Report*

II

Arah Strategis OJK 2023

OJK's 2023 Strategic Direction

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 disusun sebagai arah pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta komitmen OJK ke depan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan dan mempersiapkan SJK dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Selain itu, OJK menetapkan strategi dan arah kebijakan jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027 sebagai acuan pelaksanaan tugas kepemimpinan ADK tahun 2022-2027. *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027 disusun dengan menyelaraskan Visi dan Misi OJK serta mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Jasa Keuangan ke arah yang lebih baik.

The Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025 has been formulated to guide the development of the Financial Services Sector (SJK) and reflect OJK's future commitment to enhancing resilience and preparing SJK to face regional and global competition. Additionally, OJK has set forth a medium-term strategy and policy direction for the next five years, encapsulated in the OJK Destination Statement 2022-2027, which serves as a reference for the leadership tasks of ADK for 2022-2027. The OJK Destination Statement 2022-2027 was crafted to align with OJK's Vision and Mission and incorporate input from stakeholders to steer the growth of the Financial Services Industry towards better prospects.

II.1 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025

Indonesia Financial Services Sector Master Plan for 2021-2025

OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan peran SJK dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap kesinambungan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan dari tujuan tersebut, OJK menetapkan arah kebijakan ke depan yang selaras dengan dinamika SJK terkini.

OJK has a strong commitment to enhancing SJK's role in driving economic growth while maintaining the stability of the financial system. Based on the mandate of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, the OJK was established to ensure that all activities within the SJK are conducted in an orderly, fair, transparent, and accountable manner; capable of creating a sustainably growing and stable financial system; and able to protect the interests of consumers and the public. As part of achieving these objectives, the OJK sets forward-looking policy directions in line with the current dynamics of the SJK.

Arah kebijakan ke depan tersebut dituangkan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). MPSJKI berisikan kerangka dasar arah strategis pengembangan SJK terintegrasi dan komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan SJK untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

These forward-looking policy directions are outlined in the Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI). The MPSJKI contains the basic framework for the strategic direction of integrated and comprehensive SJK development, serving as a guideline for the development of the SJK to create a stable, contributive, and inclusive financial industry that supports Indonesia's economic growth.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) merupakan kerangka dasar arah kebijakan strategis dalam mengembangkan dan mendorong Sektor Jasa Keuangan untuk tumbuh berkelanjutan yang diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). OJK telah menerbitkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang mengusung tema "Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan". *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2021–2025 juga mendorong kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor Penggerak utama (*enabler*) untuk mendorong pencapaiannya.

The Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) consists of a basic framework for strategic policies to develop the financial service industry's sustainable growth, particularly, in the context of how it aligns with the Indonesian government's National Medium Term Development Plan (RPJMN). OJK published the 2021-2025 MPSJKI along with the theme of "Recovering the National Economy and Increasing the Resilience and Competitiveness of the Financial Services Sector". The plan is essentially focused on three areas, namely: (1) Strengthening Resilience and Competitiveness; (2) Developing Financial Services Ecosystem; and (3) Accelerating Digital Transformation. In addition, MPSJKI 2021–2025 encouraged collaboration and cooperation between stakeholders as they are the main actors who would drive these achievements.

MPSJKI 2021-2025 ini dijadikan acuan bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan

The 2021-2025 MPSJKI has been used as a reference by the financial services industry as well as other stakeholders who are involved in the development of the financial services sector to provide greater added value to the national economy and improve people's welfare, while at the same time maintain the financial system's stability.

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan
Enhancing Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

MPSJKI 2021-2025

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing
Strengthening Resilience and Competitiveness

Memperkuat **permodalan dan akselerasi konsolidasi** LJK
Strengthening capital and accelerating consolidation of financial services institutions

Memperkuat **tata kelola, manajemen risiko**, dan *market conduct*
Strengthening governance, risk management, and market conduct

Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau **standar internasional**
Synchronising financial services sector regulation and supervision, in reference to the international best practices and/or standards

Memperkuat **pengawasan terintegrasi** lintas sektor (*cross cutting issues*) dan konglomerasi keuangan
Strengthening integrated supervision of cross cutting issues and financial conglomerates

Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan
Developing the Financial Services Ecosystem

Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung **sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah**
Improving the role of financial services to support priority economic sectors, SMEs, job creation, and regional development

Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah **keuangan syariah** dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah
Developing financial services sector integration to increase value added in Islamic finance to develop the halal industry and Islamic economic ecosystem

Memperluas **akses keuangan** dan meningkatkan **literasi keuangan** masyarakat
Expanding financial access and increasing financial literacy

Memperkuat **perlindungan konsumen** SJK
Strengthening consumer protection in financial services sector

Mendorong percepatan **pedalaman pasar keuangan**
Supporting multi-activities business expansion at financial services institutions

Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan ***multi-activities business***
Supporting multi-activities business expansion at financial services institutions

Meningkatkan peran jasa keuangan dalam ***sustainable finance*** untuk mencapai *SDGs*
Increasing the role of financial services in sustainable finance to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)

Akselerasi Transformasi Digital
Accelerating Digital Transformation

Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi **digital SJK**
Fostering innovation and accelerating digital transformation of the financial services sector

Mengembangkan **pengaturan** yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital
Developing regulations that support digital financial sector ecosystem

Meningkatkan **kapasitas SDM** di SJK seiring dengan perkembangan industri digital
Improving HR capacity in the financial services sector aligned with digital industry development

Memperkuat **peran riset** untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK
Strengthening the role of research to support digital innovation and transformation in the financial services sector

Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI (*SupTech*) di OJK dan pemanfaatan *RegTech* oleh LJK
Accelerating the implementation of IT-based supervision (SupTech) at OJK and utilisation of regulatory technology (RegTech) by financial services institutions

Melakukan ***Business Process Re-engineering*** untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan
Implementing Business Process Re-engineering to improve the quality of licensing, regulation, and supervision

Kolaborasi dan Kerja Sama antar Pemangku Kepentingan (*Enabler*)
Collaboration and Cooperation among Stakeholders (Enablers)

Gambar 2.1 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI 2021-2025)
Figure 2.1 Indonesian Financial Services Sector Master Plan 2021-2025

II.2 *Destination Statement* OJK 2022-2027

OJK Destination Statements 2022-2027

Perencanaan dan manajemen strategi OJK mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang memasuki tahap Perumusan Strategi jangka menengah 5 (lima) tahun. Sebagai acuan pelaksanaan tugas selama periode kepemimpinan ADK, Dewan Komisioner telah menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027 (sebagai strategi jangka menengah lima tahun).

Destination Statement OJK 2022-2027 disusun berdasarkan tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif *Stakeholder* yang mencerminkan *outcome* yang akan dituju dalam "Mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dalam rangka Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi dan Stabilitas Sektor Keuangan";
2. Perspektif *Internal Business Process*, mencerminkan *outcome* atas pelaksanaan/penyempurnaan/pengembangan proses bisnis kegiatan utama dalam organisasi untuk mendukung pencapaian perspektif *Stakeholder* secara keseluruhan. Pada perspektif ini terdapat tiga sasaran yang dituju, antara lain penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip *prudential*, keterbukaan, dan *market conduct*, yang terintegrasi; peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan; dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penguatan perlindungan konsumen; dan
3. Perspektif *Strategic Support* (*enabler*), mencerminkan *outcome* atas elemen pendukung dalam bentuk pengembangan SDM, penguatan sistem informasi dan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola sebagai *enabler* untuk merealisasikan sasaran *Destination Statement* secara keseluruhan.

Destination Statement OJK Tahun 2022-2027 yang telah disusun juga diselaraskan dengan Visi Misi OJK serta mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Jasa Keuangan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027 dijabarkan ke dalam Indikator Keberhasilan (*milestone*)/target tahunan sebagai acuan OJK dalam melakukan penyusunan Peta Strategi, *Scorecard*, Program Kerja, dan Anggaran serta sebagai tolak ukur dari kinerja OJK selama lima tahun mendatang.

Strategic planning and management processes in OJK referred to a system called the Strategy, Budget, and Performance Management System (MSAK) and it entered its 5 (five) year medium-term formulation stage. As a reference for carrying out tasks during the ADK leadership period, the Board of Commissioners has confirmed the strategy and policy directions included in the OJK Destination Statement for 2022-2027 (as a five year medium-term strategy).

The OJK Destination Statement 2022-2027 is prepared based on three perspectives, namely:

1. *Stakeholder Perspective. This reflects the desired outcome of, "Developing a Financial Services Industry that is Healthy, Efficient and with Integrity, while Strengthening Consumer and Community Protection, in the context of Market Deepening, Enchancement of the Financial Sector Inclusion and Maintenance of the Financial Sector Stability";*
2. *Internal Business Process Perspective. This refers to the outcome of the implementation, improvement, and development of business processes and activities within the organization that support the attainment of the Stakeholder Perspective as a whole. In this perspective, there are three targets aimed at strengthening an integrated function of regulation, supervision and legal enforcement towards the prudential principles, openness and good market conduct. The improvement of service quality and data management in an integrated and transparent manner; and increasing the public's financial literacy and inclusion through education and the strengthening of consumer protections; and*
3. *Strategic Support (enabler) Perspective. This is concerned with the outcome of supporting elements such as human resource development, strengthening information systems and infrastructure, and improving governance as an enabler to realize the overall Destination Statement objectives.*

OJK's 2022-2027 Destination Statement has been aligned with the Vision and Mission and has accommodated input from stakeholders that will encourage growth of the financial services industry. Furthermore, the 2022-2027 Destination Statement is equipped with Success Indicators (milestones)/annual targets which will then be referred to in preparing Strategy Maps, Scorecards, Work Programs, and Budgets, as well as a baseline for OJK performance in the next five years.

Destination Statement OJK 2022-2027
OJK Destination Statement 2022-2027

Visi | *Vision*

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

To become the most trusted supervisory agency for the financial services industry, to protect the interests of consumers and the public, and to be able to make the financial services industry a pillar of the national economy that is globally competitive and can advance public welfare.

Misi | *Mission*

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  Aid the facilitation of all financial services activities in a regular, fair, transparent, and accountable manner.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  Realize a financial system that grows sustainably and steadily.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  Protect the interests of consumers and the public.

DESTINATION STATEMENT

Stakeholder Perspective

Mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan.
Developing a financial services industry that is healthy, efficient, and offers integrity, strengthens consumer and community protection for market deepening, better inclusion and financial sector stability.

Internal Business Process Perspective

S.1. Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Prudential*, Keterbukaan, dan *Market Conduct* yang Terintegrasi.
Strengthening an Integrated Function of Regulation, Supervision and Legal Enforcement towards the Prudential Principles, Openness and Market Conduct.

S.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data secara Terintegrasi dan Transparan.
Improving Service Quality and Data Management in an Integrated and Transparent Manner.

S.3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat melalui Edukasi dan Penguatan Pelindungan Konsumen.
Improving Financial Literacy and Inclusion through Education and Consumer Protections.

Strategic Support Perspective

S.4. Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul.
Delivering Organizational Transformation Through Excellent Human Capital Development.

S.5. Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna, dan Terintegrasi.
Developing an Innovative, Fit for Purpose, and Integrated Information System.

S.6. Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien.
Enhancing Effectiveness and Efficiency of Governance.

NILAI STRATEGIS | *STRATEGIC VALUES*

- **INETGRITAS** *Integrity*
- **PROFESIONALISME** *Professionalism*
- **SINERGI** *Synergy*
- **INKLUSIF** *Inclusive*
- **VISIONER** *Visionary*

PERILAKU KUNCI | *KEY BEHAVIORS*

- **PROAKTIF** *Proactive*
- **KOLABORATIF** *Collaborative*
- **BERTANGGUNG JAWAB** *Responsible*

Gambar 2.2 *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027
Figure 2.2 OJK Destination Statement 2022-2027

III

Tinjauan Industri Sektor Keuangan

Financial Services Sector Overview

Sepanjang 2023, kinerja ekonomi global mengalami perlambatan dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 terutama dipengaruhi konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti. Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Di kawasan Eropa, Euro Area mengalami tekanan stagflasi, sementara inflasi masih persisten tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penurunan inflasi *headline* secara signifikan. Penurunan inflasi ini juga didorong oleh normalisasi harga komoditas global serta keberhasilan kebijakan moneter global dalam meredakan tekanan inflasi. Sejalan dengan masih persistennya inflasi inti, mayoritas bank-bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuannya di level tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*).

Throughout 2023, global economic performance experienced a slowdown and heightened uncertainty. The economic growth of the United States in 2023 was mainly driven by household consumption and the services sector, whereas China's growth slowed due to weakened consumption and a crisis in the property sector. Inflationary pressures remained high, spurred by rising energy and food prices due to geopolitical conflicts, economic fragmentation, and the El Niño phenomenon. In Europe, the Euro Area faced stagflation pressures, while inflation persisted at high levels. The economic slowdown significantly reduced headline inflation. This decrease in inflation was also driven by the normalization of global commodity prices and the success of global monetary policies in alleviating inflationary pressures. Given the persistence of core inflation, most central banks worldwide maintained their policy interest rates at high levels for a prolonged period (higher for longer).

III.1 Perkembangan Perekonomian Dunia 2023
Global Economic Developments 2023

Di 2023, kinerja ekonomi global mengalami moderasi dengan divergensi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara utama global. Di Amerika Serikat (AS), tanda-tanda normalisasi ekonomi telah terlihat dengan potensi meningkatnya *soft landing*. Pemulihan ekonomi AS ini diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi yang tercatat tumbuh 2,5% *yoy* (sebelumnya 1,9% *yoy*), didukung oleh data kinerja konsumsi rumah tangga dan pasar tenaga kerja yang solid. Indikator ketenagakerjaan AS cukup resilien dengan kembali meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor swasta *(nonfarm payrolls)* dan *initial jobless claims* yang terjaga di level rendah. Kinerja manufaktur juga membaik meskipun masih berada di zona kontraksi.

Di kawasan Eropa, Euro Area mengalami tekanan stagflasi dengan ekonomi tumbuh sebesar 0,4% *yoy*, jauh lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya (3,4%), sementara inflasi masih persisten tinggi. Ekonomi terbesar di Euro Area, Jerman, mengalami tantangan resesi selama 2023 didorong oleh permintaan luar negeri terhadap barang-barang Jerman yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sementara sektor rumah tangga masih menahan pengeluaran. Hal ini berdampak pada kinerja manufaktur Euro Area yang terpantau masih dalam zona kontraksi.

Sementara itu, ekonomi Tiongkok 2023 tumbuh sebesar 5,2%, melebihi target resmi 5,0% dan meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,0%. Selain karena *base effect* atas rendahnya pertumbuhan ekonomi di 2022, capaian pertumbuhan perekonomian ini turut didukung oleh berbagai langkah dari pemerintah berupa pemberian *stimulus targeted*. Namun demikian, Tiongkok dinilai kehilangan momentum pemulihan pasca *reopening* ekonominya pada awal 2023 sehingga angka pertumbuhan ini menjadi laju pertumbuhan tahunan yang paling lambat sejak 1990. Hal ini juga sebagai dampak dari krisis properti yang berkepanjangan, konsumsi yang tetap lemah, serta tensi geopolitik dengan AS dan Eropa.

In 2023, the global economy experienced moderation, accompanied by economic growth divergence among several major global players. In the United States (US), early signs of economic normalisation have been observed, thus increasing the potential for a soft landing. The US economic recovery remains intact, as indicated by economic growth recorded at 2.5% yoy, up from 1.9% yoy previously, underpinned by robust household consumption data and a solid labour market. US employment indicators are resilient with employment increasing in the private sector (non-farm payrolls) and a low level of initial jobless claims maintained. Furthermore, manufacturing industry performance also improved despite remaining in a contractionary zone.

In Europe, the euro area succumbed to stagflation pressures, with economic growth of just 0.4% yoy, well below the 3.4% recorded one year earlier, coupled with persistently high inflation. As the largest economy in the euro area, Germany grappled with the challenge of recession throughout 2023, with no signs of recovery in terms of external demand for German goods, and a housing sector disinclined to spend. Such conditions impacted manufacturing performance in the euro area, which remained in a contractionary zone.

Meanwhile, China's economy grew 5.2% in 2023 to exceed the official 5.0% target, up from 3.0% one year earlier. In addition to the base effect of low economic growth recorded in 2022, economic growth in China was supported by several government measures to provide targeted stimuli. Notwithstanding, China is thought to have lost recovery momentum after economic reopening in early 2023, leading to the lowest annual growth rate recorded since 1990. Such conditions also stem from a prolonged property crisis, weak consumption as well as deepening geopolitical tensions with the US and Europe.

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Negara Utama (% *yoy*)
Table 3.1. Economic Growth in Major Global Countries (% yoy)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023
AS | *US*	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5
Zona Eropa | *Eurozone*	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,4
Jepang | *Japan*	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9
Tiongkok | *China*	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2
India | *India*	3,9	-5,8	9,1	7,2	6,7
ASEAN-5 | *ASEAN-5*	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,2
Indonesia | *Indonesia*	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0
Afrika Selatan | *South Africa*	0,3	-6,0	4,7	1,9	0,6

Sumber: | *Source*: IMF, *World Economic Outlook* Januari 2024 | *International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, January 2024*
Catatan: | *Notes*: Estimasi IMF dalam *World Economic Outlook Update*, Januari 2024 | *IMF estimates in World Economic Outlook Update, January 2024*

Tabel 3.2. Perkembangan *Purchasing Manufacturing Index* (PMI) Negara Utama
Table 3.2. PMI Performance in Major Global Economies

PMI Manufaktur | *Manufacturing PMI*	Dec-21	Dec-22	Dec-23
Negara Maju | *Advanced Economies*			
AS | *US*	57,70	46,2	47,9
EU | *EU*	58	47,8	44,4
Jepang | *Japan*	54,3	48,9	47,9
Jerman | *Germany*	57,4	47,1	43,3
Perancis | *France*	55,6	49,2	42,1
Inggris | *UK*	57,9	45,3	46,2
Italia | *Italy*	62	48,5	45,3
Spanyol | *Spain*	56,2	46,4	46,2

PMI Manufaktur | *Manufacturing PMI*	Dec-21	Dec-22	Dec-23
Negara Berkembang | *Emerging Markets*			
Tiongkok | *China*	50,3	47	49
Indonesia | *Indonesia*	53,5	50,9	52,2
Malaysia | *Malaysia*	52,8	47,8	47,9
Filipina | *Philippines*	51,8	53,1	51,5
Thailand | *Thailand*	49,5	52,5	45,1
Vietnam | *Vietnam*	52,5	46,4	48,9
Brazil | *Brazil*	49,8	44,2	48,4
India | *India*	55,5	57,8	54,9

Sumber | *Source:* CEIC

Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penurunan inflasi *headline* secara signifikan. Penurunan inflasi ini juga didorong oleh normalisasi harga komoditas global serta keberhasilan kebijakan moneter global dalam meredakan tekanan inflasi. Inflasi AS terpantau turun menjadi 3,3% pada 2023 (sebelumnya 6,4%) sementara inflasi Eropa sebesar 3,4% (sebelumnya 10,4%). Meskipun tekanan inflasi utama mereda, inflasi inti masih terpantau *sticky* dan berada di atas target yang ditetapkan oleh bank sentral. Hal ini didorong kenaikan harga energi dan pangan serta adanya gangguan dalam rantai pasokan yang terjadi di penghujung 2023. Berbeda dengan AS dan Eropa, ekonomi Tiongkok mengalami tantangan deflasi -0,3% *yoy* pada 2023 sejalan dengan lemahnya permintaan konsumen karena ketidakpastian pemulihan ekonomi.

Economic moderation lowered headline inflation significantly. The normalisation of international commodity prices and successful monetary policy efforts globally to rein in inflationary pressures have also decreased inflation. US inflation was observed to fall to 3.3% in 2023 from 6.4% in 2022, with inflation in Europe retreating to 3.4% from 10.4%. Despite milder headline inflationary pressures, core inflation remained sticky and above the targets set by central banks on the back of rising food and energy prices along with supply chain disruptions towards the end of 2023. Departing from trends in the US and Europe, China's economy recorded -0.3% yoy deflation in 2023 in response to soft consumer demand given economic recovery uncertainty.

Tabel 3.3. *Headline* dan *Core Inflation* Negara Utama (% *yoy*)
Table 3.3. Headline and Core Inflation in Major Global Economies (% yoy)

Negara | *Countries*		2019	2020	2021	2022	2023
AS | *US*	*Headline*	2,3	1,3	7,2	6,4	3,3
	Core	2,3	1,6	5,5	5,7	3,9
Uni Eropa | *European Union*	*Headline*	1,7	0,3	5,4	10,4	3,5
	Core	1,7	0,9	3,1	8,1	4,3
Jepang | *Japan*	*Headline*	0,8	-1,1	0,9	3,9	2,6
	Core	0,9	-0,4	-0,7	3,0	3,7
Tiongkok | *China*	*Headline*	4,5	0,2	1,4	1,8	-0,3
	Core	1,4	0,4	1,2	0,7	0,6
India | *India*	*Headline*	7,3	4,6	5,7	5,8	5,7
	Core	3,8	5,7	6,0	6,1	3,9
Indonesia | *Indonesia*	*Headline*	2,6	1,7	1,9	5,5	12,6
	Core	3,0	1,6	1,6	3,4	1,8
Afrika Selatan | *South Africa*	*Headline*	3,9	2,9	5,9	7,2	5,1
	Core	3,8	3,3	3,4	4,9	4,5

Sumber | *Source:* CEIC

Sejalan dengan masih persistennya inflasi inti, mayoritas bank-bank sentral dunia mempertahankan suku bunga acuannya di level tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Sepanjang 2023, The Fed menaikkan suku bunga acuannya empat kali pada FOMC *Meeting* 2023. Sementara itu, di Eropa, *stance* Bank-Bank Sentral relatif lebih *hawkish* dengan peningkatan suku bunga acuan ECB 250 bps dan *BoE* 175 *bps*. Hal ini seiring tingkat inflasi di Eropa yang masih persisten dengan kondisi ekonomi yang belum solid dibandingkan dengan AS. Sementara di Tiongkok, People Bank of China (PBoC) terpantau menurunkan suku bunga acuannya dua kali selama 2023 masing-masing sebesar 10 *bps* sejalan dengan perekonomian Tiongkok yang melambat. Kebijakan *higher for longer* pada mayoritas bank sentral dunia, mendorong pengetatan likuiditas global yang tercermin dari tindakan investor yang cenderung menarik investasi mereka dari pasar yang lebih berisiko.

In line with persistent core inflation, most central banks globally maintained higher for longer policy rates. In 2023, the US Federal Reserve hiked its Federal Funds Rate (FFR) four times at its FOMC meetings. Meanwhile, the stance of central banks in Europe was more hawkish, with the ECB raising interest rates by 250 bps and the BoE by 175 bps, in the face of persistent inflationary pressures and weaker economic conditions than in the US. In China, the People's Bank of China (PBoC) lowered its policy rate twice in 2023 by 10 bps each time in response to economic moderation. The higher for longer policy adopted by most central banks globally tightened liquidity, triggering a global rebalancing as investors withdrew from higher risk markets.

Tabel 3.4. Pergerakan Suku Bunga Acuan Global
Table 3.4. Global Policy Rate Movements

Negara | *Countries*	*Policy Rate Dec-22*	*Policy Rate Dec-23*	*Total Change (bps)*
AS | *US*	4,5%	5,5%	100
Zona Eropa | *Eurozone*	2,5%	4,5%	200
Inggris | *UK*	3,5%	5,25%	175
Jepang | *Japan*	-0,1%	-0,1%	0
Korea Selatan | *South Korea*	3,25%	3,5%	25
Australia | *Australia*	3,1%	4,35%	125
Selandia Baru | *New Zealand*	4,25%	5,5%	125
Kanada | *Canada*	4,25%	5,0%	75
Tiongkok | *China*	3,65%	3,45%	-20
India | *India*	6,25%	6,50%	25
Indonesia | *Indonesia*	5,50%	6,0%	50
Thailand | *Thailand*	1,25%	2,5%	125
Filipina | *Philippines*	5,5%	6,5%	100
Malaysia | *Malaysia*	2,75%	3,0%	25

Sumber | *Source:* CEIC, Bloomberg

Tensi geopolitik Rusia-Ukraina mereda sementara konflik regional di wilayah Arab cenderung mengalami eskalasi terbatas. Namun demikian, fragmentasi geopolitik yang memicu deglobalisasi terus berlanjut, terutama terkait dengan proteksionisme yang diterapkan oleh AS dan Tiongkok. AS telah mengadopsi kebijakan proteksionis yang agresif, termasuk peningkatan tarif impor dan pembatasan investasi asing, utamanya produk dari Tiongkok sebagai bagian dari strategi *"America First"* yang dipromosikan oleh pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, Tiongkok juga telah mengambil langkah-langkah proteksionis, seperti memperkuat kendali atas teknologi dan data serta mendorong pengembangan industri dalam negeri melalui kebijakan "*Made in China* 2025". Hal ini telah menyebabkan ketegangan perdagangan antara kedua negara dan memperkuat fragmentasi dalam hubungan ekonomi global.

Geopolitical tensions between Russia and Ukraine eased, while conflicts in the Arab region tended to escalate slightly. Notwithstanding, geopolitical fragmentation continued, leading to de-globalisation, particularly as a corollary of the inward-looking policies instituted by the US and China. The US has adopted aggressive protectionist policies, which included increasing import tariffs and restricting foreign investment, particularly on Chinese products, as part of its America First strategy promoted by the previous administration. Meanwhile, China has also adopted an inward-looking approach by strengthening control over technology and data as well as fostering domestic industrial development through its Made in China 2025 policy. Such conditions have deepened trade tensions between both countries and exacerbated economic fragmentation globally.

Pasar keuangan cenderung mengalami volatilitas sepanjang 2023, meskipun dengan *magnitude* yang lebih rendah dari 2022. *Banking turmoil* di AS pada Maret 2023 tercatat sempat memicu tekanan di pasar saham. Perang Israel dan palestina juga turut mendorong kenaikan volatilitas.

The financial markets continued to experience volatility throughout 2023, albeit at a lower magnitude than recorded in 2022. The banking turmoil affecting the US in March 2023 triggered pressures in the stock market, while the ongoing war between Israel and Palestine heightened volatility.

Grafik 3.1 .Volatilitas di Pasar Keuangan
Graphic 3.1. Financial Market Volatility

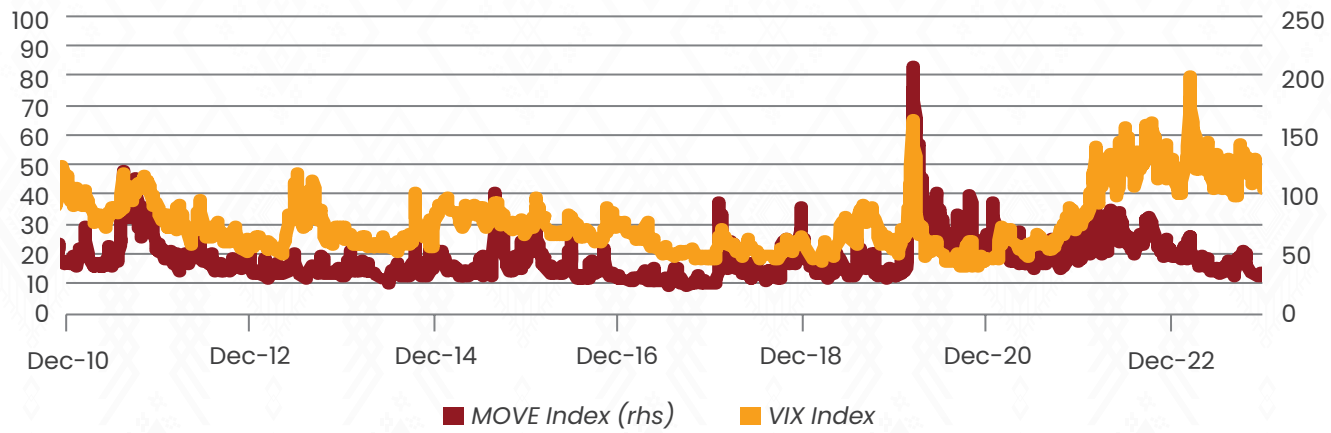

Sumber | *Source:* Bloomberg

III.2 Perkembangan Perekonomian Indonesia 2023

Domestic Economic Developments 2023

Sepanjang 2023, perekonomian Indonesia tumbuh solid di tengah kondisi perlambatan perekonomian global dan ketidakpastian fragmentasi geopolitik. PDB Indonesia sepanjang 2023 sebesar 5,05% *yoy* (2022: 5,31% *yoy*), didorong kenaikan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan belanja investasi pemerintah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, terkait dengan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi hotel/restoran dan transportasi terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi seiring pulihnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor turut terdampak dan mengalami tekanan. Ekspor sepanjang 2023 hanya tumbuh 1,32% *yoy*.

At home, national economic growth in Indonesia was solid throughout 2023 despite global economic moderation and uncertainty caused by geopolitical fragmentation. GDP in 2023 is 5.05% yoy compared with 5.31% yoy 2022, driven by higher consumption by non-profit institutions serving households (NPISH) as well as government investment spending on national strategic projects (PSN) in the new capital city (IKN). In terms of household consumption, accommodation and food service activities as well as transportation recorded solid growth as public mobility and activity continued to recover. Consistent with global economic moderation, exports experienced stronger pressures and were impacted by global spillovers, thus recording just 1.32% yoy growth in 2023.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, tren serupa juga dicatatkan oleh nilai PDB per Kapita 2023 yang kembali meningkat ke level USD4.919,95 per kapita dengan pendapatan per kapita 2022 sebesar USD4.784,12.

In line with positive economic growth, GDP per capita also tracked a similar upward trend, increasing to USD4,919.95 in 2023 from USD4,784.12 in 2022.

Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengeluaran
Table 3.5. Economic Growth by Expenditure

No.	PDB Pengeluaran % yoy *GDP (% yoy)*	2020	2021	2022	2023	2023				Bobot *Weight*
						Q1	Q2	Q3	Q4	
1.	**Konsumsi RT | *Household Consumption***	**-2,63%**	**2,01%**	**4,94%**	**4,82%**	**4,53%**	**5,22%**	**5,05%**	**4,47%**	**52,54%**
	Makanan dan Minuman | *Food and Beverages*	0,51%	1,44%	3,44%	3,42%	3,42%	3,80%	4,01%	2,56%	29,98%
	Pakaian, Alas Kaki, & Perawatannya *Clothing, Footwear and Repair*	-4,21%	-0,07%	4,31%	4,47%	3,78%	7,01%	3,58%	3,49%	3,00%
	Perumahan dan Perlengkapan RT *Housing and Household Equipment*	2,28%	2,19%	2,79%	3,80%	2,77%	3,78%	3,77%	4,85%	11,41%
	Kesehatan dan Pendidikan *Health and Education*	3,09%	1,70%	2,41%	3,99%	2,58%	5,51%	4,23%	3,66%	5,92%
	Transportasi dan Komunikasi *Transportation and Communication*	-9,57%	2,59%	9,38%	7,59%	7,89%	7,60%	7,68%	7,24%	20,89%
	Hotel dan Restoran *Accommodation and Food Service Activities*	-8,14%	3,87%	6,57%	6,38%	5,88%	6,75%	6,52%	6,35%	7,88%
	Lainnya | *Others*	-0,65%	1,83%	2,70%	2,90%	2,69%	3,72%	3,04%	2,16%	3,74%
2.	**Konsumsi LNPRT | *NPISH Consumption***	**-4,21%**	**1,62%**	**5,66%**	**9,83%**	**6,16%**	**8,59%**	**6,18%**	**18,11%**	**1,34%**
3.	**Konsumsi Pemerintah** ***Government Consumption***	**2,12%**	**4,25%**	**-4,47%**	**2,95%**	**3,31%**	**10,47%**	**-3,93%**	**2,81%**	**9,54%**
4.	**PMTDB | *Gross Domestic Fixed Capital Formation (GDFCF)***	**-4,96%**	**3,80%**	**3,87%**	**4,40%**	**2,11%**	**4,63%**	**5,77%**	**5,02%**	**32,39%**
	Bangunan | *Buildings*	-3,78%	2,32%	0,91%	4,04%	0,08%	3,32%	6,31%	6,42%	71,83%
	Mesin dan Perlengkapan *Machinery and Equipment*	-11,54%	11,66%	22,40%	3,08%	4,62%	7,67%	-1,01%	2,00%	12,78%
	Kendaraan | *Vehicles*	-13,07%	11,69%	10,27%	15,67%	24,09%	15,50%	21,27%	3,20%	5,79%
	Lainnya | *Others*	-2,07%	3,27%	2,45%	2,16%	2,12%	4,73%	2,20%	0,15%	9,60%
5.	**Ekspor | *Exports***	**-8,42%**	**17,99%**	**16,23%**	**1,32%**	**11,74%**	**-2,91%**	**-3,91%**	**1,64%**	**24,53%**
6.	**Impor | *Imports***	**-17,60%**	**24,86%**	**15,00%**	**-1,65%**	**4,15%**	**-3,23%**	**-6,75%**	**-0,15%**	**19 91%**
	PDB | *GDP*	**-2,07%**	**3,70%**	**5,31%**	**5,05%**	**5,04%**	**5,17%**	**4,94%**	**5,04%**	

Sumber: BPS
Source: BPS-Statistics Indonesia

Untuk mendukung stabilitas konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, inflasi Desember 2023 terjaga di level 2,61% *yoy*. Terjaganya inflasi didorong stabilnya tingkat inflasi pada mayoritas komponen. Indikator-indikator pertumbuhan ekonomi lainnya juga turut mengkonfirmasi soliditas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2023, indeks S&P Global Manufaktur Indonesia atau *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur berada di atas level ekspansi sebesar 50 poin. PMI Indonesia pada Desember 2023 tercatat naik ke level 52,2.

Inflation in December 2023 was maintained at a level of 2.61% yoy, thereby supporting consumption stability as the main engine of economic growth. Most inflation components were stable. Meanwhile, other economic indicators also confirmed solid growth in Indonesia. In 2023, S&P's Global Purchasing Managers Index (PMI) was recorded above the 50-point threshold that separates expansion from contraction in the manufacturing sector. Indonesia's PMI increased to a level of 52.2 recorded in December 2023.

Grafik 3.2. Perkembangan PMI Manufaktur Indonesia
Graphic 3.2. Manufacturing PMI in Indonesia

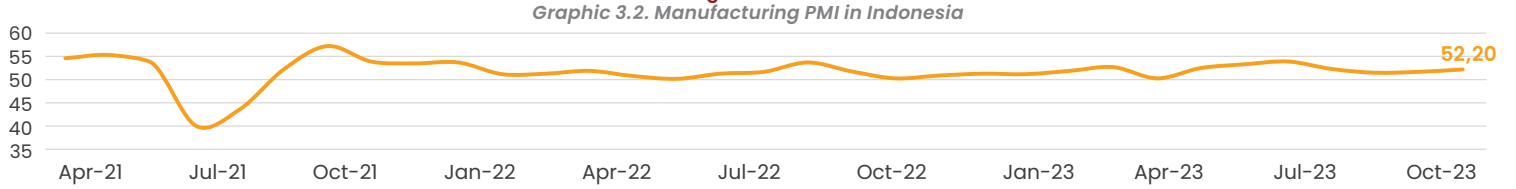

Sumber: PMI S&P Global
Source: S&P Global PMI data

III.3 Stabilitas Sistem Keuangan
Financial System Stability

Stabilitas sektor jasa keuangan di 2023 tercatat terjaga, di tengah tingginya ketidakpastian dan risiko perlambatan ekonomi global. Hal ini tercermin dari kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang tercatat solid ditopang permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga.

The stability of the financial services sector in 2023 remained intact amidst high uncertainty and risks of a global economic slowdown. This is reflected in the solid intermediation performance of financial service institutions, supported by adequate capital and liquidity, and a well-maintained risk profile.

Di sisi intermediasi, kredit perbankan mampu tumbuh 10,38%. Sementara itu, sejalan dengan pengetatan likuiditas global, pertumbuhan DPK perbankan akhir tahun tercatat menurun menjadi 3,73%. Di industri keuangan non bank, piutang pembiayaan mampu tumbuh di level tinggi sebesar 13,23% *yoy* pada akhir 2023, didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing meningkat sebesar 15,10% *yoy* dan 8,98% *yoy*. Sementara itu, *outstanding* pembiayaan *fintech peer to peer* (P2P) *lending* di 2023 mencapai Rp59,64 triliun, tumbuh 16,67% *yoy* dengan penyaluran kepada UMKM sebesar Rp20,87 triliun (34,99% dari total pembiayaan P2P). Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi komersial selama tahun 2023 mencapai Rp320,88 triliun atau tumbuh 3,02% *yoy*. Aset dana pensiun sukarela per Desember 2023 tumbuh 6,91% *yoy* dengan nilai aset sebesar Rp368,70 triliun. Sementara pada perusahaan penjaminan, nominal nilai aset mencapai Rp46,41 triliun dengan jumlah investasi Rp28,86 triliun.

In terms of intermediation, bank credit grew by 10.38%. Meanwhile, consistent with global liquidity tightening, the growth of bank deposits (DPK) at the end of the year slowed to 3.73%. In the non-bank financial industry, financing receivables grew at a high level of 13.23% year-on-year yoy by the end of 2023, driven by working capital and investment financing, which increased by 15.10% yoy and 8.98% yoy, respectively. Meanwhile, outstanding fintech peer-to-peer (P2P) lending financing reached IDR59.64 trillion in 2023, growing 16.67% yoy with disbursements to MSMEs amounting to IDR20.87 trillion (34.99% of total P2P financing). The accumulated premium income of the commercial insurance sector during 2023 reached IDR320.88 trillion, growing 3.02% yoy. Voluntary pension fund assets as of December 2023 grew 6.91% yoy, with asset values amounting to IDR368.70 trillion. In the guarantee company sector, asset values reached IDR46.41 trillion with investments totaling IDR28.86 trillion.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Kredit dan Piutang Pembiayaan
Graph 3.3. Credit Growth and Financing Receivables

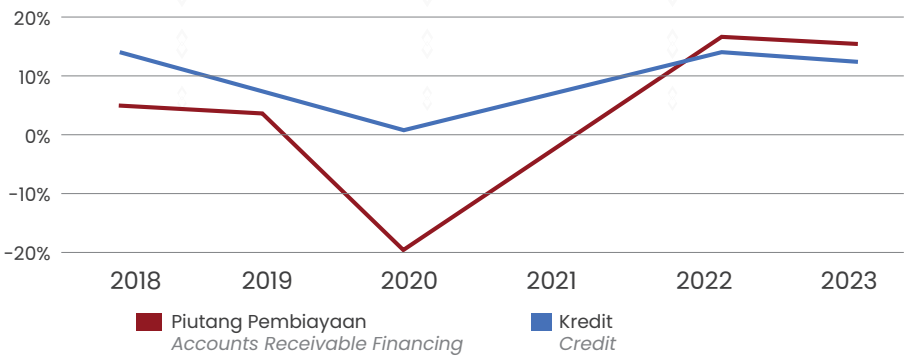

Sumber | *Source:* OJK

Grafik 3.4. Perkembangan CAR Kawasan
Graph 3.4. Development of Regional CAR

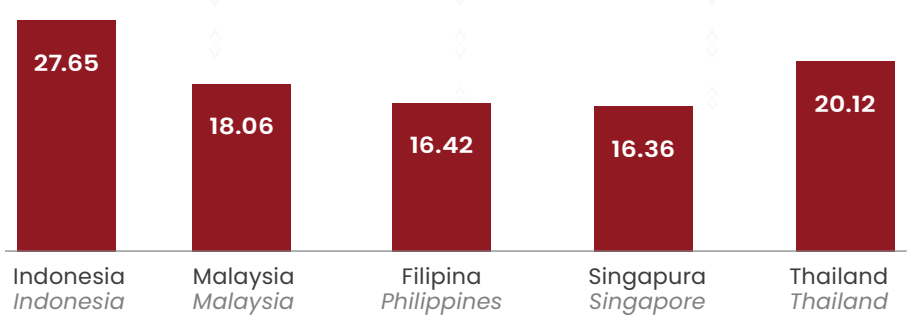

Sumber | *Source:* OJK, CEIC

Permodalan sektor keuangan tercatat kuat didukung oleh permodalan perbankan yang solid dengan *Capital Adequacy Ratio* perbankan tercatat sebesar 27,65%. Capaian ini berada di atas beberapa negara G-20 dan negara Kawasan. Sementara di industri keuangan *non bank, Risk Based Capital* (RBC) baik di asuransi jiwa maupun asuransi umum dan reasuransi tercatat tinggi, masing-masing sebesar 457,98% dan 363,1%, jauh di atas *threshold*. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang positif dan tercatat sebesar 2,26 kali di akhir 2023, jauh di bawah *threshold* 10 kali.

The financial sector's capital remains strong, supported by solid banking capitalization with a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 27.65%. This achievement is above several G-20 countries and regional counterparts. In the non-bank financial industry, the Risk-Based Capital (RBC) in both life insurance and general and reinsurance sectors remains high at 457.98% and 363.1%, respectively, far above the threshold. The gearing ratio of financing companies showed a positive trend, recorded at 2.26 times at the end of 2023, well below the threshold of 10 times.

Likuiditas di sektor perbankan tercatat memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga dan Alat Likuid/*Non Core Deposit* yang masing-masing tercatat sebesar 28,73% dan 127,07%, jauh di atas *threshold* 10% dan 50%.

Profil risiko tercatat terkendali tercermin dari kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* di sektor perbankan masing-masing sebesar 2,19% dan 0,71%. Sementara itu di Industri Keuangan Non Bank, *Non performing financing* (NPF) *gross* dan *net* Perusahaan Pembiayaan masing-masing tercatat sebesar 2,44% dan 0,64%. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dari *peer to peer landing* dalam kondisi terjaga sebesar 2,93%.

Di pasar saham, IHSG akhir tahun mampu menguat 6,16% meski terdapat *outflow non residen* sebesar Rp6,19 triliun. Jumlah investor per akhir tahun tercatat sebanyak 12,17 juta atau tumbuh 18,04% dari posisi akhir 2022. Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp255,39 triliun, dengan 78 emiten yang melakukan pencatatan saham perdana (*Initial Public Offering*/IPO) yang mencatatkan rekor jumlah IPO tertinggi. Jumlah IPO Indonesia ini menjadi terbesar ke-6 secara global dengan *share* IPO Indonesia mencapai 6% dari total IPO global.

Banking sector liquidity is adequate, as indicated by the Liquidity Assets/ Third Party Funds ratio and the Liquidity Assets/Non-Core Deposit ratio, which stood at 28.73% and 127.07%, respectively, far above the thresholds of 10% and 50%.

The risk profile is controlled, as reflected in the gross and net Non-Performing Loan (NPL) ratios in the banking sector at 2.19% and 0.71%, respectively. Meanwhile, in the Non-Bank Financial Industry, the gross and net Non-Performing Financing (NPF) ratios of Financing Companies were 2.44% and 0.64%, respectively. The aggregate delinquency rate (TWP90) of Peer-to-Peer lending was maintained at 2.93%.

In the stock market, the Jakarta Composite Index (IHSG) strengthened by 6.16% at the end of the year, despite a non-resident outflow of IDR6.19 trillion. The number of investors at the end of the year was recorded at 12.17 million, growing 18.04% from the end of 2022. Funds raised in the capital market reached IDR 255.39 trillion, with 78 issuers conducting initial public offerings (IPOs), marking a record high number of IPOs. Indonesia's IPO count ranked sixth globally, with Indonesia's share of global IPOs at 6%.

III.4 Perkembangan Industri Perbankan
Banking Industry Development

Di tengah sentimen divergensi pertumbuhan ekonomi global, kinerja perbankan pada 2023 masih cukup baik sebagaimana tercermin dari fungsi intermediasi yang terjaga. DPK tumbuh sebesar 3,73% *yoy* dan disertai dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% *yoy* meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum ketahanan perbankan pada Desember 2023 masih terjaga serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,65%. Hal ini juga didukung oleh naiknya rentabilitas perbankan yang tercermin dari rasio ROA yang meningkat meskipun rasio BOPO sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan.

Banking industry performance remained solid in 2023 despite sentiment stoked by global economic growth divergence, with the bank intermediation function maintained. Growth of third-party funds (TPF) was recorded at 3.73% yoy along with credit growth of 10.38% yoy, moderating on the previous year. In general, banking industry resilience was maintained in December 2023, indicating adequate bank capacity to absorb risk with a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 27.65%. This was also supported by higher bank profitability, as reflected by an uptick in the return on assets (ROA), despite a slight increase in the BOPO efficiency ratio on the previous year, indicating less efficiency. In addition, credit risk improved as the gross NPL ratio fell 25bps to 2.19% from 2.44% in the previous year. Ample liquidity was also maintained in the banking industry, as reflected by the ratios of liquid assets to third-party funds (LA/TPF) and liquid assets to non-core deposits (LA/NCD) well above their respective thresholds despite trending downwards.

Tabel 3.6. Kondisi Bank Umum
Table 3.6. Banking Industry Conditions

Indikator *Indicators*	2019	2020	2021	2022	2023	*yoy*	
	Dec	Dec	Dec	Dec	Dec	Dec'22	Dec'23
Jumlah Bank | *Total Banks*	110	109	107	106	105	-1	-1
Total Aset (Rp Miliar) *Total Assets (IDR, billions)*	8.562.974	9.177.894	10.112.304	11.113.321	11.765.838	9,90%	5,87%
Kredit (Rp Miliar) *Loans (IDR, billions)*	5.616.992	5.481.560	5.768.585	6.423.560	7.090.243	11,35%	10,38%
DPK (Rp Miliar) *Third-Party Funds (IDR, billions)*	5.998.648	6.665.390	7.479.463	8.153.590	8.457.929	9,01%	3,73%
- Giro (Rp Miliar) *Demand Deposits (IDR, billions)*	1.465.848	1.687.135	2.143.505	2.546.160	2.662.551	18,78%	4,57%
- Tabungan (Rp Miliar) *Savings Deposits (IDR, billions)*	1.945.185	2.173.501	2.432.260	2.615.185	2.669.183	7,52%	2,06%
- Deposito (Rp Miliar) *Term Deposits (IDR, billions)*	2.587.615	2.804.755	2.903.698	2.992.245	3.126.195	3,05%	4,48%
CAR (%) | *CAR (%)*	23,31	23,81	25,67	25,63	27,65	(4)	202
ROA (%) | *ROA (%)*	2,44	1,59	1,84	2,43	2,74	59	31
NIM/NOM (%) | *NIM/NOM (%)*	4,80	4,32	4,51	4,71	4,81	20	10
BOPO (%) | *BOPO (%)*	79,58	86,55	83,68	78,65	78,92	(503)	27
NPL/NPF *Gross* (%) | *Gross NPL/NPF (%)*	2,53	3,06	3,00	2,44	2,19	(56)	(25)
NPL/NPF *Net* (%) | *Net NPL/NPF (%)*	1,19	0,98	0,88	0,71	0,71	(17)	-
LDR/FDR (%) | *LDR/FDR (%)*	93,64	82,24	77,13	78,78	83,83	165	505
AL/DPK | *LA/TPF*	20,86	31,67	35,12	31,20	28,73	(392)	(247)
AL/NCD | *LA/NCD*	97,61	146,72	157,94	137,67	127,07	(2.027)	(1.060)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

III.4.1. Perkembangan Bank Umum Konvensional (BUK)
Conventional Commercial Banks Development

Secara umum kondisi permodalan BUK pada Desember 2023 cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,75%. Rentabilitas juga tercatat meningkat tercermin dari rasio ROA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga memadai tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* 10% dan 50%.

In general, conventional commercial banks maintained solid capital capacity in December 2023 and demonstrated adequate ability to absorb risk with a Capital Adequacy Ratio (CAR) recorded at 27.75%. Profitability also increased, as reflected by a higher ROA than recorded one year earlier. Furthermore, credit risk was effectively mitigated, with the gross NPL ratio retreating 25 bps to 2.19% from 2.44% in the previous year. Bank liquidity remained ample, as indicated by the ratios of liquid assets to third-party funds (LA/TPF) and liquid assets to non-core deposits (LA/NCD) well above their respective thresholds of 10% and 50%.

Tabel 3.7. Kondisi Bank Umum Konvensional
Table 3.7. Conventional Banking Industry Conditions

Indikator *Indicators*	Nominal					*yoy*	
	Dec'19	Dec'20	Dec'21	Dec'22	Dec'23	Dec'22	Dec'23
Jumlah Bank | *Total Banks*	96	95	95	92	92	-2	-1
Total Aset (Rp Miliar) *Total Assets (IDR, billions)*	8.212.586	8.780.681	9.670.515	10.581.455	11.171.129	9,42%	5,57%
Kredit (Rp Miliar) *Loans (IDR, billions)*	5.391.846	5.235.027	5.512.366	6.100.964	6.721.867	10,68%	10,18%
DPK (Rp Miliar) *Third-Party Funds (IDR, billions)*	5.709.670	6.342.538	7.114.041	7.724.561	7.991.997	8,58%	3,46%
- Giro (Rp Miliar) *Demand Deposits (IDR, billions)*	1.423.773	1.636.387	2.089.193	2.481.780	2.588.476	18,79%	4,30%
- Tabungan (Rp Miliar) *Savings Deposits (IDR, billions)*	1.844.526	2.053.575	2.295.109	2.450.312	2.492.249	6,76%	1,71%
- Deposito (Rp Miliar) *Term Deposits (IDR, billions)*	2.441.372	2.652.575	2.729.739	2.792.469	2.911.273	2,30%	4,25%
CAR (%) | *CAR (%)*	23,40	23,89	25,66	25,60	27,75	(6)	215
ROA (%) | *ROA (%)*	2,47	1,59	1,85	2,45	2,78	60	33
NIM (%) | *NIM/NOM (%)*	4,91	4,45	4,63	4,80	4,92	17	12
BOPO (%) | *BOPO (%)*	79,39	86,58	83,65	78,70	78,94	(495)	24
NPL *Gross* (%) | *Gross NPL (%)*	2,50	3,06	3,02	2,44	2,19	(58)	(25)
NPL *Net* (%) | *Net NPL (%)*	1,16	0,95	0,88	0,71	0,72	(17)	1
LDR (%) | *LDR (%)*	94,43	82,54	77,49	78,98	84,11	149	513
AL/DPK (%) | *LA/TPF (%)*	20,71	32,03	35,35	31,40	28,65	(395)	(275)
AL/NCD (%) | *LA/NCD (%)*	96,55	148,05	158,34	137,90	126,13	(2044)	(1177)

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

1. Aset

Total aset BUK pada Desember 2023 tumbuh 5,57% *yoy*, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,42% *yoy*. Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan utamanya disebabkan oleh melambatnya aset kelompok BUMN (porsi 44,89%) yang tumbuh 6,05% *yoy* setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,21% *yoy*. Selain itu, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) (porsi 4,96%) juga tumbuh melambat 5,94% *yoy* setelah tahun sebelumnya tumbuh dua digit 20,82% *yoy*.

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 53,31% dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,70% dari aset perbankan.

1. Assets

The total assets of conventional commercial banks in December 2023 grew 5.57% yoy, moderating from 9.42% yoy one year earlier. By bank group, moderation primarily stemmed from state-owned banks, accounting for 44.89% of the total, where growth decelerated to 6.05% yoy from 11.21% yoy in the reporting period. In addition, foreign bank branches, accounting for 4.96%, also experienced significant moderation from double-digit 20.82% yoy growth to just 5.94% yoy in 2023.

In general, banking industry assets in Indonesia were still concentrated in just a handful of banks. The total assets of the four biggest conventional commercial banks dominated 53.31% of banking industry assets, while the total assets of the 20 largest banks accounted for 81.70% of total assets in the banking industry.

Grafik 3.5. Perkembangan Aset BUK
Graphic 3.5. Total Assets in Conventional Banking Industry

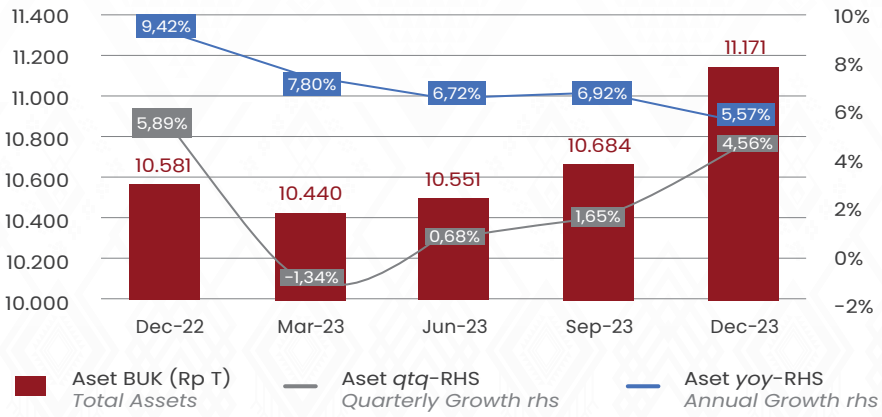

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

Grafik 3.6. Tren Pertumbuhan DPK
Graphic 3.6. TPF Growth Trends

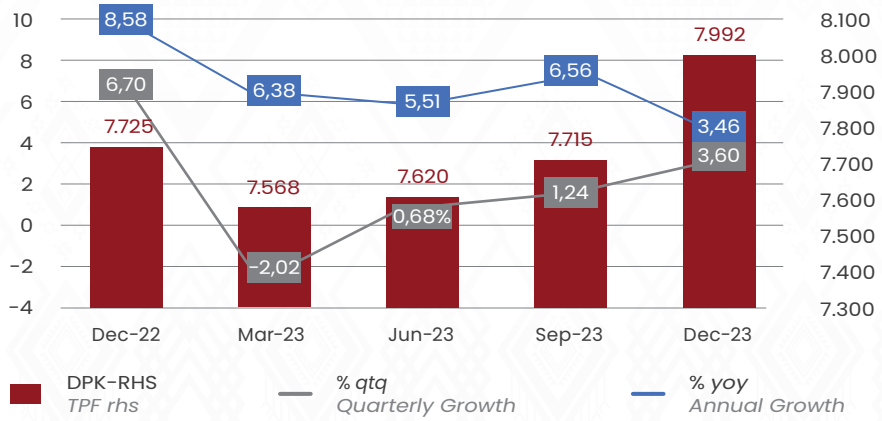

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 3,46% *yoy*, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,58% *yoy*. Pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, dengan pendorong utama yaitu deposito dan giro yang tumbuh tinggi masing-masing 4,25% *yoy* dan 4,30% *yoy*. Selain itu, tabungan juga tumbuh 1,71% *yoy* meski melambat dari pertumbuhan tahun lalu 6,76% *yoy*.

2. Third-Party Funds (TPF)

Third-party funds (TPF) at conventional commercial banks grew 3.46% yoy in 2023, down from 8.58% yoy in the same period one year earlier. The banking industry confirmed broad-based deposit growth across all TPF components, led by high growth of term deposits and demand deposits at 4.25% yoy and 4.30% yoy respectively. In addition, savings deposits posted 1.71% yoy growth, moderating from 6.76% yoy one year earlier.

3. Kredit

Kredit BUK tumbuh 10,18% *yoy* sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,68% *yoy*. Jika dilihat dari jenis penggunaan, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja/KMK (porsi: 46,73%) yang tumbuh 9,98% *yoy* setelah tahun sebelumnya dapat tumbuh 12,28% *yoy*. Sementara itu, kredit investasi/KI dan kredit konsumsi/KK tumbuh masing-masing 11,93% *yoy* dan 8,75% *yoy*, meningkat dari tahun sebelumnya tumbuh 11,15% *yoy* dan 7,49% *yoy*.

3. Loans

Loans disbursed by conventional commercial banks recorded 10.18% yoy growth, down slightly from 10.68% yoy one year earlier. By loan type, growth of working capital loans, accounting for 46.73% of total loans, grew 9.98% yoy after expanding 12.28% yoy the year earlier. On the other hand, growth of investment loans and consumer loans accelerated to 11.93% yoy and 8.75% yoy from 11.15% yoy and 7.49% yoy in the reporting period.

Grafik 3.7. Tren Pertumbuhan Kredit
Graphic 3.7. Credit Growth Trends

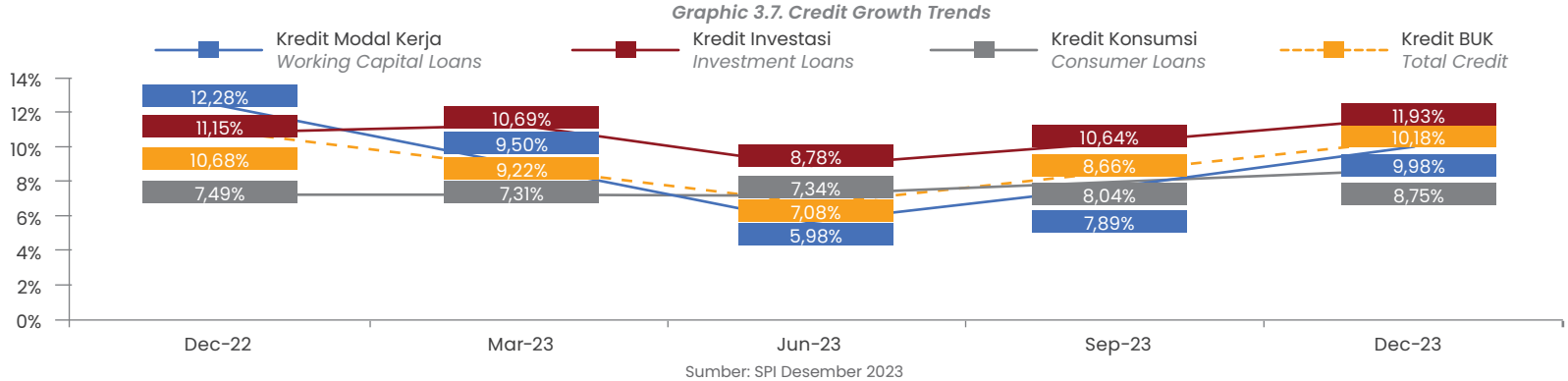

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL *gross* BUK tercatat turun 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL *net* naik 1 *bps* menjadi 0,72% dari 0,71% pada tahun sebelumnya, namun masih terjaga jauh di bawah *threshold*.

Credit quality improved in the reporting period, as indicated by a 25bps decline in the gross NPL ratio of conventional commercial banks to 2.19% from 2.44% in the previous year. Conversely, the net NPL ratio increased 1bps to 0.72% from 0.71%, which is nevertheless significantly below the threshold.

Grafik 3.8. Tren NPL (%)
Graphic 3.8. NPL Trends (%)

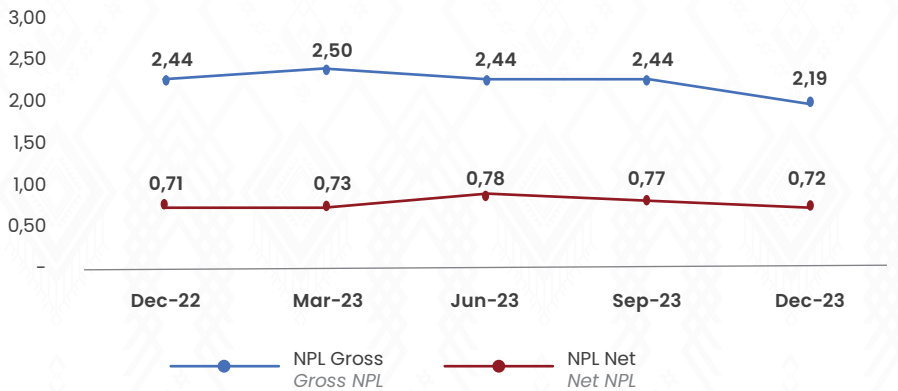

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

Grafik 3.9 Tren Rentabilitas dan Efisiensi
Graphic 3.9. Profitability and Efficiency Trends

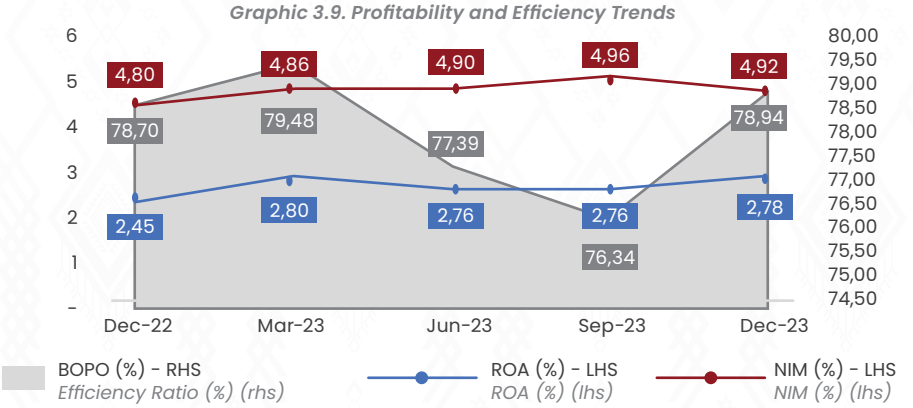

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

4. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada Desember 2023 menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% *yoy*.

Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari rasio BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% *yoy* sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% *yoy*.

Rasio NIM tercatat meningkat 12 *bps* menjadi sebesar 4,92% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% *yoy*, meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 sebesar 12,85% *yoy* sebagai pengaruh naiknya beban bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% *yoy* dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% *yoy*.

5. Permodalan

Secara umum pada Desember 2023 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari indikator CAR meningkat 215 *bps* dari 25,60% pada tahun sebelumnya menjadi 27,75%. Peningkatan didorong oleh tumbuhnya modal BUK yang tercatat sebesar 7,78% *yoy*, meski sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,55% *yoy*. Sementara itu, ATMR juga tercatat turun -0,51% *yoy*, dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,74% *yoy*, utamanya dipengaruhi oleh turunnya ATMR operasional seiring dengan implementasi Basel III pada ATMR Operasional sejak awal tahun 2023.

4. Profitability

The profitability of conventional commercial banks improved in December 2023, with the ROA climbing 33 bps from 2.45% to 2.78%. The higher ROA was attributable to strong 21.12% yoy growth of pre-tax profits.

Meanwhile, the efficiency of conventional commercial banks decreased slightly compared with conditions one year earlier, as reflected by a higher BOPO efficiency ratio of 78.94% from 78.70%. The BOPO efficiency ratio was edged upwards by higher growth of operating costs (22.64% yoy) than operating income (22.27% yoy).

The net interest margin (NIM) increased 12 bps to 4.92% from 4.80% in the previous year. This was due to 8.71% yoy growth in net interest income, despite moderating from 12.85% yoy as interest expenses tracked an upward trend. Meanwhile, growth of productive assets averaged 6.16% yoy in 2023, down from 8.91% yoy in 2022.

5. Capital

In general, capital conditions at conventional commercial banks remained solid in December 2023, as reflected by a 215 bps bump in the Capital Adequacy Ratio (CAR) from 25.60% in 2022 to 27.75%. This was driven by 7.78% yoy growth of capital at conventional commercial banks, down slightly from 8.55% yoy the year earlier. On the other hand, risk-weighted assets (RWA) contracted -0.51% yoy after growing 8.74% yoy one year earlier, primarily influenced by a lower operational RWA given the implementation of Basel III requirements on operational RWA since the beginning of 2023.

III.4.2. Perkembangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Rural Banks Development

Pada periode Desember 2023, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup positif. DPK tercatat tumbuh meningkat diikuti dengan kredit yang juga masih tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan laba dan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

In December 2023, the performance of rural banks remained sound. Growth of third-party funds accelerated, accompanied by slight moderation in terms of credit growth. The resilience of rural banks was also solid in 2023, underpinned by high capital above the threshold despite retreating compared with conditions one year earlier. Nevertheless, the performance of rural banks also demanded vigilance in line with lower profits and efficiency compared with conditions in the previous year, which were also accompanied by increasing credit risk in the reporting period.

Tabel 3.8. Kondisi Umum BPR
Table 3.8. Rural Banking Industry Conditions

Indikator *Indicators*	Nominal					*yoy*	
	Dec'19	Dec'20	Dec'21	Dec'22	Dec'23	Dec'22	Dec'23
Jumlah BPR | *Total Rural Banks*	1.545	1.506	1.468	1.441	1.402	(27)	(39)
Total Aset (Rp Miliar) *Total Assets (IDR, billions)*	149.623	155.075	168.443	182.302	194.984	8,23%	6,96%
Kredit (Rp Miliar) *Loans (IDR, billions)*	108.784	110.770	116.580	129.295	140.791	10,91%	8,89%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) *Third-Party Funds (IDR, billions)*	102.538	106.151	117.006	126.944	137.909	8,49%	8,64%
- Tabungan (Rp Miliar) *Savings Deposits (IDR, billions)*	32.132	32.763	35.867	40.169	42.617	11,99%	6,09%
- Deposito (Rp Miliar) *Term Deposits (IDR, billions)*	70.406	73.389	81.139	86.775	95.293	6,95%	9,82%
CAR (%) | *CAR (%)*	28,88	29,89	32,15	30,76	29,98	(139)	(78)
ROA (%) | *ROA (%)*	2,31	1,87	1,78	1,74	1,00	(4)	(74)
BOPO (%) | *BOPO (%)*	81,50	84,24	83,61	83,66	89,37	5	571
NPL *Gross* (%) | *Gross NPL (%)*	6,81	7,22	6,72	7,89	9,87	117	198
NPL *Net* (%) | *Net NPL (%)*	5,22	5,33	4,37	5,23	6,51	86	128
LDR (%) | LDR *(%)*	79,09	75,44	73,67	75,83	75,56	216	73
CR (%) | *CR (%)*	17,08	18,67	14,05	13,66	13,65	(39)	(1)

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

1. Aset

Aset BPR pada Desember 2023 tumbuh 6,96% *yoy*, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,23% *yoy*. Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya modal pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.10. Tren Aset BPR
Graphic 3.10. Total Assets in Rural Banking Industry

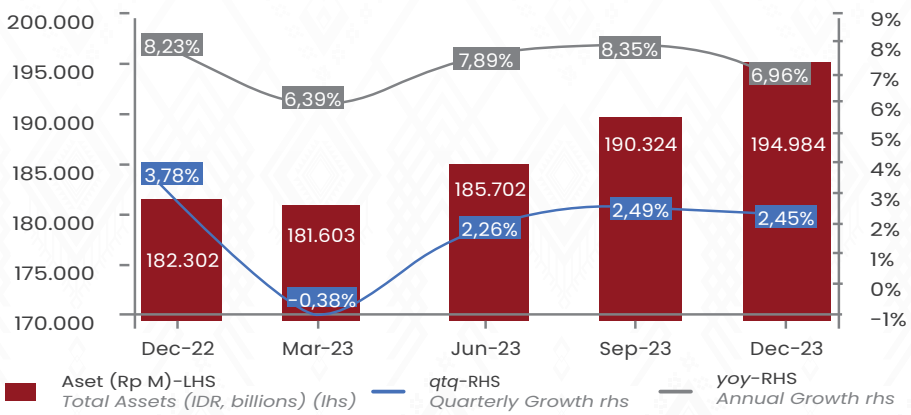

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,64% *yoy* menjadi Rp137,91 triliun, meningkat dibandingkan Desember 2022 yang tumbuh 8,49% *yoy*. Peningkatan utamanya didorong oleh kenaikan pada komponen deposito yang tumbuh 9,82% *yoy*, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,95% *yoy*. Selain itu, tabungan juga mampu tumbuh 6,09% *yoy*, meski melambat dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh 11,99% *yoy*.

Grafik 3.12. Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan
Graphic 3.12. Credit Growth Trends at Rural banks by Loan Type

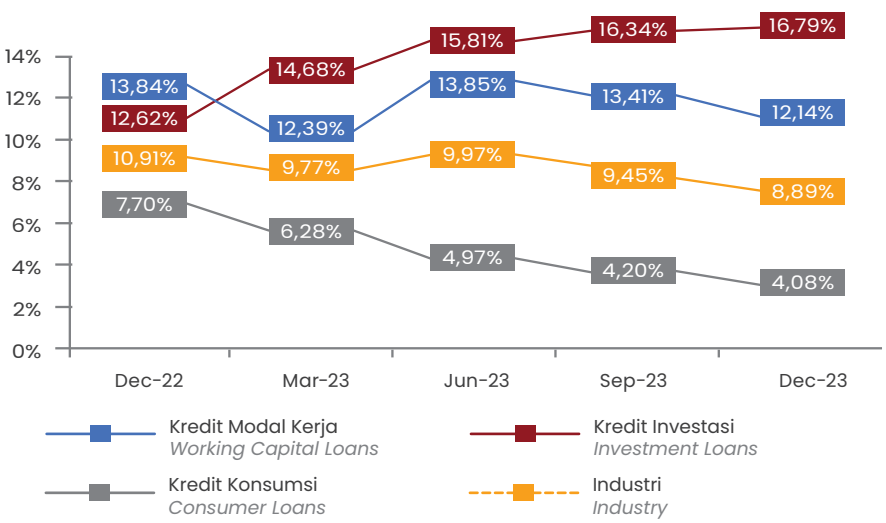

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

1. Assets

The total assets of rural banks grew 6.96% yoy as of December 2023, moderating from 8.23% yoy in the same period of 2022. Moderation stemmed from slower capital growth against the previous year.

Grafik 3.11. Tren Pertumbuhan DPK
Graphic 3.11. TPF Growth Trends

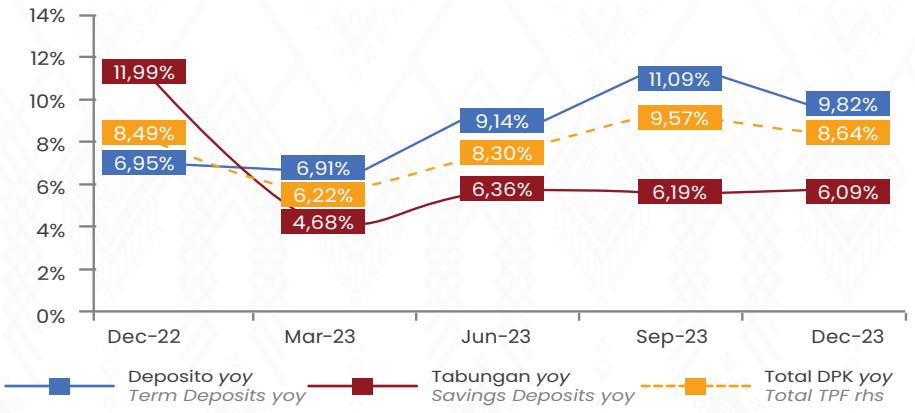

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

2. Third-Party Funds

Third-party funds (TPF) at rural banks grew 8,64% yoy in 2023 to IDR137.91 trillion, up from 8,49% yoy in the same period one year earlier. Faster growth was primarily driven by term deposits, which accelerated to 9,82% yoy from 6,95% yoy in the reporting period on the back of higher deposit rates offered by rural banks, among others. In addition, savings deposits also posted 6,09% yoy growth, moderating from 11,99% yoy one year earlier.

Grafik 3.13. Tren ROA dan BOPO BPR
Graphic 3.13. ROA and BOPO Trends at Rural Banks

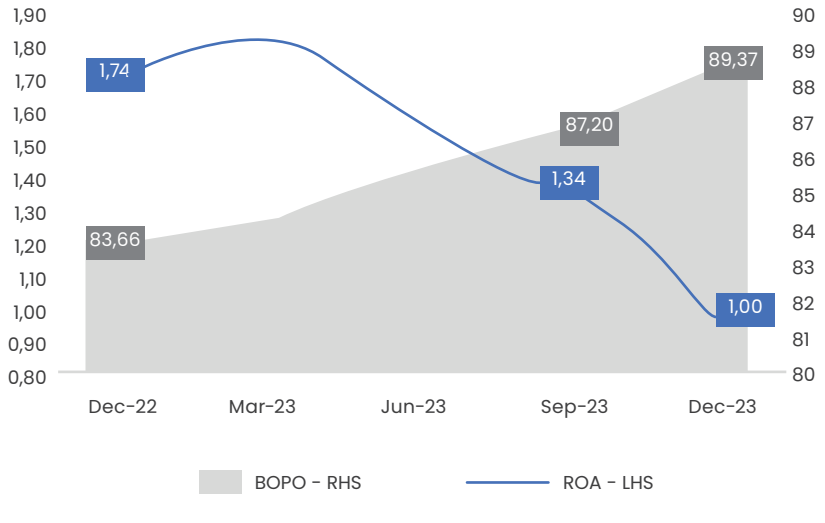

Sumber: SPI Desember 2023
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2023

3. Kredit

Kredit BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,89% *yoy*, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 10,91% *yoy*. Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (57,13%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,62%) dan Kredit Investasi/KI (8,51%), sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (42,87%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan, dengan KMK dan KK yang tumbuh masing-masing 12,14% *yoy* dan 4,08% *yoy*, meski melambat dari 13,84% *yoy* dan 7,70% *yoy*. Selain itu, KI tercatat tumbuh tertinggi sebesar 16,79% *yoy*, meningkat dari 12,62% *yoy* pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

4. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Desember 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,00% atau turun 74 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,74%.

Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 571 *bps* menjadi 89,37% dari 83,66% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang cukup tinggi yaitu tercatat tumbuh sebesar 16,16% *yoy* dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 8,74% *yoy*.

5. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM, yaitu sebesar 29,98%, meskipun turun 78 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 30,76%. Penurunan CAR diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal sejalan dengan turunnya laba. Di lain sisi, ATMR juga tercatat tumbuh melambat dari tahun sebelumnya sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit.

3. Credit

Loans disbursed by rural banks in December 2023 grew 8.89% yoy, decelerating from 10.91% yoy in 2022. By loan type, loans disbursed by rural banks in 2023 were dominated by productive loans (57.13%), consisting of working capital loans (48.62%) and investment loans (8.51%), with the remaining 42.87% attributable to consumer loans.

Rural banks reported broad-based credit growth across all loan types, with working capital loans and consumer loans growing 12.14% yoy and 4.08% yoy respectively, down from 13.84% yoy and 7.70% yoy. In addition, investment loans posted the highest growth at 16.79% yoy, accelerating from 12.62% yoy one year earlier

4. Profitability

The profitability of rural banks in December 2023 decreased compared with conditions one year earlier, as reflected by a 74 bps lower ROA ratio of 1.00% from 1.74% in 2022.

Consistent with lower profitability, rural bank efficiency also tracked a downward trend, as reflected by an increase in the BOPO efficiency ratio of 571 bps to 89.37% from 83.66% in the previous year. The BOPO ratio increased due to significantly higher operational costs, growing 16.16% yoy to outpace operational income growth at 8.74% yoy.

5. Capital

Capital at rural banks remained relatively solid and adequate to absorb the potential risks faced in 2023, as reflected by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) at rural banks well in excess of the Minimum Capital Adequacy Requirement at 29.98%, despite retreating 78 bps from 30.76% in the previous year. The lower CAR in the rural banking industry stemmed from moderating capital growth in line with lower profits. On the other hand, growth of risk-weighted assets (RWA) also decelerated on the previous year in line with slower credit growth.

III.4.3. Perkembangan Perbankan Syariah

Islamic Banking Development

Perekonomian global terus melalui proses pemulihan meskipun menunjukkan adanya perlambatan pada tahun 2023. Kondisi yang sama juga terlihat pada sektor perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah menunjukkan adanya perlambatan dari sisi pertumbuhan pembiayaan dan DPK dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketahanan industri perbankan syariah tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga menunjukkan hasil yang baik dari sisi rentabilitas yang ditandai oleh ROA dan NOM serta risiko kredit yang masih terjaga.

The global economic recovery process remains intact despite signs of moderation in 2023. Similar conditions were also observed in the Islamic banking sector. The Islamic bank intermediation function experienced moderation in 2023 in terms of financing and third-party funds compared with conditions in the previous year. Nevertheless, Islamic banking industry resilience remained solid, as evidenced by an adequate Capital Adequacy Ratio (CAR) as reported by Islamic commercial banks and Islamic rural banks. Islamic banking performance was also solid in terms of profitability, as signaled by ROA and NOM, accompanied by mitigated credit risk.

Tabel 3.9. Kondisi Perbankan Syariah
Table 3.9. Islamic Banking Conditions

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	*yoy*		*Indicators*
						Dec 2022	Dec 2023	
Perbankan Syariah *Islamic Banking*								
Total Aset (Rp Milliar)	538.322	608.898	693.795	802.256	892.163	15,63%	11,21%	*Total Assets (Rp billions)*
Pembiayaan (Rp Milliar)	365.125	394.625	421.862	505.937	585.461	19,93%	15,72%	*Financing (Rp billions)*
DPK (Rp Milliar)	425.290	475.796	548.584	619.509	684.519	12,93%	10,49%	*Deposits (Rp billions)*
Giro (Rp Miliar)	57.653	67.705	79.606	98.208	120.102	23,37%	22,29%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	136.462	162.756	187.641	222.388	242.178	18,52%	8,90%.	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	231.175	245.335	281.337	298.914	322.239	6.25%	7,80%	*Term Deposits (Rp billions)*
BUS - UUS *Islamic Commercial Banks - Islamic Business Units*								
Total Aset (Rp Milliar)	524.564	593.948	676.735	782.100	868.986	15,57%	11,11%	*Total Assets (Rp billions)*
Pembiayaan (Rp Milliar)	355.182	383.944	409.878	491.489	568.436	19,91%	15,66%	*Financing (Rp billions)*
DPK (Rp Milliar)	416.558	465.977	536.993	606.063	669.249	12,86%	10,43%	*Deposits (Rp billions)*
Giro (Rp Miliar)	57.653	67.705	79.606	98.208	120.102	23,37%	22,29%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	133.259	159.384	183.744	218.043	237.186	18,67%	8,78%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	225.646	238.888	273.643	289.812	311.960	5,91%	7,64%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	20,59	21,64	25,71	28,09	25,41	238	-268	*CAR (%)*
ROA (%)	1,83	1,54	1,72	1,90	1,86	18	-4	*ROA (%)*
NOM (%)	2,01	1,55	1,83	2,32	2,35	49	3	*NOM (%)*
BOPO (%)	82,52	83,63	81,01	77,48	78,97	-353	149	*BOPO (%)*
NPF *Gross* (%)	3,11	3,08	2,57	2,31	2,04	-26	-27	*NPF Gross (%)*
NPF *Net* (%)	1,89	1,70	0,92	0,75	0,68	-17	-7	*NPF Net (%)*
FDR (%)	85,27	82,40	76,33	81,10	84,94	477	384	*FDR (%)*
BPRS *Islamic Rural Banks*								
Total Aset (Rp Milliar)	13.758	14.950	17.060	20.157	23.177	18,15%|	14,98%	*Total Assets (Rp billions)*
Pembiayaan (Rp Milliar)	9.943	10.681	11.984	14.448	17.025	20,57%	17,84%	*Financing (Rp billions)*
DPK (Rp Milliar)	8.732	9.819	11.592	13.446	15.270	16,00%	13,56%	*Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	3.203	3.372	3.898	4.345	4.991	11,47%	14,88%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	5.529	6.447	7.694	9.102	10.279	18,29%	12,93%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	17,99	28,60	23,79	24,42	23,21	63	-121	*CAR (%)*
ROA (%)	2,61	2,01	1,73	1,92	2,05	19	13	*ROA (%)*
BOPO (%)	84,12	87,62	87,63	86,02	85,79	-161	-23	*BOPO (%)*
NPF *Gross* (%)	7,04	7,24	6,95	5,91	6,49	-104	58	*NPF Gross (%)*
NPF *Net* (%)	5,85	5,85	5,75	4,92	4,72	-83	-20	*NPF Net (%)*
FDR (%)	113,87	108,78	103,38	107,45	111,50	407	405	*FDR (%)*

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

1. Aset

Aset perbankan syariah pada posisi Desember 2023 adalah sebesar Rp892 triliun, tumbuh 11,21% *yoy* dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp802 triliun. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan mulai triwulan II-2023, namun perbankan syariah terus konsisten mencatatkan angka pertumbuhan yang *double digit* sepanjang tahun.

Grafik 3.14 Perkembangan Aset Perbankan Syariah
Graph 3.14 Islamic Banking Assets Development

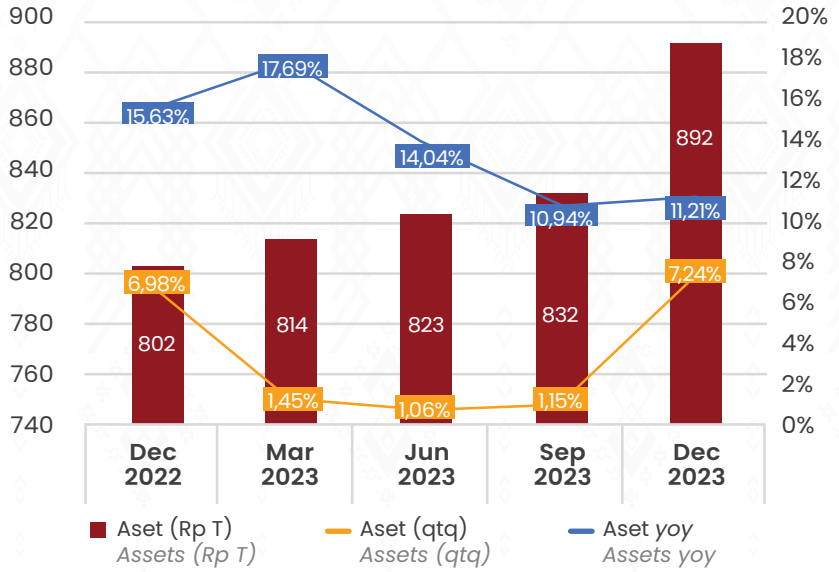

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada Desember 2023, DPK perbankan syariah mencapai Rp685 triliun, meningkat sebesar 10,49% *yoy* dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp620 triliun. Masing-masing komponen DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan cukup baik. Giro mencatatkan pertumbuhan sebesar 27,38% *yoy* dari sebelumnya Rp109 triliun menjadi Rp125 triliun. DPK tumbuh sebesar 11,28% *yoy* dari sebelumnya Rp221 triliun menjadi Rp247 triliun. Sementara itu, deposito mengalami pertumbuhan meskipun tidak sebesar kedua jenis lainnya sebesar 7,80% *yoy* dari sebelumnya Rp307 triliun menjadi Rp322 triliun.

3. Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 15,72% *yoy* pada Desember 2023. Peningkatan pertumbuhan didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 16,48% dan 19,17% *yoy*. Pembiayaan konsumsi juga tumbuh sebesar 13,84% *yoy*, porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan masing-masing memiliki porsi sebesar 49,13% dan 50,87%.

1. Assets

Islamic banking industry assets in 2023 were recorded at IDR892 trillion, up 11.21% yoy from IDR802 trillion in 2022. Despite experiencing moderation beginning in the second quarter of 2023, the Islamic banking industry consistently maintained double-digit growth in 2023.

Grafik 3.15. Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah
Graph 3.15. TPF Growth Trends in Islamic Banking Industry

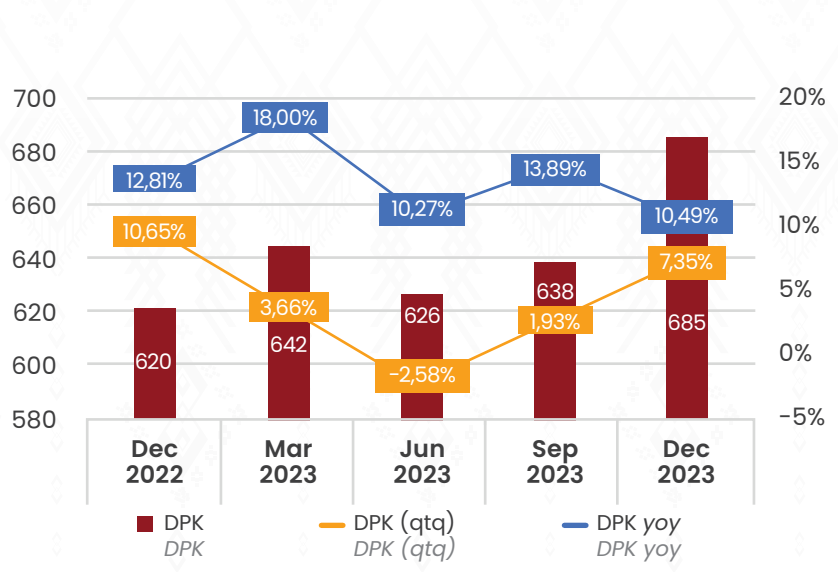

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

2. Third-Party Funds

In December 2023, the Islamic banking industry collected third party funds (TPF) totalling IDR685 trillion, up 10.49% yoy from IDR620 trillion one year earlier. Each component of third-party funds, namely demand deposits, savings deposits and term deposits, recorded solid growth, led by demand deposits at 27.38% yoy from IDR109 trillion to IDR125 trillion. Savings deposits recorded 11.28% yoy growth to increase from IDR221 trillion to IDR247 trillion in 2023. Meanwhile, term deposits recorded slightly slower 7.8% yoy growth compared with the other TPF components, increasing from IDR307 trillion to IDR322 trillion.

3. Financing

Financing disbursed by the Islamic banking industry grew 15.72% yoy in December 2023. Financing growth was driven by working capital financing and investment financing, which increased by 16.48% and 19.17% yoy respectively. Consumption financing also grew by 13.84% yoy, productive financing (working capital investment) and consumptive financing disbursed by the Islamic banking industry are relatively well balanced, accounting for 49.13% and 50.87% respectively in 2023.

Grafik 3.16. Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah
Graph 3.16. Growth Trends in Islamic Bank Financing

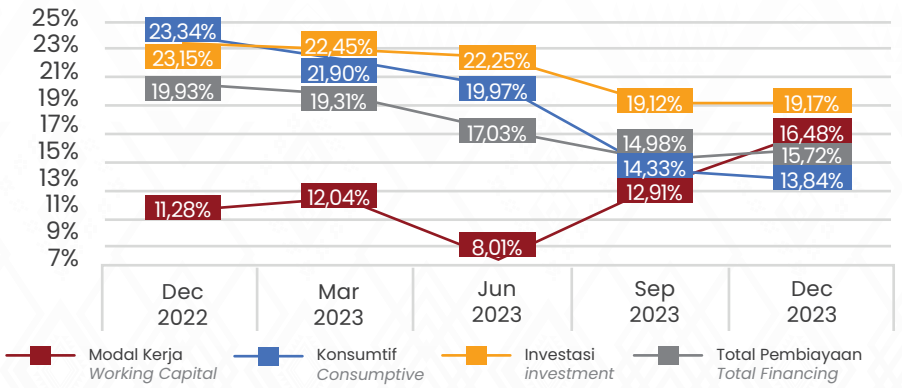

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

Grafik 3.17. Tren NPF Perbankan Syariah
Graph 3.17. NPF Trends in Islamic Banking Industry

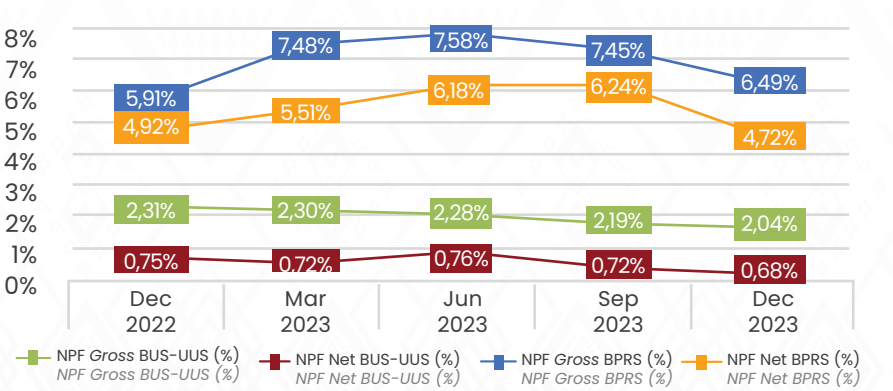

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

Pada 2023, risiko kredit perbankan syariah menunjukkan adanya perbaikan. Risiko kredit BUS-UUS di posisi NPF *Gross* membaik sebesar 27 *bps* dari sebelumnya 2,31% menjadi 2,04%. Risiko kredit BPRS juga terjaga pada posisi 4,72%. Berdasarkan akad, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad *musyarakah* dengan porsi 48,25% dan akad *murabahah* dengan porsi 44,21%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 92,47% dari total pembiayaan perbankan syariah. Porsi akad lainnya masih di bawah 5%, seperti *Qard*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Istishna*.

In 2023, credit risk in the Islamic banking industry improved, with the gross NPF position of Islamic commercial banks and Islamic Islamic business units improving 27 bps from 2.31% to 2.04%. Meanwhile, Islamic rural banks maintained credit risk at a position of 4.72%. By contract, financing disbursed by the sharia banking industry was dominated by musyarakah accounting for 48.25% and murabahah (44.21%). Together, musyarakah and murabahah contracts dominate 92.47% of total outstanding finance disbursed by the sharia banking industry. The market share of other contracts, which remains below 5%, including Qard, Mudharabah, Ijarah and Istishna.

Grafik 3.18. Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah
Graph 3.18. Composition of Sharia Banking Finance by Contract

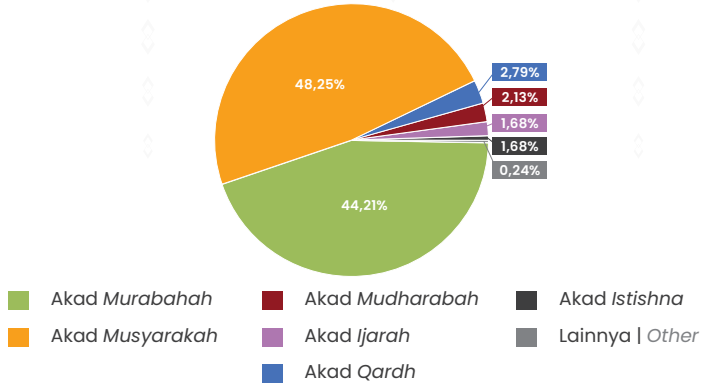

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2023
Source: Sharia Banking Statistics (SPS), December 2023

Grafik 3.19. Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah
Graph 3.19. Profitability and Efficiency Trends in Sharia Banking Industry

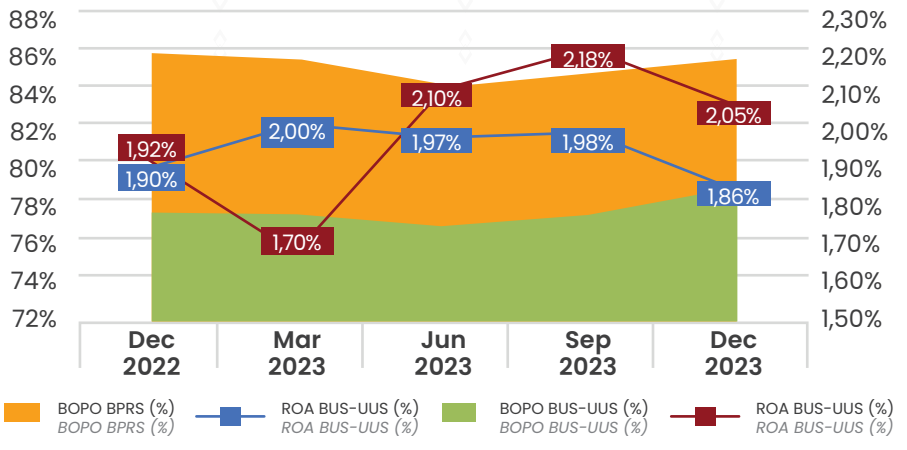

4. Rentabilitas dan Efisiensi

Rentabilitas BUS-UUS stabil di angka 1,86% sementara BPRS mencatatkan peningkatan rentabilitas dari 1,92% pada tahun 2022 menjadi 2,05% di tahun 2023. Efisiensi perbankan syariah juga tetap terjaga terlihat dari rasio BOPO yaitu sebesar 78,97% untuk BUS-UUS dan 85,79% untuk BPRS.

5. Permodalan

Ketahanan perbankan syariah juga terus solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. BUS maupun BPRS memiliki CAR di atas 20%, dengan CAR BUS sebesar 25,41% dan CAR BPRS sebesar 23,21%.

4. Profitability and Efficiency

The profitability of sharia commercial banks and business units was stable at 1.86, sharia rural banks recording an increase from 1.92% in 2022 to 2.05% in 2023. Furthermore, the efficiency of the sharia banking industry was also maintained, as BOPO efficiency ratio of 78.97% for Islamic commercial banks and business units and 85.79% for sharia rural banks.

5. Capital

Islamic banking industry resilience also remained solid in 2023, as indicated by ample liquidity. Islamic commercial banks and Islamic rural banks maintained a Capital Adequacy Ratio (CAR) above 20% at 25.41% and 23.21% respectively.

III.5 Perkembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Capital Market Industry, Financial Derivatives and Carbon Exchange Development

III.5.1. Perkembangan Pasar Modal

Capital Market Development

1. Perkembangan Perdagangan Efek

Pasar saham pada akhir 2023 menguat dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.272,80 atau mengalami peningkatan sebesar 6,16% *yoy*, dengan nilai kapitalisasi pasar saham mencapai Rp11.674 triliun atau naik 22,90% *yoy*.

1. *Securities Trading*

The stock market rallied at the end of 2023 with the Jakarta Composite Index (JCI) closing up 6.16% yoy at a level of 7,272.80, with the market capitalisation value increasing 22.90% yoy to reach IDR11,674 trillion.

Grafik 3.20. Pergerakan IHSG Tahun 2023
Graph 3.20. JCI Performance in 2023

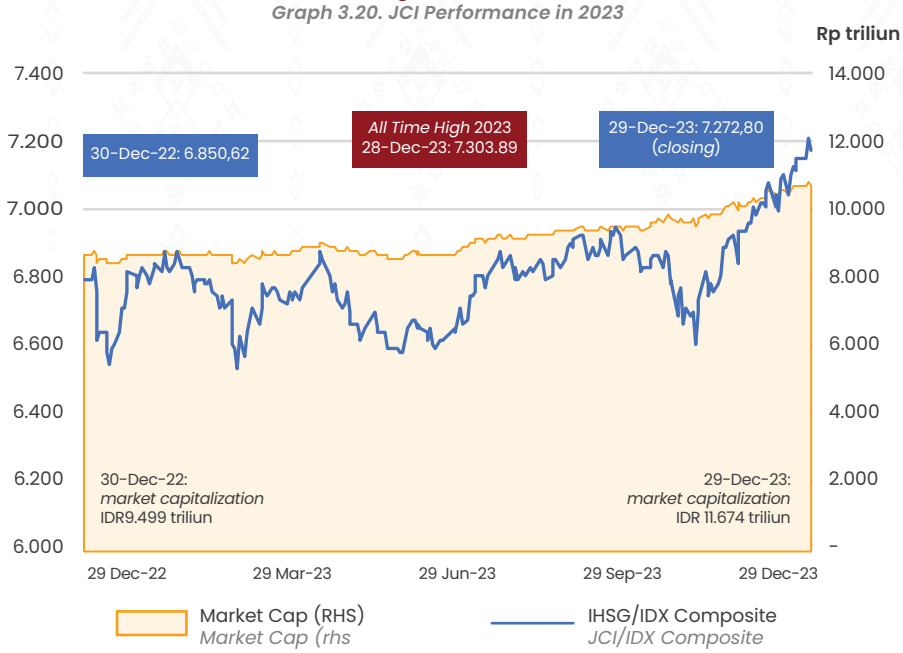

Sumber : IDX
Source: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Grafik 3.21. Perkembangan Kinerja Indeks Saham Bursa Regional
Graph 3.21. Global Stock Market Index Performance

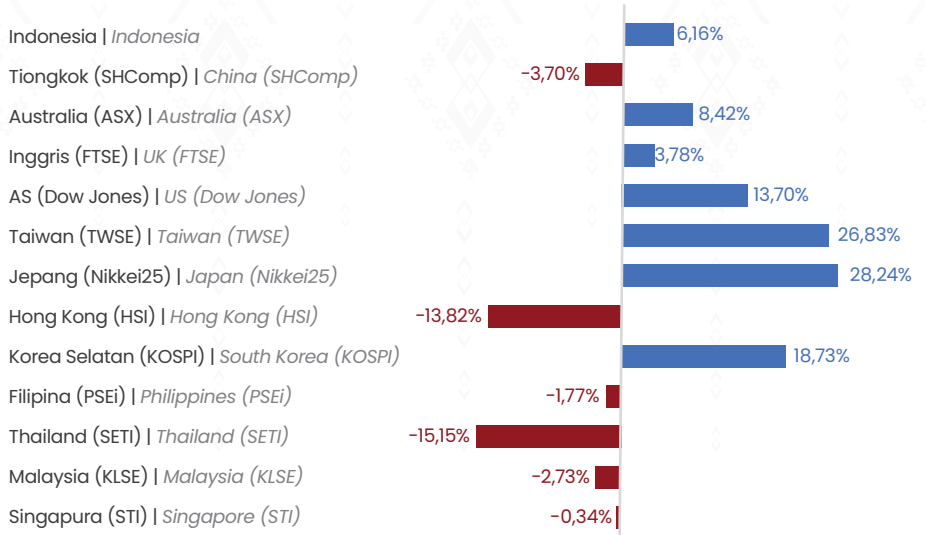

*) Data per tanggal 30 Desember 2022 dan 29 Desember 2023 (hari terakhir bursa di masing-masing *region*).
*) *Data as of 30th December 2022 and 29th December 2023 (last day of trading in each region)*

Sumber: Bloomberg, diolah
Source: Bloomberg, processed

Kinerja indeks saham di beberapa bursa saham regional sampai akhir 2023 mengalami penurunan seperti bursa Tiongkok, Hong Kong, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dengan penurunan tertinggi terjadi di bursa Thailand yakni sebesar -15,15% *yoy*. Sementara itu Indonesia, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, mencatatkan kinerja yang positif dengan indeks saham bursa Jepang memiliki nilai peningkatan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 28,24% *yoy*.

Stock indexes on several stock exchanges in the region at the end of 2023 trended downwards, including China, Hong Kong, the Philippines, Thailand, Malaysia and Singapore, with Thailand experiencing the largest decline of -15.15% yoy. On the other hand, indexes in Indonesia, Australia, UK, US, Taiwan, Japan and South Korea maintained positive performance, led by Japan with growth of 28.24% yoy.

Selanjutnya, Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia menunjukkan beberapa sektor yang mengalami peningkatan kinerja yaitu Sektor Infrastruktur, Bahan Baku, Keuangan, Barang Konsumen Primer, dan Properti & *Real Estate*.

Meanwhile, sectoral indices on the Indonesia Stock Exchange (IDX) demonstrated broad-based gains across several sectors, namely infrastructure sector, basic materials, financial, consumer non-cyclical, and property & real estate.

Grafik 3.22. Kinerja Indeks Sektoral
Graph 3.22. Sectoral Index Performance

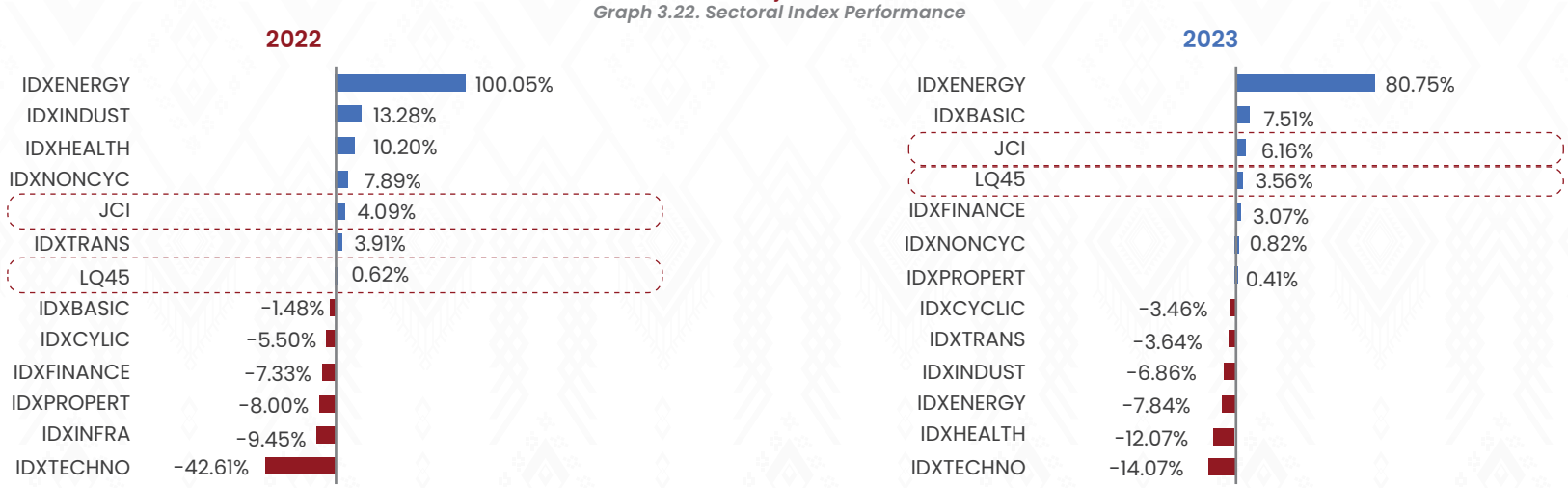

Sumber: IDX
Source: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Nilai rata-rata perdagangan saham harian mengalami penurunan sebesar Rp3,96 triliun (26,93%) dari tahun 2022. Rata-rata frekuensi perdagangan saham harian juga mencatatkan penurunan sebesar 9,65% menjadi 1.180 ribu kali di tahun 2023.

Average daily trading value decreased by IDR3.96 trillion (26.93%) from 2022, while average daily trading frequency also decreased by 9.65% to 1,180 thousand in 2023.

Grafik 3.23. Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
Graph 3.23. JCI Performance and Average Daily Trading Value

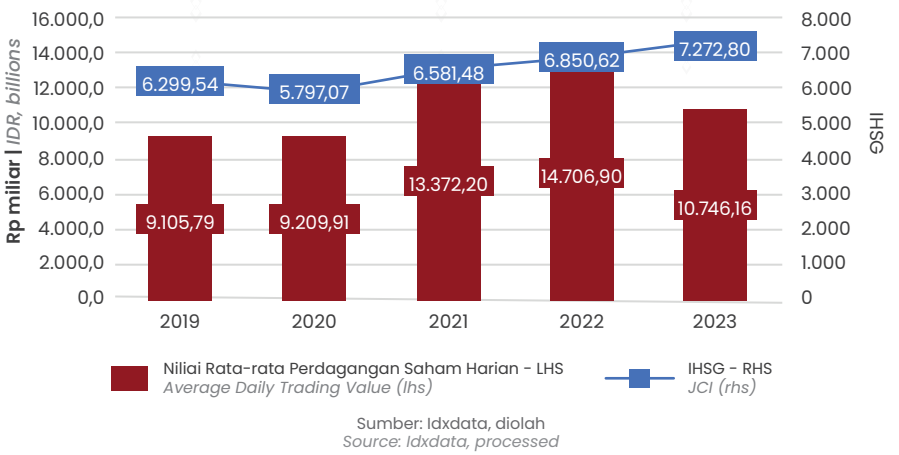

Sumber: Idxdata, diolah
Source: Idxdata, processed

Tabel 3.10. Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik
Table 3.10. Share Trading by Residents and Non-Resident Investors

Indikator (Rata-rata Harian) *Indicators (Daily Average)*	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar) *Average Daily Trading Value (IDR, billions)*	9.105,79	9.209,91	13.372,20	14.706,90	10,746.16
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (ribu) *Average Daily Trading Frequency (thousands)*	468.805	677.430	1.294,82	1.306.19	1,180,194
Nilai Transaksi Investor Asing (Rp miliar) *Transaction Value of Non-Resident Investors (IDR, billions)*					
Beli | *Buy*	3.052,76	2.801,39	3.444,52	4.928,45	3,986.62
Jual | *Sell*	2.851,97	2.999,23	3.290,77	4.682,21	4,012.51
Nilai Transaksi Investor Domestik (Rp miliar) *Transaction Value of Resident Investors (IDR, billions)*					
Beli | *Buy*	6.053,04	6.410,31	9.927,21	9.778,45	6,759.54
Jual | *Sell*	6.253,83	6.212,47	10.080,95	10.024,69	6,733.65

Sumber: Idxdata, diolah
Source: Idxdata, processed

Sepanjang 2023, transaksi investor asing membukukan *net sell* sebesar Rp6,19 triliun yang menunjukkan adanya *capital outflow* di pasar saham. Sementara itu, perdagangan saham sampai dengan akhir 2023 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik, yakni sebesar 62,78%.

In 2023, non-resident investors booked a net sell totalling IDR6.19 trillion, pointing to a capital outflow from the stock market. Meanwhile, resident investors continued to dominate trade on the stock market in terms of value and volume, accounting for 62.78% at the end of 2023.

Grafik 3.24. Perkembangan IHSG dan *Net Buy/Sell* Investor Asing
Graph 3.24. JCI and Net Buy/Sell of Foreign Investors

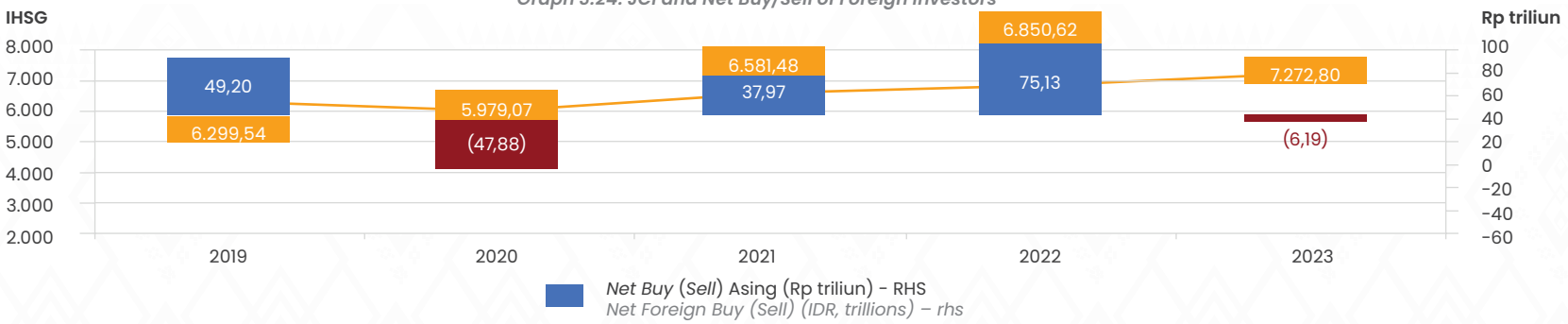

Sumber: Idxdata, diolah
Source: idxdata, processed

Pada 2023, kinerja pasar Surat Utang secara komposit yang ditunjukkan oleh Indonesia *Composite Bond Index* mengalami peningkatan sebesar 8,65% ke level 374,61 jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pasar Surat Utang juga ditandai dengan turunnya INDOBeX *Composite-Effective Yield* sebesar 0,0903 poin secara *yoy* ke level 6,6304.

In 2023, composite bond market performance improved, as reflected by an 8.65% bump in the Composite Bond Index to a level of 374.61. Stronger bond market performance was also shown by a lower INDOBeX Composite-Effective Yield, falling 0.0903 points yoy to a level of 6.6304.

Grafik 3.25. Perkembangan *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI)
Graph 3.25. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) Performance

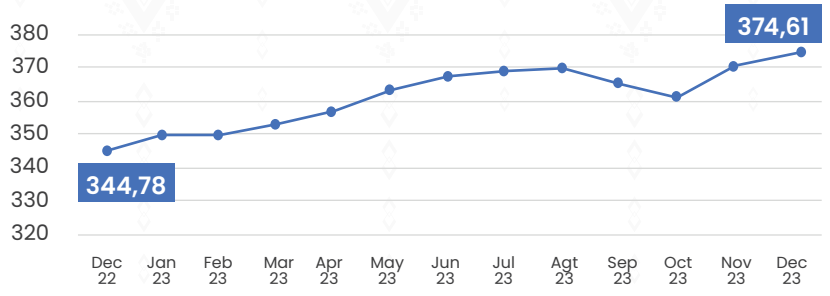

Sumber: PHEI
Source: Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)

Grafik 3.26. Perkembangan *Indonesia Bond Index Composite – Effective Yield*
Graph 3.26. ICBI – Effective Yield

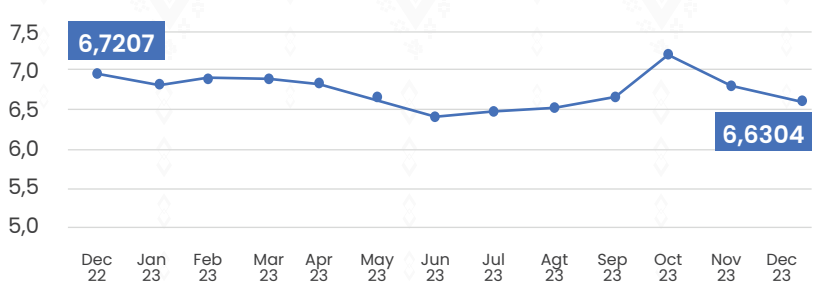

Sumber: PHEI
Source: Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)

Perdagangan Surat Utang & Sukuk Korporasi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai perdagangan sebesar Rp96,05 triliun (19,52%) menjadi Rp588,14 triliun. Nilai perdagangan Surat Utang & Sukuk Pemerintah turun sebesar Rp163,85 triliun (-1,35%) menjadi Rp11.934,72 triliun. Sementara itu, untuk nilai perdagangan Repo sebesar Rp1.397,22 triliun (-21,25%) menjadi sebesar Rp5.177,90 triliun.

The trading value of corporate debt securities and sukuk increased by IDR96.05 trillion, or 19.52%, to IDR588.14 trillion. On the other hand, the trading value of government debt securities and sukuk fell by IDR163.85 trillion, or -1.35%, to IDR11,934.72 trillion. Meanwhile, the trading value of repo transactions decreased by IDR1,397.22 trillion, or -21.25%, to IDR5,177.90 trillion.

Tabel 3.11. Perkembangan Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk
Table 3.11. Bond and Sukuk Trading Development

Jenis Efek *Securities Type*	**2022**	**2023**
	Nilai (Rp triliun) | *Value (IDR, trillions)*	**Nilai (Rp triliun) | *Value (IDR, trillions)***
Surat Utang dan Sukuk | *Bonds and Sukuk* :		
• Korporasi | *Corporate*	492,09	588,14
• Pemerintah | *Government*	12.098,57	11.934,72
Jumlah | *Total*	12.590,65	12.522,87
Repo | *Repo*	6.575,12	5.177,90

Sumber: *Bond Reporting* (PLTE *Report*)
Source: Bond Reporting (PLTE Report)

2. Perkembangan Jumlah *Single Investor Identification* (SID)

Jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 12.168.061 atau meningkat 18,01% *yoy*. Jumlah SID C-BEST mencapai 5.255.571 atau mengalami peningkatan sebanyak 815.638 SID (18,37% *yoy*). Sedangkan, jumlah SID S-INVEST mencapai 11.416.711 atau bertambah sebanyak 1.812.442 SID (18,87% *yoy*) dan SID SBN mencapai 1.002.727 atau mengalami peningkatan sebanyak 171.272 SID (20,60% *yoy*) dibandingkan posisi akhir 2022.

2. *Single Investor Identification (SID)*

The amount of Single Investor Identification (SID numbers issued reached 12,168,061 overall, up 18.01% yoy. Meanwhile, the amount of C-BEST SID numbers issued increased by 815,638 (18.37% yoy) to reach 5,255,571, the amount of S-INVEST SID numbers issued increased by 1,812,442 (18.87% yoy) to reach 11,416,711, and the amount of SBN SID numbers issued increased by 171,272 (20.60% yoy) to reach 1,002,727 in total at the end of 2022.

Grafik 3.27. Perkembangan Jumlah SID
Graph 3.27. Growth of Single Investor Identification (SID)

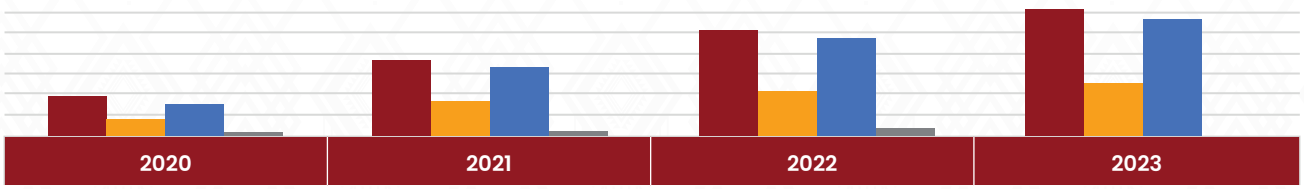

	2020	2021	2022	2023
Total SID	3.880.753	7.489.337	10.311.152	12.168.061
C-BEST	1.695.268	3.451.513	4.439.933	5.255.571
S-INVEST	3.175.429	6.840.234	9.604.269	11.416.711
SBN	460.372	611.143	831.455	1.002.727

Sumber: KSEI
Source: Indonesian Central Securities Depository (KSEI)

3. Perkembangan Industri Pengelolaan Investasi

Pada akhir 2023, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana turun sebesar Rp3,4 triliun (-0,67% *yoy*) menjadi Rp501,46 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp504,86 triliun. Terdapat tiga Reksa Dana yang mencatatkan penurunan NAB di akhir 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Reksa Dana Saham turun sebesar Rp18,24 triliun (-17,37%), diikuti Reksa Dana Pasar Uang turun sebesar Rp5,61 triliun (-6,95%), dan Reksa Dana Indeks turun sebesar Rp0,09 triliun (-0,69%). Sedangkan Reksa Dana lainnya mencatatkan pertumbuhan, dengan pertumbuhan NAB tertinggi pada yaitu ETF dan Reksa Dana Campuran dengan kenaikan masing-masing sebesar 24,64% (bertambah Rp3,38 triliun) dan 22,7% (bertambah Rp4,94 triliun).

3. *Investment Management Industry Development*

At the end of 2023, the net asset value (NAV) of investment funds decreased by IDR3.4 trillion (-0.67% yoy) to IDR501.46 trillion from IDR504.86 trillion the year earlier. Three mutual funds recorded a lower NAV at the end of 2023 compared with the previous year, namely Equity Funds that fell IDR18.24 trillion (-17.37%), followed by Money Market Funds at IDR5.61 trillion (-6.95%) and Indexed Funds at IDR0.09 trillion (-0.69%). Meanwhile, other mutual funds recorded NAV growth, led by Exchange Traded Funds (ETF) and Discretionary Funds at 24.64% (IDR3.38 trillion) and 22.7% (IDR4.94 trillion) respectively.

Tabel 3.12. Perkembangan NAB Per Jenis Reksa Dana
Table 3.12. Net Asset Value (NAV) per Type of Mutual Funds

NAB Per Jenis Reksa Dana	2022 (Rp triliun) | *(IDR trillion)*				2023 (Rp triliun) | *(IDR trillion)*				*NAB per Type of Mutual Funds*
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
RD Pasar Uang	102,85	91,81	88,41	80,73	71,36	69,54	66,43	75,12	*Money Market Funds*
RD Pendapatan Tetap	148,81	137,48	141,65	133,39	136,78	143,46	144,93	135,56	*Fixed Income Funds*
RD Saham	118,19	118,40	108,52	105,01	99,77	99,19	91,13	86,77	*Equity Funds*
RD Campuran	26,24	23,85	24,25	21,70	24,18	25,81	27,47	26,64	*Discretionary Funds*
RD Terproteksi	101,20	108,52	102,75	96,67	99,70	100,30	103,24	104,55	*Protected Funds*
RD Indeks	8,96	10,93	11,91	13,03	12,27	12,29	13,03	12,94	*Indexed Funds*
ETF	15,62	13,54	12,82	13,72	14,09	14,52	16,95	17,10	*Exchange Traded Funds (ETF)*
RD Syariah*	43,23	40,86	40,34	40,61	42,65	42,95	43,11	42,78	*Sharia Funds*
Total	565,12	545,39	530,65	504,86	500,81	508,06	506,29	501,46	Total

*) termasuk ETF Saham Syariah | *Including Sharia Equity ETF*

Tabel 3.13. Nilai Dana Kelolaan Industri Pengelolaan Investasi
Table 3.13. Value of Managed Funds in Investment Management Industry

Jenis Investasi *Investment Type*	2022				2023			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Reksa Dana (termasuk ETF) | *Mutual Funds (including ETF)*	565,12	545,39	530,65	504,86	500,81	508,06	506,29	501,46
RDPT** | *Private Equity Funds (RDPT)*	30,82	27,78	29,71	27,25	27,25	25,85	25,96	21,58
EBA* | *Asset-Backed Securities*	2,85	2,57	1,53	1,71	1,72	1,65	1,63	1,64
EBA-SP* | *Asset-Backed Securities Participatory Note (EBA-SP)*	3,33	3,12	2,91	3,20	3,11	2,87	2,87	3,34
DIRE* | *Real Estate Investment Trust (REIT)*	10,24	10,32	10,33	10,33	10,33	10,30	10,33	10,34
KPD * | *Fund Management Contracts*	243,07	242,46	258,52	268,87	273,53	274,03	277,59	274,95
DINFRA** | *Infrastructure Investment Fund - Collective Investment Contracts (DINFRA)*	7,59	7,77	7,90	7,99	7,99	7,85	8,37	7,92

Catatan: Nilai dalam Rp Triliun | *Values in trillions of rupiah*
*data lag 1 bulan | *1-month data lag*
**data lag 3 bulan | *3-month data lag*

4. Perkembangan Penghimpunan Dana Melalui Penawaran Umum

Dari sisi penghimpunan dana melalui pasar modal, tercatat jumlah Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar -4,29% *yoy* menjadi 223 perusahaan, yang terdiri dari 78 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 25 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 120 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. Nilai emisi Penawaran Umum juga mengalami penurunan sebesar -4,61% *yoy* menjadi Rp255,39 triliun.

4. *Fundraising through Public Offerings*

In terms of fundraising through the capital market, the number of Public Offerings experienced a -4.29% yoy contraction to 223 issuing companies, consisting of 78 Initial Public Offerings (IPO), 25 Rights Issues, and 120 Corporate Bond And Sukuk Offerings (PU EBUS). The value of public offerings also experienced a -4.61% yoy declined to IDR255.39 trillion.

Tabel 3.14. Perkembangan Penawaran Umum
Table 3.14. Public Offerings Growth

Jenis Penawaran Umum *Type of Public Offering*	2022		2023		Δ (%) Jumlah Emisi *Total Issuance*	Δ (%) Nilai Emisi *Issuance Value*
	Jumlah Emisi *Total Issuances*	Nilai Emisi (Rp triliun) *Issuance Value (IDR, trillions)*	Jumlah Emisi *Total Issuances*	Nilai Emisi (Rp triliun) *Issuance Value (IDR, trillions)*		
Penawaran Umum Perdana Saham *Initial Public Offering*	65	33,01	78	54,33		
Penawaran Umum Terbatas *Rights Issue*	45	78,37	25	56,18		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk* *Corporate Bond and Sukuk Offering**	123	156,33	120	144,88		
Jumlah | *Total*	**233**	**267,71**	**223**	**255,39**	**-4,29**	**-4,61**

** Termasuk Penawaran Umum Berkelanjutan tahap I dan seterusnya
***including phase 1 shelf registration and subsequent phases*

Pada 2023, jumlah Emiten baru di Pasar Modal yang Pernyataan Pendaftarannya telah dinyatakan Efektif oleh OJK adalah sebanyak 83 yang terdiri dari 78 Emiten Baru Saham dan lima Emiten Baru Penerbit Efek Bersifat Utang/Sukuk.

In 2023, the number of new issuers in the capital market with effective registration statements approved by OJK totalled 83, consisting of 78 new issuers of shares and five new issuers of debt securities/sukuk,

Grafik 3.28. Perkembangan Jumlah Emiten Baru
Graph 3.28 New Issuers Growth

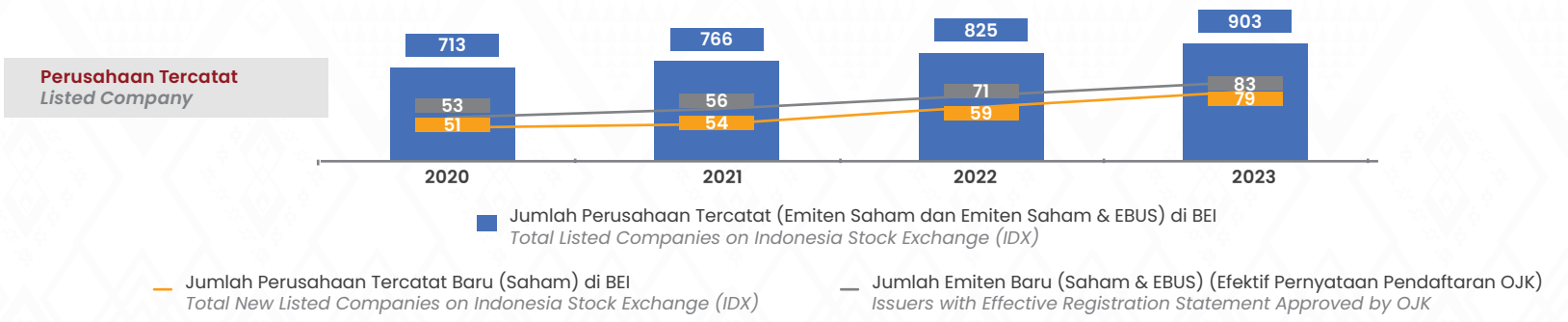

5. Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai 2023, penyaluran dana untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) melalui platform *Securities Crowdfunding* adalah sebagai berikut:

5. *Securities Crowdfunding*

Until 2023, fund disbursements for micro, small and medium enterprises (MSME) through securities crowdfunding platforms were as follows:

Tabel 3.15. Penghimpunan Dana Melalui *Securities Crowdfunding*
Table 3.15. Fundraising through Securities Crowdfunding

No	Nama Penyelenggara *Platforms*	Jumlah Penerbit *Total Issuers*	Jumlah Pemodal *Total Investors*	Total Dana yang Tersalurkan (Rp)* *Total Funds Disbursed (IDR)**
1	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	1	23	226.100.000
2	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	33	9.822	77.651.010.000
3	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15	158	9.242.017.111
4	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	6	277	7.263.650.000
5	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	1	1	2.000.000.000
6	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	142	39.403	222.844.518.850
7	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	4	801	11.846.362.500
8	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	43	25.400	217.649.860.000
9	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	89	61.153	145.048.393.400
10	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	160	31.030	350.035.600.000
11	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	-	-	-
12	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	-	-	-
13	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	-	-	-
14	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	-	-	-
15	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	-	-	-
16	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	-	-	-
	**Jumlah	*Total***	**494**	**168.068**	**1.043.807.511.861**

*Catatan | *Notes* :
1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah *fully funded* (tidak termasuk yang masih dalam proses).
   The data presented is fully funded ECF-SCF issuance data (excluding in process)
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana.
   The data is accumulated since fundraising began

Sumber data: ALUDI, diakses pada 5 Januari 2024.
Source: ALUDI, accessed on 5th January 2024.

III.5.2. Perkembangan Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon

Financial Derivatives and Carbon Exchange Development

1. Perkembangan Keuangan Derivatif

Sampai akhir 2023, terdapat empat jenis produk keuangan *derivative futures* dari PT Bursa Efek Indonesia yaitu:

a. IDX LQ45 *Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks LQ45 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk IDX LQ45 *Futures*.

b. IDX30 *Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks IDX30 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk IDX30 *Futures*.

c. *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF): merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu SUN Seri *Benchmark* dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk IGBF bertenor lima dan 10 tahun.

d. *Basket Bond Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli sekumpulan SUN Seri *Benchmark* dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk *Basket Bond Futures* dengan tenor lima tahun dan 10 tahun.

2. Perkembangan Bursa Karbon

Sampai akhir 2023, terdapat satu Penyelenggara Pasar yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara Bursa Karbon yaitu PT Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon) dan terdapat 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar di Bursa Karbon. Di antara 46 perusahaan pengguna jasa bursa karbon tersebut sebanyak 10 perusahaan (21,74%) adalah perusahaan publik.

Produk unit karbon di IDX Carbon hingga akhir tahun 2023 sebagai berikut:

a. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di IDX Carbon:

1. Financial Derivatives Development

At the end of 2023, four types of futures derivative were available from the Indonesia Stock Exchange (IDX) as follows:

a. IDX LQ45 Futures: an agreement (contract) between two parties to buy or sell a group of LQ45 index shares at a previously agreed price and time. There are currently three products of IDX LQ45 Futures.

b. IDX30 Futures: an agreement (contract) between two parties to buy or sell a group of IDX30 index shares at a previously agreed price and time. There are currently three products of IDX30 Futures.

c. Indonesia Government Bond Futures (IGBF): an agreement (contract) between two parties to buy or sell a benchmark series of government securities (SUN) at a previously agreed price and time. There are currently six IGBF products with tenors of 5 and 10 years.

d. Basket Bond Futures: an agreement (contract) between two parties to buy or sell a group of benchmark series government securities (SUN) at a previously agreed price and time. There are currently six Basket Bond Futures products with tenors of 5 and 10 years.

2. Carbon Exchange Development

At the end of 2023, one Market Operator was licensed as the Carbon Exchange Operator, namely PT Bursa Efek Indonesia (IDX Indonesia), along with 46 registered carbon exchange service participants, 10 of which are listed companies (21.74%).

At the end of 2023, the carbon units trading on IDX Carbon were as follows:

a. Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) listed on IDX Carbon:

No.	*Series*	*Instrument/Project*	*Vintage*
1.	SPE-10-PR-VI-2023-14464	Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk *Lahendong Unit 5 & Unit 6 Project by PT Pertamina Geothermal Energy Tbk*	2016-2020
2.	SPE-11-PR-V-2023-10867	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang *Construction of the New Gas-Fueled Power Plant PLTGU Block 3 PJB Muara Karang*	2023

b. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi – Pelaku Usaha (PTBAE-PU) belum diperdagangkan melalui Bursa Karbon. Saat ini, hanya dari sektor energi dengan sub sektor ketenagalistrikan atau pembangkit listrik tenaga batubara yang telah ditetapkan PTBAE oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
c. Total sebaran SPE GRK yang telah diterbitkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada tahun 2023 sebanyak 1.791.322 tCO2e. Dari jumlah tersebut, total yang tersedia untuk Bursa Karbon sebanyak 1.764.209 tCO2e, di mana yang sudah berhasil diperdagangkan sebesar 494.253 tCO2e (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, dan negosiasi). Sebesar 6.260 tCO2e sudah dilakukan *retirement*, sehingga sampai triwulan IV 2023 sisa SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan 1.757.949 tCO2e.

b. Technical Approval of Emission Limits – Business Players (PTBAE-PU) not yet traded through the Carbon Exchange. Currently, only the energy sector, namely the electricity and coal-fired power plant subsector have been designated PTBAE by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia.
c. The total distribution of SPE GRK carbon units issued by the National Climate Change Control Registry System (SRN PPI) in 2023 was recorded at 1,791,322 tCO2e, of which 1.764.209 tCO2e are available for the carbon exchange, where 494,253 tCO2e have already been traded based on regular, auction and negotiation trade mechanisms. In total, 6,260 tCO2e have been retired, with the remaining 1,757,949 tCO2e still tradable as of the fourth quarter of 2023.

III.5.3. Perkembangan Pasar Modal Syariah
Islamic Capital Market Development

Selama 2023, perkembangan Pasar Modal syariah Indonesia cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari produk syariah di Pasar Modal yang mengalami kenaikan dari sisi produk saham syariah, reksa dana syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara.

Dari sisi indeks saham, meskipun terjadi penurunan nilai indeks pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar -2,23% dibandingkan akhir 2022 menjadi sebesar 212,64, kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 28,41% menjadi Rp6.145,96 triliun. Hal yang sama terjadi pada produk Reksa Dana syariah, meskipun terjadi penurunan jumlah produk Reksa Dana syariah sebesar -0,36%, kinerja Nilai Aktiva Bersih (NAB) berhasil tumbuh sebesar 5,34%. Peningkatan juga terjadi pada nilai *outstanding* sukuk korporasi sebesar 6,52%, dan nilai *outstanding* sukuk negara sebesar 7,53% dibandingkan tahun lalu.

In 2023, the Islamic capital market in Indonesia performed positively. This was confirmed by the growing number of Islamic products available in the capital market, including sharia shares, sharia mutual funds, corporate sukuk and government sukuk.

Regarding the stock index, despite a -2.23% decline recorded in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) compared with conditions at the end of 2022 to a level of 212.64, market capitalisation increased by 28.41% to IDR6,145.96 trillion. Similarly, in spite of a -0.36% decline in the number of sharia investment fund products available, the Net Asset Value (NAV) increased by 5.34%. Meanwhile, the value of outstanding corporate sukuk and government sukuk climbed 6.52% and 7.53% respectively on the previous year.

1. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik dua kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham. Sepanjang 2023, DES periode I diterbitkan tanggal 24 Mei 2023, yang berlaku efektif 1 Juni 2023 sampai dengan 30 November 2022. Selanjutnya, DES periode II terbit tanggal 24 November 2023, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023 hingga penerbitan DES periode selanjutnya.

Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 574 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 629 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode II pada 24 November 2023 sampai akhir tahun 2023, terdapat penambahan delapan saham yang masuk dalam DES. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir 2023 berjumlah 637 saham.

1. Islamic Shares Development

OJK publishes the sharia Securities List (DES) biannually and also incidentally when there are corporate actions, particularly an initial public offering (IPO). In 2023, the DES list for period 1 was published at dated 24th May 2023, effective from 1st June 2023 until 30th November 2022. The DES list for period 2 was published dated 24th November 2023, effective from 1st December 2023 until the subsequent DES list is published.

In total, 574 sharia securities were listed in period 1, includes shares of issuers and public companies as well as other sharia securities, also 629 listed in the second period.

From the date of publication of the DES list for the second period on 24th November 2023 until the end of 2023, eight additional shares were listed issued. In total, 637 shares were included on the DES list at the end of 2023.

Grafik 3.29. Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri
Graph 3.29. Islamic Shares by Economic Sectors

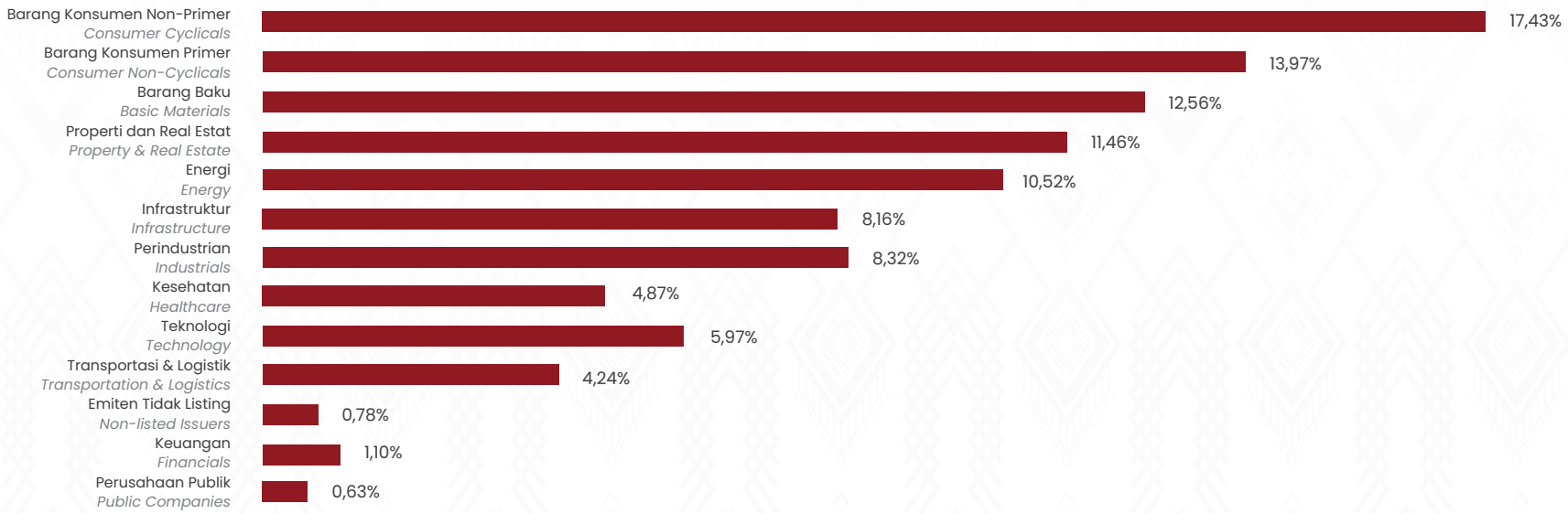

Kinerja saham syariah dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX *Sharia Growth*. Pada akhir Desember 2023, ISSI ditutup pada level 212,64 atau menurun sebesar -2,33% dibandingkan indeks ISSI akhir 2022 sebesar 217,73. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir 2023 sebesar Rp6.145,96 triliun, meningkat sebesar 28,41% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir 2022 sebesar Rp4.786,02 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII mengalami penurunan sebesar -8,90% *yoy* dengan ditutup pada level 535,68, namun nilai kapitalisasi pasar meningkat sebesar 16,05% *yoy* mencapai Rp2.501,49 triliun. Selanjutnya, indeks JII70 per akhir 2023 juga ditutup -8,02% *yoy* pada level 183,06, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp3.306,08 triliun, naik sebesar 23,91% dibandingkan akhir 2022.

Indeks IDX-MES BUMN 17 pada akhir 2023 ditutup pada level 79,66 atau menurun sebesar -13,19% *yoy*. Nilai kapitalisasi pasar indeks IDX-MES BUMN 17 juga mengalami kenaikan sebesar 14,66%, dari sebelumnya Rp647,03 triliun menjadi Rp741,88 triliun. Begitu juga dengan indeks IDX *Sharia Growth* pada akhir 2023 ditutup pada level 90,39 atau menurun sebesar -13,82% dibandingkan akhir 2022, namun nilai kapitalisasi pasar indeks IDX *Sharia Growth* juga mengalami kenaikan sebesar 21,80%.

The performance of Islamic shares is reflected in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, and IDX Sharia Growth. At the end of December 2023, the ISSI index closed at a level of 212.64, down -2.33% on the 217.73 recorded at the end of 2022. On the other hand, ISSI market capitalisation at the end of 2023 stood at IDR6,145.96 trillion, up 28.41% on the IDR4,786.02 trillion recorded at the end of 2022.

In the same period, the JII index experienced an -8.90% yoy contraction to close at a level of 535.68, contrasting market capitalisation that increased 16.05% yoy to reach IDR2,501.49 trillion. Meanwhile, the JII70 Index also retreated by -8.02% yoy to a level of 183.06, with market capitalisation growing 23.91% yoy to reach IDR3,306.8 trillion.

The IDX-MES BUMN 17 index closed at a level of 79.66 at the end of 2022, down -13.19% yoy. On the other hand, market capitalisation increased 14.66% from IDR647.03 trillion to IDR741.88 trillion. Similarly, the IDX Sharia Growth index fell 13.82% yoy to close at a level of 90.39 at the end of 2023 but with market capitalisation experiencing 21.80% yoy growth.

Tabel 3.16. Perkembangan Indeks Saham Syariah
Table 3.16. Sharia Stock Market Index

Tahun *Year*	Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index (JII)*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*	Jakarta Islamic Index 70 *JII70*	IDX MES BUMN 17 *IDX-MES BUMN 17*	IDX *Sharia Growth* *IDX Sharia Growth*	Indeks Harga Saham Gabungan *Jakarta Composite Index (JCI)*
2019	698,09	187,73	233,38			6.299,54
2020	630,42	177,48	220,21			5.979,07
2021	562,02	189,02	195,96	94,63		6.581,48
2022	588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850.62
2023	535,68	212,64	183,06	79,66	90,39	7.272,80

Tabel 3.17 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
Table 3.17 Sharia Stock Market Capitalisation

(Rp Triliun)
(IDR Trillion)

Tahun *Year*	Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index (JII)*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*	Jakarta Islamic Index 70 *JII70*	IDX MES BUMN 17 *IDX-MES BUMN 17*	IDX *Sharia Growth* *IDX Sharia Growth*	Indeks Harga Saham Gabungan* *Jakarta Composite Index (JCI)**
2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00			7.265,02
2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42			6.968,94
2021	2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74		8.252,41
2022	2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.494,42
2023	2.501,49	6.145,96	3.306,08	741,88	1.366,19	11.674,06

*Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi.
**All listing boards, including the Main Board, Development Board and Acceleration Board*

2. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2023, terdapat penerbitan 54 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp14,99 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 41 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum yang jatuh tempo, dengan total nilai Rp12,12 triliun. Hingga Desember 2023, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 234 seri sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 24,10% dari 971 seri jumlah total sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp45,37 triliun dengan proporsi nilai sukuk 9,79% dari jumlah total sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp463,08 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang mencatatkan Rp42,50 triliun, terjadi peningkatan *outstanding* sebesar 6,75% pada akhir tahun 2023. Secara kumulatif, sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 70 emiten yang menerbitkan sukuk korporasi sebanyak 457 seri dengan total nominal penerbitan mencapai Rp99,96 triliun.

2. *Corporate Sukuk*

In 2023, 54 series of corporate sukuk were issued through public offerings with a value of IDR14.99 trillion. In the same period, 41 series of corporate sukuk issued through public offerings matured, valued at IDR12.12 trillion. As of December 2023, 234 series of corporate sukuk were outstanding, accounting for 24.10% of the 971 series of outstanding corporate sukuk and bonds. The value of outstanding corporate sukuk issued through public offering reached IDR45.37 trillion in the reporting period, accounting for 9.79% of total outstanding corporate sukuk and bonds worth IDR463.08 trillion. Compared with the end of 2022 when IDR42.50 trillion was recorded, the value of outstanding corporate sukuk increased 6.75% in 2023. Cumulatively, therefore, a total of 457 series of corporate sukuk were issued as of the end of 2023 by 70 issuers, with a total issuance value of IDR99.96 trillion.

Tabel 3.18. Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
Table 3.18. Corporate Sukuk Issuances

Tahun *Year*	Emisi Sukuk (Akumulasi Penerbitan) *Sukuk Issuances (Accumulated Issuances)*		Sukuk *Outstanding* *Outstanding Sukuk*	
	Total Nilai (Rp Triliun) *Total Value (IDR, trillions)*	Total Jumlah *Amount*	Total Nilai (Rp Triliun) *Total Value (IDR, trillions)*	Total Jumlah *Amount*
2019	48,24	232	29,83	143
2020	55,15	274	30,35	162
2021	66,45	327	34,77	189
2022	84,97	403	42,50	221
2023	99,96	457	45,37	234

Dari 234 sukuk korporasi melalui penawaran umum yang *outstanding* pada akhir 2023, terdapat 121 seri sukuk korporasi (51,71%) yang menggunakan akad *ijarah*, 99 seri sukuk korporasi (42,31%) menggunakan akad *mudharabah*, 12 seri sukuk korporasi (5,13%) menggunakan akad *wakalah*, dan 2 seri sukuk korporasi (0,85%) menggunakan akad *musyarakah*. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp18,57 triliun (40,93%) untuk *ijarah*, Rp24,02 triliun (52,94%) untuk *mudharabah*, Rp2,41 triliun (5,31%) untuk akad *wakalah*, dan Rp370,50 miliar (0,82%) untuk akad *musyarakah*.

Of the 234 corporate sukuk series currently outstanding issued through public offerings, 121 series (51.71%) are based on ijarah contracts, with 99 series applying mudharabah contracts (42.31%), 12 series using wakalah contracts (5.13%) and 2 series of corporate sukuk using musyarakah contracts (0.85%). The value of ijarah contracts was recorded at IDR18.57 trillion (40.93%), mudharabah contracts at IDR24.02 trillion (52.94%), wakalah contracts at IDR2.41 trillion (5.31%) and musyarakah contracts at IDR370.50 billion (0.82%).

Grafik 3.30. Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding* melalui Penawaran Umum
Graph 3.30. Corporate Sukuk Issuances and Outstanding through Public Offering

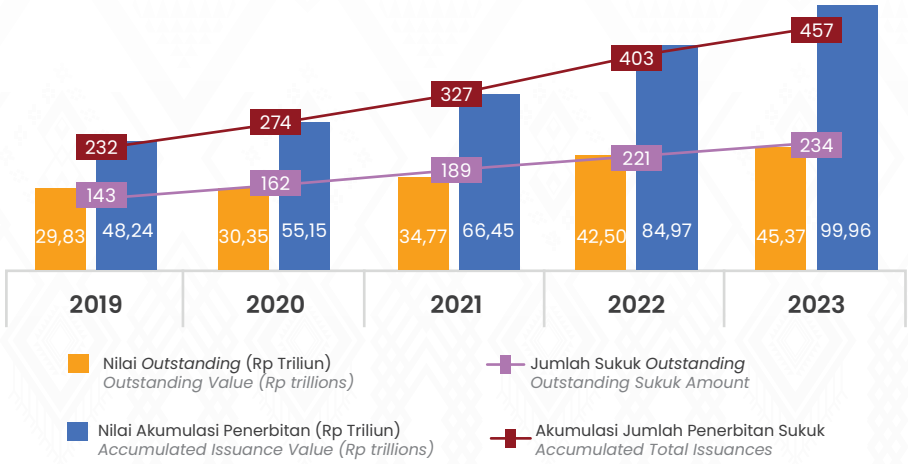

Grafik 3.31. Perbandingan Jumlah Seri Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.31. Composition of Total Outstanding Corporate Sukuk Series by Contract

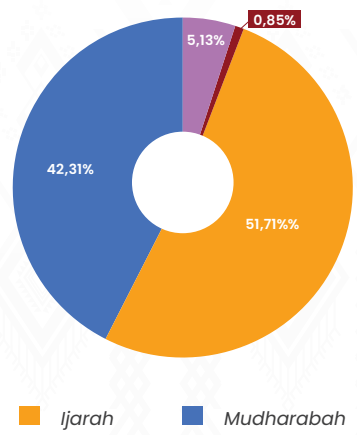

Grafik 3.32 Perbandingan Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.33. Composition of Total Outstanding Corporate Sukuk Value by Contract

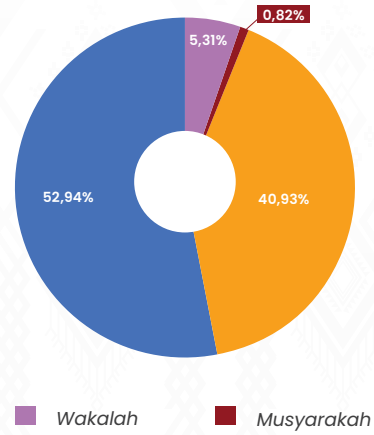

3. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2023 terdapat 34 penerbitan Reksa Dana Syariah efektif, sementara itu pada periode yang sama, terdapat 35 pembubaran Reksa Dana Syariah. Secara kumulatif sampai dengan 29 Desember 2023 terdapat 273 Reksa Dana Syariah beredar dengan NAB per 29 Desember 2023 mencapai Rp42,78 triliun. Jumlah Reksa Dana Syariah ini berkurang sebesar -0,36% dibandingkan dengan jumlah pada tahun lalu. Namun demikian, terdapat peningkatan NAB sebesar 5,34% dibandingkan akhir tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana aktif yang berjumlah Rp501,46 triliun maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 8,53% dari total NAB Reksa Dana aktif.

3. *Sharia Mutual Funds*

In total, 34 sharia mutual funds were issued in 2023 and 35 were redeemed, bringing the cumulative total, as of 29th December 2023, to 273 outstanding sharia mutual funds with a net asset value (NAV) of IDR42.78 trillion recorded on 29th December 2023. The number of outstanding sharia mutual funds decreased -0.36% on the previous year. Notwithstanding, NAV increased 5.34% from the end of 2022. When compared with the total NAV of active mutual funds, which amounted to IDR501.46 trillion, the NAV of sharia mutual funds accounted for 8.53% of active mutual funds.

Tabel 3.19. Perkembangan Reksa Dana Syariah
Table 3.19. Sharia Mutual Funds

Tahun *Year*	Perbandingan Jumlah Reksa Dana *Comparison of Mutual Funds*				Perbandingan NAB (Rp. Triliun) *%; NAV (IDR, trillions)*			
	Reksa Dana Syariah *Sharia Mutual Funds*	Reksa Dana Konvensional *Conventional Mutual Funds*	Reksa Dana Total *Total Mutual Funds*	%	Reksa Dana Syariah *Sharia Mutual Funds*	Reksa Dana Konvensional *Conventional Mutual Funds*	Reksa Dana Total *Total Mutual Funds*	%
2019	265	1.916	2.181	12,15	53,74	488,46	542,20	9,91
2020	289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
2021	289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022	274	1.846	2.120	12,92	40,61	464,26	504,86	8,04
2023	273	1.536	1.809	15,09	42,78	458,68	501,46	8,53

Grafik 3.33. Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Graph 3.33. Total and NAV of Sharia Mutual Funds

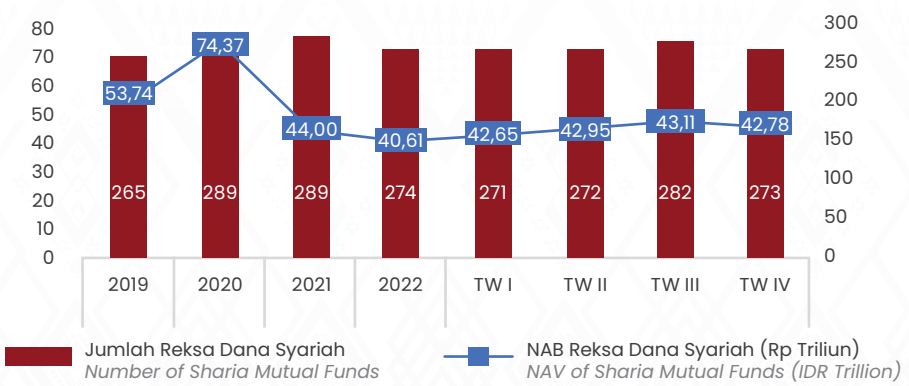

Grafik 3.34. Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*
Graph 3.34. Outstanding Government Sukuk

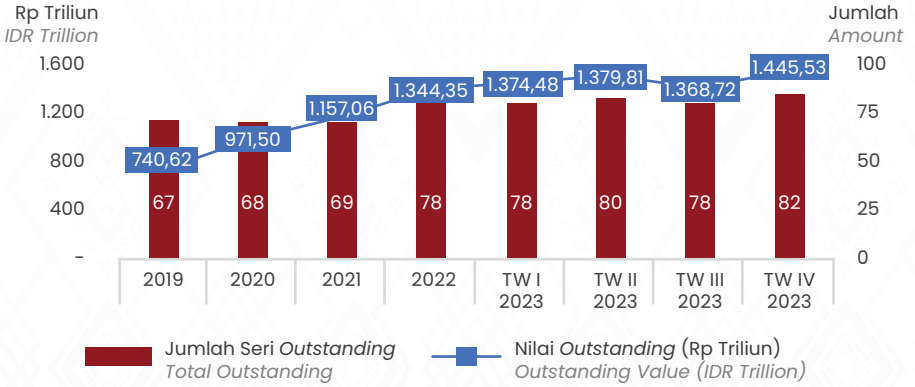

Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir 2023 yakni Reksa Dana Syariah berbasis Efek luar negeri sebesar 27,82%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah pasar uang sebesar 16,90%, dan Reksa Dana Syariah Saham sebesar 14,30%.

By type, foreign securities funds dominated sharia mutual funds in 2023 in terms of net asset value, accounting for 27.82%, followed by money market funds 16.90% and equity funds 14.30%.

Grafik 3.35. Proporsi RDS per Jenis Berdasarkan NAB
Graph 3.35. Proportion of Sharia Mutual Funds per Type by NAB

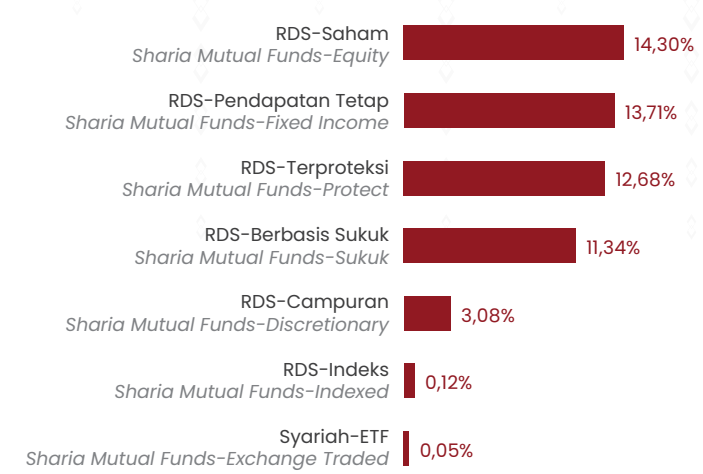

Grafik 3.36. Proporsi RDS per Jenis Berdasarkan Jumlah
Graph 3.36. Proportion of Sharia Mutual Funds per Type by Numbers

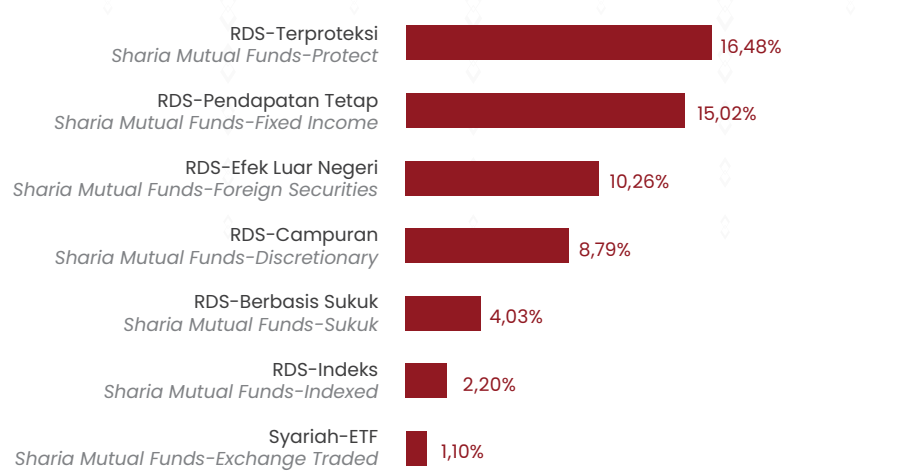

4. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Sampai akhir 2023, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 82 seri, meningkat 5,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan dari nilai *outstanding* sukuk negara, yaitu sebesar Rp1.445,53 triliun atau meningkat sebesar 7,53% dibandingkan periode sebelumnya.

5. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai akhir 2023, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. 60 MI yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).

4. Government Islamic securities Development

At the end of 2023, the number of outstanding SBSN series increased by 5.13% to 82 series. In addition, the value of outstanding government sukuk also increased by 7.53% on the previous year to reach IDR1,445.53 trillion.

5. Islamic Services in the Capital Market

At the end of 2023, the following parties were providing Islamic services in the capital market:

a. 60 investment managers with an Islamic Investment Management Unit (UPIS).

b. 1 MI Syariah.
c. 34 PEE yang pernah turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi.
d. 14 Pihak Penerbit DES.
e. 15 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah.
f. 16 Perusahaan Efek yang memiliki SOTS (*Shariah Online Trading System*) aktif.
g. 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
h. 101 ASPM, di mana 100 aktif dan 1 nonaktif sementara.

b. 1 Islamic investment manager.
c. 34 underwriters for issuers of corporate sukuk.

d. 14 issuers of the Islamic Securities List (DES).
e. 15 custodian banks managing Islamic investment funds.
f. 16 securities companies with an active Sharia Online Trading System (SOTS).
g. 10 trust agents representing issuers of corporate sukuk.

h. 101 Islamic capital market experts, of which 100 are active and one is temporarily non-active.

III.6 Perkembangan Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Insurance, Guarantee and Pension Fund (IGPF) Development

Pada 2023, Kinerja Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar Rp407,36 triliun (18,72% *yoy*) dari sebesar Rp2.175,68 triliun menjadi Rp2.583,03 triliun. Komposisi aset PPDP terdiri dari Perasuransian sebesar Rp2.148,06 triliun (83,16%), Dana Pensiun sebesar Rp368,70 triliun (14,27%), Lembaga Penjamin sebesar Rp46,41 triliun (1,80%), dan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebesar Rp19,87 triliun (0,77%). Selanjutnya, jumlah pelaku tercatat sebanyak 589 perusahaan yang terdiri dari Perasuransian sebanyak 148 perusahaan, Dana Pensiun sebanyak 199 perusahaan, Lembaga Penjamin sebanyak 22 perusahaan, dan Industri Penunjang Asuransi dan Reasuransi sebanyak 220 perusahaan.

In 2023, the performance of the insurance, guarantee and pension fund (IGPF) sector was positive, as reflected by an increase in total assets of IDR407.36 trillion (18.72% yoy) from IDR2,175.68 trillion to IDR 2,583.03 trillion. The composition of PPDP assets consists of Insurance to IDR 2,148.06 trillion (83.16%), Pension Funds to IDR 368.70 trillion (14.27%), Guarantee Institutions to IDR 46.41 trillion (1.80%), and Industry Insurance and Reinsurance Supporting Services to IDR 19.87 trillion (0.77%). Furthermore, recorded at 589 companies in IGPF sectors, consisting of 148 Insurance companies, 199 Pension Fund companies, 22 Guarantee Institutions, and 220 Insurance and Reinsurance Supporting Industries.

Table 3.20. Perkembangan Aset PPDP tahun 2019-2023
Table 3.20. Insurance, Guarantee and Pension Fund Sector Assets from 2019-2023

(triliun Rupiah)
(trillions, IDR)

No	Jenis Industri | *Industries Type*	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Perasuransian** | *Insurance***	1.357,14	1.450,32	1.643,90	1.776,48	2.148,06
2	Dana Pensiun | *Pension Fund*	293,92	317,50	329,97	344,92	368,70
3	Lembaga Penjamin *Guarantee Institution*	19,460	21,906	25,163	36,904	46,41
4	Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi *Supporting Services of Insurance and Reinsurance*	11,32	13,88	14,24	17,38	19,87
	Jumlah Aset | *Total Assets*	1.681,84	1.803,61	2.013,27	2.175,68	2.583,03

*) Penyajian data menggunakan laporan keuangan unaudited 2023.
Based on 2023 unaudited financial data.
**) Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Reasuransi, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.
Life insurance, general insurance, reinsurance, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, and BPJS Kesehatan.
***) DPPK-PPMP, DPPK-PPIP, dan DPLK.
DPPK-PPMP, DPPK-PPIP, dan DPLK.
****) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Jasa Penilai Kerugian Asuransi
Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Appraisal Services

Grafik 3.37. Komposisi PPDP 2023
Graph 3.37. Composition of IGPF Sector in 2023

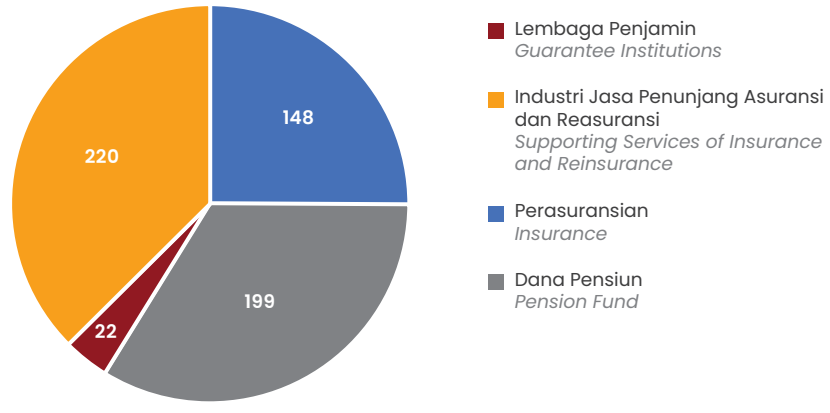

III.6.1. Perkembangan Industri Perasuransian
Insurance Industry Development

Sampai akhir 2023, aset mencapai Rp371,58 triliun (20,92% *yoy*) dari sebesar Rp1.776,48 triliun menjadi Rp2.148,06 triliun. Peningkatan aset sejalan dengan peningkatan nilai investasi sebesar Rp131,16 triliun (9,13% *yoy*) dari Rp1.437,34 triliun menjadi Rp1.568,43 triliun.

Until the end of 2023, assets reached IDR 371.58 trillion (20.92% yoy) from IDR 1,776.48 trillion to IDR 2,148.06 trillion. The increasing is in line with an increase in investment value of IDR 131.16 trillion (9.13% yoy) from IDR 1,437.34 trillion to IDR 1,568.43 trillion.

Tabel 3.21. Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi
Table 3.21. Gross Premiums, Claims, Assets and Investments

(triliun Rupiah)
(trillions, IDR)

Produk Asuransi *Insurance Product*	Premi bruto | *Gross Premiums*			Aset | *Assets*			Investasi | *Investments*			Klaim | *Claims*		
	2021	2022	2023*	2021	2022	2023*	2021	2022	2023*	2021	2022	2023*
Asuransi Jiwa *Life Insurance*	204,78	190,74	177,41	631,69	617,63	620,52	555,29	543,62	546,65	178,89	175,74	163,27
Asuransi Umum dan Reasuransi *General Insurance and Reinsurance*	91,09	102,79	143,47	222,83	236,63	271,44	110,77	117,83	141,71	46,76	57,10	65,56
Asuransi untuk PNS dan TNI / POLRI (JR, TASPEN, dan ASABRI) *Compulsory Insurance*	11,59***	16,52***	23,98**	138,75***	164,06***	419,01**	132,82***	134,25***	121,88**	18,32***	18,74***	17,09**
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) *Social Insurance (BPJS)*	223,47	232,36	248,57	650,63	758,15	837,09	561,98	641,63	758,19	133,11	162,51	212,37
Jumlah | *Total*	**530,92**	**542,40**	**592,44**	**1.643,90**	**1.776,48**	**2.148,06**	**1.360,86**	**1.437,34**	**1.568,43**	**377,07**	**414,09**	**458,28**

*) Penyajian data menggunakan laporan keuangan unaudited 2023. | *Based on 2023 unaudited financial data.*
**) Program JKK, JKM, THT, JP dari PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). | *JKK, JKM, THT, JP programs from PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero).*
***) Program THT dari PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). | *THT programs from PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero).*

Pada 2023, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah sebesar Rp1.959.534 meningkat 1,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi asuransi, yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada 2023 adalah sebesar 2,76%, (0,05% *yoy*). Peningkatan penetrasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan premi asuransi umum yang meningkat sebesar 14,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi industri asuransi per 2023 adalah sebesar Rp1.568,43 triliun dengan portofolio investasi terbesar ditempatkan pada SBN sebesar Rp811,28 triliun (51,73% dari total investasi).

In 2023, Insurance density, which represents the average annual per capital spending on insurance premiums, was recorded at IDR1,959,534 in 2023, up 1.8% on the previous year. Meanwhile, insurance penetration, which indicates the ratio of premiums underwritten in a given year to GDP, increased (0.05% yoy) to reach 2.76%. The increase in insurance penetration was primarily attributable to a 14.55% bump in general insurance premiums collected. The investment portfolio of the insurance industry in 2023 stood at IDR1,568.43 trillion, dominated by SBN placements of IDR811.28 trillion (51.73% of total investment).

Grafik 3.38. Distribusi Investasi Industri Asuransi
Graph 3.38. Investment Distribution of the Insurance Industry

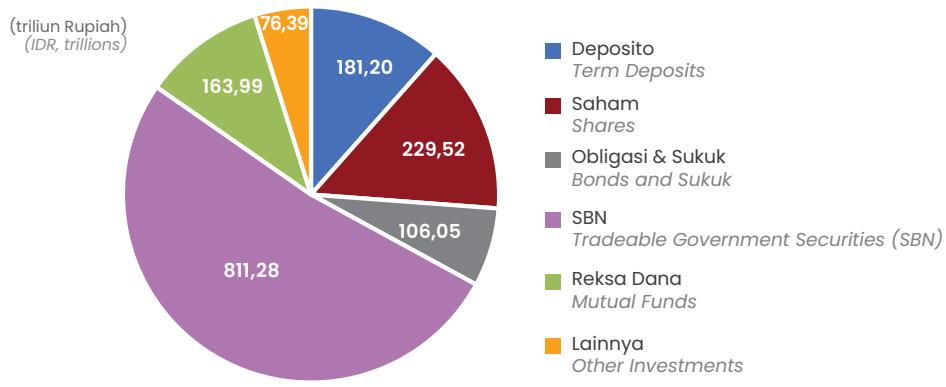

III.6.2. Perkembangan Industri Dana Pensiun
Pension Funds Industry Development

Sampai akhir 2023, aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar Rp23,78 triliun (6,89% *yoy*) dari Rp344,92 triliun menjadi Rp368,70 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp21,41 triliun (6,37% *yoy*) dari Rp335,93 triliun menjadi Rp357,34 triliun.

At the end of 2023, the assets of the pension funds industry increased Rp23.78 trillion (6.89% yoy) from IDR344.92 trillion to IDR368.70 trillion. This growth in assets was in line with the uptick in investment value, which increased by IDR21.41 trillion (6.37% yoy) from IDR335.93 trillion to IDR357.34 trillion.

Grafik 3.39.Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Periode 2019-2023
Graph 3.39. Assets of Pension Funds Industry 2019-2023

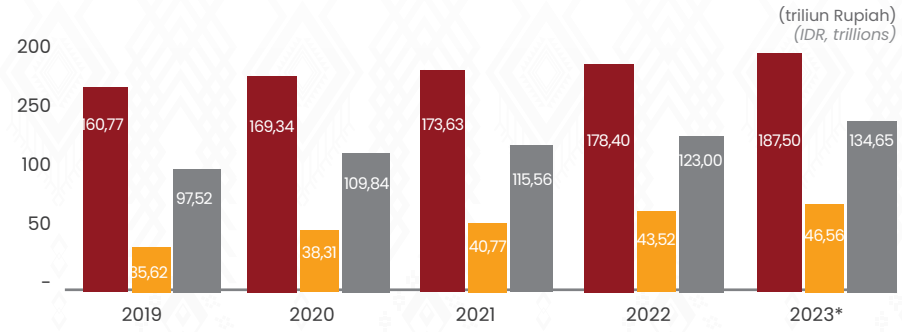

*data unaudited 31 Des 2023 | *unaudited data as of 31st December 2023*

DPPK PPMP
Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans
DPLK
Financial Institution Pension Funds
DPPK PPIP
Employer Pension Funds – Defined Contribution Plans

Grafik 3.40. Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun tahun 2019-2023
Graph 3.40. Investment Portfolio of the Pension Funds Industry in 2019-2023

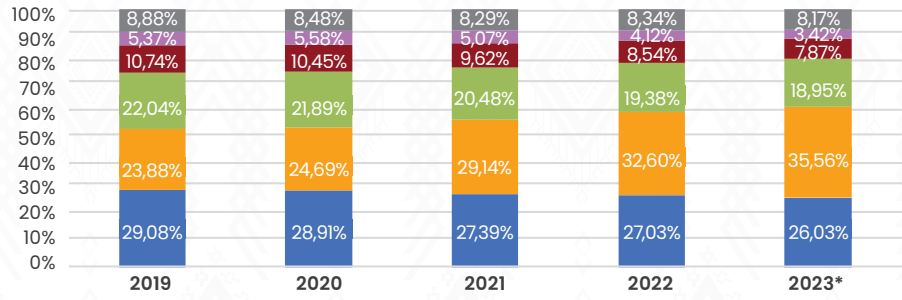

Deposito
Term Deposits
SBN
Tradeable Government Securities (SBN)
Obligasi**)
*Bonds and Sukuk***)*
Saham
Stocks
Reksa Dana
Mutual Funds
Properti dan lainnya***)
*Other Investments and Property****)

*data unaudited 31 Des 2023 | *unaudited data as of 31st December 2023*

III.6.3. Perkembangan Industri Lembaga Penjamin
Guarantee Institutions Development

Selama 2023, *outstanding* penjaminan mengalami peningkatan sebesar Rp104,24 triliun (32,71% *yoy*) dari Rp318,68 triliun menjadi Rp422,92 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya nilai penjaminan usaha produktif sebesar Rp83,11 triliun (36,22% *yoy*) dan penjaminan usaha non produktif sebesar Rp21,13 triliun (23,68% *yoy*).

In 2023, outstanding guarantees increased to IDR104.24 trillion (32.71% yoy) from IDR318.68 trillion to IDR422.92 trillion. This stemmed is from the increasing of value of guarantees for productive business a IDR83.11 trillion (36.22% yoy) and IDR21.13 trillion (23.68% yoy) in the value of guarantees for non-productive business.

Grafik 3.41. Pertumbuhan *Outstanding* Penjaminan Perusahaan Penjaminan
Graph 3.41. Growth of Outstanding Guarantees

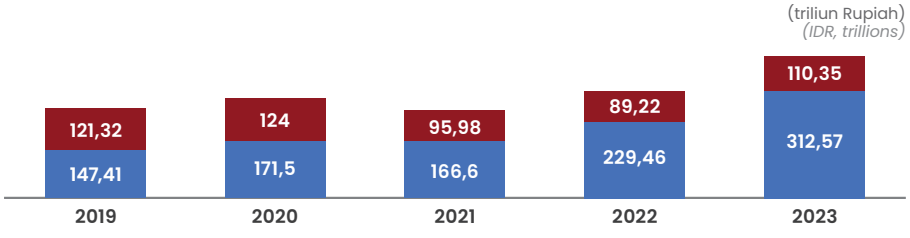

Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif
Outstanding Guarantees – Productive Businesses
Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif
Outstanding Guarantees – Non-Productive Businesses

Grafik 3.42. Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi
Graph 3.42. Insurance and Reasurance Supporting Services Industry Assets Comparison

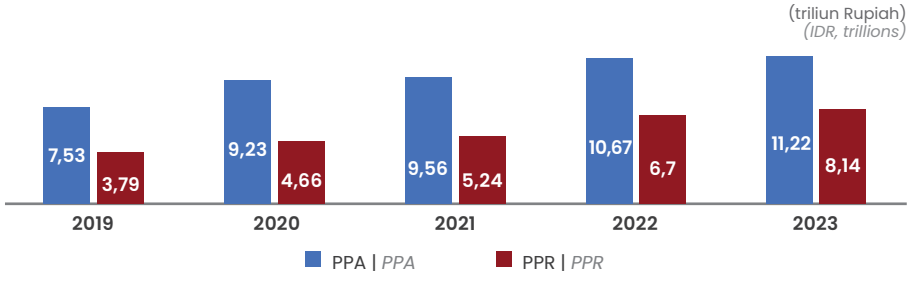

PPA | *PPA*
PPR | *PPR*

III.6.4. Perkembangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi
Insurance and Reinsurance Supporting Services Development

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan sebesar Rp1,99 triliun (11,46% *yoy*) dari Rp17,37 triliun menjadi Rp19,36 triliun.

The total assets of insurance and reinsurance brokers increased to IDR1.99 trillion (11.46% yoy) from IDR17.37 trillion to IDR19.36 trillion.

III.6.5. Perkembangan PPDP Syariah
Sharia IGPF Industry Development

Tabel 3.22. Jumlah Perusahaan PPDP Syariah
Table 3.22. Sharia IGPF Companies

Jenis Industri	2019		2020		2021		2022		2023		*Industries Type*
	Full	UUS *Sharia Business Unit*	*Full*	UUS *Sharia Business Unit*	*Full*	UUS *Sharia Business Unit*	*Full*	UUS *Sharia Business Unit*	*Full*	UUS *Sharia Business Unit*	
Perasuransian Syariah	**13**	**49**	**13**	**47**	**14**	**42**	**15**	**43**	**16**	**43**	***Sharia Insurance***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	8	21	9	21	*Sharia Life Insurance Companies*
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	24	5	21	6	19	6	19	6	19	*Sharia General Insurance Companies*
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	*Sharia Reinsurance Companies*
Dana Pensiun Syariah	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	***Sharia Pension Funds***
DPPK-PPMP Syariah	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans*
DPPK-PPIP Syariah	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans*
DPLK Syariah	1	3	1	4	1	5	1	5	1	5	*Sharia Financial Institution Pension Funds*
Perusahaan Penjaminan Syariah	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**8**	**2**	**7**	**2**	**7**	***Sharia Guarantee Companies***
Jumlah	**18**	**57**	**19**	**56**	**20**	**59**	**21**	**56**	**23**	**56**	***Total***

Pada akhir 2023, total pelaku PPDP Syariah tercatat sebanyak 79 pelaku, terdiri dari 23 perusahaan *full* Syariah dan 56 unit usaha Syariah. Sementara itu, total aset PPDP Syariah meningkat sebesar Rp1.948 miliar (3,25% *yoy*) dari Rp59.970 miliar menjadi Rp61.918 miliar. Peningkatan aset terbesar dialami oleh dana pensiun syariah sebesar Rp2.530 miliar (25,65% *yoy*) dari Rp9.856 miliar menjadi Rp12.386 miliar. Komposisi aset PPDP Syariah terdiri dari perasuransian syariah sebesar Rp44.004 miliar (71%), dana pensiun syariah sebesar Rp12.386 miliar (20%), dan penjaminan syariah sebesar Rp5.528 miliar (9%).

At the end of 2023, the Islamic IGPF industry totalled 79 players, consisting of 23 full-fledged Islamic companies and 56 Islamic windows. Meanwhile, the total assets of the Islamic IGPF industry increased to IDR1,948 billion (3.25% yoy) from IDR59,970 billion to IDR61,918 billion, led by the sharia pension funds that recorded IDR2,530 billion (25.65% yoy) from IDR9,856 billion to IDR12,386 billion. The asset composition of the sharia IGPF industry consist of sharia insurance industry to IDR44,004 billion (71%), sharia pension fund to IDR12,386 billion (20%), and sharia guarantee to IDR5,528 billion (9%).

Tabel 3.23. Perkembangan Total Aset PPDP Syariah dalam Lima Tahun Terakhir
Table 3.23. Sharia PPDP Total Assets Development in the Last Five Years

(miliar Rupiah)
(billions, IDR)

Jenis Industri	2019	2020	2021	2022	2023	*Industries Type*
Perasuransian Syariah	**45.453**	**44.440**	**43.550**	**45.025**	**44.004**	***Sharia Insurance***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	37.487	36.317	34.970	34.891	32.806	*Sharia Life Insurance Companies*
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.903	6.014	6.616	7.728	8.463	*Sharia General Insurance Companies*
Perusahaan Reasuransi Syariah	2.063	2.109	1.964	2.406	2.735	*Sharia Reinsurance Companies*
Dana Pensiun Syariah	**3.973**	**7.996**	**9.019**	**9.856**	**12.386**	***Sharia Pension Fund***
DPPK-PPMP Syariah	330	538	611	662	1.619	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans*
DPPK-PPIP Syariah	112	99	614	713	841	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans*
DPLK Syariah	3.531	7.359	7.794	8.481	9.926	*Sharia Financial Institution Pension Funds*
Perusahaan Penjaminan Syariah	**2,225**	**3.049**	**4.450**	**5.089**	**5.528**	***Sharia Guarantee Companies***
Jumlah	**49.428**	**55.485**	**57.019**	**59.970**	**61.918**	***Total***

III.7 Perkembangan Industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya

Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions Development

Kinerja Industri Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada 2023. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,00% menjadi Rp981,46 triliun.

The performance of the Financing Institutions, Venture Capital, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions industry increased in 2023. This is reflected in the growth of total PVML assets which increased compared to the previous year by 8.00% to IDR981.46 trillion.

Tabel 3.24 Total Aset PVML
Table 3.24 Assets of PVML

(triliun Rupiah)
(IDR, trillions)

No	Industri	2019	2020	2021	2022	2023	*Industry*
1	Perusahaan Pembiayaan	518,14	456,06	433,11	487,92	552,89	*Finance Companies*
2	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	12,31	14,69	14,55	16,51	15,11	*Infrastructure Finance Companies*
3	Perusahaan Modal Ventura	18,65	19,48	21,27	25,94	27,25	*Venture Capital Firms*
4	Lembaga Keuangan Mikro	1,07	1,23	1,38	1,52	1,58	*Microfinance Companies*
5	Pergadaian	65,76	72,35	66,98	75,51	85,45	*Pawnbroker*
6	*Peer-to-Peer Lending*	3,04	3,71	4,06	5,51	7,04	*Peer-to-Peer Lending*
7	Sarana Multi Infrastruktur	75,88	101,05	114,58	117,39	116,18	*Sarana Multi Infrastuktur*
8	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	108,59	92,09	89,10	87,03	67,67	*Indonesia Eximbank*
9	Sarana Multigriya Finansial	26,70	32,57	33,75	32,96	45,70	*Sarana Multigriya Finansial*
10	Permodalan Nasional Madani	24,76	31,11	43,52	46,56	50,92	*Permodalan Nasional Madani*
11	BP Tapera				11,95	11,67	*BP Tapera*
	Jumlah Aset	**854,90**	**824,34**	**822,30**	**908,80**	**981,46**	***Total Assets***

*Termasuk data syariah | *Including sharia data*

III.7.1 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Finance Industry Developments

Selama 2023, aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan masing-masing meningkat sebesar 13,23% , 15,77% dan 7,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih Perusahaan Pembiayaan juga meningkat sebesar 12,98% dibandingkan tahun sebelumnya.

During 2023, finance companies' assets, liabilities and equity increased by 13.32%, 15.77% and 7.71% respectively compared to the previous year. Meanwhile, the finance company's net profit also increased by 12.98% compared with the year earlier.

Grafik 3.43. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.43. Growth of Assets, Liabilities and Equity at Finance Companies

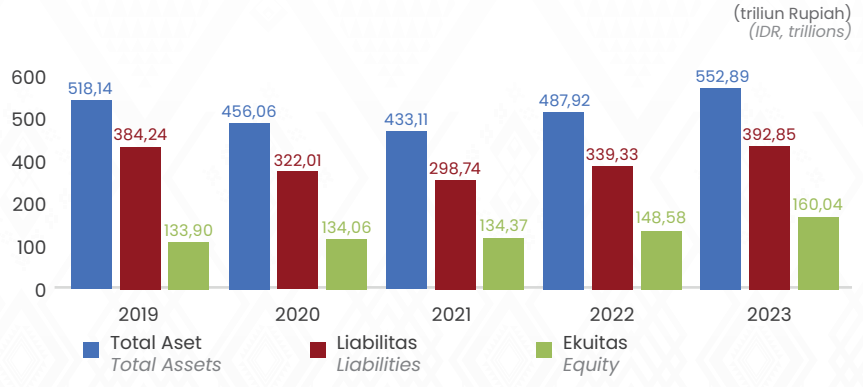

Grafik 3.44. Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.44. Profit and Loss of Finance Companies

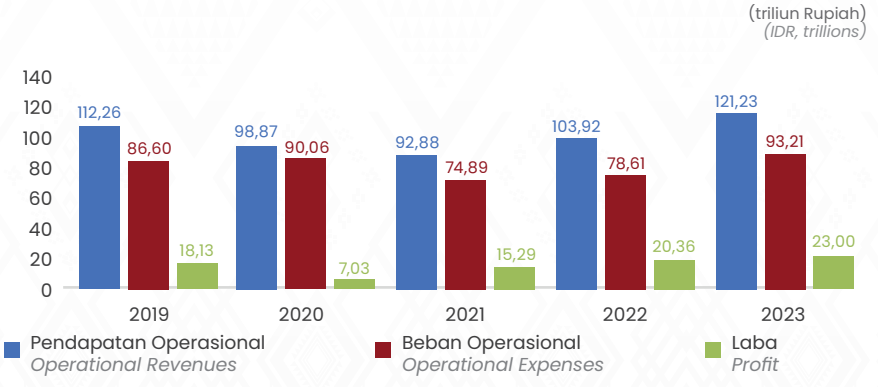

Komposisi piutang pembiayaan pada 2023 didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 52,08% dan 32,78%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan, tercermin dari meningkatnya piutang pembiayaan neto sebesar 13,23% *yoy* menjadi Rp470,86 triliun.

Multipurpose financing and investment financing dominating financing receivables in 2023, respectively accounting for 52.08% and 32.78%. Furthermore, net financing receivables increased 13.23% in the reporting period to IDR470.86 trillion.

Grafik 3.45 Piutang Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.45. Financing Receivables of Finance Companies

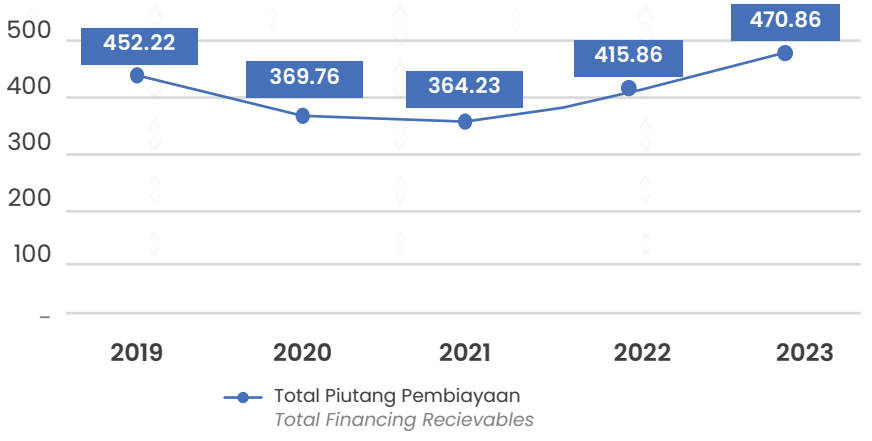

Grafik 3.46 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.46. Currency of Loans Received by Finance Companies

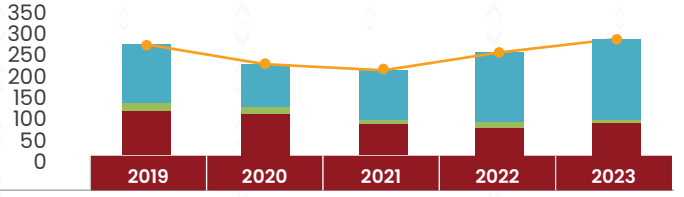

	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia Rupiah | *IDR*	144,52	108,41	123,29	172,01	198,40
Singapore Dollar | *SGD*	0,06	0,03	-	0,01	0,01
Japanese Yen | *JPY*	19,24	17,28	11,30	10,96	11,05
United States Dollar | *USD*	114,54	106,50	81,91	74,33	85,71
Euro | *EUR*	0,73	0,76	0,62	0,30	0,11
Jumlah | *Total*	279,08	232,98	217,11	257,60	295,28

III.7.2 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Venture Capital Industry Developments

Selama 2023, aset, liabilitas dan ekuitas industri Perusahaan Modal Ventura naik masing-masing sebesar 5,03%, 2,35% dan 7,23% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2023, the assets, liabilities and equity of venture capital firms increased respectively by 5.03% yoy, 2.35% yoy and 7.23% yoy on the previous year.

Grafik 3.47. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.47. Growth of Assets, Liabilities and Equity at Venture Capital Firms

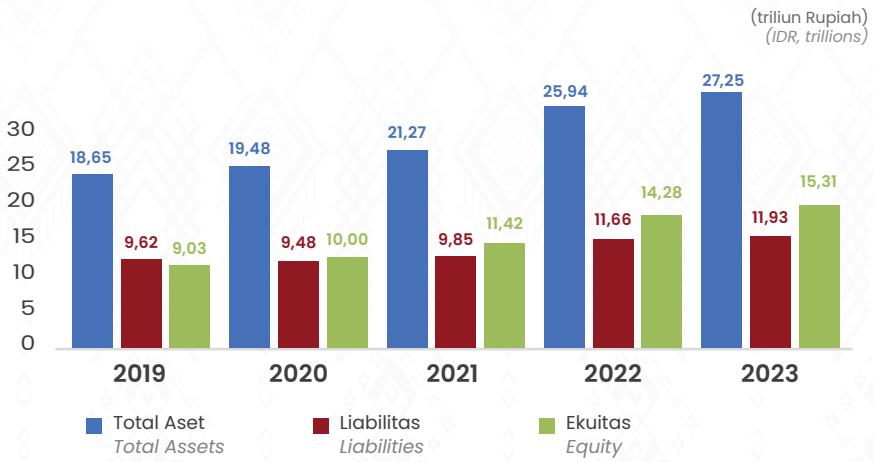

Grafik 3.48. Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
Graph 3.48. Growth of Capital Investment/Financing

*data termasuk syariah
**including sharia data*

Selain itu, penyertaan/pembiayaan neto industri modal ventura turun sebesar 3,74% menjadi Rp17,34 triliun, dengan porsi pembiayaan usaha produktif 57,49% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

In addition, the net financing/investment of venture capital firms decreased by 3.74% yoy to IDR17.34 trillion, with productive business financing accounting for 43.10% of the total.

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan, yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) di mana rasio masing-masing pada 2023 adalah 95,66%, 63,65% 1,53% dan 2,17%.

The performance of venture capital firms is measured based on financial ratios, namely the BOPO Efficiency Ratio, Investments and Financing to Assets Ratio (IFAR), Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), recorded at 95.66%, 63.65%, 1.53% and 2.17%.

Grafik 3.49. Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.49. Financial Ratios of Venture Capital Firms

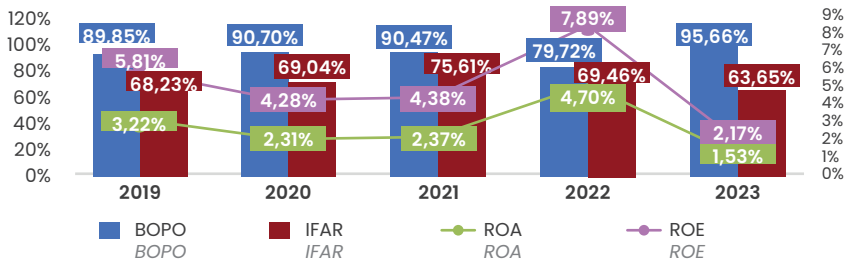

*data termasuk Syariah | *data include sharia*

Grafik 3.50. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Graph 3.50. Growth of Assets, Liabilities and Equity at Infrastructure Finance Companies

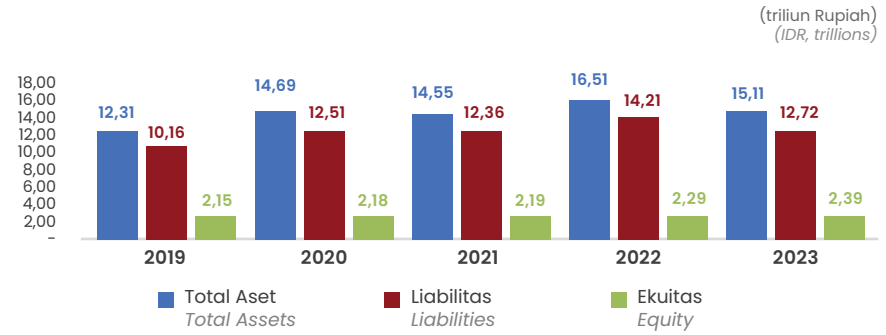

*Keterangan: | * Note:*
Per 2023 terdapat pemisahan data PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
As of 2023 there is a data separation of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) from the Infrastructure Finance Company

III.7.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Infrastructure Finance Industry and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Development

Sampai akhir 2023, total aset dan total liabilitas dari perusahaan pembiayaan infrastruktur dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) masing-masing menurun sebesar 8,50% dan 10,54% menjadi Rp15,11 triliun dan Rp12,72 triliun, namun ekuitas meningkat menjadi Rp2,39 triliun.

At the end of 2023, the total assets and total liabilities of the infrastructure finance companies and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) declined respectively by 8.50% and 10.54% to Rp15.11 trillion and Rp12.72 trillion, on the other hand total equity increased to IDR2.39 trillion.

III.7.4 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Microfinance Industry Developments

Hingga akhir 2023, total aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengalami peningkatan sebesar 4,39% *yoy* menjadi Rp1.581,88 miliar. Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer naik 7,18% *yoy* menjadi Rp869,01 miliar. Ekuitas mengalami peningkatan 0,97% *yoy* menjadi Rp685,87 miliar.

Per year-end 2023, total assets of microfinance institutions soared 4,39% to IDR1,581,88 billion. Liabilities and Temporary Syirkah Funds rose 7.18% yoy to IDR869.01 billion. Equity increased 0.97% yoy to IDR685.87 billion.

Grafik 3.51. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.51. Growth of Assets, Liabilities and Equity at Microfinance Institutions

(miliar Rupiah)
(IDR, billion)

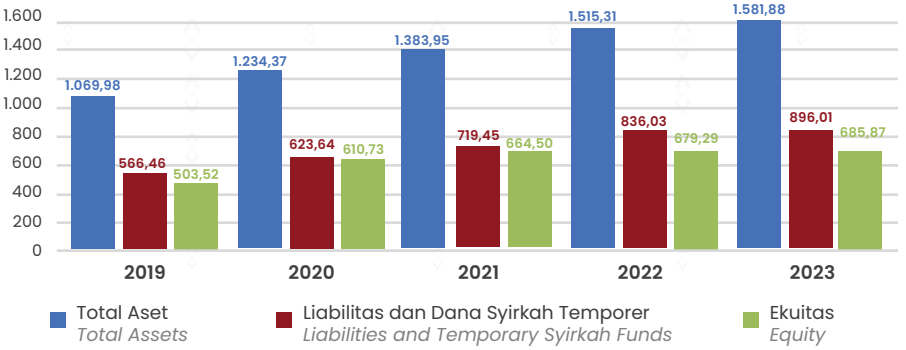

Grafik 3.52. Perkembangan Pinjaman dan Simpanan Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.52. Growth of Savings and Deposits at Microfinance Institutions

(riliun Rupiah)
(IDR, trillions)

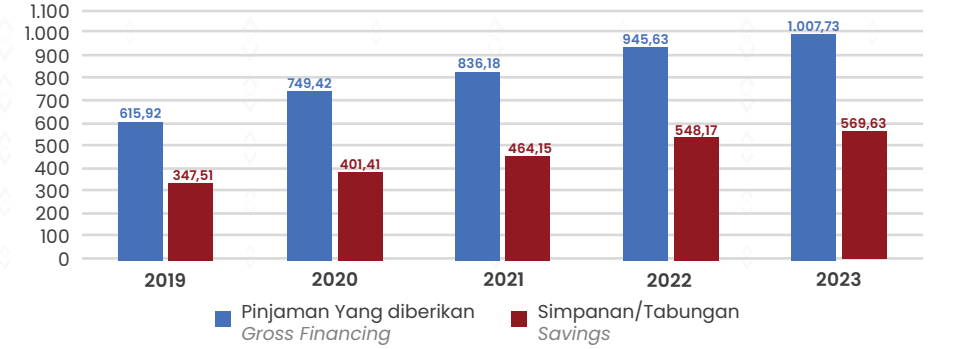

Sampai akhir 2023, total pinjaman yang disalurkan LKM adalah sebesar Rp1.007,73 miliar atau tumbuh 6,57%, sementara simpanan yang dihimpun LKM sebesar Rp569,63 miliar atau tumbuh 3,92% dibandingkan 2022.

At the end of 2023, total outstanding loans disbursed by microfinance institutions stood at IDR1,007.73 billion, up 6.57% yoy, meanwhile savings deposits collected by microfinance institutions were recorded at IDR569.63 billion, growing 3.92% yoy on the previous year.

III.7.5 Perkembangan Perusahaan Pergadaian

Pawnbroker Industry Developments

Selama 2023, penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian mengalami peningkatan sebesar 14,37% menjadi sebesar Rp69,38 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2023, loans disbursed by pawnshops experienced a 14.38% Increased on the previous year to IDR69.38 trillion.

Grafik 3.53. Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian
Graph 3.53. Value of Disbursed Loans by Pawnbrokers

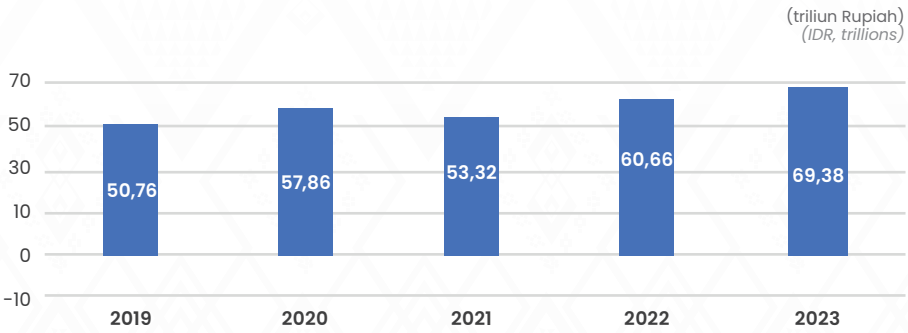

Tabel 3.25. Perkembangan Industri *Fintech (Peer To Peer Lending)*
Table 3.25. FinTech Peer-to-Peer Lending Industry Developments

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	*Descriptions*
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	164	149	103	102	101	*Total Registered Operators*
2.	Jumlah Pemberi Pinjaman	605.935	716.963	809.494	999.455	1.209.336	*Total Lenders*
3.	Jumlah Penerima	18.236.123	43.561.362	73.246.852	99.795.780	120.259.912	*Total Borrowers*
4.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp)	81,5	155,9	295,85	528,01	763,14	*Total Disbursed Loans (IDR, trillions)*

III.7.6 Perkembangan Industri *Fintech Peer to Peer Lending*
FinTech Peer-to-Peer Lending Industry Developments

Jumlah perusahaan yang bergerak pada industri *Fintech* khususnya *Peer to Peer Lending* periode 2023 sebanyak 101 entitas dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp763,14 triliun atau naik 44,53% *yoy* dari periode sebelumnya sebesar Rp528,01 triliun.

The number of companies engaged in the FinTech industry, specifically peer-to-peer lending, continued to track an upward trend. At the end of 2023, a total of 101 entities were licensed by OJK, with disbursed loans growing 44.53% yoy to reach IDR763.14 trillion from IDR528.01 trillion in 2022.

III.7.7 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
Specialized Financial Services Industry Developments

III.7.7.1 Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
PT Sarana Multi Infrastruktur Developments (SMI)

Sampai akhir 2023, total aset dan liabilitas dari Sarana Multi Infrastruktur masing-masing menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1,03% dan 3,74% menjadi Rp116,18 triliun dan Rp73,81 triliun, namun ekuitas meningkat menjadi Rp42,37 triliun.

At the end of 2023, the total assets and liabilities of Sarana Multi Infrastruktur decreased from the previous year respectively by 1.03% and 3.74% to IDR116.18 trillion and IDR73.81 trillion, but equity increased to IDR42.37 trillion.

Grafik 3.54. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Sarana Multi Infrastruktur
Graph 3.54.Assets, Liabilities and Equity Growth of Sarana Multi Infrastruktur

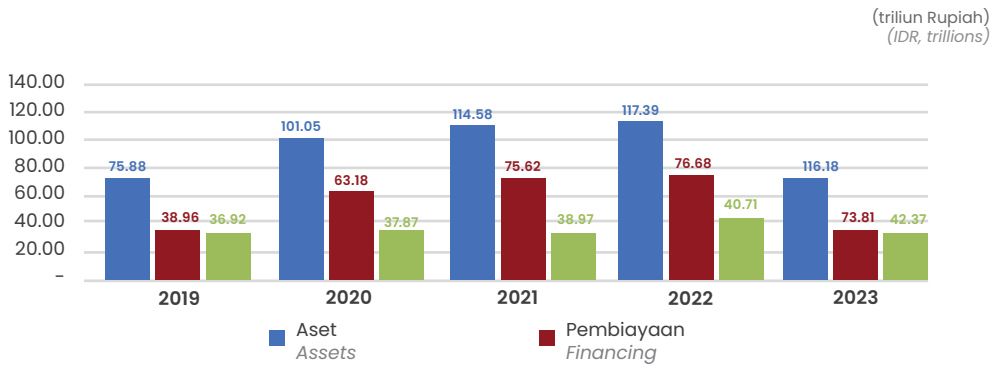

III.7.7.2 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Indonesia Eximbank Developments

Aset LPEI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19,36 triliun (22,24%) dari Rp87,03 triliun pada 2022 menjadi Rp67,67 triliun pada 2023. Pembiayaan neto LPEI juga menurun sebesar Rp11,70 triliun (17,29 %) dari Rp67,65 triliun pada 2022 menjadi Rp55,96 triliun pada 2023.

LPEI's assets decreased compared to the previous year by IDR19.36 trillion (22.24%) from IDR87.03 trillion in 2022 to IDR67.67 Trillion in 2023. LPEI's net financing also decreased by IDR 11.70 trillion (17.29 %) from IDR67.65 trillion in 2022 to IDR55.96 trillion in 2023.

III.7.7.3 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - PT SMF (Persero)
Secondary Housing Financing Company

Aset PT SMF (Persero) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,75 triliun (38,68%) dari Rp32,96 triliun pada 2022 menjadi Rp45,70 triliun pada 2023. Kegiatan penyaluran pinjaman oleh PT SMF (Persero) mengalami kenaikan sebesar 32,50% menjadi Rp35,98 triliun.

The assets of PT SMF (Persero) increased by IDR12.75 trillion (38.68%) compared to the previous year, from IDR32.96 trillion in 2022 to IDR45.70 trillion in 2023. The loan disbursement activities of PT SMF (Persero) rose by 32.50% to IDR35.98 trillion.

III.7.7.4 Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Aset PT PNM pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,36 triliun (9,37%) dari Rp46,56 triliun pada 2022 menjadi Rp50,92 triliun pada 2023. Pembiayaan Neto PT PNM juga meningkat sebesar Rp3,58 triliun (9,31%) dari Rp38,44 triliun pada 2022 menjadi Rp42,02 triliun pada 2023.

The assets of the PT PNM in 2023 increased compared to the previous year by IDR4.36 trillion (9.37%) from IDR46.56 trillion in 2022 to IDR50.92 trillion in 2023. The net financing of the PT PNM also increased by IDR3.58 trillion (9.31%) from Rp38.44 trillion in 2022 to IDR42.02 trillion in 2023.

III.7.7.5 Perkembangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)
Badan Pengelola Tapera (BP Tapera)

Total aset BP Tapera mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,28 triliun (2,36 %) dari Rp11,95 triliun pada 2022 menjadi Rp11,67 triliun pada 2023. Penurunan aset dialami oleh Dana Tapera sebesar Rp0,35 triliun (4,26%) dari Rp8,15 triliun pada 2022 menjadi Rp7,81 triliun pada 2023. Namun, aset Badan BP Tapera meningkat Rp0,06 triliun (1,71%) dari Rp3,80 triliun pada 2022 menjadi Rp3,86 triliun pada 2023.

The total assets of BP Tapera decreased compared to the previous year by IDR0.28 trillion (2.36 %) from IDR11.95 trillion in 2022 to IDR11.67 trillion in 2023. The assets of Dana Tapera experienced a decline in assets of IDR0.35 trillion (4.26%) from IDR8.15 trillion in 2022 to IDR7.81 trillion in 2023. However, BP Tapera Agency's assets increased by IDR0.06 trillion (1.71%) from IDR3.80 trillion in 2022 to IDR3.86 trillion in 2023.

Grafik 3.55. Pertumbuhan Aset dan Piutang Pembiayaan yang Disalurkan LPEI
Graph 3.55. Assets and Financing Receivables Growth of Indonesia Eximbank

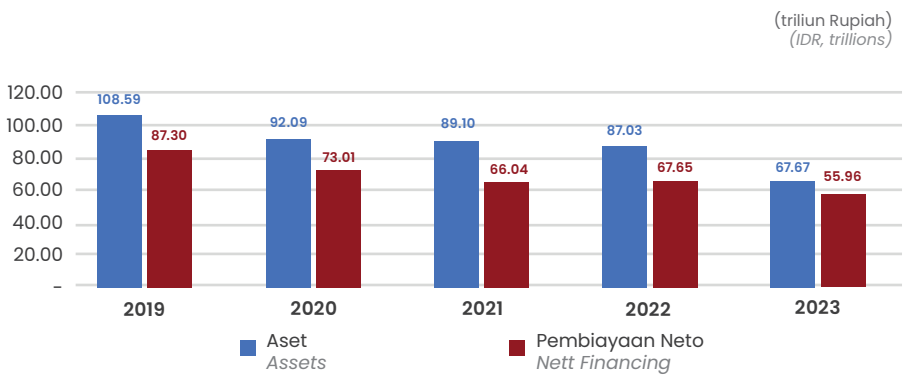

Grafik 3.56. Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman oleh SMF
Graph 3.56. Assets and Loan Growth at SMF

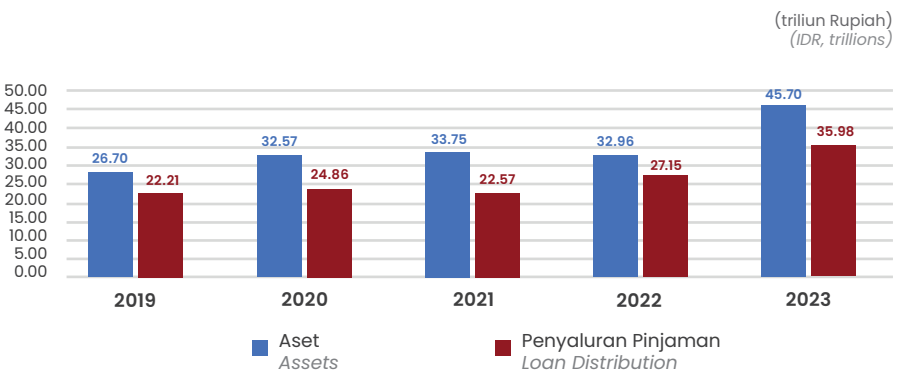

Grafik 3.57. Pertumbuhan Aset dan Piutang Pembiayaan yang Disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Graph 3.57. Assets and Financing Receivables Growth of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

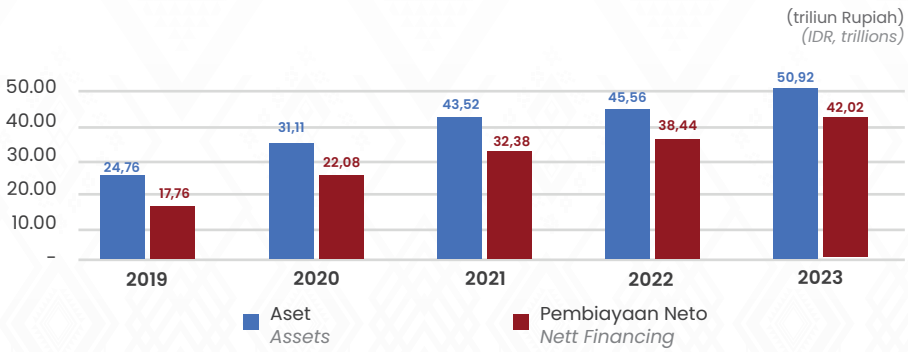

Grafik 3.58. Pertumbuhan Aset BP Tapera
Graph 3.58. Assets Growth of BP Tapera

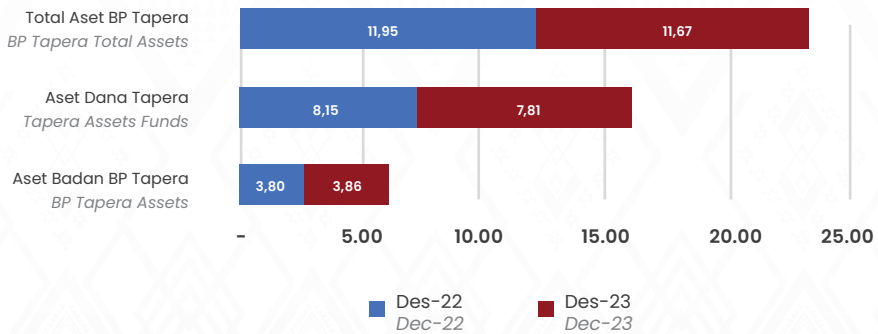

III.7.12 Perkembangan Lembaga PVML Syariah
Sharia PVML Industry Developments

Jumlah pelaku industri PVML Syariah pada periode Desember 2023 adalah sebanyak 133 pelaku yang terdiri atas 99 *full* syariah dan 34 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar Rp102.88 triliun. Jumlah pelaku tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 134 pelaku pada 2022.

In December 2023, a total of 133 entities were operating in the sharia PVML industry, consisting of 99 full-fledge entities and 34 sharia windows, with assets totalling IDR102.88 trillion. The number of entities operating in the Islamic PVML industry declined from 134 in 2022.

Tabel 3.26. Jumlah Pelaku Usaha PVML Syariah Tahun 2023
Table 3.26. Financial Performance of Sharia PVML industry in 2023

Jenis Industri *Industries Type*	Jumlah Pelaku PVML Syariah *Total Islamic PVML Players*											
	Dec 22		Mar 23		Jun 23		Sep 23		Nov 23		Dec 23	
	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS
Lembaga Pembiayaan Syariah | *Sharia Finance Institutions*	**4**	**27**	**4**	**28**	**4**	**27**	**4**	**27**	**3**	**27**	**3**	**27**
- Perusahaan Pembiayaan Syariah | *Sharia Finance Companies*	4	27	4	28	4	27	4	27	3	27	3	27
Perusahaan Modal Ventura Syariah | *Sharia Venture Capital Firms*	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**
Lembaga Keuangan Mikro Syariah | *Sharia Microfinance Institutions*	**81**	**-**	**81**	**-**	**81**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah | *Sharia Other Financial Services Institutions*	**10**	**5**	**10**	**5**	**11**	**5**	**11**	**5**	**11**	**5**	**11**	**5**
- P2P Lending Syariah | *Sharia P2P Lending*	7		7		7		7		7		7	
- Perusahaan Pergadaian Syariah | *Sharia Pawnbrokers*	3	1	3	1	4	1	4	1	4	1	4	1
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah | *Sharia Indonesia Eximbank*		1		1		1		1		1		1
- Sarana Multi Infrastruktur Syariah | *Sharia Sarana Multi Infrastructure*		1		1		1		1		1		1
- Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syaria *Islamic Finance Company for Secondary House*		1		1		1		1		1		1
- Permodalan Nasional Madani Syariah | *Sharia Permodalan Nasional Madani (PNM)*		1		1		1		1		1		1
Total | *Total*	**100**	**34**	**100**	**35**	**101**	**34**	**100**	**34**	**99**	**34**	**99**	**34**

Tabel 3.27. Kinerja Keuangan PVML Syariah Tahun 2023
Table 3.27. Financial Performance of PVML Sharia in 2023

Jenis Industri *Industries Type*	Jumlah Aset (Rp Miliar) *Total Assets (IDR, billions)*					*Growth yoy*	Porsi *Portion*
	Dec 22	Mar 23	Jun 23	Sep 23	Dec23		
Perusahaan Pembiayaan Syariah | *Sharia Finance Companies*	**21.878,70**	**25.073,89**	**26.891,27**	**28.342,66**	**30.420,21**	**39,04%**	**29,57%**
Perusahaan Modal Ventura Syariah | *Sharia Venture Capital Firms*	**4.229,46**	**4.488,53**	**3.835,46**	**4.000,19**	**4.303,63**	**1,75%**	**4,18%**
Lembaga Keuangan Mikro Syariah | *Sharia Microfinance Institutions*	**600,43**	**600,43**	**587,75**	**607,18**	**623,48**	**3,84%**	**0,61%**
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah | *Sharia Other Financial Services Institutions*	**59.460,84**	**62.286,48**	**64.016,13**	**66.372,53**	**67.536,78**	**13,58%**	**65,64%**
Perusahaan Pergadaian Syariah | *Sharia Pawnbrokers*	11.146,01	11.237,66	11.511,62	13.001,65	13.653,00	22,49%	13,27%
P2P Lending Syariah | *Sharia P2P Lending*	133,64	128,87	129,73	136,47	138,69	3,78%	0,13%
UUS LPEI | *Sharia Indonesia Eximbank Window*	8.875,81	8.857,48	8.614,25	8.131,00	8.014,00	-9,71%	7,79%
UUS PT SMI (Persero) | *PT SMI Islamic Window*	6.992,24	6.993,49	8.343,21	9.199,11	9.052,77	29,47%	8,80%
UUS PT SMF (Persero) | *PT SMF Islamic Window*	3.871,96	4.234.65	4.543,38	5.274,00	5.373,00	38,77%	5,22%
UUS PT PNM | *PT PNM Islamic Window*	28.441,18	30.834,33	30.873,95	30.630,00	31.306,00	10,07%	30,43%
Jumlah | *Total*	**86.169,42**	**92.449,33**	**95.330,61**	**99.322,56**	**102.884,10**	**19,40%**	**100,00%**

Selama 2023, kinerja PVML Syariah bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar 19,40% *yoy* menjadi Rp102,9 triliun. Proporsi aset terbesar dimiliki oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yaitu Unit Usaha Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan perolehan nilai aset sebesar Rp31,3 triliun dengan porsi 30,4% dari seluruh industri PVML Syariah. Aset industri PVML Syariah mencapai Rp102,87 triliun dengan *market share* sebesar 10,48% terhadap total aset industri PVML sebesar Rp981,38 triliun. *Market share* industri PVML mengalami peningkatan sebesar 1% dari 9,48%.

In 2023, the Islamic PVML industry maintained positive performance, as reflected by 19.40% yoy growth in total assets to IDR102.9 trillion. Assets were dominated by Other Financial Services Institutions, namely the Islamic Window of Permodalan Nasional Madani (PNM), which recorded assets totalling IDR31.3 trillion, accounting for 30.4% of total assets in the Islamic PVML industry. Total assets of the Islamic PVML industry reached IDR102.87 trillion in 2023, accounting for 10.48% of total assets in the PVML industry, recorded at IDR981.38 trillion. The market share of the PVML industry increased by 1 percentage point from 9.48%.

Grafik 3.59. *Market Share* PVML Syariah
Graph 3.59. Market Share of Islamic PVML Industry

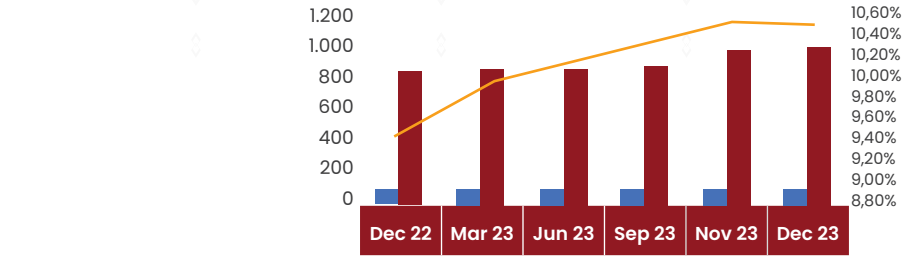

	Dec 22	Mar 23	Jun 23	Sep 23	Nov 23	Dec 23
Aset PVML Syariah (triliun Rp) *Assets of Islamic PVML Industry (IDR trillion)*	86,17	92,45	95,33	99,32	100,97	102,87
Aset PVML Konvensional (triliun Rp) *Assets of Conventional PVML Industry (IDR trillion)*	822,38	840,10	848,03	862,88	960,12	981,38
Market Share	9,48%	9,91%	10,11%	10,32%	10,52%	10,48%

Grafik 3.60. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.60. Assets Liabilities and Equity of Islamic Finance Companies

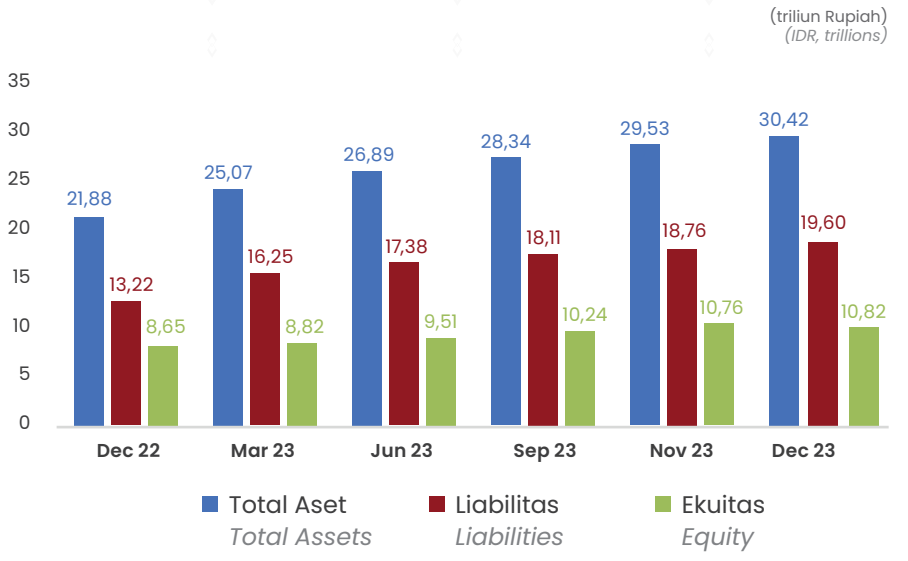

III.7.12.1 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah
Sharia Finance Company Industry Developments

Pada akhir 2023, aset Perusahaan Pembiayaan Syariah mengalami peningkatan 39,04% *yoy* mencapai Rp30,42 triliun. Liabilitas Perusahaan Pembiayaan Syariah mencapai Rp19,60 triliun, meningkat 48,18% *yoy*. Selain itu, ekuitas meningkat 25,07% *yoy* atau sebesar Rp10,82 triliun.

At the end of 2023, the assets of Islamic finance companies increased 39.04% yoy to IDR30.42 trillion. The liabilities of Sharia finance companies grew 48.18% yoy to reach IDR19.60 trillion. In addition, equity increased 25.07% yoy to IDR10.82 trillion.

1. Perkembangan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pada Desember 2023 mencapai Rp24,83 triliun, mengalami peningkatan 33,08% *yoy* atau sebesar Rp6,17 triliun. Berdasarkan jenisnya, pembiayaan terbesar berasal dari Pembiayaan Jual Beli (76,95%), diikuti oleh Pembiayaan Jasa (15,56%) dan Pembiayaan Investasi (7,49%).

Piutang pembiayaan jual beli mengalami peningkatan secara tahunan sebesar Rp3,20 triliun (20,10%), piutang pembiayaan investasi mengalami peningkatan secara tahunan sebesar Rp1,41 triliun (311,52%), dan piutang pembiayaan jasa mengalami peningkatan secara tahunan sebesar Rp1,57 triliun (68,18%).

1. Financing Receivable at Sharia Finance Companies

Financing receivable at Islamic finance companies in December 2023 stood at IDR24.83 trillion, increasing by 33.08% yoy or IDR6.17 trillion. Financing was dominated by trade financing (76.95%), followed by services financing (15.56%) and investment financing (7.49%).

Trade financing receivable experienced an annual increase of IDR3.20 trillion (20.10%), while investment financing receivable recorded an annual increase of IDR1.41 trillion (311.52%) and services financing receivable increased annually by IDR1.57 trillion (68.18%).

Grafik 3.61. Perkembangan Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.61. Financing Receivable at Islamic Finance Companies

(triliun Rupiah)
(IDR, trillions)

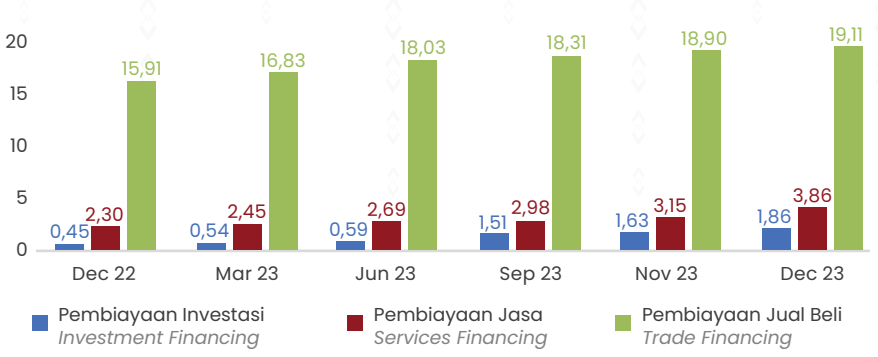

Grafik 3.62. Perkembangan Rasio Pembiayaan Bermasalah Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.62. NPF Ratio of Islamic Finance Companies

(triliun Rupiah)
(IDR, trillions)

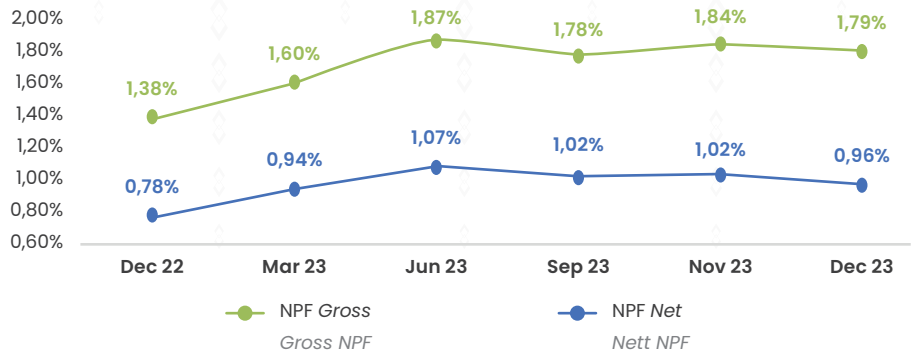

2. Perkembangan Rasio Permbiayaan Bermasalah Perusahaan Pembiayaan Syariah

NPF *Gross* Perusahaan Pembiayaan Syariah per Desember 2023 meningkat secara tahunan menjadi 1,79% dari 1,38%, serupa dengan NPF Neto yang meningkat secara tahunan menjadi 0,96% dari 0,78%.

2. Non-Performing Financing (NPF) Ratio of Sharia Finance Companies

The gross NPF ratio of sharia finance companies in December 2023 increased annually to 1.79% from 1.38%, the nett NPF ratio increased annually to 0.96% from 0.78%.

3. Perkembangan Rasio Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah

BOPO Perusahaan Pembiayaan Syariah per Desember 2023 sebesar 66,12%, turun secara tahunan dari 66,44% pada Desember 2022. Rasio ROA secara industri mencapai 11,48%, meningkat secara tahunan dari 9,56% pada Desember 2022. Rasio ROE secara industri mencapai 26,26%, meningkat secara tahunan dari 20,15% pada Desember 2022.

3. Financial Ratios of Sharia Finance Companies

The BOPO efficiency ratio of sharia finance companies in December 2023 stood at 66.12%, decreasing annually from 66.44% in December 2022. The return on assets (ROA) of the sharia finance industry was recorded at 11.48%, increasing from 9.56% in December 2022, while the return on equity (ROE) stood at 26.26%, up from 20.15% in December 2022.

Grafik 3.63. Perkembangan Rasio BOPO Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.63. BOPO Efficiency Ratio of Sharia Finance Companies

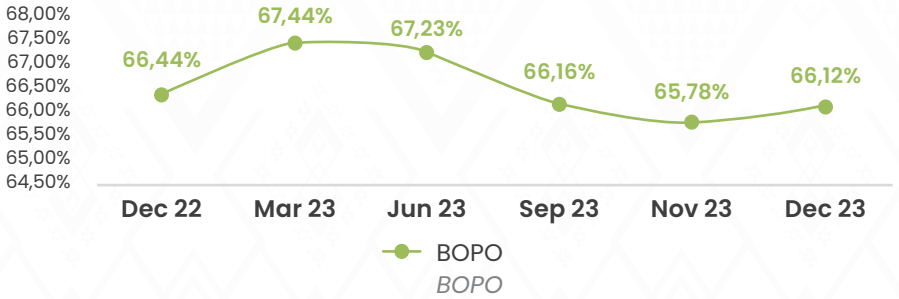

Grafik 3.64. Perkembangan Rasio ROA dan ROE Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.64. ROA and ROE of Sharia Finance Companies

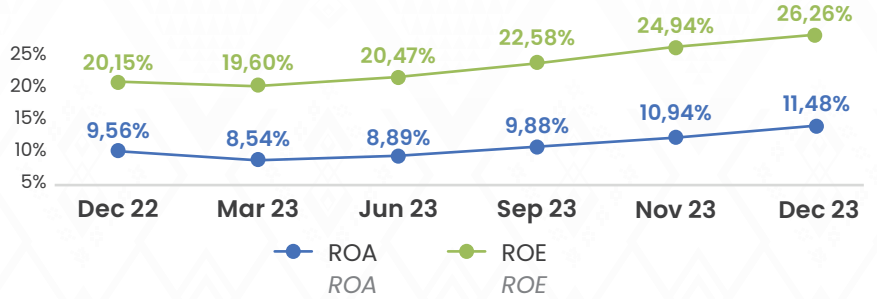

Gearing Ratio (GR) masih terjaga sesuai dengan *threshold*, yaitu paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali yaitu sebesar 1,13 kali. *Financing to Assets Ratio* (FAR) masih terjaga sesuai dengan *threshold* yaitu minimal 40%, yaitu sebesar 81,64%.

The gearing ratio was maintained within regulatory thresholds, namely from 0 to 10x, at 1.13. The financing to assets ratio (FAR) was maintained above the 40% minimum threshold at 81.64%.

Grafik 3.65. Perkembangan *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.65. Gearing Ratio of Sharia Finance Companies

Grafik 3.66. Perkembangan *Financing to Assets Ratio* Perusahaan Pembiayaan Syariah
Graph 3.66. Financing to Assets Ratio of Sharia Finance Companies

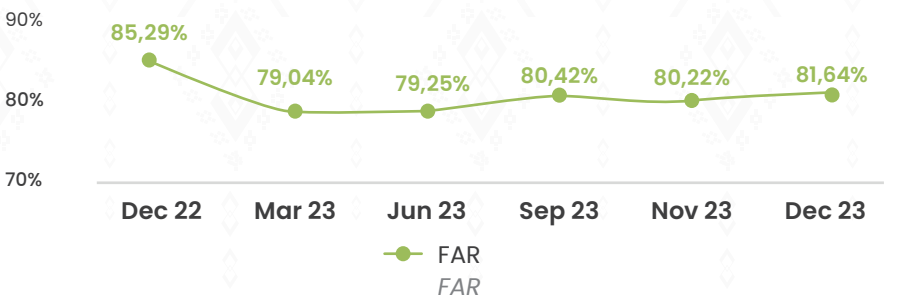

III.7.12.2 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Syariah
Sharia Venture Capital Industry Developments

Sampai 2023, total aset Perusahaan Modal Ventura Syariah mengalami peningkatan secara tahunan sebesar Rp0,07 triliun (1,75%). Liabilitas Perusahaan Modal Ventura Syariah mengalami peningkatan secara tahunan turun sebesar Rp0,10 triliun (3,09%). Selain itu, ekuitas mengalami peningkatan secara tahunan naik sebesar Rp0,18 triliun (19,09%).

Through to the end of 2023, the total assets of sharia venture capital firms recorded an annual increase of IDR0.07 trillion (1.75% yoy). Meanwhile, the liabilities of sharia venture capital firms experienced a IDR0.10 trillion decline (3.09%) and equity increased annually by IDR0.18 trillion (19.09%).

Grafik 3.67. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.67. Assets, Liabilities and Equity of Sharia Venture Capital Firms

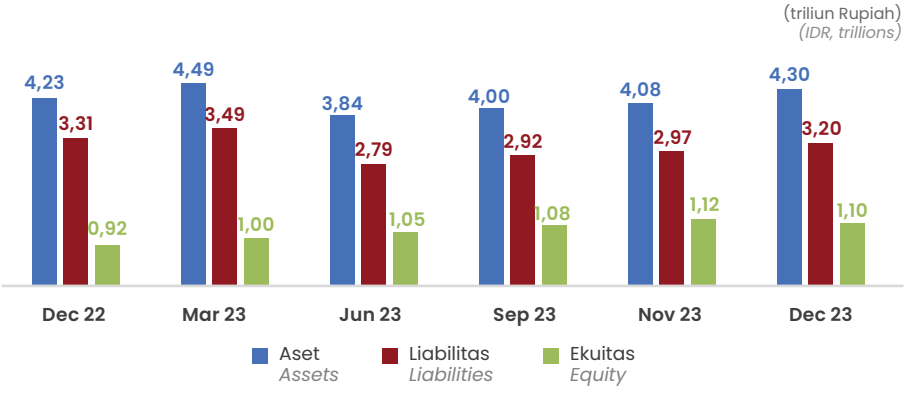

Grafik 3.68. Perkembangan Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.68. Financing Disbursed by Sharia Venture Capital Firms

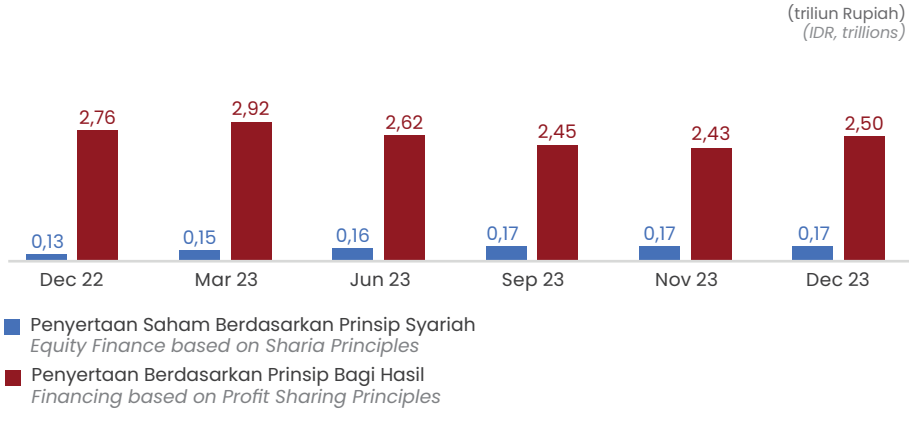

1. Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura Syariah sebesar Rp2,67 triliun, mengalami penurunan secara tahunan sebesar Rp0,22 triliun (7,62%). Penyaluran pembiayaan/penyertaan terbesar terdapat pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebesar Rp2,50 triliun (93,76%), diikuti penyertaan saham berdasarkan prinsip syariah sebesar Rp0,17 triliun (6,24%).

2. Rasio Pembiayaan Bermasalah Perusahaan Modal Ventura Syariah

NPF *Gross* perusahaan Modal Ventura Syariah per Desember 2023 meningkat secara tahunan menjadi 3,99% dari 3,86% pada Desember 2022. NPF Neto perusahaan Modal Ventura Syariah syariah per Desember 2023 juga meningkat dibandingkan Desember 2022 menjadi 3,40%.

Grafik 3.69. Rasio Pembiayaan Bermasalah Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.69. NPF Ratio of Sharia Venture Capital Firms

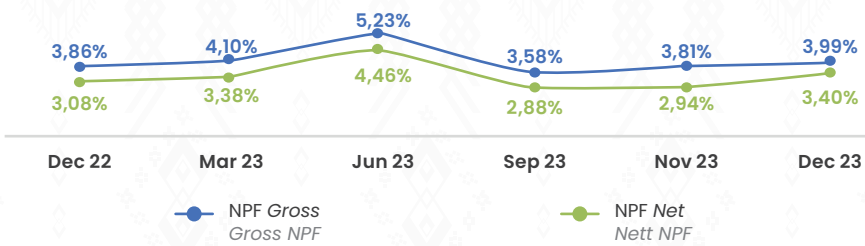

3. Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah

BOPO PMV Syariah per Desember 2023 naik secara tahunan menjadi 84,93% dari 72,17% pada Desember 2022. ROA PMV Syariah sebesar 4,02% secara tahunan turun dari 7,04% pada Desember 2022. ROE juga mengalami penurunan pada Desember 2023 menjadi 14,83% dari 41,56% pada Desember 2022. *Gearing Ratio* (GR) masih terjaga sesuai dengan *threshold*, yaitu sebesar 2,35 kali. *Investment/Financing to Assets Ratio* (IFAR) PMV Syariah per Desember 2023 sebesar 62,01% turun dari 68,30% pada Desember 2022.

Grafik 3.71. Rasio ROA dan ROE Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.71. ROA and ROE Ratios of Sharia Venture Capital Firms

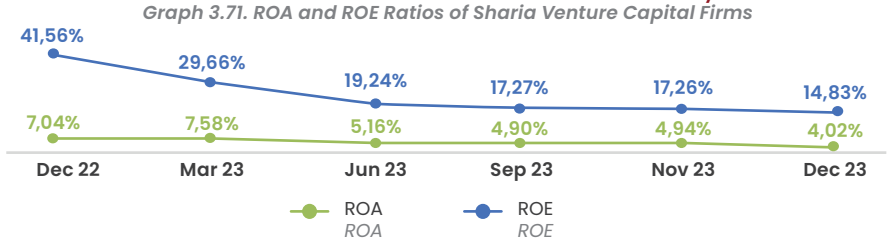

III.7.12.3 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Sharia Microfinance Institution Developments

Selama 2023, total aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,84% *yoy* menjadi sebesar Rp623 miliar. Berdasarkan pelaku usaha, jumlah pelaku usaha pada industri LKMS menjadi pelaku industri PVML terbanyak dengan jumlah industri sebanyak 80 entitas.

1. *Financing by Sharia Venture Capital Firms*

The financing/investment of sharia venture capital firms was recorded at IDR2.67 trillion, declining annually by IDR0.22 trillion (7.62%). Financing/investment was dominated by financing disbursed based on profit sharing principles, totalling IDR2.50 trillion (93.76%), followed by equity financing at IDR0.17 trillion (6.24%).

2. *Non-Performing Financing (NPF) Ratio of Sharia Venture Capital Firms*

The gross NPF ratio of sharia venture capital firms, as recorded in December 2023, increased to 3.99% from 3.86% in December 2022. The nett NPF ratio of Islamic venture capital firms also increased to 3.40% in the same period.

Grafik 3.70. Perkembangan Rasio BOPO Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.70. BOPO Efficiency Ratio of Sharia Venture Capital Firms

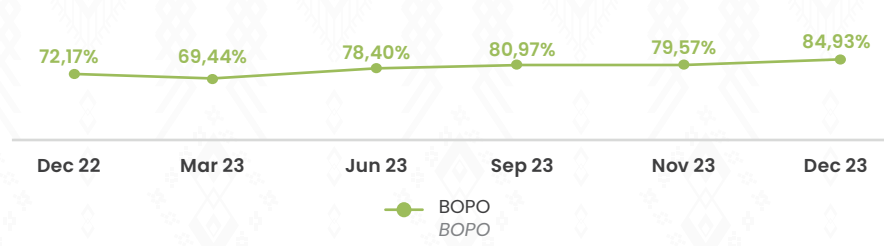

3. *Financial Ratios of Sharia Venture Capital Firms*

The BOPO efficiency ratio of sharia Venture Capital Firms in December 2023 increased to 84.93% from 72.17% in December 2022. Annually, the return on assets (ROA) of Sharia Venture Capital Firms decreased to 4.02% in December 2023 from 7.04% in December 2022, while the return on equity (ROE) fell to 14.83% from 41.56% in the same period. The gearing ratio (GR) of Islamic Venture Capital Firms in 2023 was maintained within the threshold at 2.35x. The Investment/Financing to Assets Ratio (IFAR) of Islamic Venture Capital Firms in December 2023 stood at 62.01%, down from 68.30% in December 2022.

Grafik 3.72. *Gearing Ratio* Perusahaan Modal Ventura Syariah
Graph 3.72. Gearing Ratio of Sharia Venture Capital Firms

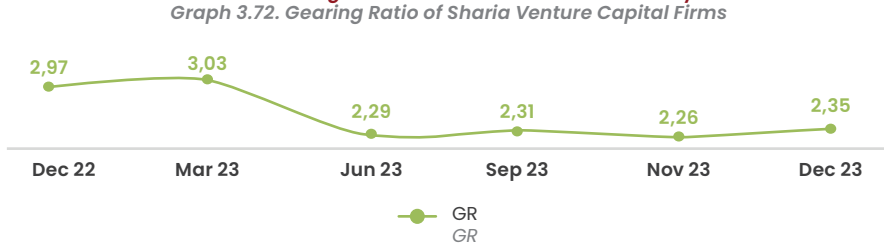

In 2023, the total assets of Sharia Microfinance Institutions recorded 3.84% yoy growth to reach IDR623 billion. Most businesses in the Sharia microfinance industry operated in the PVML industry, totalling 80 entities.

Tabel 3.28. Perkembangan Kinerja dan Penyaluran Pembiayaan LKMS
Table 3.28. Performance of Microfinance Institutions Developments

	2022-1	2022-2	2022-3	2023-1	2023-2	2023-3
Aset | *Assets*	555,31	580,62	600,43	587,75	607,18	623,48
Liabilitas | *Liabilities*	92,35	100,84	104,40	101,15	113,66	118,65
Ekuitas | *Equity*	286,38	288,75	289,36	287,88	289,50	289,55
PYD (Neto)	191,06	185,94	186,91	204,73	207,75	208,11
PYD (Bruto)	250,77	246,34	248,72	269,26	274,09	277,36

III.7.12.8. Perkembangan Perusahaan Pergadaian Syariah
Sharia Pawnbrokers Developments

Pada 2023, aset pergadaian syariah mencapai Rp13,65 triliun, naik 22,85% *yoy* dengan *market share* terbesar adalah aset UUS PT Pegadaian yang mencapai 99,40% dari total aset industri pergadaian syariah. Di sisi lain, nilai pinjaman juga mengalami kenaikan 30,00% *yoy*, menjadi Rp13,74 triliun dengan *market share* terbesar adalah UUS PT Pegadaian yang mencapai 99,49% dari total pinjaman yang diberikan industri pergadaian syariah.

In 2023, total assets of sharia pawnbrokers reached IDR13.65 trillion, up 22.85% yoy, and the market share was dominated by UUS PT Pegadaian, accounting for 99.40% of the total assets in the Sharia pawnbroking industry. On the other hand, the value of disbursed loans also increased by 30.00% yoy to IDR13.74 trillion, again dominated by UUS PT Pegadaian with a 99.49% market share of total disbursed loans in the industry.

Grafik 3.73. Aset dan Pinjaman yang Disalurkan
Graph 3.73. Assets and Disbursed Loans

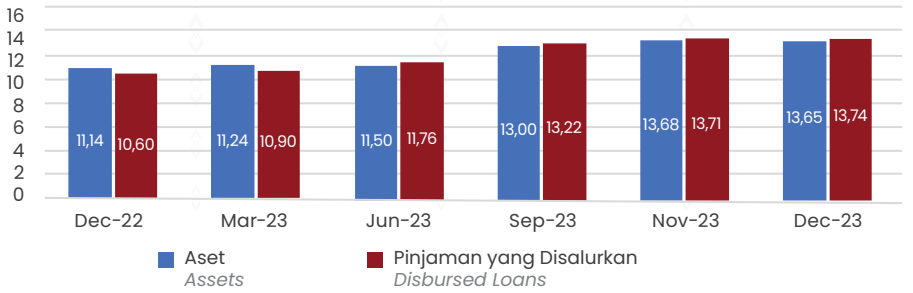

Grafik 3.74. Pinjaman yang Diberikan berdasarkan Jenis Produk
Graoh 3.74. Disbursed Loans by Product

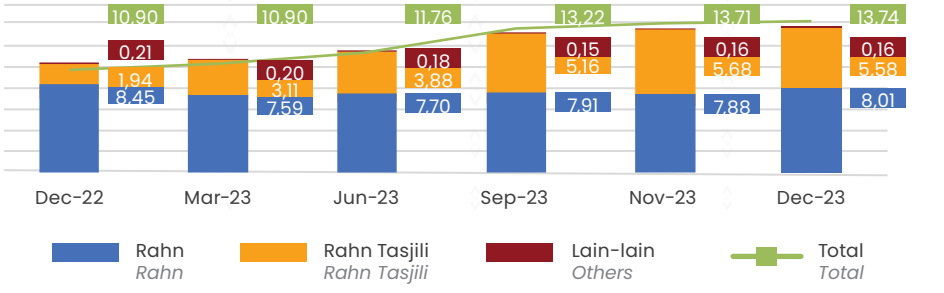

Berdasarkan jenis produk, penyaluran pinjaman terbesar industri pergadaian syariah diberikan dalam bentuk produk Rahn (Gadai), yaitu sebesar Rp8,01 triliun atau 58,09% dari total pinjaman yang diberikan, turun 5,25% *yoy*, diikuti oleh produk Rahn Tasjili (Fidusia) sebesar Rp5,58 triliun (40,80%) dari total pinjaman yang diberikan, naik 187,46% *yoy*, dan produk lain sebesar Rp0,16 triliun (1,11%) dari total pinjaman yang diberikan, turun 24,63% *yoy*.

By product, disbursed loans in the sharia pawnbroking industry were dominated by Rahn products, totalling IDR8.01 trillion and accounting for 58.09% of total disbursed loans, retreating 5.25% yoy, followed by Rahn Tasjili products at IDR5.58 trillion (40.80%), up 187.46% yoy, and other products totalling IDR0.16 trillion (1.11%), down 24.63% yoy.

Debt to Asset Ratio (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) UUS PT Pegadaian sebesar 49,35% dan 97,42%, serta DAR dan DER Pergadaian Swasta Syariah pada Triwulan III-2023 sebesar 27,96% dan 38,81% menunjukkan solvabilitas industri pergadaian swasta masih terjaga.

The debt-to-asset ratio (DAR) and debt-to-equity ratio (DER) of UUS PT Pegadaian were recorded at 49.35% and 97.42% respectively, while the DAR and DER of private sharia pawnbrokers in the third quarter of 2023 stood at 27.96% and 38.81%, demonstrating that the solvency of the private sharia pawnbroking industry was maintained.

Grafik 3.75. Perkembangan Likuiditas dan Solvabilitas UUS PT Pegadaian
Graph 3.75. Liquidity and Solvency of UUS PT Pegadaian

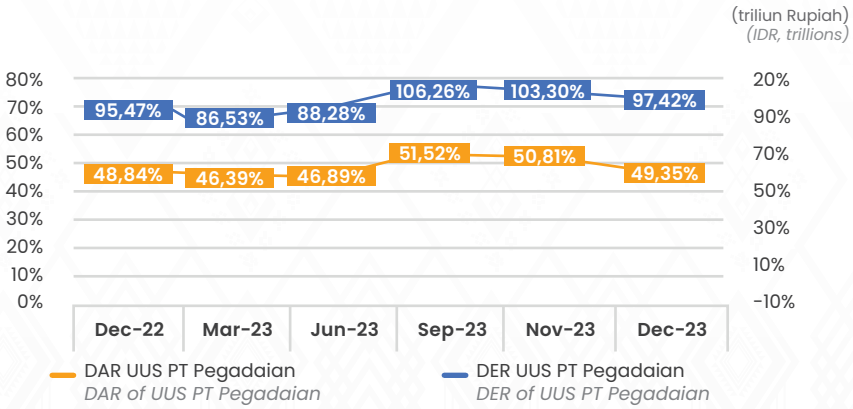

ROA UUS PT Pegadaian sebesar 5,48%, sedangkan ROA Pergadaian Swasta sebesar 6,37% menunjukkan Perusahaan Pergadaian Swasta masih memiliki profitabilitas lebih baik dibandingkan dengan UUS PT Pegadaian. Industri pergadaian masih menunjukkan profitabilitas yang memadai dengan ROE UUS PT Pegadaian sebesar 10,60% dan Pergadaian Swasta Syariah sebesar 10,18%. Industri Pergadaian Syariah menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan BOPO UUS PT Pegadaian sebesar 69,45% dan BOPO Pergadaian Swasta Syariah sebesar 68,66%.

Grafik 3.76. Perkembangan Likuiditas dan Solvabilitas Pergadaian Swasta Syariah
Graph 3.76. Liquidity and Solvency of Private Sharia Pawnbroking Industry

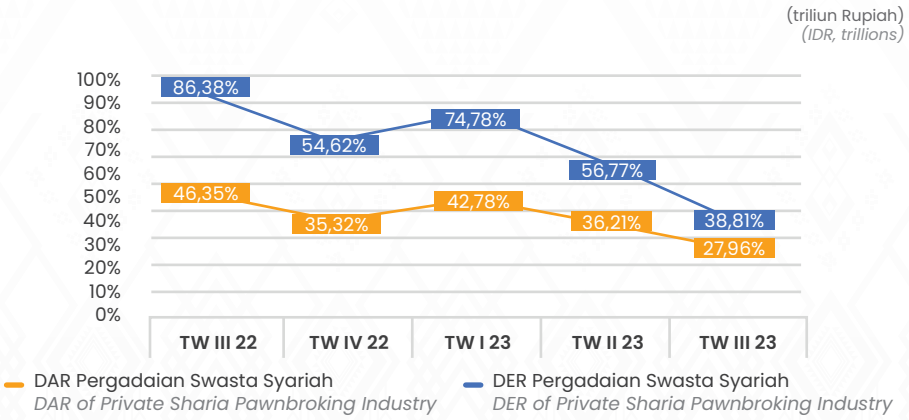

The ROA of UUS PT Pegadaian was recorded at 5.48% and 6.37% for the private sharia pawnbroking industry, indicating that the profitability of the private sharia pawnbroking industry was higher than UUS PT Pegadaian. Meanwhile, the pawnbroking industry also maintained adequate profitability, as indicated by a return on equity (ROE) for UUS PT Pegadaian of 10.60% and 10.18% for the private sharia pawnbroking industry. Furthermore, the sharia pawnbroking industry also demonstrated solid efficiency, as reflected by a BOPO efficiency ratio of 69.45% for UUS PT Pegadaian and 68.66% for the private sharia pawnbroking industry.

III.7.12.9. Perkembangan *Peer to Peer Lending* Syariah
Sharia Peer-to-Peer Lending Developments

Sampai dengan akhir 2023, total aset, liabilitas dan ekuitas *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp138,69 miliar, Rp72,69 miliar dan Rp28,78 miliar.

At the end of 2023, the total assets, liabilities and equity of Sharia Peer-To-Peer Lending (P2PL) increased to IDR138.69 billion, IDR72.69 billion and IDR28.78 billion respectively.

Grafik 3.77. Kinerja Keuangan P2PL Syariah
Graph 3.77. Financial Performance of Sharia Peer-to-Peer Lending

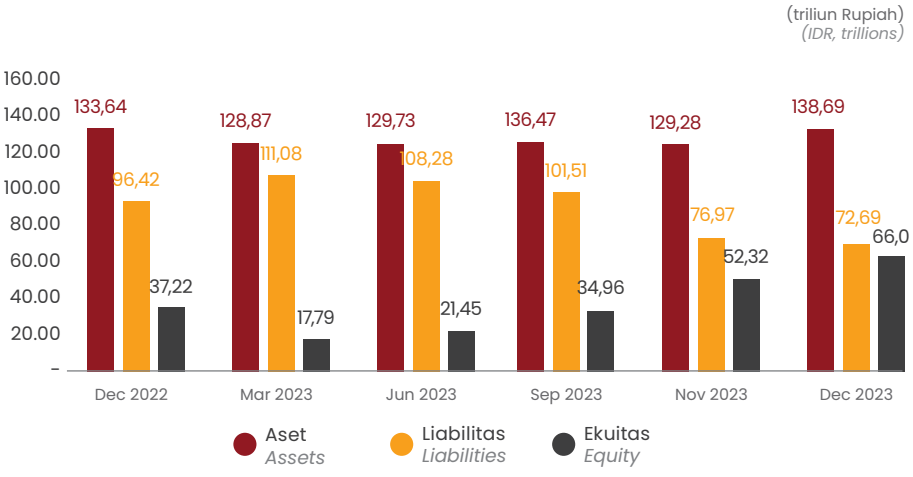

Grafik 3.78. Penyaluran Pinjaman P2PL Syariah
Graph 3.78. Disbursed Financing of Sharia P2PL Industry

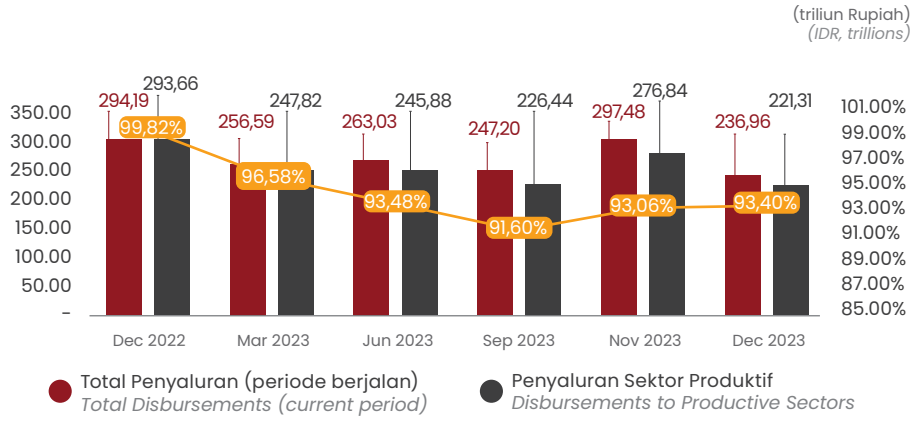

Akumulasi sejak berdiri *Unique Lender* periode Desember 2023 mengalami peningkatan 11,47% *yoy* mencapai 61.875 entitas. Akumulasi sejak berdiri *Unique Borrower* mengalami peningkatan 226,67% *yoy* mencapai 117.655 entitas. Selain itu, akumulasi sejak berdiri transaksi Lender mencapai 499.548 akun, naik 51,02% *yoy*. Sementara itu, akumulasi sejak berdiri Transaksi *Borrower* juga mengalami peningkatan 322,75% *yoy* menjadi 260.864 akun.

Accumulation since the establishment of unique lenders in December 2023 increased 11.47% yoy to reach 61,875 entities. Accumulation since establishment of unique borrowers increased significantly by 226.67% yoy to reach 117,655 entities. In addition, accumulation since the establishment of lender transactions increased 51.02% yoy to reach 499,548 accounts. Meanwhile, accumulation since the establishment of borrower transactions also increased significantly by 322.75% yoy to reach 260,864 accounts.

Penyaluran Pinjaman periode Desember 2023 turun 19,45% menjadi Rp236,96 miliar dari Rp294,19 miliar di tahun sebelumnya. Penyaluran Pinjaman pada Sektor Produktif mengalami penurunan dari Rp293,66 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp221,31 miliar pada periode Desember 2023. Persentase Penyaluran Pinjaman pada Sektor Produktif terhadap Total Penyaluran Pinjaman periode Desember 2023 mengalami penurunan menjadi 93,40%.

Disbursed financing in December 2023 fell 19.45% to IDR236.96 billion from IDR294.19 billion in the previous year. Disbursed financing to productive sectors experienced a decline from IDR293.66 billion in 2022 to IDR221.31 billion in December 2023. Percentage of disbursed financing of productive sectors to total disbursed financing in 2023 has decreased to 93.40%.

Grafik 3.80. *Outstanding* P2PL Syariah
Graph 3.80. Outstanding Financing of Sharia P2PL Industry

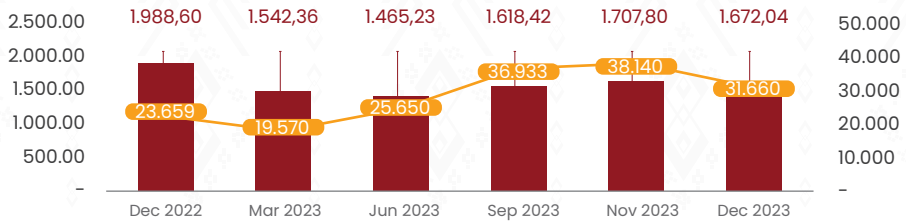

Grafik 3.81. Rasio BOPO P2PL Syariah
Graph 3.81. BOPO Efficiency Ratio of Sharia P2PL Industry

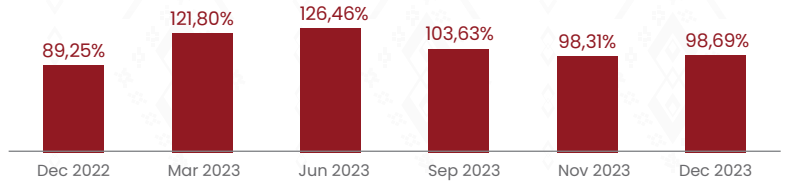

Outstanding pinjaman periode Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.672,04 miliar atau turun sebesar 15,92% *yoy*. Jumlah *borrower* aktif yang masih memiliki pinjaman adalah sebanyak 31.660 akun naik 33,82% *yoy*. Sampai akhir periode laporan, BOPO meningkat secara tahunan *yoy* menjadi 98,69% dari 89,25% pada Desember 2022. Lebih lanjut, rasio ROA tercatat sebesar 0,75% dan rasio ROE tercatat sebesar 1,57%. TWP90 Desember 2023 sebesar 0,94%, atau naik sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Outstanding financing in December 2023 was recorded at IDR1,672.04 billion, down 15.92% yoy. The number of active borrowers with outstanding loans increased 33.82% yoy to 31,660 accounts. At the end of the reporting period, the BOPO efficiency ratio increased to 98.69% from 89.25% in December 2022. Furthermore, ROA and ROE were recorded at 0.75% and 1.57% respectively. TWP90 in December 2023 increased by 0.12% from the previous year to reach 0.94%.

Grafik 3.82. Rasio ROA P2PL Syariah
Graph 3.82. ROA Ratio of Sharia P2PL Industry

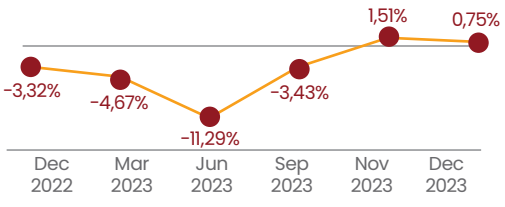

Grafik 3.83. Rasio ROE P2PL Syariah
Graph 3.83. ROE Ratio of Sharia P2PL Industry

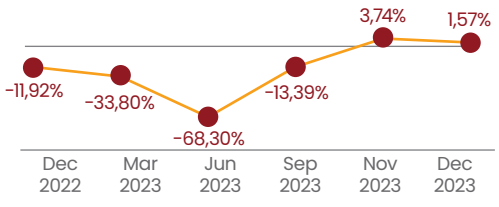

Grafik 3.84. TWP90 P2PL Syariah
Graph 3.84. TWP90 of Sharia P2PL Industry

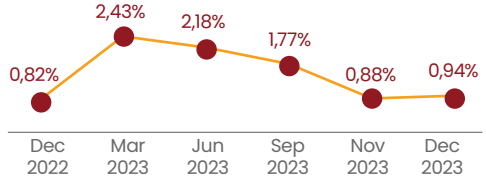

III.7.12.4 Perkembangan Unit Usaha Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur
Sharia Business Units of PT Sarana Multi Infrastruktur

Sampai akhir 2023, aset Unit Usaha Syariah (UUS) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp9,05 triliun, meningkat 29,47% secara tahunan. Liabilitas secara MtM mengalami penurunan 30,98% secara tahunan. Ekuitas secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 181,85%. Pada UUS PT SMI juga terdapat dana *syirkah* temporer dengan nilai Rp4,76 triliun, meningkat 25,21% secara tahunan.

As of the end of 2023, the total assets of the Sharia Business Units (UUS) of PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) totalled IDR9.05 trillion, up 29.47% annually. Liabilities (mtm) declined 30.98% annually, while equity increased significantly by 181.85% yoy. The Sharia Business Units of PT Sarana Multi Infrastruktur also disbursed temporary syirkah funds totalling IDR4.76 trillion, up 25.21% annually.

Grafik 3.85. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas dan Dana *Syirkah* Temporer UUS PT SMI
Graph 3.85. Growth of Assets, Liabilities, Equity and Temporary Syirkah Funds by the Sharia Business Units of PT SMI

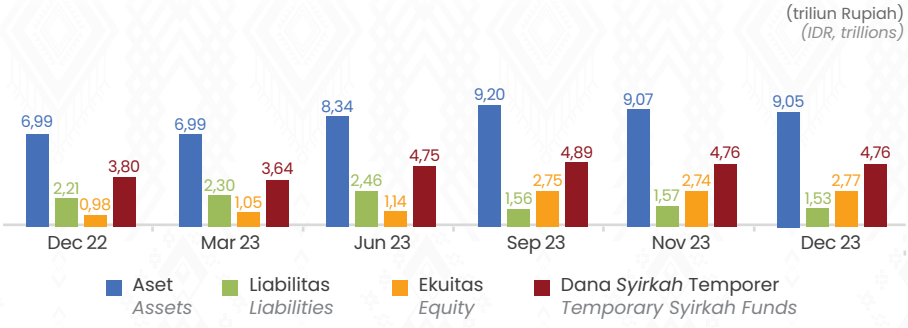

Grafik 3.86. Perkembangan Rasio NPF UUS PT SMI
Graph 3.86. NPF Ratio of the Sharia Business Units of PT SMI

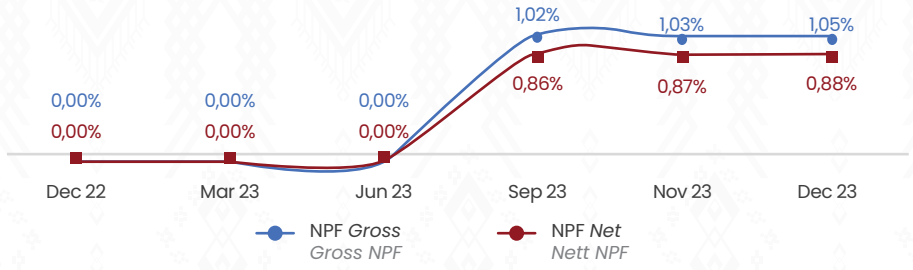

NPF *Gross* UUS PT SMI meningkat secara tahunan *yoy* menjadi 1,05%. Sementara NPF Neto UUS PT SMI per Desember 2023 meningkat secara tahunan *yoy* menjadi sebesar 0,88%. *Gearing Ratio* (GR) UUS PT SMI terjaga sesuai dengan *threshold*, paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali yaitu sebesar 0,52 kali. Selain itu, rasio ROA UUS PT SMI 4,33% meningkat dibandingkan Desember 2022. Sementara itu, ROE 14,39% mengalami penurunan dari 18,39% pada Desember 2022.

The gross NPF ratio of UUS PT SMI increased annually to 1.05% in December 2023, while the nett NPF ratio increased to 0.88% in the same period. The gearing ratio (GR) of UUS PT SMI was maintained within the 0-10x threshold at 0.52x. In addition, the return on assets (ROA) of UUS PT SMI increased to 4.33% in December 2023 but the return on equity (ROE) decreased to 14.39% from 18.39% in December 2022.

Grafik 3.87. Perkembangan Rasio BOPO UUS PT SMI
Graph 3.87. BOPO Efficiency Ratio of UUS PT SMI

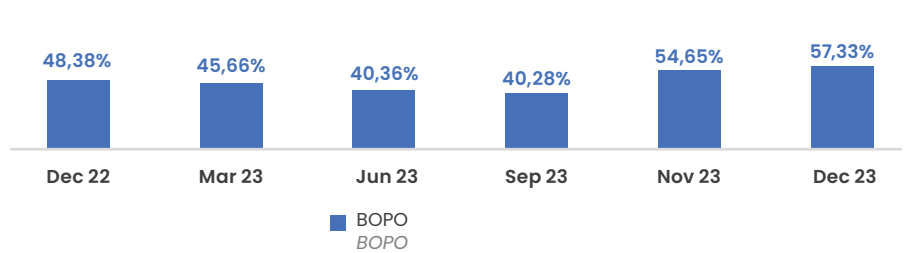

Grafik 3.88. Perkembangan *Gearing Ratio* UUS PT SMI
Graph 3.88. Gearing Ratio of UUS PT SMI

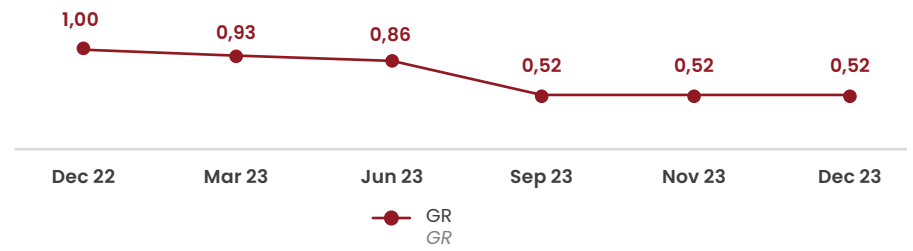

III.7.12.5 Perkembangan Unit Usaha Syariah LPEI
Sharia Business Units of Indonesia Eximbank

Sampai akhir 2023, aset UUS LPEI sebesar Rp8,01 triliun, turun 9,71% *yoy*. Penurunan aset UUS LPEI salah satunya disebabkan karena nilai pembiayaan ekspor mengalami penurunan. Sementara itu, ekuitas UUS LPEI turun 29,29% *yoy* menjadi Rp1,73 triliun pada Desember 2023. Nilai pembiayaan bruto UUS LPEI pada Desember 2023 turun 20,66% *yoy* menjadi Rp9,94 triliun dan nilai pembiayaan *netto* UUS LPEI turun 9,87% *yoy* menjadi Rp8,00 triliun.

At the end of 2023, total assets of The Sharia Business Units of Indonesia Eximbank (UUS LPEI) decreased by 9.71% yoy to IDR8.01 trillion. The lower asset position was partially attributable to the lower value of export financing. Meanwhile, the equity of UUS LPEI retreated 29.29% yoy to IDR1.73 trillion in December 2023. Gross financing in December 2023 fell 20.66% yoy to IDR9.94 trillion, with the net value declining 9.87% yoy to IDR8.00 trillion.

Grafik 3.89. Perkembangan Aset, Ekuitas, Pembiayaan Neto, dan Pembiayaan Bruto
Graph 3.89. Assets, Equity, Net Financing and Gross Financing

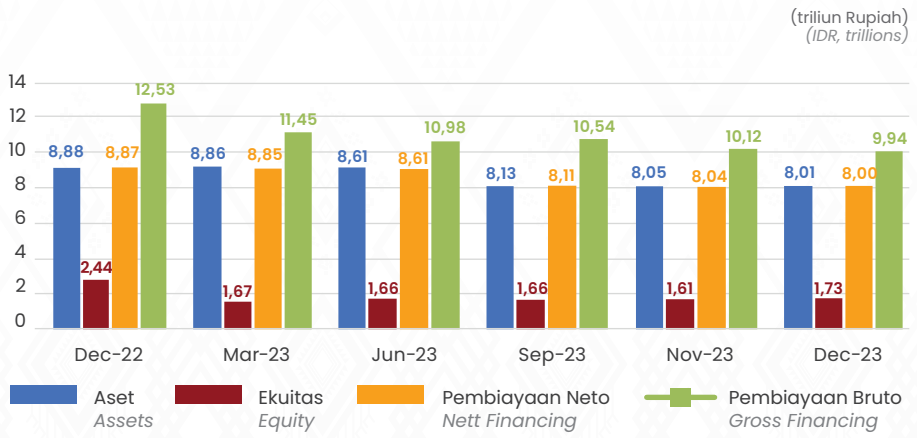

Grafik 3.90. Pembiayaan Berdasarkan Sektor Periode Desember 2023
Graph 3.90. Composition of Financing by Sector in December 2023

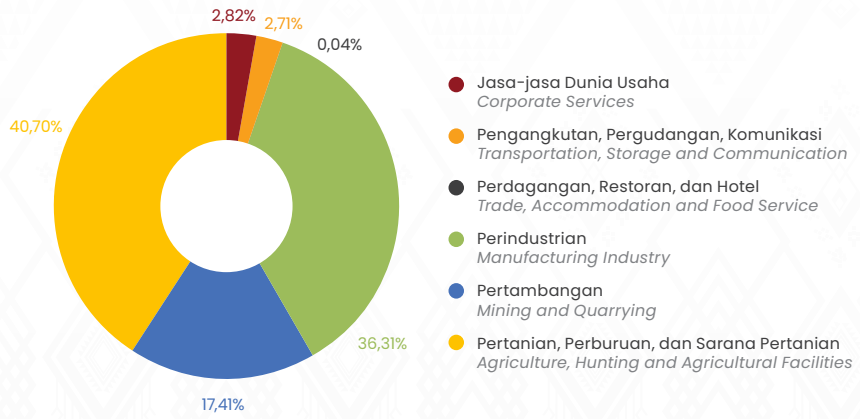

Portofolio pembiayaan UUS LPEI terbesar adalah pembiayaan investasi, sebesar Rp7,80 triliun (78,52%), berdasarkan sektor ekonomi lapangan usaha, pembiayaan UUS LPEI terbesar adalah pada sektor Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian sebesar Rp4,05 triliun. FAR periode Desember 2023 sebesar 99,79%, turun 0,17% *yoy*. Rasio NPF Bruto pada Desember 2023 sebesar 48,42%, naik 8,59% *yoy*.

The financing portfolio of UUS LPEI was dominated by investment financing, totalling IDR7.80 trillion (78.52%), by sector most financing disbursed by UUS LPEI was extended to the agricultural, hunting and agricultural facilities sector, totaling Rp4.05 trillion. The FAR for the period of December 2023 was 99.79%, a decrease of 0.17% yoy. The Gross NPF ratio in December 2023 was 48.42%, an increase of 8.59% yoy.

Grafik 3.91. Perkembangan Rasio FAR dan NPF Bruto UUS LPEI
Graph 3.91. FAR and Gross NPR Ratios of UUS LPEI

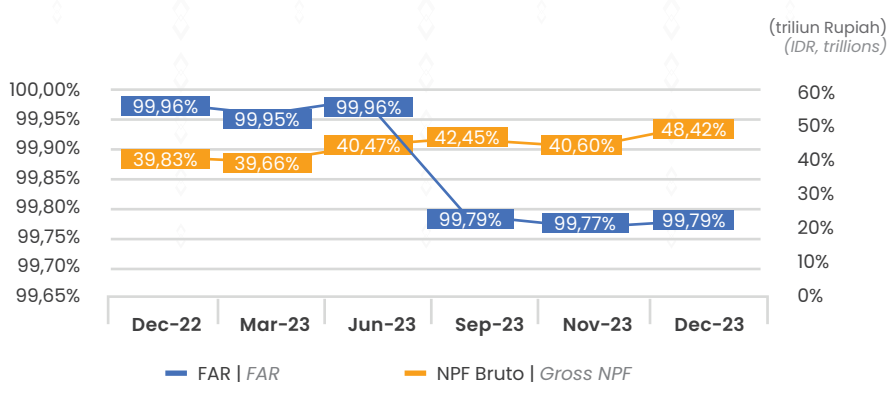

Grafik 3.92. Perkembangan Rasio ROA ROE UUS LPEI
Graph 3.92. ROA and ROE of UUS LPEI

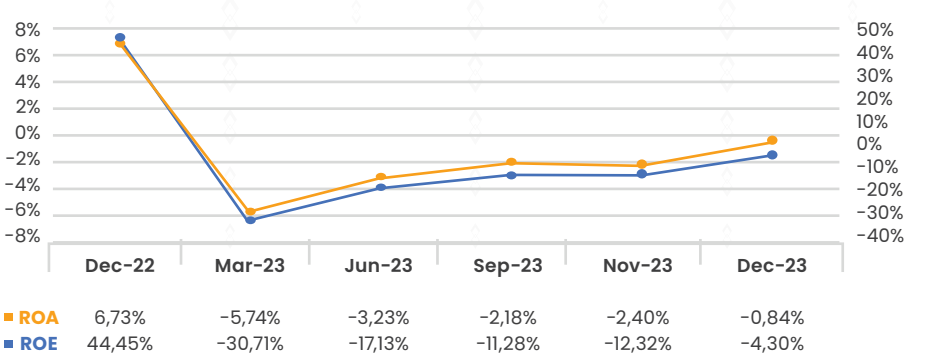

III.7.12.6. Perkembangan Unit Usaha Syariah PT PNM (Persero)
Sharia Business Units of Permodalan Nasional Madani (PNM)

Pada 2023, aset PT PNM Unit Usaha Syariah mencapai Rp31,31 triliun, naik 10,07% *yoy*. Nilai pembiayaan *netto* naik 12,27% *yoy* menjadi Rp29,41 triliun. FAR tercatat sebesar 93,94%, masih berada di atas batas minimum, yaitu 65%. Penyaluran pembiayaan neto yang dilakukan PT PNM Unit Usaha Syariah paling besar adalah Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu sebesar Rp28,44 triliun atau 96,72% dari total pembiayaan.

In 2023, total assets of the sharia business units of Permodalan Nasional Madani (UUS PT PNM) increased 10.07% yoy to IDR31.31 trillion. Nett financing increased 12.27% yoy to IDR29.41 trillion and the FAR ratio was recorded at 93.94%, above the 65% minimum threshold. Net financing disbursed by UUS PT PNM was dominated by the Mekaar Program for a prosperous family economy, totalling IDR28.44 trillion or 96.72% of total disbursed financing.

Grafik 3.93. Kinerja Keuangan UUS PT PNM
Graph 3.93. Financial performance of UUS PT PNM

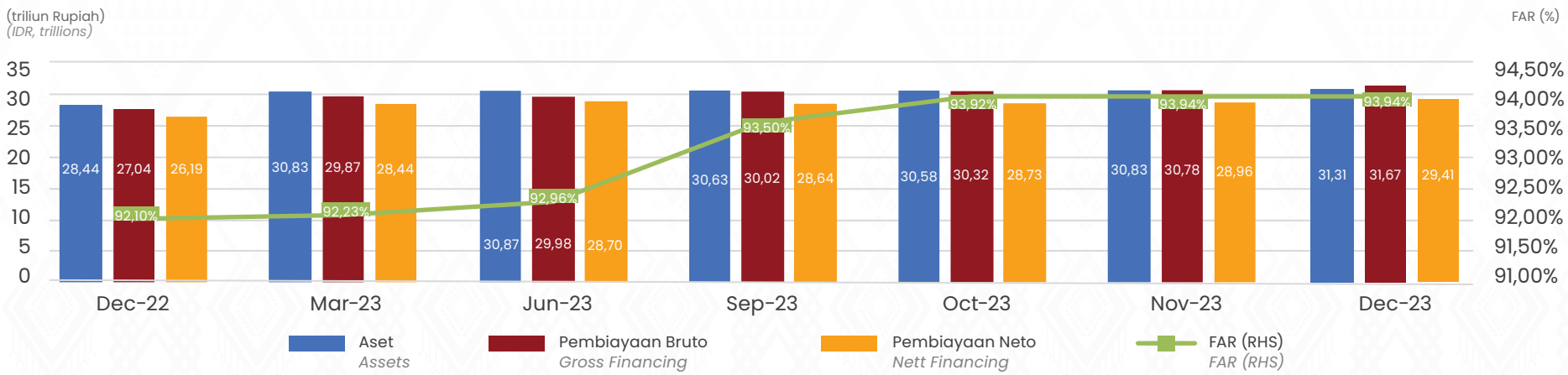

III.7.12.7. Perkembangan Unit Usaha Syariah PT SMF
Sharia Business Units of Sarana Multi Finance (UUS PT SMF)

Aset UUS PT SMF periode Desember 2023 sebesar Rp5,37 triliun, mengalami kenaikan sebesar 38,76% *yoy*. Selanjutnya, Pinjaman Yang Disalurkan juga mengalami kenaikan sebesar 41,95% *yoy* menjadi Rp5,25 triliun. Pinjaman Yang Diterima sebesar Rp370,50 miliar, naik sebesar 270,50% *yoy*. Selanjutnya, Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 27,01% *yoy* menjadi Rp372,24 miliar. *Gearing Ratio* periode Desember 2023 sebesar 1,00 kali.

Total assets of UUS PT SMF in December 2023 were recorded at IDR5.37 trillion, up 38.76% yoy. Meanwhile, disbursed financing also increased by 41.95% yoy to IDR5.25 trillion in the reporting period. Financing received by UUS PT SMF in 2023 increased significantly by 270.50% yoy to IDR370.50 billion, while equity increased by 27.01% yoy to IDR372.24 billion and the Gearing Ratio (GR) was maintained in December 2023 at 1.00x.

Grafik 3.94. Kinerja Keuangan UUS PT SMF
Graph 3.94. Financial Performance of UUS PT SMF

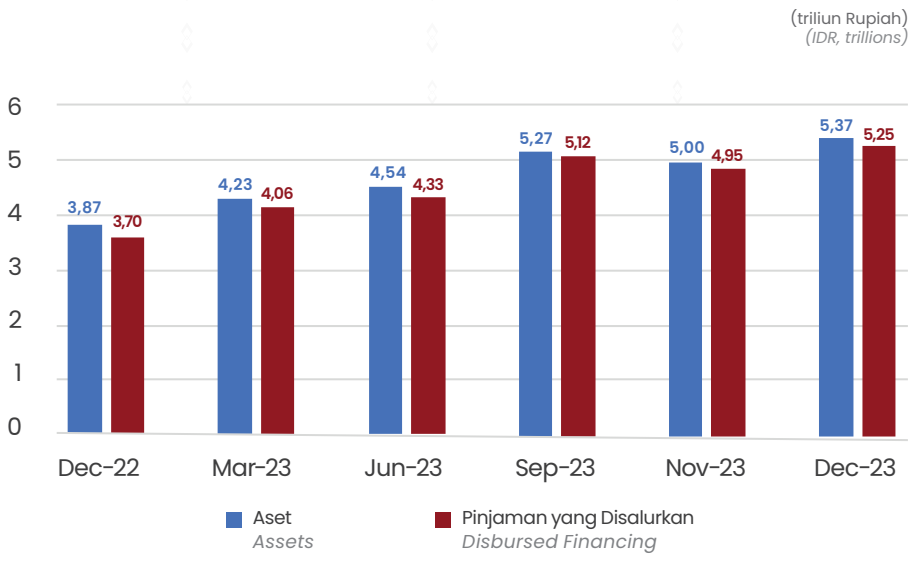

Grafik 3.95. Pinjaman yang Diterima, Ekuitas, dan *Gearing Ratio* UUS PT SMF
Graph 3.95. Financing Received, Equity and Gearing Ratio of UUS PT SMF

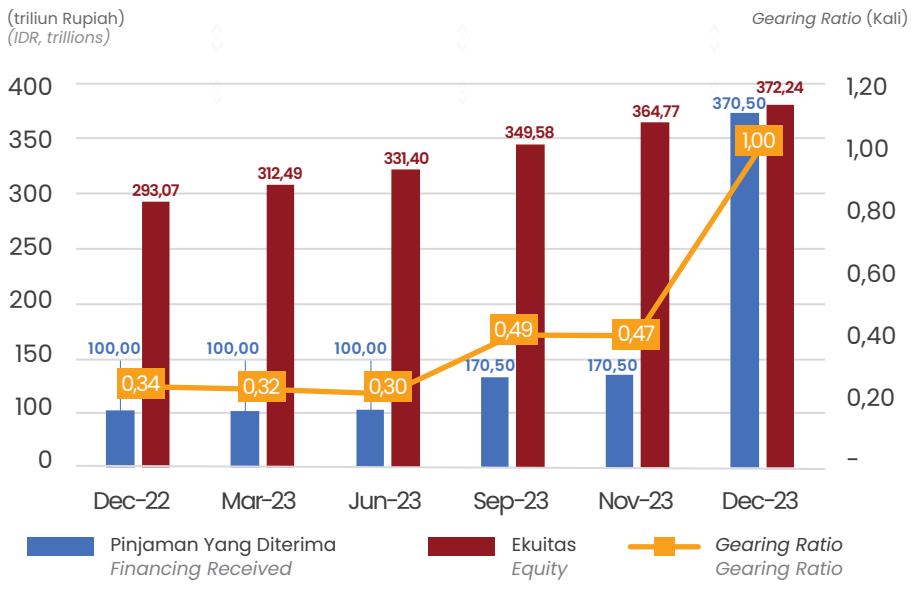

III.8 Perkembangan Industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Financial Sector Technology Innovation Industry, Digital Financial Assets and Crypto Assets

Bidang Pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) dibentuk atas amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan industri IAKD pada tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan ITSK dalam *Regulatory Sandbox***

   Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, antusiasme atas inovasi terus tumbuh yang terlihat dari jumlah permohonan pencatatan sebagai penyelenggara ITSK yang akan masuk ke OJK dalam rangka *Regulatory Sandbox* sejumlah 458 proposal. Atas permohonan tersebut, OJK telah menerbitkan status tercatat terhadap 155 penyelenggara ITSK.

Supervision of the financial sector technology innovation industry, digital financial assets and crypto assets (IAKD) is in accordance with the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act), which has the function of implementing a supervisory and regulatory system for the financial sector technology innovation industry, digital financial assets and crypto assets that is integrated with all activities in the financial services sector. In general, IAKD industry developments in 2023 were as follows:

1. ***Implementation of Financial Sector Technology Innovation in the Regulatory Sandbox***

   Since promulgation of OJK Regulation (POJK) Number 13/POJK.02/2018 concerning digital financial innovation in the financial services sector, enthusiasm for innovation has continued to grow, as reflected by the 458 applications received from Financial Sector Technology Innovation (ITSK) service providers to join the OJK regulatory sandbox. Of the applications received, OJK has issued registered status to 155 ITSK service providers.

Grafik 3.96. Jumlah Pengajuan Permohonan Penyelenggara ITSK
Graph 3.96. Applications for Financial Sector Technology Innovation (ITSK) Service Providers

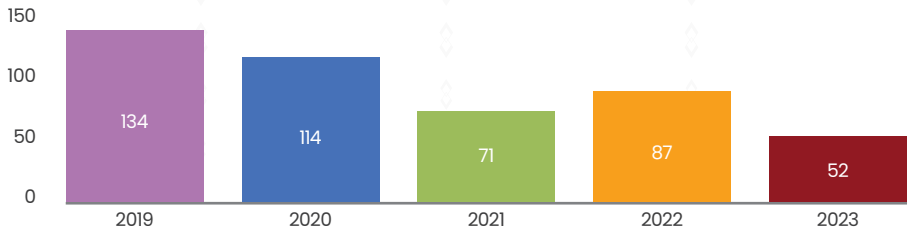

Grafik 3.97. Penyelenggara ITSK
Graph 3.97. ITSK Service Providers

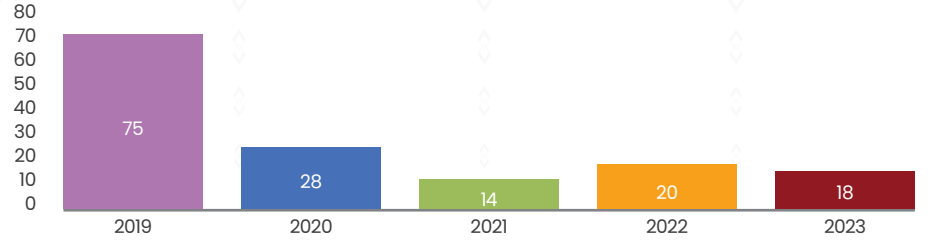

Sejak Agustus-Desember 2023, terdapat tiga penyelenggara ITSK yang tercatat atas hasil forum panel untuk *batch* 25. Selain itu, terdapat pengajuan permohonan pencatatan sebanyak 14 penyelenggara ITSK yang masuk pada *batch* 26 dan terdapat dua penyelenggara ITSK yang masuk pada *batch* 27.

From August to December 2023, a total of three ISTK service providers were recorded in the results of the panel forum for Batch 25. In addition, 14 ISTK service providers were included in Batch 26 and a further two in Batch 27.

Selanjutnya terdapat 11 pembatalan status Tercatat (termasuk menghapus 1 klaster, yaitu *Property Investment Management*). Pembatalan ini didasari oleh perubahan model bisnis, penyelenggara ITSK tidak melanjutkan usaha (*dormant*), maupun penyelenggara ITSK mengembalikan status tanda bukti tercatat secara sukarela.

Meanwhile, OJK cancelled the registered status of 11 ISTK service providers, including one cluster, namely property investment management. The cancellations were due to changes of business model, dormant ISTK service providers and voluntary cancellations.

Grafik 3.98. Tren Jumlah Penyelenggara ITSK
Graph 3.98. Trend of Total ITSK Service Providers

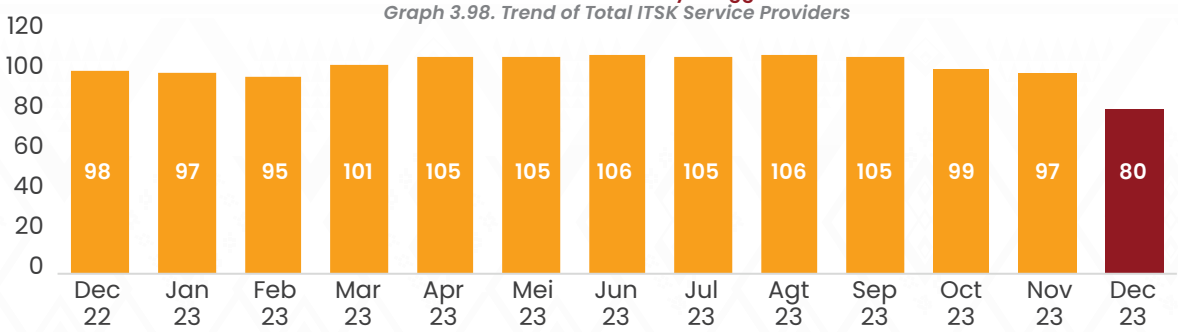

Selain itu, OJK telah menetapkan klaster *Innovative Credit Scoring* (ICS) sebagai obyek yang diatur dan diawasi oleh OJK pada bidang pengawasan IAKD berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan kepada dua *prototype* klaster tersebut. Dalam hal ini, OJK telah menetapkan 11 kriteria yang wajib dipenuhi oleh 15 penyelenggara ICS lainnya (*non-prototype*) sebelum diberikan rekomendasi pendaftaran.

In addition, OJK also designated the Innovative Credit Scoring (ICS) cluster as an object regulated and supervised by OJK in the field of IAKD supervision based on the results of trials for two prototype clusters. In this case, OJK finalised 11 criteria that must be met by 15 other non-prototype ICS service providers before receiving a registration recommendation.

80 Penyelenggara ITSK di OJK dikelompokkan ke dalam 13 Klaster berdasarkan bisnis:
80 ITSK organizers at OJK are grouped into 13 clusters based on business:

Gambar 1. Klaster Regulatory Sandbox OJK
Figure 1. OJK Regulatory Sandbox Clusters

Sehingga per Desember 2023, penyelenggara ITSK yang masih berada dalam *Regulatory Sandbox* OJK sejumlah 80 penyelenggara yang diklasifikasikan ke dalam 13 klaster.

As of December 2023, a total of 80 ISTK service providers remained in the OJK regulatory sandbox classified into 13 clusters.

2. Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik tercatat dalam tren meningkat. Per Desember 2023, jumlah total investor aset kripto adalah 18,51 juta investor atau mengalami peningkatan 260 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.

Grafik 3.99. Jumlah Akumulasi Pelanggan Terdaftar Aset Kripto
Graph 3.99. Cumulative Total of Crypto Asset Investors

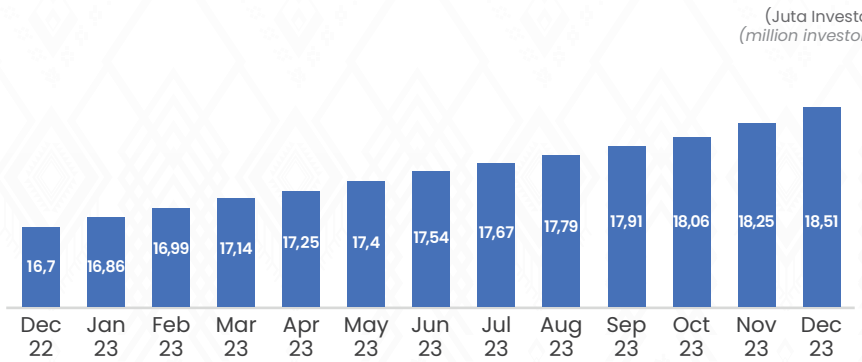

Indonesia menempati urutan ke-7 dalam Global *Crypto Adoption Index*, dimana India, Nigeria, dan Vietnam menempati urutan satu sampai tiga.

Sedangkan nilai transaksi aset kripto sepanjang Desember 2023 tercatat sebesar Rp27,25 triliun atau meningkat 179,77% *yoy*. Nilai transaksi aset kripto terus menunjukkan tren peningkatan yang persisten setelah cenderung mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Secara akumulasi, total nilai transaksi aset kripto sepanjang 2023 senilai Rp149,24 triliun.

2. *Digital Financial Assets including Crypto Assets*

The number of investors and transactions associated with crypto assets domestically is tracking upward trend. As of December 2023, the number of investors in crypto assets increased by 260 thousands on the previous month to reach 18.51 million.

Grafik 3.100. Nilai Transaksi Aset Kripto
Graph 3.100. Value of crypto asset transactions

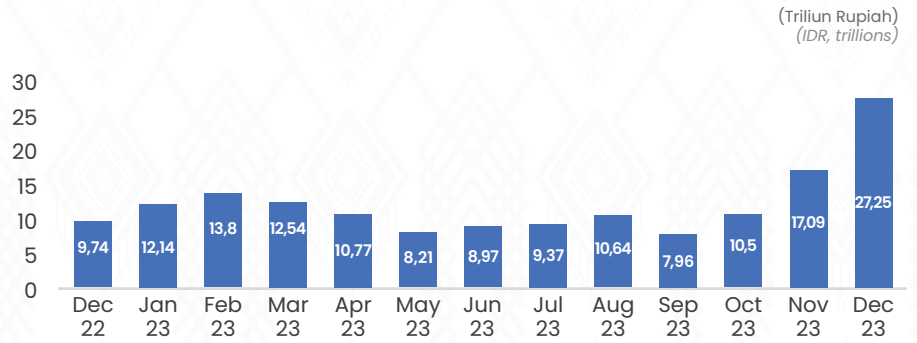

Indonesia placed seventh on the Global Crypto Adoption Index, with India, Nigeria and Vietnam occupying the top three spots.

Meanwhile, the value of crypto asset transactions in December 2023 stood at IDR27.25 trillion, up 179.77% yoy. The value of crypto asset transactions has tracked a persistent upward trend after experiencing a decline since the Covid-19 pandemic. Cumulatively, total crypto asset transaction value in 2023 reached IDR149.24 trillion.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

IV

Fokus Pelaksanaan Tugas OJK 2023

Focus of OJK Task Implementation in 2023

Dalam menjaga Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan wujud dukungan terhadap implementasi UU PPSK, OJK menerbitkan 30 POJK dan 25 SEOJK, peluncuran *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian 2023-2027 serta Peta Jalan Pengawasan PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) 2023-2027.

Sejalan dengan amanat UU PPSK, OJK melakukan penguatan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi, penguatan pengawasan dengan prinsip prudensial, keterbukaan dan *market conduct*, yang diimbangi dengan penguatan literasi, edukasi dan pelindungan konsumen. OJK juga menerapkan penegakan hukum dan percepatan penyelesaian kasus seputar SJK serta melakukan pencegahan terjadinya praktik investasi ilegal melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI). Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan infrastruktur perizinan terintegrasi, sehingga mampu mendukung pengawasan SJK yang efektif.

To maintain the stability of the Financial Services Sector (SJK) amid global economic uncertainties and support the implementation of the PPSK Law, OJK issued 30 POJK and 25 SEOJK, launched the 2023-2027 Roadmap for the Development and Strengthening of Islamic Banking in Indonesia (RP3SI), the 2023-2027 Indonesian Capital Market Roadmap, the 2023-2028 Roadmap for the Development and Strengthening of Peer-to-Peer Lending Services, the 2023-2027 Roadmap for the Development and Strengthening of the Insurance Industry, and the 2023-2027 Supervision, Education, and Consumer Protection Roadmap.

In line with the PPSK Law mandate, OJK enhanced integrated and conglomerate supervision, strengthened prudential, transparency, and market conduct supervision, and reinforced literacy, education, and consumer protection. OJK also enforced the law and expedited the resolution of cases related to the SJK, while preventing illegal investment practices through the Task Force for the Eradication of Illegal Financial Activities (PASTI). To improve service quality for stakeholders, OJK continued to refine the mechanism and infrastructure for integrated licensing, thereby supporting effective SJK supervision.

IV.1 Kebijakan Strategis
Strategic Policies

IV.1.1. Pengawasan Terintegrasi
Integrated Supervision

Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memperkuat peran OJK melalui mandat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi dalam rangka menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (5) UU PPSK diatur bahwa Ketua Dewan Komisioner mengoordinasikan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan.

The implementation of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) strengthens the role of OJK through the mandate to carry out integrated regulation and supervision to ensure financial system stability, as mandated by Law Number 21 of 2011. Furthermore, Article 10, paragraph (5) of the PPSK Law stipulates that the Chairman of the Board of Commissioners coordinates integrated supervision in the financial sector.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi tersebut, efektif sejak 1 November 2023 OJK membentuk Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi (DPZT) yang melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan terintegrasi, *cross-cutting issues/ regulatory arbitrage* terkait pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, isu perizinan secara terintegrasi *(online single submission)*, serta menangani aplikasi dan otomasi perizinan.

To support the implementation of integrated supervision, effective from November 1, 2023, OJK established the Department of Coordination for Integrated Supervision and Licensing (DPZT). This department coordinates the implementation of integrated supervision, addresses cross-cutting issues/regulatory arbitrage related to integrated supervision in the financial services sector, handles integrated licensing issues (online single submission), and manages licensing applications and automation.

Dalam rangka memperkuat pengawasan terintegrasi, pada akhir 2023 telah disusun kajian untuk mendukung dasar hukum pelaksanaan Rapat Pengawasan Terintegrasi (RPT), yaitu forum koordinasi, pembahasan dan pengambilan keputusan terkait isu maupun kebijakan pengawasan terintegrasi.

To strengthen integrated supervision, a study was prepared at the end of 2023 to support the legal basis for the implementation of the Integrated Supervision Meeting (RPT), as a forum for coordinating, discussing, and making decisions on issues and policies related to integrated supervision.

RPT diperlukan untuk mendukung penguatan koordinasi pengawasan dan pengaturan terintegrasi sehingga dapat mempercepat penyelesaian permasalahan *cross cutting issues* dan meminimalisasi *regulatory arbitrage* antar sektor, serta menganalisis dampak sistemik terhadap Konglomerasi Keuangan. RPT akan dilaksanakan dalam bentuk *two-tier level*, yaitu RPT Level Prinsipal dan RPT Level Deputi.

RPT is necessary to support the strengthening of integrated supervision and regulation coordination, thereby accelerating the resolution of cross-cutting issues and minimizing regulatory arbitrage between sectors, as well as analyzing the systemic impact on Financial Conglomerates. RPT will be implemented in a two-tier level, namely the Principal Level RPT and the Deputy Level RPT.

IV.1.2. Perizinan Terintegrasi
Integrated Licensing

Penyederhanaan Proses Perizinan Terintegrasi

Dalam rangka mempercepat layanan perizinan di OJK, telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis perizinan (simplifikasi *business process)* yang didukung dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi perizinan terintegrasi melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Aplikasi SPRINT yang dapat diakses pada alamat *sprint.ojk.go.id*, telah dikembangkan sejak 2015 sebagai aplikasi perizinan elektronik satu pintu di OJK *(single window licensing)* yang berfungsi untuk memproses perizinan dan registrasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik perseorangan maupun badan usaha

Simplification of Integrated Licensing Process

To accelerate licensing services at OJK, the business processes for licensing have been simplified (business process simplification) with the support of integrated information systems and licensing technology through the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT). The SPRINT application, accessible at sprint.ojk.go.id, has been developed since 2015 as a single window electronic licensing application at OJK, functioning to process licensing and registration for Financial Services Business Actors (PUJK), both individuals and business entities, electronically. The licensing process through the SPRINT application covers

secara elektronik. Proses perizinan melalui aplikasi SPRINT dilakukan terhadap perizinan solo dan interkoneksi pada ketiga sektor. Penggunaan aplikasi SPRINT telah diatur dalam POJK Nomor 26/POJK.01/2019 Tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan.

solo and interconnected licensing across the three sectors. The use of the SPRINT application is regulated under POJK Number 26/POJK.01/2019 on Electronic Licensing in the Financial Services Sector.

Realisasi penyederhanaan proses perizinan yang dilakukan melalui aplikasi SPRINT, antara lain perizinan interkoneksi *bancassurance* yang melibatkan sektor Perbankan dan IKNB, sehingga waktu penyelesaian perizinan menjadi lebih cepat, dari semula membutuhkan waktu 101 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Perizinan AP/KAP (melibatkan sektor pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) dari semula 110 hari menjadi 20 hari. Di samping itu, penyederhanaan proses perizinan juga telah dilakukan pada perizinan Reksa Dana kerja sama dengan Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang semula 101 hari menjadi 19 hari kerja.

The realization of licensing process simplification through the SPRINT application includes interconnected bancassurance licensing involving the Banking and IKNB sectors, reducing the processing time from 101 working days to 14 working days. Licensing for AP/KAP (involving the Banking, Capital Market, and IKNB supervisory sectors) was reduced from 110 days to 20 days. Additionally, the simplification of the licensing process has been carried out for mutual funds in collaboration with banks as Mutual Fund Selling Agents (APERD), reducing the process from 101 days to 19 working days.

Saat ini aplikasi SPRINT telah dilengkapi dengan fitur penyampaian dokumen secara daring, *tracking* perizinan secara *real-time*, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen serta monitor pekerjaan secara daring.

The SPRINT application now includes features for online document submission, real-time licensing tracking, validation of Registration Certificates (STTD)/Decision Letters (SK) for financial service providers, internal task distribution within OJK for license issuance, automatic document classification, document completeness verification/requests, and online work monitoring.

Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi

Sejak dikembangkan pada 2015, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring dengan bertambahnya jenis layanan perizinan yang disediakan SPRINT, dengan total yang telah dikembangkan sejumlah 466 sub modul.

Development of Integrated Licensing System

Since its development in 2015, the number of licenses processed by SPRINT has increased along with the addition of licensing services provided by SPRINT, with a total of 466 sub-modules developed.

Dalam mengembangkan SPRINT, OJK menjalin kerja sama dengan BSSN yang diwujudkan melalui implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau *Digital Signature* pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Implementasi *Digital Signature* memungkinkan proses perizinan menjadi lebih cepat, karena surat Keputusan dapat di-*generate* secara otomatis melalui SPRINT dan langsung disampaikan ke pimpinan melalui sistem tanpa membutuhkan naskah dinas di luar sistem. Selanjutnya, Pimpinan satuan kerja dapat langsung melakukan *approval* menggunakan TTE dan Surat Keputusan akan disampaikan ke Pemohon melalui SPRINT.

In developing SPRINT, OJK collaborates with BSSN through the implementation of Electronic Signatures (TTE) or Digital Signatures for licensing Investment Manager Representatives (WMI), Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD), Marketing Broker-Dealer Representatives (WPPE-P), and Limited Marketing Broker-Dealer Representatives (WPPE-PT). Digital Signature implementation allows for faster licensing processes, as Decision Letters can be automatically generated through SPRINT and directly delivered to the leadership through the system without requiring external documents. Subsequently, the head of the work unit can approve using TTE, and the Decision Letter will be sent to the applicant through SPRINT.

Dalam rangka pederhanaan proses bisnis perizinan SJK secara elektronik melalui SPRINT, saat ini telah dikembangkan modul *General* untuk memudahkan proses pengembangan jenis perizinan baru di SPRINT, menggunakan *form* terstandarisasi yang tersedia pada modul. Modul *General* juga dapat mengakomodir level pemroses perizinan secara fungsional untuk menjawab kebutuhan pasca reorganisasi struktural di satuan kerja, serta ditunjang dengan *fitur Instant Approval* untuk perizinan yang bersifat *administrative*, sehingga mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kualitas layanan pemrosesan perizinan kepada *stakeholder*.

In order to simplify the electronic licensing process for financial service institutions through SPRINT, a General module has been developed to facilitate the development of new licensing types in SPRINT, using standardized forms available in the module. The General module can also accommodate the functional processing level of licensing to meet the needs post-structural reorganization in work units, supported by the Instant Approval feature for administrative licenses, thereby speeding up the licensing process and improving the quality of licensing service processing for stakeholders.

Ringkasan Perizinan Terintegrasi

1. *Trend* Perizinan Melalui SPRINT

Summary of Integrated Licensing

1. Trend of Licensing Through SPRINT

Tabel 4.1. Perkembangan Perizinan SPRINT
Table 4.1. Development of SPRINT Licensing

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah izin yang masuk dan diproses SPRINT	26.764	37.672	47.420	67.297	73.344	81.067	*Number of licenses submitted and processed by SPRINT*
Jumlah sub izin perizinan pada SPRINT	175	175	257	398	404	466	*Number of sub-licenses in SPRINT*

Grafik 4.1. Perkembangan Perizinan SPRINT
Graph 4.1. Development of SPRINT Licensing

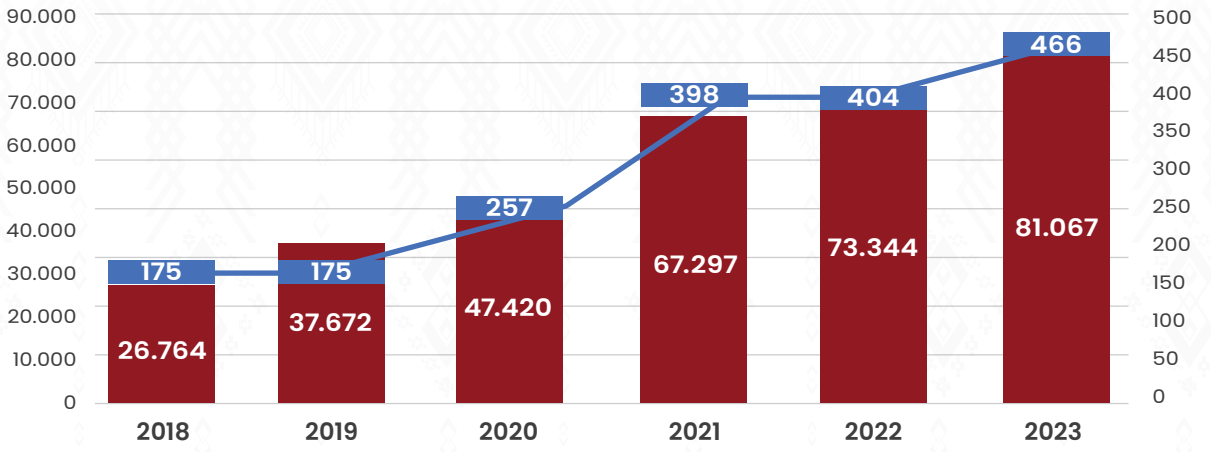

Jumlah izin yang masuk dan diproses SPRINT
Number of Licenses Submitted and Processed by SPRINT

Jumlah sub izin perizinan pada SPRINT
Number of Sub-Licenses in SPRINT

Jumlah Izin Lembaga & Perorangan
Number of Institution & Individual Licenses
70.049

Jumlah Izin Produk
Number of Product Licenses
11.018

Jumlah Izin Penawaran Umum
Number of General Offering Licenses
1.207

Tabel 4.2. Perizinan Lembaga dan Perseorangan
Table 4.2. Institution and Individual Licences

Jumlah Izin Lembaga & Perseorangan *Number of Institution & Individual Licenses*	
Perbankan | *Banking*	153
APERD | *APERD*	124
Asuransi | *Insurance*	157
Manajer Investasi | *Investment Manager*	115
Kantor Akuntan Publik | *Public Accounting Firm*	483
Konsultan Hukum | *Legal Consultant*	618
Notaris | *Notary*	462
Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Bureau*	12
Penasehat Investasi | *Investment Advisor*	42
Penjamin Emisi Efek | *Underwriter*	99
Wali Amanat | *Trustee*	14

Jumlah Izin Lembaga & Perseorangan *Number of Institution & Individual Licenses*	
Perusahaan Pemeringkat Efek | *Credit Rating Agency*	6
PPE EBUS | *PPE EBUS*	131
Bank Kustodian | *Custodian Bank*	31
WAPERD | *WAPERD*	23862
WPPE | *WPPE*	14762
WPEE | *WPPEE*	1892
WMI | *WMI*	4929
Akuntan Publik | *Public Accountant*	2839
Ahli Syariah Pasar Modal | *Sharia Capital Market Expert*	142
Penilai | *Appraiser*	422
WPPE-P | *WPPE-P*	17290
WPPE-PT | *WPPE-PT*	257

Tabel 4.3. Perizinan izin Produk/Aktifitas
Table 4.3. Product/Activity Licensing

Jumlah Izin Produk/Aktivitas | *Number of Product/Activity Licenses*	
Pemeriksaan Reksadana | *Mutual Fund Marketing*	1900
Reksadana | *Mutual Funds*	5870
Bancassurance | *Bancassurance*	2787
ETF | *ETFs*	84
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas | *Equity Securities Investments*	62
Investasi pada Efek Bersifat Utang | *Debt Securities Investments*	232
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi *Real Estate* | *Collective Investment Contracts Real Estate Investment Fund*	23
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | *Collective Investment Contracts Asset-Backed Securities*	25
Dana Investasi Multi Asset | *Multi-Asset Investment Funds*	4
Dana Investasi Infrastruktur | *Infrastructure Investment Funds*	15
Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | *Asset-Backed Securities in the Form of Participation Letters*	16
IPO, Obligasi, Sukuk | *Number of E-Registration Licenses IPO, Bonds, Sukuk*	1207

Pengembangan SIPUTRI (Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi)

SIPUTRI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan data profil dan riwayat Pelaku di LJK dari seluruh bidang pengawasan OJK sehingga diperoleh *Single Source of Truth* yang dapat mempermudah proses perizinan dan pengawasan, antara lain perizinan Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK), serta Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. SIPUTRI juga memungkinkan pembaruan dan permintaan informasi secara elektronik antar lintas bidang pengawasan.

Sepanjang 2023 telah dilakukan berbagai pengembangan, di antaranya evaluasi dan peningkatan kualitas data per-sumber aplikasi; evaluasi dan penyempurnaan fitur; tindak lanjut atas rekomendasi audit internal; sosialisasi menu administrator satuan kerja kepada satuan kerja pengguna; *hands on* pengkinian data *track record* dan upaya melengkapi *beneficial owner* dalam memenuhi target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2024 dan penyesuaian kolom NIK dan NPWP berupa 16 digit angka. Per Desember 2023, peningkatan jumlah permintaan akses SIPUTRI mencapai 1.554 dibandingkan tahun 2022 atau naik 46,9% *yoy*. Jumlah informasi yang terdapat pada SIPUTRI adalah sebesar 1.108.149 dengan catatan pencarian informasi sebanyak 76.534.

Development of SIPUTRI (Integrated Financial Services Institution Participant Information System)

SIPUTRI is an application that integrates profile data and history of actors in financial service institutions from all OJK supervision fields, providing a Single Source of Truth that can simplify licensing and supervision processes, including Fit and Proper Test (PKK) licensing, and Re-evaluation of Key Parties (PKPU) for management in financial service institutions. SIPUTRI also enables electronic updates and information requests across different supervision fields.

Throughout 2023, various developments were undertaken, including data quality evaluation per application source; evaluation and improvement of support features; follow-up on internal audit recommendations; socialization of work unit administrator menus to user work units; hands-on data update and efforts to complete beneficial owner information to meet the 2024 National Strategic Targets for Corruption Prevention and adjust NIK and NPWP columns to 16 digits. As of December 2023, the increase in SIPUTRI access requests reached 1,554 compared to 2022, an increase of 46.9% yoy. SIPUTRI contains 1,108,149 pieces of information with 76,534 search queries.

IV.1.3. Pengelolaan Data dan Pelaporan Terintegrasi
Integrated Reporting and Data Management

IV.1.3.1. Pengelolaan Data
Data Management

1. ***Big Data Analytics***

   OJK melakukan Pengembangan *Big Data Analytics* (BDA) untuk membantu pengelolaan data dan analisis data dalam jumlah besar guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan *pre-emptive*. Pengembangan BDA dilakukan dengan menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pada 2023, OJK telah mengembangkan aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* (BI) Olahan *Big Data* Tahun 2023-2024 Tahap I.

1. ***Big Data Analytics***

   OJK developed big data analytics (BDA) to assist big data management and analysis towards more effective and pre-emptive of decision-making. BDA development was achieved using data from the Financial Information Services System (SLIK). In 2023, OJK developed Phase I of the Dashboard and Business Intelligence (BI) applications for big data analytics 2023-2024.

2. *Enterprise Data Warehouse (EDW) SJK Terintegrasi*

Enterprise Data Warehouse (EDW) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SJKT) merupakan teknologi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam model data yang seragam. Saat ini, OJK telah mengembangkan EDW SJKT yang berfungsi sebagai sarana pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk menghasilkan data berkualitas dan data berbasis *metadata driven*. Pengembangan EDW SJK Terintegrasi Tahun 2023, sebagai berikut:

a. Modul Bank Umum -Antasena dan APOLO.
b. Modul *Artificial Intelligence Based Control for Incompliance and Irregularities* (AICII) BPR Syariah.
c. Modul Pasar Modal Tahap II.
d. Modul IKNB Tahap I.
e. Modul *Dashboard* Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

3. Portal Data dan Metadata *SJK Terintegrasi*

Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (Portal Data) merupakan *platform* berbasis *website* yang digunakan sebagai sarana bersama (lintas sektor) dalam melakukan pengelolaan diseminasi atas data dan metadata SJK secara terintegrasi. Portal data SJK memiliki fitur maupun tampilan yang interaktif serta dapat dikustomisasi sesuai keinginan pengguna saat melakukan akses terhadap data dan metadata OJK. Pengembangan Portal Data telah dilakukan sejak 2021 dan pada 2023 difokuskan pada pengembangan Portal Data Tahap II Data Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Emiten/Perusahaan Publik.

2. *Integrated Financial Services Sector Enterprise Data Warehouse (EDW)*

The Integrated Financial Services Sector (IFFS) Enterprise Data Warehouse (EDW) is technology that integrates data from various sources into a uniform data model. OJK has developed its IFFS EDW to function as a means of integrating data from various sources to generate quality and metadata-driven data. IFFS EDW development in 2023 included the following:

a. Commercial Bank – Antasena and APOLO Module
b. Artificial Intelligence Based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) at Islamic Rural Banks Module
c. Phase II Capital Market Module
d. Phase I NBFI Module
e. Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) Dashboard Module

3. *Integrated Financial Services Sector Data and Metadata Portal*

The Integrated Financial Services Sector Data and Metadata Portal (Data Portal) is a web-based platform used as a cross-sectoral means to manage the dissemination of integrated financial services sector data and metadata. The Financial Services Sector Data Portal is equipped with interactive features and displays that are fully customisable according to the user's specific needs when accessing OJK data and metadata. Development of the Data Portal has remained ongoing since 2021 and focused in 2023 on Phase 2 development of the Data Portal for Insurance Data, Pension Funds, Finance Companies and Public Companies/Issuers.

IV.1.3.2. Pelaporan Terintegrasi
Integrated Reporting

Aplikasi pelaporan data terintegrasi OJK yang digunakan oleh seluruh Sektor Jasa Keuangan, terdiri dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO), dengan rincian sebagai berikut:

The OJK Integrated Data Reporting Application used by all financial services sectors consists of the Financial Information Services System (SLIK) and OJK Online Reporting Application (APOLO) as follows:

1. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK yang dikelola oleh OJK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi debitur antar pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian fasilitas penyediaan dana. Pada akhir 2023, terdapat sebanyak 2.064 Pelapor SLIK, dengan rincian perkembangan jumlah pelapor SLIK periode 2021 – 2023, sebagai berikut:

1. *Financial Information Services System (SLIK)*

Managed by OJK, SLIK functions as a means to exchange debtor information between reporting entities, thus supporting broader access to funding facilities. At the end of 2023, the SLIK system accommodated 2,064 reporting entities recapitulated from 2021-2023 as follows:

Tabel 4.4. Perkembangan Jumlah Pelapor SLIK Periode 2021-2023
Table 4.4. Development in the Number of SLIK Reporters for the Period 2021-2023

Jenis Pelapor	Des-21 *Dec-21*	Des-22 *Dec-22*	Des-23 *Dec-23*	*Reporting Entities*
Bank Umum Konvensional	95	93	92	*Conventional Commercial Banks*
Bank Umum Syariah	12	13	13	*Islamic Commercial Banks*
Unit Usaha Syariah	21	20	20	*Islamic Business Units*
BPR Konvensional	1.481	1.439	1.408	*Conventional Rural Banks*
BPR Syariah	163	169	173	*Islamic Rural Banks*

Jenis Pelapor	Des-21 *Dec-21*	Des-22 *Dec-22*	Des-23 *Dec-23*	*Reporting Entities*
Perusahaan Pembiayaan	155	148	144	*Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura	16	49	49	*Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	2	2	*Infrastructure Finance Companies*
Perusahaan Pembiayaan Syariah	33	33	31	*Islamic Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2	6	6	*Islamic Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	0	1	1	*Islamic Infrastructure Finance Companies*
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3	3	3	*Other Financial Services Institutions*
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	1	2	2	*Islamic Other Financial Services Institutions*
Perusahaan Efek (PE)	119	117	115	*Securities Companies*
Lembaga Pendanaan Efek	1	1	1	*Securities Funding Institutions*
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	4	4	4	*Non-Financial Services Institutions*
Jumlah	**2.106**	**2.100**	**2.064**	***Total***

Selama 2023, tercatat sebanyak 225.079.591 jumlah permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor SLIK, dengan rincian periode 2021 – 2023, sebagai berikut:

In 2023, OJK received 225,079,591 requests for Debtor Information (IDeb) from SLIK reporting entities as follows:

Tabel 4.5. Jumlah Permintaan Informasi Debitur (IDeb) oleh Pelapor SLIK
Table 4.5. Number of debtor information requests (IDeb) by SLIK reporters

Jenis Pelapor	2021	2022	2023	*Reporting Entities*
Bank Umum Konvensional	106.967.215	115.338.963	146.891.819	*Conventional Commercial Banks*
Bank Umum Syariah / UUS	6.805.310	7.173.279	11.244.136	*Islamic Commercial Banks/Islamic Business Units*
BPR Konvensional	3.303.067	3.992.600	4.513.759	*Conventional Rural Banks*
BPR Syariah	341.915	478.625	511.038	*Islamic Rural Banks*
Perusahaan Pembiayaan	46.606.845	49.444.336	57.281.803	*Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura	415.277	914.065	1.836.602	*Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	2.573	*Infrastructure Finance Companies*
Perusahaan Pembiayaan Syariah	827.022	930.776	1.377.718	*Islamic Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	37.355	239.373	705.567	*Islamic Venture Capital Firms*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	-	157	*Islamic Infrastructure Finance Companies*
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	695.322	448.411	567.057	*Other Financial Services Institutions*
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	129.081	40.223	26.587	*Islamic Other Financial Services Institutions*
Perusahaan Efek	178	340	1.135	*Securities Companies*
Lembaga Pendaan Efek	-	-	-	*Securities Funding Institutions*
Pergadaian	-	-	-	*Pawnbrokers*
Pergadaian Syariah	-	-	-	*Islamic Pawnbrokers*
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	131.752	108.504	119.640	*Non-Financial Services Institutions*
Jumlah	**166.260.339**	**179.109.495**	**225.079.591**	***Total***

2. Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO)

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka *regulatory reporting*. Terdapat 109 modul pelaporan di APOLO untuk seluruh sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB dengan rincian LJK pelapor, sebagai berikut:

2. *OJK Online Reporting Application (APOLO)*

The OJK Online Reporting Application (APOLO) is an information system used by financial services institutions as a means of submitting online reports to OJK in accordance with regulatory reporting requirements. The APOLO system consists of 109 reporting modules for all reporting entities in the banking, capital market and NBFI sectors as follows:

Tabel 4.6. Jumlah Modul Pelaporan SJK Tahun 2023
Table 4.6. Number of SJK Reporting Modules in 2023

Sektor Pihak Pelapor | *Sector Reporting Entities*	Jumlah Pihak Pelapor | *Total Reporting Entities*
Perbankan | *Banking*	1,679
IKNB | *NBFI*	838
Pasar Modal | *Capital Market*	1,653
Total	**4,170**

*data per Desember 2023, Pelapor mencakup LJK dan Profesi.
**Data as of December 2023, reporting entities include financial services institutions and professionals.*

Jenis Pihak Pelapor | *Reporting Entities*	Jumlah Pihak *Total*
Bank Umum Konvensional | *Conventional Commercial Banks*	92
Bank Umum Syariah | *Islamic Commercial Banks*	13
BPR Syariah | *Islamic Rural Banks*	172
BPR Konvensional | *Conventional Rural Banks*	1,402
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional *Conventional Financial Institution Pension Funds (FIPF)*	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah *Islamic Financial Institution Pension Funds (FIPF)*	1
Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional *Conventional Employer Pension Funds*	170
Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah *Islamic Employer Pension Funds*	4
Pialang Asuransi | *Insurance Brokers*	52
Asuransi Jiwa | *Life Insurance*	52
Asuransi Umum Syariah | *Islamic General Insurance*	6
Pialang Reasuransi | *Reinsurance Brokers*	10
Asuransi Jiwa Syariah | *Islamic Life Insurance*	9
Penilai Kerugian Asuransi | *Loss Assessors*	12
Reasuransi Syariah | *Islamic Reinsurance*	1
Reasuransi Konvensional | *Conventional Reinsurance*	7
Asuransi Umum | *General Insurance*	71
Perusahaan Penjaminan Konvensional *Conventional Guarantee Companies*	4
Perusahaan Pergadaian Syariah | *Islamic Pawnbrokers*	3
Perusahaan Pergadaian Konvensional | *Conventional Pawnbrokers*	118
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Syariah | *Islamic IT-based Lending Services*	6
Perusahaan Penjaminan Syariah | *Islamic Guarantee Companies*	1
Lembaga Keuangan Khusus | *Special Financial Institutions*	2

Jenis Pihak Pelapor | *Reporting Entities*	Jumlah Pihak *Total*
Lembaga Keuangan Mikro Konvensional *Conventional Microfinance Institutions*	3
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi | *IT-based Lending Services*	80
Modal Ventura Konvensional | *Conventional Venture Capital Firms*	49
Perusahaan Pembiayaan Konvensional | *Conventional Finance Companies*	143
Perusahaan Pembiayaan Syariah | *Islamic Finance Companies*	3
Modal Ventura Syariah | *Islamic Venture Capital Firms*	5
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur *Infrastructure Finance Companies*	2
Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Agencies (SAA)*	10
Bank Kustodian | *Custodian banks*	25
Wali Amanat | *Trust Agents*	12
Perusahaan Pemeringkat Efek | *Broker-Dealers*	4
Kantor Akuntan Publik | *Public Accountant Firms*	249
Manajer Investasi | *Investment Managers*	56
Perantara Pedagang Efek yang Tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah | *Broker-Dealers Not Administering Customer Securities Accounts*	9
Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah *Broker-Dealers Administering Customer Securities Accounts*	78
Penjamin Emisi Efek | *Underwriters*	10
Konsultan Hukum | *Legal Consultants*	457
Ahli Syariah Pasar Modal | *Islamic Capital Market Experts*	87
Notaris | *Notaries*	308
Penilai | *Appraisers*	339
Lembaga Kliring dan Penjaminan | *Clearing Houses*	1
Total	**4,170**

IV.1.4. Keuangan Berkelanjutan
Sustainable Finance

Dalam rangka mendorong penguatan keuangan berkelanjutan, beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan OJK, antara lain:

1. Implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) dikembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing IJK dalam menghadapai tuntutan kebutuhan mengenai bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. *Roadmap* tahap I berfokus pada peningkatan penetapan dasar kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi IJK, serta peningkatan kerja sama kelembagaan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan dan menjawab beberapa tantangan yang timbul, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dengan mengembangkan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari tujuh komponen, meliputi:

a. Kebijakan;
b. Produk;
c. Infrastruktur Pasar;
d. Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait;
e. Dukungan Non-pemerintah;
f. Sumber Daya Manusia; dan
g. *Awarenes.*

2. Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Urgensi penanganan perubahan iklim, transisi menuju *Net Zero Emission* (NZE), peningkatan kesejahteraan, dan penyelarasan aspek-aspek berkelanjutan pada dasarnya telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H, Pasal 33 Ayat 3, dan Pasal 33 Ayat 4. Lebih lanjut didukung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memuat satu bab khusus mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, memperluas definisinya dengan mencakup juga pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengatur adanya taksonomi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah, OJK berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melakukan penyempurnaan terhadap Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dengan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. TKBI telah diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang dihadiri pula oleh Presiden Republik Indonesia.

To promote the strengthening of sustainable finance, several policies and programs have been implemented by OJK, including:

1. Implementation of the Sustainable Finance Roadmap

The Phase I Sustainable Finance Roadmap (2015 – 2019) was developed to enhance the resilience and competitiveness of FSI in meeting the demand for sustainability-based business practices. The first phase focused on establishing a policy foundation for sustainable finance, increasing awareness and capacity building for FSI, and enhancing institutional cooperation in sustainable finance development.

To expedite the transition of the financial sector towards sustainability and address emerging challenges, OJK issued the Phase II Sustainable Finance Roadmap (2021-2025), developing a sustainable finance ecosystem comprising seven components:

a. Policy;
b. Products;
c. Market Infrastructure;
d. Coordination with Relevant Ministries/Agencies;
e. Non-Government Support;
f. Human Resources; and
g. Awareness.

2. Taxonomy for Sustainable Finance Indonesia (TKBI)

The urgency of addressing climate change, transitioning to Net Zero Emissions (NZE), enhancing welfare, and aligning sustainable aspects are fundamentally enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through Articles 28H, 33 Paragraph 3, and 33 Paragraph 4. This is further supported by Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, which includes a chapter on sustainable finance, expanding its definition to include financing for the transition to sustainable economic growth, and regulating a sustainable taxonomy.

To support the Government's commitment, OJK collaborated with various stakeholders to refine the Indonesian Green Taxonomy Edition 1.0 by developing the Taxonomy for Sustainable Finance Indonesia (TKBI). TKBI is a classification of economic activities that support Indonesia's Sustainable Development Goals, covering economic, environmental, and social aspects. The taxonomy guides the allocation of sustainable capital and financing to achieve Indonesia's NZE target by 2060 or earlier. TKBI was issued on February 20, 2024, during the Annual Financial Services Industry Meeting (PTIJK), attended by the President of the Republic of Indonesia.

TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip *scientific* dan *credible, interoperable* dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance* dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan *(Environmental Objective)*, yaitu EO1-*Climate Change Mitigation,* EO2-*Climate Change Adaptation,* EO3-*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity* dan EO4-*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy;* dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-Do No *Significant Harm*, EC2-*Remedial Measure to Transition,* dan EC3-*Social Aspect*. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas, yaitu *Technical Screening Criteria* (TSC) untuk segmen korporasi/non-UMKM dan *Sector Agnostic Decision Tree* (SDT) untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI, yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi "Hijau" atau "Transisi". Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

TKBI is designed with principles of scientific and credible, interoperable and supportive of national interests, and inclusive. The TKBI framework, elements, and criteria refer to the ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance and national policies as primary references, adopting four environmental objectives (EO1-Climate Change Mitigation, EO2-Climate Change Adaptation, EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity, and EO4-Resource Resilience and Transition to a Circular Economy) and three essential criteria (EC1-Do No Significant Harm, EC2-Remedial Measure to Transition, and EC3-Social Aspect). TKBI uses two assessment approaches: Technical Screening Criteria (TSC) for corporate/non-SME segments and Sector Agnostic Decision Tree (SDT) for SME segments. The final classification of activities is either "Green" or "Transition," and activities not meeting these classifications are labeled "Not Classified."

Ruang lingkup TKBI mencakup NDC *related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor, yaitu *Energy, Waste, Industry Processes and Product Use* (IPPU), *Agriculture dan Forestry and Other Land Use* (FOLU). Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai 2024 dengan fokus sektor pertama, yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan NDC *related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas pada sektor energi dalam TKBI terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan aktivitas Pertambangan dan Penggalian yang memuat mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE. Di samping itu terdapat pula *enabling activities* seperti *Carbon Capture and Storage* (CCS); penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi.

TKBI covers NDC-related sectors (and their changes). Based on Indonesia's Enhanced NDC 2022, the focus sectors are Energy, Waste, Industry Processes and Product Use (IPPU), Agriculture, and Forestry and Other Land Use (FOLU). To align with national and regional policy developments, TKBI implementation starts in 2024 with the energy sector, followed by other NDC-related sectors in subsequent years. The energy sector activities in TKBI are divided into two major groups: Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air Supply, including the acceleration of coal-fired power plant operational termination; and Mining and Quarrying activities containing critical minerals supporting clean energy technology and transition to NZE. Additionally, enabling activities like Carbon Capture and Storage (CCS); research, development, and innovation for CCS technology; and energy conservation/efficiency services are included.

Ke depan, sejalan dengan sifat *living document*, TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

TKBI, as a living document, will be periodically reviewed to ensure it remains current with scientific, technological, and sustainable finance policy developments at national and global levels.

3. *Pilot Project* Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI)

Dalam rangka implementasi THI Edisi 1.0 dan membangun *database* hijau sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (UU PPSK), OJK telah menyelenggarakan *pilot project* secara bertahap kepada perbankan untuk laporan penyaluran kredit/pembiayaan bank sejak Juli 2022, dengan melibatkan 105 bank KBMI 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah debitur yang dilaporkan secara beragam (KBMI 1 dan 2 melaporkan top 250 debitur sementara KBMI 3 dan 4 melaporkan top 450 debitur). Di samping itu, dilakukan pula *Workshop Pilot Project* Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 pada Pelaporan Bank melalui Aplikasi APOLO serta *coaching clinic* dalam rangka pendampingan pelaporan THI.

3. *Pilot Project* Implementation of Indonesian Green Taxonomy (THI)

To implement THI Edition 1.0 and build a green database as mandated by Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK Law), OJK conducted a phased pilot project for banks to report credit/financing distribution since July 2022. The project involved 105 banks across KBMI 1, 2, 3, and 4, reporting various debtor numbers (KBMI 1 and 2 report the top 250 debtors, while KBMI 3 and 4 report the top 450 debtors). Additionally, a Workshop on Pilot Project Implementation of THI Edition 1.0 in Bank Reporting through the APOLO Application and coaching clinics for THI reporting assistance were conducted.

Ke depan, sejalan dengan terbitnya TKBI sebagai pengkinian THI, akan dilakukan penyesuaian *piloting* pelaporan secara bertahap. Untuk debitur sektor energi (masuk dalam cakupan TKBI) akan dinilai menggunakan TKBI, sementara untuk sektor lainnya masih menggunakan THI. Hal tersebut juga berlaku pada sektor *Nationally Determined Contribution* lainnya saat TKBI versi selanjutnya telah terbit dan efektif.

Going forward, TKBI issuance as an update to THI will adjust pilot reporting gradually. Energy sector debtors (covered by TKBI) will be assessed using TKBI, while other sectors will still use THI. This approach will also apply to other NDC sectors as subsequent TKBI versions are issued and effective.

4. Pemantauan Perkembangan *Sustainability Disclosure Standard*

IFRS - International Sustainability Standard Board (ISSB) telah menerbitkan IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures* pada Juni 2023. IFRS S1 mengatur standar umum pengungkapan keuangan berkelanjutan dan IFRS S2 *climate-related disclosure* terdiri dari empat pilar: *Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Target*.

Dalam rangka mempersiapkan adopsi dan implementasi standar internasional terkait *climate-related disclosures* tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membentuk Struktur Tata Kelola Standar Keberlanjutan IAI, terdiri dari Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI (DP-SK IAI) dan Dewan Standar Keberlanjutan IAI (DSK IAI). OJK menjadi anggota *ex-officio* baik di DP-SK IAI dan DSK IAI. Pada 28 November 2023 telah dilakukan *kick off meeting* DSK IAI a.l membahas Struktur Tata Kelola Standar Keberlanjutan dan arahan DP-SK IAI terkait penyusunan rencana strategis.

4. Monitoring the Development of Sustainability Disclosure Standards

The International Sustainability Standards Board (ISSB) issued IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and IFRS S2 Climate-related Disclosures in June 2023. IFRS S1 sets general standards for sustainability-related financial disclosure, and IFRS S2 climate-related disclosures comprise four pillars: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics & Targets.

To prepare for the adoption and implementation of international standards related to climate-related disclosures, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) established the IAI Sustainability Standards Governance Structure, consisting of the IAI Sustainability Standards Oversight Board (DP-SK IAI) and the IAI Sustainability Standards Board (DSK IAI). OJK holds an ex-officio membership in both DP-SK IAI and DSK IAI. On November 28, 2023, a kick-off meeting was held by DSK IAI to discuss the Sustainability Standards Governance Structure and DP-SK IAI's strategic plan directions.

5. *Enhancement Minisite Sustainable Finance Information Hub (SFIH)*

Pada 2023, telah dilakukan *enhancement minisite* SFIH sebagai media diseminasi terintegrasi terkait keuangan berkelanjutan. Saat ini, *minisite* SFIH telah dapat diakses melalui alamat *ojk.go.id/keuangan berkelanjutan*. Lingkup *enhancement* meliputi penambahan fitur kolaborasi dengan *stakeholder*, agenda kegiatan, *business matching,* dan berbagai fitur lainnya untuk mempermudah penggunaan *minisite.* Dengan demikian, publik dapat mengetahui berbagai perkembangan kebijakan dan inisiatif keuangan berkelanjutan OJK melalui *minisite* tersebut.

5. Enhancement of the Sustainable Finance Information Hub (SFIH) Minisite

In 2023, the SFIH minisite was enhanced as an integrated dissemination medium for sustainable finance. It is accessible at ojk.go.id/keuanganberkelanjutan. The enhancement includes collaboration features with stakeholders, activity agendas, business matching, and various features to facilitate minisite use. This allows the public to access updates on OJK's sustainable finance policies and initiatives.

6. Keikutsertaan OJK dalam Fora Internasional berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka menjaga interoperabilitas kebijakan OJK dengan inisiatif global, OJK terlibat dalam berbagai forum internasional baik di level kawasan maupun global, antara lain:

***a. Sustainable Banking and Finance Network* (SBFN)**

SBFN merupakan komunitas yang bersifat *voluntary* yang terdiri dari regulator sektor keuangan dan asosiasi perbankan di negara berkembang (*emerging market*) yang berkomitmen untuk memajukan keuangan berkelanjutan sejalan dengan international *best practices*. Keanggotaan SBFN saat ini terdiri atas 89 institusi dari 68 negara dan berdasarkan struktur organisasinya, kelembagaan SBFN terdiri dari tiga *Working Group* (WG), yakni *WG Measurement*, WG *Sustainable Finance Instruments*, WG *Data & Disclosure Working Group,* serta *Task Force* yang bernama *Task Force for Low-Income Countries*. Saat ini, OJK terlibat dalam WG *Sustainable Finance Instrument.*

6. OJK Participation in International Fora on Sustainable Finance

To maintain interoperability with global initiatives, OJK participates in various international forums at regional and global levels, including:

a. Sustainable Banking and Finance Network (SBFN)

SBFN is a voluntary community of financial sector regulators and banking associations in emerging markets committed to advancing sustainable finance in line with international best practices. SBFN comprises 89 institutions from 68 countries and has three working groups: Measurement, Sustainable Finance Instruments, and Data & Disclosure Working Group, along with a Task Force for Low-Income Countries. OJK is involved in the Sustainable Finance Instrument Working Group.

Pada 2 November 2021, SBFN telah meluncurkan *Global Progress Report* 2021. Laporan tersebut diikuti dengan *updating Country Progress Report* Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 8 Maret 2022 yang masih menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai negara di *maturing stage* bersama dengan China dan Kolombia sebagaimana gambar di bawah. Di level tersebut, Indonesia berada di tahap *consolidating* yang secara umum berarti memiliki kerangka keuangan berkelanjutan nasional yang komprehensif yang telah mencakup seluruh SJK (perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank).

OJK telah menyampaikan tanggapan survei kepada SBFN sebagai bahan penyusunan The SBFN *Global and Country Progress Report,* yang laporan menggambarkan upaya perkembangan inisiatif keuangan berkelanjutan negara-negara anggota SBFN termasuk di antaranya adalah Indonesia.

b. ASEAN *Taxonomy Board* (ATB)

ASEAN *Taxonomy Board* (ATB) dibentuk pada Maret 2021 di bawah naungan ASEAN *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) dan didukung oleh ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF); ASEAN *Insurance Regulators Meeting* (AIRM); ASEAN *Senior Level Committee on Financial Integration* (SLC); dan ASEAN *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD), bertujuan untuk mendorong kegiatan dan investasi berkelanjutan di kawasan termasuk salah satunya menyusun taksonomi di level kawasan. OJK turut berperan sebagai *principle representative* Indonesia di ATB.

ATB memiliki tiga *working group*, yang terdiri dari WG 1 - *Conceptual Framework and Principles* (CFP), WG 2 – *Plus Standards and Transition Standards* dan WG 3 - *Market Facing and Resourcing* (MFR). Dalam menjalankan fungsinya, ATB secara rutin menyerahkan laporan kepada AFMGM, serta memfasilitasi kegiatan konsultasi untuk para anggotanya. Saat ini, Indonesia menjadi *Vice Chair* WG 1. Sebagai langkah lanjutan dari version 1, pada 27 Maret 2023 ATB telah menerbitkan ASEAN *Taxonomy for Sustainable Finance version* 2 (ATSF v2), dengan *highlight*:

1) Penyelesaian *Foundation Framework*, memuat metodologi terperinci terdiri dari *decision trees* dan *guiding questions* untuk seluruh tujuan lingkungan (*environmental objectives*/EO) dan kriteria esensial (*essential criteria*/EC) untuk menilai suatu aktivitas ekonomi, serta dilengkapi *use cases*; dan
2) *Plus Standard* dengan pengembangan TSC untuk *focus sector* pertama, yaitu sektor energi. *Plus Standard* mengklasifikasikan suatu aktivitas menjadi *Green, Amber Tier* 2 dan *Amber Tier* 3. *Green tier* diselaraskan dengan taksonomi internasional lainnya dan mengacu pada target Perjanjian Paris 1,5oC. Sementara *Amber Tier* 2 dan *Amber Tier* 3 bertujuan untuk mendorong transisi aktivitas ekonomi.

ATSF v2 juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam Taksonomi, dengan menggabungkannya sebagai EC ketiga di samping *"Do No Significant Harm"* (DNSH) dan *"Remedial Measures to Transition"* (RMT).

On November 2, 2021, the SBFN launched the Global Progress Report 2021. This report was followed by the updated Indonesia Country Progress Report published on March 8, 2022, which still indicates that Indonesia has maintained its position as a country in the maturing stage alongside China and Colombia, as shown in the image below. At this level, Indonesia is in the consolidating stage, which generally means having a comprehensive national sustainable finance framework covering all financial services sectors (banking, capital markets, non-bank financial industries).

The OJK has submitted survey responses to the SBFN as input for the preparation of The SBFN Global and Country Progress Report, which depicts the progress of sustainable finance initiatives among SBFN member countries, including Indonesia.

b. ASEAN Taxonomy Board (ATB)

Established in March 2021 under the ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) and supported by ASEAN Capital Markets Forum (ACMF); ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM); ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC); and ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD). ATB aims to promote sustainable activities and investments, including developing regional taxonomy. OJK serves as Indonesia's principal representative in ATB.

ATB has three working groups: WG 1 - Conceptual Framework and Principles (CFP), WG 2 – Plus Standards and Transition Standards, and WG 3 - Market Facing and Resourcing (MFR). ATB regularly reports to AFMGM and facilitates consultation activities for its members. Indonesia is currently the Vice Chair of WG 1. On March 27, 2023, ATB issued ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version 2 (ATSF v2), featuring:

1) Completion of the Foundation Framework with detailed methodologies, decision trees, guiding questions for all environmental objectives (EOs), and essential criteria (ECs) for assessing economic activities, along with use cases;

2) Plus Standard development for the energy sector, classifying activities into Green, Amber Tier 2, and Amber Tier 3. The Green tier aligns with other international taxonomies and adheres to the Paris Agreement's 1.5°C target. Amber Tier 2 and 3 aim to promote economic transition activities.

ATSF v2 also emphasizes social aspects by incorporating them as the third EC alongside "Do No Significant Harm" (DNSH) and "Remedial Measures to Transition" (RMT).

c. ***The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System* (NGFS)**
Dibentuk tahun 2017, NGFS merupakan grup *voluntary-based* yang terdiri dari bank sentral dan otoritas pengawas di berbagai negara untuk saling bertukar pengalaman, *best practices* dan perkembangan manajemen risiko iklim di sektor keuangan. Adapun *output* yang dihasilkan oleh NGFS adalah berupa *Annual Report, Progress Report,* dan Dokumen Teknis.

Keterlibatan OJK dalam kegiatan NGFS sepanjang 2023, antara lain dalam penyusunan *"Report on micro-prudential supervision of climate-related litigation risks",* penyusunan laporan *"Ensuring Credibility of Transition Plans and Planning"* dan penyusunan laporan *"Scaling Up Blended Finance for Climate Mitigation and Adaptation in Emerging Market and Developing Economies".*

c. ***Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)***
Formed in 2017, NGFS is a voluntary group of central banks and supervisors sharing experiences, best practices, and developments in climate risk management in the financial sector. NGFS produces Annual Reports, Progress Reports, and Technical Documents.

OJK's involvement in NGFS activities in 2023 includes contributing to the "Report on micro-prudential supervision of climate-related litigation risks," "Ensuring Credibility of Transition Plans and Planning" report, and "Scaling Up Blended Finance for Climate Mitigation and Adaptation in Emerging Market and Developing Economies" report.

7. Pelaksanaan *Capacity Building*

a. OJK bekerja sama dengan *United States Agency for International Development* (USAID) *Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience* (SINAR) menyelenggarakan beberaoa pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkenalkan karakteristik bisnis pembangkit listrik energi terbarukan dan kebijakan pemerintah kepada analis kredit, meningkatkan kemampuan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam mengelola risiko yang terkait dengan isu lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), dan sebagai forum diskusi terkait pembiayaan energi bersih antar pemodal.

b. OJK bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) – *CEFIM Programme, dan Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GiZ) menyelenggarakan *Workshop Clean Energy Finance and Investment* yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan mengisi kesenjangan pengetahuan serta pemahaman dari tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pengembang proyek, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berperan penting dalam mencapai transisi energi bersih Indonesia.

7. *Capacity Building Implementation*

a. *OJK, in collaboration with the United States Agency for International Development (USAID) Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR), conducted sustainable finance training to introduce renewable energy business characteristics and government policies to credit analysts, enhance FSI's capacity to manage environmental, social, and governance (ESG) risks, and serve as a discussion forum for clean energy financing among investors.*

b. *OJK partnered with the Human Resource Development Agency for Energy and Mineral Resources - Center for Human Resource Development for Electricity, New Renewable Energy, and Energy Conservation in the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – CEFIM Programme, and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ) to conduct a Workshop on Clean Energy Finance and Investment. This aimed to build capacity and fill knowledge gaps among three key stakeholders: the government, project developers, and Financial Services Business Actors (PUJK), essential for achieving Indonesia's clean energy transition.*

IV.1.5. Kebijakan Konglomerasi Keuangan
Financial Conglomerate Policy

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi, dibutuhkan penyusunan kerangka hukum yang lebih kuat untuk pengawasan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) oleh OJK. Berkaitan dengan hal tersebut, telah disusun kajian terkait PIKK sebagai salah satu dukungan dalam penerbitan Peraturan OJK PIKK, antara lain *benchmarking* ketentuan dari beberapa institusi dan otoritas negara lain, pemetaan Konglomerasi Keuangan (KK) di Indonesia, kriteria jenis KK yang wajib membentuk PIKK, serta mekanisme pengawasan KK yang wajib PIKK, serta mekanisme pengawasan untuk KK yang tidak wajib PIKK.

To support integrated supervision, a stronger legal framework is needed for supervising Financial Conglomerate Holding Companies (PIKK) by OJK. A study on PIKK was prepared to support the issuance of OJK Regulation on PIKK, including benchmarking regulations from other institutions and authorities, mapping Financial Conglomerates (KK) in Indonesia, criteria for KK types that must form PIKK, and the supervision mechanism for PIKK-required and non-PIKK-required KKs.

Dalam rangka mendukung pembahasan terkait kebijakan pengaturan PIKK, telah dibentuk *Task Force* Kebijakan Perusahaan PIKK yang beranggotakan perwakilan seluruh Satuan Kerja Pengawasan dan Pengaturan di OJK dengan tugas pemberian informasi dan/atau data terkini terkait pemetaan KK, serta berperan aktif dalam pembahasan kebijakan pengaturan PIKK, melalui pemberian tambahan informasi dan/atau usulan yang relevan.

A Task Force on PIKK Policy, comprising representatives from all OJK supervisory and regulatory work units, was formed to support discussions on PIKK regulation. The Task Force provides up-to-date information and data on KK mapping and actively participates in policy discussions on PIKK regulation.

IV.1.6. APU PPT

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF)

Sebagai bentuk peran OJK dalam menciptakan sektor keuangan yang berintegritas, OJK senantiasa berkomitmen untuk memperkuat rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di SJK dalam rangka memitigasi digunakannya penyedia jasa keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) oleh para pelaku kejahatan.

As part of its role in creating an integrity-based financial sector, OJK is committed to strengthening the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing (AML/CFT and CPPFM) regimes in the financial sector to mitigate the use of financial service providers for money laundering (TPPU), terrorism financing (TPPT), and proliferation financing (PPSPM) crimes.

1. **Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

   Pada 14 Juni 2023 OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang mencabut POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.

   POJK Nomor 8 Tahun 2023 telah selaras dengan prinsip internasional antara lain rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

1. ***Strengthening AML/CFT and CPPFM Program Regulation in the Financial Services Sector***

   On June 14, 2023, OJK issued POJK Number 8 of 2023 on the Implementation of AML/CFT and CPPFM Programs in the Financial Services Sector, repealing POJK Number 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Number 23/POJK.01/2019.

   POJK Number 8 of 2023 aligns with international principles, including FATF recommendations, Indonesian regulations, and developments in innovation and technology while maintaining security and confidentiality.

2. **Keanggotaan Indonesia menjadi Anggota FATF**

   Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh *(full member)* FATF sebagaimana ditetapkan dalam FATF *Plenary Meeting* tanggal 25-27 Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara PPATK dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

   Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF ke-40, sehingga Indonesia akan mendapatkan manfaat dan hak sebagai anggota FATF. Kedudukan Indonesia sebagai anggota penuh FATF menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G20 dengan integritas sistem keuangan yang kuat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat internasional terhadap integritas sektor keuangan Indonesia dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian nasional.

2. ***Indonesia's Full Membership in FATF***

   Indonesia has been accepted as a full member of the FATF, as established during the FATF Plenary Meeting on October 25-27, 2023. This achievement is the result of strong collaboration between the PPATK and all relevant Ministries/Agencies, including the OJK, demonstrating that the national financial services sector has comprehensively met international standards in the implementation of AML, CFT, and CPF programs.

   Indonesia was unanimously accepted as the 40th member of the FATF, thus gaining the benefits and rights of FATF membership. Indonesia's position as a full FATF member places the country on par with G20 member states, with a strong financial system integrity. This will enhance public trust, including international trust, in the integrity of Indonesia's financial sector and, in turn, positively impact the national economy.

3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

OJK senantiasa melakukan program pengembangan kapasitas SDM di bidang APU PPT dan PPPSPM secara berkelanjutan kepada: (i) Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT dan PPSPM berbasis risiko, serta (ii) internal OJK (satuan kerja Pengawasan, Perizinan, dan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas proses *market entry* dan pengawasan program APU PPT dan PPSPM berbasis risiko.

OJK melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk *stakeholders* internasional, dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tren dan perkembangan kejahatan yang terjadi, antara lain:

1. Kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menyelenggarakan webinar secara *online* bagi perwakilan seluruh IJK dengan topik *"Role of Financial Service Sector on Countering the Financing of Terrorism"* pada 8 s.d. 9 Mei 2023;
2. Kerja sama dengan Australian Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) dalam menyelenggarakan FGD secara *hybrid* yang bagi pengawas dan IJK dengan topik penguatan penerapan program APU PPT dan PPPSPM pada 11 September 2023; dan
3. Kerja sama dengan US Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (USDOJ OPDAT) dalam menyelenggaran *workshop* pendampingan bagi IJK pada 6 s.d. 8 Juni, 11 s.d. 12 Juli, dan 28 s.d. 30 Agustus 2023.

3. Human Resource Development

OJK continuously implements capacity-building programs in AML/CFT and CPPFM for (i) the Financial Services Industry (FSI) to enhance the effectiveness of risk-based AML/CFT and CPPFM program implementation and (ii) internal OJK (supervision, licensing, and other work units) to improve the effectiveness of market entry and risk-based AML/CFT and CPPFM supervision.

OJK collaborates with various parties, including international stakeholders, in conducting human resource development activities according to current trends and crime developments, such as:

1. *Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to hold an online webinar for all FSI representatives on "The Role of the Financial Service Sector in Countering the Financing of Terrorism" on May 8-9, 2023;*
2. *Collaboration with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) to hold a hybrid FGD on strengthening AML/CFT and CPPFM program implementation on September 11, 2023; and*
3. *Collaboration with the US Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ OPDAT) to conduct a workshop for FSI on June 6-8, July 11-12, and August 28-30, 2023.*

IV.1.7. Kerja Sama Internasional
International Cooperation

1. Kerja Sama Internasional dengan Otoritas Keuangan Asing dan Organisasi Internasional

Pesatnya perkembangan IJK global dan disrupsi teknologi meningkatkan kebutuhan pengawasan, pengembangan dan pengaturan lintas negara antar otoritas keuangan asing dalam menjaga stabilitas keuangan baik di tingkat regional maupun global. Selain itu, peran organisasi internasional diperlukan dalam mendorong pengembangan industri jasa keuangan di Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Sampai saat ini, OJK telah menjalin kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) sebanyak 23 MoU dengan 17 otoritas keuangan asing dan enam lembaga internasional. Pada tahun 2023, OJK memiliki MoU dengan:

a. Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (FSRA-ADGM), terkait pengembangan pengaturan dan pengawasan IJK khususnya terkait perdagangan karbon, *financial technology (FinTech)* dan perizinan serta pengawasan jasa keuangan.

b. Non-Bank Financial Services Authority of Cambodia (Cambodia FSA), terkait pengembangan pengaturan dan pengawasan industri keuangan.

c. Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), terkait pengembangan infrastruktur sektor asuransi melalui kerangka Jaring Pengaman Keuangan.

1. International Cooperation with Foreign Financial Authorities and International Organizations

The rapid development of the global financial services sector and technological disruption have increased the need for cross-country supervision, development, and regulation among foreign financial authorities to maintain financial stability at both regional and global levels. Additionally, the role of international organizations is crucial in promoting the development of the financial services industry in Indonesia to face global challenges. Therefore, in 2023, OJK established international cooperation through Memorandums of Understanding (MoUs) with:

a. The Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (FSRA-ADGM) concerning the development of regulations and supervision of the financial services sector, particularly related to carbon trading, financial technology (FinTech), and licensing as well as financial services supervision.
b. The Non-Bank Financial Services Authority of Cambodia (Cambodia FSA) concerning the development of regulations and supervision of the financial industry.
c. The Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) concerning the development of insurance sector infrastructure through the Financial Safety Net framework.

d. Korea Insurance Development Institute (KIDI), terkait pengembangan *database* penilaian risiko dan penentuan tarif premi asuransi.

e. International Labour Organization (ILO), dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan inklusi keuangan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM).
f. Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (DSIK) dalam rangka penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk mendorong perekonomian daerah.
g. Financial Supervisory Service (FSS) Korea dalam rangka pertukaran pengalaman dan keahlian antar pegawai kedua otoritas.

2. Adopsi dan Implementasi *Financial Sector Reform*

Indonesia secara konsisten mengadopsi dan mengimplementasikan standar internasional di sektor keuangan, atau disebut *Global Financial Sector Reforms* (GFSR). Guna mendukung hal tersebut, OJK berkontribusi aktif melalui keanggotaan pada forum standar keuangan global (*Standard Setting Bodies*/SSB) yang membahas isu keuangan lintas sektor seperti *Financial Stability Board* (FSB), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Financial Action Task Force* (FATF), *International Financial Reporting Standards* (IFRS), *International Committee on Credit Reporting* (ICCR), *Integrated Financial Supervisors Conference* (IFSC), *Network for Greening the Financial System* (NGFS). Dalam sektor perbankan, OJK berpartisipasi dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision* (EMEAP-GHOS). OJK juga turut berpartisipasi dalam sektor edukasi dan pelindungan konsumen melalui OECD *International Network on Financial Education* (OECD-INFE) dan *International Financial Consumer Protection Organisation* (FinConet). Dalam sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, OJK berpartisipasi melalui *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), *OECD International Organisation of Pension Supervisors* (OECD-IOPS), ASEAN *Insurance Regulators' Meeting* (AIRM-ASEAN), dan *Insurance Information & Ratemaking Forum of Asia* (IIRFA). Pada sektor pasar modal, OJK terlibat melalui *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), *International Capital Market Association* (ICMA), OECD *Corporate Governance* (OECD-CG) dan ACMF-ASEAN. Sementara itu, sektor industri keuangan non-bank terdapat keanggotaan OJK di *Global Financial Innovation Network* (GFIN).

Untuk memastikan keselarasan dan optimalisasi GFSR dengan kebutuhan Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK berkoordinasi dengan lembaga multilateral seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB), Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), dan International Finance Cooperation (IFC). Selain itu, dari sisi pengembangan kapasitas internal OJK dan IJK dalam mendukung *financial sector reform*, OJK juga melakukan kerja sama pelaksanaan program *Technical Assistance* (TA) melalui berbagai program *joint study, expert work*, dan *capacity building* dengan lembaga internasional dimaksud.

d. The Korea Insurance Development Institute (KIDI) concerning the development of a risk assessment database and insurance premium rate determination.
e. The International Labour Organization (ILO) to promote national economic growth by enhancing financial inclusion for Small and Medium Enterprises (SMEs).
f. The Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (DSIK) to strengthen People's Economy Banks (BPR) and Microfinance Institutions (LKM) to boost regional economies.

g. The Financial Supervisory Service (FSS) Korea for the exchange of experiences and expertise between the employees of both authorities.

2. Adoption and Implementation of Financial Sector Reform

Indonesia consistently adopts and implements international standards in the financial sector, known as Global Financial Sector Reforms (GFSR). To support this, OJK actively contributes through membership in global financial standard-setting forums (Standard Setting Bodies/SSB) that address cross-sector financial issues such as the Financial Stability Board (FSB), Islamic Financial Services Board (IFSB), Financial Action Task Force (FATF), International Financial Reporting Standards (IFRS), International Committee on Credit Reporting (ICCR), Integrated Financial Supervisors Conference (IFSC), and Network for Greening the Financial System (NGFS). In the banking sector, OJK participates in the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (EMEAP-GHOS). OJK also participates in the education and consumer protection sectors through the OECD International Network on Financial Education (OECD-INFE) and the International Financial Consumer Protection Organisation (FinConet). In the insurance, guarantee, and pension sectors, OJK participates through the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), OECD International Organisation of Pension Supervisors (OECD-IOPS), ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM-ASEAN), and Insurance Information & Ratemaking Forum of Asia (IIRFA). In the capital market sector, OJK is involved with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), International Capital Market Association (ICMA), OECD Corporate Governance (OECD-CG), and ACMF-ASEAN. In the non-bank financial industry sector, OJK holds membership in the Global Financial Innovation Network (GFIN).

To ensure alignment and optimization of GFSR with the needs of the Financial Services Sector (SJK), OJK coordinates with multilateral institutions such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), and Asian Development Bank (ADB), the Indonesia-Australia Partnership Program for the Economy (Prospera), and the International Finance Corporation (IFC). Additionally, for internal capacity development of OJK and SJK in supporting financial sector reform, OJK collaborates in implementing Technical Assistance (TA) programs through joint studies, expert work, and capacity building with these international institutions.

OJK juga mendukung pelaksanaan *financial sector reform* dengan menjadi *implementing agency* pada program *Development Policy Loan*-3 dari World Bank dengan total pinjaman sebesar USD 1 *billion* yang disetujui pada 31 Maret 2023. Terdapat enam area reformasi (yang dituangkan dalam *policy matrix*) yang menjadi tanggung jawab dan telah dilaksanakan OJK, yaitu *increasing access and usage, broadening financial market products, mobilizing long-term savings, protecting consumers and personal data and enhancing transparency, implementing sustainable finance practices*, dan *advancing the effectiveness of financial sector oversight*.

OJK also supports financial sector reform by acting as the implementing agency for the World Bank's Development Policy Loan-3 program, with a total loan amount of USD 1 billion approved on March 31, 2023. OJK is responsible for and has implemented six reform areas (outlined in the policy matrix): increasing access and usage, broadening financial market products, mobilizing long-term savings, protecting consumers and personal data and enhancing transparency, implementing sustainable finance practices, and advancing the effectiveness of financial sector oversight.

3. Kegiatan Internasional dalam Menangani Tantangan Keuangan Global

Perubahan tren dalam lanskap ekonomi dan keuangan memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang juga disertai dengan tantangan dalam memanfaatkan peluang tersebut. Untuk itu, OJK berinisiatif mengadakan kegiatan internasional guna menjawab dan menangani tantangan keuangan global melalui:

a. *The Second Indonesia and Korea Financial Cooperation Forum on Forging the Future of Finance*: *Strengthening Collaboration and Sustainable Finance in Korea and Indonesia* dalam rangka membahas *best practices* serta pertukaran pengetahuan antara regulator dan pelaku usaha jasa keuangan untuk pengembangan keuangan berkelanjutan antara kedua negara.
b. *Focus Group Discussion* (FGD) *on Sustainable Finance and Carbon Market Exchange Mechanism* untuk saling berdiskusi mengenai arah pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan termasuk pengembangan bursa karbon.
c. Seminar bersama Cambodia's Non-Bank Financial Services Authority (Cambodia FSA) tentang Pengembangan Keuangan Berkelanjutan dan Peran OJK serta Cambodia FSA dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

3. International Activities in Addressing Global Financial Challenges

Changes in trends within the economic and financial landscape offer opportunities to enhance global economic growth, accompanied by challenges in capitalizing on these opportunities. To address these challenges, OJK has initiated international activities to tackle global financial challenges through:

a. The Second Indonesia and Korea Financial Cooperation Forum on Forging the Future of Finance: Strengthening Collaboration and Sustainable Finance in Korea and Indonesia to discuss best practices and knowledge exchange between regulators and financial service industry players for sustainable finance development between the two countries.
b. Focus Group Discussion (FGD) on Sustainable Finance and Carbon Market Exchange Mechanism to discuss the direction of sustainable financial instrument development, including the development of carbon markets.
c. Joint seminar with Cambodia's Non-Bank Financial Services Authority (Cambodia FSA) on Sustainable Finance Development and the roles of OJK and Cambodia FSA in maintaining financial system stability.

4. Menjadi Rujukan Bagi Mitra Internasional dalam Pengembangan Industri Jasa Keuangan

Di 2023, berbagai mitra otoritas keuangan asing menjadikan OJK sebagai rujukan dalam pengembangan industri jasa keuangan melalui kunjungan, antara lain:

a. *Benchmarking* Program dari FSS Korea tentang pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.
b. *Benchmarking* Program dari Lao Securities Commission Office (LSCO) dalam rangka mempelajari mekanisme pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal di Indonesia.
c. *Courtesy Visit* dari Bank of Thailand (BoT) dalam rangka mempelajari pengembangan bank digital di Indonesia.
d. *Virtual Workshop* dengan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) tentang pengaturan dan pengawasan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
e. *Secondment* Program dari Securities and Exchange Commission of Cambodia (SEC Cambodia) dalam rangka mempelajari *market surveillance* Pasar Modal Indonesia.

4. Being a Reference for International Partners in Financial Services Industry Development

In 2023, various foreign financial authorities considered OJK a reference in developing the financial services industry through visits, including:

a. Benchmarking Program from FSS Korea on the regulation and supervision of the financial services industry in Indonesia.
b. Benchmarking Program from Lao Securities Commission Office (LSCO) to study the regulatory and supervisory mechanisms of the Capital Market sector in Indonesia.
c. Courtesy Visit from the Bank of Thailand (BoT) to study the development of digital banks in Indonesia.
d. Virtual Workshop with the Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) on the regulation and supervision of Information Technology-Based Joint Funding Services.
e. Secondment Program from the Securities and Exchange Commission of Cambodia (SEC Cambodia) to study market surveillance in Indonesia's Capital Market.

5. Optimalisasi Akses Pasar Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah berupaya untuk menempatkan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok perdagangan utama global dan menjadi tujuan utama aliran investasi asing. OJK sebagai salah satu regulator sektor keuangan turut mengambil peran penting dalam mendukung upaya Pemerintah tersebut. Dukungan nyata OJK tercermin melalui partisipasi aktif pada berbagai perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), dalam rangka menjaga kepentingan sektor jasa keuangan Indonesia dan memperluas akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) Indonesia dalam berekspansi ke negara mitra.

Perundingan PPI membahas draf teks perjanjian dan komitmen akses pasar masing-masing pihak. Setelah perundingan selesai dan ditandatangani, setiap pihak akan meratifikasi perjanjian tersebut melalui peraturan perundang-undangan masing-masing untuk selanjutnya, mulai berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha masing-masing pihak.

Beberapa perundingan PPI yang sedang diikuti OJK baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, antara lain:

a. Bilateral: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA);
b. Regional/Multilateral: ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), dan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Comm) WTO.

6. Menjaga dan Memperkuat Persepsi Positif Investor dan Pemangku Kepentingan Asing

Dalam rangka menjaga dan memperkuat persepsi positif investor asing serta para pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas IJK Indonesia, IRU OJK memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan investor dan *stakeholder* asing dan diseminasi informasi terkait perkembangan terkini SJK dan kebijakan/regulasi OJK. Selama 2023, telah dilaksanakan empat pertemuan dalam rangka asesmen *sovereign credit rating* Indonesia dengan lembaga pemeringkat global (Moody's, S&P, Fitch Rating dan R&I) serta 26 pertemuan dengan investor maupun pemangku kepentingan internasional. Selain itu, IRU OJK juga memfasilitasi pertemuan dengan investor asing, baik untuk *equity* maupun *fixed income* di Singapura, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat untuk memaparkan perkembangan perekonomian dan stabilitas IJK Indonesia serta arah kebijakan OJK ke depan. Sementara itu, *minisite* IRU (*https://ojk.go.id/iru*) yang dikelola IRU OJK sebagai hub informasi bagi pemangku kepentingan internasional, telah diakses oleh lebih dari 17.050 *user* yang berasal dari 112 negara/wilayah asing di 2023. Selain pengelolaan *minisite* IRU, IRU OJK juga secara rutin melakukan diseminasi informasi terkait keadaan terkini SJK maupun kebijakan/regulasi OJK kepada investor dan pemangku kepentingan internasional melalui publikasi dan *mailing list*.

5. Optimization of Market Access for the Financial Services Sector

To accelerate Indonesia's economic growth, the Government aims to position Indonesia as part of the global main trade supply chain and a prime destination for foreign investment flows. As one of the financial sector regulators, OJK plays a vital role in supporting this effort. OJK's tangible support is reflected in its active participation in various International Trade Agreement (PPI) negotiations to protect Indonesia's financial services sector interests and expand market access for Indonesian financial service institutions (LJK) to expand into partner countries.

PPI negotiations discuss the draft agreement text and each party's market access commitments. After the negotiations are completed and signed, each party will ratify the agreement through their respective regulations to come into effect and benefit their business actors.

OJK participates in PPI negotiations both bilaterally, regionally, and multilaterally, including:

a. Bilateral: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) and Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA);
b. Regional/Multilateral: ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), and Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Comm) WTO.

6. Maintaining and Enhancing Positive Perceptions of Investors and Foreign Stakeholders

To maintain and enhance the positive perceptions of foreign investors and international stakeholders regarding the stability of Indonesia's financial services sector, OJK's IRU facilitates meetings with foreign investors and stakeholders and disseminates information on the latest developments in the SJK and OJK policies/regulations. In 2023, OJK conducted four meetings for the sovereign credit rating assessment of Indonesia with global rating agencies (Moody's, S&P, Fitch Rating, and R&I) and 26 meetings with investors and international stakeholders. Additionally, OJK's IRU facilitated meetings with foreign investors in equity and fixed income in Singapore, the UK, Germany, and the USA to present developments in Indonesia's economy and financial services sector stability, as well as future OJK policies. The International Information Hub (IIH) (https://ojk.go.id/iru), managed by OJK's IRU, serves as an information hub for international stakeholders and has been accessed by over 17,050 users from 112 foreign countries/regions in 2023. Besides managing IIH, OJK's IRU regularly disseminates information on the current state of the SJK and OJK policies/regulations to investors and international stakeholders through publications and mailing lists.

IV.2 Pengawasan Perbankan
Supervision of Banking

IV.2.1. Aktivitas Pengaturan Perbankan
Banking Regulation Activities

Sepanjang 2023, OJK telah menerbitkan lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), lima Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), 10 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP), serta beberapa kebijakan lainnya di Bidang Perbankan, antara lain:

Throughout 2023, five POJK, five SEOJK, 10 KEPP letters, and three Head of Department Letters were issued with several policies in the banking sector, including:

Tabel 4.7. Ketentuan/Kebijakan Bidang Perbankan Tahun 2023
Table 4.7. Banking Sector Regulations/Policies for the Year 2023

No.	POJK | *POJK*
1.	POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan *POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant and Auditing Firm Services in Financial Services Activities*
2.	POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum *POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance of Commercial Banks*
3.	POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah *POJK Number 19 of 2023 concerning Human Resources Development of Rural Banks and Sharia Rural Banks*
4.	POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum *POJK Number 19 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks*
5.	POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah *POJK Number 28 of 2023 concerning Determining Supervision Status and Follow-up Actions of Rural Banks and Sharia Rural Banks*
	SEOJK | *SEOJK*
6.	SEOJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah *SEOJK Number 11 of 2023 concerning Maximum Limitations for Lending of Rural Banks and Maximum Limitations of Banks Fund Disbursements*
7.	SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* *SEOJK Number 16/SEOJK.03/2023 concerning Capital Calculation for Bank Exposure to Central Counterparty Institutions*
8.	SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin Untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga *Central Counterparty* *SEOJK Number 17/SEOJK.03/2023 concerning Margin Requirements for Derivative Transactions That Are Not Cleared Through a Central Counterparty Institution*
9.	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan *SEOJK Number 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures of Using the Public Accountant and Auditing Firms in Financial Services Activities*
10.	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum *SEOJK Number 24/SEOJK.03/2023 concerning Digital Maturity Level Assessment*

Surat KEPP | *Letter of Approval*	
11.	Surat KEPP No.3/D.03/2023 perihal Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing *KEPP Letter No.3/D.03/2023 concerning Implementation of Reporting Fulfillment of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
12.	Surat KEPP No.4/D.03/2023 perihal Penyesuaian dan Penegasan SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan *KEPP Letter No.4/D.03/2023 concerning Adjustments and Confirmation of SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 concerning Credit Information Management Institutions*
13.	Surat KEPP No.5/D.03/2023 perihal Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI) *KEPP Letter No.5/D.03/2023 concerning the Placement of Customer's Natural Resources (SDA) Export Proceeds Foreign Exchange Funds in Operational Deposit Terms*
14.	Surat KEPP No.8/D.03/2023 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Bank Melalui APOLO Terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 *KEPP Letter No.8/D.03/2023 concerning Adjustment of the Time Limit of Submitting Bank Reports via APOLO Regarding National Holidays and Mass Leave*
15.	Surat KEPP No. S-16/D.03/2023 Perihal Kebijakan Relaksasi Pengaturan SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan *KEPP Letter No. S-16/D.03/2023 concerning Relaxation Policy of SEOJK Regulations No.27/SEOJK.03/2022 concerning Credit Information Management Institutions*
16.	Surat KEPP Nomor S-17/D.03/2023 perihal Insentif bagi Bank Umum mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA) *KEPP Letter Number S-17/D.03/2023 concerning Incentives for Commercial Banks regarding Foreign Exchange Proceeds of Exports from Business Activities, Management and/or Processing of Natural Resources (DHE SDA)*
17.	Surat KEPP Nomor S-29/D.03/2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi *KEPP Letter Number S-29/D.03/2023 concerning Banking Support for Credit Growth to MSMEs and Consumption*
18.	Surat KEPP Nomor S-32/D.03/2023 perihal Penyampaian Laporan Informasi Nasabah Asing (Laporan AEOI) Melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) *KEPP Letter Number S-32/D.03/2023 concerning Submission of Foreign Customer Information Reports (AEOI Reports) Through the Submission System*
19.	Surat KEPP Nomor S-33/D.03/2023 perihal Penegasan atas Penerapan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan *KEPP Letter Number S-33/D.03/2023 concerning Confirmation of the Implementation of SEOJK Number 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures of Using the Public Accountant and Auditing Firms in Financial Services Activities*
20.	Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-1E/PB.01/2023 perihal Perubahan Sementara Alamat Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi *Letter of Head Department of Banking Regulation and Development Number S-1E/PB.01/2023 concerning Temporary Changes of the Integrated Reporting Portal Website Address*
21.	Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-121/PB.01/2023 perihal Penggunaan Kembali Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi untuk Penyampaian LBUT – ANTASENA *Letter of Head Department of Banking Regulation and Development Number S-121/PB.01/2023 concerning the Reuse of the Integrated Reporting Portal Website for Submission of LBUT – ANTASENA*
22.	Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-171/PB.01/2023 perihal Penerusan Informasi terkait Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye *Letter of Head Department of Banking Regulation and Development Number S-171/PB.01/2023 concerning the Forwarding Information regarding the Policy of Opening and Closing Campaign Fund Special Accounts*

IV.2.2.Aktivitas Pengawasan Perbankan

Banking Supervision Activities

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank baik Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), OJK menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*). *Risk Based Supervision* merupakan pengawasan menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

In carrying out the supervision function over banks, including Commercial Banks, Islamic Commercial Banks (BUS), Rural Banks (BPR), and Islamic Rural Banks (BPRS), OJK employs a risk-based supervision approach (Risk Based Supervision). This approach uses strategies and methodologies based on risk, enabling supervisors to detect significant risks early and take appropriate and timely supervisory actions.

Pengawasan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengawasan tidak langsung termasuk penilaian tingkat kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala pada setiap semester untuk posisi Juni dan Desember. Selain itu, OJK dapat melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lainnya.

Supervision of banks is conducted through both on-site supervision and off-site supervision. On-site supervision is carried out through periodic examinations or as needed. Off-site supervision includes the regular assessment of the Bank's soundness, conducted semi-annually for the positions in June and December. Additionally, OJK may update the Bank's soundness assessment at any time if necessary, based on examination results, periodic reports submitted by the Bank, and/or other information.

Dalam melakukan pengawasan, OJK juga melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan baik melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, OJK mengambil tindakan pengawasan yang sesuai, antara lain mengenakan sanksi administratif kepada Bank dan/atau pihak terkait yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK, penetapan status pengawasan, dan tindakan lainnya.

In conducting supervision, OJK also oversees the Bank's compliance with OJK regulations and relevant laws through both on-site supervision and off-site supervision. Based on the results of the supervision, OJK takes appropriate supervisory actions, including imposing administrative sanctions on the Bank and/or related parties that do not comply with OJK regulations, determining supervisory status, and taking other actions.

IV.2.3.Aktivitas Pengawasan Konglomerasi Keuangan

Supervision Activities for Financial Conglomerates

Pengawasan OJK terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) merupakan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Kriteria grup/kelompok keuangan yang ditetapkan sebagai KK sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (POJK KK) adalah memiliki total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); dan kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Grup/kelompok keuangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat ditetapkan OJK sebagai KK dengan dasar pertimbangan tertentu.

OJK's supervision of Financial Conglomerates (KK) involves monitoring financial service institutions within a single group or cluster due to ownership and/or control connections. The criteria for a financial group/cluster to be designated as a KK, according to POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomerates (POJK KK), are: having total group or cluster assets greater than or equal to IDR100 trillion and engaging in business activities in more than one type of financial service institution (LJK). Financial groups/clusters that do not meet these criteria may be designated by OJK as a KK based on certain considerations.

Struktur KK berdasarkan POJK KK terdiri dari Entitas Utama dan: a) perusahaan anak; dan/atau b) perusahaan terelasi beserta perusahaan anak dengan keanggotaan meliputi jenis LJK: a. bank; b. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; c. perusahaan pembiayaan; dan/atau d. perusahaan efek bank. Entitas Utama merupakan LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. Secara umum, LJK yang ditunjuk sebagai entitas utama memiliki aset terbesar dan/atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

The structure of KK under POJK KK consists of a Main Entity and: a) subsidiary companies; and/or b) affiliated companies along with their subsidiaries, encompassing types of LJLs such as: a. banks; b. insurance and reinsurance companies; c. financing companies; and/or d. securities companies. The Main Entity is the parent financial service institution of the Financial Conglomerate or a financial service institution appointed by the controlling shareholder of the Financial Conglomerate. Generally, the financial service institution appointed as the main entity has the largest assets and/or demonstrates good risk management practices.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap KK. Hal ini dtujukan untuk memitigasi potensi beberapa risiko dari kegiatan usaha KK, antara lain sebagai berikut:

Based on the Indonesian Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, the Financial Services Authority (OJK) is mandated to supervise KKs. This is aimed at mitigating potential risks from KK business activities, including:

1. **Risiko Sistemik/Konsentrasi (*Systemic/Concentration Risk*)**
   Kontribusi total aset 15 KK yang saat ini diawasi OJK terhadap total aset sektor jasa keuangan (SJK) posisi 31 Desember 2023 mencapai 59,11%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan keuangan di KK akan berdampak secara sistemik kepada seluruh sektor jasa keuangan sehingga berimplikasi kepada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

1. ***Systemic/Concentration***
   Risk The total assets of the 15 KKs currently supervised by OJK contributed 59.11% to the total assets of the financial services sector (SJK) as of December 31, 2023. This indicates that financial problems within a KK can have a systemic impact on the entire financial services sector, affecting financial system stability and the Indonesian economy.

2. **Risiko Rambatan (*Contagion risk*)**
   Anggota KK terdiri dari seluruh jenis SJK dengan tingkat transaksi intragrup yang cukup tinggi sehingga permasalahan di salah satu LJK anggota KK dapat berimplikasi kepada seluruh sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap aktivitas bisnis dari transaksi intragrup antar anggota konglomerasi keuangan agar dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini sebagai dasar dilakukannya tindakan pengawasan yang bersifat *pre-emptive* secara lebih cepat dan tepat.

2. ***Contagion Risk***
   Members consist of all types of financial service institutions with significant intra-group transactions. Problems in one member financial service institution can affect the entire financial services sector. Therefore, effective and comprehensive supervision of intra-group business transactions among KK members is necessary to identify issues early and take pre-emptive supervisory actions promptly.

Dalam rangka menjalankan mandat dimaksud, maka OJK telah membentuk Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan (DPKG) yang bertugas melakukan pengawasan berdasarkan risiko terhadap KK dalam rangka mewujudkan KK yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi positif terhadap Stabilitas Sistem Keuangan dan perekonomian Indonesia.

To carry out this mandate, OJK has established the Department of Financial Conglomerate Supervision (DPKG) tasked with conducting risk-based supervision of KKs to create healthy, efficient, integrated, competitive, and sustainable KKs that positively contribute to financial system stability and the Indonesian economy.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan siklus pengawasan sebagaimana pengawasan secara individual LJK, namun dengan mengedepankan aspek koordinasi dengan pengawas individual LJK anggota KK baik melalui pertemuan-pertemuan maupun diskusi-diskusi dengan menggunakan berbagai sarana yang disiapkan oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu strategis setiap individual anggota KK yang dapat berdampak terhadap Kinerja KK secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan pengawasan yang tepat dan terukur.

Supervision is conducted based on a supervision cycle similar to individual financial service institutions, emphasizing coordination with individual financial service institution supervisors within KK through meetings and discussions using various tools provided by OJK. This aims to identify issues or strategic concerns of individual KK members that may impact the overall performance of the KK, forming the basis for appropriate and measured supervisory actions.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan siklus pengawasan secara lebih optimal, saat ini OJK menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang menjadi *backbone* utama dalam menyediakan data KK. Sistem tersebut dan *tools* pengawasan lainnya terus dikembangkan dan disempurnakan untuk menghasilkan data keuangan/rasio-rasio keuangan yang lebih akurat dan indikator-indikator pengawasan lainnya, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan KK. Pengembangan tersebut juga memperhatikan kebutuhan Pengawas dalam melakukan pengolahan *big data* melalui *data analytics, artificial intelligence, machine learning*, dan lain-lain. Melalui pengembangan sistem tersebut diharapkan akan mempercepat dan meningkatkan kualitas Pengawas dalam memahami permasalahan dan menganalisis kondisi keuangan/ non keuangan KK sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat.

To support the optimal implementation of the supervision cycle, OJK currently uses the Integrated Supervision Information System (SIPT) as the main backbone for providing KK data. This system and other supervisory tools are continuously developed and improved to produce more accurate financial data/ratios and other supervisory indicators, enhancing the quality of KK supervision. The development also considers the need for supervisors to process big data through data analytics, artificial intelligence, machine learning, etc. This development is expected to speed up and improve the quality of supervisors in understanding issues and analyzing the financial/ non-financial condition of KKs as a basis for rapid, precise, and accurate supervisory actions.

Selain itu, dalam rangka memastikan kualitas analisis dan pemahaman pengawas terhadap permasalahan KK serta ketepatan tindakan pengawasan yang dilakukan, maka diperlukan suatu pengendalian kualitas (*quality assurance*) yang dijalankan secara berkala (semesteran) dalam bentuk Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap seluruh KK, dengan anggota Panelis yang berasal dari Pejabat level tertentu pada seluruh sektor pengawasan LJK di OJK.

Additionally, to ensure the quality of analysis and understanding of supervisors regarding KK issues and the appropriateness of supervisory actions taken, a quality control (quality assurance) is needed, conducted regularly (semi-annually) in the form of the Integrated Supervision Panel Forum (FPPT) for all KKs, with panel members from certain level officials in all financial service institution supervision sectors within OJK.

Forum panel ini bertujuan untuk memperoleh reviu/masukan atas *input*, proses, dan *output* pelaksanaan pengawasan KK agar memenuhi standar kualitas pengawasan yang ditetapkan, antara lain mencakup penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

This forum aims to obtain reviews/inputs on the input, process, and output of KK supervision implementation to meet established supervision quality standards, including comprehensive use of information, sharpness and depth of analysis, quality of conclusions on the condition of Financial Conglomerates, and supervisory actions taken.

Berdasarkan kriteria KK sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020, OJK melakukan pengawasan terhadap 15 konglomerasi keuangan yang terdiri dari 107 LJK dengan total aset mencapai Rp9.018 triliun dan menguasai 59,11% aset sektor jasa keuangan (posisi Desember 2023) dan seluruhnya berada di atas *threshold* aset sebesar Rp100 T. Sebanyak empat KK memiliki aset di atas Rp1.000 T, dengan total aset sebesar Rp6.663 T atau 73,89% dari total aset KK.

Based on KK criteria in POJK No. 45/POJK.03/2020, OJK supervises 15 financial conglomerates comprising 107 financial service institutions with total assets of IDR 9,018 trillion, accounting for 59.11% of the financial services sector's assets (as of December 2023). All are above the IDR 100 trillion asset threshold. Four KKs have assets exceeding IDR 1,000 trillion, with total assets of IDR 6,663 trillion, or 73.89% of the total KK assets.

Grafik 4.2. Perkembangan Total Aset KK dan SJK
Graph 4.2. Development of KK and SJK Assets Table

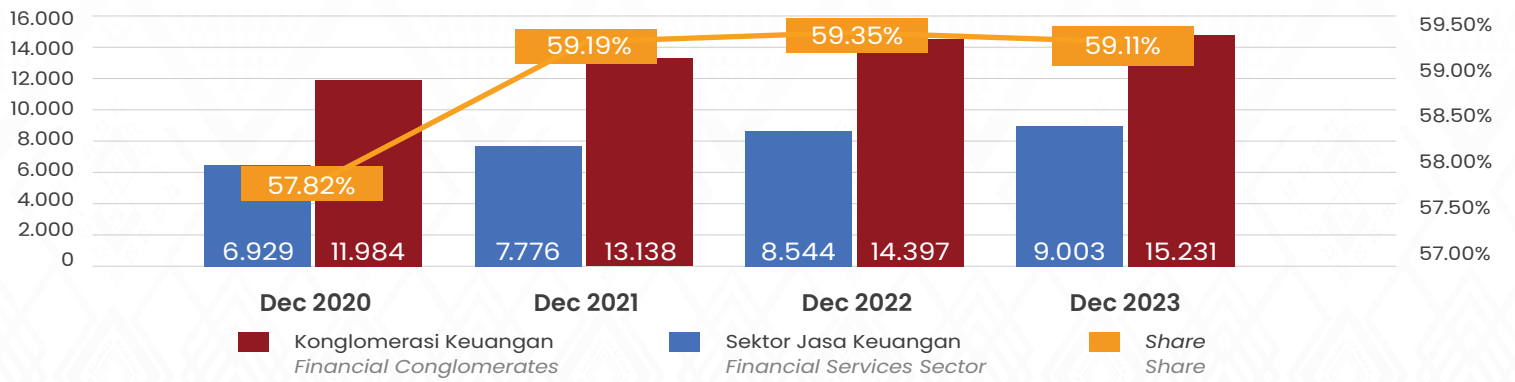

Tabel 4.8. Perkembangan Aset KK dan SJK
Table 4.8. Table of Development of KK and SJK Assets

Aset (Rp Triliun) | *Asset (IDR Trillion)*	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023
Konglomerasi Keuangan | *Financial Conglomerates*	6.929	7.776	8.544	9.003
Sektor Jasa Keuangan | *Financial Services Sector*	11.984	13.138	14.397	15.231
Share | *Share*	57,82%	59,19%	59,35%	59,11%

Sumber : *OJK* | *Source: OJK.*
*SJK: Perbankan dan IKNB | *SJK: Banking and Non-Banking Financial Industry*

Perkembangan aset KK tersebut secara umum relatif stabil terhadap SJK, yaitu berada pada kisaran 59%, yang menunjukkan bahwa KK yang bertumbuh sehat mempengaruhi pertumbuhan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan juga potensi dampak sistemik KK kepada seluruh sektor jasa keuangan.

The asset development of KKs has remained relatively stable compared to SJK, around 59%, indicating that healthy-growing KKs influence the growth of the financial services sector. On the other hand, it also shows the potential systemic impact of KKs on the entire financial services sector.

IV.2.4.Aktivitas Perizinan Perbankan
Banking Licensing Activities

Hingga akhir 2023, OJK menyelesaikan permohonan perizinan terkait sektor perbankan, yaitu 72 perizinan bank umum konvensional, 17 perizinan bank umum syariah dan unit usaha syariah, 17 perizinan BPR dan enam perizinan BPRS dengan detail sebagaimana berikut:

By the end of 2023, OJK completed various licensing applications related to the banking sector, including 72 licenses for conventional commercial banks, 17 licenses for Islamic commercial banks and Islamic business units, 17 licenses for BPR, and six licenses for BPRS, detailed as follows:

1. Perizinan Bank Umum Konvensional
1. Licensing for Conventional Commercial Banks

Tabel 4.9. Perizinan BUK Tahun 2023
Table 4.9. Licensing of Conventional Commercial Banks in 2023

No.	Jenis Kegiatan	2023	*Activity Type*
1.	**Pembukaan Bank Umum**		***Bank Opening***
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	7	*Regional Office (Kanwil)*
	b. Kantor Cabang (KC)	18	*Branch Office (KC)*
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-	*Sub-Branch Office (KCP)*
	d. Kantor Fungsional (KF)	-	*Functional Office (KF)*
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	1	*Representative Office of Commercial Bank Abroad*

No.	Jenis Kegiatan	2023	*Activity Type*
2.	**Penutupan Bank Umum**		***Bank Closure***
	a. Izin Usaha	-	*Business License*
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-	*Representative Office of Commercial Bank Abroad*
	c. Kantor Cabang (KC)	34	*Branch Office (KC)*
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-	*Sub-Branch Office (KCP)*
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	*Functional Office (KF)*
3.	**Pemindahan Alamat Bank Umum**		***Bank Address Relocation***
	a. Kantor Pusat (KP)	2	*Head Office (KP)*
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	*Regional Office (Kanwil)*
	c. Kantor Cabang (KC)	-	*Branch Office (KC)*
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-	*Sub-Branch Office (KCP)*
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	*Functional Office (KF)*
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	*Bank Representative Office*
4.	**Perubahan Status Bank Umum**		***Change of Bank Status***
	a. Peningkatan Status	-	*Status Upgrade*
	- KCP menjadi KC	8	*KCP to KC*
	- KK menjadi KCP	-	*KK to KCP*
	- KF menjadi KCP	-	*KF to KCP*
	- KK menjadi KC	-	*KK to KC*
	b. Penurunan Status Bank Umum	-	*Status Downgrade*
	- KP menjadi KC	-	*KP to KC*
	- KC menjadi KCP	-	*KC to KCP*
	- KCP ke KF/KK	-	*KCP to KF/KK*
5.	**Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)**	**2**	***Change of Business License (Name Change)***
6.	**Perubahan Badan Hukum**	**-**	***Change of Legal Entity***
7.	**Merger/Integrasi Bank Umum**	**-**	***Bank Merger/Integration***
8.	**Izin Bank Devisa**	**-**	***Forex Bank License***
9.	**Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia**	**-**	***Opening of Foreign Bank Representative Office in Indonesia***
	Jumlah	**72**	***Total***

2. Perizinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

2. Licensing for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units

Tabel 4.10 Perizinan BUS dan UUS Tahun 2023
Table 4.10 Licensing of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units in 2023

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Activity Type*
1.	**Pembukaan**		***Opening***
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	*Regional Office (Kanwil)*
	b. Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)	1	*Branch Office (KC)/Islamic Branch Office (KCS)*
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)/KCP Syariah (KCPS)	1	*Sub-Branch Office (KCP)/Islamic Sub-Branch Office (KCPS)*
	d. Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS)	-	*Functional Office (KF)/Islamic Functional Office (KFS)*
	e. Kantor Bank di Luar Negeri	1	*Bank Office Abroad*

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Activity Type*
2.	**Penutupan**		***Closure***
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	*Regional Office (Kanwil)*
	b. Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)	-	*Branch Office (KC)/Islamic Branch Office (KCS)*
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)/KCP Syariah (KCPS)	-	*Sub-Branch Office (KCP)/Islamic Sub-Branch Office (KCPS)*
	d. Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS)	-	*Functional Office (KF)/Islamic Functional Office (KFS)*
	e. Kantor Bank di Luar Negeri	-	*Bank Office Abroad*
3.	**Pemindahan Alamat**		***Address Relocation***
	a. Kantor Pusat (KP)/Kantor Induk Kegiatan UUS	2	*Head Office (KP)/Parent Office of UUS Activities*
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	*Regional Office (Kanwil)*
	c. Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)	4	*Branch Office (KC)/Islamic Branch Office (KCS)*
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)/KCP Syariah (KCPS)	2	*Sub-Branch Office (KCP)/Islamic Sub-Branch Office (KCPS)*
	e. Kantor Kas (KK)/Kantor Kas Syariah (KKS)	1	*Cash Office (KK)/Islamic Cash Office (KKS)*
	f. Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS)	-	*Functional Office (KF)/Islamic Functional Office (KFS)*
	g. Kantor Bank di Luar Negeri	-	*Bank Office Abroad*
4.	**Perubahan Status**		***Status Change***
	a. Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Syariah (KCS)	-	*Upgrade of Sub-Branch Office (KCP)/Islamic Sub-Branch Office (KCPS) to Branch Office (KC)/Islamic Branch Office (KCS)*
	b. Penurunan Status Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Syariah (KCS) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	-	*Downgrade of Branch Office (KC)/Islamic Branch Office (KCS) to Sub-Branch Office (KCP)/Islamic Sub-Branch Office (KCPS)*
5.	**Wawancara Direktur UUS**	**1**	***UUS Director Interview***
6.	**Wawancara Dewan Pengawas Syariah BUS/UUS**	**3**	***Interview of Sharia Supervisory Board of BUS/UUS***
7.	**Pemisahan UUS dengan Cara Pendirian BUS**	**1**	***Separation of UUS through Establishment of BUS***
	Jumlah	**17**	***Total***

3. Perizinan BPR

3. Licensing for BPR

Tabel 4.11 Perizinan BPR 2023
Table 4.11 Licensing of Rural Banks in 2023

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Activity Type*
1.	Pendirian	-	*Establishment (Business License)*
2.	Penggabungan	12	*Merger*
3.	Peleburan	-	*Consolidation*
4.	Pencabutan Izin Usaha	5	*Revocation of Business License*

4. Perizinan BPRS

4. Licensing for BPRS

Tabel 4.12 Perizinan BPRS 2023
Table 4.12 Licensing of Islamic Rural Banks in 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	Activities
1	Pendirian	-	*Establishment (Business License)*
2	Penggabungan	1	*Merger*
3	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah	5	*Change of Business Activity from Rural Economic Banks to Sharia People's Economic Banks*
4	Pencabutan Izin Usaha	-	*Revocation of Business License*

IV.2.5.Aktivitas Penegakan Hukum Perbankan

Banking Law Enforcement Activities

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama 2023, terdapat 17 Kantor Bank (KB) dengan 36 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada 2023 maupun pada periode tahun sebelumnya sebanyak tiga KB dengan delapan PKP sedang dalam proses sampai pada akhir tahun 2023, sebanyak 2 KB dengan tiga PKP ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan, dan sebanyak 13 KB dengan 27 PKP telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan. Rincian sebagaimana tabel berikut:

1. *Handling Suspected Banking Crimes (TIPIBANK)*

Throughout 2023, there were 17 bank offices (KB) with 36 Banking Regulation Violations (PKP) reported by the bank supervision units. Among these, three bank offices (KB) with eight PKPs from 2023 and previous years were still under process by the end of 2023. Two bank offices (KB) with three PKPs were followed up with supervisory actions, and 13 bank offices (KB) with 27 PKPs were processed and forwarded to the Investigation Unit. The details are as follows:

Tabel 4.13. Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Table 4.13. Statistics on Handling Banking Regulation Violations

Tahapan Kegiatan	Tahun 2023						*Activity Stage*
	Bank Umum | *Commercial Banks*		BPR | *Rural Banks*		Jumlah | *Total*		
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP	
1. PKP yang diterima	5	6	12	30	17	36	*PKP received*
2. PKP dalam proses	1	1	2	7	3	8	*PKP under process*
3. PKP yang dikembalikan	0	0	2	3	2	3	*PKP returned*
4. PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *)	3	4	10	23	13	27	*PKP forwarded to DPJK**

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari tahun sebelumnya | * *Includes carryover PKP from previous years*
Sumber: OJK | *Source: OJK*

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan, selama 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap 20 kantor bank.

Additionally, to further investigate indications of banking regulation violations, in 2023, 20 bank offices underwent Special Examination of Indications of Banking Regulation Violations (Riksus IPKP) together with the Supervisors.

2. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama 2023, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan pemberian keterangan Ahli dan/atau keterangan Saksi Pelapor sebanyak 46 kali. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 23 permintaan dari Polri, enam permintaan dari Penyidik OJK dan 10 permintaan dari Kejaksaan RI. Sementara itu, pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas tujuh permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2. *Provision of Expert and/or Witness Testimony*

In 2023, to fulfill requests from law enforcement agencies (APH), OJK provided expert and/or witness testimony 46 times. The expert testimony was given in response to 23 requests from the Police, six requests from OJK Investigators, and 10 requests from the Indonesian Prosecutor's Office. Meanwhile, witness testimony was provided for seven requests from the Indonesian Prosecutor's Office for court appearances.

The expert testimony related to cases previously handled by OJK or cases reported by banks or other parties to the Police and the Indonesian Prosecutor's Office. The provision of expert testimony was conducted in line with expertise in banking regulations, bank supervision, and the experience of employees in handling suspected banking crimes.

Tabel 4.14. Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
Table 4.14. Expert/Witness Testimony Provision

No.	APH | *Law Enforcement Officers*	Permintaan | *Requests*		
		Ahli | *Expert*	Saksi | *Witness*	Jumlah | *Total*
1	Polri | *The Indonesian National Police*	23	0	23
2	Kejaksaan RI | *Indonesian Prosecutor's Office*	10	7	17
3	DPJK – OJK | *DPJK - OJK*	6	0	6
Jumlah | *Total*		**39**	**7**	**46**

Sumber: OJK | *Source: OJK*

IV.2.6.Aktivitas Pengembangan Perbankan
Banking Development Activities

Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya dan kaitannya dengan TPPU.

OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU sebanyak tiga kali pada tahun 2023 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan total peserta sebanyak 318 orang dari pengurus dan/atau pegawai yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan/atau audit internal dari BPR yang berada di wilayah koordinasi pengawasan Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah dan Kantor OJK Provinsi Bali.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada tahun 2023 telah dilaksanakan *Workshop* Tipologi dan Penanganan Dugaan Tipibank dan Kaitannya dengan TPPU sebanyak tiga kali secara tatap muka dengan total peserta 82 orang Pengawas Bank dari Kantor Pusat dan Kantor OJK.

OJK juga telah mendistribusikan banner pencegahan tipibank kepada 218 BPR sebagai sarana peningkatan pemahaman dan *awareness* pegawai BPR terhadap tindak pidana perbankan dan bentuk sosialisasi pencegahan tindak pidana perbankan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Bank dan Konglomerasi Keuangan, pada 2023 OJK melakukan aktivitas pengembangan pengawasan meliputi:

1. **Pengembangan Pedoman Pengawasan**
   Kegiatan pengembangan pedoman pengawasan pada 2023 mencakup antara lain:

   a. Penyusunan pedoman pemahaman BPR dan BPRS, pedoman perencanaan pengawasan BPR dan BPRS, serta pedoman pemeriksaan BPR dan BPRS.

Enhancing the understanding and handling of banking crime cases (tipibank) needs to be processed quickly to create a deterrent effect for bankers who commit fraud. In this context, OJK conducted socialization to the banking industry regarding OJK's role in handling tipibank, efforts to prevent it, and its relation to money laundering (TPPU).

OJK conducted Socialization on the Prevention of Banking Crimes and Their Relation to TPPU three times in 2023 for the banking industry. The socialization sessions were held face-to-face with a total of 318 participants from the management and/or employees responsible for compliance, risk management, and/or internal audit functions of BPRs under the supervision of OJK Regional Offices in South Sumatra and Bangka Belitung, Central Java, and Bali.

Additionally, to improve the understanding of supervisors in handling suspected tipibank, a workshop on Tipology and Handling Suspected Tipibank and Its Relation to TPPU was held three times in 2023, attended by 82 bank supervisors from OJK headquarters and offices.

OJK also distributed banners on the prevention of tipibank to 218 BPRs as a means to increase understanding and awareness of banking crimes among BPR employees and as a continuous effort to socialize the prevention of banking crimes.

In supporting the supervision of banks and financial conglomerates, OJK conducted the following development activities in 2023:

1. ***Development of Supervision Guidelines***
   The development of supervision guidelines includes the preparation of guidelines for supervisors to conduct supervision activities on banks and financial conglomerates, including:
   a. Drafting SEDK on Guidelines for Understanding BPR and BPRS, Supervision Planning Guidelines for BPR and BPRS, and Inspection Guidelines for BPR and BPRS.

b. Penyusunan beberapa ketentuan internal pengawasan lainnya terkait pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan. Penyusunan ketentuan internal pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut atas penerbitan UU PPSK, peraturan perundang-undangan yang memengaruhi sektor perbankan, ataupun perkembangan *best practice* di sektor jasa keuangan.
c. Penerbitan pedoman pengawasan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan.
d. Penerbitan pedoman perencanaan pengawasan berdasarkan risiko bagi bank umum.
e. Penerbitan pedoman penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
f. Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan koordinasi dan diskusi dengan perwakilan pengawasan bank dan satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan dan/atau penginian pedoman pengawasan perbankan.

2. Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan mencakup kegiatan penyusunan kajian terkait metode yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Bank dan Konglomerasi Keuangan, antara lain:

a. Penyusunan kajian mengenai evaluasi *Risk-Based Supervision* terhadap Bank Umum dan Bank Umum Syariah sebagai tindak lanjut atas arah strategis pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2020 – 2025 sejalan dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021 – 2025. Kajian ini bersifat *multiyears*.
b. Penyusunan kajian mengenai pengawasan BPR dan BPRS Grup dalam rangka konsolidasi sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan pada *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RP2I BPR dan BPRS) Tahun 2022 - 2025.
c. Penyusunan kajian mengenai *Financial Engineering* dan *Legal Engineering* dalam pengawasan Bank yang bertujuan untuk mendeteksi praktik penyalahgunaan *Financial Engineering* dan *Legal Engineering* dengan fokus tahun 2023 adalah praktik penyalahgunaan *Financial Engineering* dan *Legal Engineering* di BPR dan BPRS.
d. Penyusunan kajian mengenai penyederhanaan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap BPR dan BPRS melalui penyederhanaan proses bisnis pada siklus pengawasan dan mekanisme tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPRS yang didukung dengan pengembangan sistem informasi pengawasan.
e. Penyusunan kajian mengenai pedoman pengenaan sanksi administratif APU PPT pada sektor perbankan dalam rangka mendukung penguatan penerapan program APU PPT oleh Bank.
f. Penyusunan kajian pengawasan Konglomerasi Keuangan terkait permodalan Konglomerasi Keuangan yang dilakukan melalui diskusi dengan *technical assistance* dari *World Bank.*

b. Drafting other internal supervision provisions related to banking and financial conglomerate supervision. The drafting of these internal supervision provisions is a follow-up to the enactment of the Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK), regulations affecting the banking sector, and the development of best practices in the financial services sector.
c. Issuance of SEDK on Supervision Guidelines for Banking Synergy Implementation.
d. Issuance of SEDK on Risk-Based Supervision Planning Guidelines for Commercial Banks.
e. Issuance of SEDK on Health Level Assessment Guidelines for BPR and BPRS.
f. Conducting activities related to coordination and discussions with bank supervision representatives and relevant work units to draft and/or update banking supervision guidelines.

2. Development of Supervision Methodology

The development of supervision methodology includes the preparation of studies on methods used in supervising banks and financial conglomerates, including:

a. Conducting studies on the evaluation of Risk-Based Supervision for Commercial Banks and Islamic Commercial Banks as a follow-up to the strategic direction in the Indonesian Banking Development Roadmap (RP2I) 2020-2025, in line with the Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025. This study is multi-year.
b. Conducting studies on BPR and BPRS Group supervision as part of consolidation following the policy direction in the BPR and BPRS Industry Development Roadmap (RP2I BPR and BPRS) 2022-2025.
c. Conducting studies on Financial Engineering and Legal Engineering in bank supervision to detect misuse of Financial Engineering and Legal Engineering practices, with a focus on 2023 being the misuse practices in BPR and BPRS.
d. Conducting studies on simplifying the supervision business process for BPR and BPRS to enhance supervision effectiveness through business process simplification in the supervision cycle and follow-up reporting mechanism supported by developing a supervision information system.
e. Conducting studies on guidelines for imposing administrative sanctions on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) in the banking sector to support strengthening AML/CFT program implementation by banks.
f. Completing studies on financial conglomerate supervision related to financial conglomerate capital through discussions with technical assistance from the World Bank.

3. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan mencakup kegiatan pengembangan sistem informasi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan bank baik Bank Umum maupun BPR/ BPRS, serta pengembangan fitur secara bertahap. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIPB) untuk modul produk pengawasan dan pengolahan data.

4. Pengembangan Teknis Kapasitas Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknis kapasitas pengawasan mencakup kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Bank dan Konglomerasi Keuangan, antara lain:

a. ***Workshop* Penguatan Pengawasan Program APU PPT dan *Fraud Detection***
   Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara satuan kerja di OJK dan instansi terkait yaitu, Densus 88, KPK, dan DJP sebagai narasumber. Materi yang disampaikan lebih menekankan pada pendalaman dan mitigasi risiko atas TPPU yang berasal dari beragam tindak pidana asal, metode pemeriksaan, serta studi kasus.
b. ***Workshop Training of Trainers* (ToT) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR**
   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengawas terhadap penerapan tingkat kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan risiko.
c. ***Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawasan BPR dan *On The Job Training* (OJT)**
   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pengawasan dan pemeriksaan BPR berdasarkan risiko.
d. ***Workshop Artificial Intelligence Neural Network***
   Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengalaman bagi pengawas perbankan dan penyusun kebijakan sektor perbankan dalam menggunakan teknologi *artificial intelligence.*
e. ***Workshop* Pengawasan Teknologi Informasi**
   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya yang terkait dengan penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi (TI) di Bank.
f. ***Workshop* PSAK 71**
   Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi dengan *Technical Assistant World Bank.* Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya yang terkait dengan penerapan PSAK 71 di Bank Umum.

3. Surveillance Technology Development

Surveillance technology development activities include the activities to develop supervisory information systems to support the implementation of bank supervision processes for both Commercial Banks and Rural Banks/Sharia Rural Banks, as well as gradual feature development. The developments include the development of the Banking Supervision Information System (SIPB) Application for supervision product and data processing modules.

4. Development of Technical Supervision Capacity

The development of technical supervision capacity includes activities to enhance the knowledge and skills of supervisors in supervising banks and financial conglomerates, including:

*a. **Workshop on Strengthening AML/CFT and Fraud Detection Supervision***
   This activity was conducted in collaboration with OJK work units and related agencies such as Densus 88, KPK, and DJP as resource persons. The material focused on deepening and mitigating risks related to money laundering originating from various predicate crimes, examination methods, and case studies.
*b. **Workshop on Training of Trainers (ToT) Health Level Assessment for BPR***
   This activity aimed to enhance supervisors' understanding of the health level assessment of BPR and BPRS based on risk.
*c. **Workshop on Strengthening BPR Supervision Capacity and On The Job Training (OJT)***
   This activity aimed to enhance the competence of employees in BPR supervision and examination.
*d. **Workshop on Artificial Intelligence Neural Network***
   This activity aimed to provide understanding and experience for bank supervisors and policymakers in using artificial intelligence technology.
*e. **Workshop on Information Technology Supervision***
   This activity aimed to enhance supervisors' competence in performing supervisory functions, especially those related to Information Technology (IT) risk management in banks.
*f. **Workshop on PSAK 71***
   This activity was conducted in collaboration with the World Bank Technical Assistance. It aimed to enhance supervisors' competence in performing supervisory functions, particularly related to PSAK 71 implementation in Commercial Banks.

IV.2.7.Aktivitas Pengaturan Perbankan

Banking Regulation Activities

Pengaturan Perbankan Syariah

Pada Tahun 2023, OJK menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) kepada OJK. Selain memuat aturan mengenai pemisahan UUS, POJK tersebut juga mengatur aspek kelembagaan mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK), serta aspek penguatan UUS yang terdiri dari penguatan permodalan (dana usaha), tanggung jawab pengembangan UUS, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS dan kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya.

Untuk mendukung penguatan, tata kelola, efisiensi perbankan syariah, pada Tahun 2023 OJK juga menerbitkan beberapa SEOJK, sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan penambahan *form* dan perubahan pada *form* yang telah ada, baik pada laporan per kantor maupun pada laporan gabungan.
2. SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang merupakan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan atas perubahan kegiatan usaha BUK menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).
3. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan BPR Syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk BPR Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian. SEOJK ini mencabut SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sharia Banking Regulation

In 2023, OJK promulgated OJK Regulation (POJK) Number 12 of 2023 concerning sharia Windows (POJK UUS) in accordance with Article 68 of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act). In addition to containing regulations regarding the separation of sharia windows, the POJK also regulates institutional aspects, starting from the opening, management and office networks to the revocation of business licences by request from a conventional commercial bank, as well as aspects of strengthening sharia windows, consisting of strengthening capital (business funds), development responsibilities, utilisation of conventional commercial bank resources by sharia windows and obligations to prepare an action plan for strengthening the sharia window within the corporate plan of the parent conventional commercial bank.

Seeking to support the strengthening, governance and efficiency of sharia banks, OJK issued several Circular Letters (SEOJK) in 2023 as follows:

1. *Circular Letter (SEOJK) Number 3/SEOJK.03/2023 concerning the Monthly Reports of Sharia Rural Banks, as an amendment to SEOJK Number 18/SEOJK.03/2019 concerning the Monthly Reports of Islamic Rural Banks, which included an additional form and changed the existing forms of the individual office report and combined report.*
2. *Circular Letter (SEOJK) Number 6/SEOJK.03/2023 concerning Changes in the Business Activities of Conventional Commercial Banks to Become Sharia Commercial Banks and SEOJK Number 7/SEOJK.03/2023 concerning Changes in the Business Activities of Rural Banks to Become Sharia Rural Banks, as an amendment to SEOJK Number 2/SEOJK.03/2017 concerning Changes in the Business Activities of Conventional Commercial Banks to Become Sharia Commercial Banks and SEOJK Number 3/SEOJK.03/2017 concerning Changes in the Business Activities of Rural Banks to Become Sharia Rural Banks. OJK issued these circular letters to increase the efficiency and effectiveness of the licensing process for changes in the business activities of conventional commercial banks to become Sharia commercial banks or rural banks to become Sharia Rural Banks.*
3. *Circular Letter (SEOJK) Number 10/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Islamic Rural Banking Products, which was issued to create highly competitive Islamic rural banks that contribute significantly to the national economy and social development, while aligning with prevailing laws and regulations to foster the development of Islamic rural banking products based on capital adequacy principles, effective risk management and prudential principles. This circular letter repeals SEOJK Number 37/SEOJK.03/2015 in its entirety concerning the Products and Activities of Islamic Rural Banks.*

4. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan dengan tujuan agar BUS dan UUS dapat mengelola dan memitigasi risiko dengan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

4. Circular Letter (SEOJK) Number 25/SEOJK.03/2023 concerning the Application of Risk Management for Islamic Commercial Banks and Islamic Windows, as implementation guidelines for OJK Regulation (POJK) Number 65/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Islamic Commercial Banks and Islamic Windows issued to ensure Islamic commercial banks and Islamic windows can manage and mitigate risk through a process of risk identification, measurement, monitoring and management in accordance with the business activities of the Islamic bank and based on conformity with sharia principles.

IV.2.8.Aktivitas Pengembangan Perbankan
Banking Development Activities

OJK meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 untuk mendukung pengembangan Perbankan Syariah Nasional yang memiliki Pilar Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah dan Pilar Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional.

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

OJK terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat karakteristik perbankan syariah dengan mengembangkan produk yang memiliki keunikan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis Perbankan Syariah di industri Perbankan. Salah satu strategi memperkuat karakteristik Perbankan Syariah dengan mengembangkan keunikan produk syariah yang dilakukan melalui:

1. **Penyusunan Pedoman Produk Perbankan Syariah**
   OJK menyelesaikan Pedoman Produk Pembiayaan *Murabahah* bagi Perbankan Syariah yang merupakan edisi penyempurnaan dari Standar Produk *Murabahah* yang diterbitkan Tahun 2016. Pembahasan dalam pedoman dimaksud, meliputi :
   a. Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* yang mencakup pembahasan tentang rukun dan syarat serta ketentuan lain dalam pembiayaan.
   b. Skema Pembiayaan *Murabahah* yang mencakup mekanisme implementasi yang dapat diterapkan di industri Perbankan Syariah Indonesia.

   Selain itu, OJK menyelesaikan Penyusunan Pedoman Produk *Musyarakah* dan Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPRS dan *Fintech* P2P *Financing*.

2. **Pengembangan dan Implementasi Produk Unik Perbankan Syariah**
   OJK terus mendorong pengembangan produk yang memiliki keunikan model bisnis dengan mengintegrasikan fungsi keuangan dan fungsi sosial dalam layanan dan produknya sebagai *added value* bagi nasabah. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pengembangan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang diharapkan dapat memperkuat peran Perbankan Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah yang mencakup sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait lainnya.

OJK launched the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) 2023-2027 to support development of the national Islamic banking industry, which contains a Pillar for Strengthening the Characteristics of Islamic Banking and a Pillar for Strengthening the Contribution of Islamic Banking in the National Economy.

Strengthening the Characteristics of Islamic Banking

OJK continues making various efforts to strengthen the characteristics of Islamic banking by developing products that are uniquely Islamic to differentiate the business models of Islamic banking in the national banking industry. One strategy to strengthen the characteristics of Islamic banking is by developing unique sharia-compliant products by:

1. ***Preparing Guidelines for Islamic Banking Products***
   OJK finalised its Guidelines for Murabahah Financing products for Islamic banking as an improved edition of the Murabahah Product Standards published in 2016. Discussions in the guidelines include:

   a. Sharia Principles in Murabahah Financing Products, including discussions on harmonisation with the terms and conditions of other financing products.
   b. Murabahah Financing Scheme, including implementation mechanisms that are applicable to the Islamic banking industry in Indonesia.

   In addition, OJK also finalised Guidelines for Musyarakah Products and Guidelines for Channelling Cooperation between Islamic Rural Banks and FinTech P2P Financing.

2. ***Development and Implementation of Unique Islamic Banking Products***
   OJK continues to nurture the development of products with unique business models by integrating the financial and social functions into the products and services as value added for the customer. An ongoing effort is the development of Cash Waqf Linked Deposits (CWLD), which are expected to strengthen the role of Islamic banking in the Islamic economic ecosystem through synergy with government ministries/agencies, local governments and other relevant stakeholders.

Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

Salah satu strategi untuk meningkatkan kontribusi Perbankan Syariah dalam perekonomian nasional adalah dengan penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah melalui perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, di antaranya sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) lainnya, Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan industri halal melalui kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank. Selain itu, sinergi Perbankan Syariah juga dilakukan melalui kerja sama Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan *Fintech* P2P *Financing* Syariah dan *Fintech Funding*. Sinergi dimaksud dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan aspek kepatuhan syariah dari sisi akad yang digunakan.

Increasing the Contribution of Islamic Banking in the National Economy

One strategy to increase the contribution of Islamic banking in the national economy is to strengthen the role of Islamic banks in the Islamic economic ecosystem by expanding access to Islamic banking services within the Islamic economic ecosystem, including synergy with other Islamic financial services institutions, government ministries/agencies and the halal industry through interbank cooperation within bank business groups. In addition, Islamic banking synergy is also achieved through cooperation between Islamic rural banks with FinTech P2P Financing and FinTech Funding. Synergy is implemented in accordance with prudential principles and sharia compliance in terms of the contracts used.

IV.3 Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Supervision of the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange

IV.3.1. Aktivitas Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Regulatory Activities for the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange

Selama tahun 2023, telah diterbitkan 10 Peraturan OJK dan lima Surat Edaran OJK dari Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebagai berikut:

During 2023, 10 OJK Regulations (POJK) and five OJK Circular Letters (SEOJK) were issued by the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange sector as follows:

Tabel 4.15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Table 4.15. Financial Services Authority Regulations (POJK)

No.	Judul POJK | *Title of POJK*
1.	POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan | *POJK Number 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector*
2.	POJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan *POJK Number 13 of 2023 concerning Policies to Maintain Performance and Stability of the Capital Market under Significantly Fluctuating Market Conditions*
3.	POJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah *POJK Number 15 of 2023 concerning Administration Services Implementation of the Know Your Customer Principle*
4.	POJK Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal *POJK Number 26 of 2023 concerning the Use of International Financial Reporting Standards in the Capital Market*
5.	POJK Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal *POJK Number 30 of 2023 concerning the Communication of Key Audit Matters in the Public Accountant's Report on Audited Financial Statements in the Capital Market*
6.	POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi *POJK Number 2 of 2023 concerning Amendments to POJK Number 10/POJK.04/2018 Regarding the Implementation of Governance for Investment Managers*
7.	POJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *POJK Number 4 of 2023 concerning the Second Amendment to POJK Number 23/POJK.04/2016 on Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts*
8.	POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan *POJK Number 18 of 2023 concerning the Issuance and Requirements for Debt Securities and/or Sustainable Sukuk*
9.	POJK Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka *POJK Number 29 of 2023 concerning Share Buybacks Issued by Public Companies*
10.	POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon | *POJK Number 14 of 2023 concerning Carbon Trading Through the Carbon Exchange*

Tabel 4.16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)
Table 4.16. Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK)

No.	Judul SEOJK | *Title of SEOJK*
1.	SEOJK Nomor 9/SEOJK.04/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi | *SEOJK Number 9/SEOJK.04/2023 concerning Amendments to Financial Services Authority Circular Letter Number 19/SEOJK.04/2018 on Reports on the Implementation of Governance for Investment Managers*
2.	SEOJK Nomor 2/SEOJK.04/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan Serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan | *SEOJK Number 2/SEOJK.04/2023 concerning Guidelines for Preparing Adjusted Net Working Capital Forms and Submission and Validation of Adjusted Net Working Capital Reports*
3.	SEOJK Nomor 8/SEOJK.04/2023 Tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah *SEOJK Number 8/SEOJK.04/2023 concerning Submission of Information by Issuers or Public Companies in the Context of Preparing the List of Sharia Securities*
4.	SEOJK Nomor 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek Karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kelangsungan Usaha |*SEOJK Number 13/SEOJK.04/2023 concerning Share Buybacks by Public Companies Due to the Delisting of Securities by the Stock Exchange Due to Significant Events Negatively Impacting Business Continuity*
5.	SEOJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon *SEOJK Number 12/SEOJK.04/2023 concerning Procedures for Conducting Carbon Trading Through the Carbon Exchange*

IV.3.2.Aktivitas Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange Supervision Activities

1. Pengawasan Transaksi Efek
a. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi efek, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Monitoring* terhadap 58 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

1. Supervision of Securities Transactions
a. Supervision of Stock Transactions

As of the fourth quarter of 2023, OJK has conducted securities transaction supervision activities as follows:

1) Monitoring 58 stocks based on daily, weekly, and monthly trading reports that indicated irregularities.

No	Kategori | *Category*	Jumlah Saham *Number of Stocks*
1	Saham yang sedang dilakukan *monitoring* | *Stocks under monitoring*	12
2	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | *Stocks escalated to review process*	32
3	Saham telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran *Stocks decided to be discarded after further analysis revealed no indications of violations*	14
	Jumlah | *Total*	**58**

2) Penelahaan terhadap 47 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

2) Review of 47 stocks as a follow-up from monitoring unusual market activity where the trading activities were indicated to be irregular.

No	Kategori | *Category*	Jumlah Saham *Number of Stocks*
1	Saham yang sedang dilakukan penelaahan | *Stocks under review*	26*
2	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis | *Stocks escalated to technical examination*	16
3	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Stocks completed review and handed over to the Special Capital Market Examination Unit*	3
4	Saham diputuskan untuk di-*discard* setelah dilakukan penelaahan | *Stocks decided to be discarded after review*	2
	Jumlah | *Total*	**47**

*Keterangan: 10 saham di antaranya tidak melalui tahapan *monitoring* sejak penyesuaian SOP baru, di mana pada SOP baru tersebut Tahapan *Monitoring* telah menjadi satu bagian dengan Tahapan Penelaahan
**Note: 10 of these stocks did not go through the monitoring stage due to new SOP adjustments, where the Monitoring Stage is integrated with the Review Stage.*

3) Pemeriksaan Teknis terhadap 22 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

3) Technical examination of 22 stocks as a follow-up from the review process to verify indications of fictitious transactions, market manipulation, and/or insider trading.

No	Kategori | *Category*	Jumlah Saham *Number of Stocks*
1	Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis | *Stocks under technical examination*	12
2	Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Stocks completed technical examination and handed over to the Special Capital Market Examination Unit*	10
	Jumlah | *Total*	**22**

b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Sampai triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

1) *Monitoring* Efek Bersifat Utang dan Efek Lain dengan rincian sebagai berikut:

b. Supervision of Debt Securities and Other Securities Transactions

As of the fourth quarter of 2023, OJK conducted the following supervision activities for debt securities and other securities transactions:

1) Monitoring Debt Securities and Other Securities with the following details:

No	Kategori | *Category*	Jumlah Seri *Number of Series*
Surat Berharga Negara | *Government Securities*		
1	SBN yang sedang dilakukan *monitoring* | *Government Securities under monitoring*	-
2	SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | *Government Securities escalated to review process*	1
3	SBN telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran *Government Securities decided to be discarded after further analysis revealed no indications of violations*	8
4	SBN telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan penelaahan | *Government Securities decided to be discarded after review*	2
Obligasi dan Sukuk Korporasi | *Corporate Bonds and Sukuk*		
1	EBUS Korporasi yang sedang dilakukan *monitoring* | *Corporate Debt Securities under monitoring*	-
2	EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | *Corporate Debt Securities escalated to review process*	1
3	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran *Corporate Debt Securities decided to be discarded after further analysis revealed no indications of violations*	3
4	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan penelaahan | *Corporate Debt Securities decided to be discarded after review*	3
5	EBUS Korporasi telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Corporate Debt Securities completed technical examination and handed over to the Special Capital Market Examination Unit*	1
Medium Term Notes* | *Medium Term Notes		
1	MTN yang sedang dilakukan *monitoring* | *Medium Term Notes under monitoring*	-
2	MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | *Medium Term Notes escalated to review process*	-
3	MTN telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran *Medium Term Notes decided to be discarded after further analysis revealed no indications of violations*	1
Efek lain | *Other Securities*		
1	Waran yang sedang dilakukan *monitoring* | *Warrants under monitoring*	-
2	Waran telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | *Warrants escalated to review process*	5
3	Waran telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran *Warrants decided to be discarded after further analysis revealed no indications of violations*	5
4	Waran telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Warrants completed review and handed over to the Special Capital Market Examination Unit*	1
5	Waran Terstruktur telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Structured Warrants completed review and handed over to the Special Capital Market Examination Unit*	1
6	Waran telah diputuskan untuk di-*discard,* setelah dilakukan penelaahan | *Warrants decided to be discarded after review*	-
7	Waran telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal *Warrants completed technical examination and handed over to the Special Capital Market Examination*	2
	Jumlah | *Total*	**34**

2) Terdapat 1 seri EBUS Korporasi, 2 seri Waran, dan 1 kasus SBN dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan reviu *alert*.
3) Terdapat 2 seri waran dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari kegiatan *monitoring*.
4) Terdapat pemeriksaan teknis 1 seri Waran yang sedang berjalan, dan 1 seri Waran Terstruktur yang telah dilimpah ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal.
5) Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) bulan Januari s.d. Desember 2023.

2. Pengawasan Lembaga Efek

Selama tahun 2023, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self-Regulatory Organizations* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE), antara lain:

a. Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Program Strategis PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Triwulan III Tahun 2023.
b. Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan Keuangan PT BEI.
c. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI Tahun 2024.
d. Tanggapan atas Permohonan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2023.
e. Persetujuan Revisi RKAT PT KSEI Tahun 2023.
f. Persetujuan RKAT PT KSEI Tahun 2024.
g. Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Sementara PT KSEI Tahun 2023.
h. Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KSEI Triwulan III Tahun 2023.
i. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PT KSEI Tahun 2023.
j. Tanggapan dan Penyampaian Hasil Analisis Laporan Keuangan Tengah Tahunan (*Audited*) PT KPEI tahun 2023.
k. Penyampaian Pemenuhan Hasil Pemeriksaan PT KPEI Tahun 2022.
l. Penyampaian Tanggapan dan Risalah Rapat terkait Permohonan Persetujuan Insentif Pengurangan *Haircut* MKBD bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Transaksi Repo Melalui Fasilitas *Triparty Repo* PT KPEI.
m. Tanggapan Atas Hasil *Assessment* Awal/*Initial Rating* PT KPEI oleh Lembaga Pemeringkat Efek.
n. *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Rencana Kerja PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).
o. *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Kegiatan PT PEI.
p. *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Keuangan PT PEI.
q. Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek Indonesia (P3IEI).
r. Penyampaian persetujuan Revisi RKAT PT P3IEI Tahun 2023.
s. Penyampaian pesetujuan RKAT PT P3IEI tahun 2024.
t. Permohonan Pendapat Hukum terkait Permohonan Bank Indonesia kepada PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) untuk menyediakan data Harga Pasar Wajar (HPW) atas Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

2) One series of Corporate Debt Securities, two series of Warrants, and one Government Securities case are under review as a follow-up from alert review activities.
3) Two series of Warrants are under review as a follow-up from monitoring activities.
4) Technical examination of one series of Warrants is ongoing, and one series of Structured Warrants has been handed over to the Special Capital Market Examination Unit.
5) Reviewing debt market trend reports from PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) from January to December 2023.

2. Supervision of Securities Institutions

Throughout 2023, Ojk conducted supervision of Self-Regulatory Organizations (SROs), Securities Pricing Agencies (LPHE), Investor Protection Fund Managers (PDPP), and Securities Funding Institutions (LPE), including:

a. Budget Realization Report, Work Plan, and Strategic Programs of PT Bursa Efek Indonesia (BEI) for Q3 2023.
b. Response to KAP Communication on PT BEI Financial Audit Reports.
c. Approval of PT BEI's Work Plan and Annual Budget (RKAT) for 2024.
d. Response to Revision Request of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)'s Work Plan and Annual Budget (RKAT) for 2023.
e. Approval of PT KSEI's Revised RKAT for 2023.
f. Approval of PT KSEI's RKAT for 2024.
g. Response to PT KSEI's Preliminary Examination Results for 2023.
h. Budget Realization and Work Plan Realization Report of PT KSEI for Q3 2023.
i. Submission of PT KSEI's Examination Results Report for 2023.
j. Response and Submission of Analysis Results of PT KPEI's Semi-Annual Financial Report (Audited) for 2023.
k. Submission of Compliance with PT KPEI's Examination Results for 2022.
l. Response and Meeting Minutes regarding PT KPEI's Request for Incentive Approval for Haircut Reduction for Repo Transactions through PT KPEI's Triparty Repo Facility.
m. Response to PT KPEI's Initial Rating Assessment by a Securities Rating Agency.
n. Monitoring submission and analysis of PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI)'s Work Plan Report.
o. Monitoring submission and analysis of PT PEI's Activity Report.
p. Monitoring submission and analysis of PT PEI's Financial Report.
q. Monthly Activity and Financial Position Report of the Investor Protection Fund (DPP) of PT Indonesian Investor Protection Program Organizer (P3IEI).
r. Approval of PT P3IEI's Revised RKAT for 2023.
s. Approval of PT P3IEI's RKAT for 2024.
t. Legal Opinion Request related to Bank Indonesia's Request to PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) for providing Fair Market Price (HPW) data for Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI), Bank Indonesia Foreign Exchange Securities (SVBI), and Bank Indonesia Sukuk Foreign Exchange (SUVBI).

3. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek selama 2023 telah dilakukan beberapa hal, antara lain pengawasan terhadap Perusahaan Efek yang terdiri dari 91 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB) dan 30 Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (PE Non AB). Selain itu, dilakukan analisis dan pemantauan atas Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi, serta pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek, yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE).

4. Pengawasan Pengelolaan Investasi

Pengawasan terhadap pengelolaan investasi pada 2023, antara lain pemeriksaan APU-PPT terhadap 17 Manajer Investasi (MI) pada triwulan III-2023; pemeriksaan berdasarkan *Risk Based Supervision* (RBS) Manajer Investasi terhadap empat MI pada triwulan IV-2023; pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana ketentuan Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi; pemantauan terhadap laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi untuk periode tahun 2024 dan pemantauan terhadap laporan MKBD bulanan Manajer Investasi Pemenuhan Nilai Minimum MKBD.

5. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama 2023, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

3. *Supervision of Securities Companies*

In 2023, OJK conducted supervision of Securities Companies, which included 91 Stock Exchange Member Securities Companies (PE AB) and 30 Non-Stock Exchange Member Securities Companies (PE Non AB). Additionally, OJK analyzed and monitored Underwriters involved in underwriting activities and monitored the monthly activity reports of Securities Companies through the Brokerage Activity Report (LKPPE).

4. *Supervision of Investment Management*

Investment management supervision in 2023 included Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CFT) examinations of 17 Investment Managers (MI); Risk-Based Supervision (RBS) examinations of four MIs in Q4 2023; monitoring of monthly Investment Manager reports as per Regulation No. X.N.1 on Monthly Activity Reports of Investment Managers; monitoring of the 2024 Business Plan Reports of Investment Managers; and monitoring of monthly MKBD reports for Minimum Capital Adequacy Ratio compliance.

5. *Supervision of Issuers And Public Companies*

Throughout 2023, OJK has conducted supervision of Issuers and Public Companies with the following details:

a. Supervision of Issuers and Public Companies was also carried out through monitoring the submission of periodic reports, as follows:

Tabel 4.17. Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahan Publik
Table 4.17. Issuers and Public Companies Periodic Reports Submission

Laporan Berkala	LKT 2022		LT 2022		LKTT 2022		*Periodic Report*
	EPP	%	EPP	%	EPP	%	
Tepat Waktu	640	69,57%	778	81,64%	791	82,22%	*On Time*
Terlambat	233	25,33%	126	13,22%	110	11,43%	*Late*
Belum Menyampaikan	47	5,11%	49	5,14%	61	6,34%	*Not Submitted*

b. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet selama tahun 2023, penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022.

b. Based on reports submitted through SPE-IDXnet in 2023, the submission of Public Offering Fund Usage Realization Reports was as follows:

1) Public Offering Fund Usage Realization Report as of December 31, 2022.

Tabel 4.18. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 31 Desember 2023
Table 4.18. Submission of Realization Report on Use of Public Offering Proceeds 31 December 2023

No	Laporan Berkala	LRPD		*Periodic Report*
		EPP	%	
1	Tepat Waktu	235	83,33%	*On Time*
2	Terlambat	47	16,67%	*Late*

2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023.

2) Public Offering Fund Usage Realization Report as of June 30, 2023.

Tabel 4.19. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 30 Juni 2023
Table 4.19. Submission of Realization Report on Use of Public Offering Proceeds 30 June 2023

No	Laporan Berkala	LRPD		*Periodic Report*
		EPP	%	
1	Tepat Waktu	265	95,67%	*On Time*
2	Terlambat	12	4,33%	*Late*

c. Selama 2023, OJK telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 3.382 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 206 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 990 hasil RUPS.

c. Throughout 2023, OJK monitored compliance with capital market regulations through 3,382 disclosure reports on material information or facts, 206 securities rating reports, and 990 GMS results.

6. Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada tahun 2023, OJK telah melakukan penelaahan atas 24 laporan perubahan data dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah, 22 laporan hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUSTPU), 19 laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit, empat laporan informasi material dari Agen Pemantau dan enam laporan lain-lain terkait EBUSTPU. Selanjutnya pada tahun 2023 juga telah dilakukan penelaahan atas 1.254 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:

6. Supervision Of Capital Market Supporting Professions

In 2023, OJK reviewed 24 reports on changes in data for starting and stopping as Sharia Supervisory Board members, 22 reports on the issuance of Debt Securities Without Public Offering (EBUSTPU), 19 reports on changes in EBUSTPU terms and conditions from issuers, four material information reports from Monitoring Agents, and six other related EBUSTPU reports. Additionally, in 2023, OJK reviewed 1,254 periodic reports from Capital Market Supporting Professions, including:

Tabel 4.20. Laporan Berkala Profesi Penunjang Pasar Modal
Table 4.20. Periodic Report on Capital Market Supporting Professionals

Nama Laporan	Tepat Waktu *On Time*	Terlambat *Late*	Dianggap Tidak Menyampaikan *Deemed Not Submitted*	Belum Menyampaikan *Not Submitted*	Jumlah *Total*	*Report Name*
Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2022	105	0	0	0	105	*Capital Market Sharia Expert Activity Report (LK-ASPM) 2022*
Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP)	114	1	1	0	116	*Public Accountant Service Provision Activity Report (LKPJ-KAP)*
Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2022	283	13	0	0	296	*Appraiser Activity Periodic Report (LBKP) 2022*
Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2022	265	4	5	21	295	*Notary Activity Periodic Report (LBKN) 2022*
Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2022	399	10	7	26	442	*Legal Consultant Activity Periodic Report (LBKKH) 2022*
Jumlah	**1.166**	**28**	**13**	**47**	**1.254**	***Total***

7. Pengawasan Pasar Modal Syariah

Pada 2023 telah dilakukan penelaahan atas 14 laporan tahunan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Pihak Penerbit DES berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Sampai akhir 2023, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan secara luring kepada satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah disampaikan kepada satu Pihak Penerbit DES.

7. Supervision Of Sharia Capital Market

In 2023, OJK reviewed 14 annual reports on the issuance of the Sharia Securities List (DES) by DES Issuers based on POJK No. 35/POJK.04/2017 on Criteria and Issuance of Sharia Securities List. By the end of 2023, OJK conducted on-site supervision of one DES Issuer and submitted the Examination Results Report (LHP) to one DES Issuer.

Dalam rangka pengawasan atas Pihak Penerbit DES, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Kriteria Daftar Efek Syariah, selama 2023, terdapat satu pihak yang menyatakan tidak lagi menjadi Pihak Penerbit DES. Di sisi lain, terdapat tiga pihak baru yang menjadi Pihak Penerbit DES selama 2023. Pada akhir Desember 2023, terdapat 14 Pihak Penerbit DES, yaitu:

a. PT Principal Asset Management;
b. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia;
c. PT BNP Paribas Asset Management;
d. PT Schroder Investment Management Indonesia;
e. PT Bahana TCW Investment Management;
f. PT Mandiri Manajemen Investasi;
g. PT Eastspring Investments Indonesia;
h. PT Samuel Aset Manajemen;
i. PT Danareksa Investment Management;
j. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen;
k. PT Surya Timur Alam Raya Asset Management;
l. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia;
m. PT Sucorinvest Asset Management; dan
n. PT KISI Asset Management.

8. Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis

a. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga SRO dan satu Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)

b. Pemeriksaan Perusahaan Efek

Pada triwulan I-III 2023 telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap 32 Perusahaan Efek dimana 13 Perusahaan Efek telah memenuhi seluruh rekomendasi temuan dan 19 Perusahaan Efek sedang dalam tahap *monitoring* pemenuhan temuan. Pada triwulan IV-2023 dilakukan pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap 11 Perusahaan Efek, di mana satu Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Supervision* (RBS) dan pada 10 Perusahaan Efek dengan fokus *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan IV-2023, telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada enam Perusahaan Efek dan lima Perusahaan Efek sedang dalam tahapan penyusunan LHP.

c. Pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama 2023, terdapat 48 Surat Tugas Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan indikasi pelanggaran antara lain terkait transaksi material, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik hingga kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

For DES Issuer supervision, based on POJK No. 35/POJK.04/2017 on Issuance and Criteria of Sharia Securities List, one party declared to no longer be a DES Issuer in 2023, while three new parties became DES Issuers in 2023. As of the end of December 2023, there are 14 DES Issuers, namely:

a. PT Principal Asset Management;
b. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia;
c. PT BNP Paribas Asset Management;
d. PT Schroder Investment Management Indonesia;
e. PT Bahana TCW Investment Management;
f. PT Mandiri Manajemen Investasi;
g. PT Eastspring Investments Indonesia;
h. PT Samuel Aset Manajemen;
i. PT Danareksa Investment Management;
j. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen;
k. PT Surya Timur Alam Raya Asset Management;
l. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia;
m. PT Sucorinvest Asset Management; and
n. PT KISI Asset Management.

8. Compliance And Technical Examinations

a. Examination of Securities Institutions

In 2023, examinations were conducted on five SROs, two Investor Protection Fund Managers (PDPP).

b. Examination of Securities Companies

From first quarter to third quarter of 2023, examination reports for 32 Securities Companies were completed, with 13 meeting all recommendations and 19 under monitoring for compliance. In Q4 2023, on-site compliance examinations were conducted on 11 Securities Companies, focusing on Risk-Based Supervision (RBS) for one company and Risk-Based Approach Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (RBA APU PPT) for 10 companies. By the end of Q4 2023, Examination Results Reports (LHP) were submitted to six companies, and five companies were in the LHP preparation stage.

c. Examination of Issuers and Public Companies

In 2023, 48 Examination Orders were issued for suspected violations related to Issuers and Public Companies, including material transactions, public offering fund usage realization, affiliate transactions and conflicts of interest, disclosure of material information or facts by Issuers or Public Companies, and compliance with other relevant Capital Market regulations.

d. Pemeriksaan Lembaga Penunjang

Sampai akhir 2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *onsite* di tahun 2023 bagi lembaga penunjang Pasar Modal yaitu pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap delapan Bank Kustodian, satu Biro Administrasi Efek, dua Perusahaan Pemeringkat Efek, satu Penerbit Daftar Efek Syariah, delapan Layanan Urun Dana beserta sampel penerbitnya, dan satu Wali Amanat serta telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan *onsite* yang telah dilaksanakan.

d. Examination of Supporting Institutions

By the end of 2023, on-site compliance and technical examinations were conducted for Capital Market supporting institutions, including eight Custodian Banks, one Securities Administration Bureau, two Securities Rating Companies, one Sharia Securities List Issuer, eight Crowdfunding Services and sample issuers, and one Trustee. Examination Results Reports were completed for the on-site examinations conducted.

e. Pemeriksaan Profesi Penunjang

Sampai dengan triwulan IV–2023, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

e. Examination of Supporting Professions

As of the fourth quarter of 2023, OJK conducted examinations of Capital Market Supporting Professions as follows:

Tabel 4.21. Pemeriksaan Profesi Penunjang Pasar Modal
Table 4.21. Examination of Capital Market Supporting Professionals

Profesi	Pemeriksaan Tahun 2023 *Year 2023 Examination*	Dalam Proses Pemeriksaan *During the Examination Process*	Telah Selesai *Completed*	*Profession*
Akuntan Publik (AP)	9	8	1	*Public Accountant*
Kantor Akuntan Publik (KAP)	7	1	6	*Public Accounting Firm*
Penilai	14	0	14	*Appraiser*
Konsultan Hukum (KH)	9	0	9	*Legal Consultant*
Notaris	7	0	7	*Notary*
Jumlah	**46**	**9**	**37**	***Total***

9. Pengendalian Kualitas Pasar Modal

Dimulai 1 Februari 2023, OJK telah melakukan transformasi kelembagaan dan bersinergi dalam penguatan proses bisnis internal, termasuk pengawasan sektor Pasar Modal. Salah satu bentuk transformasi kelembagaan dan penguatan proses bisnis internal dimaksud adalah membentuk fungsi baru terkait peningkatan pengendalian kualitas (*quality assurance*) pengawasan Pasar Modal yang bertujuan memperkuat pengendalian kualitas (*quality control*) yang telah dilaksanakan oleh pengawas Pasar Modal.

Atas pelaksanaan fungsi tersebut di atas, OJK telah menetapkan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 1/SEDK.04/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Melalui Forum Panel Dalam Rangka Pengawasan Berdasarkan Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek (SEDK 1 Tahun 2023) pada tanggal 27 Juli 2023 yang mencabut Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengendalian Kualitas Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengawasan Berdasarkan Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek (*Quality Assurance*).

Selanjutnya, telah diselenggarakan pengendalian kualitas melalui Forum Panel dalam rangka pengawasan berdasarkan risiko Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek terhadap dua Perusahaan Efek.

9. Capital Market Quality Control

Starting February 1, 2023, OJK has undergone institutional transformation and synergized in strengthening internal business processes, including capital market supervision. One form of this transformation and internal business process strengthening is the establishment of a new function related to quality control (quality assurance) of capital market supervision to enhance the quality control conducted by capital market supervisors.

For this function, OJK issued Circular Letter of the Board of Commissioners (SEDK) No. 1/SEDK.04/2023 on Guidelines for Quality Control Implementation through Panel Forums in Risk-Based Supervision of Securities Companies Acting as Underwriters and/or Broker-Dealers who are Stock Exchange Members (SEDK 1 of 2023) on July 27, 2023, which revokes OJK Circular Letter No. 8/SEDK.04/2019 on Quality Control Guidelines in Risk-Based Supervision Stages of Securities Companies Acting as Underwriters and Broker-Dealers who are Stock Exchange Members (Quality Assurance).

Subsequently, quality control was conducted through Panel Forums for risk-based supervision of Securities Companies acting as Underwriters and/or Broker-Dealers who are Stock Exchange Members for two Securities Companies.

IV.3.3.Aktivitas Perizinan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Licensing Activities in the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange

1. Perizinan Perusahaan Efek

Selama 2023, terdapat perubahan jumlah Perusahaan Efek (PE), yaitu penambahan dua PE dan pengurangan dua PE, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK per akhir tahun 2023 tetap sebanyak 121 PE.

1. *Licensing of Securities Companies*

In 2023, there was a change in the number of Securities Companies (SC), with an addition of two SCs and a reduction of two SCs, resulting in a total of 121 SCs registered with OJK by the end of 2023.

Tabel 4.22. Jumlah Perusahaan Efek Pada Akhir Tahun 2023
Table 4.22. Number of Securities Companies at the End of 2023

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah | *Total*	*Type of Business License*
1	Perantara Pedagang Efek	32	*Brokerage*
2	Penjamin Emisi Efek*	8	*Underwriter**
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	77	*Brokerage + Underwriter*
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1	*Brokerage + Investment Manager*
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-	*Underwriter + Investment Manager*
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3	*Brokerage + Underwriter + Investment Manager*
	Jumlah	**121**	***Total***

* Catatan: Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek.
** Note: Specific license for Underwriters not conducting brokerage activities.*

Hingga akhir 2023, jumlah Perusahaan Efek Daerah (PED) masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak satu (PT BJB Sekuritas Jawa Barat). PED tersebut memiliki izin Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah.

As of the end of 2023, the number of Regional Securities Companies (RSC) remained the same as in 2022, with one (PT BJB Sekuritas Jawa Barat). This RSC has a brokerage license that administers customer securities accounts.

2. Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Pada 2023, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 950 izin dengan rincian 191 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), 60 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 686 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P), dan 13 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT).

2. *Licensing of Brokerage Representatives and Underwriter Representatives*

In 2023, OJK issued 950 individual licenses, consisting of 191 Brokerage Representatives (WPPE), 60 Underwriter Representatives (WPEE), 686 Marketing Brokerage Representatives (WPPE-P), and 13 Limited Marketing Brokerage Representatives (WPPE-PT).

Tabel 4.23. Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 4.23. Licensing Process for Brokerage Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin	2022		2023		*Type of License*
	Dokumen yang Masuk *Documents Received*	Pemberian Izin *Licenses Issued*	Dokumen yang Masuk *Documents Received*	Pemberian Izin *Licenses Issued*	
WPPE	1.291	382	396	191	*WPPE*
WPEE	916	81	61	60	*WPEE*
WPPE-P	450	470	1.397	686	*WPPE-P*
WPPE-PT	224	3	17	13	*WPPE-PT*
Jumlah	**2.881**	**936**	**1.871**	**950**	***Total***

OJK menerbitkan 1.814 perpanjangan izin dengan rincian 1.628 perpanjangan izin WPPE dan 186 perpanjangan izin WPEE.

OJK issued 1,814 license renewals, consisting of 1,628 WPPE renewals and 186 WPEE renewals.

Tabel 4.24. Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 4.24. License Renewal Process for Brokerage Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin	2022		2023		*Type of License*
	Dokumen yang Masuk *Documents Received*	Pemberian Izin *Licenses Issued*	Dokumen yang Masuk *Documents Received*	Pemberian Izin *Licenses Issued*	
WPPE	1.647	1.647	2.264	1.628	*WPPE*
WPEE	321	321	194	186	*WPEE*
Jumlah	**2.030**	**1.968**	**2.458**	**1.814**	***Total***

3. Perizinan Industri Pengelolaan Investasi

Pada akhir 2023, jumlah produk Reksa Dana (termasuk ETF) mencapai 1.809 produk dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp501,46 triliun. Dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya, jumlah dan produk Reksa Dana tersebut menurun sebesar -14,67%. Penurunan jumlah produk juga dialami Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Efek Beragun Aset (EBA) di mana masing-masing mengalami penurunan sebesar -20,34% dan -22,22% dibandingkan jumlah produk pada akhir tahun sebelumnya.

3. Licensing of Investment Management Industry

By the end of 2023, the number of Mutual Fund products (including ETFs) reached 1,809 products with a Net Asset Value (NAV) of IDR 501.46 trillion. Compared to the previous year's end, the number and products of Mutual Funds decreased by -14.67%. The number of Limited Participation Mutual Funds (RDPT) and Asset-Backed Securities (EBA) also decreased by -20.34% and -22.22%, respectively, compared to the previous year's end.

Tabel 4.25. Jumlah Produk Pengelolaan Investasi
Table 4.25. Number of Investment Management Products

Jenis Investasi	2022				2023				*Investment Type*
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Reksa Dana (termasuk ETF)	2.194	2.186	2.178	2.120	2.025	1.967	1.925	1.809	*Mutual Funds (including ETFs)*
RDPT	60	54	59	59	59	52	52	47	*RDPT*
EBA	9	9	9	9	6	6	7	7	*EBA*
EBA-SP	7	7	7	8	8	9	9	10	*EBA-SP*
DIRE	7	7	7	7	7	7	8	8	*DIRE*
KPD	613	619	661	752	753	752	803	800	*KPD*
DINFRA	8	8	8	8	8	8	8	8	*DINFRA*
TAPERA	21	21	27	27	28	28	28	28	*TAPERA*

Sampai akhir 2023, OJK telah menerbitkan 158 Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran Umum.

By the end of 2023, OJK issued 158 effective statements for the registration of Mutual Funds offered through Public Offerings.

Tabel 4.26. Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
Table 4.26. Types of Mutual Funds That Received Effective Statements

Jenis Reksa Dana	**Jumlah Surat Efektif** | *Number of Effective Statements*	*Type of Mutual Fund*
Reksa Dana Saham	3	*Equity Mutual Fund*
Reksa Dana Campuran	5	*Mixed Mutual Fund*
Reksa Dana Pendapatan Tetap	11	*Fixed Income Mutual Fund*
Reksa Dana Pasar Uang	10	*Money Market Mutual Fund*

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif | *Number of Effective Statements*	*Type of Mutual Fund*
Reksa Dana Terproteksi	84	*Protected Mutual Fund*
Reksa Dana Indeks	8	*Index Mutual Fund*
ETF-Indeks	2	*ETF-Index*
ETF-Pendapatan Tetap	1	*ETF-Fixed Income*
Reksa Dana Syariah Terproteksi	19	*Sharia Protected Mutual Fund*
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2	*Sharia Money Market Mutual Fund*
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	8	*Sharia Fixed Income Mutual Fund*
Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri	4	*Sharia Foreign Securities Mutual Fund*
Reksa Dana Syariah Indeks	1	*Sharia Index Mutual Fund*
Jumlah	**158**	***Total***

OJK juga telah menerbitkan 469 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 434 Reksa Dana Konvensional dan 35 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

a. 24 Reksa Dana Campuran terdiri dari 13 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian (BK) serta 11 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
b. 5 Reksa Dana Indeks terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 4 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
c. 4 ETF-Indeks terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 1 Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
d. 36 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 11 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 20 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan 5 Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
e. 42 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 23 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 15 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan 4 Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
f. 17 Reksa Dana Saham terdiri dari 5 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 12 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
g. 4 Reksa Dana ETF-Indeks terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 1 Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
h. 3 Reksa Dana ETF-Saham terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 2 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
i. 303 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 269 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 33 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan, dan 1 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
j. 2 Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.

OJK also issued 469 dissolution letters for Mutual Funds, consisting of 434 Conventional Mutual Funds and 35 Sharia Mutual Funds. The details of the dissolution are as follows:

a. 24 Mixed Mutual Funds, with 13 dissolved by agreement between the Investment Manager (MI) and Custodian Bank (BK) and 11 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
b. 5 Index Mutual Funds, with 1 dissolved by agreement between MI and BK and 4 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
c. 4 ETF-Index, with 3 dissolved by agreement between MI and BK and 1 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
d. 36 Money Market Mutual Funds, with 11 dissolved by agreement between MI and BK, 20 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days, and 5 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
e. 42 Fixed Income Mutual Funds, with 23 dissolved by agreement between MI and BK, 15 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days, and 4 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
f. 17 Equity Mutual Funds, with 5 dissolved by agreement between MI and BK and 12 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
g. 4 ETF-Index, with 3 dissolved by agreement between MI and BK and 1 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
h. 3 ETF-Equity, with 1 dissolved by agreement between MI and BK and 2 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
i. 303 Protected Mutual Funds, with 269 dissolved by agreement between MI and BK, 33 due to failure to meet the minimum managed funds requirement, and 1 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
j. 2 Sharia Foreign Securities Mutual Funds dissolved due to failure to meet the minimum managed funds requirement.

k. 3 Reksa Dana Syariah Indeks terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 2 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
l. 11 Reksa Dana Syariah Pasar Uang terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 9 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan 1 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
m. 6 Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 2 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan 1 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
n. 1 Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
o. 10 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 4 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 6 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
p. 2 Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Sukuk terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 1 Reksa Dana dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.

k. 3 Sharia Index Mutual Funds, with 1 dissolved by agreement between MI and BK and 2 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
l. 11 Sharia Money Market Mutual Funds, with 1 dissolved by agreement between MI and BK, 9 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days, and 1 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
m. 6 Sharia Protected Mutual Funds, with 3 dissolved by agreement between MI and BK, 2 due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days, and 1 due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
n. 1 Sharia Equity Mutual Fund dissolved due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.
o. 10 Sharia Protected Mutual Funds, with 4 dissolved by agreement between MI and BK and 6 dissolved due to failure to meet the minimum managed funds requirement.
p. 2 Sharia Sukuk-Based Mutual Funds, with 1 dissolved by agreement between MI and BK and 1 dissolved due to managed funds totaling less than IDR10 billion for 120 consecutive trading days.

Sementara itu, jumlah Wakil Manajer Investasi (WMI) yang aktif per akhir 2023 sebanyak 3.153. Kemudian, jumlah Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) yang aktif per akhir tahun 2023 sebanyak 9.423. Adapun jumlah Penasihat Investasi (PI) Orang Perseorangan per akhir tahun 2023 sebanyak 9 PI.

As of the end of 2023, there were 3,153 active Investment Manager Representatives (WMI), 9,423 active Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD), and 9 Individual Investment Advisors (PI) registered by the end of 2023.

Untuk perkembangan jumlah Pelaku Institusi Industri Pengelolaan Investasi, terdapat dua MI yang dicabut izinnya pada tahun 2023 sehingga jumlah MI pada akhir tahun 2023 sebanyak 94 MI. Namun demikian, jumlah MI sebagai PI institusi bertambah dibandingkan akhir tahun 2022 menjadi sebanyak 21 MI.

Regarding the development of institutional players in the Investment Management Industry, two MIs had their licenses revoked in 2023, resulting in 94 MIs by the end of the year. However, the number of MIs as institutional PIs increased compared to the end of 2022, totaling 21 MIs.

Selanjutnya untuk perkembangan jumlah APERD, pada tahun 2023 terdapat pencatatan dua PE sebagai APERD sehingga jumlah PE sebagai APERD bertambah menjadi 29. Sementara itu untuk APERD berupa Bank dan PPE Khusus, pada tahun 2023 terdapat dua penerbitan STTD APERD bagi Bank, dua penerbitan Izin Usaha PPE Khusus APERD dan satu pencabutan Izin Usaha PPE Khusus APERD, sehingga jumlah APERD berupa Bank dan PPE Khusus adalah sebanyak 53.

For the development of APERD (Mutual Fund Selling Agents), two PE companies were registered as APERD in 2023, increasing the number of PEs as APERD to 29. Meanwhile, for APERD in the form of Banks and Special Investment Managers, in 2023 there were two STTD APERD issuances for Banks, two APERD Special Investment Manager Business Licenses issued, and one APERD Special Investment Manager Business License revoked, resulting in a total of 53 APERD in the form of Banks and Special Investment Managers.

Tabel 4.27. Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Table 4.27. Development of Licensed Players in the Investment Management Industry

Jenis Pelaku	2022				2023				*Type of Player*
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Individu									***Individual***
Wakil Manajer Investasi (WMI)	3.419	3.492	3.542	3.589	3.001	3.053	3.091	3.153	*Investment Manager Representatives (WMI)*
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)*	23.772	23.791	23.802	23.840	9.222	9.252	9.306	9.423	*Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)**
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	6	8	8	9	9	*Investment Advisors (PI)*

Jenis Pelaku	2022				2023				*Type of Player*
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Institusi									***Institution***
Manajer Investasi (MI)	97	96	96	96	95	95	94	94	*Investment Managers (MI)*
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)									*Mutual Fund Selling Agents (APERD)*
• Bank dan PPE Khusus	49	49	49	50	50	50	50	53	*Banks and Special Investment Managers*
• PE sebagai APERD	27	27	27	27	28	28	29	29	*PE as APERD*
Penasehat Investasi (PI)	8	8	8	8	8	8	8	8	*Investment Advisors (PI)*
MI sebagai PI	18	18	18	19	19	19	21	21	*MI as PI*
APERD sebagai PI	3	3	3	3	3	3	3	3	*APERD as PI*

*Untuk tahun 2023 hanya izin WMI dan WAPERD yang masih aktif | ** For 2023, only active WMI and WAPERD licenses are counted.*

4. Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama 2023, OJK telah memproses penghimpunan dana melalui penawaran umum baik berupa Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) Saham, Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*), maupun Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama 2023, terdapat 78 perusahaan yang Pernyataan Pendaftarannya dalam rangka PUP Saham telah memperoleh Pernyataan Efektif, dengan total nilai emisi sebesar Rp54,33 triliun.

4. Licensing of Issuers and Public Companies

In 2023, OJK processed fundraising activities through public offerings, including Initial Public Offerings (IPO), Rights Issues, and Public Offerings of Debt/Sukuk Securities, with the following details:

a. Initial Public Offerings (IPO)

In 2023, 78 companies obtained effective registration statements for their IPOs, with a total emission value of IDR 54.33 trillion.

Tabel 4.28. Rekapitulasi Penawaran Umum Perdana Saham
Table 4.28. Summary of Initial Public Offerings

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Tanggal Listing *Listing Date*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT Penta Valent Tbk	13-Jan-23	24-Jan-23	353.125.000	52,62
2.	PT Jasa Berdikari Logistics Tbk	18-Jan-23	27-Jan-23	700.000.000	70,00
3.	PT Wijaya Cahaya Timber Tbk	24-Jan-23	01-Feb-23	375.000.000	44,25
4.	PT Aviana Sinar Abadi Tbk	30-Jan-23	07-Feb-23	1.000.000.000	101,00
5.	PT Vastland Indonesia Tbk	30-Jan-23	08-Feb-23	650.000.000	70,20
6.	PT Hassana Boga Sejahtera Tbk	30-Jan-23	06-Feb-23	510.000.000	51,00
7.	PT Haloni Jane Tbk	31-Jan-23	08-Feb-23	1.130.000.000	113,00
8.	PT Solusi Kemasan Digital Tbk	31-Jan-23	08-Feb-23	308.000.000	49,90
9.	PT Pelita Teknologi Global Tbk	31-Jan-23	08-Feb-23	200.000.000	32,00
10.	PT Hoffmen Cleanindo Tbk	08-Feb-23	16-Feb-23	520.000.000	67,60
11.	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	16-Feb-23	24-Feb-23	10.350.000.000	9.056,25
12.	PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk	17-Feb-23	27-Feb-23	1.278.000.000	127,80
13.	PT Hillcon Tbk	21-Feb-23	01-Mar-23	442.300.000	552,88
14.	PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	23-Feb-23	03-Mar-23	706.100.000	141,22
15.	PT Mitra Pack Tbk	23-Feb-23	06-Mar-23	800.000.000	96,00

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Tanggal Listing *Listing Date*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Nilai Emisi* *Emission Value**
16.	PT Saptausaha Gemilangindah Tbk	28-Feb-23	08-Mar-23	1.610.000.000	161,00
17.	PT Petrindo Jaya Kreasi	28-Feb-23	08-Mar-23	1.690.000.000	371,80
18.	PT Teknologi Karya Digital Nusa	28-Feb-23	08-Mar-23	750.000.000	135,00
19.	PT Nusantara Sawit Sejahtera	28-Feb-23	10-Mar-23	3.568.235.300	453,17
20.	PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk	17-Mar-23	30-Mar-23	378.875.000	56,83
21.	PT Arsy Buana Travelindo Tbk	24-Mar-23	05-Apr-23	687.100.000	96,19
22.	PT Multi Makmur Lemindo Tbk	31-Mar-23	10-Apr-23	925.000.000	97,13
23.	PT Trimegah Bangun Persada	03-Apr-23	12-Apr-23	7.997.600.000	9.997,00
24.	PT Era Digital Media Tbk	10-Apr-23	18-Apr-23	750.000.000	75,00
25.	PT MENN Teknologi Indonesia Tbk	10-Apr-23	18-Apr-23	430.200.000	33,56
26.	PT Merdeka Battery Materials Tbk	11-Apr-23	18-Apr-23	11.000.000.000	8.745,00
27.	PT Tripar Multivision Plus Tbk.	28-Apr-23	08-Mei-23	929.200.000	217,43
28.	PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk	28-Apr-23	08-Mei-23	652.500.000	65,25
29.	PT King Tire Indonesia	28-Apr-23	08-Mei-23	700.000.000	96,60
30.	PT Era Media Sejahtera	28-Apr-23	08-Mei-23	1.547.500.000	154,75
31.	PT MPX Logistics International Tbk	28-Apr-23	09-Mei-23	400.000.000	43,20
32.	PT Sarana Mitra Luas Tbk	04-Mei-23	12-Mei-23	1.750.000.000	175,00
33.	PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk	31-Mei-23	12-Jun-23	540.000.000	78,84
34.	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk	31-Mei-23	12-Jun-23	1.000.000.000	100,00
35.	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	12-Jun-23	19-Jun-23	8.750.000.000	875,00
36.	PT Graha Mitra Asia Tbk	13-Jun-23	22-Jun-23	1.200.000.000	108,00
37.	PT Carsurin Tbk	27-Jun-23	10-Jul-23	600.000.000	75,00
38.	PT Amman Mineral Internasional Tbk	27-Jun-23	07-Jul-23	6.328.208.800	10.726,31
39.	PT Graha Prima Mentari	27-Jun-23	10-Jul-23	309.000.000	37,08
40.	PT Platinum Wahab Nusantara Tbk	27-Jun-23	10-Jul-23	1.071.429.000	117,86
41.	PT Widiant Jaya Krenindo Tbk	27-Jun-23	10-Jul-23	400.000.000	40,00
42.	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk	14-Jul-23	24-Jul-23	1.500.000.000	151,50
43.	PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk	14-Jul-23	25-Jul-23	4.166.000.000	491,59
44.	PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk	21-Jul-23	31-Jul-23	250.000.000	112,50
45.	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	25-Jul-23	02-Agu-23	8.335.000.000	2.250,45
46.	PT Minahasa Membangun Hebat Tbk	28-Jul-23	07-Agu-23	240.740.800	26,00
47.	PT Multi Garam Utama	31-Jul-23	07-Agu-23	570.000.000	57,00
48.	PT Sinar Eka Selaras Tbk	31-Jul-23	08-Agu-23	1.037.500.000	404,63
49.	PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk	31-Jul-23	08-Agu-23	1.725.000.000	207,00
50.	PT ITSEC Asia Tbk.	31-Jul-23	08-Agu-23	1.008.734.800	100,87
51.	PT Humpuss Maritim Internasional Tbk	31-Jul-23	09-Agu-23	2.707.000.000	270,70
52.	PT Mutuagung Lestari Tbk	31-Jul-23	09-Agu-23	942.857.200	101,83
53.	PT Paperocks Indonesia Tbk	31-Jul-23	09-Agu-23	275.000.000	38,50
54.	PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk	31-Jul-23	09-Agu-23	195.000.000	39,00
55.	PT Multisarana Intan Eduka Tbk	31-Jul-23	10-Agu-23	360.000.000	36,00

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Tanggal Listing *Listing Date*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Nilai Emisi* *Emission Value**
56.	PT Charlie Hospital Semarang Tbk	18-Agu-23	28-Agu-23	530.000.000	60,95
57.	PT Multitrend Indo Tbk	30-Agu-23	07-Sep-23	534.000.000	142,04
58.	PT Anugerah Spareperats Sejahtera Tbk	31-Agu-23	11-Sep-23	400.000.000	40,00
59.	PT Kokoh Exa Nusantara Tbk	26-Sep-23	07-Okt-23	450.000.000	54,00
60.	PT Sumber Sinergi Makmur Tbk	27-Sep-23	06-Okt-23	1.100.000.000	110,00
61.	PT Barito Renewables Energy Tbk	29-Sep-23	09-Okt-23	4.015.000.000	3.131,70
62.	PT Lovina Beach Brewery Tbk	29-Sep-23	10-Okt-23	1.180.000.000	118,00
63.	PT Koka Indonesia Tbk	29-Sep-23	11-Okt-23	715.333.000	91,56
64.	PT Logisticsplus International Tbk	29-Sep-23	11-Okt-23	300.000.000	30,00
65.	PT Pulau Subur Tbk	29-Sep-23	09-Okt-23	450.000.000	89,10
66.	PT Agro Bahari Nusantara Tbk	19-Okt-23	31-Okt-23	500.000.000	50,00
67.	PT Kian Santang Muliatama Tbk	31-Okt-23	08-Nov-23	334.200.000	40,10
68.	PT Ikapharmindo Putramas Tbk	31-Okt-23	08-Nov-23	336.932.500	55,59
69.	PT Mastersystem Infotama Tbk	31-Okt-23	08-Nov-23	470.823.600	637,97
70.	PT Janu Putra Sejahtera Tbk	22-Nov-23	30-Nov-23	800.000.000	80,00
71.	PT Maja Agung Latexindo Tbk	30-Nov-23	07-Des-23	1.266.875.000	215,37
72.	PT Asri Karya Lestari Tbk	27-Des-23	05-Jan-24	1.250.000.000	125,00
73.	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	29-Des-23	09-Jan-24	1.216.404.000	532,78
74.	PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk	29-Des-23	10-Jan-24	465.625.000	81,48
75.	PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk	29-Des-23	11-Jan-24	693.828.000	74,93
76.	PT Manggung Polahraya Tbk	29-Des-23	11-Jan-24	762.500.000	76,25
77.	PT Citra Nusantara Gemilang Tbk	29-Des-23	08-Jan-24	531.429.000	179,62
78.	PT Multi Spunindon Jaya Tbk	29-Des-23	10-Jan-24	882.352.900	264,71
	Jumlah | *Total*				**54.326,44**

*Rp Miliar | *Rp Billion*

b. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Selama 2023, terdapat 25 Penawaran Umum Terbatas yang telah efektif, dengan total nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* sebesar Rp56,18 triliun.

b. Rights Issues

In 2023, 25 Rights Issues were effective, with a total emission value of IDR56.18 trillion.

Tabel 4.29. Rekapitulasi Penawaran Umum Terbatas
Table 4.29. Summary of Rights Issues

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT Pan Brothers Tbk	05-Jan-23	15.003.732.635	750,19
2.	PT Batavia Prosperindo Trans	11-Jan-23	1.984.000.000	198,40
3.	PT Sentul City Tbk	18-Jan-23	100.625.341.623	5.031,27
4.	PT Kimia Farma Tbk	31-Jan-23	325.108.944	333,24
5.	PT MNC Digital Entertainment Tbk	31-Jan-23	1.144.440.000	5.607,76
6.	PT Bank Nationalnobu Tbk	01-Feb-23	681.819.174	403,64

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Nilai Emisi* *Emission Value**
7.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	27-Feb-23	753.835.219	452,30
8.	PT Bank of India Indonesia Tbk	30-Mar-23	2.388.861.478	2.388,86
9.	PT Bank QNB Indonesia Tbk	28-Apr-23	14.721.362.381	3.680,34
10.	PT Bank KB Bukopin Tbk	05-Mei-23	119.999.999.692	12.000,00
11.	PT Midi Utama Indonesia Tbk	22-Jun-23	4.611.764.800	1.245,18
12.	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	27-Jun-23	499.999.477	500,00
13.	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	27-Jun-23	600.000.000	240,00
14.	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	27-Jun-23	1.224.822.231	857,38
15.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	27-Jun-23	13.814.688.390	1.381,47
16.	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	27-Jun-23	2.000.000.000	336,00
17.	PT Matahari Putra Prima Tbk	27-Jun-23	6.875.236.268	550,02
18.	PT Wicaksana Overseas International Tbk	27-Jun-23	1.400.000.000	140,00
19.	PT Bank Nationalnobu Tbk	28-Jul-23	2.195.165.124	900,02
20.	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	25-Okt-23	9.482.346.921	3.508,47
21.	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	22-Nov-23	2.097.150.000	10.485,75
22.	PT Bank MNC Internasional Tbk	05-Des-23	13.503.665.292	1.012,77
23.	PT Panorama Sentrawisata Tbk	20-Des-23	187.500.000	75,00
24.	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	29-Des-23	26.741.153.601	4.011,17
25.	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk	29-Des-23	584.775.000	87,72
	Jumlah | *Total*			**56.176,93**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

c. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Selama 2023, terdapat 17 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, 42 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 61 Perusahaan yang telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi PUB EBUS tersebut sebesar Rp144,88 triliun, termasuk emisi PUB EBUS dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang telah dikonversi ke Rupiah.

c. Public Offerings of Debt/Sukuk Securities (EBUS)

In 2023, 17 companies conducted EBUS Public Offerings, 42 companies conducted Phase I of Continuous Public Offerings (PUB) of EBUS, and 61 companies conducted Phase II and subsequent PUB of EBUS. The total emission value of these PUB EBUS amounted to IDR144.88 trillion, including PUB EBUS emissions denominated in US dollars converted to Rupiah.

Tabel 4.30. Rekapitulasi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (Obligasi)
Table 4.30. Summary of Public Offerings of Debt Securities (Bonds)

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT Danareksa (Persero)	30-Jan-23	Obligasi | *Bonds*	1.000,00
2.	PT TBS Energi Utama Tbk d.h. PT Toba Bara Sejahtra Tbk	23-Feb-23	Obligasi | *Bonds*	500,00
3.	PT KB Finansia Multi Finance	19-Jun-23	Obligasi | *Bonds*	1.000,00
4.	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	26-Jun-23	Obligasi | *Bonds*	500,00
5.	PT BRI Multifinance Indonesia	27-Jun-23	Obligasi | *Bonds*	500,00
6.	PT Hino Finance Indonesia	27-Jun-23	Obligasi | *Bonds*	700,00

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**
7.	PT Arkora Hydro Tbk	31-Jul-23	Obligasi Berwawasan Lingkungan *Green Bonds*	339,90
8.	PT Wahana Inti Selaras	31-Jul-23	Obligasi | *Bonds*	2.433,60
9.	PT Adhi Commuter Properti Tbk	30-Nov-23	Obligasi | *Bonds*	499,90
10.	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	20-Des-23	Obligasi | *Bonds*	1.500,00
11.	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	27-Des-23	Obligasi | *Bonds*	3.000,00
12.	PT Indonesia Infrastructure Finance	29-Des-23	Obligasi | *Bonds*	335,19
13.	PT Danareksa Persero	29-Des-23	Obligasi | *Bonds*	1.000,00
14.	PT Nirmala Taruna	29-Des-23	Obligasi | *Bonds*	1.500,00
	Jumlah | *Total*			**14.808,59**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

Tabel 4.31. Rekapitulasi Penawaran Umum Sukuk
Table 4.31. Summary of Public Offerings of Sukuk

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT CIMB Niaga Auto Finance	30-Jan-23	Sukuk | *Sukuk*	1.000,00
2.	PT Armadian Tritunggal	20-Nov-23	Sukuk | *Sukuk*	2.000,00
3.	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	27-Des-23	Sukuk | *Sukuk*	1.000,00
	Jumlah | *Total*			**4.000,00**

Tabel 4.32. Rekapitulasi Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang (Obligasi) Tahap I
Table 4.32. Summary of Phase I Continuous Public Offerings of Debt Securities (Bonds)

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi | *Emission Value**	
				Rp*	USD
1.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	03-Jan-23	PUB Obligasi III Tahap I | *PUB Bonds III Phase I*	450,00	-
2.	PT Barito Pacific Tbk	31-Jan-23	PUB Obligasi III Tahap I | *PUB Bonds III Phase I*	1.000,00	-
3.	PT Sinar Mas Multifinance	31-Jan-23	PUB Obligasi III Tahap I | *PUB Bonds III Phase I*	1.000,00	-
4.	PT Bank Victoria International Tbk	28-Feb-23	PUB Obligasi III Tahap I | *PUB Bonds III Phase I*	500,00	-
5.	PT Provident Investasi Bersama Tbk	17-Mar-23	PUB Obligasi I Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	750,00	-
6.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	27-Mar-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds II Phase I*	500,00	-
7.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	29-Mar-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds II Phase I*	250,00	-
8.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21-Jun-23	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap I *PUB Green Bonds I Phase I*	5.000,00	-
9.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	23-Jun-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds II Phase I*	3.000,00	-
10.	PT Astra Sedaya Finance	26-Jun-23	PUB Obligasi VI Tahap I | *PUB Bonds VI Phase I*	2.500,00	-
11.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	26-Jun-23	PUB Obligasi I Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	408,80	-
12.	PT Oto Multiartha	26-Jun-23	PUB Obligasi I Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	500,00	-
13.	PT Mandiri Tunas Finance	27-Jun-23	PUB Obligasi VI Tahap I | *PUB Bonds VI Phase I*	691,74	-

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi | *Emission Value**	
				Rp*	USD
14.	PT Toyota Astra Financial Services	27-Jun-23	PUB Obligasi IV Tahap I | *PUB Bonds IV Phase I*	1.500,00	-
15.	PT Federal International Finance	27-Jun-23	PUB Obligasi VI Tahap I | *PUB Bonds VI Phase I*	1.000,00	-
16.	PT Medco Energi Internasional Tbk	27-Jun-23	PUB Obligasi V Tahap I | *PUB Bonds V Phase I*	1.000,00	-
17.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	27-Jun-23	PUB Obligasi VI Tahap I | *PUB Bonds VI Phase I*	1.700,00	-
18.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	27-Jun-23	PUB Obligasi IV Tahap I | *PUB Bonds IV Phase I*	3.250,00	-
19.	PT Global Mediacom Tbk	27-Jun-23	PUB Obligasi IV Tahap I | *PUB Bonds IV Phase I*	850,00	-
20.	PT Sarana Multigriya Finansial	27-Jun-23	PUB Obligasi VII Tahap I | *PUB Bonds VII Phase I*	1.500,00	-
21.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	27-Jun-23	PUB Obligasi VI Tahap I | *PUB Bonds VI Phase I*	1.500,00	-
22.	PT Voksel Electric Tbk	27-Sep-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds II Phase I*	250,00	-
23.	PT MNC Energy Investments Tbk	27-Sep-23	PUB Obligasi I Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	500,00	-
24.	PT Samator Indo Gas Tbk	29-Sep-23	PUB Obligasi III Tahap I | *PUB Bonds III Phase I*	70,00	-
25.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	29-Sep-23	PUB Obligasi USD I Tahap I | *PUB USD Bonds I Phase I*	-	150,00
26.	PT Oki Pulp & Paper Mills	29-Sep-23	PUB Obligasi I Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	3.000,00	-
27.	PT Oki Pulp & Paper Mills	29-Sep-23	PUB Obligasi USD I Tahap I | *PUB USD Bonds I Phase I*	-	100,00
28.	PT Oki Pulp & Paper Mills	29-Sep-23	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap I *PUB Green Bonds I Phase I*	1.500,00	-
29.	PT Provident Investasi Bersama Tbk	15-Nov-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds II Phase I*	157,83	-
30.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	14-Des-23	PUB Obligasi Berwawasan Sosial I Tahap I *PUB Social Bonds I Phase I*	500,00	-
31.	PT Indonesia Infrastructure Finance	15-Des-23	PUB Obligasi II Tahap I | *PUB Bonds I Phase I*	500,00	-
	Jumlah | *Total*			**35.328,36**	**250,00**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

Tabel 4.33. Rekapitulasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Tahap I
Table 4.33. Summary of Phase I Continuous Public Offerings of Sukuk

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	29-Mar-23	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I | *PUB Sukuk Ijarah II Phase I*	155,00
2.	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	27-Jun-23	PUB Sukuk Ijarah II Tahap I | *PUB Sukuk Ijarah II Phase I*	700,00
3.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	27-Jun-23	PUB Sukuk Mudharabah V Tahap I | *PUB Sukuk Mudharabah V Phase I*	300,00
4.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	27-Jun-23	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap I | *PUB Sukuk Mudharabah III Phase I*	750,00
5.	PT Global Mediacom Tbk	27-Jun-23	PUB Sukuk Ijarah IV Tahap I | *PUB Sukuk Ijarah IV Phase I*	850,00
6.	PT Sarana Multigriya Finansial	27-Jun-23	PUB Sukuk Musyarakah I Tahap I | *PUB Sukuk Musyarakah I Phase I*	500,00
7.	PT Samudera Indonesia Tbk	25-Jul-23	PUB Sukuk Ijarah I Tahap I | *PUB Sukuk Ijarah I Phase I*	550,00
8.	PT MNC Energy Investments Tbk	27-Sep-23	PUB Sukuk Wakalah I Tahap I | *PUB Sukuk Wakalah I Phase I*	250,00
9.	PT Samator Indo Gas Tbk	29-Sep-23	PUB Sukuk Ijarah III Tahap I | *PUB Sukuk Ijarah III Phase I*	70,00
10.	PT Oki Pulp & Paper Mills	29-Sep-23	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I | *PUB Sukuk Mudharabah I Phase I*	500,00
11.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	14-Des-23	PUB Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Tahap I *PUB Social Sukuk Musyarakah I Phase I*	200,00
	Jumlah | *Total*			**4.825,00**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

Tabel 4.34. Rekapitulasi Penawaran Umum BerkelanjutanEfek Bersifat Utang (Obligasi) Tahap II dan Berikutnya
Table 4.34. Summary of Phase II and Subsequent Continuous Public Offerings of Debt Securities (Bonds)

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Masa Penawaran *Offering Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**	
				Rp	USD
1.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	24-25 Jan-23	PUB Obligasi V Tahap III | *PUB Bonds V Phase III*	1.100,00	-
2.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	24-Jan-23	PUB Obligasi III Tahap IV | *PUB Bonds III Phase IV*	1.072,93	-
3.	PT Voksel Electric Tbk	25-Jan-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	100,00	-
4.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	14-Feb-23	PUB Obligasi V Tahap VI | *PUB Bonds V Phase VI*	2.486,00	-
5.	PT Sarana Multigriya Finansial	15-17 Feb-23	PUB Obligasi VI Tahap IV | *PUB Bonds VI Phase IV*	2.000,00	-
6.	PT Federal International Finance	20-21 Feb-23	PUB Obligasi V Tahap V | *PUB Bonds V Phase V*	3.000,00	-
7.	PT Chandra Asri Petrochemical	23-Feb-23	PUB Obligasi IV Tahap II | *PUB Bonds IV Phase II*	1.250,00	-
8.	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	28 Feb - 2 Mar 23	PUB Obligasi II Tahap IV | *PUB Bonds II Phase IV*	784,72	-
9.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1-3 Mar-23	PUB Obligasi IV Tahap II | *PUB Bonds IV Phase II*	2.500,00	-
10.	PT Surya Artha Nusantara Finance	10-13 Mar-23	PUB Obligasi IV Tahap II | *PUB Bonds IV Phase II*	1.500,00	-
11.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	15-16 Mar-23	PUB Obligasi III Tahap II | *PUB Bonds III Phase II*	2.906,50	-
12.	PT Indomobil Finance Indonesia	21-Mar-23	PUB Obligasi V Tahap II | *PUB Bonds V Phase II*	600,00	-
13.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	3 - 5 Apr-23	PUB Obligasi IV Tahap III | *PUB Bonds IV Phase III*	1.000,00	-
14.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3 - 5 Apr-23	PUB Obligasi III Tahap III | *PUB Bonds III Phase III*	955,50	-
15.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	6 - 11 Apr-23	PUB Obligasi V Tahap IV | *PUB Bonds V Phase IV*	1.600,00	-
16.	PT Bussan Auto Finance	13-Apr-23	PUB Obligasi II Tahap III | *PUB Bonds II Phase III*	1.242,00	-
17.	PT Sarana Multi Infrastuktur	12-Mei-23	PUB Obligasi III Tahap III | *PUB Bonds III Phase III*	4.000,00	-
18.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk	31 Mei - 5 Jun 23	PUB Obligasi III Tahap III | *PUB Bonds III Phase III*	1.093,50	-
19.	PT Provident Investasi Bersama Tbk	30-31 Mei-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	750,00	-
20.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	5-9 Jun-23	PUB Obligasi V Tahap V | *PUB Bonds V Phase V*	1.100,00	-
21.	PT Pegadaian	12-13 Jun-23	PUB Obligasi V Tahap III | *PUB Bonds V Phase III*	1.995,00	-
22.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	21-23 Jun-23	PUB Obligasi III Tahap II | *PUB Bonds III Phase III*	300,00	-
23.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	31 Jul - 1 Ags-23	PUB Obligasi IV Tahap III | *PUB Bonds IV Phase III*	2.559,49	-
24.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	03-Ags-23	PUB Obligasi II Tahap II | *PUB Bonds II Phase II*	110,35	-
25.	PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	7-8 Ags-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	400,00	-
26.	PT Pegadaian	18-21 Ags-23	PUB Obligasi V Tahap IV | *PUB Bonds V Phase IV*	2.433,16	-
27.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	22-Ags-23	PUB Obligasi IV Tahap I | *PUB Bonds IV Phase I*	3.000,00	-
28.	PT Bussan Auto Finance	4-5 Sep-23	PUB Obligasi II Tahap IV | *PUB Bonds II Phase IV*	458,00	-
29.	PT Pyridam Farma	15-Sep-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	400,00	-
30.	PT Chandra Asri Petrochemical	21-22 Sep-23	PUB Obligasi IV Tahap III | *PUB Bonds IV Phase III*	1.000,00	-
31.	PT Mandiri Tunas Finance	22-Sep-23	PUB Obligasi VI Tahap II | *PUB Bonds VI Phase II*	1.131,11	-
32.	PT Toyota Astra Financial Services	26-27 Sep-23	PUB Obligasi IV Tahap II | *PUB Bonds IV Phase II*	625,00	-
33.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	2-3 Okt-23	PUB Obligasi II Tahap II | *PUB Bonds II Phase II*	1.800,00	-
34.	PT Sinar Mas Multifinance	06-Okt-23	PUB Obligasi III Tahap II | *PUB Bonds III Phase II*	1.000,00	-
35.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-12 Okt-23	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II *PUB Green Bonds I Phase II*	6.000,00	-

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Masa Penawaran *Offering Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**	
				Rp	USD
36.	PT Summarecon Agung Tbk	16-Okt-23	PUB Obligasi IV Tahap II | *PUB Bonds IV Phase II*	900,00	-
37.	PT Sarana Multigriya Finansial	11-17 Okt-23	PUB Obligasi VII Tahap II | *PUB Bonds VII Phase II*	2.768,80	-
38.	PT Astra Sedaya Finance	23-Okt-23	PUB Obligasi VI Tahap II | *PUB Bonds VI Phase II*	1.000,00	-
39.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	06-Nov-23	PUB Obligasi VI Tahap II | *PUB Bonds VI Phase II*	1.250,00	-
40.	PT Federal International Finance	9-13 Nov-23	PUB Obligasi VI Tahap II | *PUB Bonds VI Phase II*	1.100,00	-
41.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	15-16 Nov-23	PUB Obligasi IV Tahap III | *PUB Bonds IV Phase II*	3.000,00	-
42.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	20-Nov-23	PUB Obligasi USD I Tahap II | *PUB USD Bonds I Phase II*	-	50,00
43.	PT Barito Pacific Tbk	20-23 Nov-23	PUB Obligasi III Tahap II | *PUB Bonds III Phase II*	1.000,00	-
44.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	28-29 Nov-23	PUB Obligasi VI Tahap II | *PUB Bonds VI Phase II*	1.513,10	-
45.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	8-11 Des-23	PUB Obligasi III Tahap IV | *PUB Bonds III Phase IV*	1.000,00	-
46.	PT Oki Pulp & Paper Mills	08-Des-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	3.000,00	-
47.	PT Oki Pulp & Paper Mills	08-Des-23	PUB Obligasi USD I Tahap II | *PUB USD Bonds I Phase II*	-	25,00
48.	PT Oki Pulp & Paper Mills	08-Des-23	PUB Obligasi I Tahap II | *PUB Bonds I Phase II*	500,00	-
49.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	11-12 Des-23	PUB Obligasi IV Tahap IV | *PUB Bonds IV Phase IV*	2.093,00	-
	Jumlah | *Total*			**73.378,15**	**75,00**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

Tabel 4.35. Rekapitulasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Tahap II dan Berikutnya
Table 4.35. Summary of Phase II and Subsequent Continuous Public Offerings of Sukuk

No.	Nama Emiten *Issuer Name*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Keterangan *Description*	Nilai Emisi* *Emission Value**
1.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	24-Jan-23	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap IV | *PUB Sukuk Mudharabah II Phase IV*	675,51
2.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3 - 5 Apr-23	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III | *PUB Sukuk Mudharabah I Phase III*	135,00
3.	PT Permodalan Nasional Madani	5 - 6 Apr-23	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II | *PUB Sukuk Mudharabah I Phase II*	1.721,90
4.	PT Pegadaian	12-13 Jun-23	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap III | *PUB Sukuk Mudharabah II Phase III*	605,00
5.	PT Mandala Multifinance Tbk	15-16 Jun-23	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III | *PUB Sukuk Mudharabah I Phase III*	500,00
6.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	03-Ags-23	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II | *PUB Sukuk Ijarah II Phase II*	59,65
7.	PT Pegadaian	18-21 Ags-23	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap IV | *PUB Sukuk Mudharabah II Phase IV*	235,04
8.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	22-Ags-23	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap II | *PUB Sukuk Mudharabah III Phase II*	1.250,00
9.	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	06-Okt-23	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II | *PUB Sukuk Ijarah II Phase II*	425,00
10.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	06-Nov-23	PUB Sukuk Mudharabah V Tahap II | *PUB Sukuk Mudharabah V Phase II*	300,00
11.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	15-16 Nov-23	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap III | *PUB Sukuk Mudharabah III Phase III*	1.090,38
12.	PT Oki Pulp & Paper Mills	08-Des-23	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I | *PUB Sukuk Mudharabah I Phase I*	500,00
	Jumlah | *Total*			**7.497,48**

*Rp Miliar | *IDR Billion*

Selain itu, OJK juga telah memproses rencana aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik pada tahun 2023, sebagai berikut:

In addition, OJK also processed corporate action plans undertaken by Issuers and Public Companies in 2023, as follows:

Tabel 4.36. Aksi Korporasi
Table 4.36. Corporate Actions

No.	Aksi Korporasi | *Corporate Action*	2023
1	ESOP Asing | *Foreign ESOP*	2
2	*Go Private* | *Go Private*	1
3	*Merger* | *Merger*	1
4	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) | *Capital Increase Without Preemptive Rights (PMTHMETD)*	20
5	Penawaran Tender Sukarela | *Voluntary Tender Offer*	1
6	Penawaran Tender Wajib | *Mandatory Tender Offer*	5
7	Penawaran Umum Terbatas | *Rights Issue*	8
8	Transaksi Afiliasi | *Affiliated Transactions*	1
9	Transaksi Material | *Material Transactions*	6
10	Transaksi Material dan Afiliasi | *Material and Affiliated Transactions*	5
11	Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi | *Material and Affiliated Transactions*	1
12	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha | *Business Activity Change Transactions*	13

5. Perizinan Penyelenggara *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan 2023, terdapat 16 Penyelenggara yang telah mendapatkan izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF) dengan rincian sebagai berikut:

5. *Licensing of Securities Crowdfunding Providers*

As of 2023, there were 16 licensed Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) providers, with the following details:

Tabel 4.37. Penyelenggara *Securities Crowdfunding*
Table 4.37. Securities Crowdfunding Providers

No	Nama Penyelenggara *(Platform)* *Provider Name (Platform)*	Tanggal Izin OJK *OJK License Date*	Berizin *License Type*
1	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	07-Des-22	SCF
2	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	31-Dec-19	ECF
3	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15-Feb-23	SCF
4	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF
5	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF
6	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	06-Nov-19 & 23-Aug-21	ECF & SCF
7	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	18-Mar-22	SCF
8	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF
9	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF
10	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	30-Dec-20	SCF
11	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF
12	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF
13	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	04-Jul-22	SCF
14	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	26-Des-22	SCF
15	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	27-Des-22	SCF
16	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	31-Jan-23	SCF

6. Perizinan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS).

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

6. Licensing of Capital Market Supporting Institutions and Professions

a. Supporting Institutions of the Capital Market

Supporting Institutions of the Capital Market provide services to one or more parties according to their business licenses in the Capital Market, including Securities Administration Bureaus (BAE), Custodian Banks (BK), Trustees, Rating Agencies, Sharia Securities List Issuers (PPDES), and Electronic General Meeting of Shareholders Providers (E-RUPS).

The number of Capital Market Supporting Institutions registered with OJK is as follows:

Tabel 4.38. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
Table 4.38. Number of Capital Market Supporting Institutions

Lembaga Penunjang *Supporting Institution*	Tahun | *Year*		Jenis *Type*
	2022	2023	
Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Bureau*	9	9	Surat Perizinan | *Permission Letter*
Bank Kustodian | *Custodian Bank*	25	25	Surat Persetujuan | *Approval Letter*
Wali Amanat | *Trustee*	12	12	STTD | *Document Receipt Letter*
Perusahaan Pemeringkat Efek | *Rating Agency*	4	4	Surat Perizinan | *Permission Letter*
PPDES | *Sharia Securities List Issuer*	12	14	Surat Persetujuan | *Approval Letter*
Penyedia E-RUPS | *E-RUPS Provider*	0	0	Surat Persetujuan | *Approval Letter*

1) Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, selama 2023 terdapat empat BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (26,13%), PT Datindo Entrycom (18,25%), PT Sinartama Gunita (14,58%), dan PT Raya Saham Registra (13,39%), sementara BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2,48%.

1) Securities Administration Bureau (BAE)

BAE is a party that, based on a contract with the Issuer, performs recording of securities ownership and distribution of rights related to securities. Based on the number of clients owned by BAE, in 2023 there were four BAEs dominating the market: PT Adimitra Jasa Korpora (26.13%), PT Datindo Entrycom (18.25%), PT Sinartama Gunita (14.58%), and PT Raya Saham Registra (13.39%), while the BAE with the fewest Issuers was PT BSR Indonesia at 2.48%.

Grafik 4.3. *Market Share* Biro Administrasi Efek
Graph 4.3. Market Share of Securities Administration Bureaus

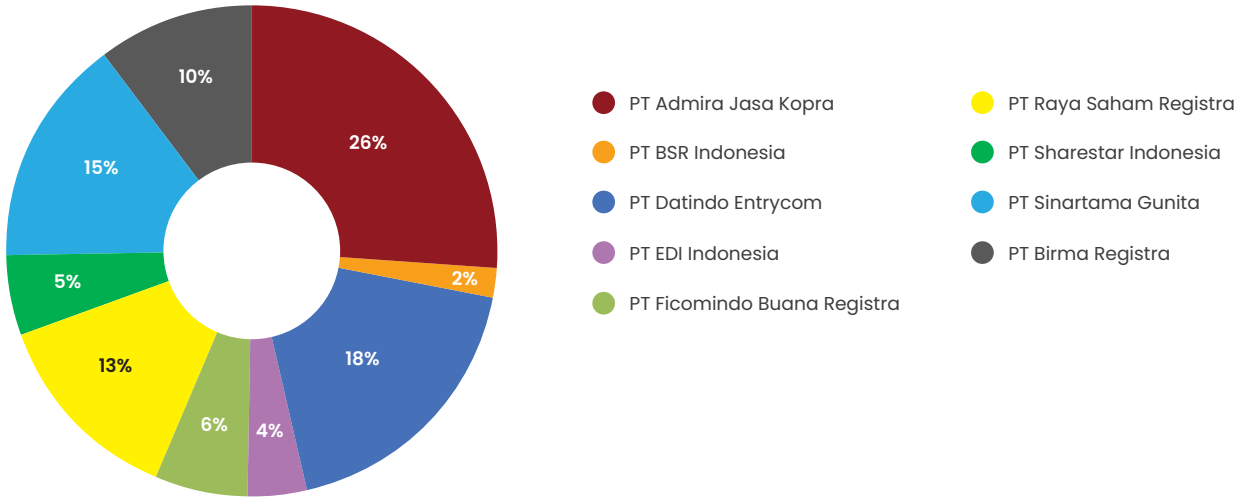

2) Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sampai akhir tahun 2023 terdapat 25 Bank Kustodian yang telah memiliki persetujuan OJK.

2) Custodian Bank

Custodian Bank is a party that provides securities and other assets related to securities and other services, including receiving dividends, interest, and other rights, settling securities transactions, and representing account holders who are its customers. By the end of 2023, there were 25 Custodian Banks approved by OJK.

Tabel 4.33. Daftar Bank Kustodian
Table 4.33. List of Custodian Banks

No	Nama Bank Kustodian | *Custodian Bank Name*	No	Nama Bank Kustodian | *Custodian Bank Name*
1	PT Bank HSBC Indonesia	14	PT Bank Permata Tbk
2	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	PT Bank KB Bukopin Tbk	16	PT Bank Sinarmas Tbk
4	PT Bank Central Asia Tbk	17	PT Bank UOB Indonesia
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	18	Citibank, N.A.
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19	Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
7	PT Bank DBS Indonesia	20	Standard Chartered Bank
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	21	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22	PT Bank KEB Hana Indonesia
10	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	23	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
11	PT Bank Mega Tbk	24	PT Bank OCBC NISP Tbk
12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25	PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk
13	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin)		

3) Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. Wali Amanat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan. Sampai akhir tahun 2023, terdapat 12 Wali Amanat yang telah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari OJK.

3) Trustee

Trustee is a party that represents the interests of debt securities holders. Trustees represent the interests of debt securities holders, both in and out of court, in accordance with the Trustee Contract and legislation. By the end of 2023, there were 12 Trustees registered with OJK.

Tabel 4.34. Daftar Wali Amanat
Table 4.34. List of Trustees

No	Nama Wali Amanat | *Trustee Name*	No	Nama Wali Amanat | *Trustee Name*
1	PT Bank KB Bukopin Tbk	7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	8	PT Bank Permata Tbk
3	PT Bank Pembangunan Daerah DKI	9	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10	PT Bank Sinarmas Tbk
5	PT Bank Mega Tbk	11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

4) Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat baik untuk Efek (*security rating*), yaitu Efek Bersifat Utang, Sukuk, Efek Beragun Aset, atau Efek lain yang dapat diperingkat maupun Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi *Real Estate* Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sampai akhir tahun 2023, terdapat empat Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki izin OJK yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia, PT Kredit Rating Indonesia, dan PT Pemeringkat Kredit Indonesia.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Penilai Pemerintah, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Adapun data Profesi Penunjang Pasar Modal sampai dengan akhir 2023 sebagai berikut:

4) Rating Agencies

Rating Agencies are Investment Advisors in the form of Limited Liability Companies that conduct rating activities and provide ratings for both securities (security ratings) such as Debt Securities, Sukuk, Asset-Backed Securities, or other securities that can be rated, and entities (company ratings), including Mutual Funds and Real Estate Investment Trusts in the form of Collective Investment Contracts. By the end of 2023, there were four Rating Agencies licensed by OJK, namely PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia, PT Kredit Rating Indonesia, and PT Pemeringkat Kredit Indonesia.

b. Supporting Professions of the Capital Market

Supporting Professions of the Capital Market are professions that provide services to one or more parties in the Capital Market, including Accountants, Legal Consultants, Appraisers, Notaries, Government Appraisers, and Capital Market Sharia Experts (ASPM).

The data of Supporting Professions of the Capital Market by the end of 2023 are as follows:

Tabel 4.35. Jumlah Profesi Pasar Modal
Table 4.35. Number of Capital Market Professions

Nama Profesi	Jumlah Aktif | *Active Number*		*Profession Name*
	2022	2023	
Akuntan	788	790	*Accountant*
KAP	318	318	*Public Accounting Firm (KAP)*
Konsultan Hukum	454	461	*Legal Consultant*
Penilai	303	339	*Appraiser*
Notaris	297	324	*Notary*
Penilai Pemerintah	245	245	*Government Appraiser*
ASPM	103*	100*	*ASPM*

* Belum termasuk satu ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024
** Not including one ASPM temporarily inactive effective from August 23, 2021, to November 19, 2024.*

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama tahun 2023 OJK bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan 19 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal.

1) Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia (FASJK-IAPI) telah menyelenggarakan sembilan kali kegiatan pendidikan profesi penunjang Pasar Modal pada tahun 2023.

To enhance the professionalism of Supporting Professions of the Capital Market, in 2023, OJK in collaboration with associations held 19 Continuing Professional Education (CPE) sessions for Supporting Professions of the Capital Market. The details are as follows:

1) Accountants

The Financial Services Sector Accountants Forum - Indonesian Institute of Public Accountants (FASJK-IAPI) held nine professional education sessions for supporting professions in the Capital Market in 2023.

2) **Penilai**
Forum Penilai Pasar Modal - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI) telah menyelenggarakan empat kali kegiatan pendidikan profesi penunjang Pasar Modal pada tahun 2023.

3) **Konsultan Hukum**
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan empat kali kegiatan pendidikan profesi penunjang Pasar Modal pada tahun 2023.

4) **Notaris**
Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menyelenggarakan dua kegiatan pendidikan profesi penunjang Pasar Modal pada tahun 2023.

2) **Appraisers**
The Capital Market Appraisers Forum - Indonesian Society of Appraisers (FPPM-MAPPI) held four professional education sessions for supporting professions in the Capital Market in 2023.

3) **Legal Consultants**
The Association of Indonesian Capital Market Legal Consultants (HKHPM) held empat professional education sessions for supporting professions in the Capital Market in 2023.

4) **Notaries**
The Indonesian Notaries Association (INI) held two professional education sessions for supporting professions in the Capital Market in 2023.

IV.3.4.Aktivitas Penegakan Hukum Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Enforcement Activities in the Capital Market, Derivatives, and Carbon Exchange

1. Pemeriksaan Khusus Pasar Modal
Per 31 Desember 2023, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani OJK adalah sebanyak 40 kasus yang terdiri dari:
a. Sebanyak lima kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
   1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
   2) Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
   3) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
   4) Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Sebanyak 31 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
   1) Transaksi semu, manipulasi pasar; dan
   2) Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
c. Sebanyak empat kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
   1) Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
   2) Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menyelesaikan 33 kasus, yang terdiri dari 25 kasus pidana dan delapan kasus administrasi.

1. Special Investigations in the Capital Market
As of December 31, 2023, the OJK is handling 40 cases with indications of criminal violations in the Capital Market sector, consisting of:

a. Five cases related to Issuers and Public Companies, with suspected violations including:
   1) Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds;
   2) Affiliated Transactions and Conflicts of Interest;
   3) Boards of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies; and
   4) Plans and Execution of General Meetings of Shareholders.
b. Thirty-one cases related to Securities Transactions and Trading, with suspected violations including:
   1) Fictitious transactions, market manipulation; and
   2) Securities orders and allocations in Public Offerings.
c. Four cases related to Securities Companies, Securities Brokers, and customer complaints about stock transactions at Securities Companies, with suspected violations including:
   1) Behavior of Securities Companies Acting as Securities Brokers; and
   2) Customer complaints about stock transactions.

Apart from the above cases, by the end of Quarter IV-2023, the OJK has resolved 33 cases, consisting of 25 criminal cases and eight administrative cases.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal

1) Sanksi Atas Kasus

2. *Imposition of Sanctions and Handling of Appeals in the Capital Market Industry*

a. *Imposition of Sanctions in the Capital Market Industry*

1) *Sanctions on Cases*

Tabel 4.36. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Kasus
Table 4.36. Summary of Administrative Sanctions on Cases

No.	Klasifikasi Pihak	Jenis Sanksi | *Type of Sanction*						*Party Classification*
		Denda | *Fine*		Perintah Tertulis *Written Order*	Pembekuan Izin *License Suspension*	Pencabutan Izin *License Revocation*	Peringatan Tertulis *Written Warning*	
		Jumlah Sanksi *Number of Sanctions*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*					
Bidang Pengelolaan Investasi								***Investment Management Sector***
Perusahaan								***Company***
1.	Manajer Investasi	10	16.660.000.000	10	-	2	-	*Investment Manager*
2.	Perusahaan Efek	1	300.000.000	-	-	-	-	*Securities Company*
3.	Agen Penjual Efek Reksa Dana	-	-	-	-	1	-	*Mutual Fund Securities Sales Agent*
4.	Bank Kustodian	2	950.000.000	-	-	-	-	*Custodian Bank*
Perorangan								***Individual***
1.	Direktur Utama	5	1.730.000.000	1	-	1	-	*President Director*
2.	Direktur	12	2.320.000.000	1	-	-	-	*Board of Directors*
3.	Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Tidak Langsung	5	6.300.000.000	4	-	-	-	*Shareholders and/or Indirect Shareholders*
4.	Komisaris Utama	1	1.200.000.000	1	-	-	-	*President Commissioner*
5.	Komisaris	3	755.000.000	2	-	2	-	*Commissioner*
6.	Perseorangan/Pihak Lainnya	54	5.250.000.000	44	-	8	-	*Individual/Other Party*
	Jumlah	**93**	**35.465.000.000**	**63**	**-**	**14**	**-**	***Total***
Bidang Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon								***Securities Transactions, Derivative Financial Instruments, and Carbon Exchange***
Perusahaan								***Company***
1.	Manajer Investasi	1	100.000.000	-	-	-	-	*Investment Manager*
2.	Perusahaan Efek*	6	10.275.000.000	1	1	-	-	*Securities Company**
3.	Perusahaan	2	4.900.000.000	1	-	-	-	*Company*
Perorangan								***Individual***
1.	Direktur	3	1.700.000.000	-	-	-	-	*Board of Directors*
2.	Komisaris	1	1.000.000.000	-	-	-	-	*Commissioner*
3.	Nasabah	7	13.000.000.000	6	-	-	-	*Customer*
4.	Pemegang Saham**	3	2.800.000.000	-	-	-	-	*Shareholder***
5.	*Sales*	6	9.825.000.000	2	-	-	-	*Sales*
6.	Direktur dan Pemegang Saham***	2	2.200.000.000	-	-	-	-	*Board of Directors and Shareholders****
7.	Komisaris dan Pemegang Saham	2	2.600.000.000	-	-	-	-	*Commissioners and Shareholders*
8.	Perseorangan	1	25.000.000	-	-	-	-	*Individual*
	Jumlah	**34**	**48.625.000.000**	**10**	**1**	**-**	**-**	***Total***

Keterangan: | *Note:*
*Terdapat 1 Perusahaan Efek yang dikenakan 2 surat sanksi atas kasus yang berbeda | **There is 1 Securities Company that received 2 sanction letters for different cases*
**Terdapat 1 Pemegang Saham yang dikenakan 2 surat sanksi atas kasus yang berbeda | ***There is 1 Shareholder who received 2 sanction letters for different cases*
***Terdapat 1 Direktur dan Pemegang Saham yang dikenakan 2 surat sanksi atas kasus yang berbeda | ****There is 1 Director and Shareholder who received 2 sanction letters for different cases*

No.	Klasifikasi Pihak	Jenis Sanksi | *Type of Sanction*						*Party Classification*
		Denda | *Fine*		Perintah Tertulis *Written Order*	Pembekuan Izin *License Suspension*	Pencabutan Izin *License Revocation*	Peringatan Tertulis *Written Warning*	
		Jumlah Sanksi *Number of Sanctions*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*					
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal								***Issuers, Public Companies, and Capital Market Supporting Professions***
Perusahaan								***Company***
1.	Emiten	4	1.478.000.000	-	-	-	2	*Issuers*
Perorangan								***Individual***
1.	Direksi	1	525.000.000	-	-	-	-	*Board of Directors*
2.	Notaris	10	-	-	-	-	23	*Notary*
3.	Penilai	-	-	-	-	-	1	*Appraiser*
	Jumlah	**4**	**1.803.000.000**	**-**	**-**	**-**	**16**	***Total***

Keterangan: | *Note:*
*terdiri dari sanksi yang ditetapkan oleh pengawas Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta pengawas Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
**consists of sanctions determined by supervisors of Issuers, Public Companies, and Capital Market Supporting Professions as well as supervisors of Securities Transactions, Derivative Financial Instruments, and Carbon Exchange..*
**terdiri dari sanksi yang ditetapkan oleh pengawas Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
***consists of sanctions determined by supervisors of Securities Transactions, Derivative Financial Instruments, and Carbon Exchange.*

Bidang Perusahaan Efek, Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang								***Securities Companies, Securities Institutions, and Supporting Institutions***
Perusahaan								***Company***
1.	Perusahaan Efek	1	200.000.000	-	-	1	-	*Securities Companies*
Perorangan								***Individual***
1.	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	*None*
	Jumlah	**1**	**200.000.000**	**-**	**-**	**1**	**-**	***Total***

2) Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

2) Sanctions for Reporting Delays

Tabel 4.37. Ikhtisar Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan
Table 4.37. Summary of Administrative Sanctions for Late Submission of Reports

No.	Klasifikasi Pihak	Jenis Sanksi | *Type of Sanction*						*Party Classification*
		Denda | *Fine*		Perintah Tertulis *Written Order*	Pembekuan Izin *License Suspension*	Pencabutan Izin *License Revocation*	Peringatan Tertulis *Written Warning*	
		Jumlah *Total*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*					
Bidang Pengelolaan Investasi								***Investment Management Sector***
Perusahaan								***Company***
1.	Manajer Investasi	52	3.342.300.000	-	-	-	-	*Investment Manager*
2.	Penasihat Investasi	2	176.800.000	-	-	-	-	*Investment Advisor*
3.	APERD	16	373.200.000	-	-	-	-	*APERD*
4.	Bank Kustodian	1	1.000.000	-	-	-	-	*Custodian Bank*
	Jumlah	**71**	**3.893.300.000**					***Total***
Bidang Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal								***Issuers, Public Companies, and Capital Market Supporting Professions***
Perusahaan								***Company***
1.	Emiten	238	15.882.100.000	-	-	-	41	*Issuers*
2.	Kantor Akuntan Publik	5	25.000.000	-	-	-	-	*Public Accountant Offices*

No.	Klasifikasi Pihak	Jenis Sanksi | *Type of Sanction*						*Party Classification*
		Denda | *Fine*		Perintah Tertulis *Written Order*	Pembekuan Izin *License Suspension*	Pencabutan Izin *License Revocation*	Peringatan Tertulis *Written Warning*	
		Jumlah *Total*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*					
Perorangan								***Individual***
1.	Komisaris Emiten	1	2.800.000	-	-	-	-	*Issuer Commissioner*
2.	Pemegang Saham Emiten	1	200.000	-	-	-	-	*Issuer Shareholders*
3.	Konsultan Hukum	31	127.700.000	-	-	-	-	*Legal Consultant*
4.	Notaris	53	248.900.000	-	-	-	-	*Notary*
5.	Penilai	14	10.000.000	-	-	-	-	*Appraiser*
	Jumlah	**343**	**16.296.700.000**	**-**	**-**	**-**	**41**	***Total***
Bidang Perusahaan Efek, Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang								***Securities Companies, Securities Institutions, and Supporting Institutions***
Perusahaan								***Company***
1.	Perusahaan Efek	34	587.900.000	-	-	-	-	*Securities Companies*
2.	Partisipan CTP PLTE	88	47.030.000	-	-	-	-	*Participants in the CTP PLTE*
3.	Biro Administrasi Efek	1	5.200.000	-	-	-	-	*Securities Administration Bureau*
4.	Penyelenggara Layanan Urun Dana	4	28.600.000	-	-	-	-	*Mutual Fund Service Providers*
	Jumlah	**127**	**668.730.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Total***

3) Sanksi Selain Keterlambatan Non Kasus

Selama 2023, tidak terdapat sanksi selain keterlambatan non kasus, kecuali pada emiten sebanyak lima peringatan tertulis.

3) *Sanctions for Non-Case Reporting Delays*

In 2023, there were no sanctions for non-case reporting delays, except for five written warnings to issuers.

b. Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif di Industri Pasar Modal

b. Handling of Appeals Against Administrative Sanctions in the Capital Market Industry

Tabel 4.38. Ikhtisar Keberatan Terkait Sanksi Administratif Atas Kasus
Table 4.38. Summary of Appeals Against Administrative Sanctions on Cases

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan *Decision on Appeal*			Jumlah *Total*	*Classification of Fields*
		Diterima *Accepted*	Diterima Sebagian *Partially Accepted*	Ditolak *Rejected*		
1	Bidang Pengelolaan Investasi	-	-	1	1	*Investment Management Sector*
2	Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	-	-	22	22	*Transactions and Securities Institutions Sector*
3	Bidang Emiten dan Perusahaan Publik	-	-	3	3	*Issuers and Public Companies Sector*
4	Bidang Profesi dan Lembaga Penunjang	-	-	-	-	*Supporting Professions and Institutions Sector*
	Jumlah	-	-	26	26	***Total***

Tabel 4.39. Ikhtisar Keberatan Terkait Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan
Table 4.39. Summary of Appeals Against Administrative Sanctions on Reporting Delays

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan *Decision on Appeal*			Jumlah *Total*	*Classification of Fields*
		Diterima *Accepted*	Diterima Sebagian *Partially Accepted*	Ditolak *Rejected*		
1	Bidang Pengelolaan Investasi	2	6	20	28	*Investment Management Sector*
2	Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	-	2	13	15	*Transactions and Securities Institutions Sector*
3	Bidang Emiten dan Perusahaan Publik	1	2	15	18	*Issuers and Public Companies Sector*
4	Bidang Profesi dan Lembaga Penunjang	-	-	1	1	*Supporting Professions and Institutions Sector*
	Jumlah	3	10	49	62	***Total***

Tabel 4.40. Ikhtisar Keberatan Terkait Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan
Table 4.40. Summary of Appeals Against Administrative Sanctions on Late Payment of Levies

No.	Klasifikasi Bidang	Keputusan Keberatan *Decision on Appeal*			Jumlah *Total*	*Classification of Fields*
		Diterima *Accepted*	Diterima Sebagian *Partially Accepted*	Ditolak *Rejected*		
1	Bidang Pengelolaan Investasi	1	-	1	2	*Investment Management Sector*
2	Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	-	-	-	-	*Transactions and Securities Institutions Sector*
3	Bidang Emiten dan Perusahaan Publik	2	-	1	3	*Issuers and Public Companies Sector*
4	Bidang Profesi dan Lembaga Penunjang	-	-	-	-	*Supporting Professions and Institutions Sector*
	Jumlah	3	-	2	5	***Total***

Selama 2023, tidak terdapat penanganan keberatan terkait sanksi yang ditetapkan *Self-Regulatory Organization*.

During 2023, there were no objections handled regarding sanctions imposed by the Self-Regulatory Organization.

IV.3.5.Aktivitas Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Development Activities for the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange

1. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

a. Per akhir tahun 2023, terdapat penyusunan Rancangan Pengaturan, antara lain :

1) 14 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK)
2) 2 Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK)
3) 4 Rancangan Peraturan Dewan Komisioner OJK (RPDK)
4) 6 Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (RSEDK)
5) 1 Rancangan Keputusan Dewan Komisioner OJK (RKDK)

1. Preparation of Regulatory Drafts and Studies in the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange

a. By the end of 2023, the preparation of regulatory drafts included:

1) 14 Draft OJK Regulations (RPOJK)
2) 2 Draft OJK Circular Letters (RSEOJK)
3) 4 Draft OJK Commissioner Board Regulations (RPDK)
4) 6 Draft OJK Commissioner Board Circular Letters (RSEDK)
5) 1 Draft OJK Commissioner Board Decision (RKDK)

b. Per akhir tahun 2023, sedang dilakukan penyusunan kajian, antara lain :

1) Kajian tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* di Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.
2) Kajian tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi *Exchange Traded Fund* (ETF).
3) Kajian tentang *Ranking Rating* Reksa Dana dan Manajer Investasi.
4) Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal Tahun 2023.
5) Kajian Analisis Perlakuan Akuntansi Perdagangan Emisi Karbon.

2. *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027

Dalam rangka memberikan pedoman arah pengembangan Pasar Modal Indonesia yang tangguh dan stabil di tengah kondisi global, OJK secara resmi meluncurkan *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027 pada 31 Januari 2023.

Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 merupakan peta jalan untuk pengembangan industri Pasar Modal, agar pengembangannya dapat selaras dan seirama dengan Sektor Jasa Keuangan lainnya, dalam rangka mendukung visi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada 2045.

Dalam *Roadmap* ini, pengembangan Pasar Modal difokuskan pada lima pilar pengembangan Pasar Modal, yaitu:

a. Akselerasi Pendalaman Pasar Melalui Keberadaan Variasi Produk dan Layanan Jasa Sektor Keuangan yang Efisien;
b. Akselerasi Program yang Berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan;
c. Penguatan Peran Pelaku Industri dalam Pengembangan Sektor Keuangan yang Sejalan dengan *Best Practice* dan *Market Conduct*;
d. Peningkatan Serangkaian Upaya Dalam Rangka Perlindungan Investor; dan
e. Penguatan Layanan Keuangan Digital untuk Penguatan Kredibilitas Sektor Keuangan dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta mendukung pelaksanaan program dan rencana aksi dalam lima pilar pengembangan yang termuat dalam *Roadmap* ini, diperlukan penguatan proses bisnis internal dan sinergi kelembagaan, transformasi kelembagaan, serta penguatan teknologi informasi sebagai faktor pendukung.

Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 ini menjadi acuan dalam pengembangan Pasar Modal ke depan secara terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan perkembangan sektor keuangan, serta mendukung perekonomian Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan.

b. By the end of 2023, several studies were under preparation, including:

1) Study on the Implementation of Anti-Fraud Strategies in Securities Companies and Investment Managers.
2) Study on Accounting Treatment of Exchange-Traded Fund (ETF) Transactions.
3) Study on Ranking of Mutual Funds and Investment Managers.
4) Provision of Accounting Opinions in the Capital Market Sector in 2023.
5) Analysis Study on the Accounting Treatment of Carbon Emission Trading.

2. Indonesian Capital Market Roadmap 2023-2027

To provide guidance for the development of a robust and stable Indonesian Capital Market amidst global conditions, OJK officially launched the Indonesian Capital Market Roadmap 2023-2027 on January 31, 2023.

The Roadmap of the Indonesian Capital Market 2023-2027 serves as a blueprint for the development of the Capital Market industry, ensuring its development is aligned and harmonious with other Financial Services Sectors. This is to support the vision of making Indonesia the world's 5th largest economic power by 2045.

The roadmap focuses on five pillars for capital market development:

a. Accelerating Market Deepening through a Variety of Efficient Financial Sector Products and Services
b. Accelerating Programs Related to Sustainable Finance
c. Strengthening the Role of Industry Players in Financial Sector Development in Line with Best Practices and Market Conduct
d. Enhancing Investor Protection Efforts
e. Strengthening Digital Financial Services to Enhance Financial Sector Credibility and Public Trust

To achieve the vision and mission, and support the implementation of programs and action plans within the five development pillars outlined in this Roadmap, it is necessary to strengthen internal business processes and institutional synergies, institutional transformation, as well as information technology enhancement as supporting factors.

The Roadmap of the Indonesian Capital Market 2023-2027 serves as a reference for future Capital Market development in a directed, coordinated, and aligned manner with financial sector developments, while supporting Indonesia's economy to grow sustainably.

Visi *Vision*
Menjadi Pasar Modal yang Tangguh, Stabil dan Tumbuh Berkelanjutan dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Nasional
To become a Resilient, Stable, and Sustainable Capital Market in Driving the National Economy.

Misi *Mission*
Mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang Dalam, Likuid, Berdaya Saing, Terpercaya, serta Tumbuh dan Berkelanjutan
To create a Deep, Liquid, Competitive, Trusted, and Sustainable Indonesian Capital Market.

1 Akselerasi Pendalaman Pasar Melalui Keberadaan Variasi Produk dan Layanan Jasa Sektor Keuangan yang Efisien
Acceleration of Market Deepening through Efficient Financial Sector Product and Service Variations

A. Perluasan Skema Penggalan dana Jangka Panjang
B. Perluasan dan Penyempurnaan Variasi Layanan Produk, Termasuk Produk Syariah
C. Penambahan Variasi dan Layanan Produk, Termasuk Produk Syariah
D. Efisiensi Proses Penyelesaian

A. Expansion of Long-Term Funding Schemes
B. Expansion and Addition of Transaction Variations
C. Increase in Product Supply, Including New Products
D. Efficient Settlement Processes

2 Akselerasi Program yang Berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan
Acceleration of Programs Related to Sustainable Finance

Penyiapan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal

Strengthening the Sustainable Financial Ecosystem in the Capital Market

3 Penguatan Peran Pelaku Industri dalam Pengembangan Sektor Keuangan yang Sejalan dengan *Best Practice* dan *Market Conduct*
Strengthening the Role of Industry Players in Developing the Financial Sector Aligned with Best Practices and Market Conduct

A. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal
B. Penguatan Peran Intermediasi dan Potensi Perluasan Intermediasi Jasa Keuangan

A. Strengthening the Infrastructure of the Capital Market
B. Strengthening the Role of Intermediaries and Financial Service Providers

4 Peningkatan Serangkaian Upaya Dalam Rangka Pelindungan Investor
Enhancement of Efforts for Investor Protection

A. Penguatan *Disclosure* Emiten dan Perusahaan Publik
B. Penguatan Infrastruktur Pengawasan

A. Strengthening Disclosure by Issuers and Public Companies
B. Strengthening Investor Protection and Institutional Infrastructure

5 Penguatan Layanan Keuangan Digital untuk Penguatan Kredibilitas Sektor Keuangan dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
Strengthening Digital Financial Services to Enhance Credibility and Public Trust

A. Mempercetap Inovasi Layanan Keuangan Digital Sesuai *Best Practive* dengan Tetap Memperhatikan Tata Kelola
B. Penguatan Keamanan dan Keandalan Infrastruktur Teknologi Lembaga EFek dan Lembaga Jasa Keuangan

A. Enhancing Financial Innovation and Digital Services
B. Ensuring Adherence to Best Practices and Governance
C. Strengthening Data Security and Safety for Financial Services Institutions

Penguatan Proses Bisnis Internal dan Sinergi Kelembagaan
Strengthening Internal Business Processes and Institutional Synergy

Transformasi Kelembagaan
Institutional Transformation

Penguatan Teknologi Informasi
Strengthening Information Technology

Hingga akhir 2023, telah dilakukan beberapa rencana aksi dalam rangka mencapai target atau tujuan yang akan dicapai sesuai Pilar Pengembangan, antara lain sebagai berikut:

a. Pilar 1 Akselerasi Pendalaman Pasar Melalui Keberadaan Variasi Produk dan Layanan Jasa Sektor Keuangan yang Efisien
Percepatan dan efisiensi pelaksanaan proses Penawaran Umum telah diakomodir melalui mekanisme *e-IPO* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pengembangan penyediaan mekanisme penawaran umum Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS) secara elektronik saat ini sedang dalam proses kajian oleh Bursa Efek. Selain itu, dalam rangka mengembangkan produk keuangan derivatif, OJK juga tengah menyiapkan ketentuan tindak lanjut amanat UU PPSK dan RPP Peralihan Pengawasan Produk Derivatif.

By the end of 2023, several action plans were executed to achieve the targets aligned with the Development Pillars, including:

a. Pillar 1: Accelerating Market Deepening through a Variety of Efficient Financial Sector Products and Services
The acceleration and efficiency of the Public Offering process have been accommodated through the e-IPO mechanism as stipulated in POJK Number 41/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk Public Offering Activities Electronically. The development of the mechanism for the electronic public offering of Debt Securities or Sukuk (EBUS) is currently under review by the Stock Exchange. Additionally, to develop derivative financial products, OJK is also preparing the follow-up regulations mandated by UU PPSK and the RPP for the Transition of Derivative Product Supervision.

b. Pilar 2 Akselerasi Program yang Berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka pembentukan Bursa Karbon sebagaimana amanat UU PPSK, telah diterbitkan POJK nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. PT Bursa Efek Indonesia menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia sejak 26 September 2023.

c. Pilar 3 Penguatan Peran Pelaku Industri dalam Pengembangan Sektor Keuangan yang Sejalan dengan *Best Practice* dan *Market Conduct*

Dalam rangka penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan, OJK mengkaji terkait penerapan Stratifikasi Perusahaan Efek dan Klasifikasi Manajer Investasi.

d. Pilar 4 Peningkatan Serangkaian Upaya Dalam Rangka Perlindungan Investor

OJK telah mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap *influencer* melalui perubahan POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan Kajian Akademik mengenai Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang mengakomodir penguatan penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi Perusahaan Efek.

e. Pilar 5 Penguatan Layanan Keuangan Digital untuk Penguatan Kredibilitas Sektor Keuangan dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat.

Dalam rangka melakukan integrasi data untuk automasi dan simplifikasi proses perizinan serta dukungan pengawasan, telah dilakukan integrasi aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) dan *Data Warehouse* Pasar Modal.

3. *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024

Untuk lebih mempercepat pertumbuhannya, Otoritas Jasa Keuangan menyusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur, yang dituangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah. Seiring dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015–2019, maka diperlukan strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah selama periode lima tahun ke depan yang tertuang dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024. Strategi *Roadmap* ini terdiri dari empat arah kebijakan utama, yaitu Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah, Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah, Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah dan Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan.

b. Pillar 2: Accelerating Programs Related to Sustainable Finance

In establishing a Carbon Exchange as mandated by UU PPSK, POJK Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange and SEOJK Number 12/SEOJK.04/2023 on Procedures for Conducting Carbon Trading through the Carbon Exchange have been issued. PT Bursa Efek Indonesia has become the carbon exchange operator in Indonesia since September 26, 2023.

c. Pillar 3: Strengthening the Role of Industry Players in Financial Sector Development in Line with Best Practices and Market Conduct

To strengthen intermediation roles and expand financial services intermediation potential, OJK is reviewing the implementation of Securities Companies Stratification and Investment Managers Classification.

d. Pillar 4: Enhancing Investor Protection Efforts

OJK has accommodated regulations and supervision of influencers through amendments to POJK Number 50/POJK.04/2020 on Internal Controls of Securities Companies Conducting Business Activities as Securities Brokers. Additionally, OJK has completed an Academic Study on Internal Controls and Behavior of Securities Companies, which accommodates the strengthening of IT risk management in Securities Companies.

e. Pillar 5: Strengthening Digital Financial Services to Enhance Financial Sector Credibility and Public Trust

To integrate data for automation and simplification of licensing processes and support supervision, the integration of the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT) application with the Capital Market Supervision Information System (SIPM) and the Capital Market Data Warehouse has been carried out.

3. Sharia Capital Market Roadmap 2020-2024

To further accelerate its growth, OJK has developed a comprehensive, planned, and measurable strategy outlined in the Sharia Capital Market Roadmap. With the end of the Sharia Capital Market Roadmap 2015-2019, a new strategy is required for the next five years, contained in the Sharia Capital Market Roadmap 2020-2024. This strategy includes four main policy directions: Development of Sharia Capital Market Products, Strengthening and Developing Sharia Capital Market Infrastructure, Increasing Sharia Capital Market Literacy and Inclusion and Strengthening Synergies with Stakeholders.

Arah I : Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah

Sebagai industri yang berfungsi untuk menjembatani kebutuhan pendanaan perusahaan dengan kebutuhan investasi masyarakat, pasar modal syariah berperan dalam penyediaan produk yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Penyediaan produk dari industri pasar modal syariah ini mempunyai peran penting dalam ekosistem sektor jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sisi *supply* dan *demand*.

Upaya mendorong terbitnya sejumlah produk pasar modal syariah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya mulai dari penerbitan saham syariah, sukuk maupun reksa dana syariah telah banyak dilakukan. Namun demikian, sampai saat ini *market share* produk pasar modal syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk pasar modal konvensional. Hal ini memerlukan akselerasi untuk mendorong pertumbuhan produk pasar modal syariah tersebut.

Mempertimbangkan implementasi kebijakan atas produk pasar modal syariah saat ini, diperlukan berbagai bentuk pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika terkini. Hal ini perlu dilakukan dengan berbagai cara seperti memperkuat peraturan produk yang sudah ada, memodifikasi produk dengan tren perkembangan global, mensinergikan dengan produk dari industri keuangan lainnya serta dengan *mirroring* dari produk pasar modal konvensional yang telah ada.

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ragam produk investasi Pasar Modal Syariah, pada tahun 2023 OJK sedang menyusun kajian atas revisi POJK 35/2017 khususnya terkait mekanisme penerbitan efek syariah dalam negeri maupun luar negeri oleh Pihak Penerbit DES (PPDES). Untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah di pasar modal, OJK berencana melakukan perubahan ketentuan dalam penentuan kriteria saham syariah dalam rangka mengakomodir masukan dari *stakeholder* dan juga menyelaraskan dengan praktik internasional. Selain itu, OJK juga berencana melakukan perubahan atas ketentuan mengenai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam rangka meningkatan efisiensi dan efektivitas perizinan dan Pengawasan terhadap PPDES dimaksud.

Selanjutnya, dalam rangka program pengembangan produk pasar modal syariah berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI) dan rencana aksi pengembangan produk pasar modal syariah berbasis wakaf produktif, pada tahun 2023 telah dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai pilihan pendanaan maupun investasi guna optimalisasi pengelolaan aset wakaf bagi para nazir dan pelaku industri pasar modal. Sementara itu, untuk rencana aksi terkait filantropi islam di pasar modal syariah, OJK telah menerbitkan POJK 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan yang mencakup ketentuan terkait EBUS Lingkungan, Sosial, Keberlanjutan, terkait Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf.

Direction I: Development of Sharia Capital Market Products

As an industry that serves to bridge the funding needs of companies with the investment needs of the public, the sharia capital market plays a role in providing products that meet sharia principles in the capital market. The provision of products from the sharia capital market industry plays an important role in the financial services sector ecosystem to meet supply and demand needs.

Efforts to encourage the issuance of various sharia capital market products, ranging from sharia shares, sukuk, to sharia mutual funds, have been carried out extensively. However, the market share of sharia capital market products remains relatively small compared to conventional capital market products. This requires acceleration to drive the growth of these sharia capital market products.

Considering the current implementation of policies on sharia capital market products, various forms of development tailored to community needs and current dynamics are necessary. This includes strengthening existing product regulations, modifying products with global development trends, synergizing with products from other financial industries, and mirroring existing conventional capital market products.

In implementing the program to increase the variety of Sharia Capital Market investment products, in 2023 OJK is conducting a study on revising POJK 35/2017, particularly regarding the mechanism for issuing domestic and foreign sharia securities by Sharia Securities Issuers (PPDES). To enhance the application of sharia principles in the capital market, OJK plans to amend the criteria for sharia shares to accommodate stakeholder input and align with international practices. Additionally, OJK plans to amend regulations concerning Sharia Securities Issuers (PPDES) to improve the efficiency and effectiveness of licensing and supervision of these issuers.

Furthermore, in the program to develop Sharia capital market products based on Socially Responsible Investment (SRI) and the action plan for developing sharia capital market products based on productive waqf, a series of activities have been carried out in 2023, including coordination, dissemination, business matching, and one-on-one meetings involving nazir, industry players, and related ministries/agencies. This program aims to introduce the sharia capital market as a funding and investment option to optimize waqf asset management for nazir and capital market industry players. Meanwhile, for action plans related to Islamic philanthropy in the sharia capital market, OJK has issued POJK 18/2023 on the Issuance and Requirements for Sustainable Debt Securities and Sukuk, which includes provisions related to Environmental, Social, and Sustainability Sukuk, and Waqf Sukuk.

Arah II: Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah

Pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia cukup menggembirakan dalam lima tahun terakhir (2018 – 2023), tercermin dari jumlah aset pasar modal syariah di Indonesia yang meningkat cukup pesat selama kurun waktu tersebut. Namun demikian, infrastruktur pasar modal syariah masih perlu terus untuk dikembangkan. Infrastruktur ini mencakup landasan hukum terkait produk, jasa, maupun layanan pasar modal syariah, serta kelembagaan syariah di pasar modal. Penguatan infrastruktur pasar modal syariah juga akan memperhatikan perkembangan isu-isu terkini, seperti teknologi finansial.

Sehubungan dengan program peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di pasar modal, OJK telah menerbitkan POJK No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Selanjutnya, OJK juga menerbitkan SEOJK Nomor 9/SEOJK.04/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. OJK sedang melakukan pengembangan sistem laporan tata kelola untuk mengimplementasikan regulasi tersebut.

Selain Manajer Investasi, Perusahaan efek juga mempunyai peran penting di dalam pengembangan pasar modal, termasuk pasar modal syariah, karena merupakan ujung tombak dalam menarik minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum maupun mengajak institusi atau perorangan untuk menjadi investor. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan efek yang berpartisipasi di pasar modal syariah, diharapkan jumlah penerbitan efek syariah, nilai transaksi, dan jumlah dana kelolaan efek syariah juga akan meningkat. Sampai dengan tahun 2023, sudah terdapat 34 Perusahaan Efek yang pernah menjadi Penjamin Emisi Sukuk (empat di antaranya telah cabut izin).

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemanfaatan teknologi finansial (tekfin) untuk mendukung Pasar Modal Syariah, salah satu rencana aksinya yaitu mengupayakan pembentukan *platform crowdfunding* syariah. Per Desember 2023 sudah terdapat tiga *platform* penyelenggara berizin OJK yang *full-fledged* syariah.

Arah III: Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah

Literasi dan inklusi merupakan dua hal penting yang berperan dalam akselerasi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, mengingat indikator literasi dan inklusi tersebut yang menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang telah memahami serta memanfaatkan industri pasar modal syariah sebagai bagian dari aktivitas keuangannya.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016, diperoleh data bahwa tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah hanya mencapai 0,02 persen dan 0,01 persen. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap industri pasar modal syariah ikut berdampak terhadap rendahnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan di pasar modal syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan, baik terhadap pelaku

Direction II: Strengthening and Developing Sharia Capital Market Infrastructure

The growth of the sharia capital market industry in Indonesia has been quite encouraging over the past five years (2018 – 2023), as reflected by the significant increase in the number of sharia capital market assets during this period. However, the infrastructure of the sharia capital market still needs continuous development. This infrastructure includes the legal framework for sharia capital market products, services, and institutions. Strengthening sharia capital market infrastructure will also consider current issues, such as financial technology.

In connection with the program to enhance the role and capacity of sharia institutions in the capital market, OJK has issued POJK No. 2 of 2023 on Amendments to OJK Regulation No. 10/POJK.04/2018 concerning the Implementation of Investment Manager Governance. Furthermore, OJK issued SEOJK No. 9/SEOJK.04/2023 on Amendments to OJK Circular No. 19/SEOJK.04/2018 on Investment Manager Governance Reports. OJK is developing a governance report system to implement these regulations.

Besides Investment Managers, securities companies also play an important role in the development of the capital market, including the sharia capital market, as they are at the forefront of attracting companies to conduct public offerings and inviting institutions or individuals to become investors. With the increasing number of securities companies participating in the sharia capital market, the number of sharia securities issuances, transaction values, and the amount of managed sharia securities funds are expected to increase. As of 2023, there are 34 Securities Companies that have acted as Sukuk Underwriters (four of which have revoked their licenses).

Meanwhile, to support the program of utilizing financial technology (fintech) for the sharia capital market, one of the action plans is to establish a sharia crowdfunding platform. As of December 2023, there are three OJK-licensed platforms that are full-fledged sharia.

Direction III: Increasing Sharia Capital Market Literacy and Inclusion

Literacy and inclusion are two important aspects that play a role in accelerating the development of the sharia capital market in Indonesia, considering that literacy and inclusion indicators show how many people have understood and utilized the sharia capital market industry as part of their financial activities.

Based on the 2016 National Financial Literacy and Inclusion Survey, data showed that the literacy and inclusion rates of the public towards the sharia capital market were only 0.02 percent and 0.01 percent, respectively. The low public understanding of the sharia capital market industry contributes to the low public willingness to utilize products and services in the sharia capital market. Therefore, increasing literacy and inclusion in the sharia capital market needs to be continuously carried out, both for sharia capital market

industri pasar modal syariah sebagai pihak yang aktif melakukan aktivitas di pasar modal syariah, maupun terhadap masyarakat secara luas. Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi meningkatkan kompetensi syariah SDM di Pasar Modal, pada tahun 2023, OJK telah melakukan identifikasi isu-isu syariah di pasar modal bekerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penyusunan standarisasi aspek syariah di pasar modal.

industry players who actively engage in sharia capital market activities and for the broader community. In implementing the action plan to enhance the sharia competence of human resources in the Capital Market, in 2023, OJK has identified sharia issues in the capital market in collaboration with DSN-MUI to develop standards for sharia aspects in the capital market.

Selanjutnya, dalam rangka program peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di pasar modal, pada tahun 2023 telah dilakukan *Business Matching* dan *Coaching Clinic* peningkatan peran lembaga keuangan syariah di pasar modal. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan *Business Matching* dengan lembaga keuangan syariah sektor IKNB yang diikuti oleh 12 lembaga pembiayaan syariah, sektor Perbankan yang diikuti oleh 19 bank syariah, dan 16 perusahaan asuransi. Terdapat dua lembaga keuangan syariah yang mendapatkan perizinan/pendaftaran di pasar modal, yaitu PT Bank Mega Syariah sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam menyediakan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara *online*.

Furthermore, in the program to enhance the role and capacity of sharia institutions in the capital market, Business Matching and Coaching Clinic activities have been conducted in 2023 to enhance the role of sharia financial institutions in the capital market. During 2023, Business Matching with sharia financial institutions in the IKNB sector was conducted, involving 12 sharia financing institutions, the Banking sector with 19 sharia banks, and 16 insurance companies. There are two sharia financial institutions that obtained licenses/registrations in the capital market, namely PT Bank Mega Syariah as a Sharia Mutual Fund Selling Agent (APERD) and PT Bank Syariah Indonesia Tbk in providing online Customer Fund Accounts (RDN) services.

Sementara itu, kegiatan *Coaching Clinic* telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Berdasarkan hasil *Business Matching*, diperlukan perluasan produk syariah di masyarakat dengan peningkatan peran bank dan IKNB syariah di pasar modal syariah. *Coaching Clinic* dilakukan dalam rangka peningkatan peran lembaga keuangan syariah di pasar modal, salah satunya sebagai penerbit Efek syariah (Sukuk). Pada tahun 2023, terdapat 54 seri penerbitan sukuk korporasi oleh 20 pihak. Di sisi penerbitan SCF, terdapat 195 seri penerbitan sukuk dan empat penerbitan saham syariah melalui SCF oleh 105 pihak (akumulasi). Perkembangan industri pasar modal syariah perlu ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Meanwhile, eight Coaching Clinic activities have been conducted. Based on the results of Business Matching, expanding sharia products in the community through the increased role of sharia banks and IKNB in the sharia capital market is necessary. Coaching Clinic aims to enhance the role of sharia financial institutions in the capital market, one of which is as issuers of sharia securities (Sukuk). In 2023, there were 54 corporate sukuk issuances by 20 parties. In the SCF issuance, there were 195 sukuk issuances and four sharia share issuances through SCF by 105 parties (cumulative). The development of the sharia capital market industry needs to be supported by quality human resources (HR).

Pada 2023 telah dilaksanakan *Training of Trainers* (ToT) kepada dosen perguruan tinggi serta kepada organisasi masyarakat Islam untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah. Pelaksanaan kegiatan ToT berupa penyuluhan pasar modal syariah dalam bentuk *training/workshop*/sosialisasi. ToT dilaksanakan kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Syiah Kuala Aceh, kepada pengurus dan anggota Fatayat NU tanggal 10 April 2023 dan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan IAIN Ambon.

In 2023, Training of Trainers (ToT) was conducted for university lecturers and Islamic community organizations to increase public literacy on the sharia capital market. ToT activities included sharia capital market education in the form of training/workshops/socialization. ToT was conducted for the Faculty of Sharia Economics and Business Lecturers at Syiah Kuala University Aceh, for the Fatayat NU management and members on April 10, 2023, and public lectures at Muhammadiyah University Surakarta and IAIN Ambon.

Sepanjang 2023 juga telah dilaksanakan beberapa kali *workshop* salah satunya terkait dengan terkait SCF Syariah. Pelaksanaan *workshop* tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk menerbitkan dan memasarkan produk pasar modal syariah kepada masyarakat luas. Sehubungan dengan rencana aksi optimalisasi implementasi program reksa dana syariah bagi pelajar dan mahasiswa, dilakukan sosialisasi reksa dana syariah bagi siswa SMA Labschool Unsyiah, sosialisasi kepada komunitas Pemuda Aceh dan Remaja Masjid, serta sosialisasi kepada komunitas perempuan Aceh.

Throughout 2023, several workshops were also conducted, one of which was related to Sharia SCF. These workshops aim to increase the confidence of market participants to issue and market sharia capital market products to the broader community. In connection with the action plan to optimize the implementation of sharia mutual fund programs for students, socialization of sharia mutual funds was conducted for Labschool Unsyiah high school students, Aceh Youth and Mosque Youth communities, and Aceh women's communities.

Dalam rangka kerja sama edukasi pasar modal syariah, OJK telah menyelenggarakan sosialisasi pasar modal syariah baik sebagai penyelenggara maupun narasumber, antara lain kegiatan *Roadshow* Pasar Modal Syariah bagi diaspora Indonesia di Singapura yang bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Selain itu juga dilakukan penyebaran informasi pasar modal syariah melalui media sosial yang dikelola secara mandiri.

In cooperation with sharia capital market education, OJK has conducted socialization of the sharia capital market both as an organizer and as a speaker, including the Sharia Capital Market Roadshow for Indonesian diaspora in Singapore in collaboration with the Sharia Economic Community. Additionally, sharia capital market information is disseminated through independently managed social media.

Arah IV: Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan
Dalam mewujudkan industri pasar modal syariah yang wajar, teratur dan efisien serta terjaga pemenuhan prinsip syariahnya, pasar modal syariah perlu terus menerus melakukan koordinasi dengan regulator dan otoritas terkait yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, mengawasi industrinya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Direction IV: Strengthening Synergy with Stakeholders
To create a fair, orderly, and efficient sharia capital market industry while ensuring the fulfillment of sharia principles, the sharia capital market needs continuous coordination with regulators and relevant authorities who have the authority to make policies, supervise the industry, and conduct socialization to the public, including the Ministry of Finance, the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency, Bappenas, Bank Indonesia, the Supreme Court, the National Sharia Board-the Council of Indonesian Ulama, and the National Committee for Sharia Economy and Finance.

Kolaborasi yang efektif perlu ditingkatkan agar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dapat selaras dan tidak kontra produktif. Selain itu, tugas dan fungsi berupa pengawasan maupun sosialisasi masing-masing regulator dan otoritas juga perlu dikoordinasikan agar dapat dilakukan secara lebih efisien dari segi waktu dan biaya dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

Effective collaboration needs to be enhanced so that policies and regulations issued are aligned and not counterproductive. Additionally, the supervision and socialization tasks and functions of each regulator and authority need to be coordinated to be more efficient in terms of time and cost and to reach a wider segment of society.

OJK juga melakukan sinergi dengan *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) antara lain mengenai regulasi terkait pasar modal syariah serta Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah.

OJK also synergizes with Self-Regulatory Organizations (SROs) consisting of the Indonesia Stock Exchange (BEI), the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), and the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), including regulations related to the sharia capital market and the implementation of sharia capital market socialization and education.

Untuk meningkatkan *market share* industri pasar modal syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan sektor syariah lainnya, yaitu perbankan syariah dan IKNB syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan efek syariah di pasar modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di efek syariah. Selain dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di pasar modal syariah.

To increase the market share of the sharia capital market industry in Indonesia, synergy with other sharia sectors, namely sharia banking and sharia IKNB, is needed. This synergy can also increase the capacity of sharia financial institutions through the issuance of sharia securities in the capital market to enhance capitalization. Additionally, sharia financial institutions with excess liquidity can invest in sharia securities. Besides supply and demand, these sharia financial institutions can also play a role as infrastructure in the sharia capital market.

Di samping itu, OJK senantiasa mempromosikan pasar modal syariah ke berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu. OJK juga senantiasa berkolaborasi dengan SRO, asosiasi, dan pelaku industri pasar modal dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah, baik melalui kegiatan virtual maupun tatap muka.

Moreover, OJK continually promotes the sharia capital market to various regions in Indonesia, one of which is through Integrated Capital Market Socialization and Education activities. OJK also continually collaborates with SROs, associations, and capital market industry players to increase public literacy and inclusion in the sharia capital market, both through virtual and face-to-face activities.

IV.4 Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Supervision of Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds

IV.4.1. Aktivitas Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Regulation Activities of Insurance, Guarantees Institutions and Pension Funds

Dengan diterapkannya UU PPSK, sektor IKNB khususnya di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) diharapkan semakin stabil dan berkembang, mampu mempercepat akumulasi dana jangka panjang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, mendorong pendalaman sektor keuangan secara keseluruhan, dan berkontribusi pada sektor keuangan yang lebih stabil serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sepanjang 2023, OJK telah menerbitkan 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan lima Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) sebagai kebijakan di Bidang PPDP, antara lain:

With implementation of the PPSK Act, the NBFI sector, specifically the insurance industry, guarantees and pension funds (PPDP), is expected to develop and maintain stability, thereby accelerating the accumulation of long-term funds that can be leveraged as a source of development financing, increasing financial sector deepening overall and contributing to a more stable financial sector in pursuit of sustainable national economic growth.

In 2023, OJK promulgated 10 OJK Regulations (POJK) and five Circular Letters (SEOJK) concerning the PPDP industry as follows:

Tabel 4.41. Ketentuan/Kebijakan Bidang PPDP Tahun 2023
Table 4.41. Provisions/Policy in the Field of PPDP for the Year 2023

Nomor *Number*	Mengatur Tentang *Concerning*
POJK 1/2023	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan. | *Amendment to OJK Regulation Number 5/POJK.05/2013 concerning Supervision of the Social Security Management Agency (BPJS) by the Financial Services Authority (OJK)*
POJK 5/2023*	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. | *Second amendment to OJK Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance Companies and Reinsurance Companies*
POJK 6/2023*	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. | *Second amendment to OJK Regulation Number 72/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Islamic Insurance Companies and Islamic Reinsurance Companies*
POJK 7/2023*	Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. | *Governance and Institutional Arrangements of Joint Venture Insurance Companies*
POJK 10/2023*	Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan | *Spin-Off of Islamic Windows from Guarantee Companies*
POJK 11/2023*	Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi | *Spin-Off of Islamic Windows from Insurance Companies and Reinsurance Companies*
POJK 20/2023*	Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah *Insurance Products Linked to Credit or Islamic Finance as well as Suretyship or Sharia-compliant Suretyship Products*
POJK 23/2023*	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah *Business Licenses and Institutional Arrangements of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies and Islamic Reinsurance Companies*
POJK 24/2023*	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian *Business Licenses and Institutional Arrangements of Insurance Brokers, Reinsurance Brokers and Loss Assessors*

Nomor *Number*	Mengatur Tentang *Concerning*
POJK 27/2023*	Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun | *Implementation of Pension Fund Business*
SEOJK 1/2023	Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah. *Monthly Reports of Guarantee Companies, Islamic Guarantee Companies and Islamic Windows*
SEOJK 15/2023	Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan *Monthly Report on Health Insurance Program Management for the Social Security Management Agency (BPJS)*
SEOJK 21/2023	Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi *Amendment to Circular Letter Number 25/SEOJK.05/2020 concerning the Format and Structure of Periodic Reports for Insurance Brokers, Reinsurance Brokers and Loss Assessors*
SEOJK 22/2023	Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial *Monthly Financial Statement of Social Security Management Agency (BPJS) and Monthly Financial Statement of Social Guarantee Fund*
SEOJK 23/2023	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun *Fit and Proper Tests for Primary Parties of Insurance Companies, Guarantee Institutions and Pension Funds*

*keterangan: peraturan turunan UU PPSK | **note: Regulations Derived from UU PPSK*

Sebagai tindak lanjut memenuhi amanat UU PPSK untuk menerbitkan peraturan turunannya, OJK menerbitkan sembilan POJK di bidang PPDP antara lain:

1. **POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**
   POJK mengatur antara lain mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi. Selain itu, perlu juga untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut mengenai pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (6) UU PPSK.

2. **POJK 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah**
   POJK mengatur antara lain mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi. Selain itu, perlu juga untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut mengenai pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (6) UU PPSK.

As a follow-up action to fulfil the mandate in accordance with the PPSK Act in terms of promulgating derivative regulations, OJK in 2023 issued nine OJK Regulations (POJK) derived from the PPSK Act in the PPDP industry as follows:

1. ***POJK Number 5 of 2023, as the second amendment to Financial Services Authority Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance Companies and Reinsurance Companies***
   This POJK was issued to regulate, among others, investment limits on related and non-related parties. The investment limits required adjustment to encourage corporate prudence when placing investments by considering corporate capital capacity to bear the investment risks. In addition, some of the provisions contained in the POJK also required adjustments concerning exemptions from the obligation to establish a guarantee fund for insurance companies that participate in the policy guarantee program in accordance with Article 83, Paragraph (6) of the PPSK Act.

2. ***POJK Number 6 of 2023, as the second amendment to Financial Services Authority Regulation Number 72/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Islamic Insurance Companies and Islamic Reinsurance Companies***
   This POJK was issued to regulate, among others, investment limits on related and non-related parties. The investment limits required adjustment to encourage corporate prudence when placing investments by considering corporate capital capacity to bear the investment risks. In addition, some of the provisions contained in the POJK also required adjustments concerning exemptions from the obligation to establish a guarantee fund for insurance companies that participate in the policy guarantee program in accordance with Article 83, Paragraph (6) of the PPSK Act.

3. **POJK 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama**
   POJK dilatarbelakangi oleh Amanat dari UU PPSK dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha bersama, POJK ini mengatur mengenai ketentuan tentang tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi usaha bersama dan Penegakan kepatuhan kepada usaha bersama sebagaimana diatur dalam UU PPSK.

4. **POJK 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan**
   POJK mengatur kriteria pemisahan UUS dalam UU Penjaminan tersebut diatur berdasarkan pencapaian nilai aset tertentu (paling sedikit 50% dari nilai aset perusahaan induknya) atau dengan batas waktu 15 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diundangkan (UU Penjaminan). Dengan batas waktu tersebut, perusahaan penjaminan wajib melakukan pemisahan UUS paling lambat tanggal 19 Januari 2031, adapun amanat mengenai pemisahan UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Penjaminan diubah dengan Pasal 105 UU PPSK.

5. **POJK 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**
   Pada pokoknya mengatur kriteria pemisahan unit syariah dalam UU Perasuransian tersebut diatur berdasarkan pencapaian nilai aset tertentu dari dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta (paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya) atau dengan batas waktu 10 tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) diterbitkan. Dengan demikian batas waktu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya, amanat mengenai pemisahan unit syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Perasuransi diubah dengan Pasal 52 UU PPSK.

6. **POJK 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.**
   OJK menerbitkan POJK ini sebagai upaya untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah dikelola secara hati-hati dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, diperlukan pengaturan terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah.

7. **POJK 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

   POJK mengatur tentang penguatan pada aspek permodalan, kelembagaan dan operasional penyelenggaraan usaha industri. 1) Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (*new entry*) maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang

3. ***POJK Number 7 of 2023 concerning Governance and Institutional Arrangements of Joint Venture Insurance Companies***
   This POJK was issued in accordance with the mandate of the PPSK Act in terms of supervising joint venture companies. The POJK regulates governance and the institutional arrangements of joint venture insurance companies and enforces compliance at joint venture companies in accordance with the PPSK Act.

4. ***POJK Number 10 of 2023 concerning the Spin-Off of Islamic Windows from Guarantee Companies***
   This POJK regulates the criteria for the spin-off of Islamic windows, as stipulated in the Guarantee Act, based on a specific asset value (at least 50% of the asset value of the parent company) or prescriptive period of 15 years after enactment of Act Number 1 of 2016 concerning Guarantees (Guarantee Act). Guarantee companies are obligated, therefore, to separate (spin-off) their Islamic windows no later than 19th January 2031. The mandate regarding the spin-off of Islamic windows as stated in Article 62 of the Guarantee Act was amended by Article 105 of the PPSK Act.

5. ***POJK Number 11 of 2023 concerning the Spin-Off of Islamic Windows from Insurance Companies and Reinsurance Companies***
   Fundamentally, this POJK regulates the criteria for the spin-off of Islamic windows, as stipulated in the Insurance Act, based on a specific value of tabarru' funds and participant's investment funds (at least 50% of the total value of insurance funds, tabarru' funds and participant's investment funds in the parent company) or prescriptive period of 10 years after enactment of Act Number 40 of 2014 concerning Insurance (Insurance Act). Insurance and reinsurance companies are obligated, therefore, to separate (spin-off) their Islamic windows no later than 17th October 2024. The mandate regarding the spin-off of Islamic windows as stated in Article 87 of the Insurance Act was amended by Article 52 of the PPSK Act.

6. ***POJK Number 20 of 2023 concerning Insurance Products Linked to Credit or Financing as well as Suretyship or Sharia-compliant Suretyship***

   OJK issued this POJK to mitigate and manage prudently the level of risk exposure associated with insurance products linked to credit or Islamic finance as well as Suretyship or Sharia-compliant Suretyship products and provide better protection to the interested parties, thus requiring regulations concerning insurance products linked to credit or Islamic finance as well as Suretyship or Sharia-compliant Suretyship products.

7. ***POJK Number 23 of 2023 concerning the Business License and Institutional Arrangements of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies and Islamic Reinsurance Companies***
   The Financial Services Authority Regulation strengthens various capital, institutional and operational aspects as follows: 1) Strengthening capital by refining the provisions for minimum paid-up capital for new entries, while increasing the minimum equity for existing businesses. 2) Strengthening institutional aspects by refining regulations on the

telah mendapatkan izin usaha (*existing*). 2) Penguatan dalam aspek kelembagaan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria pengendali, persyaratan dan kriteria penggunaan tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan aktuaris perusahaan, penambahan substansi pengaturan terkait pejabat eksekutif dan auditor internal, serta penyesuaian pengaturan mengenai rangkap jabatan pihak utama. 3) Penguatan dalam aspek operasional penyelenggaraan usaha industri dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru terkait sinergi kerja sama dalam satu kepemilikan (*sharing function in one group*).

requirements and criteria for controlling parties, the requirements and criteria for employing foreign workers, specialists and corporate actuaries, additional regulatory substance concerning executive officers and internal auditors, as well as refining the regulations on concurrent positions held by primary parties. 3) Strengthening operational aspects by establishing new policies regarding the sharing function in one group.

8. **POJK 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian**
   Penyempurnaan pengaturan antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, tenaga ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, penggabungan, dan peleburan, *e-licensing*, dan sanksi.

8. ***POJK Number 24 of 2023 Business License and Institutional Arrangements of Insurance Brokers, Reinsurance Brokers and Loss Assessors***
   The regulatory improvements encompass the reporting mechanisms and identification of foreign ownership, increasing paid-up capital upon establishment, mechanisms for corporate licensing, approval and reporting, organisational structure, foreign workers, specialists, insurance brokers, reinsurance brokers and loss assessors, branch offices outside head office, insurance agents, changes of ownership, reporting, mergers and consolidation, e-licensing and sanctions.

9. **POJK 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun**

9. ***POJK Number 7 of 2023 concerning the Implementation of Pension Fund Business***

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terkait usia pensiun, iuran, manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun disabilitas, pensiun ditunda, dana pensiun lembaga keuangan, program pensiun dan program manfaat lain, pendanaan dana pensiun, metode dan asumsi aktuaria, pengakhiran kelompok peserta dan mitra pendiri, penangguhan pembayaran iuran pendiri dan mitra pendiri, pengalihan dana tidak aktif, pengalihan kepesertaan, perubahan program pensiun, penggabungan dan pemisahan, laporan aktuaris, akad, jenis investasi, pembatasan investasi dana pensiun, arahan investasi, pengalihan aset, pengelolaan investasi, kewajiban pengurus dalam pengelolaan investasi, pengalihan pengelolaan aset, penilaian kinerja investasi dana pensiun, transparansi pengelolaan investasi dan sanksi.

The regulation was refined in terms of retirement age, contributions, normal retirement benefits, accelerated retirement benefits, disability retirement benefits, deferred retirement, financial institution pension funds, pension programs and other benefits, pension fund funding, actuarial methods and assumptions, discontinuation of participant groups and founding partners, suspension of payment of founder and founding partner fees, transfer of inactive funds, transfer of membership, changes to pension programs, mergers and spin-offs, actuarial reports, contracts, types of investment, investment restrictions on pension funds, direction of investment, transfer of assets, investment management, investment management obligations, transfer of asset management, assessment of pension fund investment performance, investment management transparency and sanctions.

Selain itu, pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan, pengawasan serta kepatuhan (*compliance*) khususnya di OJK. Sebagai langkah awal upaya penguatan pengawasan *prudential* kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan POJK 1 Tahun 2023 tentang Perubahan POJK 5/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan terkait landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada BPJS baik dalam proses pengawasan langsung maupun tidak langsung termasuk untuk mengoptimalkan pengawasan kepada BPJS, serta sebagai upaya meningkatkan kinerja BPJS dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

In addition, it was necessary to strengthen integrated regulation and supervision of the financial services sector, including regulation, supervision and compliance, especially at OJK. As a preliminary measure to strengthen prudential supervision of the Social Security Management Agency (BPJS), the Financial Services Authority (OJK) promulgated POJK Number 1 of 2023 as an amendment to POJK Number 5 of 2013 concerning Supervision of the Social Security Management Agency (BPJS) by the Financial Services Authority (OJK). The regulation reinforces the legal basis for the Financial Services Authority to strengthen its supervision of BPJS in terms of on-site and off-site supervision, which includes optimising the supervision of BPJS to enhance BPJS performance for the consistent and sustainable operation of the national social security system, while protecting the interests of stakeholders and increasing compliance to prevailing laws and regulations.

IV.4.2. Aktivitas Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Supervision of Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dilakukan menggunakan pendekatan RBS (*risk based supervision*) untuk perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, serta menggunakan pendekatan *compliance based supervision* untuk perusahaan jasa penunjang dan perusahaan penjaminan.

The implementation of supervisory duties and functions is conducted using a Risk-Based Supervision (RBS) approach for insurance and pension fund companies and a compliance-based supervision approach for auxiliary service companies and guarantee companies.

IV.4.2.1. Pengawasan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

1. Dalam rangka persiapan implementasi PSAK 117, OJK melakukan pemantauan persiapan implementasi PSAK 117 dengan meminta Perusahaan menyampaikan GAP *Analysis* terhadap implementasi PSAK 117, *Technical Position Paper* (TPP), *Financial Impact Analysis* dan Saldo Awal penerapan PSAK 117, serta pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam rangka persiapan implementasi PSAK 117. Beberapa tantangan dalam persiapan implementasi khususnya bagi perusahaan perasuransian antara lain aspek kesiapan SDM dan sistem teknologi informasi yang andal dalam mendukung implementasi PSAK 117.
2. OJK meminta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk menyampaikan saldo awal seluruh akun aktiva, liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan per 1 Januari 2024, laporan perkembangan/progres penyelesaian pembangunan/pengembangan sistem dan teknologi informasi PSAK 117 secara bulanan serta melaksanakan *parallel run* yang dimulai sejak 1 Juli 2024.
3. OJK melakukan evaluasi kinerja perusahaan perusahaan Asuransi dan Reasuransi tahun 2022 dan rencana bisnis tahun 2023, termasuk memastikan agar *asset liability management* dapat dijalankan dengan baik, sehingga kewajiban perusahaan dapat dilaksanakan dengan efektif.
4. Risiko terjadinya *poaching* dan *twisting* pada industri Asuransi dimitigasi antara lain melalui diskusi dengan para pihak yang terlibat dan memastikan kondisi tersebut tidak terulang kembali, serta akan tercipta persaingan yang sehat di antara agen asuransi dan industri asuransi jiwa.
5. Penempatan investasi perlu dilengkapi dengan *self-assessment* oleh Perusahaan.
6. Pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban kepemilikan aktuaris oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
7. Perusahaan asuransi akan didorong untuk menjadi pelapor SLIK untuk memperkecil *gap* informasi asimetris antara lembaga penyalur kredit dengan perusahaan asuransi, dan *profiling* calon tertanggung yang lebih efektif, meliputi Perusahaan Asuransi dalam bidang usaha asuransi umum yang memasarkan produk asuransi kredit dan *suretyship*.

IV.4.2.1. Supervision of Insurance and Reinsurance Companies

1. *In preparation for the implementation of PSAK 117, OJK conducts a GAP Analysis on the implementation of PSAK 117 across all insurance companies, delivers Technical Position Papers (TPP), conducts Financial Impact Analysis, and establishes initial balances for the application of PSAK 117. Additionally, OJK is developing and improving systems and information technology to support the implementation of PSAK 117. Challenges in preparation, particularly for insurance companies, include the readiness of human resources and reliable information technology systems to support PSAK 117 implementation.*
2. *OJK requires insurance and reinsurance companies to report the initial balances of all asset, liability, and equity accounts in their financial position statements as of January 1, 2024, provide monthly progress reports on the development of systems and information technology for PSAK 117, and conduct parallel runs starting from July 1, 2024.*
3. *OJK evaluates the 2022 performance and 2023 business plans of insurance and reinsurance companies, ensuring effective asset-liability management.*
4. *The risk of poaching and twisting in the insurance industry is mitigated through discussions with relevant parties to ensure such conditions do not recur, fostering healthy competition among insurance agents and the life insurance industry.*
5. *Investment placements need to be complemented with self-assessments by the companies.*
6. *Monitoring the fulfillment of actuarial ownership obligations by general and reinsurance companies.*
7. *Encouraging insurance companies to become SLIK reporters to reduce information asymmetry between credit institutions and insurance companies, enhancing the profiling of prospective insured parties, including general insurance companies marketing credit insurance and suretyship products.*

IV.4.2.2.Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah

Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pada 2023, kegiatan pengawasan tidak langsung yang telah dilakukan antara lain analisis pemenuhan ketentuan batasan investasi pada pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, pelaksanaan *prudential meeting* dengan perusahaan terkait rencana *spin off* unit syariah, pembahasan rencana bisnis tahun 2024, dan diskusi dengan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah *full-fledged*. Selain itu, pada 2023 juga telah dilakukan penyusunan *Know Your Insurance Company* (KYIC) untuk seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah *full-fledged.*

Berkenaan dengan *spin-off* unit syariah, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2026. Sebelum dilakukan pemisahan unit syariah, perusahaan yang memiliki unit syariah harus menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) paling lambat 31 Desember 2023. Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, perusahaan yang memiliki unit syariah telah menyampaikan perubahan RKPUS di tahun 2023, kecuali satu perusahaan yang tidak wajib menyampaikan perubahan RKPUS karena sedang dalam proses pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahan asuransi syariah lain.

Selama 2023, terdapat satu unit syariah yang melakukan proses *spin-off* menjadi perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan dasar hukum POJK Nomor 67/POJK.05/ 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

IV.4.2.3.Pengawasan Jasa Penunjang

Dalam pelaksanaan pengawasan industri jasa penunjang dan profesi penunjang di bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, fokus OJK pada 2023 antara lain melakukan *monitoring* atas pelaksanaan ketentuan POJK 28 Tahun 2022 yang antara lain mengatur Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum POJK 28 Tahun 2022 diundangkan, wajib memperoleh persetujuan OJK untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B paling lambat enam bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Selain itu, OJK melakukan penegakan kepatuhan atas ketentuan minimum ekuitas Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berdasarkan hasil pemeriksaan *on-site* maupun *off-site*, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri jasa penunjang melalui koordinasi lintas sektor untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang perasuransian.

IV.4.2.2. Supervision of Sharia Insurance and Reinsurance

For the supervision of sharia insurance and reinsurance companies, OJK conducts both on-site supervision and off-site supervision. In 2023, off-site supervision activities included analyzing compliance of limitation provisions investment in related parties as regulated in POJK 6 of 2023 (an amendment to POJK 72/POJK.05/2016 on Financial Health of Insurance and Reinsurance Companies with Sharia Principles) and conducting prudential meeting with companies regarding spin-offs plan of sharia units, discussion 2024 business plans, and discussions with public accounting firms auditing of full-fledged sharia insurance and reinsurance companies. Moreover, in 2023 preparations of Know Your Insurance Company (KYIC) has been conducted for all insurance companies and full-fledged sharia reinsurance.

Regarding to sharia units spin-offs, as regulated in POJK Number 11 of 2023 on the Separation of Sharia Units from Insurance and Reinsurance Companies, insurance and reinsurance companies with sharia units must separate these units by December 31, 2026. Companies with sharia units must submit revised sharia unit separation work plan (RKPUS) at the latest December 31, 2023. As a follow-up to this regulation, companies with sharia units have announced revises RKPUS in 2023, except one company which is not mandatory convey the RKPUS revises because in the transfer process of membership portfolio to other sharia insurance companies.

In 2023, one sharia unit successfully completed a spin-off to become a sharia insurance company based on POJK 67 of 2016 on Licensing and Institutional Requirements for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.

IV.4.2.3. Supervision of Supporting Services

In supervising the supporting services industry and supporting professions in insurance, guarantee, and pension funds, OJK focused on monitoring the implementation of POJK 28 of 2022. This regulation requires insurance brokerage companies that provided digital insurance brokerage services before the enactment of POJK 28 of 2022 to obtain OJK approval to continue offering these services as specified in Article 51B within six months of the regulation's enactment.

Additionally, OJK enforces compliance with minimum equity requirements for insurance brokerage companies, reinsurance brokerage companies, and insurance loss adjusters based on on-site supervision and off-site supervision, and promotes human resource quality in supporting services through cross-sector coordination to establish National Work Competency Standards in insurance.

IV.4.2.4. Pengawasan Dana Pensiun

Pengawasan terhadap Dana Pensiun menerapkan pengawasan berbasis risiko *(risk-based supervision).* Pengawasan berbasis risiko berdasarkan POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dilakukan terhadap empat pilar yaitu tata kelola, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan. Penilaian terhadap profil risiko Dana Pensiun dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Adapun pengawasan terhadap industri Dana Pensiun dilakukan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung terhadap Dana Pensiun mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung tahun 2023, substansi permasalahan Dana Pensiun secara umum berada pada risiko operasional, risiko pasar, risiko kredit, tata kelola, dan pendanaan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dalam bentuk antara lain pemantauan terhadap status pengawasan Dana Pensiun, analisis laporan berkala, pengenaan sanksi atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan prudential meeting serta penyampaian *supervisory concern.*

Demikian pula, pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan POJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK. Ketentuan tersebut juga memuat aturan terkait aspek pemeriksaan antara lain kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, perlindungan konsumen, kolektibilitas iuran dan aspek lain. Adapun pengawasan tidak langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan antara lain dengan melakukan analisis laporan berkala, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyampaian *supervisory concern.*

IV.4.2.5. Pengawasan Penjaminan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) kepada perusahaan. Dalam LHPL tersebut, OJK memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaran Perusahaan yang selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi. OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

IV.4.2.4. Supervision of Pension Funds

Supervision of Pension Funds applies supervision based risk (risk-based supervision). Risk-based supervision based on POJK Number 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Health Level of Non-Bank Financial Services Institutions are carried out on four pillars, there is governance, risk profile, profitability and funding. Assessment of Pension Fund risk profile are carried out on eight risks, including strategic risk, operational risk, credit risk, market risk, liquidity risk, compliance risk, legal risks, and reputation risks. Supervision of Pension Fund industry is conducted through on-site supervision and off-site supervision.

On-site supervision Pension Funds refers to POJK Number 11/POJK.05/2014 concerning Direct Examination of Non-Bank Financial Services Institutions as has been amended several times recently by POJK Number 30/POJK.05/2020 concerning Second Amendment of POJK Number 11/POJK.05/2014 concerning Direct Examination of Non-Bank Financial Services Institutions. Based on the results of direct examination in 2023, substance of Pension Fund problems in general are operational risks, market risk, credit risk, governance and funding. Off-site supervision includes monitoring of Pension Fund supervision status, analysis of periodic reports, sanctioning of provisions compliance violations, monitoring follow-ups on examination results, and prudential meetings as well as supervisory concerns submissions.

Likewise, supervision of BPJS Ketenagakerjaan is carried out through on-site and off-site supervision in accordance with the provisions of POJK Number 1 of 2023 concerning Amendments of POJK Number 5/POJK.05/2013 concerning Supervision of BPJS by OJK. These provisions also contain rules related to inspection aspects, including financial health, good governance implementation, investment management and performance, risk management and internal control implementation, consumer protection, contributions collectability and other aspects. Off-site supervision of BPJS Ketenagakerjaan includes periodic reports analysis, inspection results follow-up monitoring, and conveying supervisory concerns.

IV.4.2.5. Supervision of Guarantee Companies

Based on OJK Regulation Number: 30/POJK.05/2020 concerning On-Site Examination of Non-Bank Financial Institutions, examiners are required to submit an On-Site Examination Report (LHPL) to the company. In the LHPL, OJK provides recommendations for improvements to the company's operations and monitors the follow-up actions on these recommendations. OJK issues a response letter to the guarantee company regarding the implementation of the recommendations. This letter states which recommendations have been fulfilled, which are still not in compliance, and/or which must still be fulfilled by the company.

Selain melakukan pemeriksaan, OJK juga melakukan penegakan kepatuhan berupa pengenaan sanksi kepada setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya. Sanksi dapat berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

In addition to conducting examinations, OJK also enforces compliance by imposing sanctions on any company that does not meet the legal and regulatory requirements. Sanctions can include warnings, written reprimands, administrative fines, business activity restrictions, and even revocation of business licenses.

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, OJK saat ini sedang Rancangan POJK yang mengatur Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang merupakan penyempurnaan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

In order to implement the provisions of Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees, OJK is currently drafting a POJK regulation governing the Business Operations of Guarantee Institutions, which is an improvement of POJK Number 2/POJK.05/2017 concerning the Business Operations of Guarantee Institutions.

IV.4.2.6. Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Pengawasan khusus bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta Dana Pensiun berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan utama perusahaan. Pada perusahaan Asuransi, permasalahan utama antara lain tidak terpenuhinya modal minimum sesuai ketentuan; kinerja keuangan yang memburuk salah satunya karena melakukan investasi pada instrumen investasi berisiko tinggi dan banyak yang merugi; permasalahan solvabilitas yakni jumlah aset yang lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan; rendahnya peringkat komposit tingkat kesehatan dan tata kelola, serta permasalahan rasio kecukupan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. OJK melakukan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Tindak dan/atau Rencana Perbaikan Permodalan yang disusun Perusahaan Asuransi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, di antaranya melalui Program Penyehatan Organik, Program Kerja Fundamental, Program Revitalisasi/Optimalisasi Aset, Program Restrukturisasi, penambahan modal, penjualan aset, mencari mitra strategis/investor baru.

IV.4.2.6. Special Supervision of Insurance, Guarantee, and Pension Funds

Special supervision for Insurance and Reinsurance Companies and Pension Funds focuses on resolving the main issues faced by these companies. For insurance companies, key issues include failure to meet the minimum capital requirements, deteriorating financial performance partly due to investments in high-risk instruments that resulted in significant losses, solvency issues where assets are less than liabilities, low composite health and governance ratings, and non-compliance with investment adequacy ratios. OJK monitors the implementation of the Action Plan and/or Capital Improvement Plan prepared by the Insurance Company to address these issues, which may include Organic Rehabilitation Programs, Fundamental Work Programs, Asset Revitalization/Optimization Programs, Restructuring Programs, capital increases, asset sales, and seeking strategic partners/ new investors.

Permasalahan utama pada Dana Pensiun antara lain rasio pendanaan yang berada pada tingkat ketiga, yaitu suatu kondisi di mana aset dana pensiun lebih kecil dibandingkan dengan nilai kini aktuaria maupun liabilitas solvabilitas, penempatan investasi pada instrumen investasi berisiko tinggi yang merugi/gagal bayar, rendahnya peringkat komposit dan tata kelola, dan/atau terdapat piutang iuran dengan nilai signifikan dibandingkan dengan total aset yang terjadi karena tidak patuhnya pendiri untuk membayar iuran secara tepat waktu maupun tepat jumlah. Tindakan pengawasan yang dilakukan OJK kepada perusahaan dalam pengawasan khusus tersebut di antaranya melaksanakan pemeriksaan langsung, *prudential meeting* secara intensif, pengenaan sanksi/ peringatan, dan permintaan menyampaikan rencana tindak dan/atau rencana perbaikan pendanaan.

Key issues for Pension Funds include funding ratios at the third level, where pension fund assets are less than actuarial present values or solvency liabilities, investments in high-risk instruments that resulted in losses or defaults, low composite and governance ratings, and significant contribution receivables compared to total assets due to founders not paying contributions on time or in full. OJK's supervisory actions for companies under special supervision include conducting on-site supervision, intensive prudential meetings, imposing sanctions/warnings, and requesting the submission of action plans and/or funding improvement plan.

IV.4.2.7. Pengawasan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Dalam Likuidasi

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat sembilan Perusahaan Asuransi dalam likuidasi, dengan rincian yaitu enam Perusahaan Asuransi dalam proses penyelesaian likuidasi dan tiga Perusahaan Asuransi dalam tahap awal proses likuidasi karena dicabut izin usahanya oleh OJK pada tahun 2023. Selain itu, dalam rangka pemantauan perkembangan dan tindak lanjut pengawasan Perusahaan Asuransi (dalam likuidasi), setiap triwulan OJK membuat Laporan Analisis Substansi Permasalahan dan Perkembangan Likuidasi.

IV.4.2.7. Supervision of Liquidated Insurance and Pension Funds

As of December 31, 2023, there were nine insurance companies in liquidation, with six in the process of liquidation and three in the initial stages of liquidation due to license revocation by OJK in 2023. To monitor the progress and follow-up of the supervision of insurance companies (in liquidation), OJK prepares a quarterly Report on Substantive Issues Analysis and Liquidation Developments.

Sementara itu, terdapat 36 Dana Pensiun yang likuidasinya diawasi oleh OJK pada awal tahun 2023 dan per 31 Desember 2023 berkurang menjadi 30 Dana Pensiun karena adanya penyelesaian delapan Dana Pensiun (dalam likuidasi) dan penambahan dua Dana Pensiun (dalam likuidasi) yang dibubarkan pada tahun 2023. Selanjutnya, dari 20 Dana Pensiun yang bubar sebelum berlakunya POJK 9/2014, terdapat tujuh Dana Pensiun (dalam likuidasi) yang Pendirinya masih beroperasi sampai dengan saat ini. Pengawas telah mengupayakan untuk berkomunikasi dengan Tim Likuidasi maupun Pendiri.

Furthermore, there were 36 Pension Funds under OJK's liquidation supervision at the beginning of 2023, which decreased to 30 by December 31, 2023, due to the resolution of eight Pension Funds (in liquidation) and the addition of two Pension Funds (in liquidation) dissolved in 2023. Of the 20 Pension Funds dissolved before the enactment of POJK 9/2014, seven Pension Funds (in liquidation) still have operating founders. Supervisors have made efforts to communicate with the Liquidation Teams and Founders.

IV.4.3. Aktivitas Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Licensing of Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds

Hingga akhir 2023, OJK menerima 5.797 permohonan perizinan kelembagaan PPDP baik konvensional maupun syariah dan 4.644 telah selesai diproses sebagaimana berikut:

By the end of 2023, OJK received 5,797 licensing applications for both conventional and sharia institutional licenses, processing 4,644 applications as follows:

Jenis Perizinan	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Processed*	*License Type*
Pemberian Izin Usaha	10	3	*Business License Granting*
Pencabutan Izin Usaha	11	9	*Business License Revocation*
Penggabungan	4	3	*Merger*
Peleburan	-	-	*Consolidation*
Pengambilalihan	11	9	*Acquisition*
Perubahan Kepemilikan	114	43	*Ownership Change*
Penetapan, Perubahan, dan Pemberhentian Pengendali	28	21	*Controller Appointment, Change, and Termination*
Perubahan Anggaran Dasar	10	8	*Articles of Association Change*
Perubahan Modal Disetor	39	13	*Paid-up Capital Change*
Perubahan Pemegang Saham	-	-	*Shareholder Change*
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	80	42	*Pension Fund Regulation Change*
Perubahan Nama	11	8	*Name Change*
Kantor Cabang	66	47	*Branch Office*
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	597	300	*Marketing Office and Other Offices*
Pendaftaran Pialang	69	51	*Broker Registration*
Pengangkatan Pialang	62	60	*Broker Appointment*
Pemberhentian Pialang	32	29	*Broker Termination*
Pendaftaran Profesi PPDP	40	29	*Professional Registration*
Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi	11	9	*Professional Data Change (Appraiser, Actuarial Consultant, and Insurance Agent)*
Produk	1.362	1.082	*Product*
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1.037	833	*Fit and Proper Test*
Perubahan Pihak Utama	887	619	*Major Party Change*
Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	635	544	*Expert, Actuary, and Internal Auditor Appointment and Termination Reporting*

Jenis Perizinan	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Processed*	*License Type*
Pelaporan Rencana Penggunaan, Pengangakatan dan Pemberhentian Tenaga Kerja Asing	109	90	*Foreign Worker Usage, Appointment, and Termination Reporting*
Kegiatan Usaha Lain	13	3	*Other Business Activities*
Pelaporan AP/KAP	105	82	*Public Accountant/Accounting Firm Reporting*
Jumlah	**5.797**	**4.644**	***Total***

IV.4.4. Aktivitas Penegakan Hukum Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Legal Enforcement Activity in Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds

OJK melakukan penegakan hukum bagi Perusahaan perasuransian, penjaminan dan Dana Pensiun, baik melalui sanksi pembatasan kegiatan usaha maupun pencabutan izin usaha/pembatalan tanda terdaftar.

1. **Perusahaan Asuransi**

   Sepanjang 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha bagi tiga perusahaan Asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Prolife (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya) dan PT Asuransi Purna Artha Nugraha, yang disebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas, ekuitas minimum, dan/atau rasio kecukupan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan perusahaan tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Sebelum melakukan pencabutan izin, OJK telah memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan dimaksud.

   Dalam melakukan upaya pelindungan konsumen, OJK melakukan fasilitasi pengaduan konsumen, yaitu mempertemukan pemegang polis dengan Perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan konsumen. Selain itu, khusus untuk PT Asuransi Jiwa Kresna dan PT Prolife, OJK telah melakukan permintaan penggantian kerugian kepada Pengendali, Pemegang Saham dan pihak tertentu lainnya.

2. **Perusahaan Jasa Penunjang**

   Selama 2023, OJK juga telah mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha kepada tiga Perusahaan Pialang Asuransi yaitu PT Sun Maju Pialang Asuransi, PT Bintang Jasa Selaras dan PT Jakarta Inti Bersama, serta pembatalan surat tanda terdaftar bagi dua Akuntan Publik dan satu Kantor Akuntan Publik yaitu AP Nunu Nurdiyaman, AP Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Selain itu, OJK mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada empat Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi yaitu PT Mega Jasa Reinsurance Brokers, PT Alih Risiko Makna Sejahtera, PT Independen Pialang Asuransi dan PT Jasa Advisindo Sejahtera. Selain PT Alih Risiko Makna Sejahtera, sanksi pembatasan kegiatan usaha telah dicabut karena Perusahaan telah memenuhi penyebab sanksi. Terhadap Perusahaan yang belum memenuhi penyebab pengenaan sanksi Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha hingga berakhirnya masa berlaku sanksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK enforces regulations for insurance, guarantee, and pension fund companies through sanctions ranging from business activity restrictions to business license revocation or registration cancellation.

1. ***Insurance Companies***

   In 2023, OJK revoked the business licenses of three insurance companies: PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Prolife (formerly PT Asuransi Jiwa Indosurya), and PT Asuransi Purna Artha Nugraha, due to failure to meet solvency ratios, minimum equity, and/or investment adequacy ratios, and inability to cover financial deficits through shareholder capital injections or new investors. Before revocation, OJK had issued business activity suspension sanctions to these companies.

   To protect consumers, OJK facilitated consumer complaints by bringing policyholders and companies together to resolve issues. Additionally, for PT Asuransi Jiwa Kresna and PT Prolife, OJK requested compensation from controllers, shareholders, and other relevant parties.

2. ***Auxiliary Service Companies***

   In 2023, OJK revoked the business licenses of three insurance brokerage companies: PT Sun Maju Pialang Asuransi, PT Bintang Jasa Selaras, and PT Jakarta Inti Bersama, and canceled the registrations of two public accountants and one public accounting firm: AP Nunu Nurdiyaman, AP Jenly Hendrawan, and KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

OJK also imposed business activity restrictions on four insurance/reinsurance brokerage companies: PT Mega Jasa Reinsurance Brokers, PT Alih Risiko Makna Sejahtera, PT Independen Pialang Asuransi, and PT Jasa Advisindo Sejahtera. The business activity restriction on PT Alih Risiko Makna Sejahtera was lifted after the company met the requirements. Companies failing to meet the requirements by the end of the restriction period will face further action in accordance with regulations.

Pembatasan kegiatan usaha juga diberikan kepada Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra yang berlaku sejak 3 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun sehubungan dengan penugasan yang sedang berlangsung, KA Arya Bagiastra wajib bertanggung jawab dan menyelesaikan semua kewajiban paling lambat 30 April 2023.

Business activity restrictions were also imposed on actuarial consultant Arya Bagiastra from March 3, 2023, to December 31, 2023. Arya Bagiastra is required to complete all ongoing assignments by April 30, 2023.

IV.4.5. Aktivitas Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Development of Insurance, Guarantee Institutions and Pension Funds

Selama 2023, aktivitas pengembangan yang terkait dengan industri perasuransian, penjaminan dan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian 2023-2027
   Pengembangan dan penguatan sektor perasuransian pada peta jalan ini ditopang melalui empat pilar utama, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor perasuransian, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor perasuransian. Implementasi dari peta jalan ini diturunkan dalam tiga fase, yaitu fase penguatan fondasi, fase konsolidasi dan menciptakan momentum, dan yang terakhir adalah fase penyelarasan dan pertumbuhan.
2. Penyusunan kajian mengenai Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, antara lain kajian program penjaminan polis, kajian asuransi parametrik, kajian manajer investasi sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan kajian sindikasi penjaminan syariah dan kajian Bunga Rampai Aturan Domestik Berdasarkan Moda Perdagangan Internasional Jasa Keuangan IKNB.
3. Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan.

In 2023, development activities related to the insurance, guarantee, and pension fund industries included:

1. *Launch of the 2023-2027 Insurance Development and Strengthening Roadmap*
   The roadmap for developing and strengthening the insurance sector is supported by four main pillars: strengthening resilience and competitiveness, developing elements within the insurance sector ecosystem, accelerating digital transformation, and enhancing regulation, supervision, and licensing in the insurance sector. The roadmap is implemented in three phases: foundation strengthening, consolidation and momentum creation, and alignment and growth.
2. *Studies on Insurance, Guarantee, and Pension Funds Studies conducted include those on policy guarantee programs, parametric insurance, investment managers as founders of Financial Institution Pension Funds (DPLK), and study on syndication of Shariah guarantee syndication and Anthology Study of Domestic Regulations Based on International Trade Modes of Non-Bank Financial Services.*
3. *Signing of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the Duties and Functions Synergy between the Ministry of Health and the Financial Services Authority.*

IV.5 Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Supervision of Financing Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions

IV.5.1. Aktivitas Pengaturan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Regulation of Financing Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions

OJK menerbitkan satu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan satu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEDK), dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, OJK promulgated one OJK Regulation (POJK), four OJK Circular Letters (SEOJK), and one BOC Circular Letter (SEDK) as follows:

1. **POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023)**

   Latar Belakang:

   Ketentuan dalam POJK 35/POJK.05/2015 berlaku untuk semua jenis PMV (*one size fits all*), baik yang portofolionya didominasi penyertaan modal maupun pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perlu penyempurnaan RPOJK Penyelenggaraan Usaha PMV agar lebih sesuai dengan fokus kegiatan usaha PMV.

   Pokok Pengaturan:

   a. Jenis kegiatan usaha bagi PMV dan UUS, kategori perusahaan, kegiatan berbasis imbal jasa dan kegiatan lain, serta tujuan dan batasan dalam penyelenggaraan usaha;
   b. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation*; pengelolaan dana ventura; pembentukan dan pengelolaan dana ventura; penggunaan nama dana ventura; perjanjian pembentukan dana ventura; batas minimum penyertaan dana ventura; penempatan dana ventura; persyaratan pemegang unit penyertaan dana ventura; hak pemegang unit penyertaan dana ventura dan rapat pemegang unit penyertaan dana ventura; pembubaran dana ventura; kewajiban, larangan dan tugas perusahaan berbentuk *venture capital corporation* dan Bank kustodian; serta wali amanat;
   c. Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* dan kerja sama pembiayaan;
   d. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan;
   e. Perjanjian kegiatan usaha;
   f. Sumber pendanaan yang berasal dari penambahan modal disetor, pinjaman, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman/pendanaan subordinasi, wakaf dan/atau hibah;
   g. Peningkatan tingkat kesehatan;
   h. Manajemen risiko;
   i. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan;
   j. Ekuitas minimum;
   k. Sistem informasi dan teknologi informasi;
   l. Larangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha;
   m. Penerapan program APU PPT dan pelindungan konsumen;
   n. Pelaporan yang terdiri dari laporan berkala dan laporan lainnya; dan
   o. Ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

2. **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (SEOJK 4/2023)**

   Latar Belakang:

   a. Tindak lanjut amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
   b. Penyempurnaan media penyampaian pelaporan menjadi melalui sistem jaringan komunikasi data OJK; dan
   c. Penyempurnaan dan penambahan formulir pelaporan dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

1. ***Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 25 of 2023 concerning the Business Implementation of Conventional and Islamic Venture Capital Firms (POJK 25/2023)***

   Background:

   The provisions contained in POJK 35/POJK.05/2015 are applicable to all types of venture capital firm (one size fits all), including those with portfolios dominated by capital participation or financing for micro, small and medium enterprises (MSME). The draft regulation on the Business Implementation of Venture Capital Firms required further refinement in accordance with the business focus of Venture Capital Firms.

   General Provisions:

   a. Types of business activities for Conventional and Islamic Venture Capital Firms, business categories, fee-based activities and other activities, as well as the business objectives and limitations,
   b. Companies in the form of venture capital corporations; venture fund management; venture fund creation and management; use of venture fund names; agreements to establish venture funds; minimum limits for venture fund participation; placement of venture funds; requirements for unit holders to participate in venture funds; rights of venture fund participation unit holders and meetings of venture fund participation unit holders; liquidation of venture funds; obligations, limitations and duties of venture capital corporations and custodian Banks; as well as trust agents,
   c. Companies in the form of venture debt corporations and financial cooperation,
   d. Application of prudential principles for companies,
   e. Business activity agreements,
   f. Sources of funds from additional paid-up capital, loans, issuance of debt securities, subordinated loans/funding, waqf and/or grants,
   g. Increasing soundness level,
   h. Risk management,
   i. Determining supervision status and follow-up actions,
   j. Minimum equity,
   k. Information systems and information technology,
   l. Limitations on business activity,
   m. Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) and consumer protection,
   n. Reporting, including periodic reports and other reports, and
   o. Other provisions, transitional provisions and closing provisions.

2. ***Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 4/SEOJK.05/2023 concerning the Monthly Reports of Indonesia Eximbank (SEOJK 4/2023)***

   Background:

   a. Following up the mandate of Article 2, Paragraph (6), and Article 10 of OJK Regulation (POJK) Number 3/POJK.05/2013 concerning the Monthly Reports of Non-Bank Financial Services Institutions,
   b. Refining the reporting media via the OJK data communication network system, and
   c. Refining and including additional reporting forms to fulfil the provisions contained in OJK Regulation (POJK) Number 9/POJK.05/22022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.

Pokok-Pokok Pengaturan:

a. SEOJK Laporan Bulanan LPEI mengatur mengenai: (i) Ketentuan Umum; (ii) Bentuk, Susunan dan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan; (iii) Waktu Penyampaian Laporan Bulanan; (iv) Direktur Pelaksana Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun Laporan Bulanan; (v) Tata Cara Penyampaian; dan (vi) Penutup;

b. Kewajiban LPEI untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan dan tata cara penyampaian yang diatur dalam SEOJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2023, yang disampaikan dengan waktu penyampaian kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
c. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK;
d. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, LPEI wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*) melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh OJK; dan
e. LPEI harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan dan tata cara penyampaian yang diatur dalam SEOJK ini.

General Provisions:

a. The Circular Letter (SEOJK) concerning the Monthly Reports of Indonesia Eximbank regulates: (i) General Provisions, (ii) Form, Structure and Guidelines for Preparing Monthly Reports, (iii) Monthly Reporting Schedule, (iv) Managing Directors and Officers Responsible for Preparing Monthly Reports, (v) Submission Procedures, and (vi) Closing Provisions,
b. The obligations for Indonesia Eximbank to submit Monthly Reports in accordance with the form, structure and submission procedures regulated in this circular letter (SEOJK), commencing for the June 2023 reporting period, and submitted to OJK on or before the 10th day of the following month,
c. Monthly Reports are submitted online via the OJK data communication network system,
d. If the OJK data communication network system is unavailable, Indonesia Eximbank is required to submit the Monthly Report via email to the address notified by OJK, and

e. Indonesia Eximbank must conduct trials to submit Monthly Reports in accordance with the form, structure and submission procedures regulated in this circular letter (SEOJK).

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2023 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (SEOJK 5/2023)

Latar Belakang:

Merupakan amanat Pasal 112 ayat (6) POJK tentang Pengawasan LPEI.

Pokok-Pokok Pengaturan:

a. Rasio KPMM bagi LPEI;

b. Kewajiban Penyertaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko LPEI;

c. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit;
d. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar;
e. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional; dan
f. Tata cara penyampaian laporan perhitungan rasio KPMM sesuai profil risiko LPEI.

3. Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 5/SEOJK.05/2023 concerning the Minimum Capital Requirements for Indonesia Eximbank (SEOJK 5/2023)

Background:

In accordance with the mandate of Article 112, Paragraph (6) of the OJK Regulation (POJK) concerning Supervision of Indonesia Eximbank.

General Provisions:

a. Minimum Capital Adequacy Requirements (KPMM) for Indonesia Eximbank,
b. Minimum Capital Adequacy Requirements in accordance with the Risk Profile of Indonesia Eximbank,
c. Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk,
d. Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Market Risk,
e. Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk, and
f. Procedures for submitting reports calculating KPMM Ratio in accordance with the Risk Profile of Indonesia Eximbank.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023)

Latar Belakang:

a. Mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
b. Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

4. Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 19/SEOJK.06/2023 concerning FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending (LPBBTI) (SEOJK 19/2023)

Background

a. Further regulating FinTech lending services in accordance with the mandate of OJK Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning FinTech P2P Lending, and
b. The legal basis for this Financial Services Authority Circular Letter is OJK Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending.

Pokok Pengaturan:

a. Dalam melakukan pendanaan, Penyelenggara harus memastikan bahwa Pengguna memahami hal yang perlu diperhatikan pada sistem elektronik Penyelenggara. Selain itu, Penyelenggara melaksanakan penilaian (*scoring*) atas permohonan perolehan pendanaan;
b. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan;

c. Penyelenggara harus mempublikasikan kinerja pendanaan pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau sistem elektronik milik Penyelenggara yang memuat informasi paling sedikit:
   1) nilai Pendanaan yang tersalurkan;
   2) jumlah Pemberi Dana;
   3) jumlah Penerima Dana; dan
   4) tingkat keberhasilan bayar penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada kontak darurat.
d. Dalam melakukan penagihan, Penyelenggara harus memastikan bahwa:
   1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
   2) dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada Penerima Dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   3) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penyelenggara;
   4) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan; dan
   5) pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan Penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi Penyelenggara.

General Provisions:

a. When disbursing funds, service providers must ensure the user understands the relevant aspects of the service provider's electronic system. In addition, the Service Provider must assess (scoring) all applications for funding.

b. Service Providers must comply with prevailing provisions concerning the limitations on economic benefits of the funds when facilitating funding.
c. Service Providers must publish their funding performance on the main page of their website, application and/or electronic system containing at least the following information:
   1) value of disbursed funds,
   2) number of investors,
   3) number of recipients, and
   4) payment success rate. The use of emergency contacts is only intended to confirm the location of the recipient, not to collect funds from the emergency contact.

d. When collecting funds, the Service Provider must ensure that:

   1) the debt collector has received adequate training concerning debt collection duties and ethics in accordance with prevailing regulations,
   2) if a Service Provider uses a third-party party debt collector to collect funds from the Recipient, the third party must employ professionals certified in debt collection from a Professional Certification Institute registered with the Financial Services Authority,
   3) the identity of each debt collector must be managed properly by the Service Provider,
   4) the debt collector must conform with ethical standards when collecting outstanding funds,
   5) other parties that provide debt collection services in cooperation with the Service Provider must also comply with the ethical standards set by the industry association.

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.06/2023 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (SEOJK 20/2023)

Latar Belakang:

Amanat pengaturan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pokok Pengaturan:

a. Ruang lingkup permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan secara elektronik;
b. Tata cara penyampaian dan persyaratan permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan secara elektronik;
c. Kewajiban untuk menyimpan dokumen asli atas dokumen perizinan, persetujuan atau pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem

5. Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 20/SEOJK.06/2023 concerning Electronic Licensing Applications, Approval and Reporting for Finance Companies and Islamic Finance Companies (SEOJK 20/2023)

Background:

In accordance with the mandate of Article 114, Paragraph (5) of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 47/POJK.05/2020 concerning the Business Licensing and Institutional Arrangements of Finance Companies and Islamic Finance Companies.

General Provisions:

a. Scope of electronic licensing applications, approval and reporting,

b. Procedures and requirements for submitting electronic licensing applications, approval and reporting,
c. Obligations for keeping original licensing, approval and reporting documents submitted via the Financial Services Authority data

jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku;

d. Ketentuan peralihan atas permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan yang telah disampaikan kepada OJK dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
e. Format tentang permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan secara elektronik.

6. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama PVML (SEDK 2/2023)

Latar Belakang:

a. Upaya menciptakan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sehat dan melindungi pemangku kepentingan dengan mengarahkan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lembaga jasa keuangan lainnya kepada praktik-praktik tata kelola yang baik dan pemenuhan prinsip kehati-hatian;
b. Penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan lembaga jasa keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan; dan
c. Panduan bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya satuan kerja yang memiliki fungsi dan kewenangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pokok Pengaturan:

a. Ketentuan umum;
b. Persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan;
c. Perangkat penilaian kemampuan dan kepatutan;
d. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP;
e. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, anggota dewan direktur dan/atau direktur pelaksana;
f. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengelola statuter;
g. Penghentian proses penilaian kemampuan dan kepatutan;
h. Pembatalan persetujuan;
i. Dokumentasi dan administrasi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
j. Penggunaan informasi *database* hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
k. Ketentuan lain-lain; dan
l. Penutup.

communication network system or through electronic email to the Financial Services Authority while the licence and approval remain valid,

d. Provisions for transitioning licensing applications, approvals and reporting submitted to OJK in the form of electronic documents via electronic mail prior to the promulgation of this Financial Services Authority Circular Letter and prior to receiving a licence, approval and/or reporting registration letter from the Financial Services Authority, and
e. Format of the electronic licensing applications, approval and reporting.

6. Financial Services Authority Board of Commissioners Circular Letter (SEDK) Number 2/SEDK/06/2023 concerning Guidelines for Implementing Fit and Proper Tests for Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions (SEDK 2/2023).

Background:

a. Creating healthy finance institutions, venture capital firms and other financial services institutions and protect stakeholders by fostering good governance practices and fulfilling prudential principles at financial institutions, venture capital firms and other financial services institutions,
b. Refining regulations concerning fit and proper tests, thereby allowing the financial services authority to provide fast, accurate, streamlined and transparent licensing services for the directors and managers of financial services institutions, and
c. Guidelines for the Financial Services Authority, particularly work units with the function and authority to implement fit and proper tests. This is the mandate in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Tests for Financial Services Institutions.

General Provisions:

a. General provisions,
b. Requirements for fit and proper tests,
c. Tools for fit and proper tests,
d. Procedures for fit and proper tests for candidate controlling shareholders (PSP),
e. Procedures for implementing fit and proper tests for candidate members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Islamic Supervisory Board, members of the Board of Directors and/or managing directors,
f. Procedures for implementing fit and proper tests for statutory managers,
g. Termination of fit and proper tests,
h. Withdrawal of consent,
i. Documentation and administration of fit and proper test results,
j. Use of database of fit and proper test results,
k. Other provisions, and
l. Closing provisions.

IV.5.2. Aktivitas Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Supervision of Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions

IV.5.2.1. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Supervision of Microfinance Institutions

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang diawasi OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM diawasi oleh OJK baik di wilayah pengawasan Kantor Pusat maupun Kantor OJK Daerah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap LKM di bawah pengawasan Kantor Pusat yang meliputi wilayah Jakarta dan Banten pada 2023, sebagai berikut:

1. **Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)**
   Selama 2023, telah dilakukan kegiatan pengawasan langsung terhadap tiga Lembaga Keuangan Mikro dengan *compliance-based supervision*, beserta penyusunan dan penetapan Laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan dimaksud.

2. **Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)**
   Selama 2023, telah dilakukan kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis laporan keuangan berkala, penyusunan dan penyampaian surat pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.

Microfinance institutions are a type of financial institution that falls under OJK supervision in accordance with the mandate of Act Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Microfinance institutions are supervised by OJK in the head office region as well as regional offices. Microfinance institutions under the supervision of Head Office, encompassing the regions of Jakarta and Banten, were subject to the following supervisory activities in 2023:

1. ***On-Site Supervision***
   In 2023, three microfinance institutions were subject to on-site supervision in the form of compliance-based supervision, accompanied by the preparation of a report on the findings of the on-site supervision.

2. ***Off-Site Supervision***
   In 2023, OJK performed off-site supervision through the analysis of periodic financial reports as well as the preparation and submission of guidance for microfinance institutions.

IV.5.2.2. Pengawasan Pergadaian

Supervision of Pawnbrokers

Pada 2023, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap 19 perusahaan pergadaian. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan *compliance-based supervision*.

In 2023, OJK performed on-site supervision for 19 pawnbrokers in the form of compliance-based supervision.

IV.5.2.3. Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi/*Financial Technology* (*Fintech*)

Supervision of FinTech Industry

1. **Analisis Laporan (*Off-Site Supervision*)**
   Sepanjang 2023, OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala 102 Perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin OJK. Selanjutnya, OJK telah melakukan Pencabutan Izin Usaha terhadap salah satu Perusahaan LPBBTI, sehingga saat ini terdapat 101 perusahaan LPBBTI yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bagi Penyelenggara berizin yang tidak menyampaikan laporan bulanan, OJK melakukan pengenaan sanksi tertulis.
2. **Pemeriksaan Langsung (*On-Site Supervision*)**
   Sepanjang 2023, OJK telah melaksanakan 26 pemeriksaan langsung Penyelenggara LPBBTI. Pemeriksaan tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), yakni sebanyak 25 Perusahaan dan penambahan satu pemeriksaan langsung dalam rangka tindak lanjut dan pendalaman atas pemenuhan rekomendasi pemeriksaan langsung tahun 2022. Selanjutnya, dalam rangka tindak lanjut pengawasan Penyelenggara LPBBTI, sepanjang 2023 OJK telah mengeluarkan sebanyak 288 sanksi.

1. ***Off-Site Supervision***
   In 2023, OJK monitored and analysed the periodic reports of 102 FinTech Lending Companies licensed by OJK. Based on the findings, OJK revoked the business licence of one FinTech P2P Lender, bringing the total to 101 FinTech P2P Lending Companies registered and supervised by OJK. OJK will impose written sanctions on licensed FinTech P2P Lenders that fail to submit monthly reports.

2. ***On-Site Supervision***
   In 2023, OJK implemented on-site supervision for 26 FinTech P2P Lending Companies. This was consistent with the number specified in the Supervision Plan (RKP), namely 25 companies, along with one on-site inspection as a follow-up action to meet the on-site supervision recommendations from 2022. In 2023, OJK issued 288 sanctions against FinTech P2P Lending Companies.

IV.5.2.4. Pendelegasian Wewenang Pengawasan Industri PVML kepada Kantor OJK Daerah
Delegating the Supervision Function for the Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions (PVML) to OJK Regional Offices

Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) terkait Penataan Organisasi Bidang Manajemen Strategis I ("Kebijakan Strategis") dalam rangka Transformasi Organisasi OJK, telah diputuskan kebijakan pendelegasian wewenang fungsi perizinan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perusahaan Pergadaian dan perusahaan Modal Ventura kepada Kantor OJK.

In accordance with a BOC Meeting Decree (RDK) concerning the Organisational Arrangements for Strategic Management I (Strategic Policy) in terms of OJK Organisational Transformation, it was decided to delegate the licensing and supervision function for Microfinance Institutions, Pawnbrokers and Venture Capital Firms to OJK regional offices.

Menindaklanjuti keputusan di atas, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Acting upon that decree, an OJK BOC Decree was issued concerning the Delegation of the Supervision Function for the Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.

Pada tanggal 7 Desember 2023, telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengawasan atas 13 Perusahaan Modal Ventura, 96 Perusahaan Pergadaian kepada Kepala Kantor OJK wilayah Kantor Pusat Industri PVML tersebut berdomisili.

On 7th December 2023, a Handover Letter (BAST) was signed for the supervision of 13 venture capital firms and 96 pawnbrokers to the Head of the OJK Regional Office in the regions where the Head Office of the PVML industry is domiciled.

IV.5.2.5. Pengawasan Industri PVML dalam Pengawasan Khusus
Supervision of the PVML Industri under Special Surveillance

Berkenaan dengan pengawasan tersebut, pada awal 2023 terdapat empat Perusahaan Pembiayaan dalam status pengawasan khusus sejak 2022, dengan rincian tiga Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan satu Perusahaan Pembiayaan Syariah (*Full-Pledge*). Selanjutnya, tiga Perusahaan Pembiayaan Konvensional tersebut telah diperpanjang status pengawasan khusus pada 2023 dengan jangka waktu paling lama enam bulan sesuai jatuh tempo waktu status pengawasan khusus masing-masing Perusahaan. Sedangkan terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam status pengawasan khusus telah dilakukan cabut izin usaha pada bulan Oktober 2023.

By the end of 2023, five Finance Companies were under special surveillance status, consisting of four Conventional Finance Companies and one Islamic Finance Company (full-pledge). At the beginning of 2023, four Finance Companies were still under special surveillance status from 2022, consisting of three Conventional Finance Companies and one Islamic Finance Company (full-pledge). The special surveillance status of three of the Conventional Finance Companies was extended in 2023 for a period of up to six months in accordance with the special surveillance period of each company, while the Islamic Finance Company under special surveillance status had its business licence revoked in October 2023.

Selanjutnya, pada 2023 terdapat dua Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan menjadi status pengawasan khusus dengan jangka waktu selama enam bulan dengan rincian, yaitu satu Perusahaan Pembiayaan Konvensional pada bulan Juli 2023 dan satu Perusahaan Pembiayaan Syariah (*Full-Pledge*) pada bulan Agustus 2023.

In 2023, two finance companies were under special surveillance status for a six-month period, namely one conventional finance company in July 2023 and one Islamic Finance Company (full-pledge) in August 2023.

Tabel 4.42. Perusahaan Pembiayaan dalam Status Pengawasan Khusus Tahun 2023
Table 4.42. Finance Companies Under Special Surveillance Status in 2023

Jenis PP *Type of Finance Company*	PP per Desember 2022 *Total Finance Companies as of December 2022*	PP Ditetapkan Status Pengawasan Khusus di Tahun 2023 (+) *Finance Companies Placed Under Special Surveillance in 2023 (+)*	PP Bubar/CIU/ Pengalihan Status di Tahun 2023 (-) *Finance Companies Closed/Transferred Status /CIU in 2023 (-)*	PP per Desember 2023 *Total Finance Companies as of December 2023*
Perusahaan Pembiayaan (PP) Konvensional *Conventional Finance Company*	3	1	0	4
Perusahaan Pembiayaan (PP) Syariah (*Full-Pledge*) *Islamic Finance Company (Full-Pledge)*	1	1	1	1
**Jumlah	*Total***	**4**	**2**	**1**	**5**

Selama 2023, OJK telah melaksanakan proses pengawasan secara langsung (*on-site*) maupun secara tidak langsung (*off-site*) atas Perusahaan Pembiayaan dengan status pengawasan khusus. Pada pengawasan langsung (*on-site*), telah melaksanakan empat pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pembiayaan dengan status pengawasan khusus, dengan rincian tiga Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan satu Perusahaan Pembiayaan Syariah (*Full-Pledge*). Hingga Desember 2023, pengawasan terhadap perusahaan dengan status pengawasan khusus telah menerbitkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung atas tiga pemeriksaan langsung yang dilakukan pada 2023 dan satu pemeriksaan langsung yang dilakukan pada 2022.

In 2023, OJK performed on-site and off-site supervision for Finance Companies under special surveillance status. In terms of on-site supervision, OJK conducted four on-site inspections of finance companies under special surveillance status, consisting of three Conventional Finance Companies and one Islamic Finance Company (full-pledge). As of December 2023, four On-Site Supervision Reports were published regarding the on-site inspections conducted in 2023 and one on-site inspection conducted in 2022 under the auspices of supervising companies under special surveillance status.

Tabel 4.43. Rincian Pemeriksaan Langsung PVML Status Pengawasan Khusus Tahun 2023
Tabel 4.43. Summary of On-Site Supervision of Finance Companies Under Special Surveillance Status in 2023

No	Industri Syariah	Jumlah	*Total*	Jenis Pemeriksaan	*Type of Supervision*	*Islamic Industry*
1	PP Konvensional	3	Berkala	*Periodic*	*Conventional Finance Companies*
2	PP Syariah (*Full-Pledge*)	1	Berkala	*Periodic*	*Islamic Finance Companies (full-pledge)*

Tabel 4.44. Rincian Penerbitan LHPL PVML Status Pengawasan Khusus Tahun 2023
Tabel 4.44. Summary of On-Site Supervision Reports Published for Finance Companies Under Special Surveillance Status in 2023

No	Industri Syariah	Pemeriksaan Langsung Tahun 2022 *On-Site Supervision in 2022*	Pemeriksaan Langsung Tahun 2023 *On-Site Supervision in 2023*	Jumlah *Total*	Jenis Pemeriksaan *Type of Supervision*	*Islamic Industry*
1	PP Konvensional	1	2	3	Berkala	*Periodic*	*Conventional Finance Companies*
2	PP Syariah (*Full-Pledge*)	0	1	1	Berkala	*Periodic*	*Islamic Finance Companies (full-pledge)*

IV.5.2.6. Pengawasan Industri PVML Syariah
Supervision of Islamic PVML Industry

Pada 2023, OJK telah melakukan proses pengawasan secara langsung (*on-site*) maupun secara tidak langsung (*off-site*) atas Perusahaan PVML Syariah (selanjutnya disebut Perusahaan). OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap enam perusahaan dan menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut:

In 2023, OJK implemented on-site and off-site supervision of Islamic PVML Companies (hereinafter referred to as Companies). OJK conducted on-site inspections of six companies and published six Supervision Reports as follows:

Tabel 4.45. Rincian Pemeriksaan PVML Syariah
Tabel 4.45. Summary of Islamic PVML Inspections

No	Industri Syariah	Jumlah | *Total*	Jenis Pemeriksaan | *Type of Supervision*	*Islamic Industry*
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah	2	Berkala | *Periodic*	*Islamic Finance Companies*
2	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	4	Berkala | *Periodic*	*Islamic Microfinance Institutions*

IV.5.2.7. Pengawasan Industri Jasa Keuangan Khusus
Supervision of Special Financial Services Industry

Pengawasan atas industri jasa keuangan khusus mencakup Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial/ PT SMF (Persero), PT Permodalan Nasional Madani/PT PNM (Persero) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Selama Tahun 2023, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) terhadap PT SMF (Persero), BP Tapera, PT PNM (Persero) dan LPEI. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Supervision of the special financial services industry includes Indonesia Eximbank, PT Sarana Multigriya Finansial/PT SMF (Persero), PT Permodalan Nasional Madani/PT PNM (Persero) and the Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera). In 2023, OJK performed on-site supervision of PT SMF (Persero), BP Tapera, PT PNM (Persero) and Indonesia Eximbank in the form of compliance-based supervision.

IV.5.2.8. Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya
Quality Control Supervision of Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions

Pada 2023, OJK melakukan forum panel Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), penyampaian risalah rapat dari forum panel yang berlangsung, analisis dan *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel dan pelaksanaan *knowledge sharing*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan forum panel terhadap 26 Perusahaan PVML;
2. *Monitoring* dan analisis pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel terhadap 19 Perusahaan PVML;
3. Pelaksanaan dua kali Rapat Komite Pengawasan IKNB;
4. Pelaksanaan satu kali Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Forum Panel RBS IKNB;
5. Pelaksanaan dua kali *refreshment programme* dan/atau *knowledge sharing* terkait dengan *issue* di bidang pengawasan PVML; dan
6. Pelaksanaan satu kali Konsinyering Pembahasan Proses Bisnis Pengawasan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya.

In 2023, OJK arranged panel forums for Non-Bank financial services institutions (NBFSI), submitted the minutes of the panel forums that took place as well as analysed and monitored the implementation of follow-up recommendations from the panel forums along with knowledge sharing as follows:

1. *Arranged panel forums for 26 Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions (PVML),*
2. *Monitored and analysed the implementation of follow-up recommendations for 19 PVML companies,*
3. *Arranged two NBFI Supervision Committee Meetings,*
4. *Arranged one Evaluation Activity regarding Implementation of the NBFI Panel Forum on RBS,*
5. *Arranged two refresher programs and/or knowledge sharing activities on issues concerning PVML supervision, and*
6. *Implemented one Consignment Discussion on Business Process Supervision for Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.*

IV.5.3. Aktivitas Perizinan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Licensing of Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions

Hingga akhir 2023, OJK menerima sebanyak 2.456 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML (konvensional dan syariah) dan sebanyak 2.188 permohonan tersebut telah selesai diproses, sebagaimana berikut:

As of the end of 2023, OJK received 2,456 applications for PVML institutional and management licences (conventional and Islamic), of which 2,188 applications were processed as follows:

Tabel 4.46. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML Kovensional Tahun 2023
Tabel 4.46. Recapitulation of Conventional PVML Licensing Activity in 2023

Jenis Perizinan *Type of License*	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*
Pemberian Izin Usaha | *Business Licenses Granted*	61	49
Pencabutan Izin Usaha | *Business Licenses Revoked*	20	19
Penggabungan | *Mergers*	2	2
Peleburan | *Acquisitions*	-	-
Pengambilalihan | *Takeovers*	1	-
Perubahan Kepemilikan | *Change of Ownership*	217	170
Perubahan Anggaran Dasar | *Changes to Articles of Association*	34	30
Perubahan Pemegang Saham & Perubahan Modal *Changes to Shareholders and Capital*	38	27
Perubahan Nama | *Name Change*	16	15
Jaringan Kantor | *Office Network*	1.031	1.008
Kegiatan Usaha Lain | *Other Business Activities*	89	50
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *Fit and Proper Tests*	554	463
Pelaporan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris | *Reporting Changes in the Composition of Directors and Commissioners*	281	279
Pengangkatan/Rekomendasi/Pemberhentian Tenaga Kerja Asing (TKA) *Appointment/Recommendation/Dismissal of Foreign Workers (TKA)*	44	33
Jumlah | *Total*	**2.388**	**2.145**

Tabel 4.47. Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML Syariah Tahun 2023
Tabel 4.47. Recapitulation of Islamic PVML Licensing Activity in 2023

Jenis Perizinan *Type of License*	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*
Pemberian Izin Usaha Unit Syariah *Islamic Window Business Licenses Granted*	5	4
Pencabutan Izin Usaha | *Business Licenses Revoked*	-	-
Penggabungan | *Mergers*	-	-
Peleburan | *Acquisitions*	-	-
Pengambilalihan | *Takeovers*	-	-
Perubahan Kepemilikan | *Change of Ownership*	10	7
Perubahan Anggaran Dasar *Changes to Articles of Association*	-	-
Perubahan Perubahan Pemegang Saham & Perubahan Modal *Changes to Shareholders and Capital*	6	1
Perubahan Nama | *Name Change*	-	-
Jaringan Kantor | *Office Network*	3	3
Kegiatan Usaha Lain (Termasuk Produk Syariah) *Other Business Activities (including Islamic products)*	7	5
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *Fit and Proper Tests*	33	20
Pelaporan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris *Reporting Changes in the Composition of Directors and Commissioners*	4	3
Pengangkatan/Rekomendasi/Pemberhentian Tenaga Kerja Asing (TKA) | *Appointment/Recommendation/ Dismissal of Foreign Workers (TKA)*	0	0
Jumlah | *Total*	**68**	**43**

IV.5.4. Aktivitas Penegakan Hukum Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Law Enforcement Activity in the Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions

IV.5.4.1. Penegakan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Law Enforcement of Microfinance Institutions

Selama 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap lima Lembaga Keuangan Mikro. Kemudian, sesuai ketentuan SEDK Pembinaan dan Pengawasan LKM, terdapat kewajiban penyusunan laporan pembinaan dan pengawasan LKM setiap tahun. Laporan pembinaan dan pengawasan LKM yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat untuk tahun 2022 telah diselesaikan pada triwulan I-2023.

In 2023, OJK imposed administrative sanctions in the form of a written reprimand on five microfinance institutions. In accordance with the BOC Circular Letter (SEDK) on the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, guidance and supervision reports for microfinance institutions must be prepared annually. Such reports for 2022 in the operational area of Head Office were completed in the first quarter of 2023.

IV.5.4.2. Penegakan Hukum Perusahaan Pergadaian

Law Enforcement of Pawnbrokers

Pada 2023, OJK mengenakan 95 sanksi administratif pada Perusahaan Pergadaian, dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, OJK imposed 95 administrative sanctions on pawnbrokers as follows:

Tabel 4.48.Pengenaan Sanksi Pengawasan Perusahaan Pergadaian Tahun 2023
Tabel 4.48.Imposition of Supervision Sanctions on Pawnbrokers in 2023

No	Jenis Sanksi	Pergadaian | *Pawnbrokers*	*Type of Sanction*
1	Denda	-	*Fine*
2	Peringatan Tertulis yang berakhir dengan sendirinya	58	*Temporary Written Warning*
3	Peringatan Pertama	19	*First Warning*
4	Peringatan Kedua	2	*Second Warning*
5	Peringatan Ketiga	1	*Third Warning*
6	Peringatan Tertulis	14	*Written Warning*
7	Pembekuan Kegiatan Usaha	-	*Business Activity Frozen/Suspended*
8	Teguran Pertama	-	*First Reprimand*
9	Teguran Kedua	-	*Second Reprimand*
10	Teguran Tertulis Pertama	-	*First Written Reprimand*
11	Teguran Tertulis Kedua	1	*Second Written Reprimand*
12	Teguran Tertulis Ketiga	-	*Third Written Reprimand*
13	Teguran Tertulis	-	*Written Reprimand*
	Jumlah	**95**	***Total***

IV.5.4.3. Penegakan Hukum Industri Jasa Keuangan Khusus
Law Enforcement of Special Financial Services Industry

Selama 2023, OJK mengenakan tujuh sanksi administratif kepada Lembaga Keuangan Khusus. Selain pengenaan sanksi administratif, OJK juga menyampaikan Surat Pembinaan dalam hal terdapat hal-hal yang menjadi perhatian pengawas untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan/lembaga, namun tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selama 2023, tidak terdapat surat pembinaan yang disampaikan kepada Lembaga Keuangan Khusus.

In 2023, OJK imposed seven administrative sanctions on Special Financial Institutions. In addition to administrative sanctions, OJK also submitted Guidance Letters to address matters of concern raised by the supervisor for follow-up actions by the company/institution that are not regulated in prevailing laws and regulations. In 2023, OJK issued no guidance letters to Special Financial Institutions.

IV.5.4.4. Penegakan Hukum Industri PVML Syariah
Law Enforcement of Islamic PVML Industry

Pada 2023, OJK telah menerbitkan enam surat pembinaan, di antaranya dua surat kepada Perusahaan Pembiayaan *Full Fledge*, dua Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, satu surat kepada Perusahaan Modal Ventura *Full Fledge* dan satu Perusahaan Gadai Swasta Syariah *Full Fledge*. Surat pembinaan tersebut terdiri dari surat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, surat pembinaan pelampauan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari batas industri secara agregat, kewajiban penyampaian laporan pelayanan pengaduan konsumen dan rencana pemenuhan pimpinan unit usaha syariah.

In 2023, OJK issued six guidance letters, including guidance letters to two full-fledge finance companies, two Islamic windows of finance companies, one full-fledge venture capital firm and one private full-fledge Islamic pawnbroker. The guidance letters contained follow-up recommendations from on-site and off-site supervision, guidance when exceeding the industry aggregate ratio of operating expenses to operating income, obligations to submit consumer complaints service reports and plans to fulfil the leadership requirements of the Islamic window.

Sebagai bentuk kegiatan penegakan peraturan di 2023, OJK telah menerbitkan 75 sanksi, di antaranya terkait pelanggaran penyampaian laporan berkala, tingkat kesehatan, maupun pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, sebagaimana tabel berikut:

As a form of regulatory enforcement activity in 2023, OJK issued 75 sanctions against violations relating to the submission of periodic reports, soundness level, and the execution of follow-up actions on inspection recommendations as follows:

Tabel 4.49.Daftar Penegakan Kepatuhan PVML Syariah
Tabel 4.49.List of Compliance in Islamic PVML Industry

No	Industri | *Industry*	Total Perusahaan *Total Companies*	Sanksi | *Sanction*					
			Denda *Fine*	Rencana Pemenuhan *Fulfilment Plan*	Surat Teguran *Written Warning*	SP1 | *First*	SP2 | *Second*	SP3 | *Third*
1	Islamic Finance Companies	11	2	4	11	6	1	-
2	Islamic Venture Capital Firms	6	2	-	27	11	4	3
3	Islamic Pawnbrokers	3	-	-	4	-	-	-
	Grand Total	**20**	**4**	**4**	**42**	**17**	**5**	**3**

IV.5.4.5. Penegakan Hukum Industri PVML dalam Pengawasan Khusus
Law Enforcement PVML Industry under Special Surveillance

Sebagai bentuk kegiatan penegakan kepatuhan di bidang Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Syariah dilakukan pemberian sanksi pada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik terkait penyampaian laporan berkala maupun pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan. Sampai dengan Desember 2023, ditetapkan sebanyak 30 sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan dalam status pengawasan khusus, dengan rincian 22 sanksi terhadap Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan delapan sanksi terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah (*Full-Pledge*).

As a form of compliance enforcement activity in terms of Special Supervision and the Supervision of Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions, sanctions are imposed on companies that fail to meet prevailing laws and regulations concerning the submission of periodic reports and implementation of follow-up actions to inspection recommendations. As of December 2023, OJK issued 30 sanctions to finance companies under special supervision, including 22 conventional finance companies and eight full pledge Islamic finance companies.

Tabel 4.50. Daftar Penegakan Kepatuhan PVML Status Pengawasan Khusus
Tabel 4.50. List of Compliance of PVML Industry under Special Surveillance

Jenis PP	Denda *Fine*	Surat Teguran *Written Warning*	SP1 *First*	SP2 *Second*	SP3 *Third*	PKUT *Limitations on Business Activity*	*Type of Finance Company*
PP Konvensional	5	3	5	4	4	1	*Conventional*
PP Syariah (*Full-Pledge*)	3	3	2	0	0	0	*Islamic (Full Pledge)*
Jumlah	**8**	**6**	**7**	**4**	**4**	**1**	***Total***

IV.5.4.6. Pemeriksaan Khusus Bidang PVML
Special Inspections in PVML Industry

Tindak pidana di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) merupakan ancaman serius bagi integritas dan stabilitas industri keuangan yang dapat memberikan dampak finansial merugikan terhadap individu, bisnis, serta perekonomian secara keseluruhan.

Criminal activity in the PVML industry (Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions) represents a serious threat to the integrity and stability of the financial industry, which can have a significant financial impact on individuals, businesses and the entire economy.

Pada 2023, terdapat empat Informasi Awal Dugaan Tindak Pidana (IADTP) di bidang PVML yang diterima OJK dari Satuan Kerja pengawasan, yaitu pada satu Penyelenggara Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan tiga Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

In 2023, OJK received Preliminary Information on Alleged Criminal Acts (IADTP) in the PVML industry from the supervisory work unit, namely one FinTech P2P lending company and three microfinance institutions.

Sebagai respons terhadap IADTP tersebut, OJK telah melakukan tindak lanjut sebagaimana berikut:

In response, OJK took the following actions:

Tabel 4.51. Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus Bidang PVML
Tabel 4.51. Follow-up to Special Inspections in PVML Industry

Tahapan Kegiatan	Kasus (IADTP) | *Cases (IADTP)*		Jumlah *Total*	*Phase*
	LPBBTI *FinTech Lending*	LKM *Microfinance Institutions*		
IADTP yang diterima dari Satuan Kerja Pengawasan	1	3	4	*IADTP received from supervisory work unit*
IADTP yang dikembalikan kepada Satuan Kerja Pengawasan sebelum pemeriksaan khusus	0	0	0	*IADTP returned to supervisory work unit prior to special inspection*
IADTP yang dilakukan pemeriksaan khusus	1	3	4	*IADTP accompanied by special inspection*
IADTP yang dilimpahkan ke Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	0	0	0	*IADTP delegated to Department of Financial Services Sector Investigation*

Dalam rangka mengurangi risiko terjadinya tindak pidana di bidang PVML, OJK senantiasa melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pemahaman terkait *fraud* dan tindak pidana kepada pelaku usaha jasa keuangan di bidang PVML melalui *knowledge sharing*. Pada 2023, OJK telah menyelenggarakan kegiatan *Knowledge Sharing*, sebagai berikut:

1. Memahami dan Mencegah *Fraud* dan Tindak Pidana Lembaga Keuangan Mikro; dan
2. Memahami dan Mencegah *Fraud* Dan Tindak Pidana Usaha Jasa Pembiayaan,

In order to reduce the risk of criminal acts in the PVML sector, OJK continuously undertook preventative efforts by providing understanding regarding fraud and criminal acts to financial services providers in the PVML sector through knowledge sharing. In 2023, OJK hosted Knowledge Sharing activities, as follows:

1. *Understand and Prevent Fraud and Criminal Acts in Microfinance Institutions; and*
2. *Understand and Prevent Fraud and Criminal Acts in Financing Institutions,*

Knowledge Sharing tersebut diselenggarakan secara *hybrid* (fisik dan virtual) dengan peserta dari asosiasi dan pelaku usaha jasa keuangan, serta internal OJK yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan khusus, dan penyidikan sektor jasa keuangan.

The Knowledge Sharing was held in a hybrid (physical and virtual) with participants from associations and financial services providers, as well as internal OJK which has regulatory, supervisory, special inspection and financial services sector investigations.

Selain itu, pada 2023 OJK juga telah menerbitkan Buku "Pahami & Hindari *Fraud* & Tindak Pidana Lembaga Keuangan Mikro" yang telah didistribusikan ke seluruh pelaku usaha LKM dan disosialisasikan secara fisik kepada pelaku usaha LKM yang berada di wilayah kerja Kantor OJK Tegal.

In addition, in 2023 OJK also published book of "Understand & Avoid Fraud & Crime Acts in Microfinance Institutions" which has been distributed to all MFI business providers and socialized physically to MFI business providers in the working area of OJK Office of Tegal.

Dalam upaya peningkatan pemahaman pegawai OJK dalam penanganan dugaan tindak pidana di bidang PVML, pada 2023 OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* sebanyak tiga kali, antara lain:

1. Pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian *fraud*;
2. Metodologi dan teknik analisis transaksi keuangan dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana sektor jasa keuangan; dan
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

In terms of increase the understanding of OJK employees in handling suspected criminal acts in PVML sector, in 2023 OJK conducted three times of Focus Group Discussions, related to:

1. *Investigative examination and fraud losses calculation;*
2. *Methodology and techniques of financial transactions analysis based on predicate crimes in form of crimes in the financial services sector; and*
3. *Implementation of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) and the Criminal Code (KUHP) in law enforcement in the financial services sector Criminal Law (KUHP) in law enforcement in the financial services sector.*

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti amanah UU PPSK, pada Tahun 2023 OJK melakukan persiapan atas upaya penertiban Perusahaan Pergadaian Swasta yang belum memiliki izin usaha dari OJK, antara lain melakukan koordinasi dengan Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia dan Satuan Kerja terkait, serta menyusun standar prosedur operasional mengenai upaya penertiban PVML yang belum memiliki izin usaha dari OJK.

Furthermore, following the mandate of PPSK Law, in 2023 the OJK prepares an efforts to control the Private Pawn Companies unlicensed by OJK, including coordinating with the Indonesian Pawn Company Association and related work units, as well as preparing standard operational procedures regarding to controlling unlicensed PVML from OJK.

IV.5.5. Aktivitas Pengembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Development of the Finance Industry, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions

IV.5.5.1. Kegiatan Pengembangan PVML Syariah

Development of Islamic PVML Industry

1. **Peluncuran *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023 – 2028**

   Pada tanggal 10 November 2023, OJK secara resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*Fintech P2P Lending*) 2023 – 2028. Peluncuran *Roadmap* ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* yang sehat, berintegritas, berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen, serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Peran *Roadmap* adalah sebagai panduan bagi segenap *stakeholders* di Industri *Fintech* P2P *Lending* mencapai visi tersebut.

1. ***Launch of FinTech P2P Lending Development and Strengthening Roadmap 2023-2028***

   On November 10, 2023, OJK officially launched the FinTech P2P Lending Development and Strengthening Roadmap 2023-2028 in an effort for OJK to create a healthy FinTech P2P Lending industry with integrity that is oriented towards financial inclusion and consumer protection and contributes to national economic growth. The roadmap serves as guidelines for all stakeholders in the FinTech P2P Lending industry towards achieving that vision.

OJK melibatkan berbagai *stakeholders* baik internal maupun eksternal dalam proses penyusunan *Roadmap* pengembangan dan penguatan *Fintech* P2P *Lending* 2023 – 2028. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan secara komprehensif serta menumbuhkan *sense of responsibility and belonging* dari para *stakeholders* untuk dapat bersama-sama mengawal implementasi *Roadmap Fintech* P2P *Lending* ini.

OJK involved various internal and external stakeholders when preparing the FinTech P2P Lending Development and Strengthening Roadmap 2023-2028, thereby facilitating comprehensive input and creating a sense of responsibility and belonging among the stakeholders to oversee roadmap implementation as a collective effort.

2. **Kajian PVML**
   Penyusunan kajian mengenai PVML, antara lain batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan industri LPBBTI, kajian penyelenggaraan usaha bulion, dan kajian potensi perencana keuangan (*financial planner*) ke dalam kelompok profesi penunjang penyedia industri jasa keuangan.

2. ***PVML Studies***
   Conducting studies on PVML, including the maximum limit of economic benefits of LPBBTI industry, studies on the implementation of bullion businesses, and studies on the potential of financial planners in the group of financial services industry supporting professions.

3. ***Business Matching* dalam Rangka Sinergi Peningkatan Peran PVML Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah**
   Business Matching diselenggarakan dalam rangka mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya membantu UMKM mendapatkan akses yang lebih luas kepada lembaga jasa keuangan syariah di Industri Bidang PVML Syariah dan membantu UMKM memperoleh wawasan yang dapat menunjang kegiatan usahanya menjadi lebih berkembang. Secara umum, kegiatan ini dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya melalui *sharing knowledge* dan *pitching* produk dan/atau layanan jasa keuangan PVML Syariah. Selama 2023, OJK telah melakukan dua kali kegiatan *Business Matching*, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Aceh.

3. ***Business Matching to Increase Synergy and Expand the Role of the Islamic PVML Industry within the Islamic Economy Ecosystem***
   Business matching aims to develop MSMEs in Indonesia, specifically by providing broader access to Islamic finance in the Islamic PVML industry and helping MSMEs gain greater insight to support and advance their business activities. In general, this was achieved through various activities, including knowledge sharing and pitching the products and/or services of the Islamic PVML industry. In 2023, OJK arranged to business matching activities in West Nusa Tenggara and Aceh.

4. ***Training of Trainer* (ToT) dan *Training of Community* (ToC) dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan PVML Syariah**
   ***Training of Trainer* (ToT)**
   ToT merupakan kegiatan pelatihan yang bersifat edukatif kepada kelompok strategis di masyarakat, sehingga kelompok tersebut dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait IKNB Syariah dan produk-produk IKNB Syariah, serta meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan/produk IKNB Syariah.

   Kegiatan ini merupakan salah satu strategi OJK untuk memberikan edukasi langsung kepada para akademisi tentang regulasi, jenis industri dan keunggulan produk, serta jasa IKNB Syariah. Melalui kegiatan ini, diharapkan para akademisi mampu menyampaikan kembali informasi yang didapatkan kepada lingkungan akademisi dan masyarakat luas di sekitarnya. Selama 2023, OJK telah melakukan dua kali kegiatan ToT, yaitu di Yogyakarta dengan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan di Padang dengan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.

4. ***Training of Trainers (ToT) and Training of Communities (ToC) to increase financial literacy in Islamic PVML Industry***
   Training of Trainers (ToT)
   ToT is an educational training activity targeting strategic community groups that can subsequently help disseminate information relating to the Islamic Non-Bank financial industry (NBFI) and its products, while simultaneously increasing public interest in using Islamic NBFI products/services.

   ToT activities are one OJK strategy to provide education directly to academics on prevailing Islamic NBFI regulations, industry types, products and services, with the expectation that trainees will subsequently be able to disseminate that information further in the local community. In 2023, OJK hosted two ToT activities, one in Yogyakarta in collaboration with the Sunan Kalijaga State Islamic University and one in Padang in conjunction with the Imam Bonjol State Islamic University.

***Training of Community* (*ToC*)**

ToC merupakan tindak lanjut dari *ToT* yang merupakan kegiatan untuk melanjutkan penyebaran informasi dan meningkatkan minat masyarakat terhadap IKNB Syariah. Kegiatan ini ditujukan kepada sivitas akademika untuk memberikan literasi mengenai IKNB Syariah, mendorong masyarakat menggunakan produk IKNB Syariah dan memberikan wadah dan peluang bagi para akademisi institut/perguruan tinggi untuk menyebarluaskan hasil tindak lanjut kegiatan *ToT*. Selama 2023, OJK telah melakukan dua kali kegiatan *ToC*, yaitu di Yogyakarta dengan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan di Padang dengan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.

Training of Communities (ToC)

ToC is a follow-up activity to the ToT program that continues the dissemination of information and strives to increase public interest in the Islamic NBFI. ToC activities target the academic community, providing greater literacy regarding the Islamic NBFI, while increasing public interest in using Islamic NBFI products as well as providing a forum and compelling opportunity for institutes/universities to disseminate the results of ToT activities. In 2023, OJK hosted two ToC activities, one in Yogyakarta in collaboration with the Sunan Kalijaga State Islamic University and one in Padang in conjunction with the Imam Bonjol State Islamic University.

IV.6 Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets

IV.6.1. Aktivitas Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Regulatory Activities for Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets, and Crypto Assets

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang PPSK dan merespon masifnya perkembangan teknologi, serta mendukung tersedianya kebijakan yang adaptif, OJK melakukan revitalisasi fungsi dan mekanisme *Regulatory Sandbox* sebagaimana POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Revitalisasi ini akan dimuat dalam Rancangan POJK tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang saat ini sedang disusun dan akan diterbitkan pada triwulan I-2024. POJK ini diterbitkan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang PPSK dan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan proses hingga pemberian status hasil *Regulatory Sandbox* yang selama ini belum optimal, serta untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan aktivitas dan layanan ITSK.

To implement the mandate of the PPSK Law, respond to the rapid development of technology, and support the availability of adaptive policies, OJK revitalizes the functions and mechanisms of the Regulatory Sandbox as outlined in POJK Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation (IKD) in the Financial Services Sector. This revitalization will be included in the Draft POJK on Financial Sector Technology Innovation, which is currently being drafted and will be issued in the first quarter of 2024. This POJK is issued to fulfill the mandate of the PPSK Law and provide legal certainty for the process and status granting of the Regulatory Sandbox results, which have not been optimal so far, as well as to mitigate risks that may arise in the implementation of ITSK activities and services.

Adapun pokok-pokok yang diatur antara lain penyelenggaraan ITSK; penyelenggaraan *Sandbox* OJK; rencana pengujian; kriteria Kelayakan inovasi untuk mengikuti *Sandbox*; proses uji coba pengembangan inovasi, jangka waktu, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akhir oleh peserta *Sandbox*; dan penyampaian hasil *Sandbox*.

The main points regulated include the implementation of ITSK; the conduct of OJK's Sandbox; the testing plan; the eligibility criteria for innovations to participate in the Sandbox; the process for testing innovation development, duration, and the obligation for participants to prepare and submit the final reports; and the submission of Sandbox results.

IV.6.2. Aktivitas Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets

Sesuai amanat Undang-Undang PPSK, OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi ITSK yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bagi sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto. Beberapa hal yang telah dilakukan sepanjang 2023 adalah:

1. **Pengawasan Penyelenggara ITSK**
   Selama 2023, OJK melakukan pengawasan terhadap 12 penyelenggara ITSK. Dalam rangka mendukung percepatan pemberian hasil *Regulatory Sandbox* sehingga memberikan kepastian atas kelangsungan bisnis/usaha penyelenggara ITSK, dilakukan pemantauan atas hasil analisis *off-site monitoring* yang menilai beberapa penyelenggara ITSK tersebut sudah tidak aktif (*dormant*).

2. **Penyempurnaan Kelengkapan Pengawasan**
   Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, OJK menyusun beberapa kelengkapan infrastruktur pengawasan, yaitu:
   a. **Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan**
      Penyempurnaan atas kelengkapan infrastruktur pengawasan yaitu dengan menyusun empat Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu: (1) SPO Pengawasan Tidak Langsung (*off-site*), (2) SPO Rencana Pengawasan Langsung (*on-site*), (3) SPO Pengawasan Langsung (*on-site*), dan (4) SPO Pemberian Masukan pada Satuan Kerja/Unit Kerja Lain.
   b. **Penyusunan Kerangka Pengawasan**
      Penyusunan kerangka pengawasan dan pedoman pemeriksaan dengan pendekatan yang diterapkan yaitu:
      1) **Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi.**
         Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi antara lain meliputi pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi, menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya, penerapan proses operasional yang baik terkait pengenalan konsumen dan manajemen risiko.
      2) **Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar.**
         Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar kepada penyelenggara ITSK yang dilakukan oleh pengawas meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan, aspek standar dan keamanan *platform*, aspek tata kelola teknologi informasi, risiko pasar, standar profesi dan etika pasar, transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, mekanisme penanganan keluhan, serta aspek keamanan dan kerahasian data konsumen dan transaksi.

In accordance with the mandate of the PPSK Law, OJK has the authority to supervise ITSK, which includes implementing supervisory policies on regulations for financial sector technology innovations, digital financial assets, and crypto assets. Several actions taken throughout 2023 are:

1. ***Supervision of ITSK Providers***
   During 2023, OJK supervised 12 ITSK providers. To support the expedited issuance of Regulatory Sandbox results, ensuring business continuity for ITSK providers, off-site supervision was conducted, assessing that several ITSK providers were inactive (dormant).

2. ***Enhancement of Supervision Infrastructure***
   To perform its supervisory duties, OJK developed several supervisory infrastructure components, including:
   a. ***Development of Supervision Standard Operating Procedures (SPOs)***
      Enhancements to supervisory infrastructure included developing four Standard Operating Procedures (SPOs): (1) Off-Site Supervision SPO, (2) On-Site Supervision Planning SPO, (3) On-Site Supervision SPO, and (4) Provision of Input to Other Work Units SPO.
   b. ***Development of Supervision Framework***
      A supervision framework and examination guidelines were developed with the following approaches:
      1) **Risk and Technology-Based Supervision**
         This approach includes balancing prudential aspects with innovation support, emphasizing robust governance and risk management in utilizing technology and managing digital ecosystems, and implementing good operational processes related to consumer identification and risk management.
      2) **Market Discipline-Based Supervision**
         This approach involves ensuring compliance with regulations, platform standards and security, IT governance, market risk, professional and market ethics standards, product and service transparency, competitive and inclusive markets, consumer needs alignment, complaint handling mechanisms, and data and transaction security and confidentiality.

Adapun aspek-aspek yang diterapkan dalam kerangka pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi serta pengawasan berbasis disiplin pasar yaitu: (1) Tata kelola, (2) Manajemen risiko, (3) Keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, (4) Pelindungan konsumen dan pelindungan data Pribadi, (5) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (6) disiplin pasar.

The supervision framework aspects include: (1) Governance, (2) Risk Management, (3) Information System Security and Reliability, including Cyber Resilience, (4) Consumer Protection and Personal Data Protection, (5) Compliance with Regulations, and (6) Market Discipline.

c. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara langsung kepada penyelenggara atas dasar hasil pengawasan tidak langsung maupun situasi atau kondisi lain yang memerlukan pengawasan langsung. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan secara langsung, yaitu:

1) Perencanaan Pemeriksaan.
2) Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu antara lain Menetapkan Standar dan Prosedur Pemeriksaan, Melakukan *Entry Meeting*, Mengumpulkan Data dan/atau Informasi, Melakukan Analisis dan Pengujian atas Data dan Informasi, Menyusun Daftar Temuan dan Bukti Pemeriksaan, Melakukan *Exit Meeting*, dan Dokumentasi.
3) Pelaporan Pemeriksaan, yaitu antara lain Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

c. Development of Examination Guidelines

Examinations are conducted on-site based on off-site supervision results or other situations requiring on-site supervision. The stages of on-site examinations are:

1) Examination Planning
2) Examination Execution, including establishing Standards and Procedures, conducting Entry Meetings, collecting Data and/or Information, analyzing and testing Data and Information, compiling Findings and Evidence, conducting Exit Meetings, and Documentation.
3) Examination Reporting, including Confirmation of Examination Results and Examination Report.
4) Follow-up on Examination Results.

3. Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan yang pada bulan Desember 2023 ini telah memasuki tahap harmonisasi, ditentukan bahwa tanggal peralihan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025.

3. Transition of Crypto Asset Regulation and Supervision

Based on the Draft Government Regulation (RPP) on the Transition of Digital Financial Asset Regulation and Supervision, including Crypto Assets and Financial Derivatives, which entered the harmonization stage in December 2023, the transition date is set for January 10, 2025.

Oleh karena itu, dilakukan inventarisir atas perangkat yang diperlukan selama masa transisi sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam RPP dimaksud, yaitu di di antaranya: (1) menetapkan kriteria kerangka kerja pengaturan dan pengawasan aset kripto yang memungkinkan, berimbang, dan kolaboratif (*an enabling, balanced, and collaborative regulatory and supervisory framework*), (2) melakukan pemetaan peraturan terkait aset kripto, dan (3) melakukan koordinasi dengan Bappebti, Bank Indonesia, dan Asosiasi terkait dalam rangka mengetahui kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam pelaksanaan transisi, sehingga proses peralihan dapat berjalan dengan lancar serta tidak mengganggu operasional di pasar Aset Kripto.

Therefore, an inventory of necessary tools for the transition period was conducted in accordance with the duties and authorities outlined in the RPP, including: (1) establishing criteria for an enabling, balanced, and collaborative regulatory and supervisory framework for crypto assets, (2) mapping regulations related to crypto assets, and (3) coordinating with Bappebti, Bank Indonesia, and related associations to assess the readiness and capability of business actors during the transition, ensuring a smooth transition without disrupting the operations of the Crypto Asset market.

IV.6.4. Aktivitas Penegakan Hukum Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Law Enforcement Activities for Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets, and Crypto Assets

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), diatur bahwa OJK melakukan penyelenggaraan pembinaan/pemantauan penyelenggara ITSK, antara lain melalui:

According to POJK Number 13/POJK.02/2018 on Digital Financial Innovation (IKD) in the Financial Services Sector and OJK Circular Letter Number 16/SEDK.02/2023 on Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets, and Crypto Assets (IAKD), OJK oversees ITSK providers through:

1. Pemantauan Langsung (*On-site*)

Pada tahun 2023, telah dilakukan pemantauan langsung terhadap 12 penyelenggara ITSK. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis operasional penyelenggara ITSK sekaligus mendukung percepatan pemberian hasil *Regulatory Sandbox* atas penyelenggara ITSK dimaksud.

1. On-site Supervision

In 2023, OJK conducted on-site supervision of 12 ITSK providers to ensure business continuity and support the regulatory sandbox process.

Tabel 4.52. Rincian Pelaksanaan Pemantauan per Klaster
Table 4.52. Details of Monitoring Implementation by Cluster

No	Jenis Klaster	Jumlah | *Total*	*Cluster Type*
1	*Aggregator*	5	*Aggregator*
2	*Innovative Credit Scoring (ICS)*	4	*Innovative Credit Scoring (ICS)*
3	*Financing Agent*	1	*Financing Agent*
4	*Property Investment Management*	1	*Property Investment Management*
5	*Transaction Authentication*	1	*Transaction Authentication*
Jumlah		**12**	***Total***

Menindaklanjuti kegiatan pemantauan langsung, bidang Pengawasan IAKD menyusun Laporan Hasil Pemantauan (LHP) atas penyelenggara ITSK yang dilakukan pemantauan langsung. Pada 2023, terdapat 12 LHP yang terbit dan sesuai dengan jadwal pemantauan langsung.

Following on-site supervision, IAKD Supervision produced 12 supervision reports (LHP) in 2023.

2. Penegakan Kepatuhan

Aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh bidang Pengawasan IAKD sepanjang tahun 2023 yaitu dengan menerbitkan sebanyak 20 surat peringatan.

2. Compliance Enforcement

Throughout 2023, the IAKD Supervision Division issued 20 warning letters.

Tabel 4.53. Rincian Surat Peringatan per Klaster
Table 4.53. Details of Warning Letters by Cluster

No	Jenis Klaster	Jumlah | *Total*	*Cluster Type*
1	*Aggregator*	8	*Aggregator*
2	*Innovative Credit Scoring (ICS)*	6	*Innovative Credit Scoring (ICS)*
3	*Financing Agent*	2	*Financing Agent*
4	*Property Investment Management*	2	*Property Investment Management*
5	*Transaction Authentication*	2	*Transaction Authentication*
Jumlah		**20**	***Total***

Surat peringatan ini diterbitkan atas pelanggaran dari penyelenggara ITSK seperti tidak menyampaikan laporan kinerja, tidak melaporkan adanya perubahan model bisnis, hingga tidak melaporkan atas adanya perubahan organisasi. *Supervisory action* ini merupakan langkah tegas bidang Pengawasan IAKD dalam memastikan penyelenggara ITSK untuk selalu tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

These warning letters were issued for violations by ITSK providers, such as failing to submit performance reports, not reporting changes in business models, and not reporting organizational changes. These supervisory actions demonstrate the IAKD Supervision Division's firm stance in ensuring ITSK providers comply with applicable regulations.

3. **Penetapan Hasil *Regulatory Sandbox***

   Sejak 2020 hingga Desember 2023, OJK telah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* atas 10 Penyelenggara ITSK yang terdiri dari enam bisnis model, yaitu *Online Gold Depository, Social Network and Robo Advisor, Project Financing, Blockchain Based, Insurance Broker Marketplace,* dan *Innovative Credit Scoring.*

3. ***Regulatory Sandbox Results Determination***

   From 2020 to December 2023, OJK determined the Regulatory Sandbox results for 10 ITSK providers, comprising six business models: Online Gold Depository, Social Network and Robo Advisor, Project Financing, Blockchain-Based, Insurance Broker Marketplace, and Innovative Credit Scoring.

IV.6.5. Aktivitas Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Development Activities for Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets, and Crypto Assets

Selama tahun 2023, OJK telah melakukan serangkaian kegiatan pengembangan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan di sektor IAKD, di antaranya yaitu:

1. **Penyelenggaraan *The 5th Indonesia Fintech Summit & Expo* (IFSE) dan Bulan *Fintech* Nasional (BFN) 2023**

   Kegiatan IFSE dan BFN 2023 merupakan upaya OJK berkolaborasi dengan asosiasi ekosistem keuangan digital seperti Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk memfasilitasi forum pertemuan antara para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku/penggiat *Fintech* baik domestik maupun mancanegara untuk berdiskusi terkait potensi perkembangan *Fintech* di Indonesia.

   Tema yang diusung pada IFSE 2023 yaitu "*Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy*". Kegiatan IFSE dan BFN 2023 menghadirkan lebih dari 70 pembicara nasional.

   Selain itu, terdapat lebih dari 147 aktivitas virtual maupun fisik pada agenda IFSE dan BFN 2023 yang meliputi webinar, seminar, *gathering, live* media sosial, serta kegiatan lain.

During 2023, OJK undertook a series of development activities to strengthen its supervisory functions in the IAKD sector, including:

1. ***The 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) and National Fintech Month (BFN) 2023***

   The IFSE and BFN 2023 were organized by OJK in collaboration with digital financial ecosystem associations such as the Indonesia Fintech Association (AFTECH), the Indonesia Sharia Fintech Association (AFSI), and the Indonesia Fintech Lending Association (AFPI). These events facilitated a forum for leaders of financial institutions, associations, and fintech practitioners both domestically and internationally to discuss the potential development of fintech in Indonesia.

   The theme for IFSE 2023 was "Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy."

   The events featured more than 70 national speakers and over 147 virtual and physical activities, including webinars, seminars, gatherings, social media live sessions, and other activities.

2. **Peluncuran Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI)**

   Dalam rangka mitigasi risiko dan mengoptimalkan AI di industri *Fintech*, bidang Pengawasan IAKD menyusun Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya (*Code of Conduct Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence*) yang dapat menjadi panduan bagi Penyelenggara *Fintech* dan pihak terkait untuk memastikan aplikasi berbasis AI yang dimanfaatkan telah memenuhi prinsip-prinsip *beneficial, fair and accountable, transparent* dan *explicable, robustness* dan *security*.

2. ***Launch of the Artificial Intelligence (AI) Code of Conduct***

   To mitigate risks and optimize AI in the fintech industry, the IAKD Supervision Division developed the Code of Conduct for Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence. This code serves as a guideline for fintech providers and related parties to ensure that AI applications are beneficial, fair and accountable, transparent and explainable, robustness and security.

Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung jawab dan Dapat Dipercaya di Sektor Teknologi Keuangan ini terbagi menjadi lime prinsip dasar, yaitu: (1) Berasaskan Pancasila, (2) Bermanfaat, (3) Wajar & Akuntabel, (4) Transparan & Dapat Dijelaskan, dan (5) Tangguh & Aman. Kehadiran panduan tersebut, diharapkan AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi inovasi *Fintech* dan dapat memitigasi risiko yang muncul di kemudian hari.

The AI Code of Conduct in the Financial Technology Sector is based on five fundamental principles: (1) Based on Pancasila, (2) Beneficial, (3) Fair & Accountable, (4) Transparent & Explainable, and (5) Resilient & Secure. The guideline aims to ensure that AI optimally benefits fintech innovation while mitigating future risks.

3. Penyusunan Kajian Pengaturan Penyelenggaraan Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif

Bidang Pengawasan IAKD telah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* terhadap para Penyelenggara Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif atau yang dikenal sebagai *Innovative Credit Scoring/Alternative Credit Scoring* untuk direkomendasikan dan diatur serta diawasi lebih lanjut oleh OJK di bidang IAKD, sehingga berdasarkan penetapan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mengatur terkait penyelenggaraan, perizinan, pelaporan, hingga sanksi terhadap Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia.

Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan/ *library research* yang akan melakukan penelaahan pada data primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang relevan) dan penelaahan data sekunder yang meliputi antara lain kajian, jurnal, buku, dan laporan yang dihasilkan oleh individu atau lembaga/akademisi yang relevan, baik pada level nasional maupun internasional. Studi kasus dalam kajian ini dilakukan pada ekosistem pelaporan kredit di beberapa negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Inggris, dan Hongkong.

Selain itu, dalam kajian ini juga dikaji mengenai hasil *Regulatory Sandbox* klaster *Innovative Credit Scoring* (ICS), kajian kecukupan modal bagi Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia, pengaturan terkait aspek Teknologi Informasi dan keamanan data, hingga ruang lingkup dan pokok-pokok pengaturan yang perlu diatur di dalam pengaturan penyelenggaraan Lembaga Pemeringkat kredit Alternatif.

3. Development of Alternative Credit Rating Agency Regulations

The IAKD Supervision Division has established Regulatory Sandbox results for Alternative Credit Rating Agency providers, also known as Innovative Credit Scoring/Alternative Credit Scoring. These agencies will be recommended for further regulation and supervision by OJK. This necessitates further regulation on the organization, licensing, reporting, and sanctions for Alternative Credit Rating Agencies in Indonesia.

The study employed library research to review primary data (relevant Indonesian regulations) and secondary data, including studies, journals, books, and reports from individuals or institutions, both nationally and internationally. Case studies were conducted on credit reporting ecosystems in countries such as South Korea, Malaysia, the UK, and Hong Kong.

The study also reviewed the Regulatory Sandbox results for the Innovative Credit Scoring (ICS) cluster, capital adequacy for Alternative Credit Rating Agencies in Indonesia, IT and data security regulations, and the scope and main points of regulation needed for these agencies.

4. Partisipasi dalam Singapore Fintech Festival (SFF) 2023

SFF merupakan acara *fintech* terbesar di Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) setiap tahunnya, yang mempertemukan regulator, pakar, CEO di bidang keuangan dan teknologi. SFF tahun ini berfokus kepada pertumbuhan dan adopsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) serta mengeksplorasi potensi teknologi di sektor keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

4. Participation in the Singapore Fintech Festival (SFF) 2023

SFF, Asia Pacific's largest fintech event organized annually by the Monetary Authority of Singapore (MAS), brings together regulators, experts, and CEOs in finance and technology. This year's SFF focused on the growth and adoption of artificial intelligence (AI) and explored technology's potential in the financial sector to enhance financial inclusion.

5. Diskusi dengan Otoritas Internasional dan Pelatihan *Selected Issues in the Regulation of Fintech*

Dalam rangka Pengembangan ITSK di Indonesia, dilakukan *sharing* dan diskusi dengan beberapa otoritas di luar negeri, antara lain Bank Negara Malaysia, Securities Exchange Commission (SEC) Thailand, Monetary Authority of Singapore (MAS), Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA), Bank of International Settlement (BIS). Di samping itu, dalam rangka penguatan SDM yang ahli di bidang ITSK, OJK mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pada *Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech* (SIFR).

5. Discussions with International Authorities and Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech

OJK engaged in sharing and discussions with foreign authorities such as Bank Negara Malaysia, the Securities Exchange Commission (SEC) of Thailand, the Monetary Authority of Singapore (MAS), the Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA), and the Bank of International Settlement (BIS). Additionally, to strengthen expertise in the ITSK field, OJK sent personnel to participate in the Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech (SIFR).

6. *Focus Group Discussion* (FGD) Bersama Bappebti

Dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai desain pengaturan dan pengawasan aset kripto yang diselenggarakan oleh Bappebti, bidang Pengawasan IAKD melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas secara teknis penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan Aset Kripto. Perdagangan Aset Kripto diatur melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini mengatur mengenai syarat entitas pedagang, syarat perdagangan, penyimpanan, ketentuan AML/CFT, pelindungan konsumen, serta kriteria Aset Kripto.

Cakupan Aset Kripto yang masuk dalam pengaturan dan pengawasan oleh Bappebti, yaitu: *unbacked crypto asset* dan *stablecoin*. Selain itu, Bappebti juga tidak mengatur mengenai *Initial Coin Offering* dan *Initial Token Offering*. Bappebti mengatur Aset Kripto sebagai bentuk komoditas dengan menerapkan proses hirarki dan bukan Aset Kripto sebagai *currency*. Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan ditetapkan melalui Peraturan Bappebti.

7. *Focus Group Discussion* (FGD) Bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF)

Dalam rangka menguatkan konstruksi pengaturan *Regulatory Sandbox* yang akan direvitalisasi, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama *Cambridge Centre for Alternative Finance* (CCAF) pada 17 – 18 November 2023. Pada kesempatan FGD tersebut, CCAF menyampaikan *best practice* yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *Regulatory Sandbox* di OJK, salah satunya adalah penerapan *eligibility criteria* oleh Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA) dalam penyelenggaraan *Regulatory Sandbox*, yaitu: (1) Inovasi tersebut harus masuk dalam cakupan pengawasan FCA, (2) Inovasi tersebut harus benar-benar baru, (3) Inovasi tersebut harus membawa manfaat bagi konsumen, (4) Kebutuhan ruang uji coba, dan (5) Kesiapan untuk dilakukan uji coba.

8. OJK Mengajar – Sosialisasi *Digital Financial Literacy*

Dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke-12, OJK menyelenggarakan kegiatan OJK Mengajar dengan tema "Sosialisasi *Digital Financial Literacy*" di Universitas Islam Bandung (Unisba) pada 13 Oktober 2023.

9. *OJK's Year-End Knowledge Sharing Session*

Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta persiapan dalam menyongsong peralihan pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto, bidang Pengawasan IAKD menyelenggarakan kegiatan *Knowledge Sharing Session* yang mengangkat tema "Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia". Tujuan kegiatan adalah untuk mewadahi diskusi bersama anggota asosiasi di antaranya AFTECH, AFSI, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), dan Indonesia Fintech Society (IFSoc).

6. *Focus Group Discussion (FGD) with Bappebti*

To provide an initial understanding of crypto asset regulation and supervision design by Bappebti, the IAKD Supervision Division conducted an FGD on the technical aspects of crypto asset regulation and supervision. Crypto asset trading is regulated under the Bappebti Regulation Number 8 of 2021 on Guidelines for the Physical Market Trading of Crypto Assets on Futures Exchanges. This regulation covers trader entity requirements, trading conditions, storage, AML/CFT provisions, consumer protection, and crypto asset criteria.

The scope of Bappebti's regulation and supervision includes unbacked crypto assets and stablecoins, excluding Initial Coin Offerings (ICO) and Initial Token Offerings (ITO). Bappebti regulates crypto assets as commodities, applying a hierarchical process rather than treating them as currency. The types of crypto assets tradable are determined by Bappebti regulations.

7. *Focus Group Discussion (FGD) with Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF)*

To strengthen the construction of the revitalized Regulatory Sandbox, an FGD was held with the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) on November 17-18, 2023. CCAF shared best practices for the implementation of Regulatory Sandboxes, including the eligibility criteria used by the UK Financial Conduct Authority (FCA): (1) The innovation must fall within the FCA's regulatory scope, (2) The innovation must be genuinely new, (3) The innovation must benefit consumers, (4) A need for a testing environment, and (5) Readiness for testing.

8. *OJK Mengajar – Digital Financial Literacy Socialization*

As part of OJK's 12th Anniversary celebration, OJK organized the OJK Mengajar event with the theme "Digital Financial Literacy Socialization" at the Islamic University of Bandung (Unisba) on October 13, 2023.

9. *OJK's Year-End Knowledge Sharing Session*

To enhance understanding and preparation for the transition of crypto asset regulation and supervision, the IAKD Supervision Division held a Knowledge Sharing Session themed "Welcoming Crypto Assets in Strengthening Indonesia's Digital Financial Ecosystem." The event aimed to facilitate discussions with association members, including AFTECH, AFSI, the Indonesian Crypto Asset Traders Association (ASPAKRINDO), and the Indonesia Fintech Society (IFSoc).

10. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait *Blockchain* dan Kripto

Dalam rangka memberikan pengetahuan dasar mengenai teknologi *Blockchain* dan Aset Kripto untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam pengawasan Layanan Digital dan Keamanan Siber, OJK bekerja sama dengan PROSPERA menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "*Fundamental Blockchain* dan *Crypto Asset*", antara lain membahas tentang Teknologi *Blockchain*, pengaturan *Crypto Assets* di beberapa negara, *Initial Coin Offering* (ICO) serta isu-isu lainnya yang terkait.

11. *Cyber Bootcamp* 2023

Dalam upaya meningkatkan *cyber awareness* dan keahlian pegawai OJK di bidang keamanan siber, OJK berkolaborasi dengan UK Embassy menyelenggarakan kegiatan pelatihan *Cyber Bootcamp*. Seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan metode *Training of Trainer* (ToT) dengan tujuan agar para peserta dapat membagikan ilmu yang telah diperoleh kepada pegawai lainnya di satuan kerja masing-masing sehingga pemahaman mengenai keamanan siber dapat diketahui oleh seluruh insan OJK. Adapun materi pelatihan *Cyber Bootcamp* terdiri dari 18 materi dari delapan topik yang terkait dengan keamanan siber, studi kasus di beberapa negara, serta *cyptocurrency*.

10. Focus Group Discussion (FGD) on Blockchain and Crypto

To provide foundational knowledge on Blockchain technology and Crypto Assets for application in Digital Services and Cybersecurity Supervision, OJK collaborated with PROSPERA to hold an FGD-themed "Fundamental Blockchain and Crypto Assets," discussing Blockchain technology, crypto asset regulations in various countries, Initial Coin Offerings (ICO), and other related issues.

11. Cyber Bootcamp 2023

To enhance cyber awareness and cybersecurity skills among OJK employees, OJK, in collaboration with the UK Embassy, organized a Cyber Bootcamp. The training was conducted face-to-face using the Training of Trainer (ToT) method, aiming for participants to share the knowledge gained with their colleagues, ensuring comprehensive cybersecurity understanding within OJK. The Cyber Bootcamp training covered 18 materials across 8 topics related to cybersecurity, case studies from various countries, and cryptocurrency.

IV.7 Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Komunikasi

Market Conduct Supervision, Education and Consumer Protection

IV.7.1. Pengembangan Dan Pengaturan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Development and Regulation of Consumer Protection and Education

IV.7.1.1. Pengembangan Kebijakan PEPK

PEPK Policy Development

1. Kajian mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan)

Kajian ini merekomendasikan pembaruan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, Pedoman RIPLAY, dan Pedoman Iklan yang sesuai dengan ketentuan POJK PKM SJK, serta kebutuhan penguatan pemahaman konsumen di sektor jasa keuangan terhadap produk dan layanan yang disediakan.

1. Review of the Provision and Delivery of Information and the Marketing of Financial Products and/or Services (RIPLAY Guidelines and Guidelines for Financial Services Advertisements)

This study recommended revisiting the Circular Letter (SEOJK) Number 12/SEOJK.07/2014 concerning Information Delivery in the Marketing of Financial Products and/or Services, namely the RIPLAY Guidelines, and Advertising Guidelines in accordance with POJK PKM SJK (Public and Consumer Protection in the Financial Services Sector), along with the need to strengthen consumer understanding of financial services sector regarding the products and services available.

Gambar 4.1. Kajian mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan)
Figure 4.1. Review of the Provision and Delivery of Information and the Marketing of Financial Products and/or Services (RIPLAY Guidelines and Guidelines for Financial Services Advertisements)

2. Kajian Mengenai Perintah atau Tindakan Tertentu Dalam Rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Kajian ini memberikan rekomendasi berupa penyusunan ketentuan OJK yang lebih spesifik dan rinci mengenai tata laksana dan mekanisme pemberian perintah tertulis atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan pelindungan konsumen sesuai dengan amanat UU PPSK, serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu.

2. Review of Specific Instructions or Actions in the context of Consumer Protection in the Financial Services Sector

This study provides recommendations in the form of drafting more specific and detailed OJK regulations concerning the implementation procedures and mechanisms for giving written instructions or specific actions as a follow-up to monitoring financial service provider (FSP) conduct to safeguard consumer protection in accordance with the mandate of the PPSK Act, while providing a clear basis for OJK to provide specific instructions or actions.

Gambar 4.2. Kajian Mengenai Perintah atau Tindakan Tertentu Dalam Rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Figure 4.2. Review of Specific Instructions or Actions in the context of Consumer Protection in the Financial Services Sector

3. **Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan**

   Kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Bidang PEPK serta Kertas Kerja (KK) yang dapat dijadikan pedoman pengenaan sanksi dan/atau denda administratif kepada PUJK.

3. ***Review of Procedures for Imposing Administrative Sanctions and/or Fines in the Context of Consumer Protection in Financial Services Sector***

   This study provides recommendations for the formulation of provisions concerning procedures for imposing sanctions and/or administrative fines in the context of FSP Conduct, Consumer Protection and Education (PEPK) as well as working papers that can be used as guidelines for imposing sanctions and/or administrative fines on financial service providers (FSP).

Gambar 4.3. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Figure 4.3. Review of Procedures for Imposing Administrative Sanctions and/or Fines in the context of Consumer Protection in the Financial Services Sector

4. **Kajian Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Mengenai Kegiatan Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan**

   Kajian ini memberikan rekomendasi pada pembaruan terhadap ketentuan terkait kegiatan komunikasi OJK agar lebih terstruktur, responsif terhadap dinamika sektor jasa keuangan dan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas komunikasi OJK dengan publik.

4. ***Review of Draft BOC Regulation (PDK) Number 3/PDK.01/2020 concerning Communication Activity by the Financial Services Authority***

   This study provides recommendations concerning refinements to regulations on OJK communication activity to be more structured and responsive to the dynamics of the financial services sector and public needs, while improving the quality of public communication at OJK.

Gambar 4.4. Kajian Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Mengenai Kegiatan Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan
Figure 4.4. Review of Draft BOC Regulation concerning Communication Activity by the Financial Services Authority

IV.7.1.2. Pengaturan PEPK dan Diseminasi
PEPK Regulation and Dissemination

1. Pada Tahun 2023, Bidang PEPK telah berhasil menerbitkan beberapa peraturan dengan rincian sebagai berikut:

a. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK LIK SJK)

POJK LIK SJK bertujuan untuk mendukung target pemerintah mencapai Indeks Inklusi Keuangan dan program OJK untuk peningkatan Indeks Literasi Keuangan, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang dinamis, meningkatkan kuantitas kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan mengoptimalisasikan peran dari PUJK, mengakomodasi tumbuhnya PUJK baru sebagai dampak perkembangan sektor jasa keuangan, serta mengoptimalisasi pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

b. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. POJK ini mempertimbangkan perluasan PUJK, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis. Selain itu, mempertegas kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*).

c. PDK Nomor 1/PDK.07/2023 tentang Pengajuan Gugatan Perdata oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (PDK Gugatan Perdata)

PDK ini mengatur tata cara OJK dalam mengajukan gugatan perdata untuk melaksanakan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. PDK ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu PDK OJK Nomor 2/PDK.07/2013 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen.

d. PDK Nomor 1/PDK.08/2023 tentang Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan

PDK ini mengatur penyelenggaraan Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, yang meliputi penerimaan dan pencatatan, layanan penerimaan informasi, layanan pemberian informasi, layanan pengaduan, pemberian perintah dan perintah tertulis untuk penyelesaian pengaduan dan penetapan sanksi, pengelolaan Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, penatausahaan layanan, evaluasi pelaksanaan pelayanan konsumen dan masyarakat, serta mekanisme koordinasi layanan konsumen dan masyarakat dengan satuan kerja lainnya dan kantor OJK.

1. In 2023, FSP Conduct, Consumer Protection and Education (PEPK) successfully issued several regulations recapitulated as follows:

a. OJK Regulation (POJK) Number 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public (POJK LIK SJK)

POJK LIK SJK aims to support the government target for the Financial Inclusion Index as well as OJK programs to increase the Financial Literacy Index, while accommodating the development of dynamic information technology, increasing the quantity of financial literacy and inclusion activities by optimizing the role of FSPs, accommodating the growth of new FSPs as a result of the financial services sector development, as well as optimizing the use of financial education learning management systems to increase Financial Literacy and Inclusion.

b. OJK Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Public and Consumer Protection in the Financial Services Sector (POJK PKM SJK)

This POJK was issued as a follow-up to the mandate of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act) and to supersede POJK Number 6/POJK.07/2022. The scope of this POJK includes the expansion of FSPs, the digitalization of products and/or services in the financial services sector, as well as the development of an increasingly complex and dynamic financial services industry. In addition, this OJK regulation also affirms the authority of OJK in terms of supervising FSP conduct (market conduct).

c. BOC Regulation (PDK) Number 1/PDK.07/2023 concerning the Filing of Civil Lawsuits by the Financial Services Authority to Protect Consumers and the Public (PDK on Civil Lawsuits)

This BOC Regulation (PDK) stipulates OJK procedures to file civil lawsuits as the implementation of Article 30 of Act Number 21 of 2011 concerning OJK. This BOC Regulation repeals the previous regulation in its entirety, namely BOC Regulation (PDK) Number 2/PDK.07/2013 concerning the Mechanism for Filing Civil Lawsuits by OJK for Consumer Protection.

d. BOC Regulation (PDK) Number 1/PDK.08/2023 concerning Integrated Consumer and Public Services Systems in the Financial Services Sector

This BOC Regulation (PDK) regulates the implementation of Integrated Consumer and Public Services Systems in the Financial Services Sector, including the receipt and recording, receiving and providing information, giving instructions and written instructions to resolve complaints and determine sanctions, managing Integrated Consumer and Public Services Systems as well as coordination mechanisms for consumer and public services with other work units and OJK offices.

e. **SEOJK Nomor 14/SEOJK.08/2023 tentang Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)**
SEOJK ini mengatur pihak yang mengikuti wawancara atas kemampuan dan kepatutan, faktor penilaian dalam wawancara atas kemampuan dan kepatutan, persyaratan administratif bagi calon pengurus dan/atau calon pengawas LAPS SJK, tata cara pemenuhan dokumen persyaratan administratif, tata cara permohonan persetujuan calon pengurus dan/atau calon pengawas LAPS SJK, mekanisme wawancara atas kemampuan dan kepatutan, hasil wawancara atas kemampuan dan kepatutan, serta ketentuan peralihan dalam wawancara atas kemampuan dan kepatutan bagi calon pengurus dan/atau calon pengawas yang sedang dilakukan.

e. ***Circular Letter (SEOJK) Number 14/SEOJK.08/2023 concerning Interview Procedures for Fit and Proper Tests for Candidate Managers and Candidate Supervisors at Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector***
This Circular Letter (SEOJK) regulates the parties participating in interviews regarding fit and proper tests, including the assessment factors when conducting interviews for fit and proper tests, the administrative requirements for candidate managers and/or candidate supervisors at Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector, as well as procedures for fulfilling the administrative requirements for documents, procedures for requesting approval from candidate managers and/or candidate supervisors at Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector, the interview mechanism for fit and proper tests, the interview results of fit and proper tests, and the transition provisions for interviews regarding ongoing fit and proper tests for candidate managers and/or candidate supervisors.

2. **Untuk mendukung pemahaman peraturan yang telah diterbitkan, OJK melakukan serangkaian sosialisasi kepada pihak internal (pengawas) dan eksternal (PUJK).**
Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan dilakukan ke beberapa kota antara lain Maluku, Denpasar, Jakarta, Malang, Bandung, Kupang, Banyuwangi, Cirebon, Papua, Pontianak, Samarinda dan Palembang.

2. ***OJK also carried out a series of socialization programs for internal (supervisors) and external (FSP) parties to increase understanding of the regulations promulgated by OJK.***
The socialization/dissemination of regulations has occurred in several cities, including Maluku, Denpasar, Jakarta, Malang, Bandung, Kupang, Banyuwangi, Cirebon, Papua, Pontianak, Samarinda and Palembang.

3. **Penyampaian Tanggapan Peraturan/Kewajiban**
Dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan serta informasi mengenai Pelindungan Konsumen sebagai tugas pokok direktorat, OJK melakukan harmonisasi atas konsep peraturan yang akan diterbitkan terhadap peraturan yang sudah ada khususnya dari aspek Pelindungan Konsumen, melalui pemberian tanggapan rancangan ketentuan. Adapun rancangan ketentuan dan kebijakan yang telah ditanggapi selama Tahun 2023 sebanyak 48 tanggapan.

3. ***Submission of Regulatory/Mandatory Responses***
Analysing and evaluating the regulations and information concerning Consumer Protection as a core task of the Directorate, OJK harmonizes and aligns conceptual regulations with existing regulations, particularly in terms of consumer protection, by providing responses to draft regulations. In 2023, OJK submitted 48 responses to draft provisions and policies.

IV.7.2. Inklusi Keuangan
Financial Inclusion

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat fungsi PEPK, OJK telah menyusun Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) Tahun 2023-2027.

Peta Jalan ini merupakan pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan, serta panduan bagi pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, serta penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat melalui pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang efektif, optimalisasi penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dalam rangka mencapai sektor jasa keuangan yang terpercaya dan masyarakat yang sejahtera.

Following to the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK), as well as OJK's commitment to strengthening the PEPK function, OJK prepared a Roadmap of Supervision of Conduct of Financial Service Providers as well as Consumer Education and Protection (PEPK Roadmap) 2023-2027.

This Roadmap is serving as a guideline for OJK and financial services industry, as well as for other relevant stakeholders to realising the synergy and collaboration to achieve the financial literacy and inclusion index targets for Indonesian society, as well as strengthening consumer and community protection through Supervision of Financial Services Provider Conduct (FSP), optimizing the resolution of complaints in the financial services sector, as well as eradicating the illegal financial activities to achieve a trusted financial services sector and a prosperous society.

1. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendorong pemerataan akses keuangan di daerah dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu sebesar 90% pada tahun 2024.

Jumlah TPAKD semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan periode triwulan IV-2023, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat Provinsi dan 481 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 434 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat Provinsi dan 400 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, sebanyak 28 Provinsi di antaranya telah membentuk TPAKD secara lengkap di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada 2023, telah dilakukan berbagai program kerja TPAKD dalam memperluas akses keuangan di daerah. Rincian capaian dan *output* dari beberapa program kerja inklusi keuangan yang diimplementasikan oleh TPAKD selama tahun 2023, yaitu:

a. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan rentenir di daerah, program K/PMR semakin ditingkatkan. Seluruh Kantor OJK di daerah telah mengimplementasikan program K/PMR, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)*

TPAKD teams serve as a coordination forum between institutions and relevant stakeholders to accelerate regional access to finance and nurture regional economic growth towards greater public prosperity. In conjunction with all relevant regional stakeholders, TPAKD teams from various work programs are expected to increase equitable regional access to finance and achieve the financial inclusion target set by the Government, namely 90% by 2024.

The number of TPAKD teams is increasing year over year. As of the fourth quarter of 2023 and in accordance with prevailing Regional Head Decrees, a total of 515 TPAKD teams have been established, including 34 at the provisional level and 481 at the regency/city administrative level. Of that total, 434 have been officially inaugurated, including 34 at the provisional level and 400 at the regency/city administrative level. In addition, 28 provinces in Indonesia have formed a full complement of TPAKD teams at the regency/city administrative level.

In 2023, various TPAKD work programs were implemented to expand regional access to finance. The milestones and deliverables of each financial inclusion work program implemented by TPAKD teams in 2023 are as follows:

a. Lending/Financing Against Loan Sharking Program (K/PMR)

Supporting efforts to eradicate loansharking in different regions, the K/PMR program was intensified. All OJK Regional offices have implemented the K/PMR program as follows:

Tabel 4.54. Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV 2023
Table 4.54. K/PMR Disbursements in Quarter IV 2023

No	*Generic Model* K/PMR	Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV 2023 *K/PMR Disbursements in Quarter IV 2023*			*Generic Model for K/PMR*
		Jumlah TPAKD *Total TPAKD*	Jumlah Debitur *Total Borrowers*	Nominal Penyaluran (Miliar) *Value (Billion)*	
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	26	113.253	Rp1.533,39	*GM 1: Fast loans/financing*
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	28	105.537	Rp3.116,59	*GM 2: Low-cost loans/financing*
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah	59	1.143.898	Rp34.111,21	*GM 3: Fast and low-cost loans/financing*
	Jumlah	**113**	**1.362.688**	**Rp38.761,19**	***Total***

Catatan: Sebanyak 14 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR
Notes: 14 TPAKD teams have more than 1 Generic Model

b. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (K/PSP)

Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pertanian khususnya dari sisi pembiayaan, saat ini telah diinisiasi GM Program K/PSP yang diluncurkan pada tahun 2020 dan telah diimplementasikan di beberapa wilayah yang memiliki potensi pertanian dengan data sebagai berikut:

b. Lending/Financing for Priority Agricultural Sectors (K/PSP)

Strengthening priority agricultural sectors, specifically in terms of financing, OJK initiated Generic Models for the K/PSP loan disbursement program in 2020, which has been implemented in several regions with agricultural as follows:

Tabel 4.55. Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester II 2023
Table 4.55. K/PSP Disbursements in Semester II 2023

No	*Generic Model* K/PSP	Perkembangan Penyaluran K/PSP Semester II *K/PSP Disbursements in Semester II*			*Generic Model for K/PSP*
		Jumlah TPAKD *Total TPAKD*	Jumlah Debitur *Total Borrowers*	Nominal Penyaluran (Miliar) *Value (Billion)*	
1	*Generic Model Level* 1	4	41.726	Rp1.850,53	*Generic Model Level 1*
2	*Generic Model Level* 2	8	37.053	Rp1.763,94	*Generic Model Level 2*
3	*Generic Model Level* 3	7	1.881	Rp88,54	*Generic Model Level 2*
	Jumlah	**19**	**80.660**	**Rp3.703,01**	***Total***

c. Penyusunan *Generic Model* (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan.

Dalam rangka terciptanya keuangan inklusif di desa, maka diperlukan referensi terkait pengembangan keuangan inklusif di wilayah khususnya yang mendukung keberlangsungan desa dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Untuk mendukung tujuan tersebut, disusunlah GM EKI yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh desa. GM EKI telah di diseminasi kepada 35 Kantor OJK di daerah, selanjutnya dilakukan replikasi berupa *pilot project* di masing-masing wilayah.

***Kick-Off* EKI Nagari Sumpur**

Guna mendukung pelaksanaan *pilot project*, OJK telah melaksanakan *kick-off pilot project* GM EKI di Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

1) **Inkubasi Tahap I**
   Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan inklusif peserta inkubasi melalui pengisian kuesioner oleh 171 perwakilan peserta inkubasi yang hadir dari kelompok UMKM, petani dan nelayan. Selanjutnya, dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi terkait pengenalan Program EKI oleh OJK dan produk/layanan keuangan.
2) **Inkubasi Tahap II**
   Inkubasi Tahap II telah dilaksanakan di Rumah Gadang, Kabupaten Tanah Datar. Inkubasi ini mencakup tiga kegiatan yang diselenggarakan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Perikanan Kab. Tanah Datar. Rincian dari kegiatan dimaksud berupa sosialisasi pembiayaan dan pemberdayaan kepada kelompok wanita melalui program Mekaar oleh PNM, pelatihan pengolahan produk ikan bilih oleh Dinas Pangan Perikanan dan pelatihan pengolahan produk sawo oleh Dinas Pertanian.

c. Preparation of a Generic Model (GM) for the Inclusive Finance Ecosystem (EKI) in Rural Areas

Seeking to create inclusive finance in rural areas, references and benchmarks are required concerning the development of inclusive finance regionally, particularly inclusive finance that supports village sustainability through the involvement of various related parties. To that end, OJK prepared a Generic Model (GM) for the Inclusive Finance Ecosystem, which is expected to respond to the needs and address the challenges faced in rural areas. The general model has been disseminated to 35 OJK Regional offices, for replication through pilot projects in each respective region.

Kick-Off Event in Nagari Sumpur

Supporting the implementation of the pilot project, OJK hosted a kick-off event in Nagari Sumpur village located in the Tanah Datar regency of West Sumatra province. The event was implemented in stages as follows:

1) ***Stage I Incubation***
   This activity aimed to determine the condition of inclusive finance among incubation participants through a questionnaire completed by 171 representatives from MSME, farmer and fisherman groups. This was accompanied by outreach activities to introduce the program by OJK along with financial products and services.
2) ***Stage II Incubation***
   Stage II Incubation took place at a traditional Rumah Gadang in Tanah Datar. Stage II Incubation involves three activities hosted in synergy with Permodalan Nasional Madani (PNM), the Agriculture Department as well as the Food and Fishery Department of Tanah Datar. The activities included socialisation and empowerment activities for women's groups through the Mekaar Program by PNM, training on processing cyprinid fish products by the Food and Fishery Department and training on the management of sapote products by the Agriculture Department.

3) Inkubasi Tahap III

Inkubasi Tahap III telah dilaksanakan di SMPN 1 Batipuh Selatan. Inkubasi ini mencakup empat kegiatan yang diselenggarakan bersinergi dengan PT Pegadaian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanah Datar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat, Kementerian Agama wilayah Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Dinas PMPTSP-Naker Kab. Tanah Datar. Rincian dari kegiatan dimaksud berupa pengenalan produk KUR Syariah dan Investasi Emas oleh PT Pegadaian, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Dinas PMPTSP-Naker, pembuatan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi produk olahan bersertifikasi halal oleh Kementerian Agama wilayah Tanah Datar dan pelatihan pengemasan produk olahan bernilai tinggi oleh Perumda Tuah Sepakat.

4) Inkubasi Tahap IV

Inkubasi tahap IV telah dilaksanakan di SMPN 1 Batipuh Selatan. Inkubasi ini mencakup dua kegiatan dan diselenggarakan bersinergi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Dinas Pariwisata Kab. Tanah Datar. Rincian dari kegiatan dimaksud berupa Pendampingan Persiapan Pembiayaan *Homestay* melalui BUMNag oleh SMF, Sosialisasi terkait Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata.

5) Inkubasi Tahap V

Inkubasi tahap V telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sumpur. Inkubasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Nagari Sumpur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan dihadiri oleh 83 peserta yang terdiri dari UMKM, Petani, serta Nelayan. Dalam tahap ini, disampaikan beberapa materi antara lain perencanaan keuangan bagi UMKM oleh Staf Sub bagian Edukasi dan Pelindungan konsumen OJK Provinsi Sumatera Barat, serta pengenalan sistem pembayaran melalui QRIS dan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) oleh Asisten Direktur Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Perizinan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Asisten Manajer Implementasi Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

6) Inkubasi Tahap VI dan Pasca Inkubasi

Rangkaian pelaksanaan kegiatan inkubasi tahap VI dan pasca inkubasi EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Desember 2023. Kegiatan pasca inkubasi dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023 dalam bentuk pemetaan hasil akhir capaian keuangan inklusif kepada pelajar SMPN 1 Batipuh Selatan.Kegiatan inkubasi tahap VI dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi edukasi keuangan terkait dengan keagenan Laku Pandai, materi terkait Pemasaran Produk melalui *E-commerce* oleh Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) dan materi terkait Waspada Investasi Ilegal oleh perwakilan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh 230 orang yang terdiri dari UMKM, Petani dan Nelayan, serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan.

3) Stage III Incubation

Stage III Incubation was held at Junior High School 1 in South Batipuh, encompassing four activities in synergy with PT Pegadaian, Department of Manufacturing and Trade Cooperatives in Tanah Datar, the Tuah Sepakat Regional Public Company (Perumda), Ministry of Religious Affairs in Tanah Datar, Department of Health in Tanah Datar, and Department of PMPTSP-Naker in Tanah Datar. Stage III Incubation introduced Islamic People's Business Financing (KUR) and gold investment products by PT Pegadaian, issuing Business Identity Numbers (NIB) by the Department of PMPTSP-Naker, issuing SPP-IRT certificates by the Department of Health, socialising halal-certified processed products by the Ministry of Religious Affairs in Tanah Datar and training for packaging high-value processed products by the Tuah Sepakat Regional Public Company (Perumda).

4) Stage IV Incubation

Stage IV Incubation was also held at Junior High School 1 in South Batipuh, encompassing two activities in synergy with Sarana Multi Finance (SMF) and the Tourism Department in Tanah Datar. The activities included mentoring in preparation for homestay financing through state-owned enterprises by SMF and socialisation activities concerning the Management and Development of Tourist Villages by the Department of Tourism.

5) Stage V Incubation

Stage V Incubation took place at Primary School 4 in Sumpur in collaboration with the Bank Indonesia Representative Office in West Sumatra and involving the local government in Tanah Datar, local government in Nagari Sumpur and Bank Rakyat Indonesia (Persero), attended by 83 participants from MSME, farmer and fisherman groups. During Stage V, participants were presented with various materials, including financial planning for MSMEs, from OJK staff in the Consumer Protection Education Department in OJK West Sumatra, and introduced to the QRIS payment system and Financial Information Recording Application Information System (SIAPIK) by the Assistant Director of Payment System Policy Implementation, Supervision and Licensing and Rupiah Currency Management as well as the Assistant Manager of Regional Financial Implementation at the Bank Indonesia Provincial Office in West Sumatra.

6) Stage VI Incubation and Post-Incubation

A series of Stage VI Incubation and Post-Incubation activities took place in Nagari Sumpur, Tanah Datar, West Sumatra, on 4-5th December 2023. The Post-Incubation activities were held on 4th December 2023 by mapping the results of inclusive finance among students at Junior High School 1 in South Batipuh. Meanwhile, the Stage VI Incubation activities included the presentation of financial education materials relating to branchless banking agents, product marketing via e-commerce by the Indonesia e-commerce Association (idEA) as well as material concerning illegal investment by the OJK Representative Office in West Sumatra. In total, 230 participants attended the activities from MSME, farmer and fisherman groups as well as representatives of financial services institutions.

d. *Capacity Building* dan Sertifikasi Anggota TPAKD

Sejalan dengan implementasi *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025 khususnya rencana aksi dari Misi ke-3, yaitu: "Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD", maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* anggota TPAKD terhadap operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka optimalisasi peran TPAKD akan dilaksanakan dalam bentuk *Capacity Building* dan Sertifikasi Anggota TPAKD.

***Capacity Building* TPAKD**

Capacity Building dilakukan untuk memenuhi informasi terkait implementasi TPAKD dalam mendukung pemberdayaan ekonomi daerah serta memberikan arahan strategis terkait TPAKD secara umum serta implementasi program kerja yang selaras dengan tematik program Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan bersinergi dengan Kemendagri yang menjadi salah satu bagian dari "*Webinar Series* Kemendagri". Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta secara *offline* dan 626 peserta secara *online*, baik melalui *zoom webinar* maupun *youtube* sikapiuangmu dan bina keuda. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi kesatu dengan tema "Optimalisasi Peran TPAKD dan Strategi Pelaksanaan Program Tematik TPAKD Tahun 2024" dan sesi kedua dengan tema "Meningkatkan Partisipasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Sektor Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2023

Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan standarisasi kapasitas serta kapabilitas anggota TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD yang sesuai dengan sektor prioritas masing-masing daerah. Kegiatan ini diikuti oleh 120 Peserta dari 109 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta dibagi dalam tiga kelas kecil dengan materi pembelajaran, yaitu:

1) Hari kesatu: Materi terkait produk IKNB, Pelindungan Konsumen OJK dan *vulnerable group* (disabilitas dan perempuan);
2) Hari kedua: Materi sektor pertanian dan peternakan serta UMKM; dan
3) Hari Ketiga: Diskusi kelompok dan penyusunan program kerja TPAKD.

e. *Coaching Clinic* dan *on-site Visit* TPAKD

Kegiatan *coaching clinic, on-site visit* dan pendampingan TPAKD dilaksanakan secara berkala dalam rangka memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, menentukan dan mengimplementasikan program kerja TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat Provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1) *Coaching Clinic* TPAKD di Kabupaten Blora.
2) *On-site visit* TPAKD di Kabupaten Asmat pada dua kelompok UMKM pengerajin yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat.

d. Capacity Building and Certification of TPAKD Members

Consistent with implementation of the TPAKD Roadmap 2021-2025, specifically the action plan of the third mission, namely Strengthening the Capacity of TPAKD Members and Improving TPAKD Performance, certain activities were required to increase the awareness of TPAKD members concerning the operationalisation and implementation of the TPAKD work program. Capacity building and certification activities were implemented to optimise the role of TPAKD members.

Capacity Building TPAKD

Capacity building aims to provide information on TPAKD implementation towards regional economic empowerment, while providing a strategic general direction for the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) and work program implementation in line with the thematic program for 2024. This activity was implemented in synergy with the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia as part of its webinar series. Approximately 200 participants attended the webinar in person, with an additional 626 participants online via Zoom or the Sikapiuangmu and Bina Keuda YouTube channels. The webinar was divided into two sessions: (i) optimising the role of TPAKD and Strategies for Implementing the TPAKD Thematic Program in 2024, and (ii) Increasing the Participation of Vulnerable and Low-Income Groups in the Financial Sector and Regional Economic Development.

Certification of TPAKD Members in 2023

The certification of TPAKD members aims to standardise the competencies of the members in terms of implementing work programs in accordance with the priority sectors in each region. In total, 120 participants from 109 TPAKD teams throughout Indonesia took part in the certification program. The participants were divided into three groups with the following learning materials:

1) Day One: NBFI products, OJK consumer protection and vulnerable groups (people living with disabilities and women),
2) Day Two: Agricultural sector and animal husbandry, as well as micro, small and medium enterprises (MSME), and
3) Day Three: Group discussion and preparing the TPAKD work program.

e. TPAKD Coaching Clinic an On-Site Visit

The TPAKD coaching clinic, on-site visit and mentorship activities are held periodically to provide technical assistance in terms of planning, preparing and implementing the TPAKD work program as well as optimising the role of TPAKD teams at the provincial level to create TPAKD teams at the regency/city administrative level. The following activities were implemented in 2023:

1) TPAKD coaching clinic in Blora Regency.
2) TPAKD on-site visit in Asmat Regency for two handicraft MSME groups under the mentorship of the local Department of Industry, Trade and Cooperatives in Asmat regency.

3) *Coaching Clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan *on-site visit* pada program Kredit Melawan Rentenir yaitu Iyamo Persayai Rentenir (AMAN) yang dilakukan pada pelaku usaha kuliner.
4) *Coaching clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Riau dan *on-site visit* TPAKD Kabupaten Kampar untuk melihat potensi daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah pedesaan.
5) *Coaching clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan *on-site visit* TPAKD Kota Samarinda dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan program Kredit Mikro Bertuah.
6) *Coaching clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Timur dan *on-site visit* TPAKD Provinsi Jawa Timur pada Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra), TPAKD Kabupaten Kediri pada potensi Program Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Petungroto dan TPAKD Kota Malang pada Program OJIR (Ojo Percoyo Karo Rentenir).
7) *Coaching clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan *on-site visit* di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan potensi Klaster Petani Cabai, Klaster Pengrajin Tenun dan Klaster Nelayan. Program kerja yang dapat dilakukan oleh TPAKD adalah Fasilitas Pembiayaan berupa K/PMR, Fasilitas Asuransi berupa AUTS dan AUTP, serta dilakukan pendampingan bagi petani klaster.
8) *Coaching clinic* TPAKD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan *on-site visit* UMKM Batik Yogus dan UMKM Batik Dayak di Kabupaten Bulungan, serta UMKM pengerajin Batik Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Batik "KUBEDISTIK" Kerajinan Ramah Lingkungan di Kota Tarakan. Selain itu, juga dilakukan kunjungan kepada Kelompok Petani Rumput Laut dan UMKM Batik Pakis di Kota Tarakan.

2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/ SimPel iB)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Dalam rangka mendorong implementasi KEJAR, saat ini telah diterbitkan beberapa kebijakan dari Kementerian terkait, yaitu:

a. SE Menteri Agama No. 12/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR;
b. SE Mendikbud Ristek Dikti No. 8/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR; dan
c. 143 Surat Edaran/Surat Keputusan/Nota Kesepahaman dan/atau kebijakan lainnya dari pemerintah daerah.

Rincian kegiatan dalam mendukung program KEJAR adalah sebagai berikut:

3) TPAKD coaching clinic in Southeast Sulawesi and on-site visit to the Lending Against Loansharking program, namely Iyamo Persayai Rentenir (AMAN), implemented by culinary businesses.

4) TPAKD Coaching Clinic in Riau and on-site visit to TPAKD Kampar to observe regional potential as the foundation for implementing the Inclusive Finance Ecosystem in rural areas.

5) TPAKD Coaching Clinic in East Kalimantan and on-site visit to Samarinda TPAKD with the One Student, One Account (KEJAR) program and Microfinance program.
6) TPAKD Coaching Clinic in East Java and on-site visit to East Java Provincial TPAKD with the Prosperous Society Program (Prokesra), Kediri TPAKD for the Inclusive Finance Ecosystem in Petungroto village and Malang TPAKD for the OJIR program (Lending Against Loansharking).

7) TPAKD Coaching Clinic in West Sulawesi and on-site visit to Mamuju, West Sulawesi to observe potential chilli farmer clusters, fabric weaver clusters, and fisherman clusters. The local TPAKD work program facilitates financing in the form of microloans, Beef Cattle Insurance (AUTS) and Rice Farm Insurance (AUTP), as well as coaching for farmer clusters.
8) TPAKD Coaching Clinic in North Kalimantan and on-site visits to Batik Yogus and Batik Daya MSMEs in Bulungan, as well as the KUBEDISTIK batik business group for people with disabilities in Tarakan city. In addition, there were also on-site visits to the Seaweed Farmer Group and Batik Pakis MSME group in Tarakan.

2. One Student, One Account (KEJAR) - Student Savings Accounts (SimPel, SimPel iB)

The One Student, One Account (KEJAR) program is a form of Saving Action by Indonesian Students in accordance with Presidential Decree (Keppres) Number 26 of 2019 concerning Indonesia Savings Day. Several regulations have been promulgated to support KEJAR implementation as follows:

a. Minister of Religious Affairs Circular Letter No. 12 of 2022, dated 18th July 2022, concerning the Acceleration of KEJAR Program Implementation,
b. Minister of Education, Culture, Research and Technology Circular Letter Number 8 of 2022, dated 23rd August 2022, concerning the Acceleration of KEJAR Program Implementation, and
c. 143 circular letters/decrees/memorandums of understanding and/or other policies from the regional government.

A summary of activities to support KEJAR program implementation in 2023 is as follows:

1) Implementasi Program KEJAR

Implementasi Program KEJAR pada saat ini dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh Bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan November 2023, sebanyak 53,87 juta pelajar (85,04%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total *outstanding* simpanan lebih dari Rp30 triliun. Program KEJAR telah diimplementasikan oleh 449 Bank peserta di seluruh Indonesia.

2) Bank Goes to School

Dalam rangka meningkatkan *awareness* bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, berbagai inisiasi telah dilakukan kepada Bank untuk melaksanakan kegiatan *Bank goes to school* sebanyak satu kegiatan dalam satu bulan.

3) Digitalisasi Tabungan Anak (DTA)

Pada 2023, realisasi perkembangan pembukaan rekening DTA sampai dengan triwulan IV-2023 sebanyak 8.592 rekening dengan nominal Rp5,06 miliar. Selain itu, pada 2023 terdapat penambahan Bank yang mengimplementasikan program DTA, yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, sehingga sampai dengan Desember 2023, jumlah Bank peserta DTA tercatat sebanyak empat Bank.

4) Hari Indonesia Menabung

Sebagai salah satu implementasi kegiatan Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2023, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan HIM dengan puncak kegiatan, yaitu penyelenggaraan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) Tahun 2023 dengan tema "Bangun Generasi Indonesia Menabung Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju". Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, berkolaborasi dengan kegiatan Raimuna Nasional XII Tahun 2023 yang diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega usia 16-25 tahun dari seluruh Indonesia dengan jumlah peserta kurang lebih 25.000 orang, serta melibatkan Kementerian/Lembaga dan Industri Perbankan.

Sejak periode Hari Indonesia Menabung Tahun 2022 – 2023, pembukaan rekening pelajar meningkat sebesar 2,6 juta rekening dengan total nominal lebih dari Rp4 triliun. Selama setahun, telah dilakukan sebanyak 51.975 kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar di 9.815 satuan pendidikan yang melibatkan perangkat sekolah, pemerintah daerah dan perbankan. Sementara itu, untuk periode KREASI Bangkit (Juli – Agustus 2023) tercatat pembukaan rekening pelajar sebanyak 653.814 rekening dengan jumlah kegiatan edukasi keuangan dan sosialisasi sebanyak 7.595 kegiatan di 2.724 satuan pendidikan.

1) KEJAR Program Implementation

KEJAR program implementation can use existing segmented Bank savings products for children/students as well as SimPel/ SimPel iB products. As of November 2023, a total of 53.87 million students (85.04%) had a Student Savings Account (SimPel) or children's savings account with more than IDR30 trillion of total outstanding savings. The KEJAR program has been implemented by 449 participating Banks throughout Indonesia.

2) Bank Goes to School

Seeking to raise awareness among students concerning a culture of saving from an early age, various initiatives have been implemented by Banks, including Bank Goes to School activities each month.

3) Digitalisation of Children's Savings Accounts (DTA)

In 2023, the number of DTA accounts opened as of the fourth quarter of 2023 was recorded at 8,592 accounts, with a value of IDR5.06 billion. In addition, another Bank joined the DTA program in 2023, namely Bank Mandiri, bringing the number of participating Banks in December 2023 to four.

4) Indonesia Savings Day

As part of the Indonesia Savings Day (HIM) activities in 2023, a series of HIM activities were arranged, culminating in the KEJAR Achievement and Generation Building Activity (KREASI BANGKIT), entitled Building Indonesia's Saving Generation, Increasing Financial Literacy and Inclusion Towards an Advanced Indonesia (Onward Indonesia). The activities were held on 20th August 2023 at Bumi Perkemahan Pramuka in Cibubur, in collaboration with Raimuna Nasional XII 22023, attended by various Scout movements for children aged 16-25 from all regions of Indonesia, with approximately 25,000 participants and involving the government ministries/agencies and the banking industry.

Since Indonesia Savings Day (HIM) in 2022-2023, students have opened an additional 2.6 million accounts with a value of more than IDR4 trillion. In one year, 51,975 education and socialization activities for students at 9,815 educational units were implemented involving schools, local government and the banking industry. Meanwhile, during the KREASI BANGKIT period from July-August 2023, students opened an additional 653,814 accounts, with 7,595 financial education and socialization activities held at 2,724 educational units.

3. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok usia muda dalam melakukan perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu "SiMuda Rumahku" untuk tujuan pengajuan uang muka rumah, "SiMuda Emasku" untuk pembelian emas, dan "SiMuda Investasiku" untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 terdiri dari SiMuda Eksisting dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana; dan SiMuda Lainnya untuk tujuan investasi lainnya. Sampai dengan triwulan IV-2023, rincian capaian adalah sebagai berikut:

a. SiMuda *Eksisting*

Perkembangan Program SiMuda Eksisting triwulan IV-2023

No	Program SiMuda Eksisting	Perkembangan Program SiMuda Eksisting Desember 2023 *Existing SiMuda Program Developments as of December 2023*		*Existing SiMuda Program Products*
		Jumlah Rekening | *Total Accounts*	Nominal (Rupiah) | *Value (Rupiah)*	
1	InvestasiKu	49	15.656.619	*InvestasiKu*
2	RumahKu	91.185	268.766.758.498	*RumahKu*
3	EmasKu	4	84.507.857	*EmasKu*
Jumlah		**91.238**	**268.866.922.974**	***Total***

Perkembangan Program SiMuda *Eksisting* sampai dengan Desember 2023 tercatat sebanyak 91.238 rekening dan nominal sebesar Rp268.866.922.974,-.

b. SiMuda Lainnya

Perkembangan Program SiMuda Lainnya triwulan IV-2023

No	Program SiMuda Eksisting	Perkembangan Program SiMuda Lainnya Desember 2023 *Other SiMuda Program Developments as of December 2023*		*Other SiMuda Program Products*
		Jumlah Rekening | *Total Accounts*	Nominal (Rupiah) | *Value (Rupiah)*	
1	Investasi	6.462	124.099.462.068	
2	Rumah	0	0	
3	Emas	0	0	
4	Lain-lain	1.181.148	4.471.369.346.818	
Jumlah		**1.187.610**	**4.595.468.808.886**	***Total***

Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan Desember 2023 tercatat sebanyak 1.187.610 rekening dan nominal sebesar Rp4.595.468.808.886,-. Dengan demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan Desember 2023 tercatat sebanyak 1.278.848 rekening dan nominal sebesar Rp4.864.335.731.860,-.

3. *Savings Accounts for University Students and Young People (SiMuda)*

The SiMuda program was first introduced in 2018 as a savings program for the 18-30 demographic, with savings products linked to insurance and/or investment features. A SiMuda generic model was issued to increase the competencies of young people in terms of financial planning. The SiMuda GM had three salient characteristics, namely 'SiMuda Rumahku' to apply for a downpayment on a house, 'SiMuda Emasku' to purchase gold, and 'SiMuda Investasiku' to purchase investment funds. The second generation SiMuda GM consists of the existing SiMuda products to purchase a house, gold and investment funds, as well as other SiMuda products for other investment purposes. As of the fourth quarter of 2023, the key milestones of the SiMuda program were as follows:

a. *Existing SiMuda Products*

Existing SiMuda Program Developments as of Q4/2023

Existing SiMuda program developments as of December 2023 stood at 91,238 accounts with a value of IDR268,866,922,974.

b. *Other SiMuda Products*

Other SiMuda Program Developments as of Quarter 4 2023

Other SiMuda program developments as of December 2023 stood at 1,187,610 accounts with a value of IDR4,595,468,808,886. Overall, therefore, the SiMuda program as of December 2023 recorded 1,278,848 accounts with a value of IDR4,864,335,731,860.

4. Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 mengangkat tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera". Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Mei – Oktober 2023 secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini juga turut melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari Industri Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank, perusahaan *E-Commerce*, Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK, serta seluruh Kantor OJK Daerah. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama BIK 2023, antara lain:

a. Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan;
b. Pembukaan rekening, polis asuransi dan produk keuangan lainnya;
c. Literasi keuangan;
d. Pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan;
e. Kampanye/publikasi program literasi, inklusi keuangan, serta pelindungan konsumen secara masif.

Sebagai rangkaian dari kegiatan BIK 2023, diselenggarakan kegiatan *Business Matching* yang berkolaborasi dengan Kantor OJK Provinsi DIY (KOYK) yang dihadiri 120 peserta. Selain itu, dilaksanakan pameran jasa keuangan atau *FinExpo* selama empat hari di Pakuwon Mall Yogyakarta dengan tema "Go Inklusif, Go Produktif". Kegiatan *FinExpo* 2023 diikuti oleh 100 peserta pameran yang terdiri dari 72 PUJK, 26 UMKM, tiga Lembaga dan tiga *Self-Regulatory Organization*. Kegiatan puncak BIK 2023 diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2023 yang diawali dengan kegiatan "*CEO Lunch Meeting*". Selanjutnya, kegiatan puncak diisi dengan "Sinergi Akselarasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas" dengan menggandeng lima UMKM disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan. Selama periode pelaksanaan BIK Tahun 2023, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 2.851 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.841.357 masyarakat atau naik 15,09% dibanding dengan tahun 2022. Adapun total rekapitulasi capaian akses keuangan selama BIK 2023 mencapai 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan atau naik sebesar 13,34% dari capaian tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Industri Perbankan: pembukaan 2.925.231 rekening baru;
b. Industri Pasar Modal: pembukaan 131.058 rekening efek;
c. Industri Perasuransian: pembukaan 658.484 polis;
d. Industri Pembiayaan: penambahan 543.731 debitur;
e. Industri Pergadaian: pembukaan 3.253.844 rekening; dan
f. Industri *Fintech*: pembukaan 424.370 akun.

5. ASEAN OJK *Seminar on Financial Inclusion*

Sebagai bentuk partisipasi OJK dalam rangka *side event Indonesia's ASEAN Chairmanship* 2023, telah diselenggarakan OJK *Seminar on Financial Inclusion* sebagai *Side Event* Indonesia's ASEAN *Chairmanship* 2023 dengan tema "*Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN*" kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Digital Financial Inclusion Festival (DFIF)-ASEAN *Festival* 2023 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

4. Financial Inclusion Month (BIK)

Financial Inclusion Month (BIK) 2023, entitled "Equitable Access to Finance for a Prosperous Society", ran from May-October 2023 as an integrated, massive and sustainable activity in all regions of Indonesia. In implementation, BIK activities involved relevant government ministries/agencies, industry associations and financial service providers (FSP) from the banking industry, capital market and Non-Bank financial industry as well as e-commerce platforms and work units from OJK head office and all regional offices. BIK activities in 2023 included the following:

a. Business matching for lending/financing,
b. Opening accounts, insurance policies and other financial products,
c. Financial literacy,
d. Marketing of financial products and/or services, and
e. Massive financial literacy, financial inclusion and consumer protection campaigns/publications.

Business Matching was an important part of the BIK activities in 2023 in collaboration with the OJK Office in Yogyakarta, which attracted 120 participants. In addition, FinExpo ran over four days at the Pakuwon Mall in Yogyakarta to market financial services with the theme 'Go Inclusive, Go Productive'. FinExpo attracted 100 exhibitors, consisting of 72 financial service providers (FSP), 26 MSMEs, 3 institutions and 3 self-regulatory organisations (SRO). BIK activities in 2023 culminated on 28th October 2023 with the CEO Lunch Meeting, followed by 'Synergy to Accelerate Financial Inclusion for People Living with Disabilities' in collaboration with five MSMEs associated with people living with disabilities to secure financing. During BIK 2023, a total of 2,851 activities were held with 1,841,357 public visitors, up 15.09% from 2022. In terms of access to finance, BIK 2023 provided access to 7,936,718 financial products and services, increasing 13.34% from 2022 as follows:

a. Banking Industry: Opening of 2,925,231 new accounts,
b. Capital Market Industry: Opening of 131,058 securities accounts,
c. Insurance Industry: Opening of 658,484 policies,
d. Finance Industry: Additional 543,731 borrowers,
e. Pawnbroker Industry: Opening of 3,253,844 accounts, and
f. FinTech Industry: Opening of 424,370 accounts.

5. ASEAN OJK Seminar on Financial Inclusion

As part of OJK's participation in the side events of Indonesia's ASEAN Chairmanship in 2023, OJK hosted the Seminar on Financial Inclusion, entitled 'Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Communities of ASEAN'. This activity was part of the Digital Financial Inclusion Festival (DFIF) – ASEAN Festival 2023 hosted by Bank Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan mendorong kualitas inklusi keuangan melalui peningkatan program literasi keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidak rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.

Beberapa *key messages* dari kegiatan seminar dimaksud, antara lain:
a. Diperlukan komitmen, kolaborasi dan sinergi dari semua *stakeholders* dalam rangka mengurangi kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan pedesaan;
b. Digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan;
c. Pentingnya kebijakan dan strategi pengembangan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan; dan
d. Peningkatan inklusi keuangan bukan hanya sebuah angka kenaikan, melainkan harus dipastikan adanya peningkatan kualitas masyarakat melalui pemanfaatan/penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

At the event, the Chairman of the OJK Board of Commissioners pledged OJK's commitment to increase financial literacy and inclusion by improving the quality of financial inclusion through additional financial literacy programs. This is expected to increase public capacity and reduce vulnerability to various illegal activities in the financial services sector.

The key messages of the Seminar on Financial Inclusion were as follows:
a. Commitment, collaboration and synergy among all stakeholders are required to bridge financial literacy and inclusion gaps between rural and urban areas,
b. Digitalisation is an important factor in accelerating financial inclusion in rural areas,
c. The importance of policies and strategies to develop the financial inclusion ecosystem in rural areas, and
d. Increasing financial inclusion is not just about raising numbers but also ameliorating the quality of the community through the use of financial products and services.

6. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI)

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI), OJK sebagai Wakil Ketua Tim Gernas BBI diminta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong terbangunnya ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis kredit di sektor hulu ke hilir, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani, kebutuhan mesin, hingga pemasaran. Pada 2023, sesuai dengan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Gernas BBI diperluas cakupannya dengan mengaktifkan Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Sesuai keputusan Kemenko Marves, OJK dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Kemeninves) ditunjuk sebagai *co-campaign manager* dari penyelenggaraan Gernas BBI-BBWI di Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan bertindak sebagai *campaign manager*. Dukungan yang diharapkan oleh Kemenko Marves terhadap OJK adalah untuk dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam memperkuat ekosistem UMKM dengan penyediaan akses pembiayaan yang inklusif.

Rincian Kegiatan BBI-BBWI yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau:
a. Pelatihan *Onboarding* dan Digitalisasi UMKM Juara Provinsi Riau.
   1) Sesi 1, pelatihan *Onboarding* dan Digitalisasi UMKM Gernas BBI-BBWI Provinsi Riau secara *hybrid* di Kantor OJK Provinsi Riau yang dihadiri 186 UMKM peserta *offline* dan 237 UMKM peserta *online*. Kepala Kantor OJK Provinsi Riau menyampaikan bahwa terdapat 635 Pelaku UMKM yang telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan pelatihan dengan materi *Onboarding* dan Digitalisasi UMKM Juara Provinsi Riau.

6. Proud of Indonesian Products Movement (GBBI) Indonesia Proud of Travelling Movement (BBWI)

In accordance with Presidential Decree Number 15 of 2021 concerning the establishment of the Team for the Proud of Indonesian Products Movement (GBBI), OJK, as Team Chairman, was tasked with actively participating in the creation of a regional MSME ecosystem by providing access to credit-based financing in upstream and downstream sectors, beginning with People's Business Loans (KUR) for farmers, demand for machinery to marketing. In 2023, the scope of the Proud of Indonesian Products Movement (GBBI) was expanded by activating the Indonesia Proud of Travelling Movement (BBWI) in line with the programs run by the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs.

In accordance with the Decree issued by the Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, OJK and the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) were appointed as co-campaign managers for the BBI-BBWI movements in Riau, with the Provincial Government of Riau appointed campaign manager. The support expected from the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs for OJK is to collaborate with the Provincial Government of Riau to strengthen the MSME ecosystem by providing access to inclusive finance.

Summary of BBI-BBWI Activities in Riau Province:
a. Digitalisation and Onboarding of MSME Champions in Riau
   1) Session 1: Hybrid digitalisation and onboarding training for MSMEs in Riau as part of the BBI-BBWI movements in the OJK Provincial Office in Riau, attended by 186 MSMEs in person and 237 MSMEs online. The Head of the OJK Provincial Office in Riau confirmed that 635 MSMEs were registered to participate in the Digitalisation and Onboarding of MSME Champions in Riau.

2) Sesi 2, pelatihan secara *online* dengan materi Teknik Foto Produk Yang Menarik Pelanggan dan dihadiri oleh 161 UMKM.
3) Sesi 3, pelatihan dengan materi Tips Membuat *Packaging* Produk Yang Menarik.
4) Sesi 4, pelatihan secara *online* dengan materi "Strategi Digital *Marketing* untuk UMKM" dan dihadiri oleh 153 UMKM.
5) Sesi 5, pelatihan secara *online* dengan materi "Jualan Laris Manis dengan Whatsapp *Marketing*" dan dihadiri oleh 151 UMKM.
6) Sesi 6, pelatihan secara *online* dengan materi "Aktivasi dan Optimasi Google Business Profil" dan dihadiri oleh 132 UMKM.
7) Sesi 7 dan 8, pelatihan secara *offline* dengan materi "Dongkrak Penjualan dengan Instagram *Marketing*" dan "Teknik Jitu Promosi di Facebook", serta pendampingan secara *one on one* bagi 40 besar UMKM dalam melakukan pemasaran secara *online*.

b. Bazar Ramadhan di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru.
c. *Business Matching* bagi UMKM di Kantor OJK Provinsi Riau dan dihadiri oleh 140 UMKM.

2) Session 2: Online training for product photography techniques to attract customers, attended by 161 MSMEs.
3) Session 3: Training and tips on creating exciting product packaging.
4) Session 4: Online training to develop Digital Marketing Strategies for MSMEs, attended by 153 MSMEs.
5) Session 5: Online training for Better Sales via WhatsApp marketing, attended by 151 MSMEs.
6) Session 6: Online training to activate and optimise business profiles on Google, attended by 132 MSMEs.
7) Session 7 and 8: Offline Training to Increase Sales via Instagram Marketing and Promotional Techniques on Facebook, combined with one-on-one coaching 40 large MSMEs with online marketing.

b. Ramadan Bazaar at An-Nur Pekanbaru Grand Mosque.
c. Business matching for MSMEs at the OJK provincial office in Rio, attended by 140 MSMEs.

IV.7.3. Literasi dan Edukasi Keuangan
Financial Literacy and Education

1. Program Literasi dan Edukasi Keuangan

Sepanjang 2023, OJK telah menyelenggarakan sebanyak 3.104 program edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang menjangkau 2.571.108 peserta, terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop, training of community, training of facilitator dan training of trainers*. Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah, dengan rincian 2.282 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 527.673 peserta, 232 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 56.713 peserta, serta 590 kegiatan edukasi keuangan gabungan antara konvensional dan syariah yang menjangkau 1.986.722 peserta. Kegiatan tersebut menyasar kepada perempuan, UMKM, pelajar/mahasiswa, guru, komunitas, penyandang disabilitas, karyawan, masyarakat terdepan, terluar dan tertinggal (3T), serta kegiatan lainnya dalam bentuk *talkshow* radio, pameran/*expo* dan kontes keuangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan "OJK Mengajar" dalam rangka HUT Ke-12 OJK, Investasi Masa Kini, Sejahtera Masa Depan

Kegiatan OJK mengajar merupakan salah satu rangkaian kegiatan edukasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun OJK ke-12. Penyelenggaraan kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda mengenai pentingnya merencanakan keuangan sejak dini sehingga dapat mempersiapkan masa depan agar lebih sejahtera. Kegiatan OJK mengajar dilaksanakan di Universitas Al Azhar Indonesia dan dihadiri oleh 515 mahasiswa secara *offline* dan lebih dari 1.000 peserta turut hadir secara *online* melalui *Zoom Webinar*.

1. Financial Literacy and Education Program

In 2023, OJK ran 3,104 educational programs to increase financial literacy, reaching 2,571,108 members of the public, including socialisation activities, workshops, Training of Communities (ToC), Training of Facilitators (ToF) and Training of Trainers (ToT). Financial education activities were grouped into three categories, namely conventional, Islamic and a combination of conventional and Islamic, consisting of 2,282 conventional financial education activities with 527,673 participants, 232 Islamic financial education activities with 56,713 participants, as well as 590 combined conventional and Islamic financial education activities with 1,986,722 participants. Through its financial literacy and education programs, OJK targeted women, MSMEs, students, teachers, communities, people living with disabilities, employees, as well as communities in disadvantaged, frontier and outermost (3T) regions. OJK also provided other activities in the form of radio talk shows, exhibitions and financial contests are follows:

a. OJK Mengajar or OJK Teaching to Commemorate OJK's 12th Anniversary, Modern Investment and Future Prosperity

OJK Mengajar was one of the series of educational activities to commemorate OJK's 12th anniversary. The activities aimed to provide greater understanding for the younger generation regarding the importance of financial planning from an early age in preparation for a more prosperous future. OJK Mengajar activities were implemented at Al Azhar University Indonesia, with 515 students in attendance and more than 1,000 participants attending online via Zoom Webinar.

b. Kegiatan Edukasi Tematik

Sepanjang 2023, OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi tematik, antara lain:

1) Kampanye Ayo Menabung dan Edukasi Keuangan Pelajar Kota Singkawang di Kantor Wali Kota Singkawang secara tatap muka dan dihadiri oleh 350 peserta.
2) *Webinar* Edukasi Keuangan bertema "Diaspora Cakap Keuangan, Diaspora Sejahtera" secara *online* dan dihadiri oleh 871 peserta.
3) Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tatap muka di Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia dan dihadiri oleh 112 peserta.
4) Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta di Aula Serbaguna Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Salemba dan dihadiri oleh 862 peserta.
5) *Podcast* "Merdeka Belajar, Merdeka Finansial" dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 yang menjangkau 893 peserta.
6) Edukasi Keuangan bagi Karyawan PT ISS dalam rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tangerang Selatan secara *hybrid* dan dihadiri oleh 907 peserta.
7) Edukasi Keuangan bagi petani di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional secara tatap muka di Gedung Wulandari Kepahiang dan dihadiri oleh 314 peserta.
8) Edukasi Keuangan dalam rangka peringatan Hari Indonesia Menabung dan Jambore Raimuna Tahun 2023 dengan rangkaian kegiatan, antara lain Program Magang Bangkit di Kantor OJK, Pos Edukasi Keuangan *Youth Development Town* (YDT), Malam Puncak KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) dan dihadiri oleh kurang lebih 25.000 anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega usia 16-25 tahun dari seluruh Indonesia.
9) Edukasi Keuangan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional kepada Guru dan UMKM di Kabupaten Blora secara *hybrid* dan dihadiri oleh 1.333 peserta.
10) Edukasi Keuangan dalam rangka memperingati Hari Ibu di Kabupaten Banyumas secara *hybrid* dan dihadiri oleh 1.369 peserta yang terdiri dari Ibu-ibu pengurus/anggota PKK, Ibu Rumah Tangga dan pelaku UMKM.

c. Kegiatan Edukasi Keuangan di Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)

OJK telah melaksanakan Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara secara tatap muka di Morotai Islamic Center yang dihadiri oleh 306 peserta.

d. *Pilot Project* Desaku Cakap Keuangan

Desaku Cakap Keuangan adalah program peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (*Training of Trainers* - ToT) bagi perangkat desa. OJK telah melaksanakan dua kegiatan Desaku Cakap Keuangan di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Tanah Datar yang menjangkau sebanyak 522 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Ketua PKK dan Anggota PKK.

b. Thematic Educational Activities

In 2023, OJK implemented the following thematic educational activities:

1) *Ayo Menabung (Let's Save) Campaign and Financial Education for Students in Singkawang at the mayor's office in Singkawang, with 350 participants attending in person.*
2) *Online Financial Education Webinar, entitled Financially Capable Diaspora, Prosperous Diaspora, attended by 871 online participants.*
3) *Financial Education for Indonesian Migrant Workers (PMI) at the Consulate of the Republic of Indonesia in Tawau, Malaysia, with 112 participants attending in person.*
4) *Financial Education for People Living with Disabilities in Jakarta in the main hall of the National Library of the Republic of Indonesia, with 862 participants attending in person.*
5) *Merdeka Belajar, Merdeka Finansial (Independent Learning for Financial Freedom) podcast on National Education Day 2023, reaching an audience of 893.*
6) *Hybrid Financial Education for Employees of PT ISS to commemorate the Anniversary of the Republic of Indonesia in South Tangerang, reaching 907 participants.*
7) *Financial Education for Farmers in Kepahiang Regency to commemorate National Farmers Day, with 314 participants attending in person at the Wulandari Building in Kepahiang.*
8) *Financial Education to commemorate National Savings Day and the Raimuna Jamboree 2023 with a series of activities, including the Bangkit Internship Program at OJK offices, Youth Development Town (YDT) financial education, and KREASI BANGKIT evening, attended by approximately 25,000 scouts aged 16-25 from throughout Indonesia.*
9) *Hybrid Financial Education to Commemorate National Teachers Day targeting teachers and MSMEs in Blora Regency, attended by 1,333 participants.*
10) *Hybrid Financial Education to commemorate Mother's Day in Banyumas Regency, attended by 1,369 participants, including members/management of the Prosperous Family Empowerment (PKK) organisation, housewives and MSMEs.*

c. Financial Education in Disadvantaged, Frontier and Outermost (3T) Regions

OJK also implemented financial education activities for communities in disadvantaged, frontier and outermost (3T) regions, specifically on Morotai Island in North Maluku at the Islamic Centre, with 306 participants attending in person.

d. 'My Financially Capable Village' Pilot Project

My Financially Capable Village is an educational program to increase public understanding in rural areas of conventional and Islamic financial institutions, products and services through the training of trainers (ToT), targeting village officials. OJK has run the pilot project in two regencies, namely Morotai Island and Tanah Datar, reaching 522 participants consisting of village heads, village secretaries, heads of village financial affairs, as well as members/management of the Prosperous Family Empowerment (PKK) organisation.

e. *Talkshow* Radio

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan melalui media komunikasi massa, OJK telah dilaksanakan sebanyak tujuh kegiatan edukasi keuangan melalui *talkshow* radio bagi masyarakat yang menjangkau wilayah Kota Jakarta Utara, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bondowoso, Kota Jakarta Selatan, Padang, Bekasi dan Makassar dengan jangkauan pendengar radio sebanyak 124.453 peserta.

f. Gebyar Safari Ramadhan

Gebyar Safari Ramadhan diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1444 H dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut:

a. Tiga Kegiatan Webinar Edukasi Keuangan Syariah yang menjangkau sebanyak 5.204 peserta yang terdiri dari mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dan masyarakat umum.
b. Empat Kontes Keuangan Syariah, yaitu Kompetisi Caption Reels, Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan, Kompetisi pengguna baru akun LMS Edukasi Keuangan, Video Pendek Promosi Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan Video Pendek PUJK Syariah - Edukasi Literasi Keuangan Syariah

Selain itu, sebagai puncak pelaksanaan GSR 1443 H diselenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertajuk Gebyar Ramadhan Nusantara secara serentak oleh 35 KR/KOJK di seluruh Indonesia. Terdapat 24 kegiatan, yang terdiri dari Edukasi Keuangan, Perlombaan, Sosialisasi, Talkshow dan Webinar dengan total peserta sebanyak 3.368.690 peserta.

g. Kampanye *World Investor Week* (WIW)

JK merupakan salah satu anggota International Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8) yang merupakan komite edukasi dan literasi keuangan bagi investor ritel. IOSCO C8 memiliki berbagai program, salah satunya World Investor Week (WIW). OJK turut berpartisipasi dalam kampanye WIW Tahun 2023 yang bekerja sama dengan KR/KOJK, Satuan Kerja OJK terkait dan *stakeholders*. Terdapat 102 kegiatan yang menjangkau 23.401 peserta yang terdiri dari 91 kegiatan edukasi pasar modal, enam *live Instagram* dan lima *talkshow* radio. Selain itu, terdapat program Kejar Poin LMS Edukasi Keuangan, edukasi melalui media sosial dan *minisite* sikapiuangmu yang bekerja sama dengan Pasar Modal Syariah, Kontak OJK 157, Bursa Efek Indonesia dan Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (SIPF).

h. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT)

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan rangkaian kegiatan *Webinar* Edukasi Pasar Keuangan dengan *tagline* Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*LIKE IT*). *Series* #2 dengan tema "UMKM Maju, Investasi Tumbuh" telah diselenggarakan secara *hybrid* di Gedung DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri oleh 3.295 peserta.

e. *Radio Talk Shows*

As part of the effort to enhance financial literacy through mass communication media, OJK has conducted seven financial education activities through radio talk shows, reaching communities in North Jakarta, Ciamis Regency, Bondowoso Regency, South Jakarta, Padang, Bekasi, and Makassar, with a total radio audience of 124,453 participants.

f. *Gebyar Safari Ramadan (GSR) or Ramadan Safari Festival*

Gebyar Safari Ramadhan was organized to enliven the Holy Month of Ramadan 1444 H with a series of activities as follows:

a. Three Sharia Financial Education Webinars that reached 5,204 participants, including students, employees, housewives, and the general public.
b. Four Sharia Financial Contests, namely the Caption Reels Competition, Learning Management System (LMS) Financial Education Competition, New User LMS Financial Education Account Competition, Short Video Promotion of Learning Management System (LMS) Financial Education, and Short Video of Sharia Financial Service Providers (PUJK) - Sharia Financial Literacy Education.

Additionally, as the peak event of GSR 1443 H, a sharia financial education activity titled Gebyar Ramadhan Nusantara was held simultaneously by 35 KR/KOJK across Indonesia. There were 24 activities, including Financial Education, Competitions, Socialization, Talk Shows, and Webinars, with a total of 3,368,690 participants.

g. *World Investor Week (WIW) Campaign*

OJK is a member of the International Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8), which is a committee for financial education and literacy for retail investors. IOSCO C8 has various programs, one of which is World Investor Week (WIW). OJK participated in the WIW campaign in 2023 in conjunction with OJK offices and regional offices, relevant OJK work units and other stakeholders. In total, 102 activities reached 23,401 participants, consisting of 91 capital market educational activities, six Instagram live activities and five radio talk shows. In addition, OJK also implemented the LMS Financial Education Competition as well as education through social media and the Sikapiuangmu mini-site in conjunction with the Islamic capital market, OJK Contact 157, Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF).

h. *Indonesia's Leading Financial Literacy (Like It)*

The Coordination Forum for Development Financing through Financial Markets (FKPPPK), which consists of OJK, Bank Indonesia (BI), the Ministry of Finance (MoF) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), has implemented a series of financial market education webinars with the LIKE IT tagline. Series #2, entitled Advanced MSMEs, Investment Growth, was implemented as a hybrid webinar at the DPM-PTSP building in West Kalimantan, attended by 3,295 participants.

2. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI)

Hingga akhir 2023, terdapat 1.469 PUJK atau 63,21% dari total 2.324 PUJK wajib lapor yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan literasi keuangan Tahun 2023, sementara 855 PUJK atau 36,79% belum melaporkan. Selanjutnya, pada laporan rencana yang akan dilakukan pada 2023, sebanyak 1.538 PUJK (66,18%) telah menyampaikan laporan, 605 PUJK (26,03%) terlambat menyampaikan laporan, serta 181 PUJK (7,79%) belum menyampaikan laporan rencana literasi keuangan tahun 2023.

2. Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI)

By the end of 2023, a total of 1,469 financial service providers (FSP), accounting for 63.21% of the total PSPs with reporting obligations, had submitted their financial literacy implementation reports for 2023, with 855 FSP, or 36.79%, failing to report. In terms of financial education planning report for 2023, a total of 1,538 FSPs (66.18%) submitted, 605 FSP (26.03%) submitted late, and 181 FSP (7.79%) failed to submit a financial education planning report for 2023.

Grafik 4.4. Laporan Realisasi Literasi 2023
Graph 4.4. Literacy Realisation Report 2023

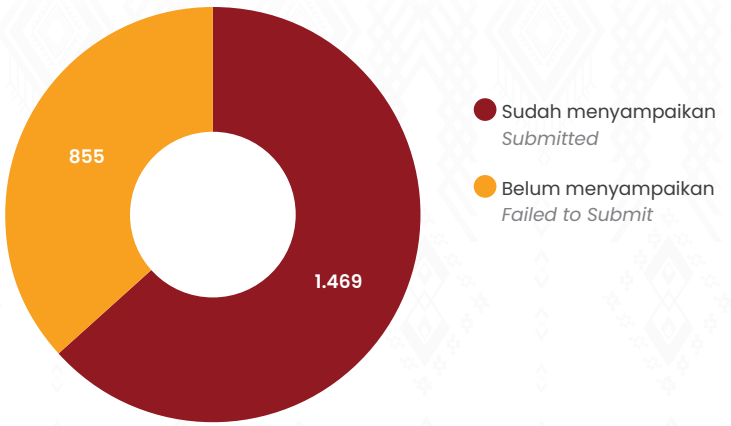

Grafik 4.5. Laporan Rencana Literasi 2023
Graph 4.5. Literacy Planning Report 2023

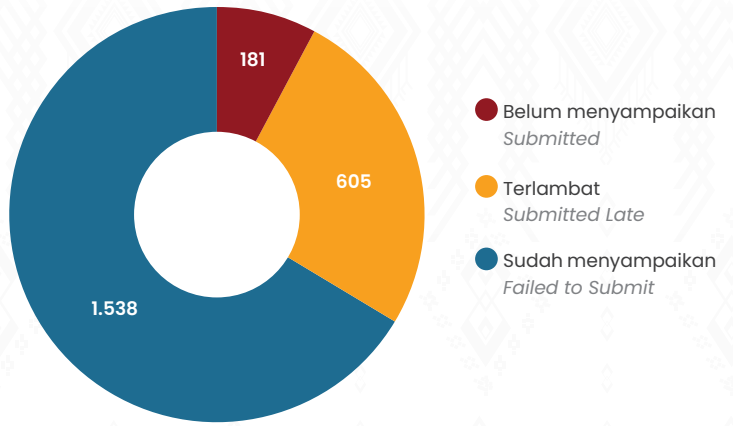

Sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, maka pelaporan realisasi dan rencana literasi keuangan dilakukan melalui LaporanLIK@ojk.go.id.

In accordance with OJK Regulation (POJK) Number 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, reporting the realization and planning for financial literacy are done via LaporanLIK@ojk.go.id.

3. Intensifikasi Penggunaan *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU)

Sepanjang 2023, LMSKU telah memiliki 40.118 pengguna dengan akses terhadap modul sebanyak 48.934 akses dan telah menerbitkan 39.291 sertifikat kelulusan. Dalam rangka intensifikasi penggunaan LMS Edukasi Keuangan (LMSKU), sepanjang 2023 OJK telah melaksanakan kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy), di antaranya:

3. Learning Management System Financial Education (LMSKU) Intensification Program

In 2023, the Financial Education Module of the Learning Management System had 40,118 users, with the modules accessed 48,934 times and 39,291 graduation certificates were issued. Seeking to intensify the use of LMSKU, OJK in 2023 hosted a number of smart chats about finance (Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk - Ngopi Kuy) as follows:

No	Nama Kampus	Jumlah Peserta *Total Participants*	Jumlah Pengunjung Booth *Total Booth Visitors*	Jumlah Penambahan Pengguna LMSKU *Number of Additional LMSKU Users*	*Campus*
Kota Padang | *Padang City*					
1	Universitas Andalas	883	398	2.393	*Andalas University*
2	Universitas Negeri Padang	850	410		*Universitas Negeri Padang*
	Jumlah	**1.733**	**808**	**2.393**	**Total**
Kota Jayapura | *Jayapura City*					
1	Universitas Cenderawasih	749	275	2.403	*Universitas Cenderawasih*
2	Universitas Yapis Papua	536	245		*Yapis Papua University*
	Jumlah	**1.285**	**520**	**2.403**	**Total**

No	Nama Kampus	Jumlah Peserta *Total Participants*	Jumlah Pengunjung Booth *Total Booth Visitors*	Jumlah Penambahan Pengguna LMSKU *Number of Additional LMSKU Users*	*Campus*
	**Kota Malang	*Malang City***			
1	Universitas Brawijaya	874	375	2.481	*Brawijaya University*
2	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	1.187	365		*Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University*
	Jumlah	**2.061**	**730**	**2.481**	**Total**
	**Kota Makassar	*Makassar City***			
1	Universitas Muhammadiyah Makassar	1.146	304	898	*Muhammadiyah Makassar University*
	Jumlah	**1.146**	**304**	**898**	**Total**

4. Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Jumlah konten artikel dan pengunjung/*views* periode Januari – Desember 2023, adalah sebagai berikut:

4. *Information Dissemination through Social/Digital Media*

OJK continuously provides financial education through digital media, namely the Sikapiuangmu mini-site and social media channels, to complement other online and offline financial education activities. From January-December 2023, OJK published numerous articles as content which attracted many views as follows:

No	Bulan	Jumlah Artikel | *Total Articles*	Total Pengunjung | *Total Views*	*Month*
1	Januari	5	20.546	*January*
2	Februari	3	7.783	*February*
3	Maret	5	8.950	*March*
4	Apri	3	9.034	*April*
5	Mei	3	14.490	*May*
6	Juni	3	5.677	*June*
7	Juli	4	10.102	*July*
8	Agustus	4	10.316	*August*
9	September	3	5.686	*September*
10	Oktober	3	10.268	*October*
11	November	5	12.826	*November*
12	Desember	3	5.886	*December*
	Jumlah	**44**	**121.564**	***Total***

Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan *engagement* (interaksi jumlah *followers, likes* dan *views*), dengan rincian sebagai berikut:

Meanwhile, OJK also published non-article content packaged with lighter material to increase engagement (interaction between total followers, likes and views) as follows:

No	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel *Total Non-Article Content*	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel | *Total Views of Non-Article Content*					Total *Total*	*Month*
1	Januari	28	21.325	120.967	64.335	4.109	5.508	216.244	*January*
2	Februari	29	19.596	92.814	46.994	3.413	4.298	167.115	*February*
3	Maret	36	17.639	112.927	44.302	4.825	4.712	184.405	*March*
4	April	25	23.599	76.293	32.331	6.991	3.974	143.188	*April*
5	Mei	38	28.833	96.478	45.777	4.120	2.172	177.380	*May*

No	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel *Total Non-Article Content*	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel | *Total Views of Non-Article Content*					Total *Total*	*Month*
			f	◎	𝕏	♪	▶		
6	Juni	35	38.730	68.053	37.781	3.103	1.017	148.684	*June*
7	Juli	32	19.037	64.174	38.227	3.368	894	125.700	*July*
8	Agustus	35	24.192	66.456	30.021	2.407	727	123.803	*August*
9	September	32	33.660	67.232	42.136	2.794	1.641	147.463	*September*
10	Oktober	38	38.100	84.603	40.544	4.093	1.290	168.630	*October*
11	November	29	32.135	71.634	43.354	3.486	1.085	151.694	*November*
12	Desember	29	36.173	52.154	34.560	4.097	608	127.592	*December*
	Jumlah	**386**	**333.019**	**973.785**	**500.362**	**46.806**	**27.926**	**1.881.898**	***Total***

5. Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK *Edutainment*)

Pada 2023, OJK melaksanakan 76 kegiatan yang memanfaatkan kendaraan SiMOLEK *Edutainment* bekerja sama dengan PUJK, di antaranya Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Indonesia " Anak Muda Cerdas Berinvestasi" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, KLINIK LIMAS-SiMolek *Edutainment*: *Talkshow* Keuangan, wisata kuliner, perlombaan "Pasar Bedug Ramadhan Seguntang" di halaman museum Siguntang Bukit Besar Palembang, dan SiMolek *Goes to School* bersama Bank BTN: SD dan SMP Insan Mandiri Kota Bandar Lampung.

5. Financial Education and Literacy Cars (SiMOLEK Edutainment)

In 2023, OJK implemented 76 activities using the SiMOLEK Edutainment vehicles in conjunction with financial service providers (FSP), including Indonesia Capital Market Education and Socialisation 'Youth Smart Investment' at the Faculty of Economics and Business at Cenderawasih Jayapura University, KLINIK LIMAS-SiMOLEK Edutainment: Financial Talk Show, culinary tours, 'Bedug Ramadhan Seguntang Market' at the Siguntang Bukit Besar Palembang Museum, and SiMOLEK Goes to School in conjunction with Bank BTN: Primary and Secondary School Students in Bandar Lampung.

IV.7.4. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Islamic Financial Literacy and Inclusion

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah, yakni 9.14% dan 12,12%. Untuk itu, OJK merumuskan strategi percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional secara masif dan merata dengan mengoptimalkan aliansi strategis dan *monitoring* kegiatan literasi dan inklusi keuangan, serta mengedepankan pengembangan dan penguatan Infrastruktur edukasi, inklusi keuangan dan komunikasi publik.

Based on the National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) in 2022, the National Islamic Financial Literacy and Inclusion Indexes are considered low at 9.14% and 12.12% respectively. OJK designed a massive strategy, therefore, to accelerate equitable financial literacy and inclusion nationally by optimising strategic alliances as well as monitoring financial literacy and inclusion activities, while prioritising the development and strengthening of education infrastructure, financial inclusion and public communication.

Sepanjang 2023, OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebanyak 3.104 kegiatan yang menjangkau 2.571.108 peserta dengan edukasi keuangan syariah sebanyak 822 (26,5%). Selain itu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebanyak 9.217 kegiatan, di mana sebanyak 1.398 (15,2%) di antaranya adalah kegiatan edukasi keuangan syariah.

In 2023, OJK implemented 3,104 financial education activities, reaching 2,571,108 participants, with 822 Islamic financial education activities (26.5%). In addition, financial service providers (FSP) also provided 9,217 financial education activities, of which 1,398 (15.2%) were Islamic financial education activities.

"Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah telah termaktub dalam Pilar 1 Literasi dan Inklusi Keuangan Peta Jalan PEPK 2023 - 2027. Pilar tersebut kemudian dijabarkan menjadi empat program kerja utama dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional, yakni: 1) Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi Keuangan Syariah; 2) Pengembangan Produk Keuangan Syariah dan Akses

Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion has been included in Pillar 1 of Financial Literacy and Inclusion of the PEPK Roadmap 2023 - 2027. This pillar is then translated into four main work programs in order to increase the national Sharia financial literacy and inclusion index, namely: 1) Acceleration and Collaboration Sharia Financial Education Program; 2) Development of Sharia Financial Products and Access to Sharia

Keuangan Syariah; 3) Penguatan Infrastruktur Literasi dan Inklusi; dan 4) Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi, Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/Lembaga *Stakeholders*. Sejalan dengan empat program utama dimaksud, upaya OJK dalam mendorong pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah sepanjang 2023, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah melalui Gebyar Safari Ramadhan 2023 (1444 Hijriah)

Gebyar Safari Ramadhan diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1444 H dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut:

a. Tiga Kegiatan *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah yang menjangkau sebanyak 5.204 peserta yang terdiri dari mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dan masyarakat umum.
b. Empat Kontes Keuangan Syariah, yaitu Kompetisi *Caption Reels, Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan, Kompetisi pengguna baru akun LMS Edukasi Keuangan, Video Pendek Promosi *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan dan Video Pendek PUJK Syariah - Edukasi Literasi Keuangan Syariah

Selain itu, sebagai puncak pelaksanaan GSR 1443 H diselenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertajuk Gebyar Ramadhan Nusantara secara serentak oleh seluruh Kantor OJK di daerah.

2. Indonesia *Sharia Financial Olympiad* (ISFO) Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, OJK kembali menggelar kegiatan Indonesia *Sharia Financial Olympiad* (ISFO) 2023. Kegiatan ini diselenggarakan berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) syariah. Sebelumnya, penyisihan dilakukan di seluruh Kantor OJK secara *online* dengan perwakilan 34 SMA di masing-masing wilayah Kantor OJK dan 75 Perguruan Tinggi yang diseleksi secara terbuka.

Babak Final ISFO 2023 diadakan di Jakarta dan terdiri dari kompetisi pengetahuan keuangan syariah dan industri jasa keuangan, serta lomba suporter finalis SMA dengan tagline "*Be Ready, Be Smart, Be a Winner!*" dengan total peserta 2.311 *viewers Youtube* OJK Indonesia dan 497 peserta secara luring di Jakarta Dalam babak final, ditetapkan sebagai pemenang kategori SMA, yakni MAN Insan Cendikia Batam, SMAN 1 Bantul dan MAN 2 Kota Malang. Sedangkan tingkat Perguruan Tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Padang, serta untuk kategori *supporter* terbaik jatuh kepada SMAN 1 Bantul, MAN Insan Cendikia Kota Batam dan MAN 2 Kota Malang.

3. Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) untuk UMKM Santri

Dalam rangka mendukung *Road to* Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Santri Nasional pada bulan Oktober 2023, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) bagi UMKM Santri. Kegiatan diawali dengan sesi edukasi dan literasi keuangan syariah yang disampaikan oleh

Finance; 3) Strengthening Literacy and Inclusion Infrastructure; and 4) Support and Strategic Alliance for Literacy, Sharia Financial Inclusion with Stakeholder Ministries/Institutions. In line with the four main programs referred to, OJK's efforts to encourage the growth of sharia financial literacy and inclusion throughout 2023 are as follows:

1. National Sharia Financial Literacy Campaign through the Gebyar Safari Ramadan (GSR) or Ramadan Safari Festival (1444 Hijriah)

The Ramadan Safari Festival was organised to celebrate the holy fasting month of Ramadan 1444 H, featuring a series of activities as follows:

a. Three Islamic financial education webinars, reaching 5,204 participants, including students, employees, housewives and the public.
b. Four Islamic finance contests, namely the Caption Reels Competition, Learning Management System (LMS) Financial Education, Competition for New Users of LMS Financial Education, Short Video Competition to Promote Learning Management System (LMS) Financial Education and Short Video Competition on Islamic Financial Service Providers (FSP) - Islamic Financial Education and Literacy.

In addition, OJK hosted Islamic financial education activities as the culmination of the GSR celebration simultaneously at all regional offices.

2. Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2023

Seeking to improve public financial literacy and inclusion at the high school and university levels, OJK again hosted the Indonesia Sharia financial Olympiad (IFSO) in 2023 in collaboration with the Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) and Sharia financial services institutions. Previously, the online selection process was undertaken by all OJK offices with representatives from 34 high schools from each region and 35 universities through open selection.

The final of ISFO 2023 was held in Jakarta, featuring a competition to test knowledge of Islamic finance and the financial services industry as well as a competition for high school finalists with the tagline, Be Ready, Be Smart, Be A Winner! This attracted 2,311 viewers to OJK's YouTube channel as well as 497 offline participants in Jakarta. In the final, MAN Insan Cendikia Batam, SMAN 1 Bantul and MAN 2 Malang emerged as the winning high schools, with the University of Indonesia, Gadjah Mada University and Padang State University winning the university category, along with SMAN 1 Bantul, MAN Insan Cendikia Kota Batam and MAN 2 Malang is the best supporter.

3. Access to Islamic Finance Business Matching and Education Forum (FEBIS) for MSMEs Owned by Santri (Pesantren Students)

Supporting the Road to the Financial Inclusion Summit and National Santri Day in October 2023, OJK hosted the Access to Islamic Finance Business Matching and Education Forum (FEBIS) for MSMEs owned by santri (students of Islamic boarding schools, or pesantren). The activities began with a session on Islamic financial education and literacy delivered

Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (GLKS) OJK, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan layanan dan produk Industri Jasa Keuangan Syariah (IJK Syariah) untuk sektor perbankan syariah dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah. Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan sesi *sharing session* dan *workshop* mengenai kewirausahaan dan pemasaran dengan narasumber yang berasal dari kalangan pengusaha yang menggunakan produk dan layanan keuangan syariah, serta merupakan alumni santri serta perwakilan dari Divisi Inklusi Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada tiga perwakilan UMKM Santri dan pembukaan 275 rekening Bank syariah.

Kegiatan dihadiri oleh 750 peserta secara *offline* dan 250 peserta secara *online* yang terdiri dari santri, alumni santri dan/atau mahasiswa di Auditorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

by the Group Head of Islamic Financial Literacy and Inclusion (GLKS) at OJK, followed by a presentation concerning the services and products offered by the Islamic financial services industry, specifically the Islamic banking sector and sharia-compliant FinTech P2P Lending. A sharing session was also provided along with workshops on entrepreneurship and marketing by speakers from the business community who use Islamic financial products and services, as well as santri alumni and representatives from the Islamic Financial Inclusion Division of the National Islamic Economy and Finance Committee (KNEKS). Through this event, Islamic People's Business Loans (KUR) were disbursed to three representatives of MSMEs owned by santri along with the opening of 275 Islamic Bank accounts.

The activities attracted 750 offline participants and 250 online participants, including santri, santri alumni and/or students at the Auditorium of Sunan Kalijaga Yogyakarta Islamic State University.

4. Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS)

Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) merupakan program yang diinisiasi OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan peran perempuan yang berasal dari unsur tokoh agama, pimpinan dan pengurus Majelis Taklim untuk menjadi duta literasi keuangan syariah.

Program SICANTIKS diluncurkan OJK untuk pertama kalinya di Kota Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang. Program SICANTIKS dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Keuangan Syariah dari kalangan perempuan atau Ibu. Program SICANTIKS dilakukan dengan memberikan kegiatan edukasi dan pelatihan keuangan syariah secara berkelanjutan kepada perempuan atau Ibu yang merupakan *Key Opinion Leader* (KOL) dari berbagai komunitas.

Setelah di Kota Bandung, SICANTIKS kembali diselenggarakan di Kota Jakarta dan dihadiri oleh 1.050 perempuan atau ibu-ibu Majelis Taklim se-JABODETABEK dan 150 peserta secara *online*. SICANTIKS Jakarta juga turut dihadiri oleh peserta yang berasal dari komunitas disabilitas yang merupakan perempuan atau ibu penyandang disabilitas pelaku UMKM.

Pada program SICANTIKS, para peserta mendapatkan materi edukasi keuangan syariah dan penjelasan terkait layanan dan produk IJK Syariah, di antaranya perbankan syariah, asuransi syariah dan pergadaian syariah. Untuk melengkapi pemahaman peserta, diberikan juga sesi *Training of Trainers* (ToT) edukasi dan pelatihan oleh Sakinah *Finance* dengan materi, antara lain pengelolaan keuangan dan *workshop* penghitungan keuangan.

4. Islamic Financial Literacy Targeting Mothers (SiCantiks)

The SiCantiks program was initiated by OJK to increase Islamic financial literacy and inclusion by empowering women in roles as religious figureheads, leaders and administrators of the Taklim Council as ambassadors of Islamic financial literacy.

The SiCantiks program was first launched by OJK in Bandung, attracting 600 participants. The program aims to expand the presence of female Islamic financial literacy ambassadors, including mothers. The program provides continuous educational activities and training on Islamic finance to women or mothers as key opinion leaders (KOL) in various communities.

After success in Bandung, the SiCantiks program was replicated in Jakarta, attracting 1,050 women and mothers from the Taklim Council in the JABODETABEK region along with 150 online participants. SiCantiks Jakarta was also attended by participants from disability communities as women or mothers living with disabilities who are also MSME entrepreneurs.

Participants of the SiCantiks program are presented with educational materials on Islamic finance along with explanations concerning the products and services of the Islamic financial services industry, including Islamic banking, Islamic insurance and Islamic pawnbrokers. Seeking to enhance participant understanding, a Training of Trainers (ToT) session also provided education and training by Sakinah Finance, presenting financial management materials and a workshop on financial bookkeeping.

5. Syariah *Financial Fair* (SYAFIF)

OJK pertama kali menginisiasi kegiatan Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) di Yogyakarta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan. SYAFIF terdiri dari pameran dan promosi terkait produk/layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) dan *business matching* dengan melibatkan 17 LJKS, di antaranya Bank Syariah, Pembiayaan

5. Sharia Financial Fair (SYAFIF)

OJK first initiated the Sharia Financial Fair (SYAFIF) in Yogyakarta as part of the Financial Inclusion Summit during Financial Inclusion Month. SYAFIF consists of an exhibition and promotional activities relating to the products and services of Islamic financial services institutions, along with business matching involving 17 Islamic financial services institutions,

Syariah, Gadai Syariah, dan Asuransi Syariah. Selain pameran, juga diselenggarakan berbagai *talkshow* edukasi keuangan syariah dari masing-masing IJK Syariah dalam rangka memberi wawasan mengenai produk keuangan syariah kepada masyarakat yang turut menghadiri acara. Sepanjang kegiatan SYAFIF, tercatat sebanyak 6.482 pengunjung telah mengunjungi *booth* SYAFIF selama empat hari kegiatan dan menghasilkan sejumlah 82 transaksi dengan nilai Rp455.465.611,-.

Kegiatan SYAFIF bertujuan untuk mendorong perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah, mengkampanyekan program literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pelindungan konsumen dan meningkatkan aliansi strategis dengan *stakeholders* terkait dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

including Islamic Banks, Islamic finance, Islamic pawnbrokers and Islamic insurance. In addition to the exhibition, SYAFIF also featured various talk shows on Islamic financial education by each Islamic financial services institution to provide greater insight to the public in attendance concerning Islamic financial products. SYAFIF attracted 6,482 visitors to the exhibition booths over four days of activities, generating 82 transactions worth IDR455,465,611.

The Sharia Financial Fair (SYAFIF) aims to expand access to Islamic financial institutions, products and/or services for all levels of society, while building public understanding and awareness of Islamic financial products and/or services, campaigning for Islamic financial literacy and inclusion programs, consumer protection and building strategic alliances with relevant stakeholders to increase Islamic financial literacy and inclusion.

6. Santri Cakap Keuangan Syariah (SAKINAH) - Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)

OJK menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah terpadu melalui kegiatan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (SAKINAH - EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Konawe, Sulawesi Tenggara. Kegiatan dihadiri oleh 375 peserta, yang terdiri dari pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Syariah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, pimpinan/pengurus Pondok Pesantren, termasuk 260 orang guru/*asatidz*, santri dan pelaku UMKM di sekitar Pondok Pesantren. Materi yang disampaikan dalam kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dan edukasi keuangan syariah, di antaranya pengenalan OJK, IJK Syariah, *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU), Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi dan Pinjaman *Online* Ilegal, serta layanan dan produk IJK Syariah, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembukaan akses keuangan dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan keuangan keuangan syariah yang dicanangkan pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya. Program inklusi keuangan syariah yang dilakukan, yaitu pengukuhan Agen Laku Pandai di Pondok Pesantren, penyerahan Produk SimPel iB kepada 100 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, penyerahan produk Kartu Santri, penyaluran Pembiayaan KUR Syariah kepada UMKM di wilayah Pondok Pesantren, penyerahan produk Tabungan Haji Muda kepada 90 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, serta rencana pendirian Galeri Investasi Edukasi Pasar Modal Syariah.

6. Islamic Financial Literacy Targeting Santri (SAKINAH) – Inclusive Pesantren Ecosystem for Islamic Finance (EPIKS)

OJK hosted integrated Islamic financial inclusion and literacy activities through the SAKINAH Islamic financial literacy program targeting santri as well as the Inclusive Pesantren Ecosystem for Islamic Finance (EPIKS) at Al-Ikhlas Lambuya Pesantren in Konawe, Southeast Sulawesi. The activities attracted 375 participants, including leaders of Islamic financial services institutions and the Coordination Forum for Regional Leaders, leaders/managers of pesantren, as well as 260 teachers/asatidz, santri, and local MSMEs. The materials presented during the Training of Trainers (ToT) and Islamic financial education activities included an introduction to OJK, the Islamic financial services industry, the Learning Management System Financial Education (LMSKU) module, financial planning, illegal online lending and investment, as well as Islamic financial products and services, involving Islamic Banks, the Islamic capital market, Islamic insurance industry and Islamic pawnbrokers.

Through this program, OJK unlocked access to finance and/or other Islamic financial products and services launched at the Al-Ikhlas Lambuya Pesantren. Various financial inclusion activities were carried out, including the appointment of branchless banking agents at the Islamic boarding schools (pesantren), the gift of SimPel Islamic Bank products to 100 santri with an opening balance of IDR200,000, delivery of Santri Cards, disbursement of Islamic KUR financing to MSMEs in the local area, the gift of Hajj Savings Accounts for 90 santri with an opening balance of IDR200,000, and the planned establishment of the Islamic Capital Market Education and Investment Gallery.

7. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

a. Dukungan OJK dalam Penyelenggaraan *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2023

OJK terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan prinsip syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK bersama DSN - MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (*Ijtima' Sanawi*)

7. Support of the Islamic Financial Inclusion and Literacy Strategic Alliance

a. OJK Support for Hosting the Ijtima' Sanawi of the Sharia Supervisory Board (DPS)

OJK continued nurturing Islamic economic and financial development in Indonesia by strengthening the role and function of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the application of sharia principles, while increasing Islamic financial literacy and inclusion. In conjunction with the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-

DPS 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" pada tanggal 13-14 Oktober 2023 di Jakarta.

Pada pelaksanaannya, terdapat pembahasan terkait isu dan ketentuan terkini seputar pengembangan dan penguatan industri keuangan syariah. Pada 2023, selain isu sektoral OJK juga mendorong peran DPS dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mendorong pelindungan konsumen dan masyarakat.

MUI), OJK hosted the Annual Gathering (Ijtima' Sanawi) of the Sharia Supervisory Board (DPS) 2023, entitled Increasing Islamic Economic and Financial Development Collaboration in the Era of Economic Disruption, on 13-14th October 2023 in Jakarta.

The Ijtima' Sanawi discussed the latest issues and regulations about developing and strengthening the Islamic financial industry. In 2023, in addition to sectoral issues, OJK also encouraged the Sharia Supervisory Board (DPS) to play a more active role in increasing Islamic financial literacy and inclusion, while advocating consumer and public protection.

b. Dukungan Aliansi Strategis melalui Indonesia *Sharia Economic Festival* 2023

OJK kembali berpartisipasi dalam kegiatan 10th Indonesia *Shariah Economic Festival* (ISEF) di JCC Senayan. Sepanjang lima hari kegiatan ISEF tahun ini, OJK berpartisipasi dalam Pojok Edukasi Keuangan Syariah dan Layanan Keuangan Masyarakat melalui Aktivasi LMSKU, Gerai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Pojok Pelindungan Konsumen melalui Kontak 157 dan Pojok Edukasi melalui Quiz Keuangan Syariah.

b. Strategic Alliance Support through the Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2023

OJK participated in the 10th Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) at JCC Senayan in Jakarta. Over five days of the ISEF festival, OJK participated in the Islamic Financial Education Corner and Public Financial Services by activating the Learning Management System Financial Education (LMSKU) module, the Financial Information Services System (SLIK) outlet, Consumer Protection Corner through Contact 157 and the Education Corner through a quiz on Islamic finance.

c. Dukungan Aliansi Strategis melalui FGD Penyusunan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

FGD ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah bersama para pemangku kepentingan (K/L dan asosiasi industri). Dalam pelaksanaannya, OJK berkolaborasi dengan KNEKS, Bank Indonesia, BPJPH dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan kegiatan diselenggarakan sebanyak empat kali.

c. Strategic Alliance Support through FGD on formulating the National Islamic Financial and Economic Education and Literacy Strategy

FGD aims to prepare strategic measures to increase Islamic financial literacy and inclusion in conjunction with relevant stakeholders (government ministries/agencies and industry associations). In implementation, OJK collaborates with the National Islamic Economy and Finance Committee (KNEKS), Bank Indonesia, Halal Certification Agency (BPJPH), and the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, with activities held four times.

d. Aktivasi Forum Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah bersama IJK Syariah dan Asosiasi

Dalam rangka membangun komunikasi, sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan asosiasi dan PUJK Syariah, OJK telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Forkom LIKS) dengan melibatkan asosiasi, PUJK Syariah dan Satuan Kerja internal untuk saling berdiskusi, memberikan saran dan masukan, serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah. FGD ini berupaya membangun kolaborasi dan integrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan keuangan konvensional dan keuangan syariah.

d. Activation Forum on Islamic Financial Literacy and Inclusion in conjunction with the Islamic Financial Services Industry and Associations

Seeking to build communication, synergy and collaboration between OJK and industry associations and Islamic financial service providers (FSP), OJK hosted the communication forum on Islamic financial literacy and inclusion (Forkom LIKS) with the participation of industry associations, Islamic financial service providers and internal work units to discuss, offer recommendations and input, as well as participate in efforts to increase Islamic financial education, literacy and inclusion. This focus group discussion also aimed to build financial literacy and inclusion collaboration and integration by involving conventional and Islamic finance.

e. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah lainnya

OJK melakukan diskusi dengan beberapa institusi/lembaga dalam rangka merumuskan kolaborasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, di antaranya WEFinance, Allianz Syariah, Santripreneur, Forum Nasional Mahasiswa Bisnis dan Ekonomi Islam, Pesantren *An Nawawi Tanara, Islamic Development Bank* (IsDB),

e. Strategic Alliance Support for Other Islamic Financial Literacy and Inclusion

OJK held discussions with various institutes/institutions to explore collaboration towards increasing Islamic financial literacy and inclusion, including WEFinance, Allianz Syariah, Santripreneur, National Forum of Islamic Business and Economics Students, An Nawawi Tanara Pesantren, Islamic Development Bank (IsDB), Asian

Asian Development Bank (ADB) dan Perguruan Tinggi NU. Beberapa hal strategis lainnya terkait Diskusi Strategis Tim Bersama *Master Plan* Ekonomi dan Keuangan 2025-2029 bersama anggota KNEKS dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional Akselerasi Implementasi Program KEJAR Wilayah Berat di Bandung.

Development Bank (ADB) and NU University. Other strategic issues were discussed, including the Economic and Financial Master Plan 2025-2029 with members of the National Islamic Economy and Finance Committee (KNEKS) and the National Task Force Coordination Meeting on Accelerating KEJAR Program Implementation in Bandung.

IV.7.5. Pelindungan Konsumen
Consumer Protection

IV.7.5.1. Layanan Konsumen
Consumer Services

1. Pada 2023, Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK sebanyak 319.416 layanan yang terdiri dari 21.118 layanan penerimaan informasi (laporan), 275.241 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 23.057 layanan pengaduan.

1. *In 2023, OJK received 319,416 service requests for consumer and public services, including 21,118 service requests for information (reports), 275,241 inquiries (questions) and 23,057 complaints.*

Grafik 4.6. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Tahun 2023)
Graph 4.6. Consumer and Public Service Requests Received by OJK in 2023

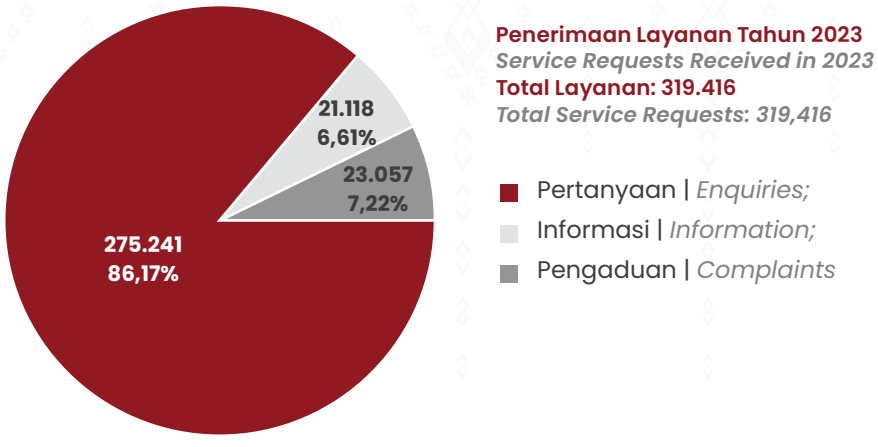

Layanan Penerimaan Pengaduan Tahun 2023 | *Complaints Received in 2023* Total Layanan: 23.057 | *Total Complaints; 23,057*			
Sektor	**Total Layanan** | *Total Service Requests*	**Porsi** | *Share*	*Sector*
Perbankan	10.848	47,05%	*Banking Industry*
Perasuransian	1.607	6,97%	*Insurance Industry*
Lembaga Pembiayaan	4.528	19,64%	*Finance Companies*
Financial Technology	5.677	24,62%	*Financial Technology (FinTech)*
Dana Pensiun	50	0,22%	*Pension Funds*
IKNB Lainnya	263	1,14%	*Other NBFI*
Pasar Modal	84	0,36%	*Capital Market*
Layanan Pemberian Informasi Tahun 2023 | *Service Requests Received in 2023* **Total Layanan: 275.241** | *Total Service Requests: 275,241*			
Sektor	**Total Layanan** | *Total Service Requests*	**Porsi** | *Share*	*Sector*
Perbankan	59.428	21,59%	*Banking Industry*

Perasuransian	3.084	1,12%	*Insurance Industry*
Lembaga Pembiayaan	27.054	9,83%	*Finance Companies*
Financial Technology	61.864	22,48%	*Financial Technology (FinTech)*
Dana Pensiun	50	0,02%	*Pension Funds*
IKNB Lainnya	773	0,28%	*Other NBFI*
Pasar Modal	229	0,08%	*Capital Market*
N/A (Lain-lain)	122.759	44,60%	*N/A (Others)*

Layanan Penerimaan Informasi Tahun 2023 | ***Enquiries in 2023***
Total Layanan: 21.118 | ***Total Service Requests: 21,118***

Sektor	**Total Layanan |** ***Total Service Requests***	**Porsi |** ***Share***	***Sector***
Perbankan	2.789	13,21%	*Banking Industry*
Perasuransian	459	2,17%	*Insurance Industry*
Lembaga Pembiayaan	822	3,89%	*Finance Companies*
Financial Technology	3.501	16,58%	*Financial Technology (FinTech)*
Dana Pensiun	8	0,04%	*Pension Funds*
IKNB Lainnya	25	0,12%	*Other NBFI*
Pasar Modal	12	0,06%	*Capital Market*
N/A (Lain-lain)	13.502	63,94%	*N/A (Others)*

2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

2. *Products that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints to OJK*

Grafik 4.7. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan
Graph 4.7. Products that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the Banking Sector

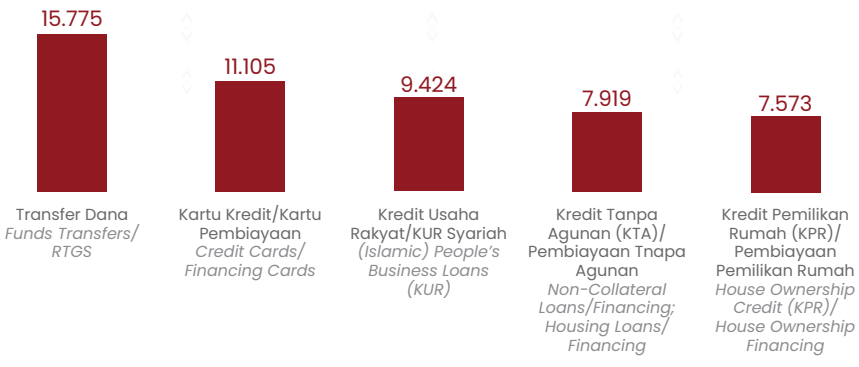

Grafik 4.8. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB
Graph 4.8. Products that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the NBFI Sector

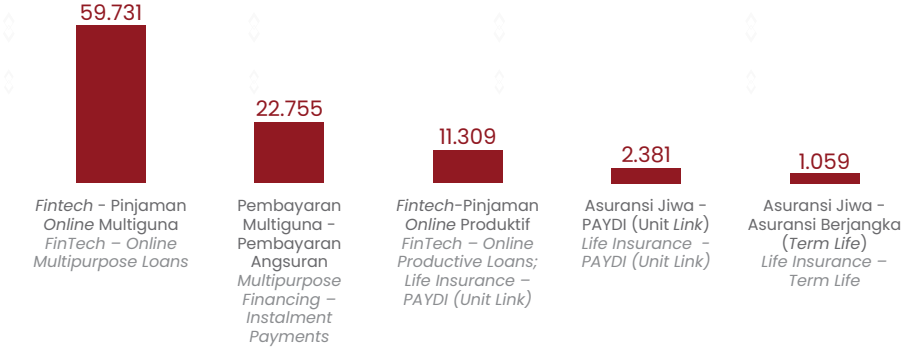

Grafik 4.9. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal
Graph 4.9. Products that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the Capital Market Sector

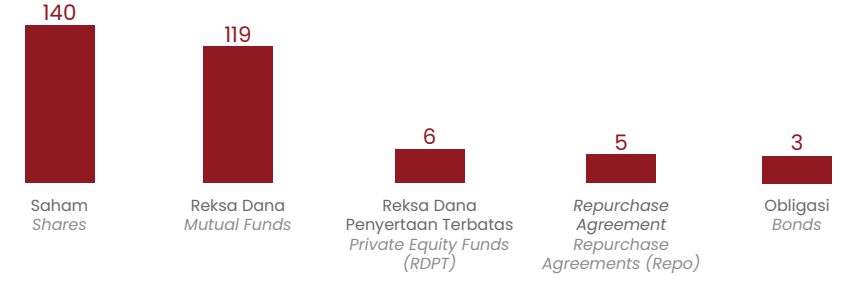

3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

3. Issues that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints to OJK

Grafik 4.10. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan
Graph 4.10. Issues that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the Banking Sector

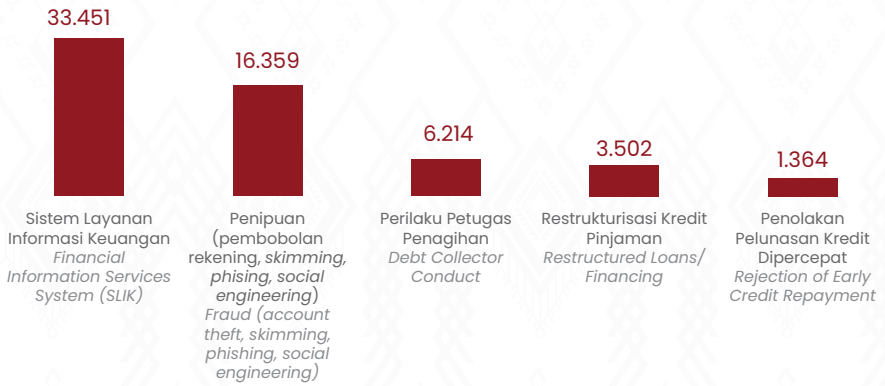

Grafik 4.11. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB
Graph 4.11. Issues that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the Banking Sector

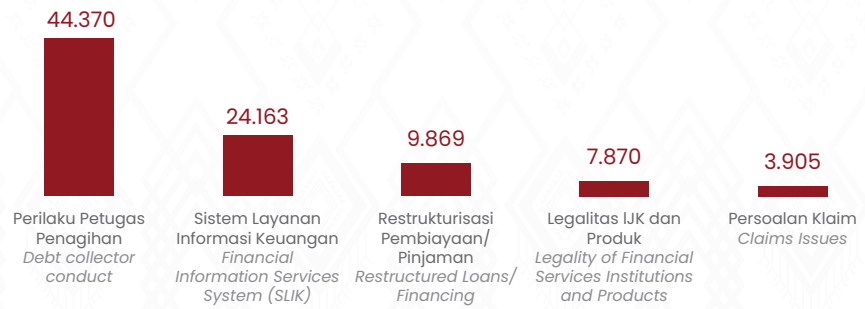

Grafik 4.12. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal
Graph 4.12. Issues that Receive Most Questions, Reports and/or Complaints in the Capital Market Sector

4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan

4. Completion Rate for Enquiries and Complaints

Grafik 4.13. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan (Tahun 2023)
Graph 4.13. Completion Rate for Enquiries and Complaints (in 2023)

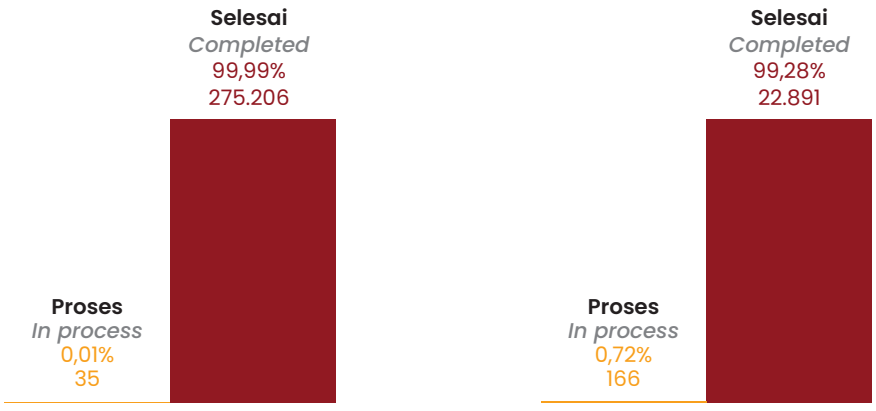

Sumber: APPK – OJK
Source: APPK – OJK

5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK
   Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, *web*, WhatsApp dan *walk-in*. Adapun jumlah layanan konsumen yang masuk melalui masing-masing kanal, adalah sebagai berikut:

5. *Number of Questions, Information and Complaints Received via OJK Channels*
   Providing more convenient access to consumer services for the public, OJK offers various channels to receive service requests, including email, telephone, letter, website, WhatsApp and walk-in services. The number of service requests received via each channel in 2023 is as follows:

Grafik 4.14. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Tahun 2023)
Graph 4.14. Number of Questions, Information and Complaints Received via OJK Channels in 2023

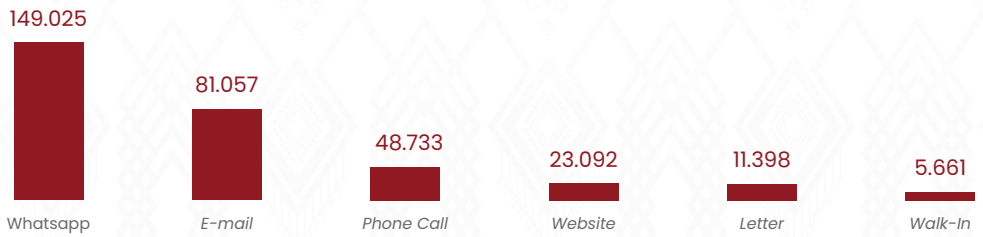

Sumber: APPK – OJK
Source: APPK – OJK

Tabel 4.56. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK (Tahun 2023)
Table 4.56. Composition of Complaints, Enquiries and Information Received by OJK in 2023

Data APPK	Jumlah Layanan *Total Service Requests*	Porsi *Share*	Proses *In Process*	Selesai *Completed*	*Data APPK*
Kantor Pusat	**313.368**	**98,11%**	**187**	**313.181**	***Head Office***
Pengaduan	21.150	6,62%	149	21.001	*Complaints*
Pertanyaan	271.343	84,95%	35	271.308	*Enquiries*
Penerimaan Informasi	20.875	6,54%	3	20.872	*Information*
KOJK	**6.048**	**1,89%**	**27**	**6.021**	***OJK Offices***
Pengaduan	1.907	0,60%	17	1.890	*Complaints*
Pertanyaan	3.898	1,22%	-	3.898	*Enquiries*
Penerimaan Informasi	243	0,08%	10	233	*Information*
Jumlah	**319.416**	**100,00%**	**214**	**319.202**	***Total***

Sumber: APPK – OJK
Source: APPK – OJK

IV.7.5.2. Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen
Consumer Protection Socialisation Activities

OJK melakukan rangkaian sosialisasi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, *talk show* melalui Radio lokal, kuliah umum di beberapa kota antara lain Purwokerto, Makassar, Lampung, Surabaya, Aceh, Samarinda, Batam, Malang, Kupang dan Cirebon kepada PUJK, Mahasiswa, dan pelaku UMKM.

OJK arranged a series of socialisation activities for consumer protection in the financial services sector, including talk shows on local radio as well as open lectures at universities in several cities, including Purwokerto, Makassar, Lampung, Surabaya, Aceh, Samarinda, Batam, Malang, Kupang and Cirebon for financial service providers (FSP), students and MSMEs.

IV.7.6. Pembelaan Hukum Konsumen
Legal Recourse for Consumers

IV.7.6.1. Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Operationalisation of Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Konsumen baik melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat. Selanjutnya, sampai dengan akhir triwulan IV-2023, LAPS SJK telah menyampaikan informasi terkait penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa

Total permohonan penyelesaian sengketa pada tahun 2023 berjumlah 2.507 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector regularly verify applications for dispute resolution submitted by consumers via the Consumer Protection Portal Application (APPK) and other channels. Based on the results of verification, the Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) will settle disputes through mediation services, arbitration and binding opinions. By the end of the fourth quarter of 2023, Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) provided the following information concerning dispute resolution:

1. Total Applications for Dispute Resolution

In 2023, OJK received 2,507 applications for dispute resolution recapitulated as follows:

Layanan	Media | *Media*	Jumlah | *Total*		*Service*
Mediasi	APPK	2.442	2.486	*Mediation*
	Non-APPK	44		
Arbitrase	APPK	0	21	*Arbitration*
	Non-APPK	21		
Jumlah		**2.507**		***Total***

2. Demografi provinsi domisili konsumen

Demografi provinsi domisili konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada tahun 2023

2. Distribution of Applications for Dispute Resolution by Province

In 2023, the distribution of applications for dispute resolution at Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector was as follows:

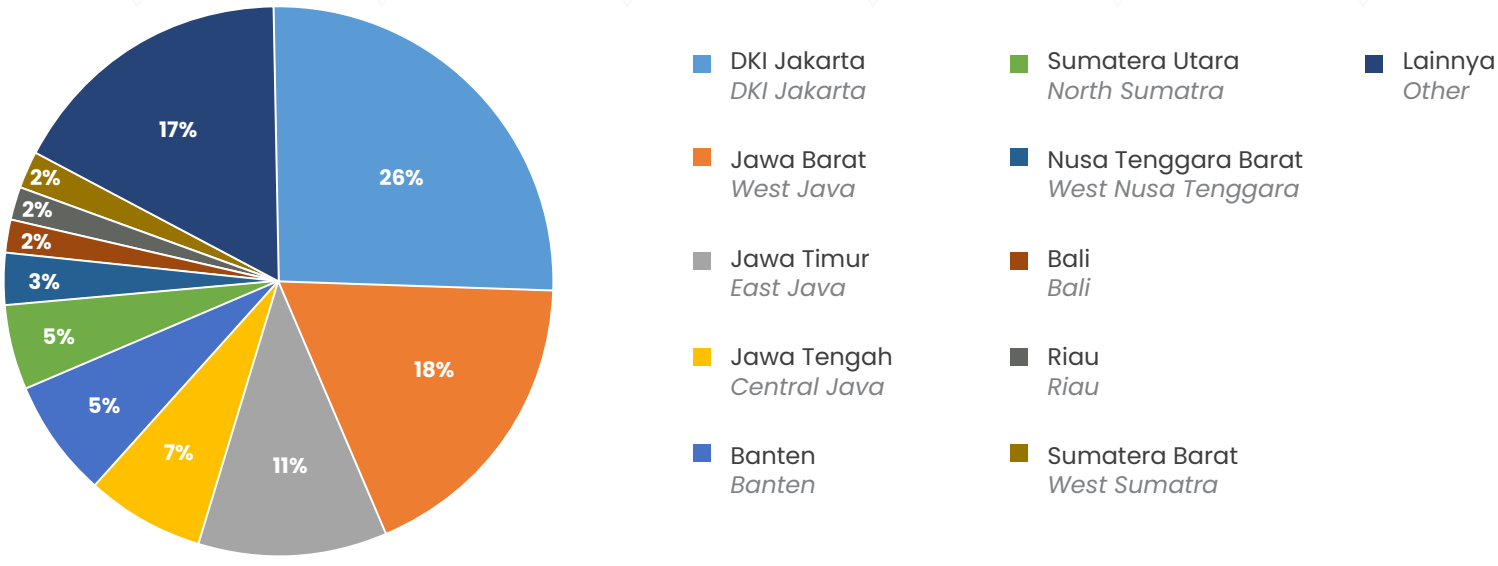

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK

Selama 2023, terdapat 507 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK dengan rincian alasan-alasan penolakan, sebagai berikut:

3. *Number of Applications for Dispute Resolution Rejected Beyond the Authority of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector*

In 2023, a total of 507 applications were rejected because they did not fulfill the requirements for dispute resolution at Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector based on the following reasons:

Alasan Penolakan | *Reason for Rejection*	Jumlah | *Total*
Sengketa dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian dan/atau perkara pidana *The dispute is under police investigation and/or part of an ongoing criminal case*	130
Sengketa menyangkut pihak ketiga di luar sektor jasa keuangan dan/atau pengaduan diajukan terhadap PUJK yang berbeda (*error in persona*) *The dispute involves third parties outside of the financial services sector and/or the complaint was filed against a different FSP (error in persona)*	105
Sengketa yang diadukan sedang dalam proses pemeriksaan atau sudah diputus oleh instansi dan/atau Lembaga berwenang lainnya *The dispute is currently under investigation or has been resolved by another competent institution and/or agency*	81
Para pihak yang bersengketa tidak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK dan/atau tidak memiliki hubungan hukum *The disputing parties cannot come to an agreement to resolve the dispute through LAPS and/or do not have a legal relationship*	67
Pengaduan tidak dapat dikonfirmasi karena tidak ada nomor kontak dan/atau Alamat surel Konsumen pada APPK dan/atau nomor kontak yang tercantum pada APPK tidak dapat dihubungi | *The complaint cannot be confirmed due to a missing contact number and/or email address in the Consumer Protection Portal Application (APPK) and/or the contact number registered in the APPK portal cannot be contacted*	51
Pengaduan mengenai *complain* atas perilaku *debt collector* | *Complaint refers to debt collector conduct*	31
Sengketa mengenai kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh PUJK *The dispute refers to policies or industry standards implemented by financial service providers (FSP)*	25
Sengketa belum dilakukan IDR atau para pihak ingin kembali IDR | *The dispute has not been subject to internal dispute resolution (IDR) or the disputing parties request further IDR*	12
Sengketa bersifat massal/masiv yang tidak dapat diselesaikan secara parsial satu per satu *The dispute is a class action and cannot be resolved partially on an individual basis*	5
Jumlah | *Total*	**507**

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1.789 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian:

a. 1.729 dalam proses verifikasi;
b. 53 dalam proses mediasi; dan
c. 4 dalam proses arbitrase.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa

Rata-rata jangka waktu LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian setiap sengketa, yaitu 67 hari kerja dengan rincian penyelesaian sengketa per layanan, sebagai berikut:

a. Mediasi: 56 hari kerja.
b. Arbitrase: 109 hari kerja.

6. *Number of Disputes in Completion Process*

As of the fourth quarter of 2023, a total of 1,789 applications were still being processed by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector as follows:

a. 1,729 in the verification process,
b. 53 in the mediation process, and
c. 4 in the arbitration process

5. *Average time taken by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector to resolve disputes*

The average time taken by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector to resolve disputes is 67 business days, recapitulated as follows:

a. Mediation: 56 business days
b. Arbitration: 109 business days

6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa pada tahun 2023

6. The 10 types of services and/or products disputed in 2023

No.	Jenis Produk/Layanan	Persentase | *Percentage*	*Product/Service*
1.	*Fintech*-Pinjaman *Online* Multiguna (Penerima Dana)	20%	*FinTech-Online Multipurpose Loans (Beneficiary)*
2.	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	12%	*Credit Cards/Financing Cards*
3.	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	12%	*Multipurpose financing – Instalment Payments*
4.	Produk Pembiayaan Lainnya	11%	*Other Financing Products*
5.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah	9%	*Housing Loans/Financing*
6.	Produk Perbankan Lainnya	8%	*Other Banking Products*
7.	*Fintech* - Pinjaman *Online* Produktif (Pemberi Dana)	8%	*FinTech – Online Productive Loans (Sender)*
8.	Tabungan	8%	*Savings*
9.	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	7%	*Multipurpose Loans/Multiservice Financing*
10.	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	5%	*Working Capital Loan/Financing*

7. Jumlah sengketa yang telah diputus/disepakati dan hasil *monitoring* atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud

Pada 2023, terdapat 487 sengketa yang telah mencapai kesepakatan melalui layanan mediasi maupun telah diputus pada layanan arbitrase, dengan rincian sebagai berikut:

a. Mediasi: 476 sengketa selesai karena mediasi.
b. Arbitrase: 11 sengketa yang telah diputus.

Terhadap kesepakatan dan putusan dimaksud, LAPS SJK melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan baik terhadap Konsumen maupun PUJK.

7. Number of disputes settled/resolved and monitoring of resolution agreement implementation

In 2023, a total of 487 disputes were resolved through mediation and arbitration services as follows:

a. Mediation: 476 disputes resolved through mediation.
b. Arbitration: 11 disputes resolved

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector monitor the implementation of dispute resolution agreements by consumers and financial service providers (FSP).

8. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK

Lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK pada tahun 2023, sebagai berikut:

8. Top five types of disputes received by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector

The top five types of disputes received by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector in 2023 were as follows:

Jenis Sengketa	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*	*Type of Dispute*
Perilaku Petugas Penagihan	391	29%	*Debt collector conduct*
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	286	21%	*Restructured/Relaxed Loans/Financing*
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, *Skimming, Cyber Crime*)	265	19%	*External Fraud (Fraud, Account Theft, Skimming, Cyber Crime)*
Persoalan Klaim	245	18%	*Claims Issues*
Sistem Layanan Informasi Keuangan	173	13%	*Financial Information Services System (SLIK)*

IV.7.6.2. Sosialisasi LAPS SJK
Socialisation of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the Financial Services Sector

Pada tahun 2023, OJK melaksanakan sosialisasi kepada PUJK, konsumen dan masyarakat terkait LAPS SJK di beberapa kota, antara lain Jakarta, Manado, Batam, Yogyakarta dan Semarang.

In 2023, OJK hosted various socialisation activities for financial service providers (FSP), consumers and the public concerning Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector in several cities, including Jakarta, Manado, Batam, Yogyakarta and Semarang.

IV.7.6.3. Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen
Legal Recourse for Consumer Protection

1. Dalam rangka persiapan pengajuan gugatan perdata, pada 2023 OJK melaksanakan persiapan pengajuan gugatan perdata dalam upaya pelindungan konsumen dan masyarakat, meliputi:
   a. FGD antara OJK dengan Jamdatun, Jampidum, Jampidsus, Bareskrim dan PPA dengan topik Mekanisme Penelusuran dan Penyitaan Aset dalam Penanganan Kasus Perdata dan Pidana di Dalam dan Luar Negeri.
   b. Pembahasan dengan PPA terkait mekanisme permohonan penelusuran aset di dalam dan luar negeri, OJK dapat bersurat terlebih dahulu kepada Jamdatun.
   c. *Knowledge Sharing* dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan topik Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam upaya pelindungan konsumen.

2. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan yang Diajukan oleh OJK dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
   a. OJK telah menyampaikan surat perihal Permohonan Kerja Sama Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Perdata oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pelindungan Konsumen, yang berisi permohonan kerja sama dalam rangka penyusunan Perma tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK dalam rangka Pelindungan Konsumen.
   b. Mahkamah Agung telah menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
   c. Pelaksanaan *kick-off meeting* Penyusunan Perma tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat pada tanggal 12 September 2023.
   d. FGD Kelompok Kecil Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Jakarta, Solo dan Semarang.

1. *OJK conducted preparations to file civil lawsuits in 2023 as part of its consumer and public protection efforts as follows:*
   a. *Focus Group Discussions (FGD) between Jamdatun, Jampidum, Jampidsus, Bareskrim and PPA on topics including mechanisms for tracing and confiscating assets when handling civil and criminal cases in Indonesia and abroad.*
   b. *In discussions with PPA regarding the application mechanism for tracing and confiscating assets in Indonesia and abroad, OJK can first correspond with Jamdatun.*
   c. *Knowledge sharing with the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia concerning the role of the Deputy Attorney General on Civil and State Administration in terms of consumer protection.*

2. *Formulation of Supreme Court Regulations concerning Examination Procedures for Lawsuits Filed by OJK in terms of Consumer and Public Protection.*
   a. *OJK submitted a letter concerning an Application for Cooperation in the Formulation of Supreme Court Regulations regarding Examination Procedures for Lawsuits Filed by OJK in terms of Consumer Protection, containing an application for cooperation in the context of drafting Supreme Court Regulations on Procedures for Filing Civil Lawsuits by OJK in terms of Consumer Protection.*
   b. *The Supreme Court finalised a Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia concerning a Working Group for the Formulation of Supreme Court Regulations regarding Examination Procedures for Lawsuits Filed by the Financial Services Authority (OJK) as part of the Consumer and Public Protection efforts.*
   c. *A kick-off meeting was held on 12th September 2023 regarding the Formulation of Supreme Court Regulations concerning the Examination Procedures for Lawsuits Filed by the Financial Services Authority (OJK) as part of the Consumer and Public Protection efforts.*
   d. *Focus Group Discussions (FGD) were held regarding the Formulation of Supreme Court Regulations concerning the Examination Procedures for Lawsuits Filed by the Financial Services Authority (OJK) as part of the Consumer and Public Protection efforts in Jakarta, Solo and Semarang.*

IV.7.7. *Market Conduct*

Market Conduct

1. Pemeriksaan Tematik

Untuk mewujudkan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, PUJK wajib menerapkan prinsip-prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat dalam seluruh rangkaian *product life cycle*. Berdasarkan hasil analisis terhadap data pengaduan, data pengawasan, permintaan rekomendasi dari Satuan Kerja Pengawasan Sektoral, data Penilaian Sendiri PUJK dan data relevan lainnya, telah ditetapkan Penyusunan Perjanjian Baku dan Dokumen Transaksi Keuangan di Lembaga Pembiayaan sebagai tema Pemeriksaan Tematik Tahun 2023.

Pemeriksaan dilaksanakan terhadap aspek kebijakan, implementasi, dan evaluasi penyusunan perjanjian pembiayaan dan dokumen transaksi keuangan pada Perusahaan Pembiayaan sampel. Pada tahun 2023, OJK melaksanakan pemeriksaan tematik terhadap lima sampel Perusahaan Pembiayaan melalui mekanisme pemeriksaan mandiri.

2. Pemeriksaan Khusus

Pada periode 2023, OJK telah melakukan beberapa pemeriksaan khusus, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemeriksaan khusus permasalahan *sponsorship* kegiatan Festival Budaya di Kota Surakarta yang melibatkan tiga PUJK;
b. Pemeriksaan khusus permasalahan perilaku petugas penagihan PUJK di wilayah Kota Bekasi;
c. Pemeriksaan khusus permasalahan dugaan pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan yang melibatkan dua PUJK di Kota Pekanbaru;
d. Pemeriksaan khusus terkait penyediaan informasi produk dan/atau layanan melalui iklan dan promosi pada tiga PUJK.

3. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023

Pemantauan terhadap pengisian atau pelaporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tahun 2023 telah dilaksanakan pada 2.747 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang wajib melakukan Penilaian Sendiri melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan konsumen (SiPEDULI).

Berdasarkan hasil pemantauan, hingga 31 Desember 2023 sebanyak 2.323 PUJK telah mengisi secara tepat waktu; 219 PUJK mengisi lebih dari tanggal batas waktu penyampaian terlambat; dan 205 PUJK belum mengisi Penilaian Sendiri periode Tahun 2023. Selanjutnya, dari 2.543 PUJK yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri sampai tanggal 31 Desember 2023, sebaran penilaian Tingkat Risiko pelindungan konsumen PUJK yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian peringkat (*rating*) Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Thematic Surveillance

Financial service providers (FSP) must apply consumer and public protection principles across all aspects of the product life cycle to create and maintain effective consumer and public protection and ensure regulatory compliance. Based on the results of analysing complaints data, supervision data, requests for recommendations from sectoral supervision work units, FSP self-assessment data and other relevant data, OJK stipulated standardised agreements and financial transaction documents for finance institutions as the target of thematic surveillance in 2023.

Thematic surveillance looked at policy aspects as well as the implementation and evaluation of financing agreements and financial transaction documents based on a sample of finance companies. In 2023, OJK conducted thematic surveillance on a sample of five financing companies through an independent mechanism.

2. Special Examinations

In 2023, OJK conducted several special examinations as follows:

a. Special examinations of sponsorship issues for the cultural festival activities in Surakarta, involving three financial service providers (FSP),
b. Special examinations of issues with FSP collection officers in Bekasi,
c. Special examinations of alleged disbursement issues concerning term deposits not in accordance with prevailing regulations, involving two FSP in Pekanbaru,
d. Special examinations concerning the provision of information on products and/or services through advertisements and promotional activities at three FSPs.

3. Self-Assessment Reports by Financial Service Providers (FSP) in 2023

Self-assessment reports in 2023 were submitted by 2,747 financial service providers (FSP) are obligated to perform self-assessments through the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI).

Based on the results of surveillance, as of 31st December 2023, a total of 2,323 FSPs submitted reports on time, with 219 FSP late to submit and 205 FSPs failing to submit for the 2023 period. Of the 2,543 financial service providers (FSP) that had submitted reports as of 31st December 2023, the composition of FSP consumer protection risk based on the rating of the self-assessment report is as follows:

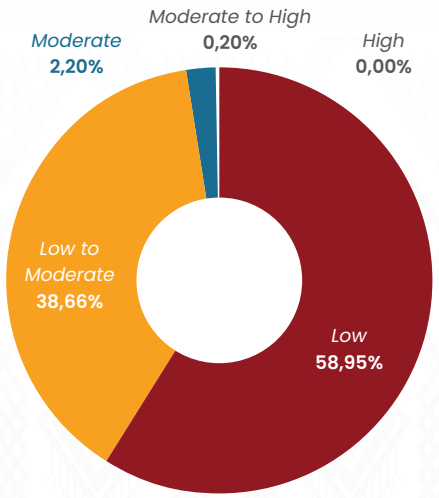

4. Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Dalam rangka memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti data/dokumen yang memadai, dilakukan proses validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang sampaikan oleh PUJK.

Selama 2023, OJK telah melaksanakan validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK Tahun 2022 secara tatap muka sebanyak 72 PUJK. Total rekomendasi hasil Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh PUJK sampel dimaksud sebanyak 1.787 rekomendasi.

5. Analisis Perjanjian Baku

Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diatur secara detail mengenai penyusunan perjanjian produk dan/atau layanan. Pada ketentuan tersebut PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam menyusun perjanjian dan wajib menghindari pencantuman klausul yang secara tegas dilarang dalam ketentuan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK memandang perlu untuk menegaskan kepada PUJK untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian baku yang dimiliki dan melakukan analisis terhadap perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan PUJK untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan isu terkait perjanjian baku di sektor jasa keuangan.

Pada 2023, OJK telah melakukan analisis terhadap sampel perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan pada total 200 PUJK di Sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank dengan hasil masih terdapat perjanjian baku PUJK yang secara redaksional berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam kerangka analisis awal, dugaan ketidaksesuaian dimaksud diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait dokumen kebijakan internal PUJK, serta implementasi atas klausula, sehingga OJK memberikan surat agar PUJK melakukan evaluasi menyeluruh atas proses penyusunan maupun implementasi perjanjian.

4. Validation of Self-Assessment Reports by Financial Service Providers (FSP)

Seeking to ensure that the self-assessment reports are accurate and reflect actual conditions, supported by adequate data/document evidence, OJK validates the self-assessment reports submitted by financial service providers (FSP).

In 2023, OJK physically validated the self-assessment reports submitted by 72 FSPs in 2022. In total, OJK presented 1,787 recommendations based on the validation of self-assessment reports across the entire sample of FSP.

5. Analysis of Standard Agreements

In accordance with Article 238 of Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening, the preparation of product and/or service agreements are regulated in detail. The regulations stipulate that financial service providers (FSP) must prepare balanced, fair and standard agreements, while avoiding clauses that are explicitly forbidden in the regulations. Therefore, OJK considers it necessary to emphasise to financial services providers the need to evaluate all standard agreements used as well as analyse of the standard agreements and financial transaction documents to get an overview of the issues related to standard agreements in the financial services sector.

In 2023, OJK analysed standard agreements and financial transaction documents from a sample of 200 FSPs in the banking sector, capital market and Non-Bank financial industry, revealing that the wording of some agreements could potentially be inconsistent with the prevailing regulations. Within the preliminary analysis, the alleged non-compliance must be evaluated further concerning the internal policy documents of the FSP and implementation of the clauses, with OJK issuing letters and notifications for FSP to evaluate the process of preparing and implementing agreements comprehensively.

Di samping itu, OJK masih menemukan sampel perjanjian baku milik 17 PUJK yang mencantumkan klausula yang dilarang dicantumkan pada perjanjian baku. Atas pelanggaran dimaksud, OJK telah mengirimkan surat agar PUJK dimaksud menyusun *action plan* yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian baku yang dimiliki PUJK tidak lagi mencantumkan klausula dilarang.

6. Pemantauan Iklan Sektor Jasa Keuangan

Selama 2023, OJK telah melaksanakan pemantauan terhadap 10.463 produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Iklan yang dipantau adalah iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dipublikasikan melalui media cetak massa, media sosial dan media daring.

Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan bahwa sebanyak 2,2% (234 iklan) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran masih didominasi dari sektor Perbankan dengan jumlah pelanggaran sebesar 197, diikuti sektor IKNB sebanyak 36 pelanggaran dan sisanya dari sektor Pasar Modal. Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan Surat Pembinaan terhadap 37 PUJK dan Surat Penghentian Pencantuman Iklan kepada 29 PUJK.

7. Pengenaan Sanksi

Penetapan sanksi atas keterlambatan pelaporan Penilaian Sendiri selama 2023 telah ditindaklanjuti kepada 154 PUJK dengan rincian surat sanksi administratif berupa denda kepada 150 PUJK dan surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 4 PUJK. Selain itu, terdapat sanksi administratif atas pelanggaran iklan sektor jasa keuangan kepada 9 PUJK.

8. Sosialisasi dan Kegiatan Lain terkait Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

a. Pelaksanaan Sosialisasi di Kota Medan

1) Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta LAPS SJK.

2) Sosialisasi POJK Nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan konsumen (SiPEDULI).

3) Sosialisasi Waspada Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Investasi Ilegal dan Pinjaman *Online* Ilegal) dan Edukasi Keuangan Syariah.

b. Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.

c. Pemberitahuan melalui surat kepada 106 PUJK subsektor Bank Umum perihal pelaksanaan pengawasan *market conduct* oleh OJK.

In addition, OJK also found a sample of standard agreements used by 17 FSP that contained clauses explicitly forbidden from use in standard agreements. In response, OJK issued letters and notifications for FSP to prepare mandatory action plans to ensure that all standard agreements used by FSP no longer contained such clauses.

6. Monitoring Advertisements in the Financial Services Sector

In 2023, OJK monitored 10,463 financial products and/or services through the Financial Services Advertisement Monitoring System (SPIKE). OJK monitored advertisements for financial products and services published in the mass media, social media and online media.

Based on the results of monitoring, OJK found that 2.2% (234 advertisements) did not comply with prevailing regulations. Violations were still dominated by the banking sector, totaling 197, followed by the NBFI with 36 violations and the remainder from the capital market sector. In response, OJK issued Guidance Letters to 37 financial service providers (FSP) as well as Advertisement Cease and Desist Letters to 29 financial service providers (FSP).

7. Sanctions

Sanctions for late submission of self-assessment reports in 2023 were imposed on 154 financial service providers (FSP), including administrative sanctions in the form of a fine of 150 FSP and administrative sanctions in the form of a written warning on four FSP. In addition, OJK has also imposed administrative sanctions for advertising violations in the financial services sector on nine FSP.

8. Socialisation and Other Activities Concerning the Supervision of FSP Conduct, Consumer and Public Protection

a. Socialisation Activities in Medan

1) Socialisation concerning the Supervision of Financial Service Provider (FSP) Conduct, Consumer and Public Protection, as well as Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector.

2) Socialisation of OJK Regulation (POJK) Number 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, as well as the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI).

3) Socialisation of unlicensed business activity (illegal online investment and lending activities) in the financial sector as well as Islamic financial education.

b. Socialisation concerning the Supervision of Financial Service Provider (FSP) Conduct as well as Consumer and Public Protection.

c. Notification through a letter to 106 FSP in the commercial banking subsector regarding the implementation of market conduct supervision by OJK.

Selain pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan di atas, OJK juga telah melaksanakan kegiatan lainnya, sebagai berikut:

1) Kegiatan Kuliah Umum Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Universitas Pendidikan Nasional Kota Denpasar.
2) Kegiatan Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi yang Bijak untuk Menyiapkan Masa Depan Generasi Muda Indonesia di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

In addition to the socialization activities and notifications mentioned above, OJK also implemented other activities as follows:

1) Open Lecture on Consumer Protection in the Financial Services Sector at the University of National Education (UNDIKNAS) in Denpasar.
2) Seminar on Wise Financial Planning and Investment to Prepare Indonesia's Young Generation for the Future at Raden Mas Said Surakarta State Islamic University.

IV.7.8. Komunikasi
Communication

1. Komunikasi Digital

Selama 2023, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube.

1. Digital Communication

In 2023, OJK implemented a continuous series of integrated communication activities via various media, including print, electronic and digital, including OJK's own media, such as the OJK website and social media channels on X, Facebook, Instagram, TikTok and YouTube.

Grafik 4.15. Publikasi *Website* OJK Tahun 2023
Graph 4.15. OJK Website Publications in 2023

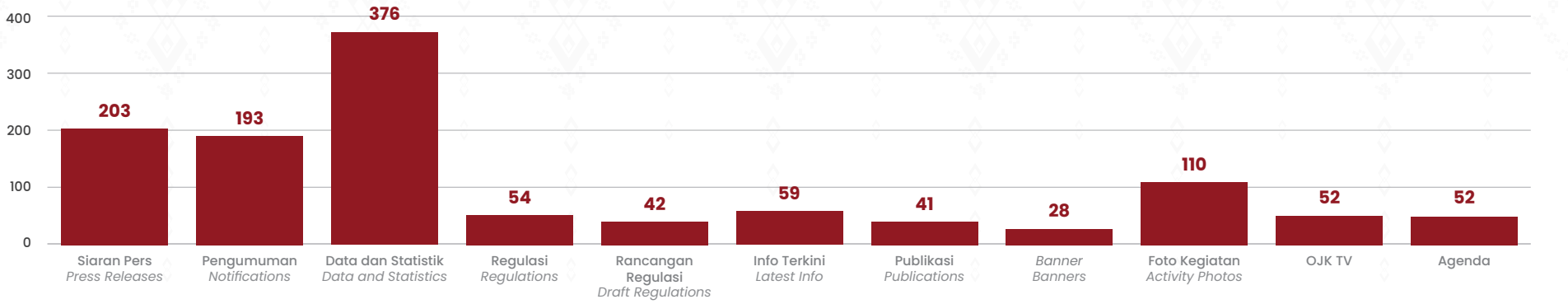

Selama 2023, *website* OJK telah mengunggah 1.210 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini dan sebagainya. Sepanjang 2023, OJK telah mempublikasikan di antaranya:

a. 54 regulasi yang terdiri dari 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).
b. 42 rancangan regulasi yang terdiri dari 25 RPOJK dan 16 RSEOJK.

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada tahun 2023 ialah sebanyak 3.237 konten, antara lain publikasi pada X sebanyak 870 konten, Facebook 887 konten, Instagram sebanyak 736 konten, Tiktok 193 konten, serta Youtube 551 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, *greetings*, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, *graphic motion*, kultwit, foto dan video.

In 2023, OJK uploaded 1,210 materials to its website, including press releases, data and statistics, regulations, the latest information and other similar materials. OJK also published the following materials in 2023:

a. 54 regulations, consisting of 22 OJK Regulations (POJK) and 32 Circular Letters (SEOJK).
b. 42 draft regulations, consisting of 25 draft POJK and 16 draft SEOJK.

Regarding the dissemination of information via OJK's social media channels (X, Facebook, Instagram, TikTok and YouTube), OJK posted 3,237 types of social media content in 2023, including 870 posts on X, 887 on Facebook, 736 on Instagram, 193 on TikTok and 551 on YouTube. The content posted on OJK's social media channels consisted of educational material and financial education, OJK policies, greetings and OJK's activity agenda in various formats, including infographics, graphic motion, tweets, photos and videos.

Grafik 4.16. Jumlah Konten Media Sosial OJK Tahun 2023
Grafik 4.16. OJK Social Media Content in 2023

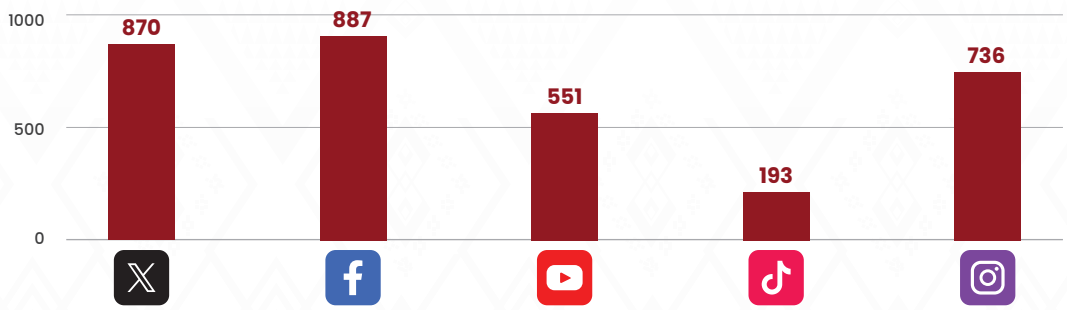

Dari 3.237 konten media sosial yang telah diunggah OJK, 1.115 konten terkait OJK *Wide* (34%), 138 konten Perbankan (4%), 1.101 konten Edukasi dan Pelindungan Konsumen (34%), 298 konten Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (9%), 198 konten Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (6%), 245 konten terkait Audit Internal (8%), 82 konten Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (3%) dan 60 konten Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan *Digital & Asset* kripto (2%), sebagaimana grafik berikut:

Of the 3,237 pieces of social media content posted in 2023, 1,115 related to OJK Wide (34%), 138 to the Banking Industry (4%), 1,101 to Education and Consumer Protection (34%), 298 to the Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange (9%), 198 to the Insurance Industry, Guarantees and Pension Funds (6%), 245 to the Internal Audit function (8%), 82 to Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (3%) and 60 to Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets (2%) as visualised in the following graph:

Grafik 4.17. Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Tahun 2023
Grafik 4.17. Composition of OJK Social Media Content in 2023

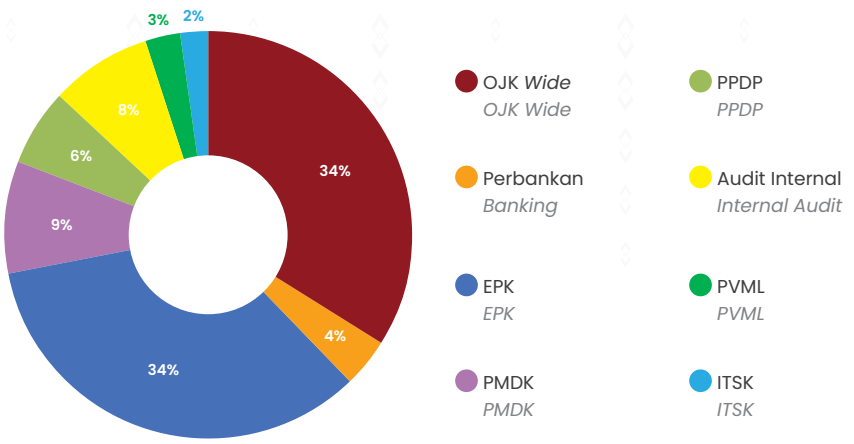

Grafik 4.18. Jumlah *Followers/Subscribers* Media Sosial OJK Tahun 2023
Graph 4.18. OJK Social Media Followers/Subscribers in 2023

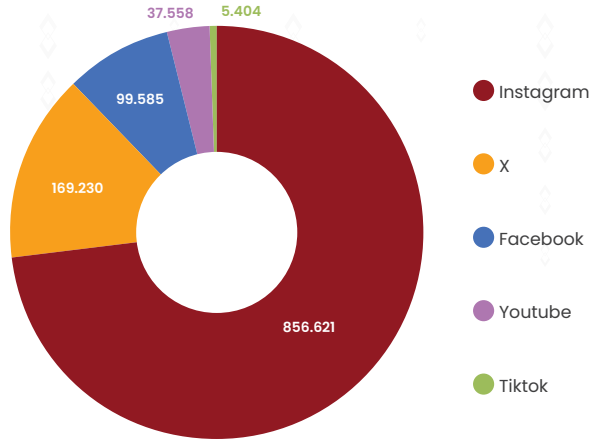

Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari *followers* karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *followers/subscribers* media sosial OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah *followers/subscribers* per 31 Desember 2023 sebagaimana *chart* di bawah ini:

Posts regarding financial education on OJK's social media channels receive a lot of attention, engagement and positive responses from followers because they provide knowledge, understanding and information about the financial services industry, thereby increasing financial literacy. This is also reflected in the growing number of followers and subscribers to OJK's social media channels as of December 31, 2023 as illustrated in the graph below.

2. Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK melayani permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui *minisite e-PPID*. Selama 2023, OJK menerima 612 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat. Materi permohonan informasi publik masih didominasi dengan permohonan informasi terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan sebesar 98% (601 permohonan), serta terkait Perbankan, Industri Keuangan non Bank dan Lain-lain sebesar 2% (11 permohonan). Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Information Services

Seeking to improve public services, OJK serves requests for public information submitted by the public via the e-PPID mini-site. In 2023, OJK received 612 requests for public information submitted by members of the public. Public information requests are still dominated by requests for information relating to the Financial Information Services System (SLIK), accounting for 98% or 601 requests, followed by requests relating to the banking industry, Non-Bank financial industry and others, accounting for 2% or 11 requests. All requests for public information are actioned in accordance with prevailing regulations.

Grafik 4.19. Permohonan Informasi Publik Triwulanan Tahun 2023
Graph 4.19. Total Requests for Public Information in Quarterly 2023

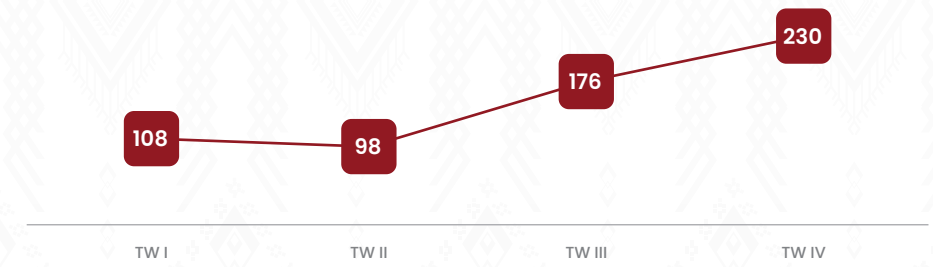

Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di *humas@ojk.go.id* dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama 2023, OJK telah menerima surat elektronik (*email*) sebanyak 12.274 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 12.274 *email* yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan pelindungan konsumen (EPK) sebesar 52% (6.430 *email*) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Kemudian di bidang OJK *Wide* sebesar 32% (3.915 *email*) dengan topik menonjol permintaan data dan *visit* OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang Perbankan sebesar 9% (1.125 *email*); Industri Keuangan Non Bank sebesar 5% (596 *email*); Pasar Modal sebesar 1,8% (189 *email*); dan lain-lain sebesar 0,2% (19 *email*).

In addition, OJK received various information required by the public via electronic mail (humas@ojk.go.id) and via telephone at (021) 29600000 ext. 1200. In 2023, OJK received 12,274 emails concerning requests for information. Of the 12,274 emails received by OJK, most requests for information was related to education and consumer protection, accounting for 52% or 6,430 emails, with the most prominent topics including the legality of FinTech and insurance products, complaints about debt collectors in the FinTech industry, reporting by financial services institutions as well as Bank lending and leasing. Meanwhile, 32% of the emails (3,915) were OJK Wide, predominantly concerning requests for data and OJK visits, job opportunities and apprenticeships, sponsorships as well as requests for resource persons or speakers. OJK also received questions about the banking industry (9% or 1,125 emails), NBFI (5% or 596 emails), capital market (1.8% or 189 emails), and others (0.2% or 19 emails).

3. OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama 2023, OJK TV telah memproduksi 551 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner termasuk 40 *live streaming* dan 123 konten lainnya (*feature & tapping*). Hingga akhir 2023, akun Youtube Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki 37.558 *subscribers*.

3. OJK TV

OJK TV is a communication media that broadcasts OJK policies, programs and activities via OJK's YouTube channel. In 2023, OJK produced 551 pieces of content relating to OJK's core activities involving members of the Board of Commissioners, including 40 live streams and 123 other pieces of content (features and taping). As of the end of 2023, OJK's YouTube channel had 37,558 subscribers.

Grafik 4.20. Jumlah Liputan OJK TV Tahun 2023
Graph 4.20. OJK TV Content in 2023

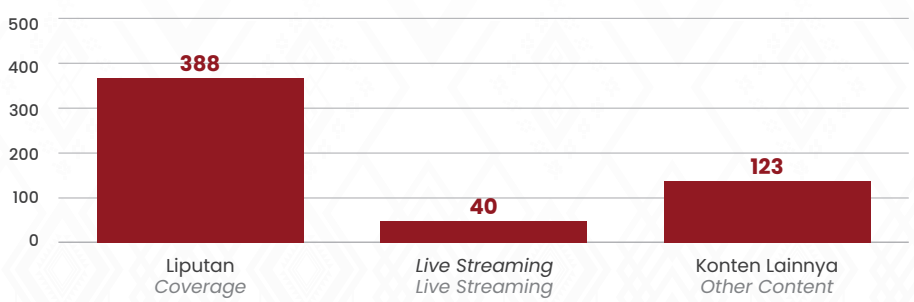

Grafik 4.21. Persentase Sentimen Berita OJK Tahun 2023
Grafik 4.21. Tone of OJK Media Articles in 2023

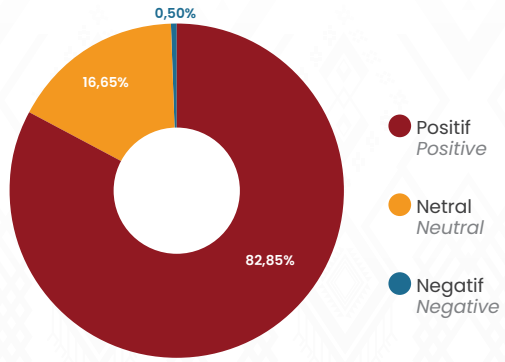

4. Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas

OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media *online*, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial. Pada 2023, total berita mengenai OJK sebanyak 58.817 berita, dengan rata-rata 4.901 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 82,85% (48.731 berita), sementara *tone* netral sebesar 16,65% (9.791 berita) dan *tone* negatif sebesar 0,5% (295 berita).

5. Relasi Media

Jumlah total siaran pers 198, yang terdiri dari:

a. 51 siaran pers OJK *Wide*;
b. 21 siaran pers Perbankan (PBKN);
c. 31 siaran pers Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK);
d. 16 siaran pers Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP);
e. Enam siaran pers Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML);
f. Lima siaran pers Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD);
g. 51 siaran pers Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK); dan
h. 17 siaran pers Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK).

4. Communication Strategy and Community Relations

OJK has quantitative and qualitative analysis programs for each OJK news story published in the mass media and via social media. Analysis is performed by monitoring the tone of news stories about OJK and the financial services industry across 325 major print media outlets, 3,826 online media, 19 national television stations and various social media platforms. In 2023, OJK analysed 58,817 news stories about OJK, averaging 4,901 articles per month. Based on sentiment, a positive tone dominated news articles on OJK in 2023 at 82.85% or 48,731 stories, followed by a neutral tone at 16.65% or 9,791 stories and a negative tone at just 0.5% or 295 news stories.

5. Media Relations

Total 198 press releases on the following topics:

a. 51 press releases on OJK Wide
b. 21 press releases on the Banking Industry (PBKN),
c. 31 press releases on the Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange (PMDK)
d. 16 press releases on the Insurance Industry, Guarantees and Pension Funds (PPDP)
e. 6 press releases on Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions (PVML),
f. 5 press releases on the Financial Sector Technology Innovation Industry, Digital Financial Assets and Crypto Assets (IAKD),
g. 51 press releases on FSP Conduct, Consumer Protection and Education (PEPK), and
h. 17 press releases on the Internal Audit, Risk Management and Quality Control functions (ARK).

OJK juga telah mengeluarkan 11 siaran pers bersama dan 6 siaran pers Satgas PASTI. Kantor OJK di daerah juga mengeluarkan total 193 dari keseluruhan siaran pers KOJK di Daerah. Siaran pers tersebut antara lain sebagai tindak lanjut RDKB sebanyak 144 dan 49 siaran pers kegiatan Kantor OJK di daerah.

OJK also issued 11 joint press releases and 6 press releases from PASTI Task Force. OJK regional offices published 193 press releases, consisting of 144 concerning Monthly Board of Commissioners Meetings (RDKB) and 49 press releases concerning local activities at OJK regional offices.

Grafik 4.22. Jumlah Siaran Pers Tahun 2023
Grafik 4.22. Composition of Press Releases Issued in 2023

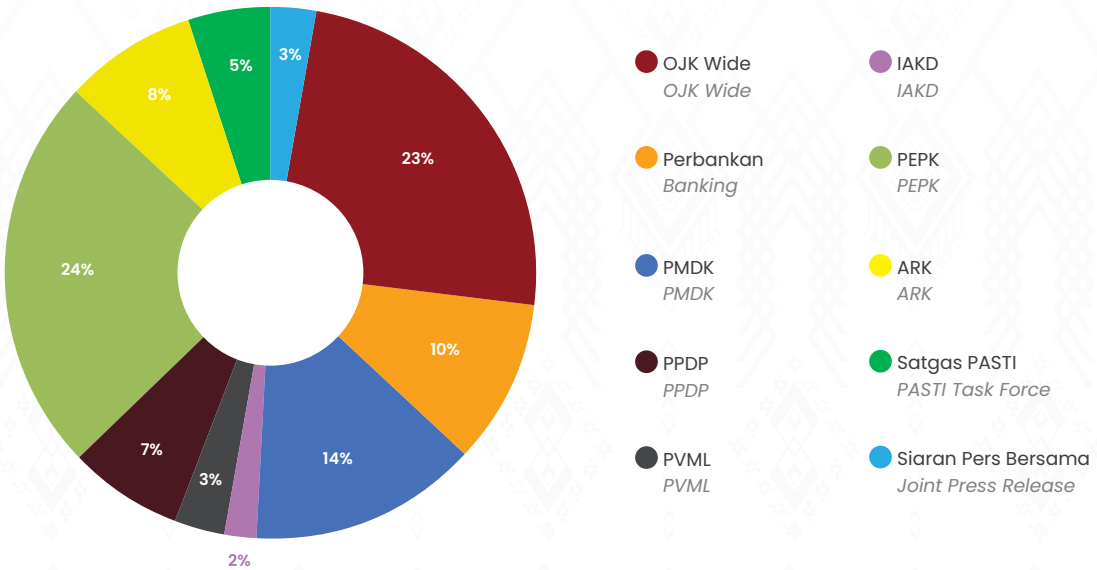

OJK telah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan media, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaran Konferensi Pers dan *Media Briefing* sebanyak 20 kali;
b. Kegiatan bersama media meliputi *Focus Group Discussion* (FGD) ADK OJK dengan Redaktur Media Massa, *Journalist Class* kolaborasi dengan OJK *Institute* dan masing-masing Kantor OJK di Daerah, serta *Media Gathering* Wartawan Media Massa, pertemuan ADK OJK dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, serta dialog ADK OJK dengan pengamat ekonomi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak total 16 kegiatan.
c. Pendampingan kepada pejabat OJK yang menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, *online* dan radio sebanyak 87 kegiatan.
d. Kerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang program dan kebijakan OJK sebanyak 86 kerja sama.

OJK also organised various media-related activities as follows:

a. 20 press conferences and media briefings,
b. 16 joint media activities, including Focus Group Discussions (FGD) with editors from the mass media, journalist classes in collaboration with the OJK Institute and OJK regional offices, media gatherings, meetings between members of the OJK Board of Commissioners and the editors-in-chief of the mass media, as well as dialogue between members of the OJK Board of Commissioners and Economists,

c. 87 Coaching activities for OJK officials as speakers in the national mass media, including television, online and radio,

d. 86 Collaborative activities with the mass media to disseminate information about OJK policies and programs.

IV.7.9. Satgas PASTI
PASTI Task Force

IV.7.9.1. Kegiatan terkait Kelembagaan
Institutional Activities

1. Penguatan Sekretariat dan Anggota Satgas

Pada 2023 telah ditetapkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (KDK). Dalam KDK tersebut terdapat penambahan empat kementerian/lembaga sebagai anggota Satgas, yaitu:

a. Kementerian Luar Negeri RI;
b. Kementerian Hukum dan HAM RI;
c. Kementerian Sosial RI; dan
d. Badan Intelijen Negara RI.

2. Penguatan Sistem Informasi Satgas (SIAWAS)

Pada 2023 telah diselesaikan proses pengembangan dan peningkatan layanan SIAWAS dalam rangka penguatan sistem informasi dengan peningkatan fitur di aplikasi dan meningkatkan kecepatan akses SIAWAS.

1. Strengthening the Secretariat and Task Force Members

In 2023, OJK BoC Decree Number 1/KDK.08/2023 was issued concerning a Task Force to Handle Unlicensed Business Activities in the Financial Sector. The OJK BoC Decree contains four additional government ministries/agencies as members of the Task Force, namely:

a. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia,
b. Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
c. Ministry of Social affairs of the Republic of Indonesia, and
d. Indonesian State Intelligence Agency.

2. Strengthening the Task Force Information System (SIAWAS)

In 2023, OJK completed the process of developing and expanding SIAWAS services to strengthen information systems by increasing the application features and accelerating access to the SIAWAS system.

IV.7.9.2. Kegiatan Pencegahan
Preventative Activities

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pada 2023, Satgas telah melakukan:

a. Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal kepada Civitas Akademika Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal 23 Februari 2023;
b. Menjadi narasumber pada kegiatan seminar dan webinar sebanyak 39 kali; dan
c. Wawancara di media radio dan televisi sebanyak 45 kali.

2. Pemantauan dan Pendataan Potensi Risiko

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendataan risiko, Sekretariat Satgas bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga terkait (terutama Kominfo, terkait Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE) dan Satgas Daerah. Pelaksanaan koordinasi tersebut, antara lain:

a. OJK melaksanakan pertemuan antara Satgas dengan Google Indonesia pada Mei 2023 untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang masih banyak ditemukan di aplikasi Google Play Store. Pihak Google akan menindaklanjuti *concern* Satgas dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak Google International.

1. Public Education and Socialisation Activities

In 2023, the Task Force performed the following activities:

a. Illegal Investment Alert socialisation activities at the Sam Ratulangi University in Manado on 23rd February 2023,
b. Providing speakers at 39 seminars and webinars, and
c. A total of 45 television and radio interviews.

2. Monitoring and Recording Potential Risks

When monitoring risk and collecting data, the Task Force Secretariat collaborates and coordinates with relevant agencies (particularly the Ministry of Communication and Information Technology in relation to Electronic System Operators) along with regional Task Forces. The coordination efforts include:

a. Convening a meeting between the Task Force and Google Indonesia in May 2023 to discuss efforts to prevent and handle illegal online loan apps, which regularly appear on the Google Play Store. Google Indonesia will follow up on the concerns of the Task Force by first holding discussions with Google International.

b. OJK melaksanakan rapat pembahasan pemberantasan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang beredar di *platform* Google Play Store pada Juni 2023. Menindaklanjuti rapat tersebut Sekretariat Satgas meminta pihak Google Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan aplikasi pinjaman *online* secara ilegal dengan cara:
   1) Proaktif melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Satgas atau OJK sebelum suatu aplikasi pinjaman *online* diizinkan di dalam Google Play Store;
   2) Menyempurnakan proses bisnis penerimaan aplikasi penawaran pinjaman *online* di Google Play Store; dan
   3) Memperhatikan ketentuan berlaku mengenai tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.
c. OJK melaksanakan rapat lanjutan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas pemberantasan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang beredar di *platform Google Play Store* pada November 2023. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Satgas PASTI akan menyampaikan daftar aplikasi *peer to peer lending* berizin di OJK sebagai referensi bagi Google untuk menyaring aplikasi-aplikasi pinjaman yang akan beredar di Google Play Store. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut Satgas PASTI telah menyampaikan daftar aplikasi *peer to peer lending* berizin di OJK melalui surat kepada Google Indonesia.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin seperti pinjaman *online* ilegal, investasi dan gadai yang ada di daerah kepada Kepala OJK dan Kepala Kantor Regional OJK.
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di mana pada tahun 2023 Sekretariat Satgas telah melakukan 12 FGD dengan Satgas daerah Sulawesi Utara, Pekalongan, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jakarta, Sumatera Selatan, Kediri, Solo, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, baik melalui *online* atau *offline*.

3. Pelaksanaan Publikasi bagi Masyarakat

Sekretariat Satgas telah melakukan beberapa publikasi tentang bahaya investasi dan pinjaman ilegal pada masyarakat, yaitu:
a. Penyusunan dan pencetakan brosur/*leaflet* SWI untuk acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan tema *Synergy and Innovation of Digital Economy*: *Fostering Growth* di Jakarta pada tanggal 7-10 Mei 2023;
b. Pembuatan video klip edukasi tentang waspada investasi dan pinjaman ilegal dan di-*upload* di Instagram Waspada Investasi. Video klip tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK;
c. Pesan (SMS) *blast* kepada satu juta kontak telepon seluler oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
d. Telah dibuat whatsapp *channel* Satgas PASTI dengan jumlah pengikut (*followers*) sebanyak 353.000;
e. Iklan Layanan Masyarakat pada radio RRI Pro 1, Elshinta dan Prambors yang diperdengarkan di seluruh Indonesia; dan
f. Penyampaian Siaran Pers Satgas PASTI sebanyak 11 kali.

b. Convening a meeting to discuss eradicating illegal online loan apps appearing on the Google Play Store platform in June 2023. The Task Force Secretariat urged Google Indonesia to support government efforts in Indonesia to eradicate illegal online loan apps as follows:
   1) Proactively clarifying and coordinating with the Task Force or OJK before an online loan app is granted access to Google Play Store;
   2) Refining the business process of accepting apps offering online loans via the Google Play Store, and
   3) Complying with applicable laws and regulations concerning the responsibilities of an Electronic Systems Operator.
c. OJK convened a follow-up meeting with Google Indonesia to discuss eradicating illegal online loan apps in the Google Play Store in November 2023. At the meeting, it was agreed the PASTI Task Force would submit a list of OJK-licensed peer-to-peer lending apps as a reference for Google to filter loan apps appearing on the Google Play Store. As a follow-up to the meeting, the PASTI Task Force submitted a list of OJK-licensed peer-to-peer lending apps to Google Indonesia.
d. Heads of OJK offices and regional offices coordinated with regional Task Forces concerning unlicensed business activities in the financial sector, including illegal online loans, investments and pawnbrokers.
e. OJK coordinated with regional task forces through Focus Group Discussions (FGD). In 2023, the Task Force Secretariat arranged 12 online and offline FGDs with regional task forces in North Sulawesi, Pekalongan, west Sumatra, Yogyakarta, Jakarta, South Sumatra, Kediri, Solo, Jambi, West Kalimantan and Central Kalimantan.

3. Publications for the Community

The Task Force Secretariat also issued several publications concerning the dangers of illegal loans and investment to the public are follows:
a. Designing and printing Investment Alert Task Force (SWI) brochures/ leaflets for the Indonesia Digital Economy and Finance Festival (FEKDI) 2023, entitled Synergy and Innovation of the Digital Economy: Fostering Growth in Jakarta from 7-10th May 2023,
b. Creating an educational video clip reminding the public to remain alert of illegal loans and investments, which was uploaded to the Investment Alert Task Force (SWI) Instagram social media channel. The video clip was also distributed to all OJK offices and regional offices.
c. SMS message blast to 1 million mobile phone contacts by the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.
d. Creating the PASTI Task Force WhatsApp channel with approximately 353,000 followers.
e. Public service announcements on the RRI Pro 1, Elshinta and Prambors radio stations with a national audience.
f. Publishing 11 PASTI Task Force press releases.

IV.7.9.3. Kegiatan Penanganan
Handling Activities

1. Rapat Koordinasi

a. Pembahasan PT Multidaya Teknologi Nusantara (*eFishery*)

Satgas PASTI melaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Multidaya Teknologi Nusantara (*eFishery*). Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara (*eFishery*) sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dari Kementerian Perdagangan RI yang disyaratkan untuk melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut telah diputuskan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara *E-Fishery* dapat dinormalisasi dari daftar entitas ilegal dan akan diumumkan melalui siaran pers Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas PASTI). Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil rapat Satgas PASTI telah menormalisasi PT Multidaya Teknologi Nusantara (*eFishery*) dari daftar entitas investasi ilegal melalui pengumuman siaran pers tanggal 4 April 2023.

b. Pembahasan PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks)

Satgas PASTI melaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks). Rapat menghasilkan rekomendasi, antara lain:

1) Tindak lanjut aduan duplikasi nama PT Uang Pintar Indonesia sebagai *developer* aplikasi pinjaman *online* ilegal.
2) PT Uang Pintar Indonesia agar menghentikan kegiatannya sebagai perencana keuangan melalui aplikasi Finetiks karena masih belum memiliki izin yang dipersyaratkan.
3) PT Uang Pintar Indonesia agar berkoordinasi dengan Direktorat Inovasi Keuangan Digital OJK dan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) untuk proses pendaftaran sebagai ITSK.

c. Pembahasan PT Affiliasi Inovasi Indonesia

Satgas PASTI melaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Affilio Inovasi Indonesia (Affilio). Rapat menghasilkan rekomendasi, antara lain:

1) Pihak Afillio wajib melanjutkan dan memenuhi proses perizinan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa Affilio belum beroperasi dan akan beroperasi dan memasarkan produk setelah mendapatkan perizinan;
2) Affilio harus menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, apakah *marketplace* atau penjualan langsung.
3) Satgas akan memonitor *update* proses perizinan dan kegiatan yang dilakukan Affilio secara *online*.

1. Coordination Meetings

a. Discussions with PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery)

The PASTI Task Force held a Coordination Meeting to clarify the activities and legality of PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery). The meeting concluded that PT Multidaya Teknologi Nusantara (E-fishery) already held a SIUPMSE business license issued electronically by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, as required to conduct business activities. Consequently, the decision was made to normalise PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) from the list of illegal entities, which will be announced via a press release issued by the Investment Alert Task Force (now known as PASTI Task Force). After the coordination meeting, PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) was removed from the list of illegal entities, as announced via press release published on 4th April 2023.

b. Discussions with PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks)

The PASTI Task Force held a Coordination Meeting to clarify the activities and legality of PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks). The meeting agreed with the following recommendations:

1) Follow-up actions to complaints concerning duplicate company names (PT Uang Pintar Indonesia) as a developer of illegal online lending apps.
2) PT Uang Pintar Indonesia was instructed to cease activities as financial planners through the Finetiks application due to the lack of a requisite license.
3) PT Uang Pintar Indonesia must coordinate with the Digital Financial Innovation Directorate of OJK and the Indonesia FinTech Association (Aftech) to process the registration as Financial Sector Technology Innovation (ITSK).

c. Discussions with PT Affiliasi Inovasi Indonesia

The PASTI Task Force held a Coordination Meeting to clarify the activities and legality of PT Affiliasi Inovasi Indonesia (Affilio). The meeting agreed the following recommendations:

1) PT Affiliasi Inovasi Indonesia (Affilio) must complete the licensing process by submitting a statement letter that Affilio will only operate and market products after receiving a license.
2) Affilio must determine its business model and activities as a marketplace or direct sales.
3) The PASTI Task Force will monitor the updated licensing process and the activities conducted by Affilio online.

d. Pembahasan PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo)

Satgas PASTI melaksanakan dua kali rapat koordinasi untuk membahas kegiatan PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo). Menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah dilaksanakan Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Satgas telah memblokir situs milik PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) untuk mencegah kerugian masyarakat karena diduga melakukan kegiatan secara ilegal.

e. Pembahasan *Future E-Commerce* (FEC)

Satgas PASTI melaksanakan empat kali rapat koordinasi untuk membahas kegiatan FEC. Menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah dilaksanakan, Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (*Future E-Commerce*/FEC) yang dilakukan oleh Kementerian Investasi RI berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan.

f. Pembahasan Kegiatan Koperasi BLN

Satgas PASTI telah melakukan beberapa kali koordinasi melalui kegiatan rapat antar anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) yang berkantor pusat di Salatiga serta tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menangani kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

2. Pemblokiran

Dalam rangka upaya penanganan terhadap kegiatan tanpa izin di sektor keuangan, Satgas PASTI pada tahun 2023 telah melakukan upaya pemblokiran atas rekening Bank, nomor telepon, kontak whatsapp dan aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman *online* ilegal bersama otoritas/kementerian/lembaga yang berwenang, sebagai berikut:

a. Aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman *online* ilegal berdasarkan temuan Patroli Siber Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Sekretariat Satgas PASTI: 2.248 *link* atau URL.

b. Rekening Bank: 85 akun rekening Bank.
c. Nomor Telepon: 53 kontak nomor telepon.
d. Kontak whatsapp: 309 kontak whatsapp.

d. Discussions with PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo)

The PASTI Task Force held two Coordination Meetings to discuss the activities of PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo). After the meetings, PASTI Task Force issued a press release stating that PASTI Task Force has blocked the website of PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) to prevent public losses given allegations of illegal activities.

e. Discussions with Future E-Commerce (FEC)

The PASTI Task Force held four Coordination Meetings to discuss FEC activities. After the meetings, The PASTI Task Force issued a press release announcing the revocation of the business license of PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC) by the Ministry of Investment of the Republic of Indonesia based on the recommendations of the Ministry of Trade.

f. Discussions with Koperasi BLN

The PASTI Task Force held several coordination meetings among members to discuss the activities performed by Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) headquartered in Salatiga along with follow-up actions to handle the activities undertaken by the cooperative.

2. Blocking

In order to handle unauthorized activities in the financial sector, the PASTI Task Force in 2023 took measures to block Bank accounts, telephone numbers, WhatsApp contacts and applications/content offering illegal online loans/investments in conjunction with the competent unauthorized as follows:

a. Applications/content offering illegal online loans/investment-based on the findings of the Cyber Patrol of the Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia and the PASTI Task Force Secretariat: 2,248 links or URL
b. Bank Accounts: 85 Bank accounts
c. Telephone numbers: 53 contact telephone numbers
d. WhatsApp contacts: 309 WhatsApp contacts

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

V

Pelaksanaan Tata Kelola

Governance

Penguatan tata kelola OJK dilakukan secara intensif melalui pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas serta program penguatan integritas yang bersifat pencegahan, maupun audit. Pengembangan dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan pelaksanaan assurans internal, termasuk pelaksanaan beberapa Forum Governansi dan Penegakan Integritas Internal OJK dan SJK. Sejak 2018-2023, Indeks integritas OJK selalu berada pada tingkat risiko korupsi rendah (>75).

OJK intensified its governance strengthening through risk management and quality control, as well as integrity enhancement programs, including preventive measures and audits. Development was carried out through the refinement of internal assurance implementation provisions, including the execution of several Governance Forums and Internal Integrity Enforcement for OJK and SJK. From 2018 to 2023, OJK's integrity index consistently remained at a low corruption risk level (>75).

V.1 Dewan Audit
Audit Board

Dewan Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisioner bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit memastikan pelaksanaan tugas OJK memiliki kecukupan pengendalian internal dan manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Dewan Audit menjalankan program kerja berdasarkan program kerja strategis OJK lima tahunan serta berbasis risiko dan terintegrasi dengan program kerja Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko OJK. Lima program prioritas Dewan Audit tahun 2023, yaitu Evaluasi dan *monitoring* program transformasi OJK; Mendorong penerbitan pedoman pelaporan berkelanjutan bagi IJK; Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas OJK ke RDK secara periodik; Penguatan pemberian rekomendasi bersifat strategis dan *monitoring* tindak lanjutnya; serta Evaluasi standar, ketentuan dan pedoman terkait audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan penegakan integritas.

The Audit Board, as a supporting organ of the Board of Commissioners, is tasked with evaluating the execution of OJK duties and formulating risk management and audit standards for OJK. The Audit Board is responsible for ensuring that task implementation at OJK has adequate internal controls and risk management, along with compliance to prevailing laws and regulations based on the principles of good corporate governance.

The Audit Board implements a risk-based work program according to the OJK five-year strategic work program, which is integrated with the OJK Internal Audit and Risk Management work program. The five priority programs of the Audit Board in 2023 were: (i) evaluating and monitoring the OJK transformation program; (ii) supporting the issuance of sustainable reporting guidelines for the financial services industry; (iii) reporting OJK task implementation to the Board of Commissioners meeting (RDK) periodically; (iv) strengthening the strategic recommendations given and monitoring the follow-up actions; (v) evaluating the standards, regulations and guidelines concerning the internal audit, risk management and quality control functions, while upholding integrity.

V.2 Audit Internal
Internal Audit

V.2.1. Kegiatan Audit
Audit Activity

1. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit berbasis risiko OJK menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui mekanisme *remote* (audit jarak jauh) dan/atau secara langsung mendatangi ke *auditee*. Pelaksanaan audit dilakukan melalui dua jenis penugasan, yaitu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan Audit Kinerja (AKN). Pada 2023, telah dilaksanakan 22 penugasan audit internal yang terdiri dari 21 penugasan ADTT dan satu penugasan AKN.

2. Pemberian Rekomendasi Audit Internal

Selama 2023, rekomendasi audit internal berfokus pada *rootcause* atas kelemahan pengendalian internal pada satuan kerja untuk meminimalisir potensi terjadinya temuan berulang. Rekomendasi yang diberikan mencakup kebijakan/prosedur, pengelolaan SDM, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan pengendalian internal di berbagai proses bisnis. Pada 2023, telah disepakati 187 rekomendasi audit internal, dengan jumlah rekomendasi selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

1. Implementation of Internal Audits

The risk-based audit implementation by OJK utilizes two approaches: remote mechanisms (remote audits) and/or on-site supervision of the auditee. The audit execution involves two types of assignments: Audits with Specific Objectives (ADTT) and Performance Audits (AKN). In 2023, 22 internal audit assignments were carried out, comprising 21 ADTT assignments and one AKN assignment.

2. Provision of Internal Audit Recommendations

Throughout 2023, internal audit recommendations focused on identifying the root causes of internal control weaknesses within work units to minimize the potential for recurring findings. The recommendations covered policies/procedures, human resource management, information system development, and enhancement of internal controls across various business processes. In 2023, 187 internal audit recommendations were agreed, with a total of recommendations in the last three years, as follows:

Grafik 5.1. Data historis Rekomendasi Audit Internal
Graph 5.1. Historical Data on Internal Audit Recommendations

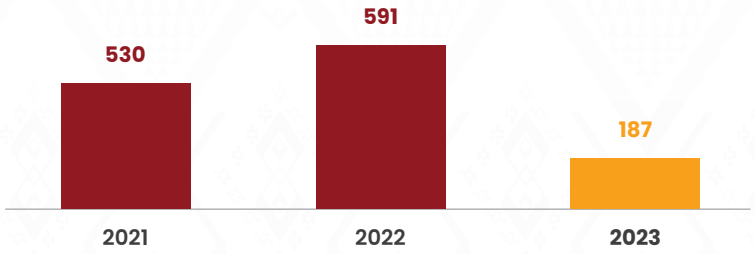

Pada 2023, dari 187 rekomendasi audit, terdapat 113 rekomendasi yang berstatus selesai dan 74 yang berstatus pantau.

In 2023, out of 187 audit recommendations, 113 recommendations were completed and 74 were under monitoring.

3. **Asesmen Maturitas/Kapabilitas Fungsi Audit Internal**
   OJK melaksanakan asesmen dengan PT BDO Konsultan Indonesia menggunakan *tools* Internal *Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan The Institute of Internal Auditors (IIA). Hasil penilaian IACM menyimpulkan tingkat kapabilitas fungsi audit internal berada pada level 4 (*Managed*) dengan nilai 91,46%, menuju level tertinggi, yaitu level 5 (*Optimizing*).

3. ***Maturity/Capability Assessment of the Internal Audit Function***
   OJK conducted an assessment with PT BDO Konsultan Indonesia using the Internal Audit Capability Model (IACM) tools developed by The Institute of Internal Auditors (IIA). The IACM evaluation results indicated that the internal audit function's capability level was at Level 4 (Managed), with a score of 91.46%, approaching the highest level, Level 5 (Optimizing).

Grafik 5.2. Data Historis Peningkatan Nilai Level Maturitas IACM
Graph 5.2. Historical Data on IACM Maturity Level Scores

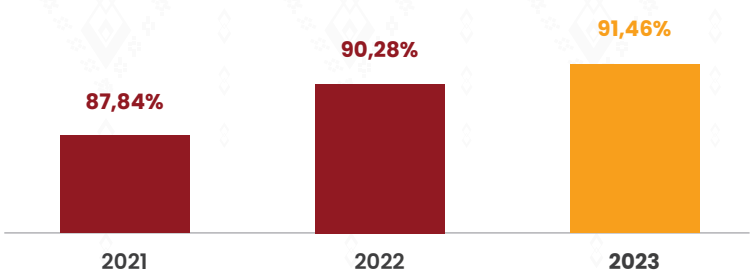

Gambar 5.1. Level Kapabilitas IACM
Figure 5.1. IACM Capability Levels

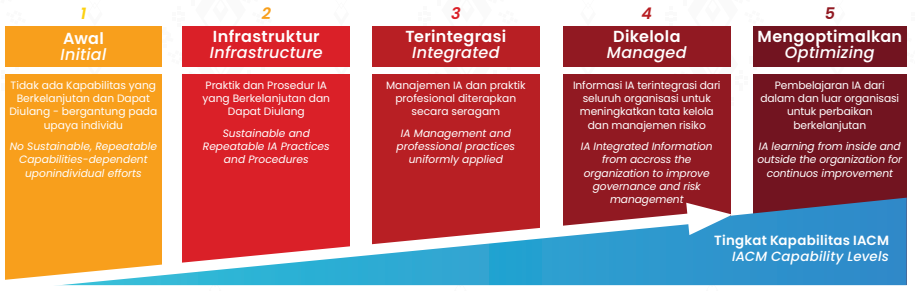

V.2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal, Audit Internal, Reviu Kualitas dan Reviu Manajemen Risiko

Monitoring the Follow-Up Actions to the Recommendations of the External Auditor, Internal Audit, Quality Review and Risk Management Review

1. **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal**
   Audit internal melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas 373 rekomendasi dari 37 Satuan Kerja yang jatuh tempo di 2023. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil asuransi manajemen risiko dan pengendalian kualitas dilakukan atas 46 rekomendasi pada 16 Satuan Kerja.

2. **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal**
   Sepanjang 2023, terdapat 516 rekomendasi hasil pemeriksaan auditor eksternal dengan 401 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai, empat rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, dan dua rekomendasi terkait Bank Indonesia.

1. ***Monitoring Follow-Up on Internal Audit Recommendations***
   Internal audits monitored the follow-up on 373 recommendations from 37 Work Units that were due in 2023. Additionally, follow-up monitoring of risk management assurance and quality control results was conducted on 46 recommendations in 16 Work Units.

2. ***Monitoring Follow-Up on External Auditor Recommendations***
   Throughout 2023, there were 516 recommendations from external auditor examinations. Of these, 401 recommendations were followed up and declared completed, four recommendations could not be followed up, and two recommendations were related to Bank Indonesia.

3. Pendampingan atas Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal

Tugas pendampingan Tim *Liaison Officer* (LO) selama 2023, berupa pendampingan pada:

a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK 2022;
b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal dan Asuransi tahun 2022 s.d. Semester I 2023 pada OJK dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta;
c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perkreditan dan Pembiayaan Sektor Perbankan dan IKNB tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada OJK dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali;
d. Permintaan data/Informasi dari Badan Pemeriksan Keuangan di luar pemeriksaan kepada OJK;
e. Undangan permintaan pemaparan dan diskusi kepada OJK;
f. Pemenuhan permintaan data terkait pemeriksaan pada instansi lain yang membutuhkan koordinasi dengan OJK.

3. Assistance for Examinations Conducted by External Auditors

The tasks of the Liaison Officer (LO) Team during 2023 included assistance with:

a. Examination of OJK's Financial Statements for 2022;
b. Specific Objective Examination of Regulation, Licensing, Supervision, and Consumer Protection in the Capital Market and Insurance Sectors from 2022 to the first half of 2023 at OJK and other related agencies in DKI Jakarta;
c. Specific Objective Examination of the Regulation and Supervision of Credit and Financing Activities in the Banking and NBFI Sectors from 2020 to the first half of 2022 at OJK and other related agencies in DKI Jakarta, Central Java, and Bali;
d. Requests for data/information from the Audit Board of the Republic of Indonesia outside of examinations conducted by OJK;
e. Invitations for presentations and discussions with OJK;
f. Fulfilling data requests related to examinations at other agencies that require coordination with OJK.

V.2.3. Kegiatan Audit Internal Lainnya
Other Internal Audit Activities

Audit Internal juga melaksanakan kegiatan lainnya, di antaranya pendampingan QAR (*Quality Assurance Review*), *Maintenance* ISO 9001, Audit SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan); penyusunan ketentuan internal, yaitu SEDK Audit Internal, Pedoman Opini Audit Internal dan Pedoman Level Temuan; pengembangan sistem informasi dan administrasi aplikasi; penyusunan *Risk Event Database*, *Data Analytic* (logistik dan pengawasan BPR); dan pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor yang bekerja sama dengan instansi serta organisasi profesi terkait.

Internal Audit also conducted other activities, including assistance with Quality Assurance Reviews (QAR), maintenance of ISO 9001 certification, audits of the Anti-Bribery Management System (SMAP), development of internal regulations such as Internal Audit SEDK, Internal Audit Opinion Guidelines, and Finding Level Guidelines, development of information systems and application administration, compilation of a Risk Event Database and Data Analytics (logistics and BPR supervision), and training and competency development for auditors in collaboration with relevant agencies and professional organizations.

V.3 Pengelolaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Risk Management and Quality Control

V.3.1. Manajemen Risiko
Risk Management

1. Pengelolaan Profil Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2023-2027 disusun mengacu pada *Destination Statement* OJK 2022-2027, untuk memastikan sasaran strategis OJK dalam jangka menengah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK tahun 2023-2027 terdiri dari sembilan jenis risiko, yaitu Risiko Pengawasan, Risiko Pengaturan, Risiko Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Risiko Hukum, Risiko Teknologi Informasi, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kecurangan dan Risiko Keuangan.

1. Risk Profile Management

The risk profile of OJK 2023 to 2027 refers to the OJK Destination Statement 2022-2027, to ensure that OJK's medium-term strategic objectives can be achieved more effectively and efficiently. The OJK Risk Profile 2023-2027 consists of nine risk types, namely Supervision Risk, Regulatory Risk, Education and Consumer Protection Risk, Legal Risk, IT Risk, Operational Risk, Reputational Risk, Fraud Risk and Financial Risk.

Selama 2023, pengelolaan risiko dilakukan secara agregasi dan terdapat *concern* perbaikan, antara lain perlunya penyusunan mitigasi yang lebih efektif dan bersifat pengendalian, penetapan IRU yang lebih *leading* dan *assessment* risiko yang lebih *stringent*. Pemahaman dan kesadaran Satuan Kerja dalam mengidentifikasi dan mengelola risikonya merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pelaksanaan mitigasi dengan optimal oleh Satuan Kerja. Pada 2023 seluruh mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi telah seluruhnya direalisasikan.

In 2023, risk management carried out as an aggregate and have concerns emerged about several improvements, including the need for preparing more effective and controlling mitigation arrangements, establishing leading Key Risk Indicators (KRI) and more stringent risk assessments. The understanding and awareness of work units when identifying and managing risk are a key factor in terms of increasing the overall effectiveness of risk management. This is demonstrated by the optimal implementation of mitigation measures by the Task Force. In 2023, all mitigation efforts were focused on business processes, human resources and information technology, which have been realised in full.

2. Reviu Manajemen Risiko

Selama 2023, diterbitkan 214 reviu manajemen risiko meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, perizinan, penyidikan, hukum, edukasi dan pelindungan konsumen, dan manajemen strategis, di mana sebanyak 144 reviu atas materi Rapat Dewan Komisioner atau *Board* Seminar dan 70 reviu tanggapan bersama fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas atas ketentuan strategis OJK. Selain itu, fungsi manajemen risiko terlibat aktif memberikan tanggapan/analisis berbasis risiko dalam setiap pembahasan mengenai pelaksanaan tugas OJK dengan Satuan Kerja.

2. *Risk Management Review*

In 2023, a total of 214 risk management reviews were issued, involving the regulation, supervision, licensing, investigation, legal, education and consumer protection, as well as strategic management functions, with 144 reviews of materials submitted to Board of Commissioners Meetings or Board Seminars along with 70 joint response reviews of the risk management and quality control functions in terms of OJK strategic regulations. Furthermore, the risk management function actively engages in providing risk-based responses/analyses in every discussion regarding OJK's task implementation with the Task Force.

3. Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK

OJK senantiasa memastikan pelaksanaan MKB tidak hanya berfokus pada proses bisnis kritikal OJK melainkan untuk seluruh proses bisnis penting di OJK. Pasca perubahan struktur organisasi OJK pada 2023, prosedur pemulihan proses bisnis oleh seluruh Satuan Kerja OJK dalam Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) dan Manajemen Insiden (MI) masing-masing Satuan Kerja di OJK telah disesuaikan.

3. *OJK Business Continuity Management (BCM)*

OJK constantly ensures that BCM implementation not only focuses on critical business processes but also on all important business processes in OJK. After the recent change in the organisational structure of OJK in 2023, the business process recovery procedures for all work units at OJK within the Business Continuity Plan and Incident Management (IM) were adjusted in each work unit.

Kesiapsiagaan (*table top*) MKB OJK dan penanganan gangguan IT selama 2023 telah dilaksanakan cukup efektif. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan MKB OJK 2023, seluruh satuan kerja Proses Bisnis Kritikal dan Satuan Kerja terkait MKB OJK telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil kesiapsiagaan dan penanganan gangguan IT. Melalui program MKB OJK diharapkan OJK memiliki kesiapan dan kapabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat meskipun dalam kondisi bencana.

The OJK BCM tabletop and handling of IT disruptions during 2023 were implemented effectively. Based on an evaluation of OJK BCM 2023 implementation, all critical work unit business processes and work units relating to BCM have actioned the recommendations for OJK BCM tabletop and handling of IT disruptions. Through the BCM program, OJK is expected to be prepared and capable of providing services to the public in the event of a disaster.

4. Pengembangan Tata Kelola

Pada 2023, OJK melakukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan assurans internal OJK melalui penetapan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEDK) Pedoman Audit Khusus, SEDK Pedoman Audit Internal, SEDK Pedoman Pelaksanaan Analitik Data (*Data Analytics*) dalam Rangka Pelaksanaan Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan Penegakan Integritas di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, telah dilakukan penetapan Laporan Hasil Kajian Penguatan Fungsi Audit Khusus di OJK, Kajian Penguatan Fungsi *Risk Quality Officer* (RQO) di Kantor OJK (KOJK) dan Kajian *Combined Assurance* di OJK.

4. *Development of Governance*

On 2023, OJK improved the regulations for implementing internal assurance through a BOC Regulation (PDK) concerning Strengthening Supervision Quality Control at the Financial Services Authority, BOC Circular Letter (SEDK) concerning Special Audit Guidelines, BOC Circular Letter (SEDK) concerning Internal Audit Guidelines, BOC Circular Letter (SEDK) concerning Data Analytics Guidelines when Implementing the Internal Audit, Risk Management and Quality Control Functions and Upholding the Integrity of the Financial Services Authority. Furthermore, OJK conducted reports regarding a Study on Strengthening the Special Audit Function at OJK, a Study on Strengthening the Risk Quality Officer (RQO) Function at OJK Offices and a Study on Combined Assurance in OJK.

OJK melakukan beberapa Forum Penguatan Governansi dan Penegakan Integritas Internal OJK dan SJK, di antaranya:

a. Forum Rapat Kerja Pengawasan Internal (RKPI), dengan tujuan meningkatkan *awareness* kepala Satuan Kerja di OJK dalam komitmen menjalankan kewajiban dan fungsi terkait *Governance, Risk and Compliance*, serta mengoptimalkan kemampuan mendeteksi dan merespon risiko dan permasalahan proses bisnis di Satuan Kerja.
b. Forum Penguatan Tata Kelola dan Integritas Sektor Jasa Keuangan di Surakarta, untuk meningkatkan sinergi dan *engagement* Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam memperkuat tata kelola dan integritas SJK.
c. Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan Sektor Jasa Keuangan di Yogyakarta, untuk meningkatkan sinergi dan keterikatan pelaku usaha SJK dan pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola dan integritas SJK.

d. Forum Penguatan Audit Internal Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema "Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi" diselenggarakan sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan *stakeholder* terkait.
e. *Risk and Governance Summit* (RGS) dengan tema *"Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper"*, diselenggarakan sebagai media meningkatkan sinergi dan keterikatan LJK dalam memperkuat tata kelola dan integritas SJK.

5. Pengembangan *Data Analytics*

Penerapan *Continuous Audit* dan *Continuous Monitoring* (CACM) menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Data dan hasil analisis CACM memberikan informasi lebih awal atau dalam waktu tertentu terkait penyimpangan yang terjadi (*early warning system*), sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat dengan *coverage* yang lebih luas. Manfaat penerapan CACM bagi OJK, antara lain:

a. Peningkatan tata kelola melalui dukungan data untuk asurans, audit investigasi dan pemeriksaan etik dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku;
b. Penguatan manajemen risiko dengan penyusunan Profil Risiko OJK *Wide* yang lebih efektif; dan
c. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur dan efektif berdasarkan data dan *Insight for Improvement*.

OJK also hosted several Forums on Strengthening Governance and Upholding Internal Integrity at OJK and in the financial services sector as follows:

a. Internal Oversight Working Meeting Forum (RKPI), to raise awareness among work unit leaders in OJK in terms of commitment to the responsibilities and function of GRC, while optimising the ability to detect and respond to business process risks and issues at the work unit level. The forum was attended by all heads of task forces at OJK.

b. Forum on Strengthening Governance and Integrity in the Financial Services Sector in Surakarta, to increase synergy and engagement among financial services institutions, thereby strengthening governance and integrity in the financial services sector.
c. Forum to Strengthen the Governance and Integrity of Financial Reporting in the Financial Services Sector, in Yogyakarta, to increase synergy and engagement between business players in the financial services sector and stakeholders in terms of strengthening governance and integrity in the financial services sector.
d. Forum to Strengthen the Internal Audit Function of the Insurance, Guarantee and Pension Funds Industries as well as Financing Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions, entitled Strengthening the Internal Audit Function in the Digitalisation Era forum was held to increase synergy and collaboration between OJK and financial sector businesses along with other relevant stakeholders.
e. Risk and Governance Summit (RGS), entitled Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper, aimed to increase synergy and engagement among financial services institutions to strengthen governance and integrity in the financial services sector.

5. Development of Data Analytics

The implementation of Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) implementation demonstrates OJK's firm commitment to maintaining good governance and increasing public trust. CACM data and analyses provide an early warning system that enables quicker handling and broader coverage. The benefits of CACM for OJK include the following:

a. Increasing governance through data support for assurance, investigative audits and ethical checks to ensure compliance to prevailing regulations and standards.
b. Strengthening risk management by formulating a more effective OJK-Wide Risk Profile.
c. Supporting a more measured and effective decision-making process based on data and insights for improvement.

Dalam rangka menyajikan data yang komprehensif dan terintegrasi, OJK melakukan pengembangan sistem CACM berupa penambahan tiga aplikasi internal OJK yang diintegrasikan dengan sistem CACM, yaitu Sistem Informasi (SI) Pasar Modal, SI IKNB dan SI *Monitoring* Pasar Modal. Saat ini, CACM telah terhubung dengan 13 Aplikasi di OJK terkait manajemen strategis, layanan konsumen, perizinan hingga pengawasan Perbankan, IKNB dan PM. Selanjutnya, telah disusun skenario untuk melihat anomali yang bersifat *compliance* untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait sebagai upaya peningkatan governansi dan pengendalian internal. Selain itu, untuk merepresentasikan hasil analisis data CACM secara lebih menarik dan mudah dimengerti, telah dilakukan pengembangan *Mock up Dashboard* CACM.

Presenting comprehensive and integrated data, OJK developed the CACM system by integrating three internal applications into the CACM system, namely the Capital Market Information System, NBFI Information System, and the Capital Market Monitoring Information System. Currently, CACM connects with 13 applications in OJK relating to strategic management, consumer services, licensing as well as banking, NBFI and capital market supervision. OJK has also prepared scenarios to review compliance anomalies that must be actioned by the relevant work units as an effort to improve governance and internal control. In addition, OJK has developed a CACM Mock-Up Dashboard to display more interesting and relatable CACM data analysis outcomes.

V.3.2. Program Pengendalian Kualitas
Quality Control

1. Konsultansi
Kegiatan asurans dalam bentuk pemberian saran (advis) ataupun sebagai fasilitator serta pemberian pelatihan. Secara umum, penugasan Konsultansi yang diberikan dibagi menjadi dari empat jenis, yaitu pemberian advis, pelatihan, fasilitator, dan permintaan Satuan Kerja.

2. Reviu
Selama 2023, dilaksanakan lima reviu kualitas, lima reviu *on call*, dua reviu laporan keuangan dengan jumlah 71 temuan dan 122 rekomendasi. Adapun dari rekomendasi tersebut 66 rekomendasi reviu selesai dan 56 bersifat pantau.

3. Penyusunan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK
OJK menyusun PDK tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Penguatan ini dilatarbelakangi oleh perlunya efektivitas pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal dengan fungsi pengendalian kualitas bidang pengawasan.

4. Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
Ruang lingkup *Surveillance* Audit ISO 9001:2015 adalah proses bisnis di Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, WBS dan Program Pengendalian Gratifikasi, serta Fungsi Administrasi.

1. Consultation
An assurance activity in the form of providing advice or training and acting as a facilitator. In general, consultancy assignments are divided into four types as follows advice consultancy, training, facilitator, and Work Unit requests.

2. Review
In 2023, OJK conducted five quality reviews, five on-call reviews and two financial statement reviews, which generated 71 findings and 122 recommendations, of which 66 review recommendations have been actioned and 56 are being monitored.

3. Preparing BoC Regulations on Strengthening the Quality Control of OJK Supervision
OJK prepared BoC Regulations on Strengthening the Quality Control of OJK Supervision. This strengthening was based on the need for effective quality control of banking, financial industry, non-bank and capital market supervision within the quality control function for supervision.

4. Implementation of ISO 9001:2015 - Quality Management Systems
The scope of the Surveillance Audit ISO 9001:2015 includes business processes in the Internal Audit, Risk Management and Quality Control, WBS and Gratification Control Program, as well as the Administration Function.

V.4 Program Penguatan Integritas
Strengthening Integrity

V.4.1. Strategi Anti Kecurangan
Anti-Fraud Strategy

OJK memiliki strategi anti kecurangan yang diatur dalam ketentuan internal OJK dalam bentuk empat pilar penanganan kecurangan secara *end-to-end*, yaitu:

OJK implements an antifraud strategy in accordance with OJK internal regulations in the form of four pillars for the end-to-end handling of fraud as follows:

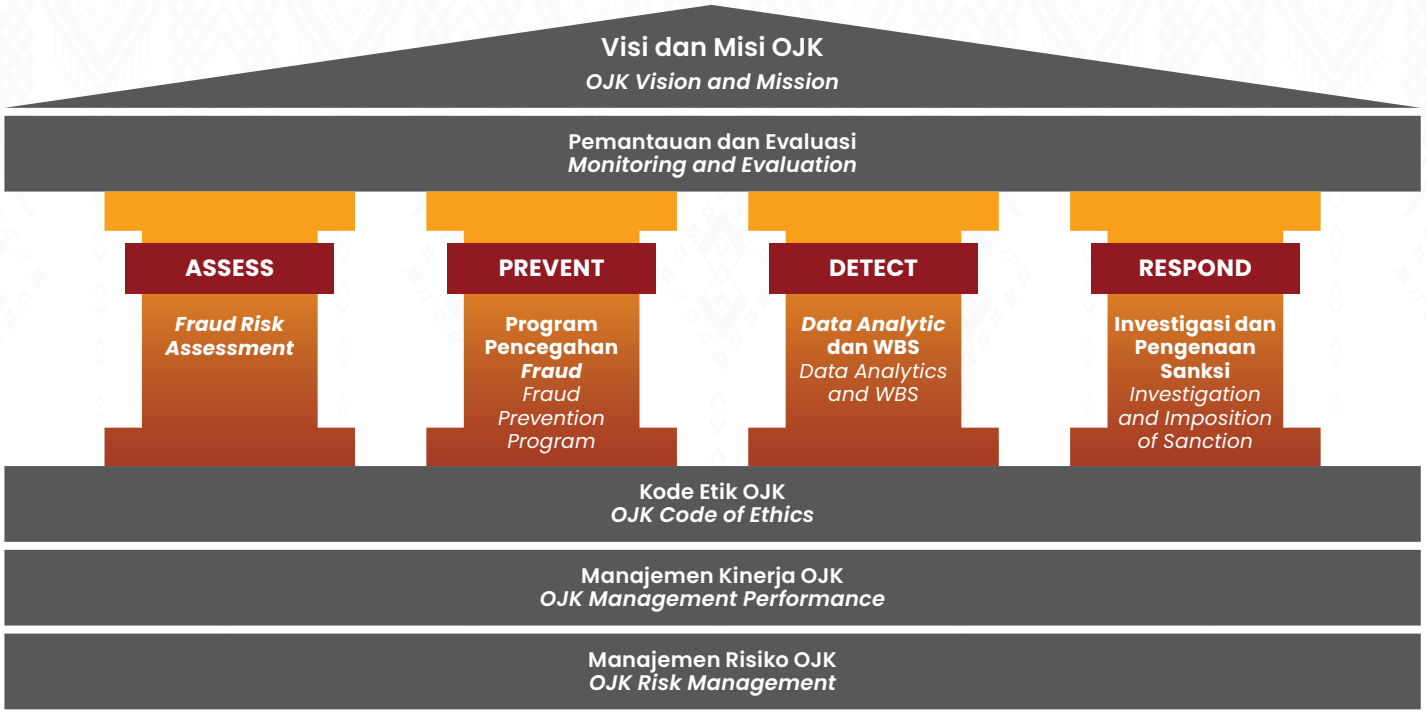

1. Pilar *Assess*, identifikasi risiko kecurangan beserta mitigasinya;
2. Pilar *Prevent*, upaya proaktif meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko kecurangan, seperti pakta integritas, pengendalian gratifikasi, LHKPN, sosialisasi, dan sistem manajemen anti penyuapan;
3. Pilar *Detect*, aktivitas pengendalian dalam mendeteksi indikasi kecurangan; dan
4. Pilar *Respond*, tindak lanjut atas laporan indikasi kecurangan, dalam bentuk investigasi dan pengenaan sanksi.

1. *Assess Pillar, fraud risk identification and mitigation measures;*
2. *Prevent Pillar, proactive efforts to minimise the possibility of fraud risk, such as integrity pacts, gratification control, wealth reports, socialisation, antibribery management system;*
3. *Detect pillar, control activities in detecting indications of fraud; and*
4. *Respond Pillar, actioning indications of fraud through investigations and imposition of sanction.*

V.4.2. Rincian Program Atas Pilar Strategi Anti Kecurangan

Anti-Fraud Strategy Program Pillars

1. ***Fraud Risk Assessment***

   Risiko kecurangan/*fraud* adalah risiko yang dimiliki seorang pejabat atau pegawai OJK dalam melakukan sebuah praktik kecurangan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan jabatan dan posisi pejabat/pegawai OJK tersebut. OJK telah melakukan *Fraud Risk Assessment* (FRA) yang dituangkan dalam bentuk *Fraud Risk Library* (FRL), sebagai referensi penyusunan FRA pada tahun-tahun berikutnya.

2. **Program Pengendalian Gratifikasi**

   Sebagai bentuk pengendalian mutu program pengendalian gratifikasi (PPG), OJK melalui konsultan independen melaksanakan *maturity assessment* PPG setiap tahun. *Maturity level* PPG OJK tahun 2023 dinilai 5 (lima) dari skala 5 (lima) yang artinya berada pada *level Optimized* dan memperoleh peringkat 1 Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga.

3. **Pengelolaan LHKPN**

   Seluruh Insan OJK telah melaporkan LHKPN 2022, yaitu sebanyak 3.446 dari 3.446 wajib lapor.

4. **Diseminasi Program Penguatan Integritas**

   Sesuai dengan komitmen OJK dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai integritas, serta kewajiban OJK untuk menjadi *role model* bagi Industri Jasa Keuangan, mendorong implementasi budaya *anti-fraud* dan menciptakan iklim industri jasa keuangan yang sehat, Insan OJK wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahun sebagai bentuk refleksi komitmen dalam pelaksanaan tugas di OJK. Selain itu, OJK melaksanakan diseminasi penguatan integritas secara berkelanjutan kepada pihak internal maupun eksternal OJK.

   Pada 2023, pelaksanaan kegiatan diseminasi penguatan integritas terdiri dari:
   a. Penguatan integritas kepada pihak Internal OJK, berupa *workshop*, *webinar*, dan sosialisasi melalui berbagai media.
   b. Penguatan integritas kepada pihak Eksternal OJK, antara lain melalui *roadshow* tata kelola di berbagai wilayah kantor OJK, sosialisasi, publikasi dan partisipasi dalam *Integrity Expo* yang diselenggarakan KPK.

5. **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

   OJK berhasil mempertahankan dan memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 SMAP tanpa adanya temuan ketidaksesuaian *(non-conformity)* baik major atau minor dan memperoleh *positive observation* dan praktik terbaik dalam praktik SMAP di OJK.

1. ***Fraud Risk Assessment***

   Fraud risk is the risk of OJK officials or employees committing fraudulent practices, directly or indirectly, due to the position held. OJK conducts fraud risk assessments in the form of a Fraud Risk Library (FRL), as a reference for the formulation of the FRA in subsequent years.

2. ***Gratification Management Program***

   As a measure of quality control for the Gratification Control Program (PPG), the OJK, through an independent consultant, conducts an annual maturity assessment of the PPG. The PPG maturity level of the OJK in 2023 was rated 5 out of 5, indicating an Optimized level and was awarded the top ranking for the National Best Gratification Control Program and the Best Gratification Control Program in the Ministry/Agency category.

3. ***LHKPN Management***

   Every OJK employee submitted their 2022 LHKPN reports, with total of 3,446 out of 3,446 required reporters submitted their reports.

4. ***Dissemination of Integrity Strengthening Programs***

   In alignment with OJK's dedication to upholding and implementing the value of Integrity, and its responsibility to serve as a role model for the Financial Services Industry, promoting an anti-fraud culture, and fostering a healthy financial services industry climate, every OJK employee is required to annually sign the Integrity Pact. This signifies their commitment to their duties at OJK. Additionally, OJK consistently disseminates integrity reinforcement to both internal and external parties.

   In 2023, the activities for integrity strengthening dissemination included:

   a. Strengthen Integrity for internal parties, in formly workshop, webinar, and socialization through various media.
   b. Strengthen integrity for external parties, through governance roadshow in various OJK Office, socialization, publication, and participation in Integrity Expo organized by the Corruption Eradication Commission (KPK).

5. ***Anti-Bribery Management System (SMAP)***

   OJK successfully maintained and expanded the scope of its ISO 37001 SMAP certification without any findings of non-conformity, either major or minor and received positive observations and best practice recognition for its implementation of SMAP.

6. *Whistleblowing* System OJK

OJK memperoleh nilai maturitas *(maturity level)* WBS OJK sebesar 5 dari skala 5, yang artinya berada level *Optimized*. Hasil penilaian ini menunjukan WBS OJK telah dilaksanakan sesuai dengan praktik terbaik, evaluasi dan perbaikan atas pengelolaan WBS OJK dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan sistem yang telah ditetapkan, serta WBS OJK telah menjadi acuan bagi organisasi lain dalam menerapkan WBS.

6. *Whistleblowing System OJK*

OJK attained a maturity level of 5 out of 5 for its Whistleblowing System (WBS), signifying an Optimized level. This assessment result indicates that the OJK WBS has been implemented in accordance with best practices, with continuous evaluation and improvement of WBS management based on the established system. Furthermore, the OJK WBS has become a benchmark for other organizations in implementing their own WBS.

V.4.3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Integrity Assessment Survey (SPI)

OJK mengikuti SPI sejak 2016 untuk mengukur perkembangan kondisi integritas, capaian upaya pencegahan korupsi dan efektivitas upaya penguatan integritas, sehingga upaya-upaya perbaikan dapat berbasis pada persoalan riil. Sejak 2018-2023, Indeks integritas OJK selalu berada pada tingkat risiko korupsi rendah (>75). Tahun 2023, OJK mencapai peringkat 10 secara nasional dengan nilai 83,26 atau di atas rata-rata nasional 70,94.

OJK has participated in the annual Integrity Assessment Survey (SPI) since 2016 to measure the development of integrity conditions, efforts to prevent corruption and the effectiveness of efforts to strengthen integrity, and to ensure improvements can be made based on real issues. From 2018-2023, an Integrity Index for OJK always at a low level of corruption risk (>75). In 2023, OJK achieved a national ranking of 10 with a score of 83.26, surpassing the national average of 70.94.

Grafik 5.4. Tren Nilai SPI OJK
Graph 5.4. OJK SPI Score Trends

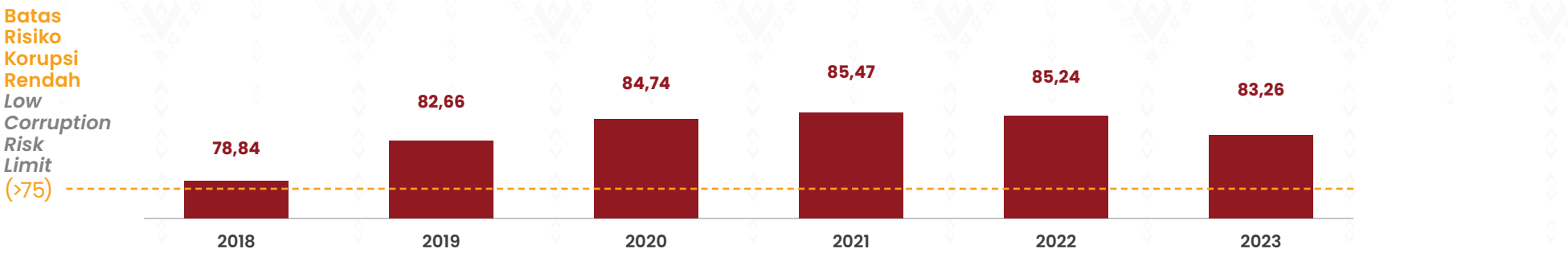

V.4.4. Sistem Informasi GRC Terintegrasi

Integrated GRC Information System

GRC Terintegrasi OJK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis asurans, meningkatkan kualitas dan mengakselerasi hasil pelaksanaan asurans sesuai prioritas kebutuhan OJK dan harapan pemangku kepentingan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang akan berdampak secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis OJK.

Selama 2023, OJK melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan modul Sistem Informasi GRC Terintegrasi, di antaranya pengembangan modul master, modul *Lesson Learned Audit* (LLA), modul GRC *Data Pooling*, modul *dashboard*, modul Audit Internal, modul Tindak Lanjut *Monitoring* Audit Internal, modul *Know Your Satker* (KYS), modul *Report* Operasional, modul *Quality Review*, modul LO Auditor Eksternal dan Modul *Anti Fraud*.

Integrated GRC aims to increase the efficiency and effectiveness of assurance business processes, increase the quality and accelerate the results of assurance implementation in accordance with priority needs and stakeholder expectations, as well as adapt to technological developments that will have a significant impact on the achievement of the strategic goals.

In 2023, OJK developed and refined Integrated GRC information system modules, including development of the master module, Lessons Learned Audit (NLA) module, GRC Data Pooling module, dashboard model, Internal Audit model, Internal Audit Monitoring Follow-Up module, Know Your Work Unit module, Operational Report module, Quality Review module, External Auditor LO module and Anti-Fraud module.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

VI

Penguatan Manajemen Strategis

Strengthening Strategic Management

Kinerja OJK pada 2023 merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga, otoritas dan berbagai pemangku kepentingan. OJK senantiasa melakukan pembenahan internal melalui transformasi organisasi, penguatan SDM, pemenuhan infrastruktur baik gedung kantor maupun penguatan di bidang teknologi informasi.

Dalam penguatan peran OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, dilakukan peran pendampingan terhadap ahli yang dimintakan oleh aparat penegakan hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam UU PPSK terdapat amanat kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diperlukan penyesuaian ketentuan terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dari hasil penyidikan dan gelar perkara OJK telah ditindaklanjuti dan dilimpahkan sesuai Undang-Undang.

OJK's performance in 2023 resulted from hard work and excellent collaboration with Ministries/Agencies, authorities, and various stakeholders. OJK continuously undertook internal improvements through organizational transformation, human resource strengthening, and infrastructure fulfillment, including office buildings and information technology enhancements.

To strengthen OJK's role in law enforcement against financial services sector crimes, OJK provided expert assistance requested by law enforcement agencies, including the police, prosecution, and judiciary. The PPSK Law mandates investigative authority over financial services sector crimes, necessitating adjustments to regulations related to such investigations. The results of OJK's investigations and case reviews have been followed up and referred in accordance with the law.

VI.1 Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
Strategic, Budget and Performance Management

VI.1.1. Peta Strategi 2023
Strategy Map 2023

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan lembaga secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, OJK melaksanakan serangkaian kegiatan mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Sistem MSAK merupakan tahapan formulasi dan pengelolaan strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta evaluasi dan *monitoring* kinerja organisasi. Dalam melaksanakan pengelolaan dan *monitoring* kinerja lembaga, OJK melakukan *cascading* dan pendetailan terhadap Arah Kebijakan Strategis tahunan ke dalam bentuk Peta Strategi dan *scorecard* yang memuat Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan manual yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan eksekusi strategi baik pada level organisasi dan Satuan Kerja. Penyusunan Peta Strategi OJK dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan, program prioritas pemerintah, *Destination Statement* OJK 2022 – 2027, hasil *environmental scanning*, serta masukan pemangku kepentingan baik melalui survei persepsi kinerja maupun pelaksanaan *Focus Group Discussion* bersama dengan asosiasi, pelaku industri, pengamat ekonomi dan media massa. Peta Strategi OJK tahun 2023 menggunakan konsep *balance scorecard* yang dimodifikasi dan terdapat 3 (tiga) perspektif, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif bisnis proses internal dan perspektif *strategic support*. Peta Strategi OJK tahun 2023 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 24 Indikator Utama dengan detail penjabaran peta strategi sebagai berikut:

OJK implements a series of activities in accordance with the Strategic, Budget and Performance Management System (MSAK) to improve transparent institutional management and fulfil the principles of public accountability. The MSAK system helps formulate and manage short and medium-term strategies, align resource allocation, monitor implementation and evaluate strategic achievements. Furthermore, the MSAK system integrates financial aspects into strategy formulation and implementation as well as the evaluation and monitoring of organisational performance. In terms of institutional performance management and monitoring, OJK uses cascading and summarisation of the annual Strategic Policy Direction in the form of a Strategy Map and Scorecards containing the Strategic Targets (SS), Key Performance Indicators (KPI) and manuals used as benchmarks for the success of strategy execution OJK-wide and at the work unit level. The OJK strategy map is prepared considering the direction of organisational development policy and the financial services sector, government priority programs, the OJK Destination Statement 2022-2027, the results of environmental scanning, as well as stakeholder input through performance perception surveys as well as Focus Group Discussions (FGD) with industry associations, industry players, economic observers and the mass media. The OJK Strategy Map in 2023 applies a modified balanced scorecard concept from 3 (three) perspectives, namely the Stakeholder perspective, Internal Business Process perspective and Strategic Support perspective. The OJK Strategy Map in 2023 encompasses 8 (eight) Strategic Targets (SS) and 24 Key Performance Indicators (KPI) as follows:

Grafik 6.1 Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja
Graph 6.1 Strategic, Budget and Performance Management System

Sasaran Strategi dan IKU OJK Tahun 2023
OJK Strategic Targets and KPI 2023

STAKEHOLDER

SS.1 Mengembangkan IJK yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
To develop a healthy and efficient financial services industry based on integrity, while strengthening consumer and public protection

IKU 1.1.	Tingkat kesehatan IJK a. % Jumlah IJK dengan tingkat permodalan dan tingkat kesehatan di atas ketentuan b. % Penyelesaian IJK dalam pengawasan tertentu	100%* sesuai dengan target TKS masing-masing sektor
IKU 1.2.	Efektivitas penerapan strategi penguatan integritas IJK	100%* sesuai dengan target masing-masing bidang
IKU 1.3.	Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas penyelesaian pengaduan SJK	75%
KPI 1.1.	*Soundness of financial services institutions* *a. % of financial services institutions with level of capital and soundness above regulatory threshold* *b. % of financial services institutions completing specific supervision*	*100% on target for each work unit* *100% on target for each sector*
KPI 1.2.	*Effective application of integrity strengthening strategies by the financial services institutions*	
KPI 1.3.	*Compliance of financial services providers regarding complaint settlement in the financial services sector*	*75%*

SS.2 Terwujudnya Pendalaman Pasar serta Peningkatan Literasi dan Inklusi
To realise financial market deepening, while increasing financial literacy and inclusion

IKU 2.1.	Tingkat pendalaman sektor keuangan	100%* sesuai target masing-masing sektor
IKU 2.2.	Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan a. Literasi b. Inklusi	a. 53% b. 88%
KPI 2.1.	*Level of financial sector deepening*	*100% conformity with target of each sector*
KPI 2.2.	*Financial literacy and financial inclusion index* *a. Literacy* *b. Inclusion*	*a. 53%* *b. 88%*

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS.3 Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakkan Hukum terhadap Prinsip Prudential Keterbukaan, dan *Market Conduct*, yang Terintegrasi
To strengthen the regulation, supervision and legal enforcement of prudential principles, disclosure requirements and integrated market conduct

IKU 3.1.	% Penyelesaian penyusunan/penyempurnaan ketentuan/kebijakan prioritas OJK	100% sesuai rencana
IKU 3.2.	% Penyelesaian riset yang mendukung ketentuan/kebijakan dan Kinerja IJK	100% sesuai rencana
IKU 3.3.	% Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan	100% sesuai rencana
IKU 3.4.	% Implementasi penyelesaian dan percepatan penanganan perkara tindak pidana SJK	100% sesuai rencana
KPI 3.1.	*% Completion of OJK priority regulations/ policies formulated/amended*	*100% according to plan*
KPI 3.2.	*% Completion of research to support financial services industry regulation and development*	*100% according to plan*
KPI 3.3.	*% Completion of follow-up recommendations based on results of supervision/inspections*	*100% according to plan*
KPI 3.4.	*% Completion and speed of handling criminal cases in the financial services sector*	*100% according to plan*

SS.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan
To enhance service quality as well as integrated and transparent data management

IKU 4.1.	% Penyelesaian penyederhanaan proses bisnis perizinan dan pelaporan	100% sesuai rencana
IKU 4.2.	% Penyelesaian proses perizinan secara transparan cepat dan terintegrasi	100% (sesuai target rata-rata waktu penyelesaian)
IKU 4.3.	% Penyelesaian pengembangan/ penggunaan data dan informasi yang terintegrasi	100% sesuai rencana
KPI 4.1.	*% Completion of streamlining licensing and reporting business processes*	*100% according to plan*
KPI 4.2.	*% completion of transparent, fast and integrated licensing processes*	*100% according to average completion target*
KPI 4.3.	*% Completion of integrated data and information development/utilisation*	*100% according to plan*

SS.5 Mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan Konsumen
To accelerate financial education, literacy and inclusion activities as well as consumer protection

IKU 5.1.	% Penyelesaian ketentuan/kebijakan edukasi/ literasi/inklusi keuangan dan perlindungan konsumen	100% sesuai rencana
IKU 5.2.	% Optimalisasi program edukasi, literasi dan inklusi keuangan	100% sesuai rencana
IKU 5.3.	% Tingkat Penyelesaian pemeriksaan pengaduan berindikasi Pelanggaran	75%
IKU 5.4.	% Tingkat penyelesaian penanganan entitas illegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI)	85% dari pengaduan
KPI 5.1.	*% Completion of financial education/literacy/ inclusion and consumer protection policies/ regulations*	*100% according to plan*
KPI 5.2.	*% Optimisation of financial education, literacy and inclusion programs*	*100% according to plan*
KPI 5.3.	*% Completion of investigations into complaints indicating violations*	*75%*
KPI 5.4.	*% Completion of handling illegal entities by Investment Alert Task Force (SWI)*	*85% of complaints*

STRATEGIC SUPPORT

SS.6 Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul
Organisational Transformation and Development of HR Excellence

IKU 6.1.	% Implementasi transformasi pengelolaan organisasi dan SDM	100% sesuai rencana
IKU 6.2.	% Pemenuhan *gap* kompetensi pegawai	100% sesuai rencana
IKU 6.3.	% Efektivitas pengelolaan Program Perubahan	100% sesuai rencana
KPI 6.1.	*% Implementation of HR and Organisational Management Transformation*	*100% according to plan*
KPI 6.2.	*% fulfilment of employee competency gap*	*100% according to plan*
KPI 6.3.	*% Effectiveness of change program management*	*100% according to plan*

SS.7 Pengembangan SIstem Infromasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK
IS Development to Support OJK Tasks and Functions

IKU 7.1.	% Implementasi pengembangan, efisiensi dan integrasi aplikasi berdasarkan prioritas	100% sesuai rencana
IKU 7.2.	% Penyelesaian penguatan infrastruktur TI	100% sesuai rencana
KPI 7.1.	*% Implementation of priority-based application development, efficiency and integration*	*100% according to plan*
KPI 7.2.	*% Completion of strengthening IT infrastructure*	*100% according to plan*

SS.8 Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
Enhancing Effective and Efficient Governance

IKU 8.1.	% Implementasi penguatan tata Kelola OJK	100% sesuai rencana
IKU 8.2.	% Implementasi strategi penguatan komunikasi	100% sesuai rencana
IKU 8.3.	% Penguatan kerja sama dan penyelesaian *cross-cutting issues* antar K/L	100% sesuai rencana
KPI 8.1.	*% Implementation of strengthening OJK governance*	*100% according to plan*
KPI 8.2.	*% Implementation of communication strengthening strategy*	*100% according to plan*
KPI 8.3.	*% Strengthening cooperation and completion of cross-cutting issues between government ministries and agencies*	*100% according to plan*

VI.1.2. Capaian Kinerja OJK Tahun 2023

OJK Performance in 2023

OJK senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memperkokoh stabilitas sektor jasa keuangan sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pengukuran kinerja OJK dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk penilaian kuantitatif diukur melalui realisasi atas capaian Peta Strategi OJK 2023, Nilai Kinerja OJK pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 98,80% dari skala 100% (Optimal).

OJK continued improving performance excellence in terms of executing the core tasks and functions of strengthening the stability of the financial services sector to provide a tangible contribution to national economic recovery efforts. OJK performance is measured quantitatively and qualitatively. Quantitatively, OJK performance in 2023 was measured based on the realisation of achievements according to the OJK Strategy Map 2023, receiving a score of 98.80% (optimal).

Capaian kinerja dari perspektif *stakeholder* cukup baik dilihat dari realisasi indeks kesehatan SJK dan indikator pendalaman pasar mencapai target yang diharapkan. Selain itu, sesuai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, capaian indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tercatat masing-masing sebesar 65,43% dan 75,02%. Terkait pendalaman pasar keuangan, OJK mendorong peningkatan penghimpunan dana melalui pasar modal dengan meningkatkan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien pada proses penawaran umum melalui mekanisme *e-IPO* untuk efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk.

From a stakeholder perspective, OJK performance was sound in terms of the health index for the financial services sector and market deepening indicators, which achieved their expected targets. In addition, according to the National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK), the National Financial Literacy Index and National Financial Inclusion Index were recorded at 65.43% and 75.02% respectively. Regarding financial market deepening, OJK fostered fundraising through the capital market by increasing the variety of efficient financial sector products and services in the public offering process via the e-IPO mechanism for equity securities, debt securities and/or sukuk.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK pada perspektif internal *business process* khususnya pada IKU penyelesaian penyusunan pengaturan dan kajian, OJK menerbitkan ketentuan antara lain POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK tentang *Digital Banking*, POJK tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS, POJK tentang Unit Usaha Syariah, POJK tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, POJK tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit/Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship/Suretyship* Syariah, POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK juga melakukan riset kebijakan dalam rangka memperkuat inklusi keuangan dan pendalaman pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengukur kinerja industri jasa keuangan dengan metode *Governance, Risk & Compliance* (GRC), memperkuat ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan determinan preferensi konsumen terhadap adopsi keuangan syariah.

In terms of implementing OJK tasks and functions from an internal business perspective, specifically the corresponding KPI on finalising regulations and research, OJK promulgated strategic regulations, including the OJK Regulation (POJK) on the Implementation of Governance for Commercial Banks, POJK on Digital Banking, POJK on the Development of Quality Human Resources in Rural Banks and Islamic Rural Banks, POJK on Islamic Windows, POJK on Carbon Trading through the Carbon Exchange, POJK on Insurance Products Linked to Credit/Islamic Finance and Suretyship/Islamic Suretyship, POJK on Business Licenses and the Institutional Arrangements of Insurance Companies, Reinsurance Companies and Islamic Reinsurance Companies, and POJK on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. OJK also conducted policy research which included strengthening financial inclusion and market deepening to increase public welfare and prosperity, measuring financial services industry performance based on governance, risk & compliance (GRC), strengthening the ecosystem for battery electric vehicles (BEV), as well as the determinants of consumer preferences when adopting Islamic finance.

Pada aspek pengawasan khususnya penegakan hukum, 18 Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh JPU (P21) dan 19 Berkas Perkara yang disertai dengan penyerahan tersangka/barang bukti. Sebagai upaya pengembangan SDM SJK, tiga SKKNI terkait Pasar Modal, Perasuransian dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan lima KKNI terkait Perasuransian, Pasar Modal, *General Banking*, LKM dan Dana Pensiun telah ditetapkan oleh OJK.

Regarding the aspect of supervision, specifically law enforcement, 18 case files were declared complete by the Public Prosecution Service (P21) and 19 case files were accompanied by the submission of evidence/suspects. Seeking to develop human resources in the financial services sector, three National Competency Standards (SKKNI) concerning the Capital Market, Insurance Industry and Microfinance Institutions were finalised by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, along with five Indonesia Qualification Frameworks (KKNI) for the Insurance Industry, Capital Market, General Banking, Microfinance Institutions and Pension Funds by OJK.

Pada persepektif *strategic support*, OJK melaksanakan penyelesaian dua *cross cutting issues* antara OJK dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan yang diselesaikan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, yaitu Nota Kesepahaman BI-OJK tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pemberian PLJP/PLJPS, serta Nota Kesepahaman (NK) OJK-LPS tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. OJK juga melakukan implementasi strategi komunikasi dan menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

From a strategic support perspective, OJK resolved two cross-cutting issues between OJK with Bank Indonesia and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as a follow-up action to the promulgation of Act Number 4 of 2023, namely the BI-OJK Memorandum of Understanding (MoU) concerning Cooperation and Coordination in the Disbursement of (Sharia-Compliant) Short-Term Liquidity Assistance, and BI-IDIC Memorandum of Understanding (MoU) concerning Cooperation and Coordination in the implementation of OJK and IDIC Duties and Functions. OJK also implemented a communication strategy and became a full member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Dalam rangka penguatan internal, OJK melaksanakan penataan organisasi dan melakukan sejumlah pengembangan kapasitas pegawai. OJK juga membangun infrastruktur dalam mendukung kelangsungan dan keamanan layanan sistem informasi, serta pengembangan aplikasi sistem informasi pelaporan, pengawasan, perizinan SJK dan perlindungan konsumen.

In terms of internal strengthening, OJK pursued organisational restructuring and implemented employee capacity development training. Furthermore, OJK also developed infrastructure to support the continuity and security of information system services, while developing information system applications for reporting, supervision, licensing and consumer protection in the financial services sector.

Untuk penilaian yang bersifat kualitatif, OJK melaksanakan Survei terhadap Tingkat Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK dengan hasil 5,10 dari skala 6 (Baik). Survei ini juga dilakukan untuk mendapat masukan dari pihak eksternal dalam rangka mewujudkan OJK sebagai Lembaga Pengawas SJK yang independen dan kredibel.

In terms of qualitative assessments, OJK conducted a Stakeholder Satisfaction Survey regarding OJK performance, resulting in a score of 5.10 on a scale of 6 (good). The survey was also performed to garner input from external parties towards realising OJK is an independent and credible supervisory institution for the financial services sector.

VI.2 Program Transformasi OJK
OJK Transformation Program

VI.2.1. Pembentukan *Project Management Office* (PMO)
Formation of Project Management Office (PMO)

Dalam rangka merespons kebutuhan transformasi, OJK membentuk *Project Management Office* (PMO). Tugas PMO merumuskan program transformasi OJK mengacu pada *Destination Statement* OJK 2022-2027 dan mendampingi Satuan Kerja mengimplementasikan perubahan. Cakupan kerja PMO meliputi:

1. ***Workstream* Sumber Daya Manusia**
   Workstream ini bertujuan merumuskan transformasi mencakup keseluruhan aspek Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Budaya Kerja OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan *workstream* ini, telah diterbitkan HR *Blueprint* 2023-2028, dengan beberapa program yang bertujuan: (1) meningkatkan *engagement* pegawai, (2) kesetaraan kesempatan bagi pegawai wanita menduduki level pimpinan, (3) komposisi *gender* pegawai, (4) jumlah pegawai yang memiliki *subject matter expert* (SME) di berbagai bidang keuangan tercapai, (5) peningkatan literasi digital, (6) pencapaian *index "great workplace to work for"* sebagai respons atas dampak dominasi generasi milenial dan zilenial dan hal lainnya, termasuk penataan organisasi yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptif.

In response to transformation needs, OJK created a Project Management Office (PMO). Project Management Office is tasked to formulating the OJK Transformation Program in reference to the OJK Destination Statement 2022-2027 as well as providing support to work units implementing change. These scope of work (SOW) of the PMO is as follows:

1. ***Human Resources Workstream***
   This workstream aims to formulate transformation initiatives encompassing all aspects of the OJK organisation, human resources (HR) and work culture. The HR Blueprint 2023-2028 was issued to support the goals of this workstream through several programs formulated to: (i) increase employee engagement, (ii) provide equal opportunities for female employees in leadership roles, (iii) balance the gender composition of employees, (iv) achieve the requisite number of subject matter experts (SME) in various financial fields, (v) increase digital literacy, (vi) achieve the 'great workplace to work for' index reading in response to the domination of Millennials and Zilenials at OJK and others, which includes structuring the organisation to prioritise flexibility and adaptability.

2. *Workstream* Sistem Informasi

OJK merumuskan transformasi sistem informasi dan digitalisasi, termasuk integrasi data dan aplikasi, serta rekomendasi pemanfaatan teknologi dan inovasi sistem informasi. Transformasi ini berfokus pada pengintegrasian fungsi pengelolaan data, statistik dan pelaporan, sambil memberikan penekanan pada penguatan tata kelola data di lingkungan OJK. Diawali dengan pengelolaan data terintegrasi, OJK bertransformasi menjadi organisasi yang berbasis data, sehingga pelaksanaan tugas diperkuat melalui pemanfaatan *advanced data analytics* dan penerapan pengawasan berbasis teknologi (*supervisory technology*).

3. *Workstream* Proses Bisnis

Melalui penerapan *guiding principles* penyederhanaan, koneksitas dan minimalisasi redundansi, OJK merumuskan rangkaian konsep transformasi penyempurnaan proses bisnis perizinan, pengaturan, pengawasan dan penguatan pelindungan konsumen. Selanjutnya, melalui penguatan pengaturan pelaporan Strategi Anti *Fraud* (SAF) terintegrasi, dirumuskan pengembangan Sistem Informasi Pelaku di SJK untuk memfasilitasi pertukaran data pelaku *fraud* di sektor keuangan.

4. *Workstream* Integritas Sistem Keuangan dan Penegakan Hukum

Dalam rangka mendukung tercapainya penegakan hukum yang efektif, efisien, independen dan memberikan efek jera untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang berintegritas, OJK merumuskan program transformasi yang mencakup keseluruhan ekosistem penegakan hukum di OJK, yaitu kerangka hukum yang terintegrasi, integrasi fungsi penegakan hukum, sistem informasi penegakan hukum terintegrasi, strategi transparansi dan publikasi, optimalisasi peran Bidang ARK, serta optimalisasi koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

2. *Information Systems Workstream*

OJK has formulated information system transformation and digitalisation, including data integration and applications, as well as recommendations on the use of information system technology and innovation. Transformation focuses on integrating the data management, statistics and reporting functions, while also strengthening data governance in the OJK environment. Beginning with integrated data management, OJK has transformed into a data-driven organisation, thereby strengthening task implementation through advanced data analytics and the application of supervisory technology (SupTech).

3. *Business Process Workstream*

Based on the guiding principles of streamlining, connectivity and minimising redundancy, OJK formulated a series of transformational concepts to improve the business processes associated with licensing, regulation, supervision and strengthening consumer protection. Furthermore, by strengthening Integrated Anti-Fraud Strategy (AFS) reporting, OJK developed an information system for participants in the financial services sector to facilitate the exchange of data on fraud in the financial sector.

4. *Integrated Financial System and Law Enforcement Workstream*

Seeking to support effective, efficient and independent law enforcement that provides an adequate deterrent and creates a financial services sector with integrity, OJK formulated a transformation program for the entire law enforcement ecosystem at OJK, encompassing an integrated legal framework, integrated law enforcement function, integrated law enforcement information system, a transparency and publication strategy, optimising the role of the internal audit and risk management function, as well as optimising coordination with law enforcement apparatus.

VI.2.2. Program Transformasi Organisasi, Tata Kerja dan Layanan

Organisational, Work Process and Services Transformation Program

Selama tahun 2023, telah dilakukan program transformasi organisasi, tata kerja dan layanan meliputi :

1. Desain organisasi menjadi lebih adaptif, yaitu menjadi organisasi *hybrid* yang merupakan gabungan organisasi struktural dan fungsional.
2. Penguatan fungsi pengawasan sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta penguatan fungsi kemitraan di daerah.
3. Pembentukan koordinasi pengawasan terintegrasi sebagaimana amanat UU PPSK.
4. Pembentukan satuan kerja edukasi sektor syariah.
5. Transformasi organisasi pada Kantor OJK di daerah dengan melengkapi fungsi penyidikan SJK, pengawasan perilaku PUJK dan penguatan fungsi penanganan kegiatan usaha di sektor keuangan tanpa izin.
6. Pembentukan *Central Data Office*.
7. Konsep pola kerja fungsional, program *Work from Anywhere* (WFA) dan *Flexible Office Space* (FOS).
8. Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan Informasi bagi Investor Luar Negeri (IRU).

In 2023, OJK implemented a transformation program focusing on the organisation, work processes and services as follows:

1. *A more adaptive organisational architecture as a hybrid organisation, combining structural and functional organisation.*
2. *Strengthening the supervisory function for the capital market, insurance industry, pension funds, financing institutions and other financial services institutions, while strengthening the regional partnership function.*
3. *Establishing integrated supervisory coordination as mandated by the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act).*
4. *Forming a work unit on Islamic sector education.*
5. *Organisational transformation at OJK regional offices by complementing the investigation function, supervision of FSP conduct, and strengthening the handling of unlicensed business activities in the financial sector.*
6. *Forming a Central Data Office.*
7. *Implementing functional working patterns, such as Work from Anywhere (WFA) and Flexible Office Space (FOS).*
8. *Forming a Special Information Services Work Unit for the Investor Relations Unit (IRU).*

VI.2.3. Program Transformasi Sumber Daya Manusia
HR Transformation Program

Selama tahun 2023, telah dilakukan program transformasi sumber daya manusia meliputi:

1. ***Talent Management* OJK**
   Untuk mendukung suksesi kepemimpinan yang baik, program *Talent Pool* direalisasikan dengan membentuk *Senior Leader Talent Pool* (SLTP) dan *Emerging Leader Talent Pool* (ELTP). SLTP difokuskan dalam bentuk pengembangan kandidat jabatan strategis di OJK dalam jangka panjang. ELTP merupakan sarana mempersiapkan kader pimpinan dari level jabatan Kepala Subbagian sampai dengan level Deputi Direktur melalui seleksi dan pendidikan, disertai kesempatan promosi.

2. **Peningkatan Peran wanita sebagai pemimpin**
   Program ini melengkapi kekayaan intelektualitas di level pimpinan OJK sehingga melengkapi dengan perspektif dan pandangan yang berbeda dalam proses penyusunan dan pembuatan keputusan atau kebijakan.

3. ***Tour of Duty* (ToD)**
   Program ini memberikan kesempatan bagi pegawai menghilangkan kejenuhan terhadap suatu pekerjaan rutin, baik dari sisi kompetensi pekerjaan maupun *soft skill*. Pegawai yang melaksanakan ToD akan memiliki pengalaman dan atmosfir bekerja di bidang yang berbeda dan membentuk pribadi pegawai lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

4. **Program Merdeka Belajar**
   Program ini memfasilitasi kesempatan pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri melalui Aplikasi *Learning Management System*. OJK juga mempersiapkan kerja sama dengan *Massive Open Online Courses* untuk memperkaya materi pengembangan pegawai.

5. ***Subject Matter Expert* (SME)**
   Adanya masing-masing SME di bidang agar pelaksanaan tugas menjadi berkualitas dan kebijakan OJK menjadi tepat sasaran dalam memberikan dampak positif bagi masing-masing industri keuangan. Program ini diinisiasi melalui pembentukan jalur karir keahlian sebagai upaya yang dilakukan secara spesifik dan sistematik dalam rangka pembentukan pegawai yang ahli dalam bidangnya.

6. ***Employee Value Proposition* (EVP)**
   Bertujuan agar OJK memiliki *competitive advantage* sebagai tempat bekerja pilihan terbaik bagi talenta terbaik bangsa dan memastikan *engagement* pegawai dalam memberikan kontribusi bagi negara.

7. **Sistem Kepangkatan (*Person Grade*)**
   Program ini diperlukan dalam upaya menciptakan talenta insan OJK yang unggul dan selaras dengan strategi SDM OJK jangka panjang. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan implementasi *dual grading system* dalam manajemen SDM, mencakup *job grade* untuk jabatan yang diduduki dan person *grading* untuk sistem kepangkatan.

In 2023, OJK implemented the HR transformation program as follows:

1. ***OJK Talent Management***
   Supporting a seamless leadership succession, OJK realised a talent pool program by creating a Senior Leader Talent Pool (SLTP) and Emerging Leader Talent Pool (ELTP). SLTP focuses on developing candidates for strategic positions at OJK in the long term. Meanwhile, ELTP prepares the leadership cadre, from subdivision heads to deputy directors, through selection and education, accompanied by promotion opportunities.

2. ***Increasing the Role of Women as Leaders***
   This program complements intellectual property at the OJK leadership level to offer different perspectives and views in the decision and policymaking processes.

3. ***Tour of Duty (ToD)***
   This program provides an opportunity for employees to relieve the monotony of routine work, in terms of hard skills and soft skills. Through the ToD program, employees gain the experience and atmosphere of working in different fields, thereby moulding agile and resilient personnel with adaptability to change.

4. ***Independent Learning Program***
   This program provides an opportunity for employees to develop competencies independently through the Learning Management System (LMS) application. OJK has also prepared cooperation with Massive Open Online Courses (MOOCs) to enrich the employee development material.

5. ***Subject Matter Experts (SME)***
   Deploying Subject Matter Experts (SME) in the field ensures higher quality implementation of tasks and optimal OJK policies that have a positive impact on the financial industry. This program was initiated through the formation of expert career paths as a specific and systematic effort to create employees who are experts in their respective fields.

6. ***Employee Value Proposition (EVP)***
   Aims to ensure OJK maintains competitive advantage by providing the best workplace to attract the very best talent nationally and increase employee engagement as a tangible contribution to the country.

7. ***Person Grade System***
   This program was necessary to create talent excellence in line with the long-term HR strategy of OJK. To that end, a dual grading system was needed for HR management, encompassing a job grade for the position occupied and person grading for the Person Grade System.

VI.2.4. Program Transformasi Budaya Kerja
Work Culture Transformation Program

Selama tahun 2023, telah dilakukan program transformasi budaya kerja yaitu *ONE OJK*. Program ini diinisiasi untuk mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan melalui beberapa aktivitas kunci, antara lain pelaksanaan *Tour of Duty* antar bidang, *Talent Pool* dengan metode *cross-mentoring* dan integrasi proses bisnis ke dalam satuan kerja terintegrasi. Program ini bertujuan mengurangi *silo mentality* di OJK akibat latar belakang organisasi dan juga pemisahan kewenangan pelaksanaan tugas per bidang. Internalisasi Perilaku Kunci Proaktif, Kolaboratif dan Bertanggung Jawab sebagai proses internalisasi budaya pegawai dalam bekerja dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

In 2023, OJK implemented a work culture transformation program, known as ONE OJK. The program was initiated to prioritise the values of unity and oneness through several key activities, including the Tour of Duty, a Talent Pool enriched through cross-mentoring methods, as well as integrating business processes into integrated work units. This program aims to reduce the silo mentality at OJK due to the nature of the organisation and also the separation of authority for task implementation in each sector. Internalisation of the key behaviours (Proactive, Collaborative and Responsible), as a work culture internalisation process, is pursued directly and indirectly.

VI.2.5. Program Transformasi Pengelolaan Data Terintegrasi
Integrated Data Management Transformation Program

Selama tahun 2023, telah dilakukan program transformasi pengelolaan data terintegrasi meliputi:

1. **Pembentukan OJK *Central Data Office* (OCDO)**
   OJK membentuk OCDO untuk mengakselerasi integrasi data pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi, serta memperkuat fungsi pelindungan konsumen sebagaimana mandat UU PPSK. Pembentukan OCDO merupakan langkah strategis mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data pelaporan sektor jasa keuangan dan data internal satu pintu.

2. **Transformasi Pelaporan dan Sistem Pelaporan**
   OJK berkomitmen memfasilitasi pelaporan yang lebih efisien bagi sektor jasa keuangan di Indonesia melalui penyederhanaan laporan yang redundan atau tumpang tindih. OJK juga fokus pada upaya penataan data di sektor jasa keuangan dan penyederhanaan sistem pelaporan melalui integrasi aplikasi pelaporan dan implementasi *Single Sign On* (SSO). Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam optimalisasi pengawasan sektor jasa keuangan dan menyempurnakan sistem pelaporan guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di sektor keuangan.

3. **Penguatan Keamanan Data (*Data Security*)**
   Dalam upaya menciptakan sistem informasi yang terpercaya di era digital dan mendukung implementasi Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), OJK memperkuat pengelolaan keamanan data dengan manajemen *data security* yang tepat. OJK memprioritaskan penggunaan teknologi enkripsi untuk data dan informasi berharga dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dikelola dalam lingkup kerjanya dan memberikan jaminan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa data mereka aman dari ancaman siber.

In 2023, OJK implemented an integrated data management transformation program as follows:

1. ***Formation of OJK Central Data Office (OCDO)***
   OJK formed the OCDO to accelerate regulatory and supervisory data integration in the financial services sector, while strengthening the consumer protection function as mandated by the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act). Forming the OCDO was a strategic measure for one-stop collecting, managing and analysing reporting data in the financial services sector as well as internal data.

2. ***Reporting and Reporting System Transformation***
   OJK is committed to facilitating more efficient reporting in Indonesia's financial services sector by reducing redundant or overlapping reporting. OJK is also focused on efforts to structure data in the financial services sector and streamline the reporting system through integrated reporting applications and the implementation of Single Sign On (SSO). These measures are part of the OJK strategy to optimise oversight in the financial services sector and refine the reporting system to strengthen transparency, accountability and good governance in the financial sector.

3. ***Strengthening Data Security***
   Seeking to create a trusted information system in the digital era and support implementation of the Personal Data Protection Act (PDP Act), OJK strengthened data security management. OJK prioritises the use of encryption technology for sensitive data and information to maintain data integrity and confidentiality in the work environment and provide assurance to the public and stakeholders that their data is protected from cyber-attack.

VI.2.6. Program Transformasi Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Use of Technology and Innovation Transformation Program

Selama tahun 2023, telah dilakukan program transformasi pemanfaatan teknologi dan inovasi meliputi:

1. **Indonesian *Financial Services Registry* (IFSR)**
   OJK memperkenalkan IFSR, sebuah *minisite* yang akan mempercepat, mengintegrasikan dan menyediakan informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan produk di sektor jasa keuangan secara efisien kepada masyarakat. *Minisite* ini menjadi portal unggulan dan inisiatif "*one-stop service*" yang menunjukkan komitmen untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, serta mencerminkan perhatian serius terhadap kebutuhan konsumen.

2. ***Sentiment Analysis* dalam Mendukung Pengawasan Berbasis Teknologi**
   OJK mengembangkan *sentiment analysis tool* sebagai alat pendukung pengawasan berbasis teknologi (*supervisory technology*) yang mempermudah penilaian risiko reputasi terhadap industri jasa keuangan. *Tool* analisis sentimen ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melakukan pencarian data dari media sosial dan portal berita *online*, serta menerapkan *machine learning* dalam analisis teks.

3. **Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi Pelaku SJK**
   OJK memiliki komitmen memperkuat integritas sektor jasa keuangan yang aman dan terpercaya melalui pertukaran dan diseminasi *data fraud*. Hal tersebut dilakukan melalui pelaporan Strategi Anti *Fraud* yang wajib dilakukan oleh seluruh sektor di bawah pengawasan OJK. Setelah dilaporkan, data yang dihasilkan akan dikumpulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyimpan, mengelola dan berbagi informasi terkait pelaku kejahatan keuangan, modus operandi, serta tren *fraud* yang terjadi di sektor jasa keuangan.

4. **Pengembangan *Dashboard* Perencanaan Strategis**
   Untuk meningkatkan tata kelola yang baik, OJK melaksanakan manajemen data internal yang mencakup data sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, profil risiko dan pencapaian indikator kinerja utama OJK. Manajemen data ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data internal. OJK juga mengembangkan *dashboard* perencanaan strategis yang menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan tata kelola.

In 2023, OJK implemented the use of technology and innovation transformation program as follows:

1. ***Indonesian Financial Services Registry (IFSR)***
   OJK introduced the IFSR registry as a minisite to accelerate, integrate and provide information on financial service providers and products in the financial services sector efficiently to the public. The minisite provides a one-stop service that demonstrates OJK's commitment to adopting international best practices from other countries, while also reflecting the serious attention placed on consumer needs.

2. ***Sentiment Analysis Supporting Supervisory Technology***
   OJK developed sentiment analysis tools to support supervisory technology (SupTech) that simplifies assessing reputational risk in the financial services industry. The sentiment analysis tools leverage technology to increase supervisory effectiveness by analysing data from social media and online news portals, while applying machine learning to text analysis.

3. ***Development of Information System Architecture for Players in Financial Services Sector***
   OJK is committed to strengthening the integrity of a safe and trusted financial services sector through the exchange and dissemination of fraud data. This is achieved through mandatory Antifraud Strategy reporting in all sectors under the supervision of OJK. Once reported, the data is collected and disseminated through a financial system for actors in the financial services sector that functions as a platform to store, manage and share information on perpetrators of financial crime, different modus operandi and emerging fraud trends in the financial services sector.

4. ***Development of Strategic Planning Dashboard***
   OJK implements internal data management, encompassing HR data, financial data, procurement data, risk profiles and KPI data, to enhance good governance. Data management aims to ensure transparency, accuracy and efficiency in terms of internal data management. OJK also developed a strategic planning dashboard as a critical element of data and governance driven decision-making.

VI.2.7. Program Transformasi Penguatan Pelindungan Konsumen Sektor Keuangan di Indonesia

Transformation Program for Strengthening Financial Sector Consumer Protection in Indonesia

Sebagaimana kebutuhan perlindungan konsumen di sektor keuangan Indonesia dan berdasarkan arahan Dewan Komisioner OJK 2022-2027, OJK merumuskan pengembangan Sistem Informasi Pelaku di SJK untuk memfasilitasi pertukaran data pelaku *fraud* di sektor keuangan. Data pelaku *fraud* akan tersedia dan dapat diakses oleh Lembaga Jasa Keuangan yang bersumber dari laporan kejadian *fraud* pada saat pelaporan Strategi Anti *Fraud*. Bersama Satuan Kerja pengaturan di bidang, pelaporan Strategi Anti *Fraud* yang semula hanya berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan di Bidang Perbankan, diakselerasi untuk dapat diterapkan bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan.

Consistent with the need for consumer protection in Indonesia's financial sector and based on the instructions of the OJK Board of Commissioners 2022-2027, OJK developed a financial system for actors in the financial services sector to facilitate fraud data exchange in the financial sector. Fraud data that originates from fraud incident reports as part of antifraud strategy reporting is provided by and accessible to financial services institutions. In conjunction with the appropriate regulatory work units, antifraud strategy reporting that was previously only implemented by banking institutions has been expanded to all financial services institutions.

VI.2.8. Program Transformasi Penyempurnaan Proses Bisnis Perizinan

Licensing Business Process Transformation Program

Proses perizinan akan dilakukan penyempurnaan melalui pengklasifikasian dan penyederhanaan proses administratif perizinan dari masing-masing bidang disertai dengan penyempurnaan Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi (SPRINT). Penyempurnaan proses bisnis perizinan lainnya dilakukan juga terhadap lembaga penunjang sektor keuangan, khususnya proses pendaftaran/pelaporan AP/KAP, yang semula diproses secara terpisah di masing-masing bidang, menjadi satu pintu dalam rangka standardisasi pelayanan termasuk peningkatan standar kualitas.

The licensing process will be refined through the classification and streamlining of the administrative process in each sector, together with refining the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT). The licensing business process for supporting institutions in the financial sector was also streamlined, specifically the reporting/registration process for public accountants and public accountant offices, by integrating previously separate processes under one roof to standardise services and increase quality standards.

VI.2.9. Program Transformasi Penguatan Fungsi Penegakan Hukum yang Terintegrasi

Transformation Program for Strengthening Integrated Law Enforcement Function

Dalam rangka meningkatkan integritas sektor jasa keuangan, OJK menguatkan *enforcement appetite* menjadi lebih tegas dan konstruktif. Dengan penguatan tersebut diharapkan OJK mampu mendeteksi/mencegah pelanggaran secara lebih dini dan melakukan penegakan hukum secara efektif, proporsional dan dapat memberikan efek jera, antara lain melalui penyempurnaan pedoman terkait penegakan hukum yang terintegrasi. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan strategi transparansi dan publikasi penegakan hukum dan koordinasi di bidang penegakan hukum. Untuk memastikan penerapan program transformasi penguatan fungsi penegakan hukum berjalan dengan konsisten, OJK mengoptimalkan peran audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas terutama terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan.

OJK strengthened its enforcement appetite to be firmer and more constructive in order to increase financial services sector integrity. The program is expected to help OJK detect/prevent violations early and apply effective and proportional enforcement as a deterrent by refining the guidelines concerning integrated law enforcement, among others. Furthermore, OJK honed its law enforcement transparency and publication strategy as well as coordination in the law enforcement space. Meanwhile, OJK optimised the role of its internal audit, risk management and quality control functions, particularly in terms of acting on supervision outcomes to ensure the consistent application of the transformation program for strengthening the integrated law enforcement function.

VI.3 Hubungan Kelembagaan dan Kerja Sama Domestik
Institutional Relations and Domestic Cooperation

Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademik dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama tahun 2023, OJK telah melakukan kerja sama sebanyak 36 kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama beserta turunannya, seperti Kesepakatan Bersama, keputusan bersama dengan kementerian/lembaga/universitas dengan rincian, sebagai berikut:

Domestic Cooperation

Establishing and maintaining institutional relationships with government ministries, public institutions, academic institutes and business associations, OJK actively hosts institutional activities with the aim of establishing strategic cooperation that can support OJK achievements moving forward. In 2023, OJK implemented 36 collaborations in the form of Memorandums of Understanding (MoU) and Cooperation Agreements (PKS), along with follow-up agreements, such as joint agreements and joint decrees with government ministries, agencies and universities, recapitulated as follows:

	Kerja Sama Domestik ***Domestic Cooperation***
1	Nota Kesepahaman dengan Universitas Riau perihal Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the University of Riau concerning Implementation of the Higher Learning Tri Dharma, Financial Services Sector Development, Increasing Financial Education and Financial Inclusion, as well as Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector*
2	Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perihal Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan Peningkatan Efektivitas Tata Kelola; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Finance and Development Supervisory Agency concerning Coordinated Financial Services Sector Supervision and Increasing Governance Effectiveness*
3	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara perihal Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of State-Owned Enterprises on Strengthening the Duties, Functions and Authority of the Ministry of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority (OJK)*
4	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of the Environment and Forestry on Increasing Coordinated Task and Function Implementation at the Ministry of the Environment and Forestry and Financial Services Authority (OJK)*
5	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial perihal Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Social Affairs concerning Task and Function Implementation Synergy*
6	Nota Kesepahaman Multilateral bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan perihal Kerja Sama Dan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra; *Multilateral Memorandum of Understanding (MoU) with the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of State-Owned Enterprises, Bank Indonesia, Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) concerning Cooperation and Coordination to Promote the Use of Local Currency Transactions (LCT) between Indonesia and Trading Partners*
7	Nota Kesepahaman bersama LPS perihal Koordinasi dan Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) concerning Coordination and Cooperation in the Implementation of Duties and Functions at the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)*
8	Nota Kesepahaman bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka perihal Koordinasi Pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Gerakan Pramuka; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Pramuka Scout Movement of Indonesia concerning Coordinated Financial Education to Increase Financial Literacy and Inclusion through the Scout Movement*
9	Nota Kesepahaman bersama Bank Indonesia perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah; *Memorandum of Understanding (MoU) with Bank Indonesia concerning Cooperation and Coordination in the Disbursement of Short-Term Liquidity Assistance for Conventional Commercial Banks and Sharia-Compliant Short-Term Liquidity Assistance for Islamic Banks*

	Kerja Sama Domestik *Domestic Cooperation*
10	Nota Kesepahaman bersama Ombudsman RI perihal Koordinasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait Sektor Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Ombudsman of the Republic of Indonesia concerning the Coordinated Provision of Public Services relating to the Financial Services Sector*
11	Nota Kesepahaman bersama Kementerian Koordinator Perekonomian perihal Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Coordinating Ministry for Economic Affairs concerning Task and Function Synergy between the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority (OJK)*
12	Nota Kesepahaman bersama Kementerian Kesehatan perihal Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan; *Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Health concerning Task and Function Synergy between the Ministry of Health and the Financial Services Authority (OJK)*
13	Nota Kesepahaman bersama Kejaksaan RI perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia. *Memorandum of Understanding (MoU) with the Public Prosecution Service on Strengthening Coordinated Implementation of the Tasks, Functions and Authority of the Financial Services Authority (OJK) and Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia*
14	Perjanjian Kerja Sama bersama Kementerian Dalam Negeri Dukcapil perihal Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Otoritas Jasa Keuangan; *Cooperation Agreement (PKS) with the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs concerning Use of Citizenship Identity Numbers (NIK), Population Data and e-KTP Data in the Purview of OJK Tasks*
15	Perjanjian Kerja Sama bersama Universitas Udayana (UNUD) perihal Sinergi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Literasi dan Inklusi Keuangan, dengan berbagai Fakultas. *Cooperation Agreement (PKS) with Udayana University (UNUD) regarding Implementation Synergy for Student Study Services (KKN) as well as the Financial Literacy and Inclusion Program with various faculties*
16	Perjanjian Kerja Sama bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Interaksi dan/atau Bagi Pakai Data Antara Sistem dan Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan Bursa Karbon; *Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Environment and Forestry concerning Interaction and/or Data Sharing between the National Climate Change Control System and Registration as well as the Carbon Exchange*
17	Perjanjian Kerja Sama bersama Kementerian Keuangan perihal Penyediaan, Pertukaran, data/atau Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; *Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Finance concerning the Provision, Exchange and/or Utilisation of Data and Information in the Implementation of Duties and Functions of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority (OJK)*
18	Perjanjian Kerja Sama bersama Ombudsman RI perihal Koordinasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait Sektor Jasa Keuangan; *Cooperation Agreement (PKS) with the Ombudsman of the Republic of Indonesia concerning the Coordinated Provision of Public Services relating to the Financial Services Sector*
19	Perjanjian Kerja Sama bersama Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik perihal Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. *Cooperation Agreement (PKS) with the Secretariat of BPS-Statistics Indonesia concerning Preparations for the National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK)*
20	Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Keuangan perihal Pengakhiran Kerja Sama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan; *Joint Agreement with the Ministry of Finance regarding the Termination of Cooperation in the Use of State Property Owned by the Ministry of Finance*
21	Keputusan Bersama dengan Bank Indonesia perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penggunaan Kekayaan Non Teknologi Informasi Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan; *Joint Decree with Bank Indonesia concerning Cooperation and Coordination in the Use by the Financial Services Authority (OJK) of Non-IT Assets Owned by Bank Indonesia*
22	Petunjuk Teknis bersama Kementerian Dalam Negeri Dukcapil perihal Penyusunan Petunjuk Teknis atas Adendum PKS tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Linkup Tugas Otoritas Jasa Keuangan, antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan *Technical Guidelines with the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs concerning the Preparation of Technical Guidelines for the Addendum to the Cooperation Agreement (PKS) on the Use of Citizenship Identity Numbers (NIK), Population Data and e-KTP Data in the Purview of OJK Tasks, between the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority (OJK)*
23	Kerangka Acuan Kerja bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perihal Pedoman Kerja Penugasan dan Pengakhiran Penugasan. *Terms of Reference with the Finance and Development Supervisory Agency concerning Work Guidelines for Assignments and the Termination of Assignments*

VI.4 Hukum & Penyidikan
Law and Investigations

VI.4.1. Hukum
Law

Sepanjang 2023, OJK menyelesaikan dan mengundangkan sebanyak 30 Peraturan OJK termasuk di dalamnya 19 Peraturan OJK yang merupakan tindak lanjut pengaturan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Selanjutnya, OJK juga melengkapi Peraturan OJK tersebut dengan menerbitkan peraturan teknis ke dalam 25 Surat Edaran OJK. OJK juga melakukan penyempurnaan tata cara penyusunan peraturan di OJK dengan mengadopsi konsep analisis dan evaluasi peraturan, serta penyusunan peraturan dengan metode omnibus.

In 2023, OJK finalised and promulgated 30 OJK regulations, including 19 follow-up regulations to Act Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Act). OJK also complemented the OJK regulations by issuing technical regulations through 25 OJK Circular Letters. In addition, OJK refined its procedures for formulating regulations by adopting the concept of regulatory analysis and evaluation, as well as formulating omnibus regulations.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses peraturan yang diterbitkan, OJK membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH OJK dilengkapi dengan informasi hukum dan statistik peraturan, serta telah terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional di Kementerian Hukum dan HAM. JDIH memudahkan pencarian peraturan terkait sektor jasa keuangan baik yang diterbitkan OJK maupun peraturan lembaga sebelumnya, termasuk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan lainnya yang relevan. JDIH OJK juga menampilkan putusan pengadilan baik dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya terkait permohonan pengujian dan gugatan terkait OJK.

OJK developed its Legal Information and Documentation Network (JDIH) to provide greater public access to OJK regulations. The OJK JDIH network is complete with legal information and regulatory statistics and integrated with the national JDIH system in the Ministry of Law and Human Rights. JDIH allows the public to search regulations concerning the financial services sector issued by OJK as well as previous regulations, including other laws and regulations relevant to the financial services sector. The OJK JDIH network also provides information on the decisions of the Constitutional Court, Supreme Court and lower courts regarding judicial reviews and lawsuits pertaining to OJK.

Sepanjang 2023, OJK menyelesaikan 64 permintaan izin pembukaan rahasia bank dari berbagai institusi di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kepala BUPLN/PUPN, BNN, BPOM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bagi individu dan kurator. Dari 64 permintaan izin pembukaan rahasia bank dimaksud, sebanyak 24 permintaan telah diberikan persetujuan, sedangkan 40 permintaan lainnya tidak diberikan persetujuan karena belum memenuhi persyaratan.

In 2023, OJK completed 64 requests for permission to disclose bank secrets from various institutions, including the Prosecution Service, National Police, Office for State Receivables, National Narcotics Agency (BNN), National Agency of Drug and Food Control (BPOM), Ministry of Finance, Ministry of the Environment and Forestry as well as individuals and curators. Of the 64 requests to disclose bank secrets, 24 were approved and 40 were rejected as the requirements were not fulfilled.

Selain itu, OJK menghadapi 646 perkara yang tersebar di seluruh Indonesia di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran berdasarkan Kantor OJK dan lingkup wilayah koordinator. Terhadap 646 perkara tersebut, sebanyak 291 perkara telah diputus sepanjang tahun 2023 dan saat ini masih terdapat 355 perkara dengan status *on going* di berbagai tingkatan pengadilan.

In 2023, OJK faced 646 cases throughout Indonesia at various levels of the judiciary system based on the location of OJK offices and the scope of the coordinator area. Of the 646 cases, a total of 291 were settled in 2023, with 355 ongoing cases at various judiciary levels.

Dalam penguatan peran OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, dilakukan peran pendampingan terhadap ahli yang merupakan pegawai OJK, yang dimintakan oleh aparat penegakan hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. OJK membentuk forum ahli yang secara rutin melaksanakan kegiatan penguatan kualitas ahli yang berasal dari pegawai OJK sesuai kompetensi bidangnya. Pada tahun 2023, OJK melaksanakan forum ahli sebanyak dua kali yang terselenggara pada bulan Juni dan Oktober 2023 dengan mengundang narasumber dari berbagai pakar hukum dan hakim, serta melaksanakan peradilan semu (*moot court*) sebagai bentuk simulasi peradilan untuk memudahkan ahli dan saksi dalam memberikan keterangan pada sidang yang sesungguhnya. Berkaitan dengan permintaan ahli dan saksi dari OJK, pada tahun 2023 OJK melayani 616 permintaan ahli dan saksi dengan persebaran permintaan berdasarkan wilayah Kantor OJK.

Strengthening OJK's role in law enforcement against crimes committed in the financial services sector, training and mentoring were provided to expert OJK staff requested by law enforcement officials from the police, prosecution service and judiciary system. OJK also established an expert forum that regularly undertakes activities to strengthen the quality of OJK experts based on their field of expertise. In 2023, OJK twice activated the expert forum in June and October 2023 by inviting speakers and resource persons in the form of various legal experts and judges, as well as simulating moot courts to help experts and witnesses provide testimony at actual hearings. Regarding the requests for experts and witnesses from OJK, OJK served 616 requests for experts and witnesses in 2023 based on the respective OJK office regions.

OJK juga senantiasa menjalin sinergi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung dengan memberikan dukungan berupa pemberian pelatihan kepada hakim. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas hakim di berbagai lingkungan peradilan sehingga mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan kegiatan jasa keuangan, antara lain terkait pengaturan serta pengawasan di bidang perbankan, *market conduct* dan perlindungan konsumen, asuransi, perusahaan pembiayaan dan *peer to peer lending*.

OJK maintains synergy and cooperation with the Supreme Court by providing support in the form of training for judges, which aims to help increase legal capacity in various judicial environments and increase comprehensive knowledge in terms of dealing with cases relating to financial services activities, including the regulation and supervision of the banking industry, market conduct and consumer supervision, insurance industry, finance companies and peer-to-peer lending.

Sepanjang tahun 2023, OJK melaksanakan sebanyak dua kali kegiatan temu wicara dengan peserta hakim dari pengadilan umum, agama dan tata usaha negara dari kabupaten/kota wilayah tempat diselenggarakan temu wicara. Kegiatan diharapkan dapat mendukung lembaga peradilan dalam memutus perkara terkait sektor jasa keuangan, sehingga mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel.

In 2023, OJK held discussions twice with judges from local general, religious and state administrative courts, which are expected to support judicial institutions when presiding over cases relating to the financial services sector, thereby supporting the realisation of an orderly, just, transparent and accountable financial services sector.

OJK berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dengan memberikan masukan dan tanggapan atas 38 rancangan peraturan perundangan yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga, meliputi rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lainnya.

OJK contributed to the preparation of laws and regulations in the financial services sector by providing input and responses to 38 draft laws and regulations initiated by government ministries and agencies, including draft laws, government regulations, presidential regulations, ministerial regulations and other regulations.

Dalam pemberian tanggapan dimaksud, OJK mengawal tiga RPP utama yang merupakan turunan UU PPSK dan berkaitan langsung dengan OJK, yaitu RPP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran OJK, RPP tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, dan RPP tentang Standar Biaya, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Remunerasi Otoritas Jasa Keuangan yang sedang dalam proses dan akan diterbitkan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK.

When providing such a response, OJK oversees three main draft bills stemming from the Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act) that relate directly to OJK, namely the Draft Bill on Levies in the Financial Services Sector, OJK Work Plan and Budget; Draft Bill on the Transfer of Regulation and Supervision Functions for Digital Financial Assets, including Crypto Assets and Financial Derivatives; as well as the Draft Bill concerning Cost Standards, the Procurement of Goods and Services, HR Management, the Organisation and Remuneration at OJK, which remain ongoing and will be issued in accordance with provisions in the PPSK Act.

VI.4.2. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
Financial Services Sector Investigations

OJK diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 dengan mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK dan SEDK Penyidikan.

OJK is authorised to implement the investigation function, formulate investigation policy, cooperate with relevant parties in law enforcement and provide support to criminal investigations in the financial services sector. The investigation function has been implemented since 2016 in accordance with prevailing laws and regulations, OJK regulations, BOC regulations (PDK) and the BOC Circular Letter (SEDK) concerning Investigations.

VI.4.2.1. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
Handling of Cases

Pada tahun 2023, OJK menerbitkan 23 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dari hasil penyidikan dan gelar perkara OJK mengirimkan 18 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, terdapat 18 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK telah melimpahkan tersangka & barang bukti (Tahap-2) kepada Kejaksaan atas 19 berkas perkara.

In 2023, OJK issued 23 Investigation Warrants (Sprindik) based on the outcomes of criminal investigations and legal cases, with OJK forwarding 18 cases to the Public Prosecutor of the Indonesian Attorney General's Office (AGO). Based on case submissions and the results of the prosecutors' own research, 18 cases were issued P-21 status by the Public Prosecution Service. Furthermore, OJK investigators also handed over evidence and suspects (Stage II) to the Public Prosecution Service concerning 19 case files.

Tabel 6.1 Sprindik dan (P-21)
Table 6.1 Investigation Warrant and (P-21)

Perkara *Case Type*	Sprindik *Investigation Warrant*	Pemberkasan *Total Cases*
Perbankan *Banking*	Perkara BPR & BPD *Rural Banks and Regional Government Banks*	21 / 15
Pasar Modal *Capital Market*	Perkara Emiten/PP *Issuers/Finance Companies*	- / -
IKNB *NBFI*	Perkara Asuransi dan LJK Lainnya *Insurance and Other Financial Services Institutions*	2 / 3
Jumlah | *Total*		**23 / 18**

Perkara *Case Type*	P-21 *P-21*	Tahap 2 *Stage 2*
Perbankan *Banking*	Perkara BPR & BPD *Rural Banks and Regional Government Banks*	14 / 14
Pasar Modal *Capital Market*	Perkara Emiten/PP *Issuers/Finance Companies*	- / -
IKNB *NBFI*	Perkara Asuransi dan Dana Pensiun *Insurance and Pension Funds*	4 / 5
Jumlah | *Total*		**18 / 19**

Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

Based on the respective P-21, OJK initiated its investigation function in accordance with Article 49 and Article 15 of the OJK Act (No. 21) of 2011.

VI.4.2.2. Kebijakan dan Dukungan Penyidikan
Investigation Policy and Support

Dalam UU PPSK terdapat amanat kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang lebih kuat dimiliki oleh OJK. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas penyidik OJK, sehingga diperlukan penyesuaian ketentuan terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, antara lain Peraturan OJK (POJK), Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK OJK), Surat Edaran Dewan Komisioner OJK (SEDK OJK) dan ketentuan internal lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut OJK telah menerbitkan:

The Financial Sector Development and Strengthening Act (PPSK Act) strengthened OJK's criminal investigation jurisdiction in the financial services sector. This has had an impact on the duties of OJK investigators, thus requiring adjustments to the provisions concerning criminal investigations in the financial services sector, including OJK regulations (POJK), BOC regulations (PDK), BOC Circular Letters (SEDK) and other internal regulations. Consequently, OJK issued the following:

1. POJK Nomor 16 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Beberapa pokok-pokok pengaturan baru dalam POJK Penyidikan (POJK) tersebut yaitu:
   a. Penyidik OJK, kategori Penyidik OJK dengan menambahkan pegawai tertentu.
   b. Kewenangan Penyidik OJK dengan menambahkan:
      1) Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
      2) Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang sedang ditangani.
      3) Meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
      4) Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
   c. Perluasan jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan.
   d. Permohonan penyelesaian pelanggaran.
   e. Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
   f. Melakukan pemblokiran rekening.
2. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PDK OJK) Nomor 6/PDK.02/2023 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
3. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (SEDK OJK) Nomor 18/SEDK.02/2023 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Selama tahun 2023 dilaksanakan kegiatan menunjang kinerja penyidikan dalam rangka pencegahan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab, antara lain:
1. Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di tujuh wilayah, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta dengan tingkat pemahaman 80%-85%.
2. Penerbitan Keputusan Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan tentang Standar Prosedur Operasional di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan.
3. Pengembangan *enhancement* Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK) tahun Anggaran 2023.
4. Penelahaan dan pengkajian pembangunan portal pelaporan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
5. Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur penyidikan.

1. OJK Regulation (POJK) Number 16 of 2023 concerning Criminal Investigations in the Financial Services Sector. The provisions of the new OJK Regulation on Investigations include the following:
   a. OJK investigators, the categories of OJK investigators by including specific employees.
   b. The authority of OJK investigators by including provisions to:
      1) Request the competent authority to prevent Indonesian citizens and/or foreign actors as well as deter foreign nationals suspected of committing crimes in the financial services sector.
      2) Request the assistance of the National Police of the Republic of Indonesia or other relevant institutions to arrest, detain, search and confiscate during ongoing criminal cases in the financial services sector.
      3) Request information from financial services institutions concerning the financial conditions of parties suspected of committing or involvement in criminal activities or violating prevailing laws and regulations in the financial services sector.
      4) Investigate money laundering crimes based on predicate crimes in the financial services sector.
   c. Expanding the scope of crimes in the financial services sector.
   d. Applications to resolve violations.
   e. OJK investigators can request information from financial services institutions concerning the financial conditions of parties suspected of violating prevailing laws and regulations in the financial services sector.
   f. Blocking/freezing accounts.
2. BOC Regulation (PDK) Number 6/PDK.02/2023 concerning the Implementation of Criminal Investigations in the Financial Services Sector.
3. BOC Circular Letter (SEDK) Number 18/SEDK.02/2023 concerning the Administration of Criminal Investigations in the Financial Services Sector.

In 2023, various activities were undertaken to support the performance of the investigation function and prevent irresponsible perpetrators of crime as follows:
1. Socialising the prevention of crime in the financial services sector to financial services providers in seven regions, namely West Sumatra, North Sumatra, Bali, South Sumatra, Riau Islands, South Sulawesi and Jakarta, achieving an 80-85% level of understanding.
2. Issuing a decree by the Deputy Commissioner for Law and Investigations concerning standard operating procedures (SOP) in the Financial Services Sector Investment Department.
3. Enhancing the Investigation Administration and Management Information System (SIANDIK) during the 2023 fiscal year.
4. Revisiting the development of a reporting portal for suspected crimes in the financial services sector.
5. Procuring equipment and tools to support investigation function infrastructure.

Gambar 6.1 Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK dengan Kejaksaan dan Kepolisian RI
Figure 6.1 Strengthening Coordination and Communication between OJK and the Public Prosecution Service and National Police of the Republic of Indonesia

VI.4.2.3. Koordinasi dengan Instansi Terkait
Coordination with Other Relevant Institutions

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait, antara lain Bareskrim Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada tahun 2023, OJK melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada jajaran aparat penegak hukum di tujuh wilayah hukum, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta dengan tingkat pemahaman antara 81%-87%.

OJK investigators regularly coordinate with relevant institutions and law enforcement apparatus, including the National Police Criminal Investigation Unit, Public Prosecution Service, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC), to strengthen the investigation function and build a credible criminal justice system. In 2023, OJK strengthened coordination and communication with several audiences, including heads of the Regional Police and Provincial Prosecutor's Office (Kejati), and also arranged socialisation activities for handling crime in the financial services sector with law enforcement officials in seven jurisdictions, namely West Sumatra, North Sumatra, Bali, South Sumatra, Riau Islands, South Sulawesi and Jakarta, achieving an 81-87% level of understanding.

VI.4.2.4. Penyampaian Informasi melalui Media
Disseminating Information via Media

Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh OJK, Penyidik OJK melakukan siaran pers atau penyampaian informasi kepada publik melalui media massa. Pada tahun 2023, Penyidik OJK melakukan tujuh kali penyampaian informasi kepada masyarakat dengan topik sebagai berikut:

1. Perkembangan Tugas Penyidikan OJK;
2. OJK Selesaikan 101 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan;
3. OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan;
4. Komitmen OJK Perkuat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Bali;
5. OJK Tangkap Pelaku Asuransi Ilegal;
6. OJK Peroleh Penghargaan Bareskrim Polri Atas Prestasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan; dan
7. Penguatan Kewenangan Penyidikan Sektor jasa Keuangan.

Providing information and understanding about OJK efforts to prevent crime in the financial services sector, OJK investigators issue press releases and disseminate information to the public through the mass media. In 2023, OJK investigators disseminated information to the public seven times as follows:

1. *Development of OJK Investigation Function;*
2. *OJK Settles 101 Criminal Cases in Financial Services Sector;*
3. *OJK Issues New Rules on Criminal Investigations in Financial Services Sector;*
4. *OJK Commitment to Strengthening Financial Services Sector Investigations, Socialisation of Financial Services Sector Crime in Bali;*
5. *OJK Arrests Perpetrators of Illegal Insurance Schemes;*
6. *OJK Awarded by National Police Criminal Investigation Unit for Achievements in Law Enforcement against Financial Services Sector Crime; and*
7. *Strengthening Investigative Jurisdiction in Financial Services Sector.*

VI.5 Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Organisation and Human Resources (HR)

VI.5.1. Penguatan Organisasi dan SDM
Strengthening the Organisation and HR

1. Penguatan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK memperbaiki tata kelola internal melalui optimalisasi struktur organisasi. OJK melakukan penataan organisasi sekaligus untuk mengakomodir amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, sehingga Struktur Organisasi OJK menjadi sebagai berikut:

a. Bidang Kebijakan Strategis.
b. Bidang Manajemen Strategis.
c. Bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
d. Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
e. Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.
f. Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
g. Bidang Pengawasan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
h. Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
i. Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.

2. Penerapan *Flexibel Working Arrangement* (FWA)

OJK menerapkan Pola Baru Bekerja Secara Fleksibel (*Flexible Working Arrangement*/FWA) yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja bagi pegawai OJK selama periode tertentu baik di kantor dan/atau di lokasi tertentu selain kantor dengan memaksimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugasnya.

3. Komite-Komite di OJK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang disebut Komite. Komite adalah forum yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan Komisioner.

1. Organisational Strengthening

Seeking to enhance the effectiveness and efficiency of implementing its tasks and functions, OJK improved internal governance by optimising the organisational structure. OJK also restructured the organisation to accommodate its mandate in accordance with Act Number 4 of 2023 concerning Financial Services Sector Development and Strengthening as follows:

a. Strategic Policy
b. Strategic Management
c. Banking Supervision
d. Supervision of Capital Markets, Financial Derivatives and the Carbon Exchange
e. Supervision of the Insurance Industry, Guarantee Institutions and Pension Funds
f. Supervision of Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions
g. Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets
h. Supervision of Financial Services Provider Conduct, Education and Consumer Protection
i. Internal Audit and Risk Management

2. Implementation of Flexible Working Arrangements (FWA)

OJK implemented new Flexible Working Arrangements (FWA) that provide greater flexibility for OJK employees in terms of remote working during specific periods by maximising the support of information technology and communication equipment to maintain and increase employee productivity, while safeguarding task continuity.

3. OJK Committees

Increasing the effectiveness, consistency, transparency and efficiency of the decision-making process, the Board of Commissioners formed supporting organs known as committees. Committees are forums established to provide recommendations concerning aspects relating to strategic policies and operational policies or topics that require further direction from the BOC members.

OJK memiliki sembilan Komite, yaitu:
a. Komite Etik;
b. Komite SDM, Organisasi dan Remunerasi;
c. Komite Manajemen Risiko;
d. Komite Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja;
e. Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan;
f. Komite Teknologi Informasi;
g. Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan;
h. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah; dan
i. Komite Pengaturan Terintegrasi.

4. Kode Etik dan Tata Tertib

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan Kode Etik OJK. Kode Etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:
a. Menjaga citra, martabat, integritas dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.
b. Memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
c. Mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
d. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.

Dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik OJK, Dewan Komisioner didukung oleh Komite Etik yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap kode etik.

There are currently nine OJK committees as follows:
a. Ethics Committee,
b. Human Resources, Organisation and Remuneration Committee,
c. Risk Management Committee,
d. Strategic, Budget and Performance Management Committee,
e. Adjustments to Mandatory Levy Committee,
f. Information Technology Committee,
g. Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee,
h. Islamic Financial Services Development Committee, and
i. Integrated Regulation Committee.

4. Code of Ethics and Conduct

In accordance with Act Number 21 of 2011 concerning OJK, the Board of Commissioners is responsible for formulating and enforcing the OJK Code of Ethics, which contains the norms and principles concerning propriety and compliance by the OJK Board of Commissioners, officials and staff to the Code in terms of task implementation.

The Code of Ethics aims to:
a. Maintain the image, dignity, integrity and independence of BOC Members, OJK Officials and Employees when executing their duties in accordance with the strategic values of the OJK organisation.
b. Provide clarity regarding behavioural guidelines (Code of Conduct) for the BOC Members, OJK Officials and Employees when executing their duties and responsibilities.
c. Prevent violations of the OJK Code of Ethics in order to protect BOC Members, OJK Officials and Employees from legal risks and/or reputational risks that may arise due to conduct that deviates from social norms or is not in keeping with public perception regarding the sound administration of public institutions.
d. Elucidate the mechanisms for handling information and the process for resolving alleged violations of the OJK Code of Ethics by BOC Members, OJK Officials and Employees.

When enforcing the OJK Code of Ethics, BOC Members are supported by the Ethics Committee, which is tasked with monitoring compliance to the Code of Ethics by BOC Members, OJK Officials and Employees.

VI.5.2. Pengembangan SDM
HR Development

1. Demografi Pegawai

Pegawai OJK per 31 Desember 2023 berjumlah 4.218 pegawai yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor OJK Daerah.

1. Employee Demographics

As of 31st December 2023, OJK employed 4,218 staff at OJK head office and regional offices.

Gambar 6.2 Demografi dan Komposisi SDM OJK
Figure 6.2 Demographics and Composition of OJK Human Resources

Komposisi SDM OJK berdasarkan Bidang
Composition of Human Resources by Sector

Bidang Kebijakan Strategis
Strategic Policy
1.263 pegawai *employee*

Bidang Manajemen Strategis
Strategic Management
753 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Sektor Perbankan
Banking Supervision
829 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Supervision of Capital Markets, Financial Derivatives and the Carbon Exchange
514 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Supervision of the Insurance Industry, Guarantee Institutions and Pension Funds
292 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Supervision of Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions
222 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Supervision of Financial Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets
27 pegawai *employee*

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Supervision of Financial Services Provider Conduct, Education and Consumer Protection
217 pegawai *employee*

Audit Internal dan Manajemen Risiko
Internal Audit and Risk Management
101 pegawai *employee*

Komposisi SDM OJK berdasarkan Usia
Composition of Human Resources by Age

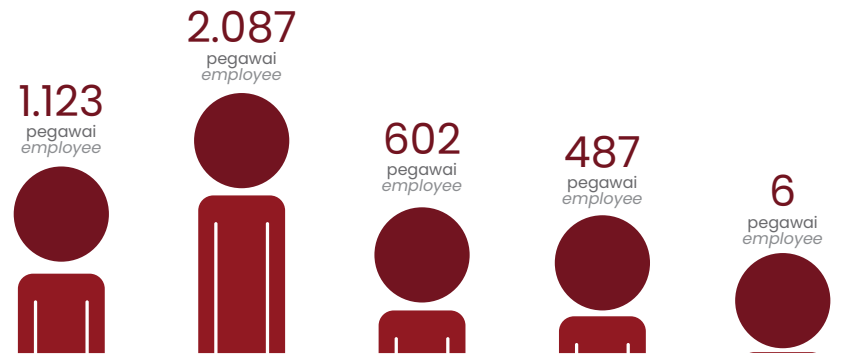

Komposisi SDM OJK berdasarkan Tingkat Pendidikan
Composition of Human Resources by Educational Background

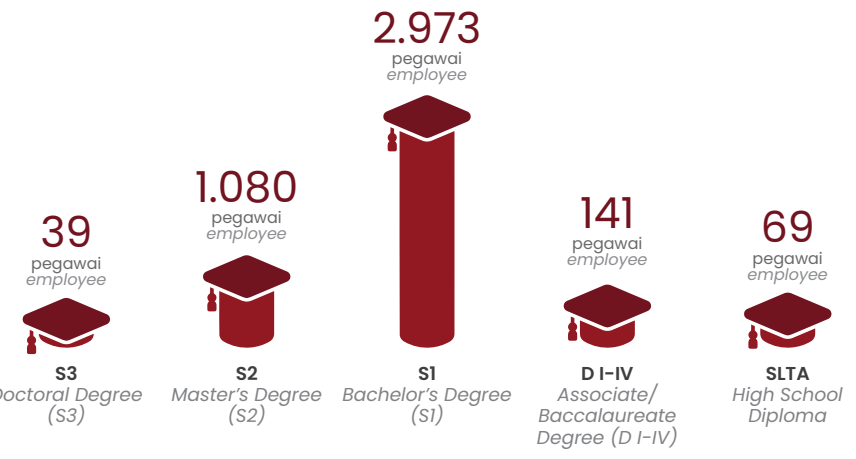

Komposisi SDM OJK berdasarkan *Gender*
Composition of Human Resources by Gender

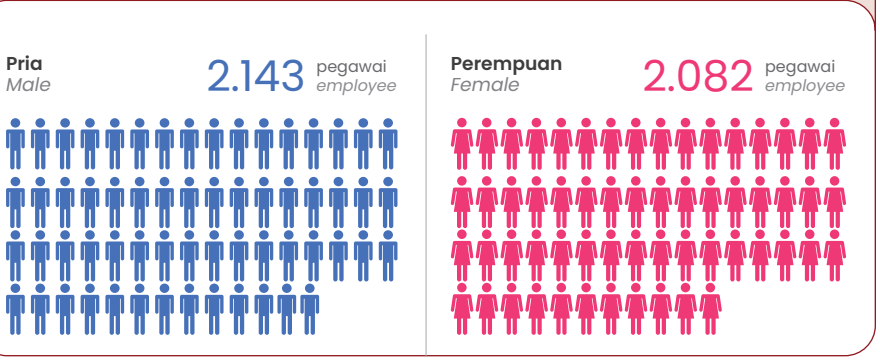

2. Pengelolaan SDM

a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

1) Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan OJK, dilakukan vaksinasi *booster* Covid-19 dosis kedua kepada 2.063 pegawai dan keluarga pegawai.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Lengkap (*General Medical Check-up*/MCU)

OJK bekerja sama dengan YKP-OJK melaksanakan MCU untuk 2.610 pegawai beserta pasangan yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut dengan menunjuk sarana pemeliharaan kesehatan yang dapat melayani MCU di Kantor Pusat, maupun Kantor OJK Daerah.

3) Bantuan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Wilayah Kantor OJK dan Kantor OJK Daerah

OJK memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker dan vitamin/multivitamin kepada pegawai yang terdampak bencana kabut asap pada Kantor OJK Provinsi Kalimatan Barat, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Provinsi Bali; dan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat.

3. Pengembangan SDM

a. Pendidikan Formal

OJK senantiasa mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis. OJK melakukan seleksi bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema pemberian beasiswa sesuai ketentuan. Sepanjang tahun 2023, OJK telah memberikan persetujuan definitif bagi 30 pegawai untuk jenjang S2 dan S3, serta menerbitkan nomor registrasi Skim 4 bagi 24 pegawai.

b. Program Sertifikasi

Sepanjang tahun 2023, OJK memfasilitasi 51 jenis Program Sertifikasi Profesi dengan total peserta sebanyak 418 pegawai dan 22 Program Sertifikasi Pengawas Sektor Keuangan dengan total peserta sebanyak 1071 pegawai.

c. Program Pengembangan Kompetensi (PPK) Teknis (*Hard Skill*) dan Perilaku (*Soft Skill*).

Sepanjang tahun 2023, OJK melaksanakan program pengembangan kompetensi teknis dengan detail sebagai berikut:

1) PPK Non *In-House* Dalam Negeri dengan peserta sebanyak 445 pegawai.
2) PPK Non *In-House* Luar Negeri dengan peserta sebanyak 238 pegawai.
3) PPK *In-House* Dalam Negeri (IHT) dengan peserta sebanyak 4.204 pegawai.

2. HR Management

a. Maintaining Employee Health

1) Preventive Actions to Monitor Employee Health

Seeking to prevent Covid-19 transmission within the OJK environment, a second dose of the booster vaccination was administered to 2,063 employees and their families.

2) General Medical Check-Up (MCU)

OJK collaborated with its Employee Welfare Foundation (YKP) to provide MCU for 2,610 employees and eligible spouses by designating healthcare facilities to provide MCU at head office and OJK regional offices.

3) Assistance for Haze Disaster Management at OJK Head Office and Regional Offices

OJK provided personal protective equipment (PPE) in the form of masks and vitamin/multivitamins to employees affected by haze at the OJK Provisional Offices in West Kalimantan, South Sumatra and Bangka Belitung, North Sumatra, Bali, and West Java.

3. HR Development

a. Formal Education

OJK constantly strives to enhance employee competencies by expanding academic knowledge. Each year, OJK conducts a selection process for employees to further their formal higher education through scholarships in accordance with prevailing regulations. In 2023, a total of 23 employees received a definitive agreement for 30 employees to further their doctoral and master's degrees, and registration numbers for Scheme 4 were issued to 24 employees.

b. Certification Program

Throughout 2023, OJK facilitated 51 Professional Certification Programs with a total of 418 participants. Additionally, OJK facilitated 22 Financial Sector Supervisor Certification Programs, engaging a total of 1,071 participants.

c. Hard Skill and Soft Skill Competency Development Program

In 2023, OJK conducted the following hard skill competency development programs:

1) Domestic Non-In-House Competency Development Programs with 445 participating employees.
2) International Non-In-House Competency Development Programs with 238 participating employees.
3) Domestic In-House Competency Development Programs with 4,204 participating employees.

VI.5.3. Pelaksanaan Program Budaya
Implementation of Cultural Programs

Gambar 6.3 Program Budaya OJK
Figure 6.3 OJK Cultural Programs

Penguatan perilaku kunci (*Proactive, Collaborative, Accountable*) yang diterapkan Satuan Kerja Utama untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Strengthening key behaviours (proactive, collaborative, accountable) in work units to achieve KPI targets.

Penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman Insan OJK mengenai pelaksanaan proses bisnis pada Satker lain dengan terlibat secara langsung.
Strengthening continuous learning to enrich employee insight and experience in terms of implementing business processes in other work units through direct involvement.

Penguatan perilaku belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK tentang berbagai tugas pokok dan fungsi melalui optimalisasi *Learning Management System* (LMS).
Strengthening independent learning to increase employee understanding of various OJK core tasks and functions by optimising the Learning Management System (LMS).

Bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah antara *Change Leader* dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja.
Aiming to facilitate two-way communication between change leaders and employees in the work unit environment.

Program penguatan jasmani pegawai melalui kegiatan olahraga bersama lintas bidang
Strengthening the physical health of employees through collective sports activities.

Bertujuan agar Insan OJK senantiasa memperluas dan memperbaharui wawasannya, baik *hard skill* maupun *soft skill*, dengan menghadirkan narasumber internal dan/atau eksternal.
Aiming to expand and enrich employee insight in the form of hard skills and soft skills by providing internal and/or external resource persons.

Bertujuan untuk mendukung program pemerintah. *Eco green* memiliki tujuan untuk penguatan gaya hidup yang lebih hijau dan ramah lingkungan.
Aiming to support government programs, Eco-Green intends to foster greener and more environmentally friendly lifestyles.

1. **Program Perubahan OJK *Way* 2023**
   Insan OJK melaksanakan Program Perubahan OJK *Way* 2023 melalui implementasi tiga Program Utama dan empat Program Pendukung, di antaranya:
   Program Utama
   1. Performance Driven Culture, merupakan penguatan perilaku kunci (*Proactive, Collaborative, Accountable*) yang diterapkan Satuan Kerja untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi pembuatan *dashboard* yang berisi posisi capaian IKU Satuan Kerja; *Reminder* target IKU secara berkala; *Knowledge sharing*; Kertas kerja *monitoring* IKU Satuan Kerja; dan Optimalisasi proses bisnis.

1. ***OJK Way Change Program 2023***
   OJK staff implemented the change program in 2023, known as OJK Way, through three flagship programs and four supporting programs as follows:
   Flagship Programs
   a. *Performance Driven Culture strives to strengthen key behaviours (Proactive, Collaborative, Accountable) at the work unit level to achieve the target Key Performance Indicators (KPI), which includes creating a dashboard containing the position of the work units' KPI achievements, periodic reminders of the KPI targets, knowledge sharing, monitoring work unit KPIs and optimising the business processes.*

b. *Apprenticeship* (Magang Antar Satuan Kerja), merupakan penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman Insan OJK mengenai pelaksanaan proses bisnis pada Satuan Kerja lain dengan terlibat secara langsung.

b. Apprenticeships that strengthen continuous learning behaviour to enrich the insight and experiences of OJK staff regarding the implementation of business processes in other work units through direct involvement.

Grafik 6.2 Pelaksanaan Program Magang antar Satuan Kerja
Graphic 6.2 Implementation of the Apprenticeship Program

145
Insan OJK
OJK Employee

Melaksanakan Program MAS tahun 2023
Participated in the Apprenticeship Program in 2023

58
Insan OJK
OJK Employee

Melaksanakan Program MAS Semester I
Participated in the Apprenticeship Program in the first semester

87
Insan OJK
OJK Employee

Melaksanakan Program MAS Semester II
Participated in the Apprenticeship Program in the second semester

Grafik 6.3 Presentase Bidang Tujuan Magang
Graphic 6.3 Composition of the Apprenticeship Program by Sector

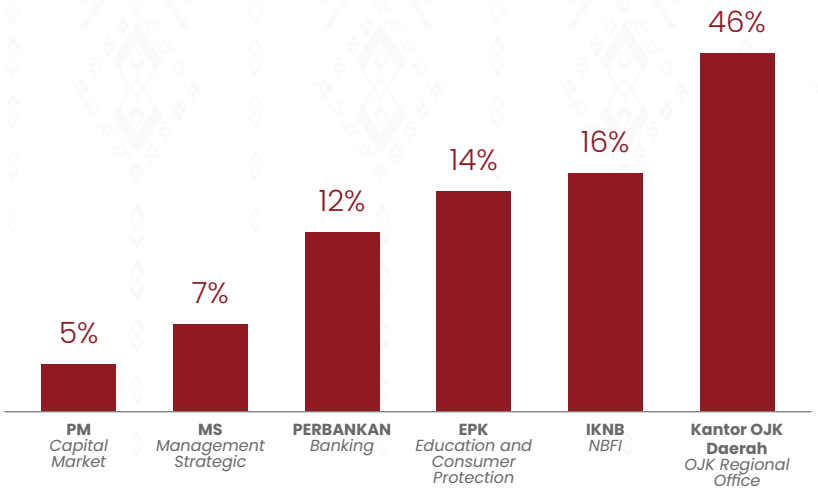

c. *Self Learning*, merupakan penguatan perilaku belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK tentang berbagai tugas pokok dan fungsi OJK melalui optimalisasi *Learning Management System* (LMS).

Grafik 6.4 Kesediaan Insan OJK Mengikuti Kembali Program MAS
Graphic 6.4 OJK Staff Available to Participate in Apprenticeship Program

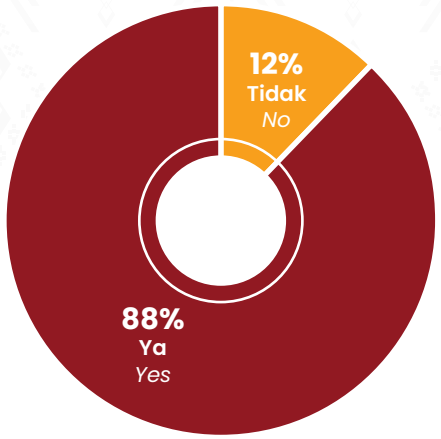

c. Self-Learning that aims to strengthen independent learning to increase employee understanding of various OJK core tasks and functions by optimising the Learning Management System (LMS).

Grafik 6.5 Program Pelaksanaan *Self Learning*
Graphic 6.5 Self-Learning Program

Insan OJK telah melaksanan modul LMS
OJK's Employee Completed LMS Module

TRIWULAN II
QUARTER II
77%

TRIWULAN III
QUARTER III
78%

TRIWULAN IV
QUARTER IV
77%

Grafik 6.6 Presentase Modul LMS 2023
Graphic 6.6 LMS Module Percentage 2023

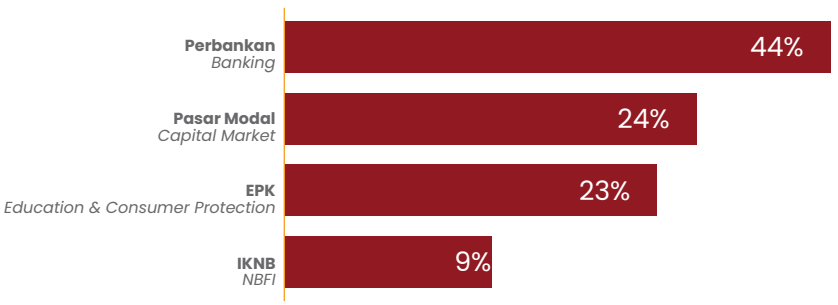

Program Pendukung

a. *Coaching*, bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah antara *Change Leader* dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja. Pada tahun 2023, rata-rata persentase Insan OJK di tiap Satuan Kerja yang mendapatkan *coaching* dari atasannya adalah sebesar 50%.

Supporting Programs

a. Coaching aims to facilitate two-way communication between change leaders and employees in the work unit environment. In 2023, the percentage of OJK staff in each work unit that received coaching from a superior averaged 50%.

Grafik 6.7 Presentase *Coaching* 2023
Graphic 6.7 Percentage of staff receiving coaching in 2023

Presentase *coaching* 2023 adalah
Percentage of staff receiving coaching in 2023 was
50%

b. *Knowledge Sharing*, bertujuan agar Insan OJK senantiasa memperluas dan memperbarui wawasannya, baik *hard skill* maupun *soft skill* dengan menghadirkan narasumber internal dan/atau eksternal.
c. *Active*, program penguatan jasmani pegawai melalui kegiatan olahraga bersama lintas bidang.
d. *Eco Green*, bertujuan untuk mendukung program pemerintah dan penguatan gaya hidup yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

b. Knowledge Sharing aims to expand and enrich the insight of OJK staff in the form of hard skills and soft skills by providing internal and/or external resource persons.
c. Active aims to strengthen the physical health of employees through collective sports activities.
d. Eco-Green aims to support government programs and foster greener and more environmentally friendly lifestyles.

2. Program Internalisasi Budaya Kerja

a. *Employee Engagement Survey 2023*

OJK melaksanakan *Employee Engagement Survey* OJK 2023 dengan jumlah responden 3.843 pegawai atau 91% dari total 4.222 populasi pegawai OJK, menghasilkan indeks *engagement level* sebesar 78% atau kategori *Moderately Engaged*. Indeks tersebut menggambarkan tingkat *engagement* Insan OJK yang memiliki semangat bekerja baik dan merasakan ikatan yang cukup kuat terhadap organisasi.

b. Survei Persepsi Budaya 2023

OJK melaksanakan Survei Persepsi Budaya OJK untuk mengetahui pendapat dan tanggapan *stakeholders* OJK dengan pertanyaan yang mengacu pada nilai strategis INPRESIV. Indeks Survei Persepsi Budaya OJK *Wide* pada tahun 2023 mencapai 5,42 dengan perhitungan nilai rata-rata dari 75 Satuan Kerja pada setiap pernyataan.

c. Kegiatan Internalisasi Budaya Kerja

OJK menyelenggarakan sejumlah kegiatan guna mendukung internalisasi budaya kerja melalui beberapa kegiatan, di antaranya *Change Leader Forum, Townhall Meeting, Change Forum, Leader's Strategic Forum*, Pemilihan Insan OJK Terbaik 2023 dan Forum Dewan Redaksi Majalah Integrasi OJK

2. Culture Internalisation Program

a. Employee Engagement Survey 2023

OJK conducted the OJK Employee Engagement Survey 2023 with a total of 3,843 respondents, accounting for 91% of the 4,222 total population of OJK personnel, indicating an Engagement Level of 78%, or Moderately Engaged. The index describes the level of engagement among OJK employees who are motivated to work hard and have a strong bond with the organisation.

b. Culture Perception Survey 2023

OJK conducted the Culture Perception Survey in 2023 to explore the opinions and responses of OJK stakeholders to questions concerning the INPRESIV strategic values. The OJK Wide Culture Perception Survey Index in 2023 reached 5.42 as an average value of the 75 work units for each statement in the survey.

c. Work Culture Internalisation Activities

OJK also organised a number of activities to support work culture internalisation, including the Change Leader Forum, Town Hall Meeting, Change Forum, Leaders' Strategic Forum, Employee of the Year 2023 and Integrated Magazine Editorial Board Forum.

3. Media Komunikasi Internal

Media komunikasi internal memuat berbagai kampanye terkait program perubahan, nilai strategis INPRESIV, serta kebijakan dan informasi internal dalam mendukung implementasi Program Perubahan OJK *Way* 2023, melalui:

a. Penerbitan Majalah Intergrasi. Sepanjang tahun 2023, OJK menerbitkan 12 Majalah Integrasi berisikan berbagai informasi dan dokumentasi atas implementasi program perubahan, kinerja dan prestasi Satuan Kerja, serta kegiatan dan kebijakan terkini yang perlu diketahui oleh Insan OJK.
b. Pesan Anggota Dewan Komisioner. Sepanjang tahun 2023, OJK menerbitkan 10 pesan Anggota Dewan Komisioner untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan Anggota Dewan Komisioner kepada Insan OJK.

Selain itu, OJK juga memiliki media komunikasi internal lainnya melalui *lift sticker, screensaver, email blast* dan media sosial *Instagram* @OJKway.

3. Internal Communication Media

Internal communication media contains various campaigns relating to the change program, INPRESIV strategic values, as well as internal policies and information to support implementation of the OJK Way Change Program 2023 as follows:

a. Publication of the Integrated Magazine. In 2023, OJK published 12 issues of the Integrated Magazine containing various information and documenting change program implementation, the performance and accomplishments of work units as well as the latest activities and policies relevant to OJK staff.
b. Messages from BOC Members. In 2023, OJK published 10 messages from BOC members to communicate the sentiments BOC members wished to convey to OJK staff.

In addition, OJK also utilizes other internal communication media such as lift stickers, screensavers, email blasts, and the Instagram social media account @OJKway.

VI.6 Pengembangan SDM & Penguatan Riset SJK
HR Development and Strengthening Research in Financial Services Sector

VI.6.1. Pengembangan SDM SJK
HR Development in Financial Services Sector

Sebagai implementasi atas peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM-SJK) 2021 – 2025, OJK melaksanakan 17 program kerja dengan progres selama tahun 2023, sebagai berikut:

As part of the launch of the Financial Services Sector HR Development Blueprint 2021-2025, OJK implemented 17 work programs with progress in 2023 recorded as follows:

Tabel 6.2 Program Pengembangan SDM SJK
Table 6.2 HR Development Program in Financial Services Sector

No.	Program Kerja *Work program*	Progres *Progress*
1.	Pemberian Rekomendasi LSP *Providing Recommendations to Professional Certification Institutes (LSP)*	OJK memberikan Surat Rekomendasi kepada delapan LSP: 1. LSP Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah (LSP BEKSYA) (Penambahan skema Perasuransian dan BPRS) 2. LSP *Microfinance* Indonesia (Penambahan skema BPR) 3. LSP Penjaminan (Penambahan skema klaim dan subrogasi penjaminan. serta pejabat eksekutif) 4. LSP Keuangan Syariah (Perubahan skema manajemen risiko perbankan) 5. LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR) (Perubahan skema manajemen risiko perbankan) 6. LSP Keuangan Syariah (Penambahan skema *general banking*) 7. LSP Keuangan Syariah (Penambahan skema tresuri) 8. LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (Perubahan skema manajemen risiko perbankan dan skema tresuri) *OJK granted recommendation letters to eight Professional Certification Institutes (LSP):* *1. Islamic Finance and Economy Business LSP (LSP BEKSYA) (additional insurance and Islamic rural bank schemes)* *2. Microfinance Indonesia LSP (additional rural bank scheme)* *3. Guarantee LSP (additional claims and subrogation schemes as well as executive officer scheme)* *4. Islamic Finance LSP (changes to banking risk management scheme)* *5. Risk Management Certification LSP (LSP BSMR) (changes to banking risk management scheme)* *6. Islamic Finance LSP (additional general banking scheme)* *7. Islamic Finance LSP (additional treasury scheme)* *8. Banking Professional Certification Agency LSP (changes to banking risk management scheme and treasury scheme)*

No.	Program Kerja *Work program*	Progres *Progress*
2.	Administrasi pendaftaran LSP *LSP Registration Administration*	OJK memberikan Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP kepada dua LSP: 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Certif (LSP Certif); dan 2. Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (LSP AAMAI). *OJK granted a Registration Certificate (STTD) to 2 Professional Certification Institutes (LSP) licensed by the Indonesian National Professional Certification Agency (BNSP):* *1. LSP Certif* *2. Indonesia Insurance Management and Insurance Application Professional Certification Institute (LSP AAMAI)*
3.	Pengembangan *Knowledge Management System* (KMS) *Knowledge Management System (KMS) Development*	OJK melakukan penyempurnaan sistem dan fitur pada KMS: 1. Menyelesaikan *minor bug* dan *error*; 2. Finalisasi modul dan materi konten GRC; 3. Menambahkan materi dan *course* SINTESIS kontibusi SJK; 4. Menyelesaikan modul dan *course* SINTESIS *Data Science & Big Data Analytic*. *OJK improved and refined the KMS system and features:* *1. Resolved minor bugs and errors.* *2. Finalised the GRC module and content material.* *3. Added financial services sector contributions to the SINTESIS materials and course.* *4. Finalised data science and big data analytics for the SINTESIS module and course.*
4.	Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan *HR Competency Certification in Financial Services Sector*	Pada periode 2023, jumlah kelulusan peserta sertifikasi yang dilaksanakan LSP Terdaftar, yakni sebanyak 13.751 orang. *In 2023, a total of 13,751 participants graduated from certification programs by registered Professional Certification Institutes (LSP)*
5.	Program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan *future skills* *Competency Enhancement Program to Prepare Future Skills*	Terdapat pelaksanaan 12 program *future skills*. *There are 12 future skills programs*
6.	Kajian/*mini survey* tentang praktik dan situasi terkini *human capital* *Studies/Mini Surveys on the Latest Practices and Situation of Human Capital*	1. *Mini survey* oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) dengan judul: "Kesiapan SDM Perusahaan Pembiayaan dalam Mengadopsi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Digital"; dan 2. *Mini survey* oleh Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) dengan judul: "Praktik, Permasalahan dan Kebutuhan Pengembangan SDM BPR terkait Kerja Sama dengan Lembaga *Fintech*". *1. Mini survey conducted by the Indonesia Association of Finance Companies (APPI) entitled 'HR Readiness at Finance Companies to Adopt Digital-Based Risk Management', and* *2. Mini survey conducted by the Indonesia Association of Rural Banks (Perbarindo) entitled 'HR Development Practices, Issues and Needs at Rural Banks concerning Collaboration with FinTech'.*
7.	Program *attachment* SDM sektor jasa keuangan *Financial Services Sector HR Attachment Program*	Pencetakan buku Panduan Program *Attachment* dan pelaksanaan kegiatan *attachment* oleh 80 LJK. *Printing the Attachment Program Guidelines and implementing attachment programs by 80 financial services institutions*
8.	Program peningkatan kompetensi di masing-masing industri *Competency Enhancement Programs in Each Industry*	Berdasarkan laporan OJK *Survey* pada 1.484 LJK dari 15 Asosiasi, Rata-rata pegawai yang mengikuti pelatihan, sebagai berikut: 1. Pegawai Organik: *Hard skill* (72,25%). *Soft skill* (61,47%); dan 2. Pegawai Non-Organik: *Hard skill* (57,01%). *Soft skill* (46,52%). *Based on an OJK survey of 1.484 financial services institutions from 15 associations, Average employee training, was as follows:* *1. Organic Employees: hard skills (72.25%). soft skills (61.47%), and* *2. Inorganic Employees: hard skills (57.01%). soft skills (46.52%)*
9.	Digitalisasi fungsi *learning* dengan menggunakan teknologi terkini *Digitalisation of the Learning Function using Latest Technologies*	Pada tahun 2023. penggunaan teknologi *e-learning* diinisiasi oleh masing-masing LJK. Hanya sebesar 10,2% LJK yang belum menggunakan teknologi *e-learning*. *In 2023. financial services institution initiated the use of e-learning technology. with only 10.92% yet to adopt e-learning technology.*
10.	Penyusunan Kamus kompetensi sektor jasa keuangan *Preparation of a Competency Dictionary for the Financial Services Sector*	OJK bersama tim konsultan *Subject Matter Expert* (SME) terkait menyusun Laporan Akhir dan Buku Kamus Kompetensi Teknis untuk topik Kamus Kompetensi Pasal Modal dan Kamus Kompetensi Perasuransian. *In conjunction with a team of subject matter experts (SME). OJK prepared the Final Reports and Technical Competency Dictionaries for the capital market and insurance industries*

No.	Program Kerja *Work program*	Progres *Progress*
11.	Perancangan baru dan pengkajian ulang SKKNI *Revisit and New Design of National Competency Standards (SKKNI)*	Terdapat tiga SKKNI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu: 1. SKKNI Pasar Modal; 2. SKKNI Perasuransian; dan 3. SKKNI Lembaga Keuangan Mikro. *Three National Competency Standards (SKKNI) were finalised by the Ministry of Manpower, namely:* *1. Capital Market SKKNI,* *2. Insurance Industry SKKNI, and* *3. Microfinance Institution SKKNI.*
12.	Perancangan baru dan pengkinian KKNI *Revisit and New Design of Indonesia Qualification Framework (KKNI)*	Terdapat lima RKKNI yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu: 1. KKNI Perasuransian; 2. KKNI Pasar Modal; 3. KKNI *General Banking;* 4. KKNI Lembaga Keuangan Mikro; dan 5. KKNI Dana Pensiun. *Five Indonesia Qualification Frameworks (KKNI) were finalised by OJK, namely:* *1. Insurance Industry KKNI,* *2. Capital Market KKNI,* *3. General Banking KKNI,* *4. Microfinance Institution KKNI, and* *5. Pension Fund KKNI.*
13.	Pemetaan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi *Mapping HR Competency Certification Needs in Financial Services Sector based on Function*	Terdapat 12 kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM SJK berdasarkan fungsi. Sebanyak 1.123 pelapor telah memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi dari total 1.484 pelapor pada 15 asosiasi (75,67%). *There are 12 HR competency certification needs in the financial services sector based on function. Thus far, 1,123 reporting entities have fulfilled the competency certification needs out of a total of 1,484 from 15 associations (75.67%).*
14.	Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi industri *Harmonisation of Education and Training Curricula with Industry Competencies*	Pelaksanaan diskusi Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK bersama delapan Universitas nasional di Indonesia. dan audiensi bersama STMA Trisakti selaku mitra penyelarasan kurikulum. *The harmonisation of education and training curricula in the context of implementing the HR Development Blueprint was discussed with eight national universities in Indonesia and STMA Trisakti as partner.*
15.	Program pengembangan SDM *HR Development Program*	OJK Institute melaksanakan kegiatan *Capacity Building* dalam rangka implementasi pengembangan SDM SJK melalui 31 program *webinar* dan 16 kegiatan *workshop*. Total peserta *webinar* mencapai 97.957 orang dengan tingkat pemahaman sebesar 85,72 poin dan total peserta *workshop* mencapai 605 orang dengan tingkat pemahaman sebesar 79,39 poin. *The OJK Institute provided capacity building activities for HR development in the financial services sector through 31 webinars and 16 workshops. Webinar participants totalled 97,957 with the level of understanding reaching 85.72 points while workshop participants totalled 605. with the level of understanding reaching 76.98 points.*
16.	Penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital *Harmonisation of Education and Training Curricula with Digital Competencies*	Pelaksanaan Diskusi Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK terkait kompetensi digital bersama delapan universitas nasional di Indonesia, dan audiensi bersama STMA Trisakti selaku mitra penyelarasan kurikulum. *The harmonisation of education and training curricula in the context of implementing the HR Development Blueprint on digital competencies was discussed with eight national universities in Indonesia and STMA Trisakti as partner.*
17.	Pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital *Training for New Skills and Enhancing Digital Skills*	OJK Institute telah melaksanakan 11 program *webinar* dan lima kegiatan *workshop* terkait kompetensi digital. Total peserta *webinar* mencapai 37.789 orang dengan tingkat pemahaman sebesar 90,33 poin dan total peserta *workshop* sebesar 220 orang dengan tingkat pemahaman 76,29 poin. *The OJK Institute hosted 11 webinars and five workshops on digital competencies. Webinar participants totalled 37,789 with the level of understanding reaching 90.33 points while workshop participants totalled 220 with the level of understanding reaching 76.29 points*

Visit OJK
Pada tahun 2023, OJK telah memfasilitasi 4.838 peserta visit dari 25 SMA/SMK dan 21 universitas di Indonesia.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) OJK
Pada tahun 2023, terdapat 1.099 permintaan mahasiswa PKL dari Satuan Kerja dan 3.007 mahasiswa yang mendaftar melalui *email pkl@ojk.go.id.* Sebanyak 635 mahasiswa berhasil diterima dan direalisasikan untuk menjadi PKL di OJK.

Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) OJK
OJK melaksanakan kegiatan Magang Kampus Merdeka, yakni program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kompetensi mahasiswa/i. Kegiatan magang dilaksanakan selama satu semester (6 bulan) yang dikonversi menjadi 20 SKS. Sebanyak 40 mahasiswa magang di OJK disalurkan melalui MBKM Kemdikbud dan empat lainnya melalui magang mandiri kampus merdeka.

Secondment
Menindaklanjuti MoU dan MoA dengan *Financial Supervisory Service* (FSS) Korea, dilakukan proses *secondee* FSS Korea ke OJK.

OJK Mengajar
OJK menyelenggarakan kegiatan OJK Mengajar dalam rangka memperingati HUT ke-12 OJK bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner dengan tema "Kunci Sukses Menciptakan Talenta Profesional di Sektor Jasa Keuangan" dan narasumber lainnya.

Pustaka OJK Institute
e-library OJK adalah sistem aplikasi untuk pengelolaan koleksi buku fisik, buku digital dan koleksi internal di OJK yang dapat diakses secara *online* oleh internal dan publik. *e-library* dapat diakses melalui *link elibrary.ojk.go.id.* Selain *e-library*, terdapat juga aplikasi *e-book* OJK (ElibOJK), yang merupakan aplikasi untuk membaca koleksi *e-book android* melalui perangkat *android* di Google Play Store dan *desktop* yang dapat diunduh melalui *https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/*.

Jumlah pengunjung *e-library* selama tahun 2023 sejumlah 38.734 (rata-rata: 3.227/bulan). Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 131 buku digital, 312 koleksi internal dan 354 buku fisik. Selain itu, Pustaka OJK Institute juga melaksanakan kegiatan Bedah Buku yang berjudul: "Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja", "*What's So Wrong About Your Self Healing*" dan "Indonesia Menuju 2045".

Widyaiswara OJK
Pada tahun 2023 dilaksanakan tujuh kegiatan Widyaiswara Bicara dengan berbagai tema dan dikuti oleh internal OJK.

OJK Visit
In 2023, OJK facilitated 4,838 visitors from 25 schools and 21 universities in Indonesia.

OJK Work Experience
In 2023, OJK received 1,099 student requests for work experience at work units and a further 3,007 students registered via email pkl@ojk.go.id. In total, 635 students were accepted to attend work experience at OJK.

OJK Independent Campus Internship Program (MBKM)
OJK implemented Independent Campus Internship activities as part of a program initiated by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology to enhance student competencies. The internship activities provided during one semester (6 months) were converted into 20 SKS credits. A total of 40 student internships at OJK were allocated through the MBKN program of the Ministry of Education and Culture, along with four others through independent campus internships.

Secondment
After signing an MoU and MoA with the South Korea Financial Supervisory Service (FSS), OJK received secondees from the FSS.

OJK Teaching
The OJK hosted various OJK Teaching (OJK Mengajar) activities to commemorate the 12th anniversary of OJK together with the Deputy Chairman of the Board of Commissioners, entitled Keys to Success in Creating Professional Talent in the Financial Services Sector along with other speakers and resource persons.

OJK Institute Library
The OJK e-Library is an application to manage physical book collections, digital books and internal collections at OJK, which can be accessed online internally and by members of the public. The OJK e-Library is accessible via elibrary.ojk.go.id. In addition to the e-Library, OJK also has an e-book application, known as ElibOJK, which allows users to read e-book collections through android devices via the Google play store and desktop, which can be downloaded from https://ojkdigitallibrary.moco.co.id.

In 2023, the OJK e-Library received 38,734 visitors, averaging 3,227 per month. The OJK Institute Library currently houses 131 digital books, 312 internal collections and 354 physical books. In addition, the OJK Institute Library also hosted book reviews, entitled "Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja", "What's So Wrong About Your Self Healing" and "Indonesia Menuju 2045".

Widyaiswara OJK
In 2023, OJK hosted seven Widyaiswara Talk Online activities based on various themes and attended by internal OJK parties.

VI.6.2. Penguatan Riset SJK

Strengthening Research in the Financial Services Sector

OJK Institute melakukan riset lintas bidang OJK *Wide,* ekonomi makro, ekonomi global, kebijakan pemerintah dan kelembagaan OJK. Pada tahun 2023, OJK Institute telah melaksanakan delapan riset yang terbagi atas dua jenis riset, yakni penyusunan riset dalam rangka mendukung ketentuan/ kebijakan OJK dan peningkatan kinerja Industri Jasa Keuangan. Topik riset yang telah selesai dilaksanakan, antara lain:

The OJK Institute conducts comprehensive research spanning OJK Wide, macroeconomics, global economics, government policies, and OJK institutional frameworks. In 2023, the OJK Institute successfully completed eight distinct research endeavors categorized into two types: research endeavors aimed at supporting OJK stipulations/policies and those directed at enhancing the performance of the Financial Services Industry. Notable among the completed research topics are:

Tabel 6.3 Riset OJK Institut 2023
Table 6.3 OJK Institute Research 2023

No.	Program Kerja *Work Program*	Topik Riset *Research Topic*
1	Riset dalam rangka mendukung ketentuan/ kebijakan OJK *Research to support OJK regulations/policies*	1. Dampak Konglomerasi terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan. 2. Analisis Penerapan *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) di Pasar Modal. 3. Efektivitas *Market Conduct* pada Industri Asuransi Jiwa. *1. The Impact of Conglomeration on Banking Performance and Stability.* *2. Analysis of the Implementation of Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) in the Capital Market.* *3. Effectiveness of Market Conduct in the Life Insurance Industry in Indonesia.*
2	Riset dalam rangka mendukung kinerja Industri Jasa Keuangan *Research to support the Financial Services Industry's performance*	1. Memperkuat Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mengukur Kinerja IJK dengan *Metode Governance, Risk, & Compliance* (GRC). 3. Prospek *Open Finance* dalam Mendukung *Embedded Finance.* 4. Peran OJK dan IJK dalam Memperkuat Ekosistem KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai). 5. Survei Komunitas Muslim di Indonesia: Determinan Preferensi Konsumen terhadap Adopsi Keuangan Syariah. *1. Strengthening Financial Inclusion and Market Deepening to Enhance Societal Welfare.* *2. Measuring FSI Performance Using the Governance, Risk & Compliance (GRC) Method.* *3. Prospects of Open Finance in Supporting Embedded Finance.* *4. The Role of OJK and FSI in Strengthening the Ecosystem of Battery-Based Electric Vehicles (KBLBB).* *5. Survey of the Muslim Community in Indonesia: Determinants of Consumer Preferences for Sharia Financial Adoption.*
3	Riset/kajian lainnya *Other research/ studies*	*1. Revisit* Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. 2. Pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Harga Saham Sektoral di Pasar Modal Indonesia. 3. Prospek BPD dalam Mendukung Perekonomian Daerah. 4. Penyusunan *Market Conduct Index* pada Industri Asuransi Jiwa di Indonesia. 5. Riset *Big Data Analytic* SLIK. *6. Takes More Than Two to Tango: Banks' NIM, CIR, Costs and Profitability.* *7. Decentralized Finance.* *1. Revisiting the Development Strategy of Islamic Banking in Indonesia.* *2. The Influence of Benchmark Interest Rates on Sectoral Stock Prices in the Indonesian Capital Market.* *3. Prospects of Regional Development Banks in Supporting Local Economies.* *4. Development of a Market Conduct Index in the Life Insurance Industry in Indonesia.* *5. Research on Big Data Analytics (SLIK).* *6. Takes More Than Two to Tango: Banks' NIM, CIR, Costs and Profitability.* *7. Decentralized Finance.*

VI.7 Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna, dan Terintegrasi

Development of Innovative, Expeditious and Integrated Information Systems

VI.7.1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Development of Information System Applications

Pengembangan aplikasi sistem informasi yang berkelanjutan dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholders* industri jasa keuangan yang terintegrasi, maupun fungsi pendukung operasional OJK. Pada tahun 2023, terdapat 113 pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 30 pengembangan lanjutan tahun 2022 dan 83 merupakan inisiasi baru.

Sepanjang tahun 2023, OJK menyelesaikan pengembangan dan perluasan cakupan program kerja, antara lain Aplikasi Pelaporan *Online* OJK, Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi, Sistem Informasi Pengawasan, *Enterprise Data Warehouse* SJK Terintegrasi, Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Website* OJK, Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, serta beberapa aplikasi pendukung internal.

The development of information system applications is continuously carried out by OJK to optimize its regulatory, supervisory, and protection functions for stakeholders in the financial services industry, as well as to support operational functions. In 2023, OJK carried out 113 information system development programs, including 30 carryover programs initiated in 2022 and 83 are new initiatives.

Throughout 2023, OJK completed the development and expansion of various programs, including OJK's Online Reporting Application, Integrated Licensing and Registration System, Supervision Information System, Integrated Financial Services Sector Enterprise Data Warehouse, Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Information System, Regional Financial Access Acceleration Team Information System, Education and Consumer Protection Reporting Information System, Consumer Protection Portal, and several internal supporting applications.

VI.7.2. Pengembangan Aplikasi Pendukung Implementasi *Suptech* OJK

Development of Applications to Support OJK SupTech Implementation

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis terintegrasi berbasis TI, OJK melakukan penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung pelaporan, pengawasan, perizinan, pelindungan konsumen dan pemanfaatan data *analytic* secara berkelanjutan.

Sistem Informasi Pelaporan

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) merupakan sistem informasi yang dikembangkan sejak tahun 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara *online* dalam rangka *regulatory reporting*. Selama tahun 2023, OJK telah menyelesaikan pengembangan APOLO sebagai berikut:

1. Pelaporan Perbankan: Laporan Bulanan BPR/BPRS, Laporan Profil Risiko BPR/BPRS, Laporan Keuangan Berkelanjutan, Laporan KPMM dan ATMR, serta Rencana Bisnis Bank Umum.

2. Pelaporan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Laporan Insidental Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian dan Perusahaan Pemeringkat Efek, Laporan Ahli Syariah Pasar Modal, serta Laporan Insidental Wali Amanat.

OJK continuously refines and hones Information System Applications that support reporting, supervision, licensing, consumer protection and data analytics to improve the effectiveness and efficiency of integrated IT-based business processes.

Reporting Information System

OJK's Online Reporting Application (APOLO) has been developed since 2017 and is utilized by financial services institutions for online report submissions to comply with regulatory reporting requirements. In 2023, OJK completed the development of APOLO as follows:

1. *Banking Reporting: Rural Bank Monthly Report, (Islamic) Rural Bank Monthly Report, (Islamic and Conventional) Rural Bank Risk Profile, Sustainable Finance Report, Minimum Capital Adequacy Requirement and Risk-Weighted Assets Report, and Commercial Bank Business Plan.*
2. *Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Reporting: Incidental Report for Securities Administration Agencies, Custodian Banks and Securities Rating Agencies, as well as the Incidental Report for Trustees.*

3. Pelaporan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun Unit Usaha Syariah.
4. Pelaporan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya: Laporan Bulanan PT PNM (Persero) Konvensional dan Syariah, serta Laporan Berkala *Fintech Peer-to-Peer Lending*.

SLIK

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit/pembiayaan antar LJK. Sumber data SLIK diperoleh dari laporan rutin yang disampaikan oleh LJK Pelapor, yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, serta data keuangan debitur. Berdasarkan data tersebut SLIK menghasilkan informasi debitur (iDeb) yang dapat dimanfaatkan oleh OJK, LJK Pelapor, debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lain.

Sistem Informasi Pengawasan

OJK mengimplementasikan Sistem Informasi Pengawasan pada bidang Perbankan, Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, maupun Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun serta Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya. Sistem Informasi Pengawasan berperan dalam mengolah data pelaporan dan perizinan untuk digunakan oleh Pengawas dalam menganalisis data dan informasi, serta mampu menghasilkan laporan yang komprehensif dalam mendukung pengawasan *on-site* maupun *off-site*.

Sepanjang tahun 2023, OJK memperkaya fitur pada Sistem Informasi Pengawasan untuk sektor pengawasan, di antaranya Perbankan; Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon; Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; dan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya. Selain itu, kegiatan pengawasan juga didukung dengan aplikasi OJK-BOX (OBOX) yang dapat digunakan oleh Pengawas untuk mendapatkan data detail yang bersifat *case-by-case* dari LJK secara cepat. Melalui OBOX, pengawas dapat mendeteksi permasalahan LJK secara dini, memberikan respons pengawasan yang cepat dan tepat, serta memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien. Pada tahun 2023, pengembangan aplikasi OBOX dilakukan dalam rangka perluasan cakupan untuk pengawasan Pasar Modal.

Sistem Informasi Perizinan

Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi layanan perizinan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK memanfaatkan teknologi informasi melalui penyediaan aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK sebagai sistem layanan perizinan satu pintu. SPRINT memberikan kemudahan bagi PUJK mulai dari tahap pendaftaran/pengajuan, *monitoring* status/*tracking*, hingga mendapatkan Surat Keputusan Izin secara daring, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja di internal OJK, misalnya percepatan perizinan *Bancassurance* yang semula 101 hari kerja menjadi 19 hari kerja, dan percepatan perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank yang semula 105 hari kerja menjadi 22 hari kerja.

3. *Insurance, Guarantee Company and Pension Fund Reporting: Insurance Company, Reinsurance Company and Pension Funds Sharia Business Unit Business Plan Supervision Report.*
4. *Finance Company, Venture Capital Firm, Microfinance Institution and Other Financial Services Institution Reporting: Conventional and Islamic Monthly Report of PT Permodalan Nasional Madani (PNM), and Periodic Report of FinTech Peer-to-Peer Lending.*

Financial Information Services System (SLIK)

The Financial Information Services System (SLIK) functions as a means for exchanging loan/financing information between financial services institutions. SLIK's data source comes from periodic reports submitted by financial services institutions, including information on debtors, funding, collateral, guarantees, ownership and management, as well as borrowers' financial profiles. Based on these data, SLIK generates debtor information (iDeb) that can be used by OJK, financial services institutions, borrowers, credit bureaus (LPIP), and other parties.

Supervision Information Systems

OJK implements Supervision Information Systems for the Banking industry; Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange; Insurance, Reinsurance and Pension Funds; as well as Finance Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions and other financial services institutions. Supervision Information Systems plays a key role in processing the reporting and licensing data for further analysis by supervisors, as well as generating comprehensive reports that support on-site and off-site supervision.

Throughout 2023, OJK enriched the features of the Supervision Information Systems for various sectors, including the Banking industry; Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange; Insurance, Reinsurance, and Pension Funds; as well as Financing Companies, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and other financial services institutions. Additionally, supervisors are supported by the OJK-BOX (OBOX) application, which allows them to obtain granular data on a case-by-case basis from financial services institutions in a timely manner. OBOX provides supervisors with early warnings of issues within financial services institutions, enables quick and optimal supervisory responses, and helps optimize resource usage. In 2023, OJK expanded the OBOX application to include the scope of Capital Market supervision.

Licensing Information System

OJK utilizes information technology by providing the Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) as a one-stop licensing service to increase the efficiency, effectiveness, and transparency of licensing services for Financial Service Providers (FSPs). SPRINT offers greater convenience for FSPs in terms of online registration/submission, status monitoring/tracking, and obtaining a license, while also increasing the efficiency and effectiveness of OJK's internal working processes, for examples the Bancassurance licensing process, which previously entailed a duration of 101 working days, has been significantly streamlined to require only 19 working days, similarly the licensing process for the issuance of bonds and sukuk for bank issuers, previously spanning 105 working days, has been optimized to necessitate only 22 working days.

OJK bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SPRINT untuk penerbitan Surat Keputusan Izin dan dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen yang diterbitkan secara elektronik.

In collaboration with the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), OJK implements Digital Signatures (TTE) when issuing Business License Authorization Letters from SPRINT to increase the security and validity of the digital documents issued.

Pada tahun 2023, cakupan layanan perizinan pada SPRINT terus diperluas, antara lain Perizinan Kelembagaan dan Jaringan Kantor BPR/BPRS, Perizinan Produk Bank Umum, Pendaftaran Agen Asuransi dan Pembatalan Bukti Terdaftar Agen Asuransi, Perizinan Penyelenggara Urun Dana, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK/*Fit and Proper Test*) DPS BUS dan BPRS, serta Modul Biro Administrasi Efek (BAE). Secara total, SPRINT telah menyediakan lebih dari 465 sub izin pendukung perizinan dan telah menerbitkan izin lebih dari 80.000 Surat Keputusan Izin.

In 2023, the scope of licensing services in SPRINT was further expanded. This expansion included Institutional and Office Network Licenses for Conventional and Islamic Rural Banks, Product Licenses for Commercial Banks, Registration and Revocation of Registration for Insurance Agents, Fit and Proper Tests for Members of the Sharia Supervisory Board (DPS) for Sharia Business Units and Islamic Rural Banks, as well as Securities Administration Agencies (SAA) registration. In total, SPRINT has generated more than 465 sub-licenses and issued more than 80,000 Business License Authorization Letters.

Sistem Informasi Perlindungan Konsumen

OJK mengembangkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat mendorong terselenggaranya praktik *Online Dispute Resolution* (ODR) di Sektor Jasa Keuangan. APPK dibangun sebagai media yang menghubungkan OJK, konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di dalam satu kanal. Melalui APPK, konsumen dapat menyampaikan pertanyaan dan informasi kepada OJK, pengaduan kepada PUJK, serta menjadi salah satu jalur untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa dengan PUJK melalui LAPS. Selain itu, APPK dapat menjadi salah satu *tools* bagi OJK untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) atas penanganan pengaduan konsumen oleh PUJK.

Consumer Protection Information System

OJK developed the Consumer Protection Portal Application (APPK) to promote the adoption of Online Dispute Resolution (ODR) practices in the financial services sector. APPK serves as a platform to connect OJK, consumers, Financial Service Providers (FSPs), and Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in one integrated channel. Through APPK, consumers can submit questions and information to OJK, lodge complaints with FSPs, and request dispute resolution processes with an FSP through LAPS. Additionally, APPK serves as a monitoring tool for OJK to oversee how FSPs handle consumer complaints.

Pada tahun 2023, APPK dikembangkan dengan penambahan notifikasi status pengaduan konsumen melalui WhatsApp, penyederhanaan mekanisme pemilihan permasalahan yang akan diadukan, serta fitur pengajuan keberatan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan oleh PUJK. Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian bisnis proses terkait jumlah hari kerja dan pengajuan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan.

In 2023, several enhancements were made to APPK, including additional notifications regarding the status of consumer complaints via WhatsApp, simplification of complaint issue selection, and feature to reject the solution provided by the FSPs. Additionally, several adjustments were made in business processes, including changes to the total business days and requests to extend the time limit for the complaint handling process.

Sistem Informasi *Data Analytic* SJK Terintegrasi

Dalam rangka mendukung proses pengolahan data dan penyajian informasi hasil analisis yang semakin komprehensif, OJK membangun *Enterprise Datawarehouse* (EDW) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat menghasilkan data berkualitas. Implementasi EDW membantu OJK dalam proses pengambilan keputusan agar lebih tepat dan akurat dalam rangka penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis TI.

Pada tahun 2023, OJK melakukan perluasan cakupan pada EDW, yang meliputi Modul Bank Umum (termasuk penambahan skenario OSIDA Bank Umum), Modul Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan, Laporan Keuangan Emiten dan atau Perusahaan Publik, *Artificial Intelligence Based Control for Incompliance and Irregularities* (AICII) BPRS, serta *Dashboard* Perizinan.

Integrated Data Analytics Information System for the Financial Services Sector

To enhance data management processes and provide comprehensive data analytics information, OJK developed an Integrated Financial Services Sector (FSS) Enterprise Data Warehouse (EDW). This EDW integrates data from various sources and ensures the generation of quality data. The implementation of the EDW enables OJK to make more precise and accurate decisions, thereby enhancing integrated FSS technology-based supervision.

In 2023, OJK expanded the scope of its EDW to include features such as the Commercial Bank Module (including the OSIDA scenario for commercial banks), the Insurance, Pension Funds, and Finance Company Module, the Financial Reports of Issuers and/or Publicly Listed Companies, Artificial Intelligence-Based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) for Islamic Rural Banks, as well as a Licensing Dashboard.

OJK telah memanfaatkan teknologi *big data analytics* yang disajikan melalui "Aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* (BI) Olahan *Big Data*". Hingga akhir tahun 2023, pengolahan *big data* OJK telah diperluas dengan 10 topik baru, yaitu *Market Surveillance, Misconduct Analysis, Microprudential, Macroprudential*, OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA), Data *Assurance, Log Analysis, Coverage Map, Open Source Intelligence* (OSINT) dan DNA *Graph Network*.

OJK has also utilized big data analytics technology presented through "the Big Data and Business Intelligence Dashboard Application". By the end of 2023, OJK's big data analytics had been expanded to cover 10 additional topics: Market Surveillance, Misconduct Analysis, Microprudential, Macroprudential, OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA), Data Assurance, Log Analysis, Coverage Map, Open Source Intelligence (OSINT), and DNA Graph Network.

VI.7.3. Pengembangan Infrastruktur TI
IT Infrastructure Development

1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan dan Keamanan Layanan Sistem Informasi (SI) OJK

OJK melakukan peningkatan infrastruktur dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan layanan sistem informasi, antara lain:

a. Penguatan konfigurasi infrastruktur, aplikasi dan *database* di *Data Recovery Center* (DRC) OJK untuk memastikan sistem yang digunakan dalam menjalankan layanan sistem informasi di OJK memiliki tingkat keandalan yang memadai, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *downtime* dan memastikan sistem dapat beroperasi secara optimal.
b. Pelaksanaan uji coba *switchover* layanan OJK dari *Data Center* (DC) ke DRC OJK untuk memastikan proses pemulihan (*recovery*) dan pengalihan (*failover*) dari DC utama ke DRC berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan ketika terjadi kegagalan atau bencana yang mengganggu operasional *Data Center* Utama OJK.

2. Pengembangan Teknologi *Cloud* di OJK

Selaras dengan Rencana Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK tahun 2023-2027 dan untuk meningkatkan kinerja sistem informasi, OJK telah mengimplementasikan teknologi *Cloud*, antara lain:

a. Melakukan penyiapan pembangunan infrastruktur dan uji coba layanan *Cloud* di lingkungan OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.
b. Implementasi dan migrasi empat aplikasi *on-premise* ke layanan *Cloud*.

3. Penerapan *Gov-Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di OJK

Gov-CSIRT (*Government-Computer Security Incident Response Team*) adalah sebuah tim atau kelompok yang bertugas menangani insiden keamanan komputer atau informasi yang terjadi di lembaga pemerintahan/negara. Gov-CSIRT bertujuan untuk melindungi sistem informasi pemerintah dari serangan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional. Pada tahun 2023, OJK bersama BSSN melakukan implementasi Penerapan Gov-CSIRT di OJK dengan harapan meningkatkan keamanan sistem informasi OJK, mengidentifikasi dan mengembangkan rencana untuk mencegah/menghadapi ancaman keamanan yang mungkin terjadi di masa depan.

1. Improving Supporting Infrastructure for the Continuity and Security of OJK Information System (IS) Services

OJK made improvements in terms of the infrastructure and policies to maintain the continuity of Information Systems services as follows:

a. Strengthening the configuration of infrastructure, applications and databases at the OJK Data Recovery Centre (DRC) to ensure the adequate reliability of information system services at OJK, thereby reducing possible downtime and ensuring the systems can operate optimally.
b. Implementing OJK service switchover trials from the main data centre (DC) to the OJK DRC to safeguard seamless and reliable recovery and failover processes from the main DC to the DRC in the event that a failure or disaster interrupts operations at the primary OJK data center.

2. Developing Cloud Technology at OJK

Consistent with the OJK Information System Development and Implementation Plan 2023-2027 and to improve the performance of information systems, OJK has implemented cloud technology as follows:

a. Preparing infrastructure and trialling cloud services within the OJK environment to support the implementation of OJK duties and functions.
b. Implementing and migrating four on-premises applications to cloud services.

3. Implementing the Government-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) at OJK

Gov-CSIRT (Government-Computer Security Incident Response Team) is a team or group tasked with handling cyber security incidents or information in government/state institutions. Gov-CSIRT aims to protect government information systems from attacks or threats posed to national security. In synergy with the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), OJK implemented Gov-CSIRT at OJK in 2023, which is expected to increase the security of information systems at OJK, as well as identify and develop plans to prevent/overcome security threats that could emerge moving forward.

Gambar 6.4 Layanan Jaringan Ekstranet untuk Pertukaran Data dengan Dukcapil
Figure 6.4 Extranet Network Services for Data Exchange with the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil)

4. Penyediaan Layanan Jaringan Ekstranet untuk Pertukaran Data dengan Dukcapil

Dalam rangka mendukung kebutuhan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (Dukcapil) dengan OJK sebagaimana Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. OJK telah menyediakan layanan koneksi jaringan ekstranet antara OJK dengan Dukcapil dan telah memanfaatkan fungsi layanan Dukcapil *Web Portal* dan *Web Service* untuk aplikasi iDebKu, serta *Web Portal* untuk aplikasi SPRINT dan SIPROJEK.

5. Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung *Flexible Office* (FOS)

Dalam mendukung implementasi *Flexible Office Space* (FOS) di lingkungan OJK, OJK Melakukan beberapa peningkatan infrastruktur TI antara lain:

a. Penguatan Pengamanan TI
   OJK memberikan fasilitas berupa *Virtual Private Network* (VPN) kepada seluruh pegawai dan mengimplementasikan:
   - *Redundancy* perangkat VPN *gateway* pada *Disaster Recovery Center* (DRC) OJK dalam rangka peningkatan *availability* layanan.
   - Teknologi VPN *Multi Factor Authentication* (MFA) dalam rangka penguatan pengamanan akses jaringan internal OJK dari luar kantor.

b. Penguatan Jaringan *Wi-Fi*
   Penerapan FOS di OJK akan dilakukan dengan dukungan koneksi jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) bagi pegawai dan mengimplementasikan peningkatan perangkat *Wi-Fi Access Point* untuk Kantor OJK tipe A, B dan C.

c. Penyediaan Perangkat *Video Conference Dedicated*
   OJK menyediakan fasilitas perangkat *Video Conference Dedicated* untuk mendukung koordinasi efektif satuan kerja.

4. Providing Extranet Network Services for Data Exchange with the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil)

Supporting the requirement for data exchange between the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and OJK in accordance with a Cooperation Agreement (PKS) concerning the Utilisation of Citizenship Identity Numbers (NIK), Population Data and Electronic Identification Documents (eKTP), OJK installed extranet network connection services between OJK and Dukcapil, providing access to the web portal and web services of Dukcapil via the iDebKu application, as well as the web portals for the SPRINT and SIPROJEK applications.

5. Preparing Information System Infrastructure to Support Flexible Office Space (FOS)

Supporting the implementation of Flexible Office Space (FOS) in the OJK environment, OJK has enhanced various IT infrastructure as follows:

a. Strengthening IT Security
   ining security during FOS implementation, OJK provides Virtual Private Network (VPN) facilities to all OJK staff and also implemented:
   - *VPN gateway redundancy at the OJK Disaster Recovery Centre (DRC) to increase service availability.*
   - *Multifactor Authentication (MFA) VPN technology to strengthen security when accessing the OJK internal network from outside the office.*

b. Strengthening the Wi-Fi Network
   FOS implementation at OJK is supported by Wi-Fi connections for OJK staff to ensure agility in each work unit. OJK has increased the number of Wi-Fi access points for OJK offices of type A, B and C.

c. Providing Dedicated Video Conferencing Equipment
   OJK provides supporting facilities for video conferencing equipment to support coordinated and effective work unit.

VI.8 Logistik
Logistics

1. Status Gedung Kantor OJK Daerah

Pada akhir tahun 2023, OJK telah memiliki 14 gedung kantor di antaranya 12 gedung hasil pembelian dan dua gedung atas hasil hibah. Selain itu, OJK juga menggunakan empat gedung dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah sebagai gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara; Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah; Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; serta Kantor OJK Provinsi Bengkulu. Sementara itu, OJK menggunakan 15 gedung sewa dari swasta dan dua gedung sewa dari Bank Indonesia. Enam di antara Gedung sewa tersebut, di antaranya Medan, Banjarmasin, Lampung, Aceh, Jambi, Tasikmalaya dan Kupang telah memiliki aset tanah/bangunan milik OJK hasil pembelian/hibah yang siap dibangun.

2. *Flexible Office Space* (FOS)

a. Latar Belakang Penerapan FOS di OJK

OJK menerbitkan pedoman pola kerja baru secara fleksibel bagi pegawai di lingkungan OJK. Sejalan dengan kebijakan tersebut, OJK menyusun standar ruang kerja bagi pegawai OJK dalam rangka penerapan FOS. Ruangan kantor fleksibel dirancang untuk memberikan fleksibilitas penataan ruang kerja dalam hal ukuran dan fasilitas yang disediakan dengan desain yang berfokus pada kemudahan adaptasi, serta memungkinkan pengelolaan ruang kerja yang lebih efisien.

b. Perkembangan Penerapan FOS

OJK melaksanakan peresmian lantai 5 Gedung Soemitro yang merupakan area ruang kerja yang dijadikan sebagai *pilot project* penataan ruang kerja dengan konsep FOS di kantor pusat OJK. Ke depan akan dilakukan penataan ruang kerja dengan konsep FOS lanjutan di lantai Gedung Soemitro dan gedung OJK lainnya, sehingga kebutuhan penyediaan ruang kerja yang nyaman dapat terpenuhi dan mampu meningkatkan efektivitas dan kinerja sumber daya di lingkungan OJK.

c. Program Ruang Kerja

1) Penyediaan fasilitas sesuai standar dan perancangan penataan disesuaikan dengan ketersediaan gedung kantor sesuai persyaratan, kondisi ruangan, ketersediaan luas ruangan, material, perlengkapan dan peralatan kerja di lokasi setempat serta ketersediaan anggaran.
2) Prinsip Desain Ruang Kerja FOS.
   a) Penyusunan konsep dan desain ruang kerja, mempertimbangkan identitas Otoritas Jasa Keuangan, optimalisasi bangunan kantor yang ada, optimalisasi penggunaan aset bersama, optimalisasi teknologi (*smart office*), ramah lingkungan (*eco office*), Kebutuhan difabel dan ramah anak, keamanan dan kenyamanan, dan protokol kesehatan.

1. Status of OJK Regional Office Buildings

In the end of 2023, OJK owned 14 office buildings, including 12 buildings purchased outright and two buildings received as grants. Furthermore, OJK utilizes four buildings with a borrowing-use status from local governments as OJK office buildings in the provinces of North Sulawesi, Gorontalo, and North Maluku; Central Kalimantan; East Kalimantan and North Kalimantan; and Bengkulu. Additionally, OJK rents 15 buildings from private entities and two buildings from Bank Indonesia. Notably, six of these rented buildings, located in Medan, Banjarmasin, Lampung, Aceh, Jambi, Tasikmalaya, and Kupang, already have OJK-owned land/building assets from purchases or grants that are ready for construction.

2. Flexible Office Space (FOS)

a. Background of FOS Implementation at OJK

OJK issued new flexible office guidelines for OJK staff. In accordance with that policy, OJK prepared workspace standards for OJK employees in the context of FOS implementation. Flexible office space is designed to provide greater flexibility in the arrangement of workspaces in terms of size and the facilities available with a design that focuses on ease of adaptation, while allowing for more efficient workspace management.

b. Development of FOS Implementation

OJK officially designated the fifth floor of the Soemitro Building as a pilot project for FOS concept implementation at OJK head office. Moving forward, OJK will expand the advanced FOS concept to other floors in the Soemitro Building and other OJK buildings, thereby meeting the need to provide comfortable workspaces, while boosting the effectiveness and performance of resources in the OJK environment.

c. Workspace Program

1) Providing facilities in accordance with prevailing standards and planning the arrangement according to the availability of office buildings in pursuance of the requirements, room conditions, available room area, materials, work equipment and devices at a location as well as the budget available.
2) Design Principles of FOS.
   a) Preparing the workspace concept and design based on the identity of the Financial Services Authority (OJK) by optimising existing office buildings, optimising the collective use of assets, as well as optimising technology (smart office) and environmentally friendly materials (eco-office), which are accessible to persons living with disabilities and children, secure and comfortable and conform with strict health protocols.

b) Jumlah dan jabatan pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFO) dan klastering Satuan Kerja.
c) Penyediaan peralatan mempertimbangkan aspek efisiensi energi, kesehatan dan perkembangan teknologi terkini.
d) Penataan ruang kerja dirancang dengan mengutamakan susunan tempat kerja yang dapat diubah sesuai kebutuhan.

3) Penyediaan ruang kerja terdiri dari ruang kerja utama, ruang rapat, dan ruang pendukung

b) The number and positions of employees following Work From Home (WFH) protocols and work unit clustering.
c) Providing equipment based on energy efficiency, health and the latest technological developments.
d) Arranging workspaces by prioritising designs that can be tailored to general and specific needs.

3) Providing workspaces consisting of the primary workspace, meeting rooms, and supporting spaces.

Gambar 6.5 Implemasi FOS
Figure 6.5 FOS Implementation

3. Sistem Informasi dan Kebijakan Kelogistikan

a. Sistem Informasi *Procurement* OJK (SI-PROJEK)

SI-PROJEK dibangun sejak tahun 2017 dan dilatarbelakangi transformasi logistik melalui otomasi dan digitalisasi proses bisnis, independensi pengaturan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta fleksibilitas penggunaan dan pemeliharaan aplikasi.

b. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa OJK

1) *Center-led*
Satuan Kerja logistik mengoordinasikan serta menyiapkan dukungan & *tools* pengadaan, namun tidak semua pengadaan dilakukan Satuan Kerja logistik dengan pertimbangan efesiensi dan efektivitas.
2) *E-Procurement* OJK
Pembangunan aplikasi sistem *procurement* milik OJK (SI-PROJEK) sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya.
3) Modernisasi Bisnis Proses
a) Pengelolaan penyedia
b) Perencanaan pengadaan melalui e-Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (DRUPBJ)
c) Pelaksanaan pengadaan melalui Tender *Management System* (TM)
d) Pelaksanaan *profiling*
e) E-Katalog
f) E-Kontrak
g) E-Serah Terima

3. Information Systems and Logistics Policy

a. OJK Procurement Information System (SI-PROJEK)

SI-PROJEK has been developed since 2017, motivated by logistics transformation through automation and digitalisation of the business processes, regulatory and procurement independence, as well as flexibility in the use and maintenance of applications.

b. OJK Procurement Policy

1) Centre-led
The logistics work unit coordinates and prepares procurement support and tools, yet not all procurement is performed by the logistics work unit due to efficiency and effectiveness considerations.
2) OJK e-Procurement
Development of the OJK Procurement Information System (SI-PROJEK) based on needs, which can be integrated with other systems.
3) Modernisation of the Business Processes
a) Vendor management
b) Procurement planning through the e-procurement planning system (DRUPBJ)
c) Procurement performed through the Tender Management (TM) System
d) Profiling
e) E-Catalogue
f) E-Contract
g) E-Receipt

Terdapat pemisahan fungsi antara perencana/pengendali dengan pelaksana pemilihan penyedia dengan pembentukan unit khusus sesuai proses bisnis di atas. Kemudian, manajemen risiko di setiap tahapan pengadaan, *monitoring* dan evaluasi, serta pendampingan dilaksanakan oleh Satuan Kerja pengendalian kualitas.

c. Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa OJK

1) Sederhana dan mudah diimplementasikan;
2) Sistem terintegrasi melalui Sistem *Procurement* OJK;
3) Mendapatkan penyedia yang tepat (*Vendor Management System*);
4) Pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab organisasi pengadaan secara tegas dan jelas;
5) Transparan dan *Governance*
6) Standardisasi pengadaan barang/jasa OJK melalui standar dokumen pemilihan, kontrak dan *profiling*;
7) Proses pemilihan penyedia lebih cepat, tepat dan efisien dengan metode pemilihan yang selaras dengan kebutuhan barang/jasa OJK; dan
8) Hasil kajian *Procurement Maturity Assesment* oleh Konsultan, OJK berada di level proaktif di atas rata-rata lembaga instansi.

d. Tahapan Pengembangan SI-PROJEK

Aplikasi SI-PROJEK dikembangkan melalui jalur PKSI secara *multiyear* sejak 2017 dan pada tahun 2023-2024 fokus pada: integrasi SI-PROJEK dan SI-AUTO (data vendor & pembayaran); *dashboard* VMS dan pengadaan; metode pemilihan *itemize*.

Modul dan Fungsi Modul di aplikasi SIPROJEK antara lain: *dashboard, vendor management*, daftar rencana umum pengadaan barang dan jasa, tender *management*, manajemen kontrak.

There is a separation of function between the planner/controller and the officer in charge of selecting vendors by establishing a special unit according to the aforementioned business processes. Risk management at each stage of procurement, monitoring and evaluation as well as support is performed by the quality control work unit.

c. Advantages of OJK Procurement

1) Simple and straightforward to implement,
2) Integrated system via OJK procurement system,
3) Vendor Management System,
4) Clearly defined separation of function, authority and responsibility of the procurement organisation,
5) Transparency and governance,
6) Standardisation of OJK procurement processes through standard documents, contracts and profiling,
7) Faster, more accurate and efficient vendor selection process in line with OJK's goods/services needs, and
8) Results of Procurement Maturity Assessment by an independent consultant show that OJK is at the proactive level, above the institutional average.

d. Development Stages of SI-PROJEK

The SI-PROJEK application has been developed through the PKSI channel over multiple years from 2017 and in 2023-2024 the focus is on: SI-PROJEK and SI-AUTO integration (payments and vendor data, procurement and VMS dashboard, Itemisation method.

The modules and functions of the SI-PROJEK application include the following: dashboard, vendor management, procurement plan registration, tender management, contract management.

VII

Outlook dan Arah Strategis 2024

Outlook and Strategic Direction 2024

Ekonomi global di 2024 masih diliputi ketidakpastian. Sejalan tekanan inflasi yang mereda di sebagian besar wilayah, Bank Sentral akan mulai akomodatif melakukan penurunan suku bunga kebijakannya. Beberapa Bank Sentral, seperti The Fed, ECB, dan BoE diperkirakan akan melakukan pemotongan suku bunga pada semester I-2024. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan kedepan yang diprediksi mempengaruhi perkembangan ekonomi 2024.

OJK menetapkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, peluang, dan prioritas kebijakan serta target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2024, dengan harapan sektor jasa keuangan dapat stabil dan tumbuh serta berkontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia.

Global economic conditions in 2024 remain uncertain. As inflationary pressures ease in most regions, central banks are expected to begin accommodatively lowering policy interest rates. Central banks such as The Fed, ECB, and BoE are anticipated to cut interest rates in the first half of 2024. However, several challenges are predicted to affect economic developments in 2024.

OJK has set its policy direction considering various challenges, opportunities, policy priorities, and the government's economic growth targets for 2024, with the hope that the financial services sector will remain stable, grow, and contribute optimally to Indonesia's economy.

VII.1 *Outlook* Perekonomian Global 2024

Global Economic Outlook 2024

Seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global, IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi global di 2024 di angka 3,1% dengan divergensi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih relatif lebar. Amerika Serikat diperkirakan mengalami *soft landing* dengan perlambatan ekonomi menjadi 2,1% pada 2024 dan 1,7% pada 2025. Sementara itu perekonomian di Eropa diprediksi mampu pulih ke 0,9% di tahun 2023. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai motor *emerging market* diprediksi kembali termoderasi di level 4,6% di tahun 2023. IMF mencatat prospek jangka menengah *uncertain* karena ketidakseimbangan terhadap investasi perumahan dan infrastruktur.

Consistent with high global economic uncertainty, the International Monetary Fund (IMF) forecasts world economic growth in 2024 at 3.1%, accompanied by relatively broad economic growth divergence. The United States (US) is expected to experience a soft landing with economic growth moderating to 2.1% in 2024 and 1.7% in 2025. Meanwhile, the economy in Europe is predicted to recover to 0.9% growth in 2023. Conversely, economic growth in China, as a driving force of emerging markets (EM), is projected to moderate further in 2023 to 4.6%. The IMF describes the medium-term outlook as uncertain given imbalances in terms of housing and infrastructure investment.

Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
Graph 7.1. Global Economic Growth Projections

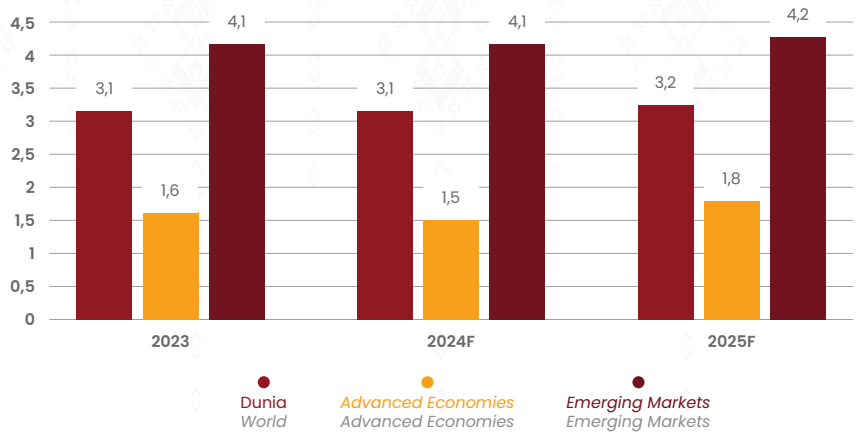

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Table 7.1. Economic Growth Projections

	Proyeksi Januari 2024 *January 2024 Projection*			Dari Oktober 2023 *Δ from October 2023*	
% yoy	**2023**	**2024F**	**2025F**	**2024F**	**2025F**
PDB | *GDP*					
Global | *World*	**3,1**	**3,1**	**3,2**	0,2	0
AE | *AE*	**1,6**	**1,5**	**1,8**	**0,1**	**0**
AS | *US*	2,5	2,1	1,8	0,6	-0,1
Zona Eropa | *Euro Zone*	0,5	0,9	1,7	-0,3	-0,1
Inggris | *UK*	0,5	0,6	1,6	0,0	-0,4
Jepang | *Japan*	1,9	0,9	0,8	**-0,1**	0,2
EM | *EM*	**4,1**	**4,1**	**4,2**	**0,1**	**0,1**
Tiongkok | *China*	5,2	4,6	4,1	**0,4**	0
India | *India*	6,7	6,5	6,5	0,2	0,2
Indonesia | *Indonesia*	**5,0**	**5,0**	**5,0**	0	0

Sumber: IMF *World Economic Outlook* Januari 2024
Source: IMF World Economic Outlook, January 2024

Sejalan tekanan inflasi yang mereda di sebagian besar wilayah, Bank Sentral akan mulai akomodatif melakukan penurunan suku bunga kebijakannya. Beberapa Bank Sentral, seperti The Fed, ECB, dan BoE diperkirakan akan melakukan pemotongan suku bunga pada semester I-2024. Berbeda dengan mayoritas Bank Sentral, Bank of Japan diproyeksikan meningkatkan suku bunga kebijakan pada Maret 2024.

In line with milder inflationary pressures in most regions, Central Banks will begin to adopt an accommodative posture by lowering policy rates. Several Central Banks, including the US Federal Reserve (Fed), European Central Bank (ECB) and Bank of England (BoE), are expected to cut interest rates in the first semester of 2024. Departing from most other Central Banks, however, the Bank of Japan (BoJ) is projected to increase its policy rate in March 2024.

Penurunan harga komoditas dan fluktuasi di pasar keuangan menjadi potensi risiko yang perlu diwaspadai, mengingat kemungkinan adanya divergensi besar antara ekspektasi pasar dan kebijakan yang diambil oleh Federal Reserve. Meskipun tanda pemulihan muncul, kebijakan moneter yang ketat dari The Fed menjadi faktor yang menimbulkan ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan global.

Lower commodity prices and financial market fluctuations are potential risks that demand vigilance considering the possibility of broad divergence between market expectations and the policies instituted by the Fed. Despite emerging signs of recovery, monetary tightening by the Fed could heighten uncertainty and trigger shocks in the global financial markets.

Ketidakpastian geopolitik menjadi *downside risk* pada prospek ekonomi global. Konflik di berbagai wilayah, seperti konflik di Timur Tengah atau ketegangan antara negara-negara besar, seperti Rusia dan Amerika Serikat, dapat memicu ketidakstabilan yang berdampak pada pasar keuangan dan perdagangan internasional. Di samping itu, ancaman terorisme, pergeseran kekuatan geopolitik, dan ketidakpastian atas kebijakan luar negeri dari beberapa negara dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi pasar global.

Deepening geopolitical uncertainty poses a downside risk to the global economic outlook. Unresolved conflicts in several regions, including the Middle East, and geopolitical tensions between global players, such as Russia and the US, could trigger instability in the financial markets and impact international trade. In addition, the threat of terrorism, geopolitical rebalancing and uncertainty surrounding foreign policy in several countries could create significant uncertainty for the global market.

VII.2 *Outlook* Perekonomian Domestik & Sektor Jasa Keuangan 2024

Outlook for the Domestic Economy and Financial Services Sector in 2024

Selain kondisi ekonomi global, terdapat beberapa tantangan ke depan yang diprediksi mempengaruhi perkembangan ekonomi 2024. Salah satunya terkait potensi penurunan harga komoditas yang memberikan tekanan pada kinerja ekspor ke depan serta permintaan kredit dari sektor terkait. Oleh karenanya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh di 4,9% sampai 5,2% sebagaimana diprediksikan oleh beberapa Lembaga baik internasional maupun Pemerintah.

In addition to global economic conditions, several future challenges are expected to influence economic developments in 2024. One such challenge relates to potentially lower commodity prices that will intensify pressures on export performance moving forward as well as the demand for loans from related sectors. Consequently, national economic growth in Indonesia is projected in the 4.9-5.2% range in line with the predictions of several international and government institutions.

Beberapa Lembaga domestik maupun internasional seperti OECD, ADB serta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di *range* 4,7% - 5,5%.

Several domestic and international organisations, including the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Bank Indonesia, project economic growth in the 4.7-5.5% range.

Outlook kinerja sektor jasa keuangan tahun 2024 mempertimbangkan tantangan, peluang, dan prioritas kebijakan serta target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2024.

The outlook for the financial services sector in 2024 considering the challenges, opportunities as well as policy priorities and government economic growth targets for 2024.

Grafik 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Pemerintah dan Internasional (%)
Graph 7.2. Domestic Economic Growth Projections by International and Government Institutions

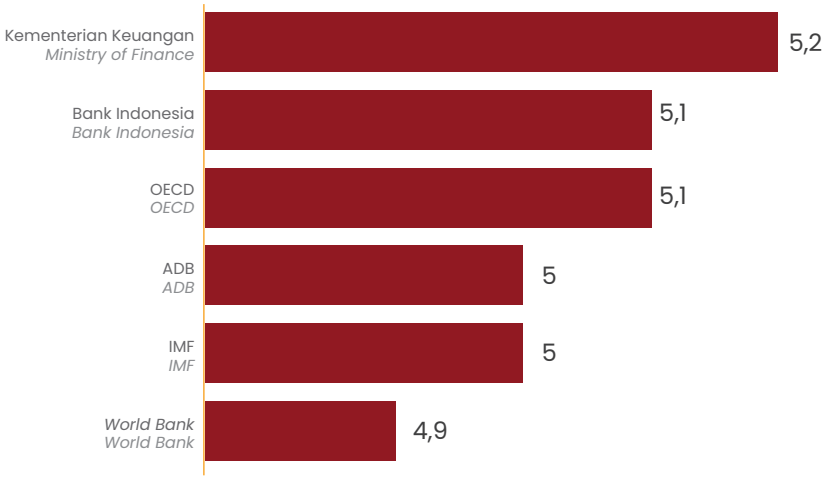

Sumber: IMF (*World Economic Outlook, January 2024*), *World Bank* (*Global Economic Prospect, January 2024*)
Source: IMF (World Economic Outlook, January 2024), World Bank (Global Economic Prospect, January 2024)

Tabel 7.2. *Outlook* Sektor Jasa Keuangan 2024
Table 7.2. Financial Services Sector Outlook 2024

		2023	2024F
Perbankan *Banking Industry*	Kredit *Loans*	10,38%	9% - 11%
	DPK *Third-Party Funds (Deposits)*	3,73%	6% - 8%
Pasar Modal *Capital Market*	Penghimpunan Dana (dalam Triliun) *Fundraising (in Trillion)*	Rp255,33	Rp200
IKNB *NBFI*	Piutang pembiayaan *Financing Receivable*	13,23%	10% - 12%
	Aset Perusahaan Asuransi Jiwa (dalam Triliun) *Life Insurance Industry Assets (in Trillion)*	-0,04% (Rp620,5)	4% - 6%
	Aset Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi (dalam Triliun) | *General Insurance and Reinsurance Industry Assets (in Trillion)*	12,77% (Rp271,4)	
	Aset Dana Pensiun (dalam Triliun) *Pension Fund Assets (in Trillion)*	6,91% (Rp368,7)	10% - 12%

VII.3 Peta Strategi 2024
Strategy Map 2024

STAKEHOLDER

SS.1 **Mengembangkan IJK yang Sehat, Efisien, dan Sinergitas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat**
To Develop a Healthy and Efficient Financial Services Industry based on Integrity, while Strengthening Consumer and Public Protection

IKU 1.1. Tingkat kesehatan IJK
IKU 1.2. Tingkat penyelesaian IJK dan profesi penunjang sektor keuangan dalam pengawasan tertentu
IKU 1.3. Tingkat penerapan strategi penguatan integritas IJK (Strategi anti *fraud* atau SMAP)
IKU 1.4. Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas penyelesaian pengaduan SJK
KPI 1.1. Soundness of financial services industry
KPI 1.2. Resolution of financial services institutions and supporting professions in the financial sector under specific supervision
KPI 1.3. Application of integrity strengthening strategies by the financial services industry (anti-fraud or SMAP strategies)
KPI 1.4. Compliance of financial services providers regarding complaint settlement in the financial services sector

SS.2 **Terwujudnya Pendalaman Pasar serta Peningkatan Literasi dan Inklusi**
To Realise Financial Market Deepening, while Increasing Financial Literacy and Inclusion

IKU 2.1. Tingkat pendalaman sektor keuangan
IKU 2.2. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan
KPI 2.1. Level of financial sector deepening
KPI 2.2. Financial literacy and financial inclusion index

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS.3 **Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakkan Hukum terhadap Prinsip *Prudential*, Keterbukaan, dan *Market Conduct* yang Terintegrasi**
To Strengthen The Regulation, Supervision and Legal Enforcement of Prudential Principles, Disclosure Requirements and Integrated Market Conduct

IKU 3.1. TIngkat penyelesaian penyusunan ketentuan/ kebijakan prioritas OJK dan riset yang mendukung ketentuan dan pengembangan IJK
IKU 3.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan
IKU 3.3. Tingkat penyelesaian dan percepatan penanganan perkara tindak pidana SJK
KPI 3.1. Completion of OJK priority regulations/policies and research formulated to support financial services industry regulation and development
KPI 3.2. Completion of follow-up recommendations based on supervision/inspections
KPI 3.3. Completion and speed of handling criminal cases in the financial services sector

SS.4 **Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan**
To Enhance Service Quality as well as Integrated and Transparent Data Management

IKU 4.1. Tingkat penyelesaian penyederhanaan proses bisnis perizinan dan pelaporan
IKU 4.2. Tingkat penyelesaian proses perizinan secara transparan, cepat dan terintegrasi
IKU 4.3. Tingkat penyelesaian pengembangan/penggunaan data dan informasi yang terintegrasi
KPI 4.1. Completion of streamlining licensing and reporting business processes
KPI 4.2. Completion of transparent, fast and integrated licensing processes
KPI 4.3. Completion of integrated data and information development/utilisation

SS.5 **Mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan Konsumen**
To Accelerate Financial Education, Literacy and Inclusion Activities as well as Consumer Protection

IKU 5.1. Tingkat penyelesaian penentuan/kebijakan edukasi/ literasi/inklusi keuangan dan perlindungan konsumen
IKU 5.2. Optimalisasi program edukasi, literasi dan inklusi keuangan
IKU 5.3. Tingkat penyelesaian pemeriksaan pengaduan berindikasi pelanggaran dan penanganan entitas ilegal
KPI 5.1. Completion of financial education/literacy/inclusion and consumer protection policies/regulations
KPI 5.2. Optimisation of financial education, literacy and inclusion programs
KPI 5.3. Completion of investigations into complaints indicating violations and the handling of illegal entities

STRATEGIC SUPPORT

SS.6 **Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul**
Organisational Transformation and Development of HR Excellence

IKU 6.1. Tingkat implementasi transformasi pengelolaan organisasi dan SDM
IKU 6.2. Pengembangan kompetensi pegawai
KPI 6.1. Implementation of HR and Organisational Management Transformation
KPI 6.2. Development of HR Competencies

SS.7 **Pengembangan SIstem Infromasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK**
IS Development to Support OJK Tasks and Functions

IKU 7.1. Tingkat penyelesaian pengembangan, efisiensi dan integrasi aplikasi berdasarkan prioritas
IKU 7.2. Tingkat penyelesaian penguatan infrastruktur TI
KPI 7.1. Completion of priority-based application development, efficiency and integration
KPI 7.2. Completion of strengthening IT infrastructure

SS.8 **Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien**
Enhancing Effective and Efficient Governance

IKU 8.1. Tingkat implementasi penguatan tata kelola OJK
IKU 8.2. Penguatan kerja sama dan tingkat penyelesaian *cross cutting issues* antar kementerian/lembaga
KPI 8.1. Implementation of strengthening OJK governance
KPI 8.2. Strengthening cooperation and completion of cross-cutting issues between government ministries and agencies

Peta Strategi OJK tahun 2024 dilengkapi dengan *Scorecard* yang berisi Sasaran Strategis, IKU, dan Satuan Kerja Pengampu IKU
The OJK Strategy Map 2024 is also complemented with a Scorecard containing the Strategic Targets, KPI, and Work Unit responsible for the KPIs.

Sebagai turunan dari *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027, OJK menjabarkan rencana aksi yang dijadikan acuan dalam menjalankan program kerja selama tahun 2024 dalam bentuk peta Strategi OJK 2024 terdiri dari delapan sasaran strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur kinerja OJK, dengan masing-masing sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU sebagai berikut:

OJK derives its action plan as a cascade from the Destination Statement 2022-2027, which serves as a reference when executing the work program throughout 2024, comprising eight Strategic Targets and 21 Key Performance Indicators (KPI) as benchmarks of OJK performance as follows:

1. Sasaran stretegi 1 diukur melalui tingkat kesehatan IJK, efektivitas penerapan strategi penguatan integritas IJK, dan tingkat kepatuhan PUJK atas penyelesaian pengaduan SJK.
2. Sasaran strategi 2 diukur melalui tingkat pendalaman sektor keuangan serta pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan.
3. Sasaran strategi 3 diukur melalui penyelesaian ketentuan/kebijakan prioritas OJK, riset yang mendukung ketentuan/kebijakan dan kinerja IJK, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan, dan implementasi percepatan penyelesaian perkara tindak pidana SJK.
4. Sasaran strategis 4 diukur melalui penyederhanaan proses bisnis dan percepatan penyelesaian perizinan, serta pengembangan/penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.
5. Sasaran strategis 5 diukur melalui penyelesaian ketentuan/kebijakan dan optimalisasi program terkait edukasi, literasi dan inklusi keuangan serta tingkat penyelesaian pemeriksaan pengaduan berindikasi pelanggaran, dan penanganan entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).
6. Sasaran strategis 6 diukur melalui implementasi transformasi pengelolaan organisasi dan SDM serta pemenuhan *gap* kompetensi pegawai
7. Sasaran strategis 7 diukur melalui implementasi pengembangan aplikasi yang akan mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi OJK dan penyelesaian penguatan infrastruktur TI.
8. Sasaran strategis 8 diukur melalui Implementasi penguatan tata kelola OJK, dan penguatan kerja sama dan penyelesaian *cross-cutting issues* antar kementerian/lembaga.

1. *Strategic Target 1 is measured by the soundness level of the financial services industry, the effectiveness of strategies applied to strengthen the integrity of the financial services industry and the level of compliance by financial services providers to the settlement of complaints in the financial services sector.*
2. *Strategic Target 2 is measured by the level of financial sector deepening and the achievement of financial literacy and inclusion index milestones.*
3. *Strategic Target 3 is measured by the completion of OJK priority regulations/policies, research to support financial services industry regulations/policies and performance, as well as the speed of handling criminal cases in the financial services sector.*
4. *Strategic Target 4 is measured by the streamlining of licensing and reporting business processes, as well as the development/utilisation of integrated data and information.*
5. *Strategic Target 5 is measured by the completion of policies/regulations and optimisation of programs relating to financial education, literacy and inclusion as well as the completion of investigations into complaints indicating violations and the handling of illegal entities by the Investment Alert Task Force (SWI).*
6. *Strategic Target 6 is measured by the implementation of HR and organisational management transformation as well as bridging the employee competency gap.*
7. *Strategic Target 7 is measured by the implementation of application development to support OJK task implementation and functions and the strengthening of IT infrastructure.*
8. *Strategic Target 8 is measured by the implementation of strengthening OJK governance and cooperation, while resolving cross-cutting issues between government ministries/agencies.*

VII.4 Program Transformasi OJK 2024
OJK Transformation Program 2024

7.4.1. Program Transformasi Organisasi dan SDM

OJK melakukan transformasi pola kerja untuk menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan terintegrasi. Transformasi ini melibatkan pergeseran dari struktur hierarki menjadi lebih fleksibel dengan mengurangi jenjang struktural eselon 3 dan 4, yang kini digantikan oleh jabatan fungsional berbasis keahlian, kompetensi, dan kolaborasi. Proses reviu pekerjaan yang panjang kini disederhanakan dengan pendekatan konseptor, reviu, dan *approver*. Untuk mendukung |suksesi kepemimpinan, OJK mengimplementasikan program *Talent Pool* dengan membentuk *Senior Leader Talent Pool* (SLTP) dan *Emerging Leader Talent Pool* (ELTP). SLTP difokuskan pada pengembangan jangka panjang

7.4.1. Program Transformasi Organisasi dan SDM

OJK is undergoing a transformation in its work patterns to create a more adaptive and integrated organization. This transformation involves a shift from a rigid hierarchical structure to a more flexible one by reducing structural tiers, particularly the elimination of third and fourth echelon positions, which have been replaced with functional positions emphasizing expertise, competence, and collaboration. The lengthy job review process has been streamlined using a conceptor, reviewer, and approver approach. To support leadership succession, OJK is implementing a Talent Pool program by establishing a Senior Leader Talent Pool (SLTP) and an Emerging Leader Talent Pool (ELTP). The SLTP focuses on the comprehensive long-term development of

kandidat jabatan strategis, sementara ELTP mempersiapkan kader pimpinan dari Kepala Subbagian hingga Deputi Direktur melalui seleksi, pendidikan, dan kesempatan promosi. Selain itu, sistem kepangkatan (*Person Grade*) diperkenalkan untuk menciptakan talenta OJK yang unggul dan selaras dengan strategi SDM jangka panjang. Implementasi *dual grading system* yang mencakup *job grade* dan *person grading* ini diharapkan memberikan dampak positif pada sistem remunerasi, jenjang karir, dan manajemen talenta di OJK.

7.4.2. Program Transformasi Digital

OJK mendorong transformasi digital yang komprehensif untuk menciptakan proses kerja yang tidak hanya lebih efisien dan terpadu, tetapi juga memperluas cakupan dan kedalaman pengawasan, pengaturan, dan perizinan. Upaya transformasi digital ini adalah langkah strategis untuk menjawab kebutuhan adaptasi di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Transformasi digital di OJK bukan sekadar penerapan teknologi terkini, melainkan sebuah perubahan fundamental dalam proses kerja.

7.4.3. Program Transformasi Integrasi Aplikasi Sistem Informasi

OJK terus berupaya melakukan integrasi aplikasi sistem informasi di internal organisasi. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai integrasi aplikasi sistem informasi di seluruh spektrum operasional OJK dan menjadi langkah strategis yang mencakup lebih dari sekedar konektivitas aplikasi, namun merambah ke integrasi pada level data yang lebih mendalam. Fokus utama dari integrasi ini adalah menciptakan sebuah ekosistem teknologi terpusat yang memungkinkan berbagai aplikasi sistem informasi di OJK untuk berkomunikasi dan saling melengkapi. Dengan demikian, dapat meningkatkan akurasi dan relevansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengaturan, dan perizinan terhadap sektor jasa keuangan.

7.4.4. Program Transformasi Menuju *Supervisory Technology*

Berbagai inisiatif dimulai melalui penerapan *machine learning* (ML) dan *artificial intelligence* (AI) di OJK melalui kerja sama dengan penyedia teknologi yang memiliki spesialisasi dan terbaik pada bidang tersebut. Selain itu, proses pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dapat diperkuat melalui pemanfaatan inovasi teknologi.

7.4.5. Program Transformasi Penyederhanaan dan Penguatan Data Pelaporan

OJK mengagas inisiatif yang berfokus kepada penyederhanaan arsitektur sistem informasi pelaporan untuk menciptakan data pelaporan terintegrasi. Simplifikasi arsitektur sistem informasi menjadi kunci dalam menghilangkan redundansi, memperbaiki alur kerja, dan mengintegrasikan data secara lebih efektif, sehingga memungkinkan sebuah proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan tepat waktu.

candidates for strategic positions, while the ELTP prepares leadership cadres from Subdivision Heads to Deputy Directors through selection, education, and promotion opportunities. Additionally, the introduction of a Person Grade system aims to create outstanding OJK talent aligned with long-term HR strategies. The implementation of a dual grading system, encompassing job grades and person grades, is expected to positively impact other systems such as remuneration, career progression, and talent management within OJK.

7.4.2. Implementation of Digital Transformation

OJK fosters comprehensive digital transformation to create not only more efficient and integrated business processes, yet also expand the scope and depth of supervision, regulation and licensing. Digital transformation is a strategic measure in response to the need for adaptation amid rapid technological development. Digital transformation at OJK goes beyond merely the application of the latest technologies to also include a fundamental change in the business processes.

7.4.3. Implementation of Integrated Information System Applications

OJK is continuing to integrate information system applications within the organisation. This initiative aims to integrate information system applications across the operational spectrum and is a strategic measure that includes more than just application connectivity, extending to integration at a deeper, more granular data level. The primary focus of such integration is to create a centralised technology ecosystem that allows various information system applications OJK to communicate and mutually reinforce one another. Thus, the accuracy and relevancy can be increase in the implementation of tasks supervision, regulation and licensing of the financial sector services.

7.4.4. Implementation of Supervisory Technology (SupTech)

Various initiatives have been introduced through the application of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) at OJK through cooperation and collaboration with specialised technology providers that are experts in their field. In addition, supervision of the financial services sector can be strengthened through the use of innovative technologies.

7.4.5. Streamlining and Strengthening Reporting Data

OJK is also focused on streamlining and simplifying the architecture of the reporting information system. This is expected to create integrated reporting data. Simplification of the information system architecture is key to removing redundancies, improving workflows and integrating data more effectively, thereby facilitating a data-driven and timely decision-making process.

7.4.6. Implementasi *Data Security*

OJK akan mengakselerasi *tools* untuk menjaga keamanan data di internal organisasi, dalam hal ini *Data Security*. Penerapan strategi keamanan data yang terpadu, merupakan sebuah langkah yang dianggap kritikal untuk melindungi aset informasi penting OJK dari serangan siber, kebocoran data, dan ancaman internal. Akselerasi dalam pengembangan dan penerapan alat keamanan data ini mencerminkan komitmen OJK untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data.

7.4.7. Program Transformasi Penyempurnaan Proses Bisnis Pengawasan Terintegrasi

OJK merumuskan *roadmap* pengawasan terintegrasi yang salah satunya bertujuan untuk menetapkan mekanisme koordinasi antar pengawas sektor. Selain itu, akan dilakukan juga asesmen dampak sistemik atas hasil pengawasan konglomerasi keuangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

7.4.8. Program Transformasi Penyempurnaan Proses Bisnis Perizinan Terintegrasi

Penyempurnaan proses bisnis perizinan terintegrasi akan terus dilakukan khususnya yang terkait dengan perizinan antarlembaga (interkoneksi) dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia (BI). Hal ini dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran utama antara lain mendukung upaya inovasi dan pengembangan dari SJK, peningkatan layanan kepada SJK, dan efisiensi operasional kedua lembaga.

7.4.9. Program Transformasi Penguatan Integritas Sektor Keuangan dan Penegakan Hukum

Melanjutkan program transformasi OJK tahun 2023, pada tahun 2024 program transformasi bidang penegakan hukum difokuskan pada integrasi fungsi yang lebih menguatkan proses penegakan hukum secara komprehensif, baik penegakan hukum administratif, pidana maupun perdata. Penyederhanaan dan percepatan bisnis proses penegakan hukum dilakukan melalui minimalisasi pengulangan proses dan perubahan proses dari model *sequential process* menjadi *joint process*.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien, OJK mengembangkan sistem informasi penegakan hukum yang terintegrasi sehingga keseluruhan proses di seluruh sektor jasa keuangan dapat diadministrasikan dengan baik dan mewujudkan penyediaan *database* terkait penegakan hukum yang terintegrasi. Sistem informasi penegakan hukum yang terintegrasi diharapkan dapat menyempurnakan administrasi rekam jejak kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan strategi pengawasan.

7.4.6. Implementation of Data Security

OJK will accelerate deployment of the tools used to maintain data security internally within the organisation. The application of an integrated data security strategy is a critical step towards protecting OJK's invaluable data assets from cyber-attacks, data leaks and internal threats. Accelerating the development and implementation of data security tools reflects OJK's firm commitment to safeguarding data integrity, confidentiality and availability.

7.4.7. Transformation Program to Improve Integrated Supervision Business Processes

OJK has finalised an integrated supervision roadmap that aims, among others, to establish a coordination mechanism between sector supervisors. In addition, OJK will also conduct an assessment concerning the systemic impact of supervising financial conglomerates, which aims to maintain financial system stability.

7.4.8. Transformation Program to Improve Integrated Licensing Business Processes

OJK will continue improving the integrated licensing business process, particularly in terms of inter-institutional (interconnected) licensing, in this case with Bank Indonesia (BI). This is done to achieve several key targets, which include nurturing innovation and development in the financial services sector, improving services for the financial services sector, and improving the operational efficiency of both institutions.

7.4.9. Transformation Program to Strengthen Financial Sector Integrity and Law Enforcement

Building on the OJK transformation program implemented in 2023, transformation in 2024 regarding law enforcement will focus on integrating functions that further strengthen the law enforcement process comprehensively, including administrative, criminal and civil law enforcement. Streamlining and accelerating the law enforcement business process will be achieved by minimising repetition and evolving from a sequential process to a joint process model.

Facilitating effective and efficient law enforcement, OJK is developing an integrated law enforcement information system to administrate all processes in all financial services sectors effectually and provide an integrated database relating to law enforcement. An integrated law enforcement information system is expected to improve the administration of compliance track records for financial services providers, which can be used to strengthen supervisory strategies.

VIII

Laporan Keuangan OJK 2023

OJK Financial Statement 2023

SALES REPORT

Pendahuluan
Introduction

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan serta Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Based on Act Number 4 of 2023, on Financial Sector Development and Strengthening, the Financial Services Authority (OJK) is legally bound to prepare interim and annual Financial Statements for public accountability. OJK's Financial Statements encompass Financial Position Statement, Operational Statement, Changes in Net assets Statement, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements.

The preparation of OJK's Financial Statements 2023 conformed with the OJK Commissioner Board Regulation Number 2 PDK.02/2020 dated December 30, 2020, on OJK Accounting Standards and Policies and OJK Commissioner Board Circular Letter Number 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020, on OJK Accounting Policies, as amended by OJK Commissioner Board Circular Letter Number 5/SEDK.02/2022 dated October 20, 2022, on the Amendment to OJK Commissioner Board Circular Letter Number 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020, on OJK Accounting Policies.

The financial statements are intended to provide applicable information to relevant stakeholders, ultimately enhancing accountability, responsibility, and transparency in OJK's financial management. Furthermore, the Financial Statements aim to provide management with information that may be used in their decision-making process to achieve good governance within OJK.

Jakarta, Mei 2024
Jakarta, May 2024

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners
The Financial Service Authority

Surat Pernyataan Dewan Komisioner tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Statement of the Board Of Commissioners on Responsibility for the Financial Statements for the Period Ended December 31, 2023 and December 31, 2022

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the Board of Commissioners of the Financial Services Authority, declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Financial Services Authority's Financial Statements for 2023.*
2. *The Financial Services Authority's Financial Statements for 2023 have been prepared and presented in conformity with the accounting standards and policies established by the Financial Services Authority.*
3. a. *All information in the Financial Services Authority's Financial Statements for 2023 has been fully and comprehensively disclosed.*
   b. *The Financial Services Authority's Financial Statements for 2023 do not hold untrue material information or omit any material information.*
4. *We are responsible for the internal control system of the Financial Services Authority.*

This statement is made in good faith.

Jakarta, Mei 2024
Jakarta, May 2024

Mirza Adityaswara
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Vice Chairman of the Board of Commissioners
The Financial Service Authority

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners
The Financial Service Authority

Surat Pernyataan Dewan Komisioner tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Statement of the Board of Commissioners on Responsibility for the Financial Statements for the Period Ended December 31, 2023 and December 31, 2022

Diketahui dan disetujui oleh: | *Acknowledged and approved by:*

Jakarta, Mei 2024 | *Jakarta, May, 2024*

Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK*	
Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Inarno Djajadi as Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK.*	
Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Ogi Prastomiyono as Chief Executive of Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK.*	
Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Agusman as Chief Executive of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Companies Supervision concurrently Member of the Board of Commissioner of OJK.*	
Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Hasan Fawzi as Chief Executive of Financial Sector Technology Innovation, Digital Assets and Crypto Assets Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK.*	
Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Friderica Widyasari Dewi as Chief Executive of Financial Service Providers Business Supervision, Financial Education, and Consumer Protection concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK.*	
Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Sophia Issabella Watimena as Chairman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK.*	
Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia. *Doni Primanto Joewono as Ex Officio Member of the Board of Commissioner of OJK from Bank Indonesia.*	
Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan. *Suahasil Nazara as Ex Officio Member of the Board of Commissioner of OJK from the Ministry of Finance.*	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab OJK atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 3.1 s.d. 3.19 atas Laporan Keuangan, OJK menyajikan Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.981,06 miliar serta Pendapatan dan Beban Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp8.120,14 miliar dan Rp7.261,16 miliar. Nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban tersebut terdampak dari penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK, berdasarkan pendelegasian wewenang sesuai tingkatan masing-masing. OJK telah menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat rahasia, namun OJK menyampaikan bukti penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat rahasia tersebut kepada BPK setelah pemeriksaan BPK berakhir. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang dampak dari penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK yang bersifat rahasia pada nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban, karena BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pengujian dan analisis untuk menilai apakah penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK yang bersifat rahasia, telah didasarkan pada pendelegasian wewenang dan memiliki dampak pada nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2023 serta Pendapatan dan Beban Tahun 2023.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.18.b atas Laporan Keuangan, OJK menyajikan Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp6.152,12 miliar. Dari nilai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 tersebut, diantaranya sebesar Rp759,61 miliar merupakan beban yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK Tahun 2022 berupa pembayaran Imbalan Prestasi atas Kinerja Organisasi dan Pencapaian Individu Pegawai Tahun 2022. Penyajian Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp759,61 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK Tahun 2022 tersebut tidak sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang menyatakan bahwa secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Seandainya Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp759,61 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK Tahun 2022 tidak disajikan sebagai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023, maka nilai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 akan menurun sebesar Rp759,61 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.2 dan 3.17 atas Laporan Keuangan, OJK menyajikan Piutang – Bersih per 31 Desember 2023 dan Pendapatan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp43,28 miliar dan Rp8.120,14 miliar. OJK telah menerbitkan surat sanksi denda administratif pada tahun 2023 sebesar Rp5,08 miliar. Namun pengenaan sanksi denda administratif tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengakuan dan penyajian Piutang dalam Laporan Posisi Keuangan OJK per 31 Desember 2023 dan Pendapatan dalam Laporan Operasional OJK Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp5,08 miliar sesuai Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang menyatakan bahwa secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Seandainya Piutang dan Pendapatan masing-masing sebesar Rp5,08 miliar tersebut disajikan, maka nilai Piutang per 31 Desember 2023 dan Pendapatan Tahun 2023 akan meningkat masing-masing sebesar Rp5,08 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.1 atas Laporan Keuangan, OJK menyajikan Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.193,93 miliar. OJK telah melakukan pengeluaran kas yang tidak dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan sebesar Rp394,10 miliar. Seandainya pengeluaran kas yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp394,10 miliar tersebut dipulihkan, maka nilai Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 akan meningkat sebesar Rp394,10 miliar.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2023, pendapatan dan beban operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 3 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 9630

The Audit Board of The Republic of Indonesia
Audit Report of Financial Statements

Report of Financial Statements

Based on Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of State Financial Management and Accountability, Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia, and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as last amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has audited the Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK), which consist of the Statement of Financial Position as of December 31, 2023, the Statement of Operations, the Statement of Changes in Net Assets, and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, as well as the Notes to the Financial Statements.

Responsibility of OJK for Financial Statements

OJK is responsible for the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with OJK Accounting Standards and Policies and for maintaining adequate internal controls to ensure that the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of BPK

BPK's responsibility is to express an opinion on the financial statements based on the audit. BPK conducts the audit according to the State Financial Audit Standards. These standards require BPK to adhere to the BPK Code of Ethics, and to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected are based on the auditor's professional judgment, including the assessment of the risk of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In assessing these risks, the auditor considers the internal controls relevant to OJK's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design appropriate audit procedures, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of OJK's internal controls. BPK audit also includes an evaluation the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by OJK, as well as the evaluation of the overall presentation of the financial statements.

BPK believes that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for expressing a Qualified Opinion.

Qualified Opinion Basis

As disclosed in Notes 3.1 to 3.19 of the Financial Statements, OJK reported Assets and Liabilities as of December 31, 2023, amounting to Rp11,981.06 billion, and Revenues and Expenses for 2023 amounting to Rp8,120.14 billion and Rp7,261.16 billion, respectively. The values of Assets, Liabilities, Revenue and Expenses are affected by the determination of policies and implementation of OJK activities, based on the delegation of authority according to each levels. OJK has established policies and conducted confidential activities; however, OJK provided evidence of these policies and the execution of these confidential activities to BPK after the BPK audit had concluded. BPK could not obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the impact of these confidential policies and activities on the values of Assets, Liabilities, Revenue, and Expenses, as BPK was unable to perform the necessary testing and analysis procedures to determine if these policies and activities, based on delegated authority, had an impact on these values. Consequently, BPK cannot determine whether any adjustments are necessary to the values of Assets and Liabilities as of December 31, 2023, and Revenue and Expenses for 2023.

As disclosed in Note 3.18.b of the Financial Statements, OJK reported Administrative Expenses for 2023 amounting to Rp6,152.12 billion. From the amount of Administrative Expenses for 2023, includes Rp759.61 billion used to finance 2022 activities, specifically the payment of Performance Rewards for Organizational and Individual Employee Achievements in 2022. The presentation of Administrative Expenses in 2023 amounting to Rp759.16 billion to finance 2022 activities is not line with OJK Accounting Standards and Policies, which state that transactions and other events should generally be recognized when they occur (not when cash or cash equivalents are received or paid) and recorded in the accounting records and reported in the financial statements for the relevant period. If the Administrative Activity Expenses for 2023 amounting to Rp759.61 billion, which were used to finance OJK activities in 2022, were not presented as Administrative Activity Expenses for 2023, the value of Administrative Activity Expenses for 2023 would decrease by Rp759.61 billion.

As disclosed in Notes 3.2 and 3.17 of the Financial Statements, OJK reported Net Receivables as of December 31, 2023, and Revenue for 2023 amounting to Rp43.28 billion and Rp8,120.14 billion, respectively. OJK issued administrative penalty fines in 2023 amounting to Rp5.08 billion. However, These administrative penalty fines were not used as the basis for recognizing and presenting Receivables in the Statement of Financial Position as of December 31, 2023, and Revenue in the Statement of Operations for 2023, each amounting to Rp5.08 billion,in line with OJK Accounting Standards and Policies, which state that transactions and other events should generally be recognized when they occur (not when cash or cash equivalents are received or paid) and recorded in the accounting records and reported in the financial statements for the relevant period. If the Rp5.08 billion had been recognized as Receivables and Revenue, the values of Receivables as of December 31, 2023, and Revenue for 2023 would have increased by Rp5.08 billion, respectively.

As disclosed in Note 3.1 of the Financial Statements, OJK reported Cash and Restricted Securities as of December 31, 2023, amounting to Rp8,193.93 billion. OJK has made cash disbursements that have not been accounted for and have not been recovered, amounting to Rp394.10 billion. If these unaccounted cash disbursements of Rp394.10 billion were recovered, the value of Cash and Restricted Securities as of December 31, 2023, would increase by Rp394.10 billion.

Qualified Opinion

According to BPK's opinion, except for the effects of the matters described in the basis for the qualified opinion paragraph, the above-mentioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of OJK as of December 31, 2023, the operational revenue and expenses, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, in line with OJK Accounting Standards and Policies.

Report on Internal Control and Compliance

To obtain sufficient assurance as to the fairness of the financial statements, BPK also examined the internal control system and compliance with Legal and Regulatory provisions. The Report on Results of Examination of the Internal Control System and Compliance with Legal and Regulatory provisions is presented in Report Number 16.b/LHP/XV/05/2024 dated May 3, 2024, which is an integral part of this report.

Jakarta, May 3, 2024
The Audit Board of The Republic of Indonesia

Auditor in Charge,

Dr. Nelson Ambarita S.E., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA
State -Registered Accountant Number 9630

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Posisi Keuangan

Indonesian Financial Services Authority
Statement of Financial Position
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 31 Desember 2022 (*Audited*)
From December 31, 2023 (Audited) and December 31, 2022 (Audited)

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	Catatan *Notes*	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Aset		*Audited*	*Audited*	***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.8, 3.1	8.193.934.232.662	7.514.363.129.765	*Restricted Cash and Securities*
Piutang	2.9, 3.2	135.300.567.569	85.024.212.796	*Accounts Receivable*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(92.022.048.906)	(53.438.412.777)	*Allowance for Doubtful Accounts*
Piutang-Bersih		43.278.518.663	31.585.800.019	*Net Accounts Receivable*
Persediaan	2.10, 3.3	8.629.320.752	11.518.124.644	*Inventory*
Uang Muka	2.11, 3.4	10.583.376.514	3.949.645.602	*Advances*
Beban Dibayar di Muka	2.12, 3.5	103.397.431.716	77.811.697.434	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar di Muka	2.19, 3.6	-	550.437.500	*Prepaid Taxes*
Jumlah Aset Lancar		**8.359.822.880.307**	**7.639.778.834.964**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Aset Tetap	2.13, 3.7			***Fixed Assets***
Tanah		1.334.790.391.874	1.334.787.888.714	*Land*
Gedung dan Bangunan		710.757.367.788	677.130.749.632	*Buildings and Structures*
Peralatan dan Mesin		1.538.998.918.931	1.216.569.982.242	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain		121.797.520.834	106.099.847.011	*Other Fixed Assets*
Akumulasi Penyusutan		(1.111.454.878.054)	(953.480.243.796)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**2.594.889.321.373**	**2.381.108.223.803**	***Total Fixed Assets-net of accumulated depreciation***
Aset Hak Guna	**2.14, 3.8**			***Right of Use Asset***
Gedung dan Bangunan		374.488.154.532	534.446.724.173	*Buildings and Structures*
Akumulasi Penyusutan		(160.898.760.161)	(270.024.417.624)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**213.589.394.371**	**264.422.306.549**	***Right of Use Assets-net of accumulated depreciation***
Aset Tak berwujud	**2.15, 3.9**			***Intangible Assets***
Aset Tak berwujud		419.909.051.985	385.236.024.116	*Intangible Assets*
Amortisasi Aset Tak berwujud		(348.140.863.173)	(319.631.696.824)	*Amortization of Intangible Assets*
Jumlah Aset Tak berwujud-setelah dikurangi amortisasi		**71.768.188.812**	**65.604.327.292**	***Net Intangible Assets-after deduction amortization***
Aset dalam Penyelesaian	**2.16, 3.10**			***Assets Under Construction***
Aset dalam Penyelesaian		19.245.681.731	29.435.829.613	*Assets Under Construction*
Jumlah Aset dalam Penyelesaian		**19.245.681.731**	**29.435.829.613**	***Total Assets Under Construction***

Uraian	Catatan *Notes*	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Aset Lainnya	2.17, 2.19, 3.6			*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan		721.749.843.382	623.349.363.015	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset Lainnya		**721.749.843.382**	**623.349.363.015**	*Total Other Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.621.242.429.669**	**3.363.920.050.272**	*Total Non-Current Assets*
Jumlah Aset		**11.981.065.309.976**	**11.003.698.885.236**	*Total Assets*
Liabilitas				*Liabilities*
Liabilitas Jangka Pendek				*CURRENT LIABILITIES*
Utang Operasional	2.18, 3.11	94.158.850	30.734.485	*Operational Payables*
Utang Pajak	2.18, 2.19, 3.6	70.721.384.881	110.001.949.663	*Tax Payables*
Pendapatan Diterima di muka	2.18, 3.12	19.178.319.786	37.875.117.447	*Unearned Revenue*
Utang Setoran ke Kas Negara	2.18, 3.13	45.697.627.153	281.274.576	*Debt to State Treasury*
Utang Sewa	2.14, 2.18, 3.14	79.566.600.804	143.841.401.559	*Lease Payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**215.258.091.474**	**292.030.477.730**	*Total Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang				*Long-Term Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pasca kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	2.1, 2.2, 2.18, 3.15	3.280.681.106.286	2.833.406.195.525	*Post-Employment and Other Long-Term Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**3.280.681.106.286**	**2.833.406.195.525**	*Total Long-Term Liabilities*
Jumlah Liabilitas		**3.495.939.197.760**	**3.125.436.673.255**	*Total Liabilities*
Aset Neto				*Net Assets*
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.20, 3.16	8.485.126.112.216	7.878.262.211.981	*Unrestricted Net Assets*
Jumlah Aset Neto		**8.485.126.112.216**	**7.878.262.211.981**	*Total Net Assets*
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto		**11.981.065.309.976**	**11.003.698.885.236**	*Total Liabilities and Net Assets*

Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Operasional

Indonesian Financial Services Authority
Statement of Operational
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 31 Desember 2022 (*Audited*)
From December 31, 2023 (Audited) and December 31, 2022 (Audited)

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	Catatan | *Notes*	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
		Audited	*Audited*	
Pendapatan	2.3, 3.17			***Revenue***
Pendapatan Pungutan		8.120.140.406.104	7.481.316.866.250	*Levy Revenue*
Jumlah Pendapatan		**8.120.140.406.104**	**7.481.316.866.250**	***Total Revenue***
Beban	**2.4, 3.18**			***Expenses***
Beban Kegiatan Operasional		777.483.110.565	532.270.436.142	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif		6.152.116.810.980	5.173.574.412.827	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		331.561.273.626	321.158.141.454	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		-	-	*Other Supporting Expenses*
Jumlah Beban		**7.261.161.195.171**	**6.027.002.990.423**	***Total Expenses***
Kenaikan Aset Neto Tanpa Pembatasan Operasional		**858.979.210.933**	**1.454.313.875.827**	*Increase In Operational Unrestricted Net Assets*
Pendapatan/Beban Lainnya	**2.5, 3.19**			***Other Revenue/Expenses***
Pendapatan Lainnya		140.292.550.305	6.385.242.400	*Other Revenue*
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		140.292.550.305	6.385.242.400	***Total Other Revenue/Expenses***
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Sebelum Pajak		999.271.761.238	1.460.699.118.227	***Change In Unrestricted Net Assets Before Tax***
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.19, 3.6	(166.357.294.673)	(286.180.952.219)	*Corporate Income Tax Expenses*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Tahun Berjalan		832.914.466.565	1.174.518.166.008	***Change In Unrestricted Net Assets For The Current Year***
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.6, 3.15	(95.892.939.980)	300.373.054.273	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Komprehensif		**737.021.526.585**	**1.474.891.220.281**	*Changes In Comprehensive Unrestricted Net Assets*

Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Perubahan Aset Neto

Indonesian Financial Services Authority
Statement of Changes in Net Assets
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 31 Desember 2022 (*Audited*)
For the Period Ended December 31, 2023 (Audited) and December 31, 2022 (Audited)

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	Catatan | *Notes*	31 Dec 20223	31 Dec 2022	*Description*
Aset Neto tanpa Pembatasan		*Audited*	*Audited*	*Unrestricted Net Assets*
Saldo Aset Neto Awal Periode	**2.20, 3.16**	**7.878.262.211.981**	**6.402.949.140.300**	***Net Assets Beginning Balance***
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Adjustment to Unrestricted Net Assets*
Penyesuaian Aset Neto	3.16	(130.157.626.350)	421.851.400	*Net Assets Adjustment*
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		**7.748.104.585.631**	**6.403.370.991.700**	***Net Assets Beginning Balance After Adjustment***
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Change in Unrestricted Net Assets*
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		832.914.466.565	1.174.518.166.008	*Increase in Change for the Current Year*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain				*Other Comprehensive Income (Loss)*
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.15	(95.892.939.980)	300.373.054.273	*Increase (Decrease) in Change for the Current Year*
Saldo Aset Neto Akhir Periode		**8.485.126.112.216**	**7.878.262.211.981**	***Net Assets Ending Balance***

Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Arus Kas

Indonesian Financial Services Authority
Statement of Cash Flow
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 31 Desember 2022 (*Audited*)
For the Period Ended December 31, 2023 (Audited) and December 31, 2022 (Audited)

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	Catatan *Notes*	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		*Audited*	*Audited*	*Cash Flow from Operating Activities*
Arus Masuk	**3.20**	**8.040.303.105.562**	**7.429.694.515.818**	***Cash Inflow***
Pungutan		8.040.183.882.162	7.429.665.015.818	*Levy Income*
APBN		119.223.400	29.500.000	*Government budget*
Arus Keluar	**3.20**	**(6.830.941.098.719)**	**(6.077.112.245.382)**	***Cash Outflow***
Kegiatan Operasional		(781.055.724.355)	(536.708.214.928)	*Operating Activities*
Kegiatan Administratif		(6.023.320.119.664)	(5.321.849.118.857)	*Administrative Activities*
Kegiatan Pengadaan Aset		(26.164.756.724)	(15.223.788.559)	*Asset Procurement Activities*
Kegiatan Pendukung Lainnya		-	-	*Other Supporting Activities*
Penyetoran ke Kas Negara		(400.497.976)	(203.331.123.038)	*Deposits to the State Treasury*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1.209.362.006.843**	**1.352.582.270.436**	*Net Cash Flow from Operating Activities*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi				*Net Cash Flow for Investment Activities*
Arus Keluar	3.20			***Cash Outflow***
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(529.790.903.946)	(507.968.813.734)	*Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets, Assets Under Construction and Right of Use Assets*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(529.790.903.946)	(507.968.813.734)	***Net Cash Flow for Investment Activities***
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**679.571.102.897**	**844.613.456.702**	*Net Increase of Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Awal Periode		7.514.363.129.765	6.669.749.673.063	***Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period***
Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas *)		**8.193.934.232.662**	**7.514.363.129.765**	*Total Balance of Cash and Cash Equivalents**

*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas, Surat Berharga serta Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya
**) Cash and Cash Equivalents represent Total Balance of Cash and Cash Equivalents and Restricted Cash and Securities.*

VIII.1 Catatan atas Laporan Keuangan
Notes to the Financial Statements

VIII.1 Umum
General

VIII.1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2023. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.
Berdasarkan UU P2SK, OJK berfungsi:

a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
c. memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan UU P2SK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
e. kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;

VIII.1.1 Organization

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution with the authority and functions of regulating, supervising, examining, and investigating as stipulated in Act Number 21 of 2011 regarding the OJK, last amended by Act Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening enacted on January 12, 2023. Effective December 31, 2012, the regulatory and supervisory functions, duties, and authority for all financial services activities in the Capital Market sector and Non-Bank Financial Industry (NBFI) were transferred from Bapepam- LK, the Ministry of Finance to OJK, while those for the Banking sector were transferred from Bank Indonesia to OJK effective December 31, 2013.

By Act Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Act), OJK was established to implement an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial sector, ensuring stability, fairness, transparency, and accountability, as well as achieve sustainable and stable growth of financial system to protect consumers and the society.
Based on P2SK Act, OJK's duties are:

a. to implement an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial sector;

b. to actively maintain Financial System Stability within its authority; and
c. to protect consumers and society.

Based on the P2SK Act, OJK carries out the task of implementing and supervising of:

a. financial services in the Banking sector;
b. financial services in Capital Market; Derivative Finance, and Carbon Exchange sectors;
c. financial services in Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Funds sectors;
d. financial services in Financing Institutions, venture capital, microfinance institutions, and Other Financial Service Institutions;
e. financial services in Technology Innovation in the Financial Sector (ITSK), as well as digital financial assets and crypto assets;

f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Dewan Komisioner menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan UU P2SK secara tertulis kepada Presiden dan DPR secara triwulanan dan tahunan. OJK wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan OJK pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan dan penetapan sasaran OJK untuk tahun yang akan datang.

OJK menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, OJK menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Selanjutnya, dalam UU P2SK OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media massa. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

f. behavioral aspect of financial service business as well as consumer education and protection; and
g. integrated financial sector and conduct assessment on the systemic impact of Financial Conglomerates.

According to Act Number 21 of 2011 on OJK, last amended by Act Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, the Board of Commissioners prepares the Work Plan and Budget (RKA) of OJK. The OJK budget is funded by the State Budget and/or levies from activities in the financial services sector. The budget finances operational, administrative, asset procurement, and other supporting activities. The budget and its realization are established based on reasonable standards in the financial services sector and exempted from general cost standards, procurement processes for goods and services, and remuneration systems as regulated in laws and regulations related to the State Budget, government procurement of goods and services, and remuneration systems. The OJK's budget must require approval from the House of Representatives (DPR).

OJK charges levy the businesses involved in the financial services sector. They must pay the levy charged by OJK. Levies are OJK's source of Revenues. OJK receives, manages, and administers these levies accountably and independently. If any levies received in the current year exceed OJK's expenditures for the following fiscal year, the surplus is transferred to the State Treasury.

By P2SK Act, OJK must prepare its quarterly and annual activities report for the President and quarterly and yearly activity reports submitted to the DPR. OJK must announce the information publicly through mass media, including the evaluation of OJK's policy implementation throughout the current year and OJK's policy planning and target for the following year.

OJK prepares and presents its annual financial reports to the President and the DPR. The preparation and structures of these reports are stipulated in the Board of Commissioners Regulation.

According to the OJK Board of Commissioners Regulation (PDK) Number 01/13/PDK/XII/2012 on OJK Accounting Standards and Policies, last amended by OJK PDK Number 2/PDK.02/2020 dated December 30, 2020, OJK prepares its semester and annual financial reports to provide transparency and accountability to the public. Based on P2SK Act, OJK must publicly announce its financial reports through mass media. The annual financial report is subject to an audit by the Audit Board of Indonesia (BPK).

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 8/ PDK.02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

Pelantikan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022.

Sebagaimana amanat UU P2SK, Mahkamah Agung melantik 2 anggota baru Dewan Komisioner pada tanggal 9 Agustus 2023. Pelantikan dilakukan sesuai Keppres No. 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Susunan keanggotaan Dewan Komisioner menjadi sebagai berikut:

a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

OJK has restructured its organization as last stipulated in the PDK Number 8/PDK.02/2023 dated August 31, 2023, on the Amendment to OJK Board of Commissioners Regulation Number 1/ PDK.02/2023 on the Organization of the Financial Services Authority, which came into effect on the date of its promulgation, as presented in Appendix I.

OJK Board Commissioner for the 2022-2027 period was officially sworn in on July 20, 2022 by the Supreme Court of the Republic of Indonesia consisting of the following:

a. Mahendra Siregar as Chairman, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
b. Mirza Adityaswara as Vice Chairman, concurrently Chairman of the Ethics Committee and Member of the Board of Commissioners of the OJK;
c. Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
d. Inarno Djajadi as Chief Executive of Supervision of Capital Markets, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
e. Ogi Prastomiyono as Chief Executive of Insurance and Pension Fund Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
f. Sophia Issabella Watimena as Chairman of the Audit Board concurrently, Member of the Board of Commissioners of the OJK;
g. Friderica Widyasari Dewi as Executive of Financial Providers Business Conduct Supervision for Financial Education and Consumers Protection, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
h. Doni Primanto Joewono as Ex-Officio from Bank Indonesia; and
i. Suahasil Nazara as Ex-Officio from the Ministry of Finance.

The Board of Commissioners was appointed based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 51/P of 2022, dated May 9, 2022.

As stipulated in P2SK Act, the Supreme Court of the Republic of Indonesia swore in 2 new OJK's Board of Commissioners members on August 9, 2023. These appointments were stipulated in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 67/P of 2023 on the Appointment of OJK's Board of Commissioners' Members. The members of the OJK's Board of Commissioners are:

a. Mahendra Siregar as Chairman, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
b. Mirza Adityaswara as Vice Chairman, concurrently Chairman of the Ethics Committee and Member of the Board of Commissioners of the OJK;

c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
h. Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
i. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

j. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
k. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

VIII.1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

VIII.1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-7/D.06/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Yang Berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2022-2025 dan 2023-2025 menetapkan susunan keanggotaan Dewan Audit. Masa jabatan Anggota Dewan Audit periode tahun 2022-2025 terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025 sedangkan Anggota Dewan Audit periode tahun 2023-2025 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.
a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Isnaeni Achdiat;
   2. Sidharta Utama;
   3. Elizabeth Silalahi; dan
   4. Tippy Joesoef.

c. Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
d. Inarno Djajadi as Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
e. Ogi Prastomiyono as Chief Executive of Insurance, Guarantee Institution and Pension Fund Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
f. Agusman as Chief Executive of Financing Institution, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Companies Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
g. Hasan Fawzi as Chief Executive of Technology Innovation, Digital Assets and Crypto Assets Supervision, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
h. Friderica Widyasari Dewi as Chief Executive of Financial Providers Business Conduct Supervision, Education, and Consumer Protection, concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
i. Sophia Issabella Watimena as Chairman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners of the OJK;
j. Doni Primanto Joewono as Ex-Officio from Bank Indonesia; and

k. Suahasil Nazara as Ex-Officio from the Ministry of Finance.

VIII.1.2 Audit Board and Ethics Committee

VIII.1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 and last defined by Decree No. 04/PDK.02/2015, dated March 5, 2015, on OJK's Audit Committee, last amended by Decree No. 2/ PDK.01/2018, representing the embodiment of OJK's independence and accountability.

The Board of Commissioners Decree (KDK) Number KEP-7/D.06/2022, dated November 28, 2022, on the Appointment of External OJK's Audit Board Members for the 2022-2025 and the 2023-2025 period stipulated the composition of the Audit Board Members. The term of office for OJK's Audit Board Members for the 2022-2025 period is from December 1, 2022, to November 30, 2025, while for OJK's Audit Board Members for the 2022-2025 period, is from January 1, 2023, to December 31, 2025.

The composition of Audit Board Members is as follows:
a. Chairman of the Audit Board, concurrently Member of the Board of Commissioner: Sophia Issabella Watimena;
b. Members of the Audit Board:
   1. Isnaeni Achdiat;
   2. Sidharta Utama;
   3. Elizabeth Silalahi; and
   4. Tippy Joesoef.

Pada tanggal 21 Desember 2023, Dewan Komisioner menyetujui pemberhentian 2 (dua) orang Anggota Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK periode tahun 2023-2025 yaitu:

a. Sdr. Sidharta Utama sebagai tindak lanjut penetapan Keputusan Presiden terkait penunjukan Badan Supervisi.
b. Sdr. Tippy Joesoef

Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Isnaeni Achdiat; dan
   2. Elizabeth Silalahi.

VIII.1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 6/KDK.01/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Komite Etik Level Governance di OJK terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

b. Anggota :
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      a) Yunus Husein; dan
      b) Yos Johan Utama.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik Level Governance adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 – 31 Januari 2023. Berdasarkan KDK Nomor 1/KDK.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020 Tentang Pembentukan Komite Etik Di Otoritas Jasa Keuangan, masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik Level Governance diubah menjadi 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.
Sekretariat Komite Etik Level Governance adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

On December 21, 2023, the Board of Commissioners approved discharging 2 (two) External OJK's Audit Board Members for the 2023-2025 period, namely:

a. Sidharta Utama, following the Presidential Decree on the appointment of the Supervision Board
b. Tippy Joesoef

The composition of Audit Board Membership is as follows:

a. Chairman of the Audit Board, concurrently Member of the Board of Commissioner, Sophia Issabella Watimena;
b. Members of the Audit Board:
   1. Isnaeni Achdiat; and
   2. Elizabeth Silalahi.

VIII.1.2.2 Ethics Committee

The Ethics Committee was established as a supporting organ for the Board of Commissioners to demonstrate integrity and independence and prevent OJK Code of Ethics violations. The Ethics Committee is responsible for overseeing the compliance of the OJK's Board of Commissioners, Officials, and Employees with the Code of Ethics stipulated within KDK Number 6/KDK.01/2022 dated February 17, 2022, concerning Amendments to the OJK Board of Commissioners' Decision Number 24/KDK.01/2020 on the Establishment of an Ethics Committee at the Financial Services Authority. The composition of the Governance-Level Ethics Committee at OJK consists of:

a. Chairman : Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
b. Members :
   1. Member of the Board of Commissioners in charge of Internal Audit and Risk Management;
   2. External Members:
      a) Yunus Husein; and
      b) Yos Johan Utama.

The term of office for External Members of the Governance-level Ethics Committee is 1 (one) year, from February 1, 2022, to January 31, 2023. Based on KDK Number 1/KDK.02/2023 dated January 31, 2023, on the Second Amendment to the Decree of the Board of Commissioners of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 24/KDK.01/2020 on the Establishment of an Ethics Committee at the Financial Services Authority, the term of office of External Members of the governance level Ethics Committee was amended to 2 years effective February 1, 2022, to January 31, 2024. The Secretariat of the Governance-level Ethics Committee is the OJK's Department of Organization and Human Resources, more specifically, the Directorate of Human Resource Management.

VIII.1.3 Kantor dan Pegawai OJK

Sesuai dengan UU P2SK, OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 8/PDK.02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023, OJK memiliki 36 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat dan 35 Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.219 orang dengan komposisi sebagai berikut.

VIII.1.3 OJK Offices and Employees

Based on P2SK Act, OJK is based in the capital of the Republic of Indonesia and may have offices within and outside the territory if deemed necessary. OJK's headquarters is in the Sumitro Djojohadikusumo Building, Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4, Central Jakarta. Based on PDK Number 8/PDK.02/2023 regarding the Third Amendment to the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 1/PDK.02/2023, OJK has 36 offices comprising 1 (one) Headquarters, and 35 OJK Offices.

In carrying out its duties and authorities, OJK is supported by a total of 4,219 employees with the following composition:

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Notes*
1.	Pegawai Tetap	4.120	3.887	*Permanent Employees*
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	62	94	*Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees*
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	37	32	*Employees Assigned to OJK from Other Institutions*
4.	Calon Pegawai	-	299	*Candidate Employees*
Jumlah *)		**4.219**	**4.312**	***Total *)***

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK
*) *excluding Members of OJK Board of Commissioners*

VIII.1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

VIII.1.4 Budget and Realization

According to the provisions of Article 34 of Act Number 21 of 2011, last amended by P2SK Act, the Board of Commissioners is responsible for formulating the OJK Work Plan and Budget. Notably, the OJK budget, which was initially funded by the State Budget, transitioned to being primarily sourced from the levies collected from the financial services sector in Indonesia, effective 2016.

The details of the OJK Work Plan and Budget (RKA) from the Fiscal Year 2019 to Fiscal Year 2023 are as follows:

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Nilai RKA *State Budget*	Persentase kenaikan RKA *% Budget Increment*
2019	5.529.742.476.307	11,10%
2020	5.992.017.790.800	8,36%
2021	6.219.340.027.258	3,79%
2022	6.303.696.965.626	1,36%
2023	7.476.488.012.318	18,60%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2023 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2022.

Based on Government Regulation No. 11 of 2014 Article 3 Article (2) on Levies by the Financial Services Authority, the levies received by OJK in the current year are used to finance OJK activities in the following fiscal year. The Revenues source for funding OJK in 2023 was the Revenues that OJK received in 2022.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 November 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2023 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp7.455.502.670.313,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 9/KDK.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

a. Kegiatan Operasional sebesar Rp740.157.976.713,00;
b. Kegiatan Administratif sebesar Rp6.034.437.648.055,00;
c. Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp680.907.045.545,00; dan
d. Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp0,00.

Based on the Minutes of the Working Meeting between Commission XI of the Indonesian House of Representatives and the Board of Commissioners of OJK on November 30, 2022, regarding the Work Plan and Budget (RKA) of OJK for 2023, the OJK budget was set at Rp7.455.502.670.313,00. The OJK Board of Commissioners Decree Number 9/KDK.01/2022 on December 29, 2022, set the RKA with the following details:

a. Operating Expenses at Rp740.157.976.713,00;
b. Administrative Expenses at Rp6.034.437.648.055,00;
c. Asset Procurements at Rp680.907.045.545,00; and
d. Other Supporting Expenses at Rp0,00.

Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2022 adalah sebesar Rp7.476.488.012.318,00, sehingga terdapat kelebihan yang dapat digunakan dalam rangka pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 sebesar Rp20.985.342.005,00. Sebagaimana Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2023 tentang Pengambilan Keputusan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2024 ditetapkan persetujuan penggunaan kelebihan penerimaan pungutan tahun 2022 dimaksud pada RKA OJK Tahun 2023. Penggunaan pada RKA tahun 2023 telah ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner pada tanggal 27 Desember 2023.

As of December 31, 2022, OJK had generated a Revenues of Rp7.476.488.012.318,00. After financing the Expenditure in 2023, there was a surplus of Rp20.985.342.005,00. As noted in the Minutes of the Working Meeting between Commission XI of the Indonesian House of Representatives and the Board of Commissioners of OJK on November 22, 2023, regarding Decision on OJK Work Plan and Budget for 2024, approval was granted for using of the levies received in 2022 for OJK RKA 2023. The Board of Commissioners meeting on December 27, 2023, has approved using the levies received in 2022 to finance RKA 2023.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.360.331.504.689,00 atau sebesar 98,45% digunakan untuk membiayai operasional OJK (lihat Catatan 3.21 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

As of December 31, 2023, OJK's realized budget was Rp7.360.331.504.689,00 or 98,45%, which was used to finance OJK operational expenses (See Note 3.21 Information and Subsequent Event After Reporting Date).

Sumber pembiayaan OJK tahun 2022 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp6.303.696.965.626,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.303.415.691.050,00 atau sebesar 99,99%.

The entire OJK expenditures in 2022 were fully financed by the Levy received at Rp6.303.696.965.626,00. As of December 31, 2022, the realized budget was Rp6.303.415.691.050,00, or 99,99%.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

The Realized budget as of December 31, 2023,, and 2022, are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023 | *December 31, 2023*					*Description*
	Pagu Awal *Budget in DPR Report*	Pagu Revisi *Revised Budget*	Realisasi Anggaran *Budget Realisation*		Pagu Tersedia *Residual*	
	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)	
Beban Kegiatan Operasional	**740.157.976.713**	**785.265.017.333**	**777.192.407.084**	**98,97**	**8.072.610.249**	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif						*Administrative Expenses*
Administrasi	754.536.302.739	717.142.842.480	700.827.900.411	97,73	16.314.942.069	*Administration*
Remunerasi	4.127.878.401.590	4.294.865.822.552	4.292.618.936.979	99,95	2.246.885.573	*Remuneration*
PPh Pasal 21	713.577.184.389	767.258.932.192	711.004.426.267	92,67	56.254.505.925	*Income Tax*
PPh Badan	438.445.759.337	346.515.511.130	324.143.875.778	93,54	22.371.635.352	*Corporate Tax*
Subtotal	**6.034.437.648.055**	**6.125.783.108.354**	**6.028.595.139.435**	**98,41**	**97.187.968.919**	*Subtotal*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	**680.907.045.545**	**565.439.886.631**	**554.543.958.170**	**98,07**	**10.895.928.461**	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**7.455.502.670.313**	**7.476.488.012.318**	**7.360.331.504.689**	**98,45**	**116.156.507.629**	*Total*

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*					*Description*
	Pagu Awal *Budget in DPR Report*	Pagu Revisi *Revised Budget*	Realisasi Anggaran *Budget Realisation*		Pagu Tersedia *Residual*	
	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)	
Beban Kegiatan Operasional	**521.801.102.172**	**533.498.512.621**	**533.260.811.596**	**99,96**	**237.701.025**	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif						*Administrative Expenses*
Administrasi	580.065.660.067	599.809.077.050	599.765.503.499	99,99	43.573.551	*Administration*
Remunerasi	3.927.084.041.813	3.858.539.661.456	3.858.539.661.456	100,00	-	*Remuneration*
PPh Pasal 21	604.278.169.971	640.049.249.289	640.049.249.289	100,00	-	*Income Tax*
PPh Badan	148.884.361.750	148.884.361.750	148.884.361.750	100,00	-	*Corporate Tax*
Subtotal	**5.260.312.233.601**	**5.247.282.349.545**	**5.247.238.775.994**	**99,99**	**43.573.551**	*Subtotal*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	**543.537.719.763**	**522.916.103.460**	**522.916.103.460**	**100,00**	**-**	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	**80.943.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**6.325.731.998.930**	**6.303.696.965.626**	**6.303.415.691.050**	**99,99**	**281.274.576**	*Total*

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas Anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp116.156.507.629,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp52.051.598.669,00.
b. Utang Setoran ke Kas Negara sebesar Rp45.435.122.748,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Setoran ke Kas Negara).
c. Dana pembayaran PPh 29 Badan tahun 2023 sebesar Rp18.669.786.212,00 (lihat Catatan 3.6 Perpajakan).

The table above shows that the Budget for 2023 was Rp116.156.507.629,00, with details as follows:

a. Payment for liabilities incurred in 2023 that were settled in 2024 using the budget for 2023 was Rp52.051.598.669,00.

b. Debt to the State Treasury was Rp45.435.122.748,00 (See Note 3.13 Debt to the State Treasury)
c. Corporate Income Tax Payables was Rp18.669.786.212,00 (See Note 3.6 Taxation)

VIII.2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan
Summary of Significant Accounting Policies

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

To prepare the OJK Financial Statements, the Board of Commissioners has meticulously established the Accounting Standards and Policies. These are outlined in PDK Number 01/13/PDK/XII/2012, dated December 28, 2012, regarding OJK Accounting Standards and Policies. They have been further amended by PDK Number 2/PDK.02/2020, dated December 30, 2020, regarding OJK Accounting Standards and Policies.

Dalam PDK dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan

b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

The PDK explains in the context of Financial Report preparation, OJK established the Financial Services Authority Accounting policies by considering the following:

a. The accounting standards established by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants; and
b. OJK financial accounting requirements that cannot be fulfilled by the accounting standards referred to in point a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Further implementation regulations of the PDK are governed by the following provisions:

a. OJK Commissioner Board Circular Letter (SEDK) Number 5/ SEDK.02/2020, regarding OJK Accounting Policies as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022, concerning Amendments to SEDK Number 5/ SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policies;
b. Deputy Commissioner for Information and Financial Systems Decision Number KEP- 10A/MS.5/2022, regarding Technical Preparation of OJK Financial Statements.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

OJK adopts the accrual basis to prepare its Statement of Financial Position, Operational Report, and Statement of Changes in Net assets. Therefore, the effects of transactions and other events are generally recognized when they occur, regardless of when cash or cash equivalents are received or paid. They are subsequently recorded in accounting records and reported in the financial statements for the respective period. However, the Statement of Cash Flows is recognized on a cash basis unless otherwise stated in the accounting policy and Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

VIII.2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

VIII.2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja/pesangon. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen mencakup Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Operations, Statement of Changes in Net assets, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements. Significant OJK accounting policies include:

VIII.2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

a. Individuals or immediate family members with significant influence over the OJK or key management personnel;
b. Entities or companies under OJK control, such as OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation (YKP); and
c. The government, namely ministries/government institutions and state agencies, includes the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI), and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

VIII.2.2 Employment Benefits

Employment benefits are all forms of compensation for services provided to OJK Commissioners and Employees, including short-term benefits, other long-term benefits, post-employment benefits, or severance. Based on a Commission XI of the DPR-RI report dated December 16, 2015, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) agreed that OJK would begin providing employee benefits in 2015. Subsequently, the Board of Commissioners meetings on December 16 and December 23, 2015, determined that OJK would apply PSAK 24 on Employee Benefits beginning in 2015.

According to KRDK Number 155/KRDK/2018, dated December 26, 2018, concerning the Approval of a SEDK on Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL) and Appointment of a Third-Party IPJL Fund Manager, the OJK Employee Welfare Foundation (YKP) was appointed to manage other long-term employment benefits. The technical guidelines in SEDK Number 10/SEDK.01/2018, dated December 26, 2018, concerning Management of Other Long-Term Employment Benefits.

An independent actuary periodically calculates employee benefits' total expenses and liabilities, covering post-employment and other long-term benefits. These expenses and liabilities are determined separately for each program using Projected Unit Credit.

The parties involved in the implementation of OJK's employment benefits are:

a. OJK Pension Fund
   Based on Under KRDK-91/MS.2/2014, dated October 8, 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:

1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK
Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015), YKP memiliki tujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan.

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.
a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

VIII.2.3 Pendapatan
Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat dipenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

1. *Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK; and*
2. *Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organization (Ministry of Finance and Bank Indonesia).*

The establishment of the OJK Pension Fund was authorized by OJK Board of Commissioners Decree Number KEP- 147/D.05/2014, dated December 17, 2014, concerning the Enactment of OJK Pension Fund Regulations.

b. *Employee Welfare Foundation (YPK OJK)*
OJK established the Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) in 2015, according to the Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU 0032949.AH.01.04. of 2015 concerning the Ratification of YPK legal entity (dated December 22, 2015) to fulfill the organization's obligations to its employees.

c. *OJK collaborated with the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as the administrator of the Defined Contribution Pension Program for OJK employees based on the OJK Board of Commissioners Decision Number 28/D.02/2014 dated November 30, 2014, regarding the assignment of the DPLK BRI.*

The recognition and measurement of employee benefits are as follows:
a. *Liabilities related to employee benefits are recognized at the end of the reporting period; and*
b. *Liabilities related to employee benefits are measured by calculating the total net value obtained from the variance of the estimated amount of benefits due to employees as a substitute for their services in the current and previous periods for the program assets managed by the Third Party. The calculation applies actuarial methods and techniques based on the actuarial assumption adjusted to OJK policies.*

VIII.2.3 Revenue
OJK Revenues from Levies and State Budget. The Revenues from the State Budget are recognized when OJK receives the disbursement of funds, while the Revenues from Levies are recognized when 2 (two) criteria are fulfilled as follows:

a. Terdapat dasar untuk pengakuan pendapatan yaitu timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.
b. Nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.
a. Pendapatan Pungutan
   Pendapatan Pungutan terdiri dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

b. Pendapatan APBN
   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

VIII.2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.
a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

a. There is a basis of Revenues recognition resulting in a right to collect, approval, or agreement with related parties or receiving overpayments after the Financial Statements period and/or when there are no corrections on expenses refund during the Financial Statements period.

b. The value of the claim which payment will be received can be estimated reliably.

Revenues is measured at the acceptable fair value of economic benefits.

OJK Revenues are classified as follows:
a. Levy Revenues
   Levy Revenues consist of:
   1. Licensing, approval, registration, ratification, and review fees upon planned corporate action;
   2. Annual fees for regulation, supervision, inspections, and research;
   3. Administrative sanction in the form of penalties for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector; and
   4. Management, retention, or utilization of Levies.

b. Revenues from State Budget
   Revenues from State Budget are obtained from:
   1. Revenues from State Budget to meet OJK budgetary requirements; and
   2. Other Revenues from State Budget.

VIII.2.4 Expenses

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses, and Other Supporting Expenses as follows:

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks, and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement, strategic management, as well as education and consumer protection;

b. Administrative Expenses are office expenses, remuneration, employee benefits, course and training, organizational and human resources development, and those incurred on employee remuneration tax;
c. Asset Procurement Expenses include the procurement of assets, Inventories expenses, and loss on assets, including depreciation and amortization, and

d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting the implementation of OJK's function, tasks, and authority, excluding the categories mentioned in points a to c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

VIII.2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima OJK. Beban lainnya diakui pada saat barang/jasa diserahkan oleh OJK. Pendapatan Lainnya diukur sebesar nilai buku, nilai wajar, atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diserahkan oleh OJK. Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diserahkan oleh OJK.

Pendapatan Lainnya berupa Aset yang berasal dari hibah diukur sebagai berikut.

a. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

b. Dalam hal dilakukan penilaian oleh penilai publik/independen, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

c. Pencatatan penilaian dari penilai publik/independen adalah sebagai berikut.
   1. Dalam hal tanggal hasil penilaian terbit pada tahun yang sama dengan tanggal akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan, dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Pendapatan Lainnya;

   2. Dalam hal tanggal hasil penilaian terbit setelah tanggal akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan yaitu pada tahun berikutnya setelah Laporan Keuangan terbit, dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan pada Aset Neto.

Expenses are recognized when cash is issued, or liabilities emerge when executing OJK activities. Administrative activity expenses are also specifically recognized when there is a reduction in the useful life of the Prepaid Expenses, when there is an allowance and/or write-off of the receivables and asset procurement expenses are also specifically recognized when there is a reduction in the useful life of the Fixed/Intangible Assets/Right of Use Asset and/or when the Inventories is utilized.

The expense is measured by the cash issued or systematic allocation of assets over utility time or the nominal value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operating, administrative, asset procurement and other supporting activities.

VIII.2.5 Other Income/Expenses

Other Income/Expenses are OJK Revenues or expenditures other than the abovementioned Revenues and Expenses.

Other income is recognized when OJK receives goods/services. Other expenses are recognized when OJK delivers the goods/services. Other Income is measured at book value, fair value, or the agreed value when OJK receives the goods/service. Other expenses are measured at book value or the agreed value when OJK delivers the goods/service.

Other income in the form of assets from Grants is measured as follows:

a. At the time of transfer, assets from grants or donations are measured at the value in the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant documents/other equivalent documents.

b. In the event that a public/independent appraiser carries out an assessment, assets from grants or donations are measured by the increase/decrease in value compared to the value in the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant document/other equivalent documents.

c. Recording of assessments from public/independent appraisers is as follows.
   1. In the event that the date of the assessment results is published in the same year as the date of the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant document/other equivalent documents, an adjustment in value is made and must be recorded to a correction to Other Income;
   2. In the event that the date of the assessment results is published after the date of the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant document/ other equivalent document, namely in the following year after the Financial Report is published, an adjustment is made to the Net assets.

VIII.2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

VIII.2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas diterima, setara kas ditempatkan dan/atau saat reklasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya menjadi kas dan setara kas pada awal tahun.

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diakui. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didapatkannya penempatan deposito dan/atau surat berharga.

VIII.2.8 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
   3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan
   4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

VIII.2.6 Actuarial Profit/Loss

Actuarial profit/loss is the change in the current value of the defined benefit obligation due to the difference between the previous actuarial assumption and realization and the effect of the change in the actuarial assumption.

Actuarial Profit/Loss is recognized at the end of the annual reporting period and measured by applying actuarial services and techniques based on the assumptions according to OJK policy.

VIII.2.7 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash on hand or the balance of savings deposits available to finance OJK activities from the state budget and/or levy income in the previous year. It consists of cash in the bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets, readily convertible into cash within 12 (twelve) months or less without significant risk of change in value.

Cash and cash equivalents are recognized upon cash received, cash equivalents are placed, and/ or reclassification of restricted cash into cash and cash equivalents at the beginning of the year.

Cash and cash equivalents are measured at nominal value upon receipt. Securities held to maturity date are measured at acquisition cost.

Acquisition cost is all the cost incurred in acquiring term deposit placement and/or securities.

VIII.2.8 Restricted Cash and Securities

Restricted Cash and Securities are as follows:

a. Restricted cash is cash and cash equivalents utilization in a certain period as follows:
   1. Funds originating from OJK Levies Income in the current year based on that will be used to fund OJK activities in the following year based on prevailing regulations, including Restricted Securities for a period of up to 12 (twelve) months;
   2. Funds to be paid to the State Treasury;
   3. Funds designated to finance OJK liabilities in the following year; and
   4. Funds designated at the Board of Commissioners Meeting to finance certain activities.

b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/ atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

b. Restricted securities are financial instruments OJK uses to manage funds originating from Levy Income in the current year to finance activity in the following year and increase OJK's budget capacity.

Placements in the form of Term Deposit at banks approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of less than 1 (one) year.

Based on Article 22 of Government Regulation, Number 11 of 2014, concerning levy of Financial Service Authority, Revenues from the management, deposit, or utilization of levies and administrative sanction in the form of penalties for violations of prevailing financial services sector laws and regulations are part of OJK levy Revenues. The elucidation of the Government's above Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks and securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation, including interest in current account and interests.
c. Revenues from utilization, including fines for goods and services procurement default.

KDK Decree Number 43/KDK.02/2016, concerning OJK Levies Management, regulates the placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and/ or Term Deposits.

Restricted cash is recognized upon receipt or when allocated for specific activities at the BOC Meeting. It is measured at nominal value, excluding deposits that mature within 12 (twelve) months or less, measured at acquisition cost.

Restricted Securities are recognized on the placement date and Restricted Securities Held to Maturity are measured at the acquisition cost.

VIII.2.9 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
   1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.
      Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
      a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
      b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
      c) biaya tahunan.
   2. Piutang atas pengelolaan.
   3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:
   1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
   2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakui piutang yang berasal dari Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi untuk piutang:
a. Sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
b. Pengelolaan, penyimpanan, penggunaan pungutan antara lain denda wanprestasi.

VIII.2.9 Receivables

Receivables from Levy Payer of the Financial Services Industry register independently on the OJK Revenues information system.

Receivables from Levy Payer of the Financial Services Industry consist of:
a. Levy Receivables include:
   1. Receivables from Levy Payer of the Financial Services Industry register independently on the OJK Revenues information system.
      Receivables from Levy Payer of the Financial Services Industry consist of:
      a) Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan;
      b) Administrative penalties in the form of fines in the financial service sectors; and
      c) Annual fees.
   2. Receivables on fund management.
   3. Receivables on Levy utilization, includiing default penalties and overpaid levy fund utilization returns.

b. State Budget Receivables consist of:
   1. Receivables on fund utilization from State Budget including return of over-paid State Budget fund utilization; and
   2. Other receivables from State Budget utilization.

Receivables are recognized when there is a sufficient basis for recognition of receivables, namely the right to collect and approval or agreement amongst the relevant parties, and the value of the receivables can be estimated reliably. Receivables are measured at the carrying amount, namely the amount to be accepted by OJK.

OJK may recognize receivables from Levy Payer who have not registered for the receivables, which include:
a. Administrative sanctions in the form of fines in the financial services sector; and
b. Management, deposit, and usage of levy, including default fines.

Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan untuk piutang sebagaimana di atas dapat diregistrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria tidak memiliki kewajiban biaya registrasi dan/atau biaya tahunan. Dalam hal Wajib Bayar tidak memiliki data/informasi sebagaimana dipersyaratkan saat dilakukan registrasi pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, maka piutang atas Wajib Bayar tersebut dicatat dalam Laporan Kontinjensi Otoritas Jasa Keuangan. Registrasi dan pencatatan Piutang Sanksi atas Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi secara mandiri dilakukan oleh pengawas pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah mendapatkan dokumen penerimaan dari PUPN sesuai ketentuan yang berlaku, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (*allowance method*).

The Obligatory Payment for Financial Service Industry of the Receivables as mentioned above can be registered by the Financial Services Authority with the criteria of no registration fees and/or annual fees. In the event that the levy payers do not have the required data/information upon registration in the OJK's levy application, the receivables from levy payers will be recorded in the OJK's Contingency Report. Registration and recording of Sanction Receivables from levy payers who have not registered independently will be carried out by the supervisor in the OJK's levy application.

According to Article 12 of PDK Regulation Number 2/PDK.02/2018 dated December 22, 2018, regarding the Second Amendment to PDK Regulation Number 5/PDK.02/2014 concerning OJK's levy Management, Bad Debts is obligation of the levy payer that have not been paid for more than 1 (one) year, and the debt collection has been transferred to the State Receivables Affairs Committee (PUPN).

SEDK Number 5/SEDK.02/2020, concerning Accounting Policy of as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022, concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning Accounting Policy of Financial Services Authority, stated that Bad Debts that has been submitted to the State Receivables Affairs Committee (PUPN) and has received acceptance documents from PUPN according to applicable regulations, it is proposed to be written-off collectively by the Deputy Commissioner in charge of the financial function no later than December of the following year to:

a. Member of Board Commissioners who oversees the finance function for amounts up to Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
b. Board of Commissioners Meeting for amounts exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

In the event of write-off proposal is approved, the amount of the receivables written-off will be deducted from the value of receivables in the State Receivable Affairs Committee (PUPN) and recorded in the Contingency Report. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and Revenues balance in the Financial Statements. Such receipts are recognized as Revenues in the current year's levy upon receipt of the payment and written-off in the Contingency Report.

According to SEDK Number 5/SEDK.02/2020, concerning Accounting Policies of the Financial Services Authority as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022, concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020, concerning Accounting Policies of the Financial Services Authority, the Financial Services Authority carries out allowance for Receivables using the allowance method.

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari);
b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo;
c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo; dan
d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan piutang pungutan pada Laporan Keuangan OJK adalah sebagai berikut.

a. Faktor makroekonomi yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* dari Bank Indonesia;
b. *Macroeconomic Variable Effect* (MEV *Effect*) yang digunakan adalah 109,92%;
c. *Loss Given Default* (LGD) yang digunakan adalah 100%;
d. Penghitungan penyisihan piutang penempatan dana dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
    1. *Rating Bank* penempatan dana berdasarkan informasi dari Lembaga Pemeringkat antara lain Pemeringkat Efek Indonesia;
    2. *Credit Risk* yang digunakan menyesuaikan rating sebagaimana huruf a di atas antara lain:
        i. 0% untuk rating idAAA; dan
        ii. 0,007% untuk rating idAA+.
    3. Garansi berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
    4. LGD yang digunakan adalah 55% dengan *Recovery Rate* sebesar 45%.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan Piutang akan direviu secara periodik dalam waktu 5 (lima) tahun dan/atau sebelum waktu dimaksud jika diperlukan.

VIII.2.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

The allowance for Levy Receivables is calculated according to the allowance method as mandatory reserves based on a certain percentage of Levy Receivables according to quality.

The quality of Levy Receivables is an estimation of the collectability based on the age of the levy receivables by regulations concerning OJK procedures for billing of the Financial Service Authority levy. The quality and percentage of allowance/reserves in the OJK Financial Statements are categorized as follows:

a. Current, if the Levy Receivable has not matured (0 days);

b. Substandard, if the levy Receivable has matured for 1 (one) to 60 (sixty) days;

c. Doubtful, if the Levy Receivable has matured for 61 (sixty one) days to 1 (one) year; and

d. Loss if the Levy Receivable has matured for more than 1 (one) year.

The factors utilized in the calculation of the allowance for levy receivables in OJK Financial Statements are as follows:

a. The macroeconomic factor used is the reference interests rate BI-7 Days Reverse Repo Rate by Bank Indonesia;
b. The Macro-Economic Variable Effect (MEV Effect) used is 109.92%;
c. The Loss Given Default (LGD) used is 100%.
d. The calculation of provisioning for investment receivables is achieved by taking into account the following factors:
    1. The bank placement rating is based on information from rating agencies such as the Indonesian Securities Rating Agency;
    2. The credit risk used adjusts to the rating as mentioned in point a above, including:
        i. 0% for idAAA rating; and
        ii. 0.007% for idAA+ rating.
    3. Guarantees based on the provisions of the Deposit Insurance Corporation (LPS);
    4. The LGD used is 55% with a Recovery Rate of 45%.

The factors utilized in calculating the allowance for doubtful accounts will be periodically reviewed throughout 5 (five) years and/or before that time if necessary.

VIII.2.10 Inventories

Inventories is a Current Asset acquired, among other things, in the form of office supplies and computer equipment stored in the storage space of the Work Unit capable of procuring inventories and has not yet been used for OJK activities.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

VIII.2.11 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (*posting* transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

VIII.2.12 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (*posting* transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Inventories are recognized upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK.

Inventories is measured at acquisition cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventories arrives at the location and is ready to use (present location and condition). Discounts and other similar items are deducted when determining purchase costs.

The acquisition cost of inventories excludes storage costs. The recorded value of inventories and inventories costs is determined by multiplying the cost/balance of inventories quantity by the average price of inventories (moving average method).

VIII.2.11 Advance Payments

According to their intended use, Advance Payments are divided into Activity Advance Payments and Purchase Advance Payments. Activity Advance Payments is an upfront payment for an urgent or an activity where the actual amount of expenses is not yet precisely determined and must be accounted for upon completion. Purchase Advance Payments refers to an Advance Payments for purchasing goods or services that OJK has not received at the time of payment. The purchase Advance Payments must be accounted for as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement.

Advance Payments are recognized at the time of payment and are measured at the nominal value paid. The Advance Payments for activities is deducted upon settlement whereas Advance Payments for goods/services are deducted upon receipt of goods/services.

VIII.2.12 Prepaid Expenses

Prepaid Expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilized before the date of the financial statements nor fulfilling the Right of Use Asset criteria.

Prepaid Expenses are recognized upon payment for the right to use the services/ facilities, with a minimum acquisition cost per unit of Rp10,000,000.00 (ten million rupiahs), and measured as a proportion of the services/ facilities already paid for but not used as of the date of the financial statements.

VIII.2.13 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST), pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
    3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
    4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Aset Tetap yang berasal dari hibah diakui saat terdapat Akta hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan. Pada saat serah terima, Aset Tetap yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun berjalan.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
    1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
    2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
    3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.

VIII.2.13 Fixed Assets

Fixed Assets are tangible assets in the form of ready-to-use or previously built items for OJK activities, not intended for sale, and with more than 1 (one) year of useful life.

Expenditures capitalized as Fixed Assets are expenditures incurred for the acquisition of goods according to the following criteria:

a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets; and/or
b. All goods not registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets referred to in Letter a, and goods with a useful life of more than one year and utilized for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah).
c. Recognition or Effectiveness of Fixed Assets is as follows:
    1. Fixed Assets acquired simultaneously are recognized upon receipt or payment, whichever is earlier.
    2. Fixed Assets acquired simultaneously and directly without a certificate of acceptance (BAST) are recognized upon payment.
    3. Fixed Assets acquired progressively, including construction, and recognition is made at the time of certificate of acceptance (BAST).
    4. The acquisition cost includes tax payments.

Fixed Assets originating from grants are recognized upon the existence of a grant deed or grant certificate of acceptance (BAST) for the grant or equivalent documents. At the time of handover, Fixed Assets originating from grants are recorded as Fixed Assets in the current year.

Further Costs of Fixed Assets consist of:

a. Expenditures after land acquisition are measured as follows:
    1. The expenditure is recorded as additional Book Value if intended to enhance economic utility by increasing performance.
    2. If the land is intended to function normally as initially planned, including expenses for taxes and the regional contribution, the expenditure is recognized in the current year's expenses.
    3. If intended to extend land rights, the expenditure is recognized as an Extension of Land Rights.

b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Penyesuaian nilai Aset Tetap yang berasal dari hibah dalam hal memperoleh penilaian dari penilai diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
e. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:
a. Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:
a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
    1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
    2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
    3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
    4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
    5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan/atau
    6. biaya pematangan tanah.

b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalization criteria are recognized as additional Fixed Assets Book Value.

c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalization criteria are recognized as additional Other Fixed Assets.
d. The adjustment of the value of Fixed Assets originating from grants, in the event of obtaining an appraisal from an appraiser, is measured by the increase/decrease in value compared to the value stated in the deed of grant/grant certificate of acceptance (BAST) for the grant/documents equivalent to it.
e. Expenditures relating to Fixed Assets not referred to in Letters a through d are recognized as current-year expenses.

Derecognition occurs when:
a. Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position if the Fixed Assets is sold, granted, exchanged, withdrawn from use, or lost.

b. The profit realized from released Fixed Assets is recognized as current year Revenues.
c. The loss incurred from released Fixed Assets is recognized as current-year expenses.
d. If insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year, it is recognized as Revenues.

e. The Book Value of Fixed Assets withdrawn from usage due to replacement with new Fixed Assets are write-off and recognized as an expense in the current year.
f. The write-off procedure for Fixed Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets:
a. Expenditures recognized as Acquisition Cost of Land consist of the following:
    1. Procurement price of land, including plants, infrastructure, and buildings on the land that must be purchased and subsequently destroyed;
    2. Construction and landscaping costs if the land must be landscaped;
    3. Compensation for residents, relocation costs;
    4. Cost of purchasing replacement land;
    5. Commission to land intermediary; and/or
    6. Cost of developing the land.

b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
   1. biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
   2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
   3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
   4. biaya konsultan;
   5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
   6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.

c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
   1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
   2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
   4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.

d. Biaya Perolehan Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan.
   2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
   3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.

e. Biaya Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hibah adalah sebagai berikut.
   1. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun berjalan dan diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/ dokumen lainnya yang dipersamakan;
   2. Dalam hal Akta Hibah/ Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan tidak mencantumkan nilai, maka nilai pengakuan awal aset adalah sebesar nilai yang ditetapkan;

b. Expenditures recognized as Cost of Acquiring Land Rights consist of the following:
   1. Cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity and spatial planning for the acquisition of land rights after the procurement contract has been signed, which are capitalized for the acquisition of land rights;
   2. Survey and planning costs for the land acquisition;
   3. Notary costs, transaction costs, and PPAT;
   4. Consultancy fees;
   5. Taxes relating to land acquisition transactions; and
   6. Official costs that must be paid to the State Treasury to acquire the rights, including status and allocation.

c. Expenditures recognized as Acquisition Cost of Fixed Assets excluding Land consist of the following:
   1. Acquisition cost of Fixed Assets, including consultancy fees, notary fees, design fees, import duties, licensing, and tax costs;
   2. Direct cost of transporting the asset to the location ready to use;
   3. Other costs incurred until the Fixed Assets is ready to use as part of the Fixed Assets procurement contract and
   4. In the event that a component is already installed, the Acquisition Cost of the component is an additional Acquisition Cost of the Fixed Assets during its useful life or non-material value.

d. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through exchange are recognized as follows:
   1. In the absent of payment or cash receipt or cash equivalents, it is recognized at the book value of the Fixed Assets delivered.
   2. In the event of cash or cash equivalents payment, it is recognized as the Book Value of the Fixed Assets delivered added by the amount of cash or cash equivalents paid.
   3. In the event cash or cash equivalents receipts, it is recognized as the Book Value of the Fixed Assets delivered deducted by the cash or cash equivalents received.

e. Acquisition Cost of Fixed Assets originating from Grants is as follows:
   1. During the handover process, assets originating from grants are recorded as Fixed Assets in the current fiscal year. They are measured at the value stated in the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST) for the grant/ grant document/or equivalent documents.
   2. If the Grant Deed/Grant Certificate of Acceptance (BAST) for the grant or other grant documents does not specify a value, the initial recognition value of the asset shall be determined as the established value.

3. Dalam hal terdapat penilaian dari penilai publik/ independent maka dilakukan penyesuaian kenaikan/ penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Aset Tetap.

Ketentuan lebih teknis ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/ MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.

g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
   1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
   2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:
a. Metode Penyusutan Aset Tetap
   Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Tetap
   Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.
   1. bukan bangunan;
      a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
      b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
   2. bangunan dengan masa manfaat 20 tahun;
   3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

3. In the event of an assessment by a public or independent appraiser, adjustments for increases or decreases are made and recorded as Fixed Assets corrections.

Further technical provisions are stipulated through the Decree of the Deputy Commissioner of Information Systems and Finance Number KEP-10A/ MS.5/2022, concerning the Technical Guidelines for the Preparation of Financial Statements of the Financial Services Authority that during the handover, assets originating from grants or donations are measured at the value stated in the grant deed/ grant certificate of acceptance (BAST)/grant documents/others equivalent document.

f. In the event of non-proceeding or non-implementation of the acquisition of Fixed Assets Land, all incurred costs are recognized as current-year expenses.

g. Direct costs related to land and/or building acquisition referred to in paragraphs a), b), and c) above paid before the land and/ or building procurement contract has been signed are initially recorded as expenses in the current year. Subsequently, if the contract is signed, the following adjustments are made:
   1. If the expense is reclassified as an asset in the current year, the direct costs of the asset relating to the procurement contract (definitive asset) are capitalized;
   2. If the expense is reclassified as an asset in the subsequent year, the direct costs remain as expenses.

The measurement subsequent to the recognition of Fixed Assets using the cost model to acknowledge their value involves recording them at their acquisition cost deducted accumulated depreciation. The useful life generally follows that of the principal asset unless there is a reassessment of the principal asset's useful life.

Fixed Assets Depreciation:
a. Fixed Assets Depreciation Method
   Fixed Assets are depreciated using the straight-line method over their useful life with no residual value.

b. Fixed Assets Depreciation Period
   The Useful Life of Fixed Assets for the Financial Statements is classified as follows:
   1. Non-Property:
      a) group 1 with a Useful Life of 4 years;
      b) group 2 with a Useful Life of 8 years;
   2. Property with a Useful Life of 20 years;
   3. In the case of Non-Property Fixed Assets that may be capitalized but are not categorized in point 1, the asset's useful life is determined by the prevailing regulations/ policies concerning the useful life of OJK's assets.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:
1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fixed Assets depreciation commences from the acquisition date.

The Useful Life of Fixed Assets will be reviewed if:
1. *an adjustment in the useful life through an additional or replacement Fixed Assets component after recognition;*
2. *the estimated loss value must be recognized if certain conditions significantly reduce the useful life of the Fixed Assets, including accidents, natural disasters, fire damage, and unrest. If the value of the loss is at least 70% of the Book Value, the Fixed Assets is written off.*

The review is conducted by the work unit responsible for Asset management.

SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policy as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022 concerning the amendment to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policy stipulates that the accounting recording and reporting of OJK's Fixed Assets and Intangible Assets regulated in this SEDK refer to the Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants. The accounting recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Budget (APBN) refer to applicable regulations. Currently, the reference regulation is Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

VIII.2.14 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-Cuma yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna
a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
   1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
   2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
   3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
   4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
   5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.

VIII.2.14 Right of Use Asset

Right-Of-Use is the asset represents the lessee's rights to utilize the underlying asset during the lease contract. The lease commences on the lease commencement date and includes Rent-Free Periods granted by the lessor to the lessee.

Recognition of Right of Use Asset
a. Identification of leasing contracts that meet the criteria of Right of use asset:
   1. fulfilling criteria as a lease agreement;
   2. length of term exceeding 12 months;
   3. value of underlying asset or lease agreement exceeding Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) per unit or determined by the Deputy Commissioner in charge of the financial function;
   4. Does not comprise a lend use agreement; and
   5. There is a transfer of assets or cash flows from the lessee to the lessor.

b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna
a. Pengukuran pada saat pengakuan
   1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
   2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
      a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
      b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
   3. Biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
   4. Biaya layanan dan pemeliharaan seperti service charge, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
   5. Biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
   6. Biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
      a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
      b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
   7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
   8. Bunga/*rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan setiap tahun, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
   9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.

b. Lease agreements that fail to meet the criteria stipulated above are recorded as Rent Expense or Prepaid Expense if meeting the requirements for recognition as Prepaid Expense.
c. The rent of intangible assets is not included in the scope of Right of use asset.
d. The useful life of Right-of-use assets is the rental period agreed upon and stipulated in the lease agreement.
e. In the event of a lease agreement is paid on a term basis or outstanding at the beginning of the lease period, it is recognized as a Liabilities/Lease Payables.
f. Upon payment of lease payables , lease interest expense will be recognized.

Measurement of Right of Use of Assets
a. Measurements at recognition of Right of use asset
   1. On the beginning date, the lessee measures the Right of Use Asset at the acquisition cost;
   2. The acquisition cost of Right of use asset includes:
      a) The initial measurement of lease payables is calculated based on the lease commencement date on the contract; and
      b) Lease payments made on or before the commencement date reduced by lease incentive received.
   3. The direct costs incurred until the Right of Use Asset is ready to use and the depreciation method refer to the Fixed Assets measurement;
   4. Service charges and utility (electricity and water supply) costs, as well as other maintenance costs, are not part of the rent component;
   5. Renovation costs for the Right of Use Asset are recorded as Other Fixed Assets;
   6. Estimated restoration costs are only recognized if:
      a) OJK is obliged to record the restoration costs in the lease agreement;
      b) The estimated restoration costs can be calculated reliably.
   7. Lease payables are measured based on the latest unpaid lease payment on that date;
   8. The rate used to measure lease payables is the rate approved by the head of the work unit responsible for the financial function, referring to other rates in securities the Government financial note;
   9. If the lease agreement contains a clausal option to extend or purchase, OJK only measures that option if that option is taken.

b. Pengukuran setelah pengakuan
   1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
   2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

VIII.2.15 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.
a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/ atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
   1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
   2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
   3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Aset Takberwujud yang berasal dari hibah diakui saat terdapat Akta hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan. Pada saat serah terima, Aset Takberwujud yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Takberwujud pada tahun berjalan.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:
a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/ sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.

b. Measurement after Recognition
   1. OJK measures Right of use asset at acquisition cost deducted by accumulated depreciation using the straight-line method commencing in the first month of the lease agreement.
   2. The calculation of depreciation after additional capitalization of the Right of Use Asset is adjusted to the month additional capitalization was recorded.

VIII.2.15 Intangible Assets

Intangible Assets are identifiable assets and not in physical form held to support OJK activities, not intended for sale, and with a useful life exceeding 1 (one) year.

The Acquisition Cost of Intangible Assets is as follows.
a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets; and/or
b. Expenditures incurred for the acquisition of all software/ information technology application systems developed (in-house and/ or outsourced) or purchased ready to use, or requiring further modifications, that can be capitalized as Intangible Assets if they have a useful life exceeding one year and are utilized in OJK activities with an acquisition cost of at least Rp10,000,000.00 (ten million rupiahs).
c. Recognition or Effectiveness of Intangible Assets is as follows:
   1. Intangible Assets acquired simultaneously are recognized upon receipt or payment, whichever is earlier.
   2. Intangible Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognized upon payment.
   3. Intangible Assets acquired gradually are recognized at the time of final certificate of acceptance (BAST).

Intangible Assets originating from grants are recognized upon the existence of a Grant Deed/ grant certificate of acceptance (BAST)/grant document/or equivalent documents. During the handover, Intangible Assets originating from grants are recorded as Intangible Assets in the current year.

Further Costs of Intangible Assets:
a. Expenditures recognized as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop (enhance) structural software/information technology application systems, as determined by the information technology work unit.

b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.
c. Penyesuaian nilai Aset Takberwujud yang berasal dari hibah dalam hal memperoleh penilaian dari penilai diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:
a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud
a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri dari:
    1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
    2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
    3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
    4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
    5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.

b. Expenditures related to Intangible Assets not referred to in Letter A are recognized as ongoing expenses, including maintenance and repairs, and licensing costs of software/ application systems for the period one year after acquisition.

c. Adjustment of the value of Intangible Assets originating from grants, in the event of assessment by an appraiser, is measured by the increase/decrease in value compared to the value stated in the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant document /or equivalent documents.

Derecognition occurs when:
a. Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position if the Fixed Assets is sold, granted, exchanged, withdrawn from use, or lost.

b. The profit realized from released Intangible Assets is recognized as the current year Revenues.
c. The loss incurred from released Intangible Assets is recognized as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year, it is recognized as Revenues.
e. The Book Value of an Intangible Asset with-drawn from use due to replacement by a new Intangible Asset is written off and recognized as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Intangible As- sets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Intangible Assets
a. Expenditures recognized as Acquisition Cost of Intangible Assets consist of the following:
    1. procurement price of (purchase/enhancement), including import duty, taxes, and freight costs;
    2. licensing cost at acquisition;
    3. consultant fees incurred for the procurement of intangible assets, which are integral to the cost of intangible assets;
    4. other costs incurred until the Intangible Assets are ready to use as part of the Intangible Asset procurement contract; and
    5. In the event that there are hardware components in the acquisition of Intangible Assets that cannot be capitalized as Intangible Assets, then the acquisition cost of the hardware increases the Intangible Assets.

b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
   1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
   2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.

c. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah adalah sebagai berikut:
   1. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Takberwujud pada tahun berjalan dan diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

   2. Dalam hal Akta Hibah/ Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan tidak mencantumkan nilai, maka nilai pengakuan awal aset adalah sebesar nilai yang ditetapkan.
   3. Dalam hal terdapat penilaian dari penilai publik/ independent maka dilakukan penyesuaian kenaikan/ penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Aset Takberwujud.

d. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud
a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud
   Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

   Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

   Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

b. Expenditures recognized as the Acquisition Cost of the Intangible Asset developed in-house consist of the following:

   1. procurement price or licensing cost of software/information technology application systems used to procure the Intangible Assets; and
   2. consultant fees and fees for the contractors for the procurement of software/information technology application systems are part of the procurement contract for Intangible Assets.

c. The Acquisition Costs of Intangible Assets originating from grants are as follows:
   1. At handover time, assets originating from grants are recorded as Intangible Assets in the current year. They are measured at the value stated in the grant deed/grant certificate of acceptance (BAST)/grant document/or equivalent documents.
   2. If the grant deed/grant Certificate of Acceptance (BAST)/ grant document/ other equivalent documents do not specify a value the asset's initial recognition value shall be determined as the established value.
   3. If there is an assessment by a public/ independent appraiser, adjustments for increase/decrease are made and recorded as Intangible Assets correction.

d. In the event that intangible Assets are not completed or implemented, all previous costs incurred are recognized as current year expenses.

Measurement after Intangible Asset Recognition applies the cost model to recognize the value of the Intangible Asset, which is recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Amortization. The useful life generally follows the useful life of the principal asset unless the useful life of the principal asset is reassessed.

Amortization of Intangible Assets
a. Intangible Assets are amortized using the straight-line method without residual value.

b. Amortization Period of Intangible Assets.
   The useful life of Intangible Assets for the purpose of preparing Financial Statements as stipulated in the provisions related to the useful life of OJK assets.

   The amortization calculation period commences on the Intangible Assets' acquisition date.

   The Useful Life of the Intangible Asset is reviewed with conditions as follows:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut.

a. *Software* dengan masa manfaat 4 tahun;
b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

VIII.2.16 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyelesaian tidak disusutkan.

1. *Adjustment to the useful life due to an addition or replacement of components of Intangible Asset after the recognition;*
2. *Certain occurrences that significantly reduced the useful life of an intangible asset, such as accidents, natural disasters, fires, and riots, then the loss value based on the estimate must be written off along with the accumulated amortization value.*

The Useful Life of Intangible Assets is reviewed by the work unit responsible for Intangible Asset management.

Based on Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2017, as an amendment to Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2015, concerning the Register of Fixed Assets and Intangible Assets, the Useful Life of Intangible Assets is as follows:

a. Useful Life of 4 years for Software;
b. Useful Life of 4 years for System Applications;
c. Useful Life of 4 years for other intangible assets or referring to assignment of rights.

SEDK Number 5/SEDK.02/2020, concerning OJK Accounting Policies as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022 concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020, concerning OJK Accounting Policies states that the accounting recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets of the OJK regulated in this Circular Letter refer to the Financial Accounting Standards set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) Financial Accounting Standards Board. The accounting recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Budget refer to the applicable regulations. The reference regulation is Government Regulation Number 71 of 2010, concerning the Government Accounting Standards.

VIII.2.16 *Assets Under Construction*

Assets Under Construction are Fixed Assets, Right Use Assets, and/or Intangible Assets not ready for use, Construction in Progress (CIP), utilized for OJK activity, and not intended for sale. Assets Under Construction are recognized if:

a. It is likely the future benefits associated with the asset will be obtained;
b. The acquisition cost can be reliably measured; and
c. The asset is still under construction.

Assets Under Construction are recognized at acquisition cost. The accumulated acquisition cost will be reclassed to the respective Fixed Assets, Right of Use Asset, and/or Intangible Asset upon completion and ready to use. Assets Under Construction are not depreciated.

VIII.2.17 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima. Aset Lainnya diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

VIII.2.18 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek
   Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:
   1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
   2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
   3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
   4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) di atas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

1. Utang Operasional diakui dalam hal:
   a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
   b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*), mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

VIII.2.17 Other Assets

Other Assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets. Other Assets are recognized upon asset receipt by OJK and measured at the value agreed upon receipt.

VIII.2.18 Liabilities

Liabilities is a debt resulting from a past event, such as the settlement of an outflow of financial resources from OJK.
Liabilities consist of the following:

a. Current Liabilities
   Current liabilities are OJK obligations to a third party that mature or be settled within 12 (twelve) months of the reporting period, including:
   1. *Operating Payables, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid before the date of the Financial Statements, for instance, to a third party;*
   2. *Tax Payables, namely liabilities that emerge due to OJK's status as a Tax Collector, such as Income Tax or Taxpayer, including Corporate Tax;*
   3. *Unearned Revenues are Revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period, for example, overpaid levies/annual fees, adjustments to Revenues paid, or overpaid return transactions in the current accounting period;*
   4. *Debt to the State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or OJK levies under prevailing regulations; and/or*
   5. *Other Short-Term Liabilities, namely debt that will mature within 12 (twelve) months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in Paragraphs 1) to 4) above.*

Current Liabilities are recognized as follows:

1. *Operating Payables are recognized when:*
   a) OJK receives the good/service, rights for the goods/services, or economic benefits of the goods/services; or
   b) OJK receives a rightful claim from a third party, usually in the form of an invoice, whichever is first.
2. *Taxes Payable are recognized upon collection from an employee and/or third party or tax payment according to prevailing regulations.*

3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.

   Pendapatan Diterima Dimuka yang tidak terdapat permohonan pengembalian setelah 2 (dua) tahun sejak tercatat pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, diakui sebagai Pendapatan tanpa menghilangkan hak pihak lain yang dapat dibuktikan secara sah.

   Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diakui sebagai Pendapatan berasal dari:
   a) Kelebihan pembayaran biaya registrasi;
   b) Kelebihan pembayaran biaya tahunan atas wajib bayar yang kewajiban biaya tahunannya telah berakhir antara lain perizinan dicabut, atau pendaftaran dibatalkan;
   c) Kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan;
   d) Pembayaran yang diterima dan dicatat sebagai penerimaan yang tidak teridentifikasi.

   Dalam hal terdapat klaim/permohonan yang dapat dibuktikan secara sah atas Pendapatan Diterima Dimuka yang telah diakui sebagai Pendapatan maka:
   a) diakui sebagai pengurang Pendapatan jika terjadi pada periode Laporan Keuangan.
   b) dicatat sebagai Beban jika terjadi pada periode Laporan Keuangan tahun yang berbeda.

4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Liabilitas Jangka Pendek tidak diakui kembali jika dan hanya jika liabilitas tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa, antara lain berdasarkan keputusan pengadilan dan/atau kesepakatan para pihak.
7. Untuk tahap posting transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Jangka Panjang merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

3. Unearned Revenues is recognized upon receipt of excess cash collections, transaction returns, or adjustment for already paid or settled Revenues.

Unearned Revenues without refund request after 2 (two) years from being recorded in the Financial Services Authority's Revenues information system is recognized as Revenues without extinguishing the rights of other parties that can be lawfully proven.

Unearned Revenues that can be recognized as Revenues originates from:
a) Excess payment of registration fees
b) Excess payment of annual fees for obligors whose annual fee obligations have ended, including cases where licenses are revoked or registrations are canceled;
c) Excess payment of administrative sanctions in the form of fines in the financial services sector;
d) Payments received and recorded as unidentified receipts.

In the event of a claim/request that can be lawfully proven for Unearned Revenues that has been recognized as Revenues, then:
a) It is recognized as a Revenues reduction if it occurs during the financial statements period.
b) It is recorded as an Expense if it occurs in a different Financial Statement period.

4. Debt to the State Treasury is recognized at the end of the reporting period in the case of residual state budget funds and/or OJK levies according to prevailing regulations.
5. Other Short-Term Debt is recognized at the end of the reporting period.
6. Short-term Liabilities are not derecognized unless and only when the liability expires, namely when the obligation is discharged, canceled, or expired, including but not limited to based on court decisions and/or agreements between parties.
7. Operating Payables and Taxes Payable are recognized first (if applicable) when posting payment transactions.

Current Liabilities are measured at nominal value.

b. Long Term Liabilities
Long-term Liabilities are obligations to third parties that will mature and be settled within more than 12 (twelve) months after the reporting period, including:

1. Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang lain, imbalan pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja/pesangon.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK.

Imbalan Kerja Jangka Panjang lain meliputi tunjangan cuti besar, penghargaan masa pengabdian, dan tunjangan frame kacamata. Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan imbalan kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Terminasi kontrak kerja/pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK. Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program imbalan kerja jangka panjang lain, pesangon, dan imbalan pascakerja Otoritas Jasa Keuangan dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Pengakuan Liabilitas Jangka Panjang adalah sebagai berikut.
1. Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode Pelaporan tahunan.
3. Liabilitas Jangka Panjang tidak diakui kembali jika liabilitas tersebut berakhir, merujuk pada dokumen yang menjadi dasar suatu kewajiban tidak berlaku lagi, antara lain keputusan pengadilan dan/atau kesepakatan para pihak.

1. *Lease Payables arise from commitments to lease Right of use asset that are unpaid on the lease commencement date.*
2. *Liabilities related to Employee Benefits encompass all forms of compensation for services rendered to OJK's Commissioners and Employees, including short-term employee benefits, other long-term employee benefits, post-employment benefits, or termination of employee contracts/severance.*

Short-term Employee Benefits are employment benefits (other than severance pay) expected to be settled entirely within twelve months after the end of the annual reporting period in which the Commissioners and Employees provide related services.

Other Long-term Employee Benefits comprise all employee benefits other than short-term employee benefits, post-employment benefits, and severance paid periodically every 2 (two) years or more, as stipulated in the OJK remuneration system regulations.

Other long-term employee benefits include large leave allowances, long service awards, and eyeglass allowances. Post-employment Benefits are benefits (excluding severance and short-term employee benefits) payable after the Commissioners and Employees have completed their services.

Termination of employment contracts/severance is compensation provided in exchange for the termination of employment agreement with OJK's Commissioners and Employee. Program assets are assets owned by Fund Managers to meet the needs of OJK's employee benefits-related liabilities, which cannot be used for other purposes. Program assets for other long-term employee benefits, severance, and post-employment benefits of the Financial Services Authority are managed by OJK's related parties.

Recognition of Long Term Liabilities is as follows:
1. *Lease Payables are recognized when the lease liabilities arise.*
2. *Liabilities related to Employee Benefits are recognized at the end of the annual reporting period.*
3. *Long-term Liabilities are not derecognized if the liability ends, referencing documents that form the basis of an obligation no longer valid, including court decisions and/or agreements between parties.*

Liabilitas Jangka Panjang diukur sebesar:

1. Utang Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Utang sewa diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

VIII.2.19 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

   1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
      b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

   2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
      b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

   3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (tax accounting) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.

Long Term Liabilities are measured at:

1. *Lease Payables are measured at the present value of lease payments yet to be paid on that date. Lease Payables are measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease payables.*
2. *Liabilities related to Employee Benefits are measured by calculating the total net value of the difference between the estimated benefits owed to Employees as compensation for services in the current and past periods with program assets managed by Third Parties. This calculation utilizes actuarial services and techniques based on actuarial assumptions adjusted to OJK policies.*

VIII.2.19 Taxation

a. OJK Taxation Status and Obligations are stipulated based on the following:

   1. Directorate General of Taxation Letter Number S-487/PJ/2015, dated December 2, 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
      a) OJK levy Revenues from the financial services sector are subject to Income Tax; and
      b) OJK Revenues from state budget funds are not considered taxable income.

   2. Ministry of Finance Letter Number S-1001/ MK.03/2015, dated December 10, 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:
      a) OJK is classified as a legal entity, namely a group of people, as a union that is not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax. Based on those criteria, OJK is established as an income tax source.
      b) OJK is subject to Income Tax. Concerning OJK levies, Directorate General of Taxation Letter Number S-487/PJ/2015, dated December 2, 2015, states that levies are a form of taxable income.

   3. OJK Chairman's Letter Number S-350/D.01/2018, dated December 31, 2018, concerning the Use of Employment Benefits Fund for Mandatory Corporate Income Tax Payments states that at a meeting between OJK and Directorate General of Taxes (DJP) held on December 17, 2018, it was agreed that Corporate Income Tax (tax accounting) for OJK was based on Revenues in the previous year recognized as Revenues in the current year deducted by expenses in the current year.

b. Pajak Penghasilan OJK:
   1. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas laba kena pajak entitas.
   2. Pajak Kini merupakan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Final.
   3. Pajak Penghasilan Final merupakan PPh yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena Pajak Penghasilan tidak final. Contoh dari PPh Final antara lain pemotongan pajak atas jasa giro dan/atau imbal hasil penempatan deposito.
   4. Beban Pajak (penghasilan pajak) merupakan jumlah agregat Pajak Kini dan Pajak Tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
   5. Pajak Dibayar Dimuka merupakan uang muka pajak yang akan menjadi pengurang pajak terutang, antara lain pembayaran PPh Pasal 25.

   Pengakuan Pajak penghasilan:
   1. Jumlah Pajak Kini yang belum dibayar harus diakui sebagai Liabilitas/Utang Pajak dan Beban Pajak.
   2. Apabila jumlah Pajak Kini yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka pada kelompok Aset.
   3. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset (sepanjang peraturan perpajakan mengizinkan).
   4. Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi).

   Pengukuran Pajak penghasilan:
   1. Liabilitas (aset) Pajak Kini dan Beban (penghasilan) Pajak diukur sebesar jumlah yang telah diperhitungkan secara self assessment untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan.
   2. Penghitungan Liabilitas (aset) Pajak Kini dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan dan dikurangi dengan kredit pajak, yang antara lain berupa angsuran Pajak Penghasilan OJK.
   3. Pajak Dibayar Dimuka diukur sebesar pembayaran yang dilakukan oleh OJK.

b. OJK Income Tax:
   1. Income Tax is calculated based on tax regulations and levied on entities' taxable income.

   2. Current Tax is the amount of Income Tax payable (recoverable) on taxable income (tax loss) for a period, consisting of Corporate Income Tax and Final Income Tax.

   3. Final income tax is a type of final withholding tax, meaning that after its payment, the tax liability is settled, and the income subject to final income tax is not combined with other types of income subject to non-final income tax. Examples of Final Income Tax include tax withholding on interest on savings accounts and/or interest from term deposit placement.
   4. Tax Expense (income tax expense) is the aggregate amount of Current Tax and Deferred Tax recognized in determining profit or loss for the period.

   5. Prepaid Tax is a tax prepayment that will reduce the tax payable, including payment of Article 25 Income Tax.

   Recognition of Income Tax:
   1. The amount of Current Tax payables must be recognized as Tax Liability/Payable and Tax Expenses.
   2. If the amount of paid Current Tax exceeds the amount of tax payables, the difference is recognized as Prepaid Tax under the Assets category.
   3. The benefit from tax loss carryforwards to recover current taxes from previous periods is recognized as an asset (as long as tax regulations permit).

   4. Prepaid Tax is recognized at the time of payment processing (transaction posting)

   Measurement of Income Tax:
   1. Current Tax Liability (asset) and Tax Expense (income) are measured at the amount calculated through self-assessment for payment (refund) to the tax authority.

   2. Calculating Current Tax Liability (asset) is done by multiplying taxable income by the applicable tax rate for the reporting period and subtracting tax credits, including OJK Installment on Income Tax.

   3. Prepaid Tax is measured at the amount paid by OJK.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
   1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
   2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
   3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

e. Pengakuan Pajak Tangguhan
   1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (*deductible/nondeductible*) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Pengukuran Pajak Tangguhan
   1. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/ negatif dari rekonsiliasi fiskal.
   2. Penghitungan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
   3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan.

According to Article 35 paragraph (3) of OJK Commissioner Regulation Number 8/ PDK.02/2017 dated March 22, 2017, concerning the Remuneration System for OJK Employees, it is stated that Income Tax (PPh) on Remuneration, including Equalization Allowances and Monthly Cash Values in the form of money received by Employees is charged to the OJK budget. Based on this provision, OJK establishes the policy treatment for Employee Article 21 Income Tax Expense as Article 21 Income Tax borne by OJK.

c. Deferred Assets tax is the amount of income tax that can be recovered in the future due to:
   1. Deductible temporary differences (including pension benefit costs);
   2. Accumulated tax losses that remain uncompensated; and
   3. Unused accumulated tax credits, if permitted by tax laws.

d. Deferred Tax Liability is the amount of Income Tax payable in future periods due to temporary taxable differences.

e. Recognition of Deferred Tax
   1. Deferred Tax Assets are recognized after fiscal reconciliation with a positive correction of the temporary differences. Thus, the tax expense according to the accounting method is smaller than the tax expense according to tax regulations.
   2. Deferred Tax Liabilities are recognized after fiscal reconciliation with a negative correction of the temporary differences. Thus, the tax expense according to the accounting method is larger than the tax expense according to tax regulations.
   3. The fiscal reconciliation mechanism refers to OJK taxation guidelines by registering a cost/expense account that is deductible or non-deductible based on prevailing tax regulations.

f. Measurement of Deferred Tax
   1. Deferred Tax Assets and Liabilities are measured using the applicable tax rate when the asset is recovered, or the liability settled, or by the amount of positive/negative corrections of the fiscal reconciliation.
   2. Deferred Tax Assets and Liabilities are calculated based on the balance sheet approach, which involves calculating the differences between the commercial book balances and the tax bases.
   3. A future adjustment in the tax rate will influence the recognition of Deferred Tax.

g. Pemotongan/Pemungutan Pajak Pihak Lain (*withholding tax*)
Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak Pihak Lain (*withholding tax*) merupakan pemotongan/pemungutan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas transaksi yang dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Dibayar Dimuka merupakan uang muka pajak yang akan menjadi pengurang pajak terutang, antara lain kelebihan pembayaran PPh Pasal 21. Pengakuan Utang Pajak Potong Pungut yaitu:
1. Liabilitas atas pemotongan/pemungutan pajak Pihak Lain (*withholding tax*) diakui pada saat pengakuan/pembayaran beban/aset terkait.
2. Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

Pengukuran Utang Pajak Potong Pungut yaitu:
1. Liabilitas atas pemotongan/pemungutan pajak Pihak Lain (*withholding tax*) diukur sebesar dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak Dibayar Dimuka diukur sebesar pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

h. Pajak Lainnya
Pengakuan Pajak Lainnya:
1. Beban terkait Pajak Lainnya diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya Liabilitas terkait Pajak Lainnya.
2. Dalam hal Pajak Lainnya merupakan bagian dari aset, maka diakui sebagai aset terkait.

Pajak Lainnya diukur sebesar dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

i. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab III Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

VIII.2.20 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan. Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan. Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

g. Withholding Tax
Obligation to Withhold/Collect Tax by Other Parties (withholding tax) refers to the deduction/collection of Employee/Third Party Taxes conducted by OJK on taxable transactions by prevailing laws and regulations.

Prepaid Tax represents advance tax payments that offset tax payable, including excess withholding tax payments under Article 21 Income Tax. Recognition of Withholding Tax Payable is as follows:
1. *Liability for withholding tax by Other Parties is recognized at the time of recognition/payment of related expenses/assets.*
2. *Prepaid Tax is recognized when the Operational Unit conducts self-assessment on payment/excess payment of related assets.*

Measurement of Withholding Tax Payable is as follows:
1. *Liability for withholding tax by Other Parties is measured at the tax base multiplied by the applicable tax rate according to the prevailing tax regulations.*
2. *Prepaid Tax is measured at the payment/excess payment of related taxes.*

h. Other Taxes
Recognition of Other Tax:
1. *Expenses related to Other Taxes are recognized at the time cash is disbursed or when liabilities related to Other Taxes arise.*
2. *If Other Taxes are part of an asset, they are recognized as related assets. According to the prevailing tax regulations.*

Other Taxes are measured at the tax base multiplied by the applicable tax rate.

i. Changes to Corporate Income Tax Rates The Republic of Indonesia Act Number 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization, Chapter III on Income Tax, Article 17 paragraph (1) letter b states that the tax rate applied to Taxable Income for domestic corporate taxpayers and permanent establishments is 22%, which will be effective from the 2022 tax year.

VIII.2.20 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets deducted by liabilities. OJK's Net Assets are unrestricted Net Assets. Net Assets are recognized in the Statement of Financial Position. Changes in Net Assets are measured by Revenues deducted by OJK expenses. End-of-period Net Assets are measured from the beginning balance of Net Assets plus/minus changes in Net Assets and adjustments to Net Assets.

VIII.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan
Details Of Financial Statement

VIII.3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.193.934.232.662,00 dan Rp7.514.363.129.765,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.1 Restricted Cash and Securities

Cash and Restricted Securities as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp8,193,934,232,662.00 and Rp7,514,363,129,765.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	31 Dec 2023		31 Dec 2022		*Description*
1.	**Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka**	-	8.077.777.725.033	-	7.514.363.129.765	***Levy Funds and Unearned Revenues***
a)	Pungutan Tahun Berjalan	8.058.599.405.247	-	7.476.488.012.318	-	*Current Year Levies*
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	19.178.319.786		37.875.117.447	-	*Unearned Revenues*
2.	**Dana Setoran Kas Negara**		45.435.122.748	-	-	***Funds for State Treasury Payment***
a)	Pengembalian Anggaran 2023	45.435.122.748	-	-		*2023 Budget Refunds*
3.	**Dana Pembayaran Perpajakan**		70.721.384.881		-	***Tax Payment Funds***
a)	Pelunasan Pasal 29 PPh Badan 2023	18.669.786.212	-	-	-	*Settlement of Article 29 of Corporate Income Tax for 2023*
b)	PPh Pasal 29 Pegawai Tahun 2023	41.752.853.237	-	-	-	*Article 29 Income Tax for Employees in 2023*
c)	PPh Pasal 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2023	10.298.445.432	-	-	-	*Article 21 Income Tax for Employees for December 2023*
d)	PPh Pasal 23 Masa Desember 2023	300.000	-	-	-	*Article 23 Income Tax for December 2023*
	Jumlah	**-**	**8.193.934.232.662**	**-**	**7.514.363.129.765**	***Total***

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp8.058.599.405.247,00 terdiri dari penerimaan pada tahun berjalan sebesar Rp8.039.902.607.586,00 (lihat Catatan 3.20a. Penjelasan Arus Kas Masuk) dan penerimaan dari adanya pengakuan Pendapatan dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp18.696.797.661,00.

Current year levies amounted to Rp8,058,599,405,247.00 consisted of receipts in the current year amounted to Rp8,039,902,607,586.00 (see Note 3.20a. Details of Cash Inflows) and receipts from Revenue recognition from Unearned Revenue amounted to Rp18,696,797,661.00.

VIII.3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.077.777.725.033,00 dan Rp7.514.363.129.765,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.1.1 Levy Fund and Unearned Revenue

Levy Fund and Unearned Revenue as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp8,077,777,725,033.00 and Rp7,514,363,129,765.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
1	**Kas yang Dibatasi Penggunaannya**	**1.489.568.725.033**	**1.220.063.129.765**	***Restricted Cash***
	a. Giro Bank Indonesia	1.002.954.826.287	809.977.071.750	*Bank Indonesia Checking Account*
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	484.994.780.860	407.637.544.609	*Bank Rakyat Indonesia Checking Account*
	c. Giro Bank Mandiri	1.619.117.886	2.448.285.549	*Bank Mandiri Checking Account*
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	-	227.857	*Bank Mandiri Checking Account (Operating Funds Management Account)*

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
2	**Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya**	**6.588.209.000.000**	**6.294.300.000.000**	***Restricted Securities***
	Bank Tabungan Negara	1.669.027.000.000	1.772.750.000.000	*Bank Tabungan Negara*
	Bank Mandiri	1.569.724.000.000	602.800.000.000	*Bank Mandiri*
	Bank Rakyat Indonesia	1.767.672.000.000	2.075.350.000.000	*Bank Rakyat Indonesia*
	Bank Negara Indonesia	1.581.786.000.000	1.843.400.000.000	*Bank Negara Indonesia*
	Jumlah Dana Pungutan dan PDD	**8.077.777.725.033**	**7.514.363.129.765**	***Total Levy Funds and Unearned Revenues***

VIII.3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp45.435.122.748,00 dan Rp0,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Setoran ke Kas Negara).

VIII.3.1.2 Funds for State Treasury Payment

Funds for State Treasury Payment in Restricted Cash as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp45,435,122,748.00 and Rp0.00, respectively (see Note 3.13 Debt to State Treasury).

VIII.3.1.3 Dana Pembayaran Perpajakan

Dana pembayaran perpajakan pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp70.721.384.881,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.1.3 Tax Payment Funds

Tax payment funds in Restricted Cash as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp70,721,384,881.00 and Rp0.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
PPh Pasal 29 Pegawai Tahun 2023	41.752.853.237	-	*Article 29 Income Tax for Employees for 2023*
Pelunasan PPh Pasal 29 Badan Tahun 2023	18.669.786.212	-	*Settlement of Corporate Income Tax Article 29 for 2023*
PPh Pasal 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2023	10.298.445.432	-	*Article 21 Income Tax for Employees for December 2023*
PPh Pasal 23 Masa Desember 2023	300.000	-	*Article 23 Income Tax for December 2023*
Jumlah	**70.721.384.881**	**-**	***Total***

(lihat Catatan 3.6 Perpajakan)
(see note 3.6 Taxation)

VIII.3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp43.278.518.663,00 dan Rp31.585.800.019,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.2 Receivables

Receivables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp43,278,518,663.00 and Rp31,585,800,019.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Piutang Pungutan	43.278.518.663	31.585.800.019	*Levy Receivables*
Piutang APBN	-	-	*State Budget Receivables*
Jumlah	**43.278.518.663**	**31.585.800.019**	***Total***

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Details of OJK Receivables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

VIII.3.2.1 Piutang Pungutan / *Levy Receivables*

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan *Receivables Before Write-Off*	Penghapusan Piutang *Written-Off Receivables*	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Sector*
1	**Biaya Tahunan**	**33.150.727.959**	**-**	**33.150.727.959**	**31.983.751.464**	***Annual Fee***
	a. Perbankan	1.229.080.942	-	1.229.080.942	812.393.134	*Banking*
	b. Pasar Modal	18.332.074.150	-	18.332.074.150	14.592.497.070	*Capital Market*
	c.Industri Keuangan Non Bank	13.589.572.867	-	13.589.572.867	16.578.861.260	*NBFI*
2	**Sanksi**	**62.648.143.473**	**-**	**62.648.143.473**	**24.351.456.562**	***Annual Fee***
	a. Perbankan	3.786.317.200	-	3.786.317.200	3.244.055.200	*Banking*
	b. Pasar Modal	53.036.358.944	-	53.036.358.944	18.403.266.944	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	5.825.467.329	-	5.825.467.329	2.704.134.418	*NBFI*
3	**Pengelolaan**	**12.303.450.052**	**-**	**12.303.450.052**	**7.452.884.927**	***Management***
	a. Bunga Deposito	11.676.485.434	-	11.676.485.434	6.802.139.138	*Time Deposit Interest*
	b. Denda Wanprestasi	364.460.213	-	364.460.213	364.471.213	*Penalty for Default*
	c. Pengembalian Beban	262.504.405	-	262.504.405	286.274.576	*Return of Overpaid Expenses*
4	**PUPN**	**38.324.898.598**	**11.126.652.513**	**27.198.246.085**	**21.116.896.443**	***State Accounts Receivable Committee (PUPN)***
	a. Biaya Tahunan	25.643.508.613	8.270.462.513	17.373.046.100	13.947.320.243	*Annual Fee*
	b. Sanksi Denda	12.681.389.985	2.856.190.000	9.825.199.985	7.169.576.200	*Fines*
Jumlah Piutang		**146.427.220.082**	**11.126.652.513**	**135.300.567.569**	**84.904.989.396**	***Total Receivables***
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				**(92.022.048.906)**	**(53.319.189.377)**	***Allowance for Uncollectible/Doubtful Accounts***
Jumlah Piutang Pungutan – Bersih				**43.278.518.663**	**31.585.800.019**	***Total Levy Receivables – Net***

(lihat Catatan 3.21 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)
Refer to Notes 3.21 Information and Events After Date of the Financial Statements

Pada tahun 2023, terdapat penghapusbukuan piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp11.126.652.513,00 (Lampiran II) melalui KRDK Nomor 126/KRDK/2023 tanggal 30 November 2023, hal ini sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK yang menetapkan bahwa Piutang PUPN yang telah mendapatkan dokumen penerimaan dari PUPN sesuai ketentuan yang berlaku diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

In 2023, a write-off on levy receivables was made for those categorized as bad debts and the collection had been submitted to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance amounted to Rp11,126,652,513.00 (Appendix II) through KRDK Number 126/KRDK/2023 dated November 30, 2023, this is according to SEDK Number 5 /SEDK.02/2020 concerning Accounting Policies of the Financial Services Authority as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022 concerning Amendments to SEDK Number 5/ SEDK.02/2020, concerning OJK Accounting Policies which stipulates that PUPN Receivables that have obtained acceptance documents from PUPN according to applicable regulations are proposed for write-off collectively by the Deputy Commissioner in charge of the finance function no later than December of the following year to:

i. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
ii. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

i. Members of the Board of Commission- ers in charge of the finance function for the amount up to Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiahs);
ii. Board of Commissioners Meeting for the amount exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiahs).

The aging of levy receivables before allowance of levy receivables is as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Belum jatuh tempo	31.302.593.677	25.156.645.700	*Not Yet Due*
Telah jatuh tempo			*Past due*
a. 1 - 60 Hari	10.576.246.509	9.615.388.515	*1 - 60 Days*
b. 61 Hari - 1 Tahun	50.223.007.894	25.618.427.563	*61 Days - 1 Year*
c. Lebih dari 1 Tahun	43.198.719.489	24.514.527.618	*More than 1 Year*
Jumlah	**135.300.567.569**	**84.904.989.396**	***Total***

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp43.198.719.489,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp27.198.246.085,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp16.000.473.404,00.

Total piutang yang telah dialihkan ke PUPN dengan nominal Rp27.198.246.085,00 terdiri dari 380 berkas. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, seluruh berkas pelimpahan belum diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Pada tahun 2023, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.400 Wajib Bayar yang belum registrasi tersebut dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp48.864.236.233,00 (Lampiran II).

The receivables up to 1 (one) year in the table above, amounted to Rp43,198,719,489.00, have been categorized as bad debts. Of this amount, Rp27,198,246,085.00 has been transferred to the State Receivables Committee (PUPN), Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance. Thus, the bad debts that have not been transferred amounted to Rp16,000,473,404.00.

380 files comprised the total receivables transferred to PUPN, with a nominal value of Rp27,198,246,085.00. As of the financial reporting date, no State Receipt for Receipt of Receivables (SP3N) has been issued for all transfered files.

In 2023, OJK had billing rights to Payers who had not registered in the SIPO application since 2014. These bills are categorized as unreliable payment rates, so they are not recorded as receivables on the balance sheet (off-balance sheet recording). Based on SEDK Number 5/ SEDK.02/2020 concerning Accounting Policies of the Otoritas Jasa Keuangan as amended by SEDK Number 5/SEDK.02/2022 concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policies, bills for 1,400 payers who have not registered are recorded in the Contingency Report with a value of Rp48,864,236,233.00 (Appendix II).

Total Laporan Piutang Kontinjensi sebesar Rp136.749.013.175,00 (Lampiran II) termasuk didalamnya merupakan piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 4.341 berkas dengan nominal Rp96.873.505.175,00 dan berkas telah diterima SP3N sebanyak 4.339 berkas.

The total Contigency Receivables Report is Rp136,749,013,175.00 (Appendix II) including receivables submitted for collection to the State Receivables Affairs Committee (PUPN) comprising 4,341 files with a nominal value of Rp96,873,505,175.00 and SP3N has received 4,339 files.

Rincian Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

The details of the Allowance for Collection Receivables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

31 Desember 2023 | *December 31, 2023*						
Keterangan	**Registrasi** *Registration*	**Biaya Tahunan** *Annual Fee*	**Sanksi** *Penalties*	**Pengelolaan** *Management*	**Jumlah** *Total*	*Description*
Belum Jatuh Tempo	-	3.060.362	109.712.475	66.343.859	179.116.696	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo						*Past due*
1 - 60 Hari	-	3.429.348.268	1.800.282.341	-	5.229.630.610	*1 - 60 Days*
61 Hari - 1 Tahun	-	11.887.669.419	31.526.912.693	-	43.414.582.111	*61 Days - 1 Year*
> 1 Tahun	-	29.314.294.756	13.884.424.733	-	43.198.719.489	*>1 Year*
Jumlah	**-**	**44.634.372.805**	**47.321.332.242**	**66.343.859**	**92.022.048.906**	***Total***

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

31 Desember 2022 | *December 31, 2022*						
Keterangan	**Registrasi** *Registration*	**Biaya Tahunan** *Annual Fee*	**Sanksi** *Penalties*	**Pengelolaan** *Management*	**Jumlah** *Total*	*Description*
Belum Jatuh Tempo	-	283.391.664	8.551.436.461	68.173.875	8.903.002.000	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo						*Past due*
1 - 60 Hari	-	4.067.065.496	841.287.264	-	4.908.352.760	*1 - 60 Days*
61 Hari - 1 Tahun	-	12.541.795.100	2.451.511.899	-	14.993.306.999	*61 Days - 1 Year*
> 1 Tahun	-	16.016.163.819	8.498.363.799	-	24.514.527.618	*>1 Year*
Jumlah	**-**	**32.908.416.079**	**20.342.599.423**	**68.173.875**	**53.319.189.377**	***Total***

VIII.3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN.

VIII.3.2.2 State Budget Receivables

State Budget receivables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amount to Rp0.00 each, represent receivables for salary overpayments sourced from State Budget funds.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	**31 Dec 2023**	**31 Dec 2022**	***Description***
Pengembalian Beban	-	119.223.400	*Expense Refund*
Jumlah Piutang	**-**	**119.223.400**	***Total Receivables***
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	**-**	**(119.223.400)**	***Receivables Allowance***
Jumlah Piutang APBN - Bersih	**-**	**-**	***State Budget Receivables - Net***

VIII.3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp8.629.320.752,00 dan Rp11.518.124.644,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 merupakan nilai Persediaan yang seluruhnya dibiayai dari Pungutan. Mutasi Persediaan adalah sebagai berikut.

VIII.3.3 Inventories

Inventories balances as of December 31, 2023, and December 31, 2022, office supplies amounted to Rp8,629,320,752.00 and Rp11,518,124,644.00, respectively. Inventories balances as of December 31, 2023, represent inventories value that had been entirely financed by levies. The inventories Movements are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Saldo Awal	**11.518.124.644**	**17.193.044.014**	***Beginning Balance***
Mutasi Tambah:			*Additions*
Pembelian Persediaan	15.581.380.210	11.744.539.018	*Inventory Purchases*
Mutasi Kurang:			*Deductions*
Beban Persediaan	15.740.200.180	17.419.458.388	*Inventory Expenses*
Penjualan Persediaan Tidak Digunakan	2.729.983.922	-	*Sale of Unused Inventory*
Saldo Akhir	**8.629.320.752**	**11.518.124.644**	***End Balance***

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

OJK's inventories locations are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Lokasi	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Location*
Kantor Pusat	3.285.172.073	6.923.742.021	*Head Office*
Kantor Regional	-	1.510.645.487	*Regional Office*
Kantor OJK	5.344.148.679	3.083.737.136	*OJK office*
Jumlah	**8.629.320.752**	**11.518.124.644**	***Total***

Berdasarkan PDK Nomor 8/PDK.02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, terdapat perubahan nomenklatur dalam penyebutan Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang dimaknai sebagai Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Kantor OJK). Ketentuan ini menjadi acuan dalam penyajian rincian persediaan.

Based on PDK Number 8/PDK.02/2023 dated 31 August 2023, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 1/PDK.02/2023 concerning the Organization of Financial Services Authority, there is a change in nomenclature in the mention of Regional Offices and Offices of Financial Services Authority which is interpreted as the Office of Financial Services Authority (OJK Office). This provision is a reference in the presentation of inventories details.

Sepanjang tahun 2023, selain pengeluaran persediaan untuk digunakan, terdapat penjualan persediaan non aktif perolehan pungutan berupa 575 unit toner dengan saldo sebesar Rp2.729.983.922,00, sebagaimana Keputusan Kepala Departemen Logistik Nomor KEP-77/MS.82/2023 tanggal 12 September 2023 dan Nomor KEP-126/MS.82/2023 tanggal 15 Desember 2023. Penjualan dilakukan dengan mekanisme lelang yang dilaksanakan pada 23 November 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagaimana risalah lelang nomor 699/25/2023 dengan jumlah harga barang sebesar Rp127.500.000,00.

Throughout 2023, in addition to the issuance of inventories for use, there were sales of inactive inventories acquired by levies in the form of 575 units of toner with a balance of Rp2,729,983,922.00, as per Decree of the Head of the Logistics Department Number KEP-77/MS.82/2023 dated September 12, 2023, and Number KEP-126/MS.82/2023 dated December 15, 2023. The sale was carried out with an auction mechanism carried out on November 23, 2023, at the Jakarta I State Wealth and Auction Services Office (KPKNL) as stated in the minutes of auction number 699/25/2023 with a total price of Rp127,500,000.00.

VIII.3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp10.583.376.514,00 dan Rp3.949.645.602,00. Uang muka tahun 2023 merupakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp10.583.376.514,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, belum terdapat pengajuan penyelesaian termin pembayaran.

VIII.3.4 Advance Payments

The balance of Advance Payments as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp10,583,376,514.00 and Rp3,949,645,602.00, respectively. Advance Payments in 2023 represented the Procurement of Construction Services for the Building Arrangement of the OJK Office Building in South Sulawesi and West Sulawesi Province, amounted to Rp10,583,376,514.00. As of December 31, 2023, there is no submission for settlement of term payments.

VIII.3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp103.397.431.716,00 dan Rp77.811.697.434,00 terdiri dari:

VIII.3.5 Prepaid Expenses

The balance of Prepaid Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp103,397,431,716.00 and Rp77,811,697,434.00, respectively, consisting of:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Sewa Kantor	8.306.400.549	8.481.568.114	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	1.004.026.513	836.445.850	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	92.816.740.562	67.726.205.347	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	1.270.264.092	767.478.123	*Insurance premiums*
Jumlah	**103.397.431.716**	**77.811.697.434**	***Total***

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

The movements of Prepaid Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Saldo Awal	**77.811.697.434**	**66.252.614.358**	***Beginning Balance***
Mutasi Tambah:			*Additions*
Pembayaran tahun berjalan	156.600.054.577	119.065.878.265	*Prepaid Expenses Payments*
Mutasi Kurang:			*Deductions*
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	131.014.320.295	107.506.795.189	*Total Utilized in period/expense*
Saldo Akhir	**103.397.431.716**	**77.811.697.434**	***End Balance***

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.397.431.716,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Prepaid Expenses as of December 31, 2023, amounted to Rp103,397,431,716.00, entirely financed from levy funds.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dikelompokkan sebagai berikut.

The details of Prepaid Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are categorized as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

31 Desember 2023 | *December 31, 2023*				
Keterangan	**Kantor Pusat | *Head Office***	**Kantor OJK | *Branch Offices***	**Jumlah | *Total***	***Description***
Sewa Kantor	8.306.400.549	-	8.306.400.549	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	-	1.004.026.513	1.004.026.513	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	92.816.740.562	-	92.816.740.562	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	209.843.606	1.060.420.486	1.270.264.092	*Insurance Premiums*
Jumlah	**101.332.984.717**	**2.064.446.999**	**103.397.431.716**	***Total***

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*				*Description*
	Kantor Pusat *Head Office*	Kantor Regional *Regional Offices*	Kantor OJK *Branch Offices*	Jumlah *Total*	
Sewa Kantor	8.231.568.114	-	250.000.000	8.481.568.114	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	-	232.000.001	604.445.849	836.445.850	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	67.726.205.347	-	-	67.726.205.347	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	-	397.752.135	369.725.988	767.478.123	*Insurance Premiums*
Jumlah	**75.957.773.461**	**629.752.136**	**1.224.171.837**	**77.811.697.434**	***Total***

Penyajian rincian Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 mengacu pada PDK Nomor 8/PDK.02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terkait perubahan nomenklatur dalam penyebutan Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang dimaknai sebagai Kantor OJK.

The presentation of detailed Prepaid Expenses in 2023 refers to PDK Number 8/PDK.02/2023 dated August 31, 2023, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 1/PDK.02/2023 concerning the Organization of the Financial Services Authority, which is related to changes in nomenclature in the mention of Regional Offices and Offices of the Financial Services Authority which are interpreted as OJK Offices.

VIII.3.6 Perpajakan

VIII.3.6.1 Beban (Pendapatan) Pajak Penghasilan

Berdasarkan SEDK Nomor 5 /SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

VIII.3.6 Taxation

VIII.3.6.1 Income Tax Expense (Income)

Based on SEDK Number 5 /SEDK.02/2020 concerning Accounting Policies of the Financial Services Authority as amended by SEDK OJK Number 5/SEDK.02/2022 concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning Accounting Policies of OJK, current tax expense and deferred tax expense are presented in Income Tax Expenses in the Statement of Operational. Details of Income Tax Expenses are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Beban Pajak Kini	264.757.775.040	226.940.248.700	*Current Tax*
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan	(98.400.480.367)	59.240.703.519	*Deferred Expense (Income)*
Jumlah	**166.357.294.673**	**286.180.952.219**	***Total***

VIII.3.6.2 Rekonsiliasi

OJK melakukan rekonsiliasi fiskal atas kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional sebelum pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

VIII.3.6.2 Reconciliation

OJK performs fiscal reconciliation of the increase (decrease) in net assets without operational restrictions before income tax in accordance with applicable tax provisions.

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional sebelum pajak penghasilan	**832.914.466.565**	**1.174.518.166.008**	***Increase (decrease) in net assets of unrestricted operational fiscal before tax income***
Koreksi Fiskal Positif	8.649.193.272.181	7.496.798.713.319	*Positive Fiscal Adjustment*
Koreksi Fiskal Negatif	(8.278.663.306.342)	(7.639.770.294.085)	*Negative Fiscal Adjustment*
Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal	1.203.444.432.404	1.031.546.585.242	*Increase (decrease) in net assets of unrestricted operational fiscal operations*
Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal - pembulatan	**1.203.444.432.000**	**1.031.546.585.000**	***Increase (decrease) in net assets of unrestricted operational fiscal operations - rounding***
Jumlah Pajak Terutang (Tarif 22%)	264.757.775.040	226.940.248.700	*Total Tax Payable (22% Rate)*
Kredit Pajak	(246.087.988.828)	(148.884.361.750)	*Prepayment of Tax*
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	**18.669.786.212**	**78.055.886.950**	***Income tax payable (over)***

Pajak penghasilan badan atas kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp264.757.775.040,00. Adapun kredit pajak tercatat sebesar Rp246.087.988.828,00 yang merupakan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2023, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp18.669.786.212,00.

Corporate income tax on the increase (decrease) in net assets without fiscal operational restrictions as of December 31, 2023, amounted to Rp264,757,775,040.00. The tax credit was Rp246,087,988,828.00, comprising installments of Income Tax Article 25 paid in 2023, therefore, the income tax payable was Rp18,669,786,212.00.

VIII.3.6.3 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp70.721.384.881,00 dan Rp110.001.949.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.6.3 Tax Payables

Taxes Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp70,721,384,881.00 and Rp110,001,949,663.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah)

(In Rupiah)

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
PPh Pasal 21/29 Pegawai	52.051.298.669	29.744.312.713	*Employee Income Tax Article 21/29*
PPh Pasal 23	300.000	-	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 29 Badan	18.669.786.212	78.055.886.950	*Corporate Income Tax Article 29*
Pajak Lainnya	-	2.201.750.000	*Other Taxes*
Jumlah	**70.721.384.881**	**110.001.949.663**	***Total***

a. Saldo Utang PPh Pasal 21/29 Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp52.051.298.669,00 dan Rp29.744.312.713,00. Utang per 31 Desember 2023 terdiri dari utang PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2023 sebesar Rp10.298.445.432,00 dan PPh Pasal 29 Pegawai sebesar Rp41.752.853.237,00 yang timbul akibat penggabungan penghasilan atau remunerasi lainnya yang diterima Pegawai dari OJK dengan pemberian Imbalan Kerja Jangka Panjang dan/atau TPHT.
b. Saldo Utang PPh Pasal 23 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp300.000,00 dan Rp0,00.

a. The balances of ITA 21/29 Payable to Employees as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp52,051,298,669.00 and Rp29,744,312,713.00, respectively. Payable as of December 31, 2023, consists of Income Tax Article 21 payables for December 2023, amounted to Rp10,298,445,432.00, and Income Tax Article 29 Employees, amounted to Rp41,752,853,237.00 arising from the incorporation of income or other remuneration received by employees from OJK with the provision of Long-Term Employee Benefits and/or TPHT.
b. Income Tax Article 23 Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp300,000.00 and Rp0.00, respectively.

c. Saldo Utang PPh Pasal 29 Badan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.669.786.212,00 dan Rp78.055.886.950,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment.*

Adapun rincian Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

c. Corporate Income Tax Article 29 Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp18,669,786,212.00 and Rp78,055,886,950.00, respectively, represented Corporate Income Tax Payable as stipulated in Law Number 36 of 2008, on Income Tax which is prepared on a self-assessment basis.

The details of Income Tax Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Saldo Awal Utang PPh 29 Badan	78.055.886.950	78.052.970.452	*Beginning of Income Tax Article 29*
Utang PPh Badan tahun Berjalan	264.757.775.040	226.940.248.700	*Current Income Tax*
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(324.143.875.778)	(226.937.332.202)	*Prepayment of Income Tax Article 25 and payment of Income Tax Article 29*
Jumlah	**18.669.786.212**	**78.055.886.950**	***Total***

Adapun rincian angsuran PPh 25 Badan dan pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The details of the installments of Corporate Income Tax Article 25 and Corporate Income Tax Article 29 paid by OJK during 2023 are as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Uraian	Tanggal Pembayaran *Payment Date*	Pembayaran *Payment*	Total Pembayaran *Total Payment*	*Description*
Pembayaran PPh 29 Badan Tahun 2022	18/04/2023	78.055.886.950	78.055.886.950	*Corporate Income Tax Article 29 Payment for 2022*
Angsuran PPh 25 Badan Tahun 2023	13/02/2023	22.371.635.348	246.087.988.828	*Prepayment of Income Tax Article 25 of 2023*
	07/03/2023	22.371.635.348		
	11/04/2023	22.371.635.348		
	10/05/2023	22.371.635.348		
	08/06/2023	22.371.635.348		
	11/07/2023	22.371.635.348		
	09/08/2023	22.371.635.348		
	07/09/2023	22.371.635.348		
	09/10/2023	22.371.635.348		
	08/11/2023	22.371.635.348		
	06/12/2023	22.371.635.348		
Jumlah			**324.143.875.778**	***Total***

d. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.201.750.000,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan Kantor OJK Provinsi Jawa Timur. Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah UU PPSK, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Berdasarkan surat Pemerintah Kota Surabaya nomor 900.1.13.1/436.8.3/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditegaskan bahwa perolehan rumah jabatan OJK termasuk objek pajak BPHTB. Menindaklanjuti surat Pemerintah Kota Surabaya dimaksud, OJK telah melakukan pembayaran utang BPHTB sebesar Rp2.091.662.500,00 karena mendapat insentif BPHTB sebesar Rp110.087.500,00 atau sebesar 5%.

d. Other Taxes Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp0.00 and Rp2,201,750,000.00, respectively, represented Fees on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) for the purchase of Land and Building of OJK Office for East Java Province. Recognition of BPHTB debt was based on Regional Regulations governing the Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) in each region. As a state institution that carries out government duties as mandated by the PPSK Act, OJK has made efforts to exempt the imposition of BPHTB debt on Land and Buildings purchase. Based on the Surabaya City Government letter number 900.1.13.1/436.8.3/2023 dated March 13, 2023, it was confirmed that the acquisition of the OJK official residence was included in the BPHTB tax object. Following the Surabaya City Government's letter, OJK has paid BPHTB obligation amounted to Rp2,091,662,500.00 after a deduction of BPHTB incentives by Rp110,087,500.00 or 5%.

VIII.3.6.4 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp550.437.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.6.4 Prepaid Taxes

Prepaid Taxes as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp0.00 and Rp550,437,500.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah)

(In Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	*Description*
PPh Pasal 25/29	-	550.437.500	*Income Tax Article 25/29*
Jumlah	-	550.437.500	*Total*

Sesuai SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan merupakan uang muka tahun 2019 yang disesuaikan dengan penetapan penghapusan dan/atau pembayaran BPHTB serta pembebanan uang muka pajak, dengan rincian sebagai berikut.

According to SEDK Number 5 /SEDK.02/2020, concerning Accounting Policies of the Financial Services Authority as amended by OJK SEDK Number 5/SEDK.02/2022 concerning Amendments to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policies, Prepaid Taxes are recognized when the Work Unit conducts self-assessment of the related tax payment/overpayment.

Prepaid Tax on Corporate Income Tax represented advance payments in 2019, adjusted to determine the waiver and/or payment of BPHTB and the imposition of tax advance payments, with details as follows.

(dalam rupiah)

(In Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	*Description*
Saldo Awal	550.437.500	629.062.500	*Beginning Balance*
Penyelesaian BPHTB	(550.437.500)	(78.625.000)	*Settlement of BPHTB*
Saldo Akhir	**-**	**550.437.500**	***End Balance***

(lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak)
see Note 3.6.3 Tax Payable

VIII.3.6.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp721.749.843.382,00 dan Rp623.349.363.015,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

VIII.3.6.5 Other Assets

Other Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp721,749,843,382.00 and Rp623,349,363,015.00, respectively, were Deferred Tax Assets.

The Deferred Tax Asset movement as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	*Description*
Saldo Awal	**623.349.363.015**	**682.590.066.534**	**Beginning Balance**
Mutasi:			*Movements:*
Penambahan tahun berjalan	305.817.094.865	92.739.458.841	*Current year additions*
Pemulihan	(207.416.614.497)	(151.980.162.360)	*Recovery*
Saldo Akhir	**721.749.843.382**	**623.349.363.015**	***End Balance***

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 22%.

Deferred tax assets arising from temporary differences in post-employment benefits and other long-term employee benefits liabilities that have been accounted for yet to be recognized with tax regulations. The deferred tax value has been calculated using the prevailing tax rate of 22%.

VIII.3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.594.889.321.373,00 dan Rp2.381.108.223.803,00, dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.7 Fixed Assets

Book *Value of Fixed Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp2,594,889,321,373.00 and Rp2,381,108,223,803.00, respectively, with details as follows.*

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	*Acquisition Cost*
Tanah	1.334.787.888.714	2.503.160	-	-	1.334.790.391.874	*Land*
Gedung dan Bangunan	677.130.749.632	8.666.042.611	-	24.960.575.545	710.757.367.788	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	1.216.569.982.242	400.221.022.647	(77.652.779.043)	(139.306.915)	1.538.998.918.931	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain	106.099.847.011	24.594.102.049	(9.035.735.141)	139.306.915	121.797.520.834	*Other Fixed Assets*
Jumlah	**3.334.588.467.599**	**433.483.670.467**	**(86.688.514.184)**	**24.960.575.545**	**3.706.344.199.427**	***Total***
Akumulasi Penyusutan	**31 Desember 2022** *December 31, 2022*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2023** *December 31, 2023*	***Accumulated depreciation***
Tanah	-	-	-	-	-	*Land*
Gedung dan Bangunan	(44.628.129.354)	(35.387.782.125)	-	-	(80.015.911.479)	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	(816.228.952.558)	(26.890.341.115)	(38.499.245.169)	(53.796.346.186)	(935.414.885.028)	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain	(92.623.161.884)	(10.428.677.866)	8.037.857.795	(1.010.099.592)	(96.024.081.547)	*Other Fixed Assets*
Total Penyusutan	**(953.480.243.796)**	**(72.706.801.106)**	**(30.461.387.374)**	**(54.806.445.778)**	**(1.111.454.878.054)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**2.381.108.223.803**	**360.776.869.361**	**(117.149.901.558)**	**(29.845.870.233)**	**2.594.889.321.373**	***Total Fixed Assets***

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Acquisition Cost*
Tanah	1.332.799.073.434	1.988.815.280	-	-	1.334.787.888.714	*Land*
Gedung dan Bangunan	339.809.971.439	157.172.717.203	-	180.148.060.990	677.130.749.632	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	994.908.122.951	223.213.983.397	(1.661.268.030)	109.143.924	1.216.569.982.242	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain	119.917.622.143	6.252.221.656	(20.041.511.782)	(28.485.006)	106.099.847.011	*Other Fixed Assets*
Jumlah	**2.787.434.789.967**	**388.627.737.536**	**(21.702.779.812)**	**180.228.719.908**	**3.334.588.467.599**	***Total***
Akumulasi Penyusutan	**31 Desember 2021** *December 31, 2021*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2022** *December 31, 2022*	***Accumulated depreciation***
Tanah	-	-	-	-	-	*Land*
Gedung dan Bangunan	(23.743.124.606)	(20.882.197.260)	-	(2.807.488)	(44.628.129.354)	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	(702.367.278.294)	(115.115.980.425)	1.265.741.176	(11.435.015)	(816.228.952.558)	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain	(74.784.472.973)	(20.506.315.856)	2.653.384.442	14.242.503	(92.623.161.884)	*Other Fixed Assets*
Total Penyusutan	**(800.894.875.873)**	**(156.504.493.541)**	**3.919.125.618**	**-**	**(953.480.243.796)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**1.986.539.914.094**	**232.123.243.995**	**(17.783.654.194)**	**180.228.719.908**	**2.381.108.223.803**	***Total Fixed Assets***

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.594.889.321.373,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp117.479.832,00; dan

b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2023 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp2.594.771.841.541,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang senilai Rp186.700.511,00 per 31 Desember 2023 yang merupakan Barang perolehan Pungutan sebesar Rp22.533.080,00 dan Rp164.167.431,00 barang perolehan APBN sebagaimana pada Lampiran III dan tercatat pada laporan keuangan karena OJK masih melakukan proses penghapusan barang hilang dimaksud, sebagai berikut.

a. Untuk Barang Milik OJK saat ini telah diterbitkan Laporan Verifikasi atas hilangnya Barang Milik OJK yaitu Laporan Verifikasi Nomor LAP-12/MS.212/2022 dan LAP-3/MS.712/2022 yang selanjutnya akan dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan.
b. Sementara untuk Barang Milik Negara yang hilang yaitu:
   1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas BMN yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Book Value of Fixed Assets as of December 31, 2023, was Rp2,594,889,321,373.00, consisted of:

a. The book value of the acquisition of Fixed Assets for Fiscal Years 2013 and 2014 financed by State Budget amounted to Rp117,479,832.00, and
b. The book value of the acquisition of Fixed Assets financed by levies for Fiscal Years 2015 through 2023 amounted to Rp2,594,771,841,541.00.

As of December 31, 2023, Fixed Asset loss amounted to Rp186,700,511.00, comprising levy acquisition goods amounted to Rp22,533,080.00 and Rp164,167,431.00 of State Budget acquisition goods, as presented in Appendix III and recorded in the financial statements pending the write-off process by OJK for the loss of the goods, as follows.

a. For OJK's Property, a Verification Report has been issued through Verification Report Number LAP-12/MS.212/2022 and LAP-3/MS.712/2022, which will be issued a Write-off Decree.

b. As State's Property loss, namely:
   1) The Directorate General of Budget (DJA), through DJA Letter Number S-4/AG/2020 dated January 6, 2020, stated that the process for BMN loss is preceded by a Compensation Claim (TGR).

2) OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
3) OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
4) DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
5) Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK dan disepakati akan diterbitkan pengaturan mengenai penanganan BMN hilang.
6) OJK telah menerbitkan PDK OJK Nomor 4/PDK.02/2022 tentang Penanganan Barang Milik Negara Yang Hilang di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2022 dan saat ini tindak lanjut penghapusan barang hilang dalam proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian oleh TPKN OJK.

2) OJK, as the Authorized User of Goods, has submitted OJK Letter Number S-65/MS.33/2020 dated February 3, 2020, requesting the formation of a State Loss Settlement Team (TPKN).
3) OJK, as the Authorized User of Goods, submitted OJK Letter Number S-61/MS.32/2020 dated April 8, 2020, regarding the second application for the formation of TPKN in the context of BMN Loss Write-off.
4) DJA through DJA Letter Number S-2/AG/2020 dated March 18, 2020, received by OJK in May 2020, stated that the settlement of BMN Loss refers to Presidential Regulation Number 38 of 2016, and TPKN is formed by the Head of the Work Unit or superior of the Head of the Work Unit.
5) On September 4, 2020, OJK discussed the formation of TPKN within OJK, and it was discussed the formation of TPKN within OJK and agreed to issue the arrangements for handling BMN loss.
6) OJK issued OJK PDK Number 4/PDK.02/2022 concerning the Handling of Lost State Property in the Financial Services Authority, dated December 29, 2022. the write-off for goods loss is being resolved for compensation claims by OJK TPKN.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap.

More details of the Fixed Assets account are as follows.

a. Tanah
   1. Penambahan nilai tanah selama Tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.503.160,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Land
   1. Additional land value during 2023 was Rp2,503,160.00 with details as follows

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a)	Biaya Pengurusan Sertifikasi SHP Tanah OJK di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	1.742.760	*Certification Management Fees for OJK Land SHP at the Southeast Sulawesi OJK Office*
b)	Biaya Pengurusan Sertifikasi SHP Tanah OJK di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	760.400	*Certification Management Fees for OJK Land SHP at the West Java OJK Office*
Jumlah		**2.503.160**	***Total***

2. Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2023 yaitu:

   a) Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK, tercatat di 19 Kantor OJK yaitu Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor OJK Solo, Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor OJK Malang, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jambi, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Provinsi Maluku, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor OJK Provinsi Riau, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Land ownership rights status as of December 31, 2023, namely:
   a) OJK's Certificate of Right for 19 OJK Offices, namely OJK Office for Yogyakarta Special Region (DIY), OJK Office for Solo, OJK Office for West Nusa Tenggara Province, OJK Office for Malang, OJK Office for Central Java Province, OJK Office for East Java Province, OJK Office for Jambi Province, OJK Office for South Sumatra and Bangka Belitung Province, OJK Office for Lampung Province, OJK Office for South Sulawesi and West Sulawesi Province, OJK Office for North Sumatra Province, OJK Office for Purwokerto, OJK Office for Tasikmalaya, OJK Office for Maluku Province, OJK Office for South Kalimantan Province, OJK Office for Riau Province, OJK Office for West Java Province, OJK Office for East Nusa Tenggara Province and OJK Office for Southeast Sulawesi Province.

b) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK, tercatat di Kantor OJK Provinsi Papua.
c) Sertifikat Hak Guna Bangunan, tercatat di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur (Rumah Jabatan).

3. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas tanah peruntukkan rumah jabatan di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.091.662.500,00 pada tanggal 14 September 2023 (lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak).
4. Pada tahun 2022, OJK menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kota Kupang. Tanah tersebut memiliki luas 2.600 m^2 yang berlokasi di Jl Raya El Tari RT.016/RW.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.950.000.000,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen pendukung berupa:
   a) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 349/KEP/HK/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Josef Adreanus Nae Soi (Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur).
   b) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/727.a/BPAD/2022 dan PRJ-4/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022.
   c) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BA-3/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022 berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/728.a/BPAD/2022.
   d) OJK telah menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 503 dengan Surat Ukur Nomor 13 Tahun 1988 pada tanggal 29 September 2023.

5. Pada tahun 2021, OJK juga telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan di Kantor OJK Provinsi Papua sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemprov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, Kantor OJK Provinsi Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya dan telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov Papua dengan OJK

b) OJK's Building Rights Title Certificate for OJK Office for Papua Province.
c) OJK's Building Rights Title Certificate for OJK Office for East Java Province (official residence).

3. The tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on land designated for official residence in the OJK Office for East Java Province, Rp2,091,662,500.00, was paid on September 14, 2023 (see Note 3.6.3 Tax Payable).

4. In 2022, OJK received land in Kupang, a grant from the Government of East Nusa Tenggara Province. The 2,600 m^2 land is on Jl Raya El Tari RT.016/RW.005, Oebobo Village, Oebobo District, Kupang land with an acquisition value of Rp1,950,000,000.00 was handed over by the Government of East Nusa Tenggara Province with supporting documents as follows:

a) Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number 349/KEP/HK/2022 dated November 2, 2022, concerning the Grant of 1 (One) Plot of East Nusa Tenggara Province's land in the form of to Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, signed by Josef Adreanus Nae Soi (Deputy Governor of East Nusa Tenggara).
b) Grant certificate of acceptance between the Government of East Nusa Tenggara Province and OJK concerning Grants of Property of the Government of East Nusa Tenggara Province in the form of 1 (one) Plot of Land Number BU.030/727.a/BPAD/2022 and PRJ-4/MS.8/2022 dated November 11, 2022.
c) Minutes of Handover of East Nusa Tenggara Provincial Government Property Grant Number BA-3/MS.8/2022 dated November 11, 2022, in the form of 1 (one) Lot of land Number BU.030/728.a/BPAD/2022.
d) OJK received a Certificate of Right to Use Number 503 with Measurement Letter Number 13 of 1988, on September 29, 2023.

5. In 2021, OJK also received a grant in the form of land and buildings for the OJK Office for the Papua Province, as stated in the grant document number PRJ-2/KO.0605/2021 concerning Grants of Papua Provincial Government Property in the Form of Land and Buildings to OJK. On December 14, 2021, OJK Office for Papua Province received a Certificate of Right to Use Land and Building Number 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) on behalf of the Irian Jaya Provincial Government class I and the signing of the Handover Minutes between the Papua Provincial Government and OJK.

OJK sampai dengan saat ini belum dapat mencatatkan hibah berupa tanah dan bangunan Kantor OJK Provinsi Papua dimaksud sesuai PDK 10/2023 tentang BMOJK dan BMPL karena belum terdapat kelengkapan bukti-bukti kepemilikan yang lengkap dari Pemprov Papua kepada OJK. Kantor OJK Provinsi Papua membutuhkan persetujuan DPRP untuk memberikan persetujuan hibah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 331 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan.

b. Gedung dan Bangunan
   1. Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp8.666.042.611,00 dengan rincian sebagai berikut.
      a) Penyelesaian atas uang muka pekerjaan Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp3.524.005.762,00;
      b) Penyelesaian atas pembayaran konstruksi perbaikan struktur Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.566.413.202,00;
      c) Penyelesaian atas pembayaran konsultan perancang dan konsultan *Quantity Surveyor* pekerjaan penataan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp2.197.613.895,00;
      d) Penyelesaian atas pembayaran Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp145.193.630,00;
      e) Penyelesaian atas pembayaran Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp144.795.812,00;
      f) Penyelesaian atas pembayaran Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku sebesar Rp88.020.310,00.

   2. Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.960.575.545,00, dengan rincian sebagai berikut.
      a) Penyelesaian atas pekerjaan penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp17.698.113.722,00;
      b) Penyelesaian atas Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2.819.985.072,00;
      c) Penyelesaian atas Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp2.729.983.347,00; dan
      d) Penyelesaian atas Manajemen Konstruksi pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.712.493.404,00.

Until now, OJK has not been able to record grants in the form of land and buildings of the OJK Office for Papua Province by PDK 10/2023 concerning BMOJK and BMPL because there is no complete proof of ownership from the Papua Provincial Government to OJK. The Papua Province OJK Office requires DPRP approval to approve the grant as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, Article 331 paragraph (1) letter a explains that the alienation of regional property is carried out after obtaining DPRD approval for land and/or buildings.

b. Buildings and Structures
   1. Additional assets in the form of buildings and structures in 2023 were Rp8,666,042,611.00, with details as follows.
      a) Settlement of advance payment for OJK Office for Riau Province amounted to Rp3,524,005,762.00;
      b) Settlement of construction payment for building structural repair in OJK Office for Central Java Province amounted to Rp2,566,413,202.00;
      c) Settlement of payments for design consultants and Quantity Surveyor consultants for the arrangement of OJK Offices for South Sulawesi and West Sulawesi amounted to Rp2,197,613,895.00;
      d) Settlement of payment to Construction Management for building construction of OJK Office for South Sumatra and Bangka Belitung Province amounted to Rp145,193,630.00;
      e) Settlement of the payment to Construction Management for the construction of the OJK Office Building for East Java Province amounted to Rp144,795,812.00;
      f) Settlement of the payment to Construction Management for the OJK Office Building for Maluku Province amounted to Rp88,020,310.00.

   2. There was a reclassification from Asset Under Construction to Building and Construction amounted to Rp24,960,575,545.00, with details as follows.
      a) Completion of work on the arrangement of the OJK Office Building for Riau Province amounted to Rp17,698,113,722.00;
      b) Completion of Construction Management for the construction of the OJK Office for East Java Province Building amounted to Rp2,819,985,072.00;
      c) Completion of Construction Management for building construction of OJK Office for South Sumatra and Bangka Belitung Province amounted to Rp2,729,983,347.00; and
      d) Completion of Construction Management for building construction of the OJK Office for Maluku Province amounted to Rp1,712,493,404.00

c. Peralatan dan Mesin

1. Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK selama Tahun 2023 tercatat sebesar Rp400.221.022.647.00, yang berasal dari pembiayaan dana pungutan dan perolehan hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada OJK, dengan rincian sebagai berikut.

   Perolehan peralatan dan mesin dari pembiayaan dana pungutan yaitu:

c. Equipment and Machinery

1. Additional OJK's equipment and machinery value during the Year 2023 was Rp400,221,022,647.00, financed by levy funds and grants from the Ministry of Finance (MoF) to OJK, with details as follows.

Acquisition of equipment and machinery from levy fund financing, consist of:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a)	Pengadaan Mesin Pengolah Data	225.910.228.794	*Data Processing Machines Procurement*
b)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	80.796.921.500	*Four-wheeled Motor Vehicles Procurement*
c)	Pengadaan Mesin Pendingin	16.169.028.001	*Cooling Machines Procurement*
d)	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	9.512.533.769	*Household Equipment Procurement*
e)	Pengadaan Peralatan Studio	4.037.652.918	*Studio Equipment Procurement*
f)	Pengadaan Peralatan Kantor	3.366.446.204	*Office Equipment Procurement*
g)	Pengadaan Peralatan Komunikasi	1.090.251.234	*Communication Equipment Procurement*
h)	Pengadaan Peralatan Lainnya	326.583.000	*Other Equipment Procurement*
i)	Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga	98.300.000	*Power Generating Machines Procurement*
j)	Pengadaan Peralatan Keamanan	97.634.134	*Security Equipment Procurement*
k)	Pengadaan Mesin Lainnya	47.139.900	*Other Machinery Procurement*
l)	Pengadaan Mesin Kantor	2.818.000	*Office Equipment Procurement*
Jumlah		**341.455.537.454**	***Total***

Sementara untuk perolehan hibah peralatan dan mesin dari Kemenkeu kepada OJK yaitu:

Meanwhile, the acquisition of equipment and machinery grants from the Ministry of Finance to OJK consisted of:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a)	Mesin Pengolah Data	45.444.464.228	*Data Processing Machines*
b)	Peralatan Komunikasi	12.157.993.090	*Communication Equipmen*
c)	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.006.416.000	*Two-wheeled Motor Vehicles*
d)	Peralatan Studio	151.800.000	*Studio Equipment*
e)	Peralatan Keamanan	3.436.875	*Security Equipment*
f)	Peralatan kantor	1.375.000	*Office Equipment*
Jumlah		**58.765.485.193**	***Total***

Penambahan yang berasal dari hibah BMN tercatat sebesar Rp58.765.485.193,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.759.069.193,00 dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.006.416.000,00.

2. Pengurangan nilai peralatan dan mesin Barang Milik OJK pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp5.228.635.508,00, sebagai berikut.
   a) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp2.805.390.873,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemindahtanganan aset melalui mekanisme hibah dan pemusnahan aset rusak berat di Kantor OJK Provinsi Bali.
   b) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.485.737.660,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemindahtanganan aset melalui mekanisme hibah dan pemusnahan aset rusak berat di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
   c) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp718.317.479,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemindahtanganan aset melalui mekanisme hibah dan pemusnahan aset rusak berat di Kantor OJK Provinsi Riau.
   d) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp126.246.030,00 sebagai tindak lanjut hibah BMOJK kepada mantan Anggota Dewan Komisioner OJK.
   e) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp62.258.016,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemusnahan aset dengan kondisi rusak berat di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah.
   f) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp30.685.450,00 yang disebabkan hilangnya 2 barang milik OJK berupa Notebook di lingkungan Kantor Pusat.

3. Pengurangan atas nilai peralatan dan mesin yang berasal dari BMN hibah kepada OJK sebesar Rp72.424.143.535,00, dengan rincian sebagai berikut.
   a) Penghapusan nilai peralatan dan mesin intrakomptabel sebesar Rp57.757.538.192,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemindahtanganan aset melalui mekanisme hibah BMN menjadi BMOJK.
   b) Pengalihan status 34 unit kendaraan bermesin roda 4 dari OJK kepada Sekretariat Jenderal, Kemenkeu sebesar Rp13.660.189.343,00, sebagaimana Surat Kepala KPKNL Jakarta II Nomor S-147/MK.6/KNL.0702/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-01/MS.82/KPB/2023 tanggal 3 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN, DJA Kementerian Keuangan.
   c) Penghapusan nilai 45 unit kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp1.006.416.000,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemindahtanganan aset melalui mekanisme hibah menjadi BMOJK.

The additions received from BMN grants were Rp58,765,485,193.00, consisting of Equipment and Machinery amounted to Rp57,759,069,193.00 and Motor Vehicles amounted to Rp1,006,416,000.00.

2. Deduction in the value of equipment and machinery of OJK Property in 2023 was Rp5,228,635,508.00 as follows.
   a) Equipment and machinery amounted to Rp2,805,390,873.00 were write-off following the transfer of assets through the grant mechanism and the destruction of severely damaged assets at the OJK Office for Bali Province.
   b) Equipment and machinery amounted to Rp1,485,737,660.00 were write-off following the transfer of assets through a grant mechanism and the destruction of severely damaged assets at the OJK Office for South Sumatra and Bangka Belitung Province.
   c) Equipment and machinery amounted to Rp718,317,479.00 were written off following the transfer of assets through a grant mechanism and the destruction of severely damaged assets at the OJK Office for Riau Provincial.
   d) Equipment and machinery amounted to Rp126,246,030.00 were write-off following a BMOJK grant to former members of the OJK Board of Commissioners.
   e) Equipment and machinery were write-off for Rp62,258,016.00 following the destruction of assets with severely damaged conditions at the OJK Office for Central Java Provincial.
   f) Equipment and machinery amounted to Rp30,685,450.00 were written off due to the loss of 2 OJK's Notebooks at the Head Office.

3. The deduction in the value of equipment and machinery originating from BMN grants to OJK amounted to Rp72,424,143,535.00, with details as follows.
   a) The "intracomptable" equipment and machinery amounted to Rp57,757,538,192.00 was written off following the transfer of assets through the BMN grant mechanism to BMOJK.
   b) Transfer of status of 34 units of 4-wheeled vehicles from OJK to the Secretariat General, Ministry of Finance amounted to Rp13,660,189,343.00, as stated in the Letter of the Head of KPKNL Jakarta II Number S-147/MK.6/KNL.0702/2023 dated February 2, 2023, and Minutes of Handover Number BAST-01/MS.82/KPB/2023 dated February 3, 2023, signed by the Head of the Logistics Department as the Goods User Authority and the Budget Director for Political, Legal, Defense and Security Affairs and BA BUN, DJA Ministry of Finance.
   c) 45 units of 2-wheeled motorized vehicles, amounted to Rp1,006,416,000.00, were write-off following the transfer of assets through a grant mechanism to BMOJK.

4. Reklasifikasi selama tahun 2023 tercatat negatif sebesar Rp139.306.915,00 yang terdiri dari:

   a) Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Lain sebesar Rp1.060.447.860,00 merupakan koreksi yang dilakukan atas kesalahan penentuan kelompok aset tetap.
   b) Reklasifikasi Masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp921.140.945,00 merupakan koreksi yang dilakukan atas kesalahan penentuan kelompok aset tetap.

5. Reklasifikasi depresiasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.935.653.101,00 merupakan penyesuaian pada aset neto atas 5.696 BMOJK perolehan hibah BMN.

d. Aset Tetap Lain
   1. Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama Tahun 2023 tercatat sebesar Rp24.594.102.049,00, yang berasal dari pembiayaan dana pungutan dan perolehan hibah dari Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut.

4. Reclassification during 2023 was recorded as negative, amounted to Rp139,306,915.00, which consisted of the following:
   a) Reclassification out to Other Fixed Assets amounted to Rp1,060,447,860.00 corrected an error in determining the group of fixed assets.
   b) The Reclassification into Equipment and Machinery amounted to Rp921,140,945.00 corrected an error in determining the Fixed Assets group.

5. The reclassification of depreciation of Equipment and Machinery amounted to Rp53,935,653,101.00 adjusted the net assets of 5,696 BMOJK-acquired BMN grants.

d. Other Fixed Assets
   1. The addition of OJK's Other Fixed Assets during the year was Rp24,594,102,049.00, which came from the financing of levy funds and the acquisition of grants from the Ministry of Finance, with the following details.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a)	Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	9.879.200.717	*Office Building Renovation for OJK Central Sulawesi Province*
b)	Penataan Ruang Kerja Gedung Sumitro Djojohadikusumo	9.135.901.744	*Office Space Renovation of Sumitro Djojohadikusumo Building*
c)	Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur	3.412.324.164	*Office Building Renovation for OJK East Kalimantan Province*
d)	Buku, Lukisan, Monografi dan Ukiran/Lukisan Lainnya	997.877.346	*Books, Paintings, Monographs, and Other Sculptures/Paintings*
e)	Penataan Ruang Kerja Gedung Kantor Wisma Mulia 2	889.510.578	*Office Space Renovation of Wisma Mulia 2 Building*
f)	Pengadaan Kanopi di Kantor OJK Provinsi Aceh	49.950.000	*Canopy Procurement at the OJK Aceh Office*
g)	Renovasi Ruang Arsip di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	49.900.000	*Archive Room Renovation at the OJK Central Kalimantan Office*
h)	Pengadaan Kanopi Gedung Kantor OJK Provinsi Lampung	48.562.500	*Canopy Procurement for the OJK Lampung Office Building*
i)	Pengadaan Kanopi Besi di Gedung Kantor OJK Cirebon	40.200.000	*Iron Canopy Procurement at the OJK Cirebon Office Building*
j)	Penataan Area Parkir Mobil Dinas di Gedung Kantor OJK Provinsi Bengkulu	36.925.000	*Renovation of Official Vehicle Parking Area at the OJK Bengkulu Office Building*
k)	Pengadaan Kanopi di Kantor OJK Provinsi Riau	23.500.000	*Canopy Procurement at the OJK Riau Office*
l)	Pengadaan *Signage* OJK Lt 23 Gedung Menara Radius Prawiro – Bank Indonesia	16.650.000	*Procurement of OJK Signage, 23rd Floor, Radius Prawiro Tower – Bank Indonesia Building*
m)	Pengadaan Pembangunan Pos Satpam Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	13.600.000	*Procurement for the Construction of the Security Post at the OJK Central Kalimantan Office*
Jumlah		**24.594.102.049**	***Total***

Penambahan Aset Tetap Lain berupa Buku, Lukisan, Monografi dan Ukiran/Lukisan Lainnya merupakan hibah BMN dengan nilai perolehan Rp997.877.346,00 dan nilai buku Rp0,00, sebagaimana Naskah Hibah Nomor PRJ-8/AG/2022 dan PRJ-2/MS.82/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan sesuai dengan surat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu Nomor S-339/AG/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima antara OJK dengan Kemenkeu Nomor BA-13/AG/2022 tanggal 26 Desember 2022. Walaupun 103 BMOJK dimaksud diserahterimakan tanggal 26 Desember 2022,

The additional Other Fixed Assets in the form of Books, Paintings, Monographs, and Other Carvings/Paintings were grants from BMN with an acquisition value of Rp997,877,346.00 and a book value of Rp0.00, as stated in the Grant Documents Number PRJ-8/AG/2022 and PRJ-2/MS.82/2022 dated December 26, 2022, and by the approval letter of the Director General of Budget, Ministry of Finance Number S-339/AG/2022 dated December 22, 2022, and the Minutes of Handover between OJK and the Ministry of Finance Number BA-13/AG/2022 dated December 26, 2022. Although the 103 BMOJK

namun pencatatan BMOJK tersebut dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023 dengan pertimbangan menghindari pencatatan ganda atas 103 BMN yang belum dihapusbukukan pada aplikasi SAKTI. Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Nomor KEP-3/AG/2023 tanggal 11 Januari 2023 dilakukan penghapusan barang dari Daftar Barang di SAKTI pada tanggal 9 Februari 2023.

were handed over on December 26, 2022, the recording of the BMOJK was done on May 30, 2023, to avoid a double recording of 103 BMN that had not been written off in the SAKTI application. As per the Decree of the Director General of Budget (DJA) Number KEP-3/AG/2023 dated January 11, 2023, the goods were removed from the Goods List in SAKTI on February 9, 2023.

2. Pengurangan Aset Tetap Lain selama periode tahun 2023 tercatat sebesar Rp9.035.735.141,00 merupakan penghapusbukuan dengan rincian sebagai berikut:

2. *Deduction of Other Fixed Assets during 2023 amounted to Rp9,035,735,141.00 is a write-off with the following details:*

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a)	Penghapusbukuan 21 Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN atas Penataan di Gedung Kantor OJK, sebagaimana Keputusan Kepala Departemen Logistik Nomor KEP-36/MS.82/2023.	4.435.242.400	*Write-off of 21 Fixed Assets under Renovation with Budgetary Acquisition for Renovation at the OJK Office Building, in accordance with the Head of Logistics Department's Decision No. KEP-36/MS.82/2023.*
b)	Penghapusbukuan penataan renovasi Eks Gedung Sewa Kantor OJK Provinsi Riau hasil pengadaan Departemen Logistik sebagaimana Keputusan Kepala Departemen Logistik Nomor KEP-15/MS.82/2023.	2.743.747.418	*Write-off of Renovation of the Former OJK Riau Office Building, based on the Logistics Department's procurement, in accordance with the Head of Logistics Department's Decision No. KEP-15/MS.82/2023.*
c)	Penghapusbukuan Aset Tetap Lain berupa Buku, Lukisan, Monografi dan Ukiran Lainnya sebagaimana Keputusan DJA Nomor KEP-3/AG/2023.	997.877.346	*Write-off of Other Fixed Assets, including Books, Paintings, Monographs, and Other Sculptures, in accordance with DJA Decision No. KEP-3/AG/2023.*
d)	Penghapusbukuan penataan renovasi eks Gedung Sewa Kantor OJK Provinsi Riau, sebagaimana Keputusan Kepala OJK Provinsi Riau Nomor KEP-18/KO.053/2023.	407.319.075	*Write-off of Renovation of the Former OJK Riau Office Building, in accordance with the Head of OJK Riau's Decision No. KEP-18/KO.053/2023.*
e)	Penghapusbukuan penataan renovasi eks Gedung Sewa Kantor OJK Purwokerto, sebagaimana Berita Acara Pengembalian Area Sewa Nomor BAPAS-01/MS.322/PSKOJKPWT/2022.	402.548.902	*Write-off of Renovation of the Former OJK Purwokerto Office Building, in accordance with the Return of Lease Area Minutes No. BAPAS-01/MS.322/PSKOJKPWT/2022.*
f)	Penghapusbukuan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi berupa Asbes di Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Keputusan Kepala Kantor OJK Nomor KEP-26/KO.19031/2023.	49.000.000	*Write-off of Buildings and Structures Under Renovation, including Asbestos at the OJK Central Kalimantan Office, in accordance with the Head of OJK Office's Decision No. KEP-26/KO.19031/2023.*
Jumlah		**9.035.735.141**	***Total***

3. Reklasifikasi masuk selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp139.306.915,00, disebabkan adanya koreksi yang dilakukan atas kesalahan penentuan kelompok aset tetap di Kantor OJK Provinsi Riau, yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lain - Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi.

3. *Reclassification in 2023 was recorded at Rp139,306,915.00 due to a correction made to the error in determining the fixed asset group at the OJK Riau Province Office, which was initially recorded as Equipment and Machinery to Other Fixed Assets - Building and Building Under Renovation.*

4. Reklasifikasi depresiasi Aset Tetap Lain sebesar Rp870.792.677,00 merupakan penyesuaian pada aset neto atas 103 BMOJK perolehan hibah BMN.

4. *The reclassification of Other Fixed Assets depreciation amounted to Rp870,792,677.00 adjusts the net assets of the 103 BMOJK BMN grants.*

VIII.3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp213.589.394.371,00 dan Rp264.422.306.549,00, dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.8 Right of Use Assets

The balance of Book Value of Right of Use Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp213,589,394,371.00 and Rp264,422,306,549.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	*Acquisition Cost*
Sewa Kantor	457.061.499.152	17.583.656.166	(175.432.636.082)	-	299.212.519.236	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	46.865.305.321	11.697.554.739	(23.257.243.447)	-	35.305.616.613	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	30.307.130.000	9.199.046.700	-	-	39.506.176.700	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	212.789.700	251.052.283	-	-	463.841.983	*Other Leases*
Jumlah	**534.446.724.173**	**38.731.309.888**	**(198.689.879.529)**	**-**	**374.488.154.532**	***Total***
Penyusutan	**31 Desember 2022** *December 31, 2022*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2023** *December 31, 2023*	***Accumulated depreciation***
Sewa Kantor	(234.474.731.208)	(72.510.176.144)	175.432.636.082	-	(131.552.271.270)	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	(28.734.543.922)	(10.192.479.579)	23.257.243.447	-	(15.669.780.054)	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	(6.758.688.084)	(6.766.169.704)	-	-	(13.524.857.788)	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	(56.454.410)	(95.396.639)	-	-	(151.851.049)	*Other Leases*
Jumlah	**(270.024.417.624)**	**(89.564.222.066)**	**198.689.879.529**	**-**	**(160.898.760.161)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	**264.422.306.549**	**(50.832.912.178)**	**-**	**-**	**213.589.394.371**	***Total Recorded Value of Right of Use Assets***

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Acquisition Cost*
Sewa Kantor	233.662.512.204	223.398.986.948	-	-	457.061.499.152	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	29.512.606.385	17.352.698.936	-	-	46.865.305.321	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	30.307.130.000	-	-	-	30.307.130.000	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	212.789.700	-	-	-	212.789.700	*Other Leases*
Jumlah	**293.695.038.289**	**240.751.685.884**	**-**	**-**	**534.446.724.173**	***Total***
Penyusutan	**31 Desember 2021** *December 31, 2021*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2022** *31 Desember 2022*	***Accumulated depreciation***
Sewa Kantor	(161.775.843.500)	(72.698.887.708)	-	-	(234.474.731.208)	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	(17.026.467.591)	(11.708.076.331)	-	-	(28.734.543.922)	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	(569.166.584)	(6.189.521.500)	-	-	(6.758.688.084)	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	(4.342.647)	(52.111.763)	-	-	(56.454.410)	*Other Leases*
Jumlah	**(179.375.820.322)**	**(90.648.597.302)**	**-**	**-**	**(270.024.417.624)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	**114.319.217.967**	**(150.103.088.582)**	**-**	**-**	**264.422.306.549**	***Total Recorded Value of Right of Use Assets***

a. Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna Tahun 2023 sebesar Rp213.589.394.371,00 terdiri dari:
   1. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp167.660.247.966,00 berupa 18 Kontrak Sewa Kantor, yaitu:
      a) 2 Gedung Kantor Pusat sebesar Rp124.867.052.075,00, yaitu AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp119.863.094.059,00 dan AHG Sewa Kantor Menara Radius Prawiro sebesar Rp5.003.958.016,00;
      b) 16 Gedung Kantor OJK sebesar Rp42.793.195.891,00.
   2. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan sebesar Rp19.635.836.559,00 berupa 32 Kontrak Sewa Rumah Jabatan, yaitu:
      a) 7 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp14.668.507.093,00; dan
      b) 25 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.967.329.466,00.
   3. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp25.981.318.912,00 berupa 5 Bangunan Lainnya, yaitu Gedung *Data Center Co-Location* di Sentul sebesar Rp17.430.084.583,00, Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp388.870.833,00, Gudang Peruri di Cilandak sebesar Rp1.672.792.000,00, Gudang Penyimpanan TI di Jakarta Selatan sebesar Rp1.585.321.496,00 dan serta Gudang Arsip di Percetakan Negara Jakarta Pusat sebesar Rp4.904.250.000,00.
   4. Nilai Buku atas Sewa Lainnya sebesar Rp311.990.934,00 berupa Lahan Parkir di Kantor OJK Provinsi Aceh sebesar Rp104.223.527,00 dan Lahan Parkir di Kantor OJK Cirebon sebesar Rp207.767.407,00.

b. Penambahan Aset Hak Guna tercatat sebesar Rp38.731.309.888,00, yaitu:
   1. Sewa 5 Gedung untuk Gedung Kantor OJK sebesar Rp17.583.656.166,00, yang terdiri dari Gedung Menara Radius Prawiro, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor OJK Provinsi NTT dan Kantor OJK Provinsi Jambi;
   2. Sewa 9 rumah untuk Rumah Jabatan sebesar Rp11.697.554.739,00, yang terdiri dari 7 Rumah Jabatan Kepala Kantor OJK dan 2 Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisioner;
   3. Sewa 4 bangunan lainnya berupa Gudang OJK sebesar Rp9.199.046.700,00, yang terdiri dari Gudang Mustikajaya, Gudang Peruri Cilandak, Gudang Penyimpanan TI di Jakarta Selatan dan Gudang Arsip di Percetakan Negara Jakarta Pusat; dan
   4. Sewa lainnya berupa 1 Lahan Parkir di Kantor OJK Cirebon sebesar Rp251.052.283,00.

a. The balance of Book Value of Right of Use Assets in 2023 amounted to Rp213,589,394,371.00, consisting of:
   1. Book Value of Office Lease Rights Assets amounted to Rp167,660,247,966.00 in the form of 18 Office Lease Contracts, namely:
      a) 2 Head Office Buildings amounted to Rp124,867,052,075.00, namely AHG Office Lease Wisma Mulia 2 amounted to Rp119,863,094,059.00, AHG Office Lease Radius Prawiro Tower amounted to Rp5,003,958,016.00;
      b) 16 OJK Office Buildings amounted to Rp42,793,195,891.00.
   2. Book Value of Office House Use Rights Assets amounted to Rp19,635,836,559.00 in the form of 32 Office House Lease Contracts, namely:
      a) 7 ADK Official residence amounted to Rp14,668,507,093.00; and
      b) 25 OJK OJK Head Official Residences amounted to Rp4,967,329,466.00.
   3. Book Value of Other Building Leasehold Assets amounted to Rp25,981,318,912.00 in the form of 5 Other Buildings, namely Data Center Co-Location Building in Sentul amounted to Rp17,430,084,583.00, Mustikajaya Warehouse in Bekasi amounted to Rp388. 870,833.00, Peruri Warehouse in Cilandak amounted to Rp1,672,792,000.00, IT Storage Warehouse in South Jakarta amounted to Rp1,585,321,496.00 and Archive Warehouse in State Printing Office, Central Jakarta amounted to Rp4,904,250,000.00.
   4. Book Value of Other Leases amounted to Rp311,990,934.00 in the form of Parking Lot at OJK Office in Aceh amounted to Rp104,223,527.00 and Parking Lot at OJK Office in Cirebon amounted to Rp207,767,407.00.

b. The addition of Right of use asset was recorded at Rp38,731,309,888.00, comprising:
   1. Lease of 5 Buildings for OJK Office Building amounted to Rp17,583,656,166.00 consisting of Radius Prawiro Tower Building, OJK Office for North Sumatra Province, OJK Office for Lampung Province, OJK Office for NTT Province and OJK Office for Jambi Province;
   2. Lease of 9 Official residence amounted to Rp11,697,554,739.00, consisting of 7 houses for OJK Official and 2 for Members of the Board of Commissioners;
   3. Lease of 4 other buildings for OJK Warehouse amounted to Rp9,199,046,700.00, consisting of Mustika Jaya Warehouse, Cilandak Stolen Warehouse, IT Storage Warehouse in South Jakarta and Archive Warehouse in State Printing Office, Central Jakarta; and
   4. Other lease in the form of 1 parking lot at OJK Office in Cirebon amounted to Rp251,052,283.00.

c. Pengurangan Aset Hak Guna tercatat sebesar Rp198.689.879.529,00 merupakan penghapusbukuan aset Hak Guna yang telah habis masa sewanya, terdiri dari:
   1. 12 Aset Hak Guna berupa sewa Gedung kantor sebesar Rp175.432.636.082,00; dan
   2. 23 Aset Hak Guna berupa sewa Rumah Jabatan ADK dan Rumah Jabatan Kepala Kantor OJK sebesar Rp23.257.243.447,00.

c. Deduction of Right of use asset amounted to Rp198,689,879,529.00 represents the write-off of Right of Use assets whose leases have expired, consisting of:
   1. 12 Right of Use Assets in the form of office building leases amounted to Rp175,432,636,082.00; and
   2. 23 Use Right Assets in the form of ADK Position House and OJK Office Head Position House amounted to Rp23,257,243,447.00.

VIII.3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp71.768.188.812,00 dan Rp65.604.327.292,00, dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.9 Intangible Assets

The Balance of Book Value of Intangible Assets as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp71,768,188,812.00 and Rp65,604,327,292.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	*Acquisition Cost*
Aset Takberwujud	385.236.024.116	111.724.838.913	(81.527.065.112)	4.475.254.068	419.909.051.985	*Intangible Assets*
Jumlah	**385.236.024.116**	**111.724.838.913**	**(81.527.065.112)**	**4.475.254.068**	**419.909.051.985**	***Total***
Amortisasi	**31 Desember 2022** *December 31, 2022*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2023** *December 31, 2023*	**Amortization**
Aset Takberwujud	(319.631.696.824)	(26.492.199.767)	74.414.656.961	(76.431.623.543)	(348.140.863.173)	*Intangible Assets*
Jumlah	**(319.631.696.824)**	**(26.492.199.767)**	**74.414.656.961**	**(76.431.623.543)**	**(348.140.863.173)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	**65.604.327.292**	**85.232.639.146**	**(7.112.408.151)**	**(71.956.369.475)**	**71.768.188.812**	***Total Recorded Value of Intangible Assets***

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Acquisition Cost*
Aset Takberwujud	355.934.961.749	23.593.880.407	-	5.707.181.960	385.236.024.116	*Intangible Assets*
Jumlah	**355.934.961.749**	**23.593.880.407**	**-**	**5.707.181.960**	**385.236.024.116**	***Total***
Amortisasi	**31 Desember 2021** *December 31, 2021*	**Penambahan** *Addition*	**Pengurangan** *Deductions*	**Reklasifikasi** *Reclassification*	**31 Desember 2022** *December 31, 2022*	**Amortization**
Aset Takberwujud	(294.190.517.319)	(25.441.179.505)	-	-	(319.631.696.824)	*Intangible Assets*
Jumlah	**(294.190.517.319)**	**(25.441.179.505)**	**-**	**-**	**(319.631.696.824)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	**61.744.444.430**	**(1.847.299.098)**	**-**	**5.707.181.960**	**65.604.327.292**	***Total Recorded Value of Intangible Assets***

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud tahun 2023 sebesar Rp71.768.188.812,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp0,00 dengan informasi bahwa seluruh Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 telah dihibahkan ke OJK sehingga dicatatkan sebagai Barang Milik OJK (BMOJK).

The balance of the Book Value of Intangible Assets in 2023 amounted to Rp71,768,188,812.00 consisting of:

a. The book value of the acquisition of Intangible Assets for Fiscal Years 2013 and 2014 financed from the State Budget amounted to Rp0.00 with information that all Intangible Assets for Fiscal Years 2013 and 2014 have been donated to OJK so that they are recorded as OJK Property (BMOJK).

b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2023 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp71.768.188.812,00.

Selama tahun 2023, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp111.724.838.913,00, yang terdiri dari aset pengadaan OJK sebesar Rp30.197.773.801,00 dan hibah Kementerian Keuangan perolehan tahun 2013 - 2014 menjadi BMOJK sebesar Rp81.527.065.112,00, dengan rincian sebagai berikut.

b. The book value of Intangible asset acquisitions financed by levies for Fiscal Years 2015 through 2023 amounted to Rp71,768,188,812.00.

Additional Intangible Assets in 2023 amounted to Rp111,724,838,913.00, consisting of OJK procurement assets amounted to Rp30,197,773,801.00 and Ministry of Finance grants acquired in 2013 - 2014 to BMOJK amounted to Rp81,527,065,112.00, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Pengadaan OJK *OJK Procurement*	Hibah Kementerian Keuangan *Ministry of Finance Grant*	*Description*
a.	Sistem Aplikasi	22.531.692.001	49.611.738.008	*System Applications*
b.	*Software* Aplikasi	7.621.417.620	31.915.327.104	*Software Applications*
c.	*System Tools*	44.664.180	-	*System Tools*
Jumlah		**30.197.773.801**	**81.527.065.112**	***Total***

Pengurangan selama tahun 2023 berasal dari penghapusan atas pencatatan BMN sebesar Rp81.527.065.112,00 yang telah dihibahkan kepada OJK.

Selain itu, terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp4.475.254.068,00 menjadi Aset Takberwujud berupa:

a. LMS Termin 1 2022 - 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00;
b. APOLO Perbankan Termin 1 2022 - 2023 sebesar Rp600.000.000,00;
c. SIP IKNB Mod RBS Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp499.451.160,00;
d. Dashboard dan BI SJK Terintegrasi 2022 - 2023 sebesar Rp498.175.076,00;
e. SIP IKNB Modul ALK Termin 1 sebesar Rp496.420.860,00;
f. EDW Termin 1 sebesar Rp354.405.961,00;
g. SIGAP Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp300.000.000,00;
h. SIP Perbankan Mod BPeR Termin 1 2022 - 2023 sebesar Rp200.000.000,00;
i. SIPM Termin 1 TA 2022 – 2023 sebesar Rp200.000.000,00;
j. APOLO IKNB Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp176.801.011,00; dan
k. SIPROJEK Termin 1 TA 2022 – 2023 sebesar Rp150.000.000,00.

Reklasifikasi amortisasi Aset Takberwujud sebesar Rp76.431.623.543,00 merupakan penyesuaian pada aset neto atas 1.370 BMOJK perolehan hibah BMN.

The deduction during 2023 came from the write-off of BMN records amounted to Rp81,527,065,112.00, which had been donated to OJK.

In addition, there was a reclassification from Asset Under Construction amounted to Rp4,475,254,068.00 to Intangible Assets in the form of:

a. LMS 1st term 2022 - 2023 amounted to Rp1,000,000,000.00;
b. APOLO Banking 1st term 2022 - 2023 amounted to Rp600,000,000.00;
c. SIP IKNB Mod RBS 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp499,451,160.00;
d. Dashboard and BI SJK Integrated 2022 - 2023 amounted to Rp498,175,076.00;
e. SIP IKNB Module ALK 1st term amounted to Rp496,420,860.00;
f. EDW 1st installment amounted to Rp354,405,961.00;
g. SIGAP 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp300,000,000.00;
h. SIP Banking Mod BPeR 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp200,000,000.00;
i. SIPM 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp200,000,000.00;
j. APOLO IKNB 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp176,801,011.00; and
k. SIPROJEK 1st term FY 2022 - 2023 amounted to Rp150,000,000.00.

Reclassification of amortization of Intangible Assets amounted to Rp76,431,623,543.00 resulted from an adjustment to the net assets of 1,370 BMOJK acquired from BMN grants.

VIII.3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.245.681.731,00 dan Rp29.435.829.613,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2023 *December 31, 2023*	*Account*
Aset Dalam Penyelesaian	29.435.829.613	19.245.681.731	-	(29.435.829.613)	19.245.681.731	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	**29.435.829.613**	**19.245.681.731**	**-**	**(29.435.829.613)**	**19.245.681.731**	***Total Recorded Value of Assets Under Construction***

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Account*
Aset Dalam Penyelesaian	197.607.556.262	28.073.489.380	(10.309.314.161)	(185.935.901.868)	29.435.829.613	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	**197.607.556.262**	**28.073.489.380**	**(10.309.314.161)**	**(185.935.901.868)**	**29.435.829.613**	***Total Recorded Value of Assets Under Construction***

Sepanjang periode tahun 2023, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp19.245.681.731,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penataan Gedung Wisma Mulia sebesar Rp13.207.744.580,00;
b. Renovasi Gudang Kantor OJK Purwokerto sebesar Rp98.195.445,00;
c. Pembayaran konsultan penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp38.940.020,00;
d. Pembuatan gardu jaga di rumah jabatan Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp48.608.300,00 dan Pembangunan rumah genset sebesar Rp14.388.100,00.
e. Pembayaran konsultan penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp36.700.152,00;
f. Pengembangan sistem aplikasi dengan total sebesar Rp5.801.105.134,00:
    1. EDW Termin 1 sebesar Rp1.563.345.250,00;
    2. SPRINT Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp1.155.765.194,00;
    3. APOLO IKNB Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp582.961.038,00;
    4. SIP IKNB Mod ALB Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp541.203.451,00;
    5. SIP IKNB Mod RBS T1 TA 2023-2024 sebesar Rp498.139.695,00;
    6. SIAUTO Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp430.000.000,00;
    7. SIP Bank Umum Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp356.098.652,00;
    8. Dashboard dan BI olahan BDA 2023-2024 sebesar Rp262.971.843,00;
    9. SIPM T1 TA 2023-2024 sebesar Rp200.000.000,00;
    10. SIPROJEK Tahan V 2023-2024 sebesar Rp110.620.011,00; dan
    11. PKSI Mendesak SISIMPU Termin 1 TA 2023-2024 sebesar Rp100.000.000,00.

VIII.3.10 Asset Under Construction

Asset Under Construction as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp19,245,681,731.00 and Rp29,435,829,613.00, respectively, with details as follows.

(In Rupiah)

(In Rupiah)

During 2023, additional Assets Under Construction (ADP) amounted to Rp19,245,681,731.00 with details as follows:

a. Re-arrangement for Wisma Mulia Building at Rp13,207,744,580.00;
b. Warehouse Renovation at OJK Office for Purwokerto at Rp98,195,445.00;
c. Payment to building arrangement consultant for OJK office for South Sulawesi and West Sulawesi Province at Rp38,940,020.00;
d. Construction of a guardhouse at the official residence of the OJK Office for Central Java Province at Rp48,608,300.00 and generator house construction at Rp14,388,100.00.
e. Payment to building arrangement consultant for OJK office for East Kalimantan Province at Rp36,700,152.00;
f. System application development at Rp5,801,105,134.00:
    1. EDW 1st term of Rp1,563,345,250.00;
    2. SPRINT 1st term FY 2023 - 2024 of Rp1,155,765,194.00;
    3. APOLO IKNB 1st term FY 2023-2024 of Rp582,961,038.00;
    4. SIP IKNB Mod ALB 1st term FY 2023-2024 of Rp541,203,451.00;
    5. SIP IKNB Mod RBS 1st term FY 2023-2024 of Rp498,139,695.00;
    6. SIAUTO 1st term FY 2023-2024 of Rp430,000,000.00;
    7. Commercial Bank SIP 1st term FY 2023-2024 of Rp356,098,652.00;
    8. Dashboard and BI processed BDA 2023-2024 of Rp262,971,843.00;
    9. SIPM T1 FY 2023-2024 of Rp200,000,000.00;
    10. SIPROJEK year V 2023-2024 of Rp110,620,011.00; and
    11. PKSI Mendesak SISIMPU 1st term FY 2023-2024 of Rp100,000,000.00.

Selain itu selama tahun 2023 terdapat reklasifikasi keluar akibat Penyelesaian atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan yaitu:

a. Penyelesaian Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp16.444.146.927,00.
b. Penyelesaian Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2.819.985.072,00;
c. Penyelesaian Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp2.729.983.347,00;
d. Penyelesaian Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.712.493.404,00;
e. Penyelesaian Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp1.253.966.795,00; dan
f. Penyelesaian atas pengembangan sistem aplikasi sebesar Rp4.475.254.068,00 yaitu:
    1. LMS Termin 1 2022 - 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00;
    2. APOLO Perbankan Termin 1 2022 – 2023 sebesar Rp600.000.000,00;
    3. SIP IKNB Mod RBS Termin 1 TA 2022 – 2023 sebesar Rp499.451.160,00;
    4. Dashboard dan BI SJK Terintegrasi 2022 - 2023 sebesar Rp498.175.076,00;
    5. SIP IKNB Modul ALK Termin 1 sebesar Rp496.420.860,00;
    6. EDW Termin 1 sebesar Rp354.405.961,00;
    7. SIGAP Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp300.000.000,00;
    8. SIP Perbankan Mod BPeR Termin 1 2022 - 2023 sebesar Rp200.000.000,00;
    9. SIPM Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp200.000.000,00;
    10. APOLO IKNB Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp176.801.011,00; dan
    11. SIPROJEK Termin 1 TA 2022 - 2023 sebesar Rp150.000.000,00.

Additionally, during 2023, a reclassification out was made following the completion of works, namely:

a. Completion of Building Arrangement at OJK Office for Riau Province amounted to Rp16,444,146,927.00.
b. Settlement of Building Construction Consultant for OJK Office for East Java Province amounted to Rp2,819,985,072.00;
c. Completion of Building Construction Consultant for OJK Office for South Sumatra and Bangka Belitung Province amounted to Rp2,729,983,347.00;
d. Completion of Building Construction Consultant for OJK Office Building for Maluku Province amounted to Rp1,712,493,404.00;
e. Completion of Building Construction Consultant of OJK Office for Riau Province amounted to Rp1,253,966,795.00; and
f. Settlement of application system development amounted to Rp4,475,254,068.00, namely:
    1. LMS 1st term 2022 - 2023 of Rp1,000,000,000.00;
    2. APOLO Perbankan 1st term 2022 - 2023 of Rp600,000,000.00
    3. SIP IKNB Mod RBS 1st Installment FY 2022 - 2023 of Rp499,451,160.00;
    4. Dashboard and BI SJK Integrated 2022 - 2023 of Rp498,175,076.00;
    5. SIP IKNB Module ALK 1st term of Rp496,420,860.00;
    6. EDW 1st term of Rp354,405,961.00;
    7. SIGAP 1st term FY 2022 - 2023 of Rp300,000,000.00;
    8. SIP Perbankan Mod BPeR 1st term FY 2022 - 2023 of Rp200,000,000.00;
    9. SIPM 1st term FY 2022 - 2023 of Rp200,000,000.00;
    10. APOLO IKNB 1st term FY 2022 - 2023 of Rp176,801,011.00; and
    11. SIPROJEK 1st term FY 2022 - 2023 of Rp150,000,000.00.

VIII.3.11 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp94.158.850,00 dan Rp30.734.485,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.11 Operating Payables

The balance of Operating Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp94,158,850.00 and Rp30,734,485.00, respectively. Operating liabilities were expenses incurred to finance OJK activities but were not paid until the date of the financial statements, with details as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Utang kepada Pihak Ketiga	54.638.850	23.909.485	*Third Party Payable*
Utang kepada Pegawai	39.520.000	6.825.000	*Employee Payables*
Jumlah	**94.158.850**	**30.734.485**	

(Lihat Catatan 3.21 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

VIII.3.12 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.178.319.786,00 dan Rp37.875.117.447,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dan adalah sebagai berikut.

VIII.3.12 Unearned Revenue

The Balance of Unearned Revenues as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp19,178,319,786.00 and Rp37,875,117,447.00, respectively. Unearned Revenues is surplus Revenues from levy payments by entities operating in the financial services sector. Details of Unearned Revenues as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2023 *31 Desember 2023*	31 Desember 2022 *31 Desember 2022*	*Description*
1	**Registrasi**	**310.213.960**	**1.078.694.542**	***Registration***
	a. Perbankan	5.000.000	5.000.000	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	277.515.035	1.060.361.209	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	27.698.925	13.333.333	*NBFI*
2	**APBN**	**18.842.484.859**	**35.967.408.690**	***State Budget***
	a. Perbankan	180.276.764	11.289.351.108	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	13.531.244.531	15.008.377.066	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	5.130.963.564	9.669.680.516	*NBFI*
3	**Sanksi**	**15.197.000**	**175.458.820**	***Penalties***
	a. Perbankan	320.000	167.363.877	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	12.000.000	5.668.200	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.877.000	2.426.743	*NBFI*
4	**Pengelolaan Pungutan**	**10.423.967**	**653.555.395**	***Levy Management***
Jumlah		**19.178.319.786**	**37.875.117.447**	***Total***

VIII.3.13 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp45.697.627.153,00 dan Rp281.274.576,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.13 Debt to the State Treasury

The balance of Debt to State Treasury as of December 31, 2023, and December 31, 2022 amounted to Rp45,697,627,153.00 and Rp281,274,576.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2023 *31 Desember 2023*	31 Desember 2022 *31 Desember 2022*	*Description*
1	**Pungutan**	**45.697.627.153**	**281.274.576**	***Levies***
	a. Pengembalian anggaran tahun 2023	45.435.122.748	-	*Budget Returns*
	b. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	262.504.405	281.274.576	*Transaction Returns*
2	**APBN**	**-**	**-**	***State Budget***
Jumlah Piutang Pungutan – Bersih		**45.697.627.153**	**281.274.576**	***Total of Levy Receivables - Net***

Pengembalian ke Kas Negara atas pengembalian beban (retur) atas transaksi 2022 Rp281.274.576,00 telah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023.

Return to the State Treasury for the returned expenses (return) for transaction in 2022 amounted to of Rp281,274,576.00 was made on May 11, 2023.

VIII.3.14 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp79.566.600.804,00 dan Rp143.841.401.559,00. Utang sewa merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi sebagai berikut.

VIII.3.14 Lease Payables

The Balance of Lease Payables as of December 31, 2023, and December 31, 2022 amounted to Rp79,566,600,804.00 and Rp143,841,401,559.00, respectively. Lease payables represent lease transactions of the Head Office, which is located as follows.

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
1	Wisma Mulia 2	74.292.324.312	143.841.401.559	*Wisma Mulia 2*
2	Menara Radius Prawiro	5.274.276.492	-	*Menara Radius Prawiro*
Jumlah		**79.566.600.804**	**143.841.401.559**	***Total***

VIII.3.15 Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain terdiri dari:
   1. Program Imbalan Pascakerja
      a) Program Pensiun
         Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 (tiga) tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

      b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
         TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
      c) Uang Pesangon
         Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
      d) Cinderamata
         Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.
      e) Tunjangan Pasca Jabatan
         Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.

   2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
      a) Cuti Besar
         OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

VIII.3.15 Post Employment Benefit and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities.

a. Post Employment Benefit and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities programs consist of:
   1. Post-employment Benefit Program
      a) Pension Program
         This pension program applies to employees of the formerly Ministry of Finance (Bapepam-LK) and formerly Bank Indonesia employees who still have >3 (three) years of service remaining in OJK and are managed by Dapen.
      b) Housing Retirement Benefits (TPHT) and Retirement Health Benefits (TKHT).
         TPHT and TKHT are facilities provided to retired OJK employees and managed by YKP.
      c) Severance Pay
         Severance pay is given to employees and Members of the Board of Commissioners (ADK) as upon termination of their service at OJK.
      d) Reward
         Souvenirs are benefits for OJK employees and ADK entering retirement.

      e) Retirement Benefit
         Benefits for ADK whose term of office has ended.

   2. Other Long-Term Employee Benefit Plans
      a) Employee Long Leave
         OJK provides extended leave allowance to employees who have reached a Service Period of at least 6 (six) years continuously and 3 (three) years continuously for the Board of Commissioners.

b) Penghargaan Masa Pengabdian
OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) *Frame* Kacamata
OJK memberikan bantuan pembelian frame kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
Saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.280.681.106.286,00 dan Rp2.833.406.195.525,00 dengan rincian sebagai berikut.

b) Service Period Award
OJK provides service benefits to employees who have reached a service period of at least 15 (fifteen) years continuously, and multiples of 5 (five) for the next period and the Board of Commissioners after completing a 5 (five) year term of office.

c) Eyeglasses Frame
OJK provides officials and employees with coverage for eyeglass frames.

b. Changes in Post-Employment Benefits and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities.
The balance of Post-Employment Benefit Liabilities and Other Long-Term Employee Benefits Liabilities liabilities as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp3,280,681,106,286.00 and Rp2,833,406,195,525.00, respectively, with details as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

31 Desember 2023 | *December 31, 2023*								
No	**Liabilitas Imbalan Kerja**	**Saldo Awal Liabilitas** *Balance of Assets (Liabilities)*	**Iuran OJK (Pendanaan)** *OJK Contribution (Funding)*	**Pembayaran Manfaat** *Benefits Payments*	**Beban Imbalan Kerja** *Employee Benefits Expenses*	**Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain** *Other Comprehensive Income (Expenses)*	**Saldo Akhir Liabilitas** *Balance of Assets (Liabilities)*	*Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*
1	Dana Pensiun	-	113.444.404.140	-	(117.631.676.965)	4.187.272.825	-	*Pension Fund*
2	TPHT Manfaat Pasti	(747.986.370.603)	66.914.083.094	-	(327.344.826.697)	(182.330.653.103)	(1.190.747.767.309)	*Housing Retirement Defined Benefits*
3	TKHT Manfaat pasti	(139.532.140.292)	15.942.912.684	-	(98.766.369.165)	70.814.894.019	(151.540.702.754)	*Retirement Health Defined Benefits*
4	Pesangon	(258.590.428.607)	-	17.028.819.615	(60.358.742.440)	(2.070.426.355)	(303.990.777.787)	*Severance pay*
5	Cinderamata	(9.871.759.491)	-	457.504.035	(2.280.712.464)	(318.413.801)	(12.013.381.721)	*Reward*
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(27.355.357.568)	-	-	(25.319.890.317)	13.824.386.435	(38.850.861.450)	*Retirement Benefits*
7	Cuti Besar	(421.619.269.340)	289.960.575.567	-	(179.286.329.788)	-	(310.945.023.561)	*Employee Long Leave*
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.179.417.055.415)	432.429.963.256	-	(478.209.595.918)	-	(1.225.196.688.077)	*Service Period Award*
9	*Frame* Kacamata	(49.033.814.209)	6.624.530.779	-	(4.986.620.197)	-	(47.395.903.627)	*Eyewear*
Jumlah		**(2.833.406.195.525)**	**925.316.469.520**	**17.486.323.650**	**(1.294.184.763.951)**	**(95.892.939.980)**	**(3.280.681.106.286)**	***Total***

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	Iuran OJK (Pendanaan) *OJK Contribution (Funding)*	Pembayaran Manfaat *Benefits Payments*	Beban Imbalan Kerja *Employee Benefits Expenses*	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income (Expenses)*	Saldo Akhir Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	*Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*
		**31 Desember 2022	*December 31, 2022***					
1	Dana Pensiun	-	72.831.504.772	-	(129.279.361.114)	56.447.856.342	-	*Pension Fund*
2	TPHT Manfaat Pasti	(585.943.865.114)	-	-	(290.177.854.439)	128.135.348.950	(747.986.370.603)	*Housing Retirement Defined Benefits*
3	TKHT Manfaat pasti	(159.429.126.835)	-	-	(96.897.277.867)	116.794.264.410	(139.532.140.292)	*Retirement Health Defined Benefits*
4	Pesangon	(336.070.730.162)	-	28.976.593.552	53.611.424.766	(5.107.716.763)	(258.590.428.607)	*Severance pay*
5	Cinderamata	(8.880.414.435)	-	475.918.800	(2.164.890.238)	697.626.382	(9.871.759.491)	*Reward*
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(99.556.813.415)	-	91.512.846.745	(22.717.065.850)	3.405.674.952	(27.355.357.568)	*Retirement Benefits*
7	Cuti Besar	(507.744.407.852)	172.994.574.278	-	(86.869.435.766)	-	(421.619.269.340)	*Employee Long Leave*
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.364.347.637.097)	313.506.806.673	-	(128.576.224.991)	-	(1.179.417.055.415)	*Service Period Award*
9	*Frame* Kacamata	(40.709.125.702)	10.520.675.000	-	(18.845.363.507)	-	(49.033.814.209)	*Eyewear*
Jumlah		**(3.102.682.120.612)**	**569.853.560.723**	**120.965.359.097**	**(721.916.049.006)**	**300.373.054.273**	**(2.833.406.195.525)**	***Total***

c. Aset Program

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp4.390.967.059.185,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

c. *Plan Assets*

OJK's plan assets in Dapen and YKP amounted to Rp4,390,967,059,185.00. The return on these plan assets refers to the investment policy. OJK Plan Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	Aset Program | *Program Assets*		*Description*
	31 Dec 2023	31 Dec 2022	
Dapen OJK	**1.614.400.462.560**	**1.357.830.896.547**	***OJK Pension Fund***
YKP OJK	**2.776.566.596.625**	**2.168.919.377.509**	***OJK Employee Welfare Foundation***
a. TPHT	734.423.230.792	709.477.964.189	*Housing*
b. TKHT	783.356.452.002	719.309.132.651	*Healthcare*
c. IJPL	1.258.786.913.831	740.132.280.669	*Other Long-Term Benefits*
Jumlah	**4.390.967.059.185**	**3.526.750.274.056**	***Total***

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

The following details the placement of OJK plan assets with Dapen as of December 31, 2023, and December 31, 2022.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Penempatan pada Dapen	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Pension Fund Placements*
1	Kas dan Setara Kas	50.000.000.000	72.049.873.261	*Cash and Cash Equivalent*
2	Saham	16.545.097.000	14.474.083.695	*Stocks*
3	Obligasi	1.490.094.848.164	1.254.137.433.268	*Bonds*
4	Efek Beragun Aset	326.459.210	730.770.918	*Asset-backed security*
5	Aset Lainnya	57.434.058.186	16.438.735.405	*Other Assets*
Jumlah		**1.614.400.462.560**	**1.357.830.896.547**	***Total***

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

The placement of OJK plan assets placed in YKP as of December 31, 2023, and December 31, 2022, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Penempatan pada YKP		31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Placements in Employee Welfare Foundation (YKP)*
TPHT				
1	Kas dan setara Kas	647.390.000.000	556.141.415.381	*Cash and Cash Equivalents*
2	Reksadana	66.233.230.792	-	*Mutual Funds*
3	Obligasi	20.800.000.000	136.140.333.504	*Bonds*
4	Aset Lainnya	-	17.196.215.304	*Other Assets*
	Jumlah	**734.423.230.792**	**709.477.964.189**	***Total***
TKHT				
1	Kas dan setara Kas	248.950.000.000	563.847.813.915	*Cash and Cash Equivalents*
2	Reksadana	110.539.266.510	-	*Mutual Funds*
3	Obligasi	397.935.978.648	138.026.817.117	*Bonds*
4	Aset Lainnya	25.931.206.844	17.434.501.619	*Other Assets*
	Jumlah	783.356.452.002	719.309.132.651	***Total***
IJPL				
1	Kas dan setara Kas	1.258.786.913.831	580.170.540.759	*Cash and Cash Equivalents*
2	Obligasi	-	142.022.530.104	*Bonds*
3	Aset Lainnya	-	17.939.209.806	*Other Assets*
	Jumlah	**1.258.786.913.831**	**740.132.280.669**	***Total***
	Jumlah	2.776.566.596.625	2.168.919.377.509	

d. Asumsi-asumsi Aktuarial
Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2023 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

d. *Actuarial Assumptions*
The calculation of employee benefits liabilities as of December 31, 2023, was performed by an independent actuary, Steven & Mourits Actuarial Consulting Firm. The main assumptions used by the actuary to determine the employee benefit obligation are as follows.

Keterangan	2023	2022	*Description*
Asumsi Ekonomi			***Economic Assumptions***
Tingkat diskonto:			*Discount Rate*
- Dana Pensiun	7,45% per tahun | *per year*	7,45% per tahun | *per year*	*Pension Fund -*
- Perumahan	7,25% per tahun | *per year*	7,25% per tahun | *per year*	*Housing -*
- Kesehatan	7,45% per tahun | *per year*	7,45% per tahun | *per year*	*Healthcare -*
- Pesangon	7,35% per tahun | *per year*	7,35% per tahun | *per year*	*Severance Pay -*
- Cinderamata	7,45% per tahun | *per year*	7,45% per tahun | *per year*	*Reward -*
- Pasca Jabatan	6,35% per tahun | *per year*	6,35% per tahun | *per year*	*Post-Employment Benefits -*
- Cuti Besar Pegawai	7,15% per tahun | *per year*	7,15% per tahun | *per year*	*Long Leave (Employee) -*
- Cuti Besar DK	5,95% per tahun | *per year*	5,95% per tahun | *per year*	*Long Leave (BoC) -*
- PMP (Pegawai)	7,25% per tahun | *per year*	7,25% per tahun | *per year*	*Service Period Award (Employee) -*
- PMP (DK)	6,45% per tahun | *per year*	6,45% per tahun | *per year*	*Service Period Award (BoC) -*
- Kacamata	6,95% per tahun | *per year*	6,95% per tahun | *per year*	*Eyewear -*
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun | *per year*	9,00% per tahun | *per year*	*Increasing rate in PhDP*
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun | *per year*	1,00% per tahun | *per year*	*Increasing rate in Pension Benefit*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun | *per year*	8,00% per tahun | *per year*	*Increasing rate in health cost*
Faktor Demografis			***Demographic Factors***
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan Group *Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun *Base on the Indonesian mortality table for 2019 (TMI IV), for the active period and the 1983 group annuity mortality for the retirement period*	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan Group *Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun *Base on the Indonesian mortality table for 2019 (TMI IV), for the active period and the 1983 group annuity mortality for the retirement period*	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita *10% from mortality rate*	10% dari tingkat mortalita *10% from mortality rate*	*Disability Rate*
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia *0.5% from all ages*	0,5% untuk seluruh usia *0.5% from all ages*	*Employee turn over*
Pensiun	100% pada usia pensiun normal *100% of normal retirement age*	100% pada usia pensiun normal *100% of normal retirement age*	*Pension*

Keterangan	2023	2022	*Description*
Asumsi Lainnya	1. Biaya kesehatan ratarata sebesar Rp12.100.000/orang/tahun di usia 56. *Average cost of healthcare is Rp12,100,000 per person per year at the age of 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for calculating the entitlement to postretirement health benefits is at the age of 50 and 20 years of service for employees from the Ministry of Finance, and at the age of 50 and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The 20-year and 10-year length of service take into account the working period from the original institution.*	1. Biaya kesehatan ratarata sebesar Rp12.100.000/orang/tahun di usia 56. *Average cost of healthcare is Rp12,100,000 per person per year at the age of 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for calculating the entitlement to postretirement health benefits is at the age of 50 and 20 years of service for employees from the Ministry of Finance, and at the age of 50 and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The 20-year and 10-year length of service take into account the working period from the original institution.*	*Other Assumptions*
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58, and 60 years (male and female)*	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58, and 60 years (male and female)*	*Normal Retirement Age*
Loading Pajak			***Tax Loading***
Asumsi Pajak:			*Tax Assumptions*
- Dana Pensiun	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Pension Fund -*
- Perumahan	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Housing -*
- Pesangon	PPh 21 *Article 21*	PPh 21 *Article 21*	*Severance Pay -*
- Pasca Jabatan	PPh 21 *Article 21*	PPh 21 *Article 21*	*Post-Employment Benefits -*
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Leave (Employee) -*
- Cuti Besar (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Leave (BoC) -*
- PMP (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Service Award (Employee) -*
- PMP (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Service Award (BoC) -*
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Value added Tax 10%*	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Value added Tax 10%*	*Reward -*
- Kacamata	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Eyewear -*

VIII.3.16 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.485.126.112.216,00 dan Rp7.878.262.211.981,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Saldo Awal	**7.878.262.211.981**	**6.402.949.140.300**	***Beginning Balance***
Mutasi:			*Transactions:*
Penyesuaian Aset Neto	(130.157.626.350)	421.851.400	*Adjustment of Net Assets*
Perubahan Aset Neto	832.914.466.565	1.174.518.166.008	*Change in Net Assets*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(95.892.939.980)	300.373.054.273	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Saldo Akhir	**8.485.126.112.216**	**7.878.262.211.981**	***End Balance***

VIII.3.16 Net Assets

The balance of Net Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp8,485,126,112,216.00 and Rp7,878,262,211,981.00, respectively.

The movement of Net Assets as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

(In Rupiah)

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

Details of Net Assets adjustments are as follows.

(dalam rupiah)

(In Rupiah)

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
1	Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KR 4	110.087.500	-	*Adjustment for the Waiver of BPHTB Debt, KR 4*
2	Penyesuaian atas perolehan Hibah BMN	997.877.346	-	*Adjustment for Acquisition of State Property Grants (BMN)*
3	Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KR 4	(27.521.875)	-	*Adjustment of Corporate Income Tax Payable for BPHTB Debt Waiver, KR 4*
4	Penyesuaian atas penyusutan Hibah BMN	(131.238.069.321)	-	*Adjustment for Depreciation of State Property Grants (BMN)*
5	Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KOSL	-	314.500.000	*Adjustment for the release of BPHTB KOSL debt*
6	Penyesuaian Utang Operasional atas Kegiatan Sarasehan dan Pisah Sambut Anggota Dewan Komisioner (ADK)	-	185.976.400	*Operational debt adjustment for Sarasehan and Pisah Sambut of the Board of Commissioners (ADK)*
7	Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KOSL	-	(78.625.000)	*Adjustment of Corporate Income Tax payable for the release of BPHTB KOSL debt*
Jumlah		**(130.157.626.350)**	**421.851.400**	***Total***

VIII.3.17 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.120.140.406.104,00 dan Rp7.481.316.866.250,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

VIII.3.17 Revenue

OJK revenue as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp8,120,140,406,104.00 and Rp7,481,316,866,250.00, respectively.

Details of Levy Revenue as of December 31, 2023, and December 31, 2022, are as follows.

No	Sektor	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Sector*
1	**Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi**	**54.426.269.685**	**78.890.617.905**	***Registration and Corporate Action Fees***
	a. Perbankan	165.000.000	460.000.000	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	51.712.936.352	76.380.617.905	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.548.333.333	2.050.000.000	*Non-Bank Financial Industry*
2	**Biaya Tahunan**	**7.617.578.390.818**	**7.148.617.442.887**	***Annual Fees***
	a. Perbankan	5.555.674.803.231	5.148.341.814.121	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	1.122.629.398.953	1.154.922.488.690	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	939.274.188.634	845.353.140.076	*Non-Bank Financial Industry*
3	**Sanksi Denda**	**158.909.971.891**	**90.588.501.782**	***Penalty Sanctions***
	a. Perbankan	19.434.771.135	22.286.506.654	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	100.041.298.800	55.769.684.488	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	39.432.201.956	12.532.310.640	*Non-Bank Financial Industry*
	d. Perlindungan Konsumen	1.700.000	-	*Consumer Protection*
4	**Pengelolaan Pungutan**	**289.225.773.710**	**163.220.303.676**	***Collection Management***
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	241.362.725.658	97.528.715.083	*Revenue from Collection Management*
	b. Jasa Giro Pungutan	42.513.827.130	60.994.185.155	*Collection Giro Services*
	c. Denda Wanprestasi	1.404.404.623	2.638.445.318	*Default Penalty*
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	688.441.553	192.263.906	*Refund of Collection Fund Usage*
	e. Pengelolaan Pungutan Lainnya	731.173.881	129.406.150	*Other Collection Management Revenues*
	f. Piutang yang telah dihapusbuku	2.525.200.865	1.737.288.064	*Revenue from Written-Off Receivables*
Jumlah		**8.120.140.406.104**	**7.481.316.866.250**	***Total***

VIII.3.18 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.261.161.195.171,00 dan Rp6.027.002.990.423,00 dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.18 Expenses

OJK's expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp7,261,161,195,171.00 and Rp6,027,002,990,423.00, respectively, with the following details.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
Beban Kegiatan Operasional	777.483.110.565	532.270.436.142	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif	6.152.116.810.980	5.173.574.412.827	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	331.561.273.626	321.158.141.454	*Asset Procurement Expenses*
Jumlah	**7.261.161.195.171**	**6.027.002.990.423**	***Total***

Penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, penyesuaian organisasi serta penyelarasan Tugas dan Fungsi OJK telah ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK) Nomor KEP-7/MS.5/2022 tentang Daftar Standarisasi Program Kerja Dan Akun Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan OJK. Ketentuan ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK tahun 2023. Dalam ketentuan ini terdapat penyederhanaan klasifikasi fungsi Kegiatan Administratif semula berjumlah 7 fungsi menjadi 5 fungsi dengan perubahan yaitu klasifikasi atas Beban Penataan Organisasi dan SDM, Beban Pendidikan dan Pelatihan, Beban Pendukung menjadi satu kelompok Beban Pengembangan Organisasi dan SDM. Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur untuk Beban Perpajakan menjadi Beban Keuangan.

a. Beban Kegiatan Operasional
   Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp777.483.110.565,00 dan Rp532.270.436.142,00 dengan rincian:

The statement of expense classification refers to the provisions related to the standardization of the Financial Services Authority's work program. The Standardized List of Work Programs and Budget Accounts of Work Units is a list of work programs and budget accounts that serve as guidelines for Work Units in preparing and implementing Road Map and Budget Plans (RKA) and OJK financial reporting.

To improve the effectiveness of financial management, organizational adjustments, and alignment of OJK's Duties and Functions, the Decree of the Deputy Commissioner for Information and Financial Systems (DKIK) Number KEP-7/MS.5/2022 concerning Standardized List of Work Programs and Budget Accounts for Work Units within OJK. This provision is a reference in preparing and implementing the Work Plan and Budget (RKA) and OJK's financial reporting in 2023. In this provision, there is a simplification of the classification of the Administrative Activities function from 7 functions to 5 functions with changes, namely the classification of Organizational and HR Development Expenses, Education and Training Expenses, and Support Expenses into one group of Organizational and HR Development Expenses. In addition, there has been a change in nomenclature from Tax Expenses to Financial Expenses.

a. Operating Expenses
   Operating Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp777,483,110,565.00 and Rp532,270,436,142.00, respectively, with details:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Beban Kegiatan Operasional	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Operating Expenses*
Beban Pengaturan	37.257.104.030	26.500.566.539	*Regulatory Expenses*
Beban Pengawasan	111.709.834.548	80.832.719.985	*Supervision Expenses*
Beban Penegakan Hukum	12.248.262.480	7.293.426.214	*Law Enforcement Expenses*
Beban Edukasi dan Perlindungan Konsumen	109.865.579.915	65.621.689.084	*Education and Consumer Protection Expenses*
Beban Manajemen Strategis	365.618.129.020	236.526.469.017	*Strategic Management Expense*
Beban Perizinan	13.962.225.925	11.215.319.385	*Licensing Expenses*
Beban Riset dan Data	45.982.330.153	33.949.514.468	*Research and Data Expenses*
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	8.283.987.827	2.835.127.878	*Internal Audit, Risk Management and Quality Control Expenses*
Beban Pendukung	72.555.656.667	67.495.603.572	*Supporting Expenses*
Jumlah	**777.483.110.565**	**532.270.436.142**	***Total***

b. Beban Kegiatan Administratif
Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.152.116.810.980,00 dan Rp5.173.574.412.827,00 dengan rincian:

b. Administrative Expenses
Administrative Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, amounted to Rp6,152,116,810,980.00 and Rp5,173,574,412,827.00, respectively, with details:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Beban Kegiatan Administratif	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Administrative Expenses*
Beban Remunerasi	3.291.057.329.749	3.138.651.146.009	*Remuneration Expenses*
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	1.352.943.578.011	750.985.644.633	*Long-Term and Post-Employment Benefits Expenses*
Beban Keuangan	827.231.787.381	-	*Financial Expenses*
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	343.770.215.580	-	*Organizational and HR Arrangement Expenses*
Beban Perkantoran	337.113.900.259	224.119.843.218	*Office Expenses*
Beban Perpajakan	-	669.811.112.002	*Tax Expenses*
Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	91.025.235.144	*Education and Training Expenses*
Beban Penataan Organisasi dan SDM	-	15.790.823.762	*Organization and Human Resources Development Expenses*
Beban Pendukung	-	283.190.608.059	*Supporting Expenses*
Jumlah	**6.152.116.810.980**	**5.173.574.412.827**	***Total***

OJK berkomitmen menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK. Beban Subsidi Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.242.838.721,00 masuk dalam kelompok Beban Remunerasi.

OJK memberikan fasilitas Imbalan Prestasi kepada seluruh Pegawai setelah periode penilaian selesai dilakukan. Beban Imbalan Prestasi tahun 2023 belum dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan tahun 2023.

Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti per 31 Desember 2023 sebesar Rp92.569.019.078,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp31.724.427.073,00 dan beban OJK sebesar Rp60.844.592.005,00. Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.013.056.605,00 (lihat Catatan 3.14 Utang Sewa).

Sehubungan dengan penyederhanaan klasifikasi fungsi Kegiatan Administratif, Beban Penataan Organisasi dan SDM serta Beban Pendidikan dan Pelatihan menjadi nihil karena kedua beban tersebut dikelompokkan menjadi satu kelompok yaitu Beban Pengembangan Organisasi dan SDM. Untuk Beban Pendukung menjadi nihil karena bebannya dikelompokkan ke dalam Beban Pengembangan Organisasi dan SDM serta Beban Keuangan. Pengelompokkan Beban Keuangan juga mencakup akun Beban Penyisihan Putang, Beban Penghapusan Piutang dan Beban Setoran Kas Negara.

OJK is committed to bearing the obligation of interest or profit-sharing subsidies as part of the remuneration facility allowance for multipurpose loans and financing utilized by Members of the Board of Commissioners and Employees to the Bank appointed by OJK. Interest Subsidy Expense, amounted to Rp64,242,838,721.00, as of December 31, 2023, was included in the Remuneration Expenses group..

OJK provides Incentives Benefit to all employees following their performance appraisal. Incentive Benefit expense 2023 has not been recorded in the 2023 Financial Statements.

Post-employment Benefits Expense for Defined Contribution as of December 31, 2023, was Rp92,569,019,078.00 comprising employee expenses of Rp31,724,427,073.00 and OJK expenses of Rp60,844,592,005.00. Included in the Office Expenses was the interest expense on office rent as of December 31, 2023, amounted to Rp7,013,056,605.00 (see Note 3.14 Lease Payables).

In the context of simplification of Administrative Activities function simplification, Organizational and HR Expenses and Education and Training Expenses become nil following the incorporation of two expenses into one group, namely Organizational and Human Resource Development Expenses. Supporting Expenses become nil because the expenses are grouped into Organizational and HR Development Expenses and Financial Expenses. The grouping of Financial Expenses also includes Allowance for Bad Debts, Write-off of Receivables, and State Treasury Deposit Expenses.

Demikian juga dengan Beban Perpajakan menjadi nihil karena terdapat perubahan nomenklatur dan diklasifikasikan menjadi Beban Keuangan.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Keuangan terdiri dari Beban Perpajakan, Akrual Beban Penyisihan Putang, Beban Penghapusan Piutang, Beban Setoran Kas Negara.

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset
Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp331.561.273.626,00 dan Rp321.158.141.454,00 dengan rincian:

Likewise, Tax Expenses become nil due to the change in nomenclature and were classified as Financial Expenses.

Details of the Financial Expenses function group consist of Tax Expenses, Accrual of Allowance for Bad Debts, Write-off of Receivables, and State Cash Deposit Expenses.

c. Asset Acquisition Expense
Asset Acquisition Expenses as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp331,561,273,626.00 and Rp321,158,141,454.00, respectively, with details as follows:

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Asset Procurement Expenses*
Beban Penyusutan	277.606.761.143	247.153.090.843	*Depreciation Expenses*
Beban Amortisasi	28.972.786.352	25.441.179.505	*Amortization Expenses*
Beban Persediaan	18.470.184.102	17.419.458.388	*Inventory Expenses*
Beban Kerugian Aset	6.511.542.029	31.144.412.718	*Asset Loss Expenses*
Jumlah	**331.561.273.626**	**321.158.141.454**	***Total***

VIII.3.19 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.292.550.305,00 dan Rp6.385.242.400,00 yang merupakan hibah Tanah dan Aset Tetap Lainnya (BMN) dari Kemenkeu (lihat catatan 3.7 Aset Tetap) dengan rincian sebagai berikut.

VIII.3.19 Other Income/Expense

OJK's Other Income as of December 31, 2023, and December 31, 2022, were Rp140,292,550,305.00 and Rp6,385,242,400.00, respectively, consisting of Land and Other Fixed Assets (BMN) grants from the Ministry of Finance (see note 3.7 Fixed Assets) with details as follows.

(dalam rupiah) / *(In Rupiah)*

No	Keterangan	31 Dec 2023	31 Dec 2022	*Description*
a.	Sistem Aplikasi	49.611.738.008	-	*Application System*
b.	Pengolah Data	45.444.464.228	-	*Data Processor*
c.	Software Aplikasi	31.915.327.104	-	*Peralatan Komunikasi*
d.	Peralatan Komunikasi	12.157.993.090	-	*Communication Equipment*
e.	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.006.416.000	-	*Two-Wheeled Motor Vehicles*
f.	Peralatan Studio	151.800.000	-	*Studio Equipment*
g.	Peralatan Kantor	1.375.000	-	*Office Equipment*
h.	Peralatan Keamanan	3.436.875	-	*Security Equipment*
i.	1 (satu) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	1.950.000.000	*1 (one) land plot from the East Nusa Tenggara Provincial Government*
j.	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Penataan Gedung Kantor OJK) dari Kementerian Keuangan	-	4.435.242.400	*Building and renovation of the office building of the OJK from the Ministry of Finance*
Jumlah		**140.292.550.305**	**6.385.242.400**	***Total***

VIII.3.20 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk
Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp8.040.303.105.562,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp8.040.183.882.162,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari:

VIII.3.20 Details of Statements of Cash Flow

a. Cash Inflow
Cash inflows from OJK Levy Revenues and State Budget Revenues were Rp8,040,303,105,562.00, with details as follows.

1. Total cash inflows from OJK Levy revenues amounted to Rp8,040,183,882,162.00 were the levies received in cash by December 31, 2023, consist of:

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	13.674.036.314	*Receivables from Previous Year*
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	8.026.169.550.566	*Revenue for the Current Year Received*
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	59.020.706	*Prepaid Revenue Received for the Current Year*
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2023	**8.039.902.607.586**	***Subtotal Cash In 2023***
Penerimaan Pengembalian Beban untuk disetor ke Kas Negara	281.274.576	*Repayment of Year Expenses to be Deposited to the State Treasury*
Jumlah	**8.040.183.882.162**	***Total***

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN merupakan penerimaan atas piutang kelebihan pembayaran gaji yaitu sebesar Rp119.223.400,00.

2. The cash inflow from APBN Revenue was the receipt of salary overpayment receivables amounted to Rp119,223,400.00.

b. Arus Kas Keluar
Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

b. Cash Outflow
The Cash Outflow in the Cash Flow Statement recorded operating and investment activities, with details as follows.

(dalam rupiah) *(In Rupiah)*

No	Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi			*Cash Outflow from Operating Activities*
1.	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	6.506.396.724.965	*Payment for operational, administrative, asset procurement, and other supporting activities*
2.	Pembayaran Utang PPh Badan *)	324.143.875.778	*Payment of Corporate Income Tax Payable - administrative activities *)*
3.	Penyetoran ke Kas Negara **)	400.497.976	*Deposit to the State Treasury **)*
	Total	**6.830.941.098.719**	***Total***
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi			*Cash Outflow from Operating Activities*
1.	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	529.790.903.946	*Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets, Assets under Construction, and Right of Use Assets*
	Total	**529.790.903.946**	***Total***
	Jumlah	**7.360.732.002.665**	***Total***

*) Lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak.
**) Lihat Catatan 3.13 Utang Setoran Kas Negara dan termasuk nilai pengembalian beban sebesar Rp281.274.576,00 serta penyetoran kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp119.223.400,00.
*) *See Note 3.13 Tax Payable*
**) *Refer to Note 3.13 on State Treasury Deposit Liabilities, which includes a refund amount of Rp281,274,576.00 and the deposit of excess salary payments sourced from APBN amounting to Rp119,223,400.00.*

VIII.3.21 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Sampai dengan tanggal 25 Januari 2024, pembayaran utang operasional milik Satuan Kerja dengan menggunakan RKA tahun 2024 adalah sebesar Rp94.158.850,00 (lihat Catatan 3.11 Utang Operasional) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	
Utang kepada Pihak Ketiga	54.638.850	
Utang kepada Pegawai	39.520.000	
Jumlah	**94.158.850**	

b. Sampai dengan tanggal 5 April 2024, penerimaan piutang pengembalian beban atas transaksi tahun 2023 adalah sebesar Rp262.504.405,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
c. Sampai dengan tanggal 25 Januari 2024, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp52.051.598.669,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	
PPh Pasal 29 Pegawai Tahun 2023	41.752.853.237	
PPh Pasal 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2023	10.298.445.432	
PPh Pasal 23 Masa Desember 2023	300.000	
Jumlah	**52.051.598.669**	

d. Berdasarkan penerimaan piutang pengembalian beban dan pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan anggaran tahun 2023, realisasi atas RKA tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp7.412.120.598.953,00 atau sebesar 99,14% digunakan untuk membiayai operasional OJK.
e. Pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan pembayaran kewajiban PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2023 sebesar Rp18.669.786.212,00 dengan menggunakan RKA Tahun 2023 (lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak).

VIII.3.21 Information and Subsequent Events of the Financial Reporting Date

a. As of January 25, 2024, the payment for Operating Liabilities of the Work Unit using the RKA for 2024 was Rp94,158,850.00 (see Note 3.11 Operating Payables), with details as follows.

(In Rupiah)

Description	Total	
Third Party Payables	54.638.850	
Employee Payables	39.520.000	
Total	**94.158.850**	

b. As of April 5, 2024, receipts from the refund of expense receivables for 2023 transactions were Rp262,504,405.00 (see Note 3.2.1 Levy Receivable).
c. As of January 25, 2024, the payment of 2023 debt made in 2024 using the 2023 budget was Rp52,051,598,669.00, with details as follows.

(In Rupiah)

Description	Total	
Employee Article 29 Income Tax for 2022	41.752.853.237	
Employee Article 21 Income Tax for December 2023	10.298.445.432	
Employee Article 23 Income Tax for December 2022	300.000	
Total	**52.051.598.669**	

d. Based on the refund receipt of expense receivables and the payment of debt in 2023 made in 2024 using the 2023 budget, the realization of the RKA for fiscal year 2023 was Rp7,412,120,598,953.00 or 99.14% used to finance OJK operations.

e. On April 29, 2024, payment of Income Tax Article 29 of the Fiscal Year 2023 for Rp18,669,786,212.00 was made using the RKA for Fiscal Year 2023 (see Note 3.6.3 Tax Payable).

VIII.3.22 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Pada tahun 2023 dan 2022, OJK telah menghadapi masing-masing 646 dan 480 perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut.

VIII.3.22 Legal Cases Faced by OJK

In 2023 and 2022, OJK faced 646 and 480 cases throughout Indonesia and at various court levels, with details as follows.

Wilayah Kantor	Jumlah | *Total* 31 Dec 2023	*Office Area*
Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten (termasuk Pengadilan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta)	268 perkara | *cases*	*OJK Jabodebek Office and Banten Province (including Courts in the Special Capital Region of Jakarta)*
Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	45 perkara | *cases*	*OJK Central Java Province Office*
Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah	77 perkara | *cases*	*OJK Central Java Province Office*
Kantor OJK Provinsi Jawa Timur	86 perkara | *cases*	*OJK East Java Province Office*
Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara	25 perkara | *cases*	*OJK North Sumatera Province Office*
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	49 perkara | *cases*	*OJK South Sulawesi and West Sulawesi Province Offices*
Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	25 perkara | *cases*	*OJK South Sumatra and Bangka Belitung Province Offices*
Kantor OJK Provinsi Bali	29 perkara | *cases*	*OJK Bali Province Office*
Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan	42 perkara | *cases*	*OJK South Kalimantan Province Office*
Jumlah	**646 perkara | *Cases***	***Total***

Terhadap 646 perkara tersebut, terdapat 355 perkara masih dalam proses hukum di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi oleh OJK tersebut, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis, baik yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

Of the 646 cases, 355 requesting material and immaterial compensation, and those directly affecting the Institution's reputation, are still in legal proceedings at various court levels. Several strategic cases requesting material and immaterial compensation and those directly affecting the Institution's reputation are also involved.

Penyajian rincian perkara hukum tahun 2023 mengacu pada PDK Nomor 8/PDK.02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terkait perubahan nomenklatur dalam penyebutan Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang dimaknai sebagai Kantor OJK.

The presentation of details of legal cases in 2023 refers to PDK Number 8/PDK.02/2023 dated 31 August 2023, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 1/PDK.02/2023, concerning the Organization of the Financial Services Authority, which is related to changes in nomenclature in the mention of Regional Offices and Offices of the Financial Services Authority which are interpreted as OJK Offices.

Sepanjang tahun 2022, OJK telah menghadapi 480 perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut.

Throughout 2022, OJK faced 480 cases throughout Indonesia at various court levels with the following distribution.

Wilayah Kantor	Jumlah | *Total* 31 Dec 2022	*Office Area*
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	185 perkara | *cases*	*Central Office and Regional Office 1 DKI Jakarta & Banten*
Kantor Regional 2 Jawa Barat	25 perkara | *cases*	*Regional Office 2 West Java*
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	68 perkara | *cases*	*Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
Kantor Regional 4 Jawa Timur	57 perkara | *cases*	*Regional Office 4 East Java*
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	27 perkara | *cases*	*Regional Office 5 North Sumatra*
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	31 perkara | *cases*	*Regional Office 6 Sulawesi, Maluku, and Papua*
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	29 perkara | *cases*	*Regional Office 7 South Sumatra*
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	21 perkara | *cases*	*Regional Office 8 Bali and Nusa Tenggara*
Kantor Regional 9 Kalimantan	37 perkara | *cases*	*Regional Office 9 Kalimantan*
Jumlah	**480 perkara | *Cases***	***Total***

VIII.3.23 Informasi Lainnya

OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor $\frac{\text{(MOU-2/(MK.01)/ 2019)/}}{\text{(MOU-6/D.01/2019)}}$ dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $\frac{\text{(PER-33/SJ/2019)/}}{\text{(PRJ-1/MS.3/2019).}}$ Melalui Surat Nomor S-303/D.01/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK akan mengembalikan objek berupa Tanah Lot 1 SCBD kepada Kementerian Keuangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk persiapan Ibu Kota Negara. Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia |dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan penyerahan kembali Barang Milik Negara berupa tanah di Lot 1 SCBD.

VIII.3.23 Other Information

OJK signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Finance regarding the plan to build a building for OJK Headquarters on land owned by the Ministry of Finance located at Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 South Jakarta. The land utilization is based on the Memorandum of Understanding Number $\frac{\text{(MOU-2/(MK.01)/ 2019)/}}{\text{(MOU-6/D.01/2019)}}$ *and Cooperation Agreement (PKS) between the Ministry of Finance and the Financial Services Authority Number* $\frac{\text{(PER-33/SJ/2019)/}}{\text{(PRJ-1/MS.3/2019).}}$ *Through Letter Number S-303/D.01/2022, dated October 13, 2022, the Chairman of the OJK Board of Commissioners stated that OJK would return the object in the form of SCBD Lot 1 Land to the Ministry of Finance in line with the Government's policy for the preparation of the new National Capital City. Furthermore, based on the Joint Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Number NK-1/MK.01/2023 and Number MOU-1/D.01/2023 dated January 20, 2023, concerning the Termination of Cooperation in the Use of State Property of the Ministry of Finance and Minutes of Handover Number BAST-1/MS.82/2023 dated January 20, 2023, State Property in the form of land in Lot 1 SCBD has been handed over.*

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

Lampiran I
Appendix I

Struktur Organisasi Level Atas Otoritas Jasa Keuangan

Organization Structure of the Financial Services Authority

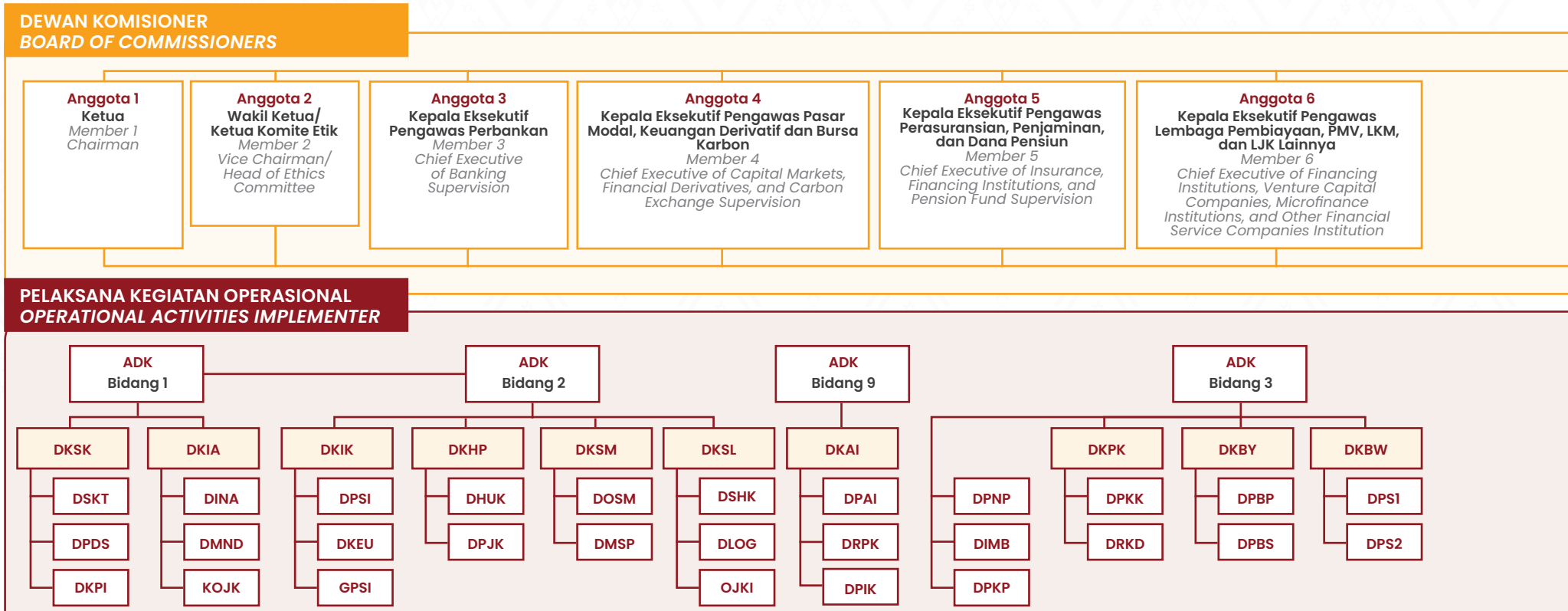

Fungsi Bersama | *Shared Function*

Keterangan | *Explanation*

- ADK (Anggota Dewan Komisioner | *Member of Board of Commissioners)*

- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan *Deputy Commissioner of Financial System Stability)*
- DSKT (Departemen *Surveillance* dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | *Surveillance and Integrated Financial Services Sector Policy Department)*
- DPDS (Departemen Pengelolaan Data dan Statistik | *Data and Statistics Management Department*)
- DKPI (Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi *Integrated Supervision and Licensing Coordination Department*)
- DKIA (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU dan PPT dan Daerah *Deputy Commissioner of International Relations, Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing and Region*)
- DINA (Departemen Internasional dan APU PPT | *International Relations and Anti-money Laundering - Counterterrorism Financing Department*)
- DMMD (Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah *Regional OJK Management and Development Department*)
- KOJK (Kantor OJK | *OJK Office*)

- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan *Commissioner of Information and Financial System*)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi *Information System Management Department*)
- DKEU (Departemen Keuangan | *Finance Department*)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi *Application System Information Development Group*)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan *Deputy Commissioner of Legal and Investigation*)
- DHUK (Departemen Hukum | *Legal Department*)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan *Financial Services Investigation Department*)
- DKSM (Deputi Komisionel SDM dan Manajemen Strategis *Deputy Commissioner of Human Resource and Strategic Management*)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM | *Organization and Human Resources Department*)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan *Strategic and Change Management Department*)
- DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan *Banking Regulation and Development Department*)
- DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan *Licensing and Crisis Management Department*)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan | *Bank Supervision Quality Control Department*)

- DKPK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan *Deputy Commissioner of Financial Conglomerates Supervision*)
- DPKK (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan *Financial Conglomerate Supervision Department*)
- DRKD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah | *Regional Bank Special Examination and Supervision Department*)
- DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah *Deputy Commissioner of Government Banks Supervision*)
- DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah | *Government Bank Department*)
- DPBS (Departemen Perbankan Syariah | *Sharia Banking Department*)
- DKSL (Deputi Komisioner Sekertariat Dewan Komisioner dan Logistik *Deputy Commissioner of Board of Commissioners Secretariat and Logistic*)
- DSHK (Departemen Sekertariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan | *Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department*)
- DLOG (Departemen Logistik | *Logistics Department*)
- OJKI (OJK Institute | *OJK Institute*)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko *Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management*)
- DPAI (Departemen Audit Internal | *Internal Audit Department*)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas *Risk Management and Quality Assurance Department*)
- DPIK (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus *Integrity Enforcement and Special Audit Department*)

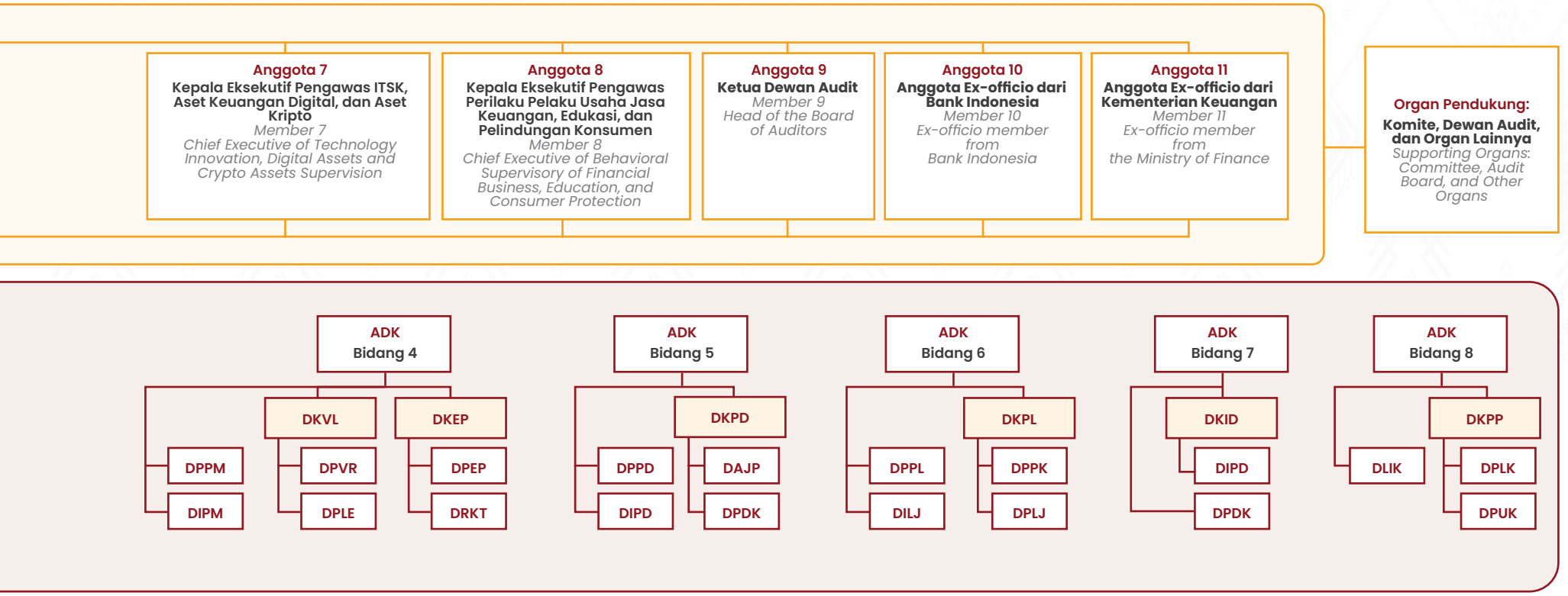

Pengawasan | *Supervision*

- DKBW (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta | *Deputy Commissioner of Private Banks Supervision*)
- DPSI (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 | *Private Bank Supervision Department I*)
- DPS2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 | *Private Bank Supervision Department II*)
- DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal *Capital Market Regulation and Development Department*)
- DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal | *Capital Market Licensing Department*)
- DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek | *Deputy Commissioner of Investment Management of Capital Markets and Securities Institutions Supervision*)
- DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek | *Investment Management and Regional Capital Market Supervision Department*)
- DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek | *Securities Institution Supervision Department*)

- DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus | *Deputy Commissioner of Issuer and Securities Transactions Supervision and Special Audit*)
- DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik *Issuer and Public Companies Supervision Department*)

- DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek | *Special Inspection and Securities Transaction Department*)
- DPPD (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP *Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Funds Regulation and Development Department*)
- DIPD (Departemen Perizinan Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PPDP | *Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Funds Licensing, Special Examination and Quality Control Department*)
- DKPD (Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun *Deputy Commissioner of Insurance and Pension Fund Supervision*)
- DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB *Insurance and Non-Bank Financial Industry Supporting Services Supervision Department*)
- DPDK (Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB | *Pension Fund Supervision and Specialized Supervision of Non-Bank Financial Industry Department*)

- DPPL (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PVML *Financing Institutions, Venture capital, microfinance institutions, and Other Financial Service Institutions Regulation and Development Department*)
- DIPL (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PVML | *Financing Institutions, Venture Capital, Microfinance institutions, and Other Financial Service Institutions Licensing, Special Examination and Quality Control Department*)

- DPKL (Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | *Deputy Commissioner of Financing and Other Financial Service Institutions Supervision*)
- DKPK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan *Deputy Commissioner of Financial Conglomerates Supervision*)
- DPKK (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan *Financial Conglomerate Supervision Department*)
- DRKD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah | *Regional Bank Special Examination and Supervision Department*)
- DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah *Deputy Commissioner of Government Banks Supervision*)
- DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah *Government Bank Department*)

- DLIK (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi *Literacy, Financial Inclusion,and Communication Department*)
- DKPP (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen | *Deputy Commissioner of Behavioral Supervisory of Financial Service Business, and Consumer Protection*)
- DPLK (Departemen Pelindungan Konsumen | *Consumer Protection Department*)
- DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan | *Financial Service Providers Business Conduct Supervision Department*

Lampiran II
Appendix II

Laporan Kontinjensi
I. Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Contigency Report
I. Written-off Receivables

No.	Uraian *Description*	Saldo *Balance* 31 Desember 2021 *31st December 2021* (d) = (a) + (b) – (c)	Penambahan*) *Additions**) (e)	Pengurangan**) *Reduction***) (f)	Saldo *Balance* 31 Desember 2022 *31st December 2022* (g) = (d) + (e) – (f)	Penambahan*) *Additions**) (h)	Pengurangan**) *Reduction***) (i)	Saldo *Balance* 31 Desember 2023 *31st December 2023* (j) = (g) + (h) – (i)
I	Perbankan Banking	1.009.874.446	389.837.910	-	1.399.712.356	440.277.919	521.097	1.839.469.178
a	Bank Perkreditan Rakyat Rural Bank	752.101.591	257.203.510	-	1.009.305.101	430.454.013	465.162	1.439.293.952
b	Profesi Penunjang Perbankan *Banking Support Professions*	183.814.455	-	-	183.814.455	9.823.906	55.935	193.582.426
c	Pihak Lainnya *Other Parties*	73.958.400	132.634.400	-	206.592.800	-	-	206.592.800
II	Pasar Modal	37.242.557.557	12.505.834.039	1.713.760.817	48.034.630.779	6.714.383.791	2.929.425.484	51.819.589.086
a	Emiten *Emiten*	29.966.751.128	4.431.578.285	1.578.141.928	32.820.187.485	5.340.835.696	2.796.520.145	35.364.503.036
b	Pengelolaan Investasi *Investment Management*	7.760.212	6.276.508.770	-	6.284.268.982	477.290.342	95.377.913	6.666.181.411
c	Perusahaan Efek *Securities Companies*	1.410.291.881	1.028.397.984	-	2.438.689.865	166.562.179	184.732	2.605.067.312
d	Perusahaan Publik *Public Company*	6.100.000	14.325.000	-	20.425.000	-	-	20.425.000
e	Lembaga Penunjang Pasar Modal *Capital Market Supporting Institution*	-	-	-	-	-	-	-
f	Profesi Penunjang Pasar Modal *Capital Market Supporting Professional*	5.829.934.336	3.024.000	135.618.889	5.697.339.447	536.695.574	37.342.694	6.196.692.327
g	Ahli Syariah Pasar Modal *Sharia Capital Market Expert*	21.720.000		-	21.720.000	-	-	21.720.000
h	Pihak Lainnya *Other Parties*	-	752.000.000	-	752.000.000	193.000.000	-	945.000.000

No.	Uraian *Description*	Saldo *Balance* 31 Desember 2021 *31st December 2021* (d) = (a) + (b) – (c)	Penambahan*) *Additions*)* (e)	Pengurangan**) *Reduction***) (f)	Saldo *Balance* 31 Desember 2022 *31st December 2022* (g) = (d) + (e) – (f)	Penambahan*) *Additions*)* (h)	Pengurangan**) *Reduction***) (i)	Saldo *Balance* 31 Desember 2023 *31st December 2023* (j) = (g) + (h) – (i)
III	Industri Keuangan Non Bank *Non-Bank Financial Industry*	29.099.226.016	1.178.449.522	23.527.247	30.254.148.291	3.971.990.803	420.416	34.225.718.678
a	Lembaga Pembiayaan *Financing Institution*	3.574.186.792	1.056.806.949	20.000	4.630.973.741	2.761.891.632	88.366	7.392.777.007
b	Lembaga Penunjang IKNB Non-Bank *Financial Institution Supporting Agencies*	4.969.174.893	16.461.249	23.495.166	4.962.140.976	1.090.783.583	164.361	6.052.760.198
c	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya *Other Financial Service Institution*	8.353.311	-	-	8.353.311	14.854.076	-	23.207.387
d	Perasuransian *Insurance*	20.547.511.020	105.181.324	12.081	20.652.680.263	104.461.512	167.689	20.756.974.086
	Total	67.351.658.019	14.074.121.471	1.737.288.064	79.688.491.426	11.126.652.513	2.930.366.997	87.884.776.942

Keterangan | *Notes*:
*) Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet | *The addition Due to Write-Off on Bad Debts Allowance*
**) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN | *The deduction due to reduction of PUPN payments*

II. Piutang Atas Wajib Bayar Yang Tidak Melakukan Registrasi

II. Receivables From Unregistered Payers

(dalam Rupiah)
(In Rupiah)

No.	Bidang *Section*	Wajib Bayar/ *Payers* 2022	Wajib Bayar/ *Payers* 2023	Saldo *Balance*	Penambahan *) *Additions *)*	Pengurangan *) *Deduction *)*	Saldo *Balance* 31 Dec 2022	Penambahan *) *Additions *)*	Pengurangan *) *Deduction *)*	Saldo *Balance* 31 Dec 2023
I	**Perbankan | *Banking***	4	4	45.255.602	-	-	45.255.602	-	-	45.255.602
a	Profesi Penunjang Perbankan *Banking Supporting Professions*	4	4	45.255.602	-	-	45.255.602	-	-	45.255.602
II	**Pasar Modal | *Capital Market***	1.393	1.396	42.402.665.059	5.307.600.000	3.776.284.428	43.933.980.631	5.385.000.000	500.000.000	48.818.980.631
a	Emiten | *Issuer*	-	3	-	-	-	-	3.219.000.000	500.000.000	2.719.000.000
b	Profesi Penunjang Pasar Modal *Capital Market Supporting Professions*	1.364	1.364	9.023.165.059	-	61.784.428	8.961.380.631	-	-	8.961.380.631
c	Pihak Lainnya | *Others*	29	29	33.379.500.000	5.307.600.000	3.714.500.000	34.972.600.000	2.166.000.000	-	37.138.600.000
	Jumlah | *Total*	1.397	1.400	42.447.920.661	5.307.600.000	3.776.284.428	43.979.236.233	5.385.000.000	500.000.000	48.864.236.233

Keterangan | *Notes*:
*) Pengurangan terjadi karena adanya | *The deduction occurs as below:*
1. Registrasi SIPO; | *SIPO registration;*
2. Pengalihan Tagihan; | *Billing transfer;*
3. Penyesuaian Tagihan; | *Billing adjustment;*
4. Pembayaran Piutang | *Payment of receivable.*

Lampiran III
Appendix III

Daftar Aset Tetap yang Hilang

List of the Lost Fixed Assets

(dalam rupiah)

(In Rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe *Brand/Type*	Jumlah Barang *Jumlah Barang/ Total Item*	Harga Perolehan *Acquisition Cost*	*Item*
Tahun Perolehan 2014				**164.167.431**	*Year of Acquisition 2014*
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475	*Notebook*
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475	*Notebook*
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.901	*Notebook*
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000	*Notebook*
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000	*Notebook*
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050	*Camera Digital*
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000	*Notebook*
12	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965	*External Harddisk*
13	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965	*External Harddisk*
14	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000	*Notebook*
Tahun Perolehan 2015				**2.213.330**	*Year of Acquisition 2015*
1	Printer	HP Officejet 100	1 unit	2.213.330	*Printer*
Tahun Perolehan 2017				**20.319.750**	*Year of Acquisition 2017*
1	Notebook	Dell Latitude E5470	1 unit	20.319.750	*Notebook*
Jumlah			**14 unit**	**186.700.511**	*Total*

Daftar Singkatan
Glossary

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : *State Budget*
ADK	: Anggota Dewan Komisioner : *Member of Board Commissioners*
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan : *The Capital Market and Financial Services Supervisory Institution*
BI	: Bank Indonesia : *Bank of Indonesia*
DAPEN	: Dana Pensiun : *The Pension Fund*
DK	: Dewan Komisioner : *Board of commissioner*
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan : *The Pension Fund Financial Institution*
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank : *Non-Financial Service Institution*
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner : *Board of Commissioner Decision*
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner : *Board of Deputy Commissioner Decision*
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner : *Decision of the Board Commissioners Meeting*
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan : *The Deposit Insurance Agency*
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner : *Regulation of the Board Commissioner*
RDK	: Rapat Dewan Komisioner : *The Board of Commissioner Meeting*
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner : *OJK Commissioner Board Circular Letter*
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai : *Employee Welfare Foundation*

2023

Laporan Kinerja OJK Tahun 2023

OJK Perfomance Report 2023

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

Telp : (021) 2960 0000
Fax : (021) 385 8321
Email : humas@ojk.go.id
Website : www.ojk.go.ig